



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**



Nomor : 22.A/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan M. Yamin No. 19 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123**



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**

Nomor : 22.A/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Berau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Berau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Berau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

SA Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak, CSCU, CA, CSFA, ACPA, CFrA, CertDA
Register Negara Akuntan No-45153

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki 45 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-

permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 65 hari yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan interim dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 29 Januari s.d. 3 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/B/ST/DJPN-VI.SMD/PPD.01/01/2026 tanggal 29 Januari 2026; dan
- b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 35 hari mulai tanggal 5 April s.d. 9 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 71/B/ST/DJPN-VI.SMD/PPD.01/04/2026 tanggal 1 April 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI,

SRI JUNIARSIH MAS



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



BUPATI BERAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Redeb, 22 Mei 2026



P



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Jl APT Pranoto No. 01 Telp (0554) 21008, 21071, 21076, Fax 21068

TANJUNG REDEB

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Pemerintah Kabupaten Berau dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.*

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tiap akhir tahun anggaran akan memberikan informasi yang transparan mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sehingga terwujud *Good Governance* yang kita inginkan bersama dalam rangka mewujudkan Masyarakat Kabupaten Berau yang lebih sejahtera.

Tanjung Redeb, 22 Mei 2026

BUPATI,

SRI JUNIARSIH MAS

**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
4	PENDAPATAN	5.1.1	5.367.930.573.905,72	5.071.599.580.232,18	94,48	6.193.996.172.870,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	401.156.435.995,00	525.978.243.343,18	131,12	343.450.025.949,60
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	175.513.778.000,00	144.942.853.267,00	82,58	91.558.760.332,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	120.583.732.356,00	110.313.931.998,96	91,48	18.110.450.696,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	11.997.643.845,00	11.397.496.922,15	95,00	17.986.298.143,26
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	93.061.281.794,00	259.323.961.155,07	278,66	215.794.516.778,34
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		401.156.435.995,00	525.978.243.343,18	131,12	343.450.025.949,60
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	4.949.130.788.110,72	4.519.561.731.619,00	91,32	5.774.506.770.500,00
4.2.01.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4.847.083.601.192,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	4.053.383.565.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	588.991.002.328,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0,00	0,00	0,00	80.364.880.846,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0,00	0,00	0,00	124.344.153.018,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	3.252.374.465.265,72	2.966.189.771.800,00	91,20	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	513.054.929.000,00	559.545.218.013,00	109,06	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.3	153.873.858.000,00	138.199.011.485,00	89,81	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		3.919.303.252.265,72	3.663.934.001.298,00	93,48	4.847.083.601.192,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36	95.468.642.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	100,00	16.869.131.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		108.529.946.000,00	90.623.229.844,00	83,50	112.337.773.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,04	815.085.396.308,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22	459.125.396.308,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00	355.960.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,04	815.085.396.308,00
	Total Pendapatan Transfer		4.949.130.788.110,72	4.519.561.731.619,00	91,32	5.774.506.770.500,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70	76.039.376.420,69
	JUMLAH PENDAPATAN		5.367.930.573.905,72	5.071.599.580.232,18	94,48	6.193.996.172.870,29
5	BELANJA	5.1.2	6.041.361.617.000,00	5.472.389.282.534,18	90,58	6.411.776.301.938,05
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.458.375.030.613,47	2.053.960.067.042,93	83,55	2.111.530.856.755,59
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.240.784.884.524,50	1.036.493.514.973,00	83,54	1.038.160.066.708,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.041.220.505.794,97	854.413.659.354,62	82,06	868.596.837.598,25
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	166.224.640.294,00	153.051.392.715,31	92,08	189.599.952.449,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,59	15.174.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi		2.458.375.030.613,47	2.053.960.067.042,93	83,55	2.111.530.856.755,59
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100	7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07	1.352.415.463,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,65	259.968.567.330,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	360.389.632.338,48	336.504.709.092,25	93,37	472.685.076.375,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	2.432.439.129.612,00	2.354.928.778.730,00	96,81	3.081.747.295.756,45
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,84	8.338.136.101,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25	4.676.717.909,00
	Jumlah Belanja Modal		3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96	3.828.768.208.935,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63	5.774.799.583,00
5.4	TRANSFER	5.1.2.4	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1	9.855.000.000,00	9.789.254.000,00	99,33	9.538.723.000,00
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1	1.250.000.000,00	1.241.379.000,00	99,31	1.485.284.000,00
5.4.02.05	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.2	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94	454.678.429.664,00
	Jumlah Transfer		463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02	465.702.436.664,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		6.041.361.617.000,00	5.472.389.282.534,18	90,58	6.411.776.301.938,05
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(673.431.043.094,28)	(400.789.702.302,00)	59,51	(217.780.129.067,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	891.211.172.162,04
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
	Jumlah Penerimaan		673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	893.211.172.162,04
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00	891.211.172.162,04
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0,00	272.644.534.292,08	0,00	673.431.043.094,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



(Handwritten signature/initials)



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
(LPSAL)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	673.431.043.094,28	893.211.172.162,04
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	673.434.236.594,08	893.211.172.162,04
SUBTOTAL (1-2)		(3.193.499,80)	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA)	5.2.3	272.644.534.292,08	673.431.043.094,28
SUBTOTAL (3+4)		272.641.340.792,28	673.431.043.094,28
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	3.193.499,80	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.2.5	272.644.534.292,08	673.431.043.094,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



A



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

NERACA

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	265.205.595.916,35	644.036.295.948,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	0,00	33.906.867,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	65.628.500,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	3.418.169.467,57	24.859.854.694,32
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	1.015.510.076,16	742.867.460,16
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	0,00	404.086.306,76
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	5.517.148.806,00	3.311.977.785,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	46.396.218.124,41	45.578.464.831,41
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	17.442.211.893,97	4.807.662.932,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	0,00
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	15.075.852.141,15	30.728.060.808,80
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	226.167.000,00	81.333.530.845,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(50.507.779.130,51)	(48.053.411.608,77)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	564.241.353,31	363.442.949,18
Persediaan	5.3.1.1.5	302.466.444.588,69	273.248.242.463,84
Jumlah Aset Lancar		606.819.780.237,10	1.061.460.610.782,74
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	557.916.107.080,51	596.513.621.017,22
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		557.916.107.080,51	596.513.621.017,22
Jumlah Investasi Jangka Panjang		557.916.107.080,51	596.513.621.017,22
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	1.083.193.249.915,83	1.072.297.219.600,83
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.633.057.034.429,78	1.370.551.524.477,78
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.839.476.170.013,43	2.370.435.810.216,46
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	14.306.736.778.991,45	11.880.709.415.429,90
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	109.529.404.810,00	95.663.258.267,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	623.194.354.588,52	886.641.620.568,26
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(7.644.179.861.099,37)	(5.540.826.811.023,30)
Jumlah Aset Tetap		12.951.007.131.649,64	12.135.472.037.536,93
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	(100.726.871.175,00)	(93.397.226.531,00)
Jumlah Properti Investasi		268.922.205.610,00	276.251.850.254,00

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	1.040.486.224,10	615.165.937,12
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	4.051.225.357,06	4.773.546.921,80
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	81.125.270.300,00	56.236.812.306,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	783.704.689.770,13	775.825.834.590,86
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(37.909.758.366,88)	(29.922.257.419,24)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(224.631.356.463,16)	(219.834.433.579,33)
Jumlah Aset Lainnya		607.380.556.821,25	587.694.668.757,21
JUMLAH ASET		14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	2.510.442.459,00	22.126.952,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	1.447.515,00	1.447.515,00
Utang Belanja	5.3.2.3	39.825.511.645,12	12.212.185.939,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	375.828.068,88	33.143.011.054,49
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.713.229.688,00	45.378.771.461,24
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		42.713.229.688,00	45.378.771.461,24
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Handwritten signature or mark in blue ink.



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**LAPORAN OPERASIONAL
(LO)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
7	PENDAPATAN	5.4.1				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	145.064.087.443,00	92.949.213.837,00	52.114.873.606,00	56,07
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	109.992.335.412,96	19.045.230.067,00	90.947.105.345,96	477,53
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	17.278.359.856,65	38.077.899.738,26	(20.799.539.881,61)	(54,62)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	254.570.801.865,48	218.937.415.392,58	35.633.386.472,90	16,28
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		526.905.584.578,09	369.009.759.034,84	157.895.825.543,25	42,79
7.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
7.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
7.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1	2.966.189.771.800,00	3.470.473.547.000,00	(504.283.775.200,00)	(14,53)
7.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00	(29.445.784.315,00)	(5,00)
7.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1	138.199.011.485,00	204.709.033.864,00	(66.510.022.379,00)	(32,49)
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		3.663.934.001.298,00	4.264.173.583.192,00	(600.239.581.894,00)	(14,08)
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
7.2.01.03	Dana Otinomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.04	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.05	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
7.2.02	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3				
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	346.297.136.632,00	479.368.348.308,00	(133.071.211.676,00)	(27,76)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		683.897.136.632,00	835.328.348.308,00	(151.431.211.676,00)	(18,13)
	Jumlah Pendapatan Transfer		4.354.830.427.930,00	5.116.371.062.500,00	(761.540.634.570,00)	(14,88)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
7.3.01	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	80.587.787.243,00	6.076.320.302,00	74.511.466.941,00	1.226,26
7.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	26.059.605.270,00	28.626.340.880,69	(2.566.735.610,69)	(8,97)
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan yang Sah		106.647.392.513,00	34.702.661.182,69	71.944.731.330,31	207,32
	JUMLAH PENDAPATAN		4.988.383.405.021,09	5.520.083.482.717,53	(531.700.077.696,44)	(9,63)
8	BEBAN	5.4.2				
8.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.040.657.020.722,36	1.041.266.704.121,13	(609.683.398,77)	(0,06)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	909.802.598.151,67	857.982.324.607,43	51.820.273.544,24	6,04
8.1.03	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.04	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.1.3	153.051.471.936,36	114.803.338.322,00	38.248.133.614,36	33,32
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	2.454.367.521,74	293.512.532,82	2.160.854.988,92	736,21
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	1.156.009.173.810,60	721.874.870.801,94	434.134.303.008,66	60,14
8.1.09	Beban Lain-lain	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI		3.271.976.132.142,73	2.751.394.750.385,32	520.581.381.757,41	18,92

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
8.3	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06
8.3.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	5.4.2.2.1	9.789.254.000,00	9.538.723.000,00	250.531.000,00	2,63
8.3.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.1	1.241.379.000,00	1.485.284.000,00	(243.905.000,00)	(16,42)
8.3.02	Beban Keuangan Lainnya	5.4.2.2.2	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)
8.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.2	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		361.916.653.344,00	370.233.794.664,00	(8.317.141.320,00)	(2,25)
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.2.3				
8.2.01	Beban Tak Terduga		5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
	JUMLAH BEBAN	5.4.2.4	3.639.754.285.486,73	3.127.403.344.632,32	512.350.940.854,41	16,38
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		1.348.629.119.534,36	2.392.680.138.085,21	(1.044.051.018.550,85)	(43,64)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
	SURPLUS NON OPERASIONAL					
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL					
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3	31.960.309.524,49	25.856.844.781,32	6.103.464.743,17	23,60
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL		31.960.309.524,49	25.856.844.781,32	6.103.464.743,17	23,60
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(31.960.309.524,49)	(25.856.844.781,32)	(6.103.464.743,17)	23,60
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.4	1.316.668.810.009,87	2.366.823.293.303,89	(1.050.154.483.294,02)	(44,37)
	POS LUAR BIASA	5.4.5				
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa			0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.7	1.316.668.810.009,87	2.366.823.293.303,89	(1.050.154.483.294,02)	(44,37)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**LAPORAN ARUS KAS
(LAK)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	144.942.853.267,00	91.558.760.332,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	110.313.931.998,96	18.110.450.696,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	11.397.496.922,15	17.986.298.143,26
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	259.152.425.304,07	214.149.979.161,46
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.5	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.5	138.199.011.485,00	204.709.033.864,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.6	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.6	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5.5.1.1.7	427.404.500.477,00	459.125.396.308,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.7	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Darurat		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	26.059.605.270,00	76.039.376.420,69
Jumlah Arus Kas Masuk		5.071.428.044.381,18	6.192.351.635.253,41
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	1.036.493.514.973,00	1.038.160.066.708,34
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	854.413.659.354,62	868.596.837.598,25
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.3	153.051.392.715,31	189.599.952.449,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.5	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00
Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2.6	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.505.362.160.230,93	2.583.008.093.002,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		2.566.065.884.150,25	3.609.343.542.250,82
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.1	171.535.851,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	0,00	1.431.875.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	0,00	212.662.616,88
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Laiian yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		171.535.851,00	1.644.537.616,88
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	6.937.492.376,00	1.352.415.463,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	252.680.070.744,00	259.968.567.330,29
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	336.504.620.292,25	472.685.076.375,72
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	2.354.928.867.530,00	3.081.747.295.756,45

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	13.974.090.596,00	8.338.136.101,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	2.001.980.765,00	4.676.717.909,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.7	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.967.027.122.303,25	3.830.768.208.935,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(2.966.855.586.452,25)	(3.829.123.671.318,58)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	428.551.100.157,00	491.827.584.194,00
Koreksi	5.5.4.1.4	3.193.499,80	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		428.554.293.656,80	491.827.584.194,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	426.062.784.650,00	491.841.293.362,00
Jumlah Arus Keluar Kas		426.062.784.650,00	491.841.293.362,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.491.509.006,80	(13.709.168,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(398.298.193.295,20)	(219.793.838.235,76)
Saldo Awal Kas	5.5.6	673.454.617.561,28	893.248.455.797,04
Saldo Akhir Kas	5.5.7	275.156.424.266,08	673.454.617.561,28

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



P



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	1.316.668.810.009,87	2.366.823.293.303,89
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas		(979.350.275.186,23)	(588.146.618.017,53)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



A



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	10
2.1 Ekonomi Makro.....	10
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	21
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	29
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum.....	29
3.2. <i>Mandatory Spending</i>	41
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	46
4.1. Entitas Pelaporan.....	46
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	46
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	46
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	46
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	111
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA).....	111
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	217
5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca.....	218
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	278
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK).....	317
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	329
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	335
BAB VII PENUTUP	338



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau	11
Tabel 2.2	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau.....	11
Tabel 2.3	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau	11
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau.....	12
Tabel 2.5	<i>Gini Ratio</i> Kabupaten Berau	13
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau.....	13
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau	15
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional.....	15
Tabel 2.9	Data Informasi Terkait Penurunan <i>Stunting</i>	16
Tabel 2.10	Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025	19
Tabel 3.1	Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 3.2	Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025	32
Tabel 3.3	Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	34
Tabel 3.4	Rekap Alokasi Anggaran <i>Mandatory Spending</i> Tahun 2025	42
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2025	42
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2025	43
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum	43
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2025.....	45
Tabel 4.1	Penggolongan Kualitas Piutang Pajak	64
Tabel 4.2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	64
Tabel 4.3	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan	74
Tabel 4.4	Masa Manfaat Aset Tetap	78
Tabel 4.5	Neraca dengan Properti Investasi.....	95
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	112
Tabel 5.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	112
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	113
Tabel 5.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	114



Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	115
Tabel 5.6	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	116
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	120
Tabel 5.8	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	121
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	126
Tabel 5.10	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	134
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	127
Tabel 5.12	Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	127
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	130
Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	131
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	133
Tabel 5.16	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	133
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025	134
Tabel 5.18	Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	134
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025	137
Tabel 5.20	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	138
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025	139
Tabel 5.22	Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	140
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025	141
Tabel 5.24	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	141

P



Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	141
Tabel 5.26	Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024	141
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025...	141
Tabel 5.28	Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	143
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025.....	143
Tabel 5.30	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024	144
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025	144
Tabel 5.32	Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	145
Tabel 5.33	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025	145
Tabel 5.34	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	146
Tabel 5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	146
Tabel 5.36	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	147
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	148
Tabel 5.38	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	149
Tabel 5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024	150
Tabel 5.40	Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024	150
Tabel 5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2025	151
Tabel 5.42	Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	153
Tabel 5.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025..	155
Tabel 5.44	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	167
Tabel 5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per SKPD Tahun Anggaran 2025..	181
Tabel 5.46	Realisasi Belanja Hibah per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024..	182
Tabel 5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2025	183
Tabel 5.48	Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024	183

P



Tabel 5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	183
Tabel 5.50	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	184
Tabel 5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025....	185
Tabel 5.52	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	186
Tabel 5.53	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025	186
Tabel 5.54	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024	192
Tabel 5.55	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025	200
Tabel 5.56	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	202
Tabel 5.57	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025	204
Tabel 5.58	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	205
Tabel 5.59	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025	207
Tabel 5.60	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	208
Tabel 5.61	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025	210
Tabel 5.62	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.	210
Tabel 5.63	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	211
Tabel 5.64	Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	211
Tabel 5.65	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025	212
Tabel 5.66	Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	212
Tabel 5.67	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025	213
Tabel 5.68	Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024	214
Tabel 5.69	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025	214
Tabel 5.70	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024...	215
Tabel 5.71	Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025	215



Tabel 5.72	Realisasi <i>Surplus/Defisit</i> Tahun Anggaran 2025 dan 2024	215
Tabel 5.73	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	216
Tabel 5.74	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	216
Tabel 5.75	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	217
Tabel 5.76	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	217
Tabel 5.77	Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	219
Tabel 5.78	Nilai Aset Tahun Anggaran 2025 dan 2024	219
Tabel 5.79	Aset Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	219
Tabel 5.80	Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024	220
Tabel 5.81	Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	221
Tabel 5.82	Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	221
Tabel 5.83	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Forest Carbon Partnership Facility Tahun Anggaran 2025	223
Tabel 5.84	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024	224
Tabel 5.85	Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	224
Tabel 5.86	Rekening Kas di Bendahara BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	225
Tabel 5.87	Rekening Kas di Bendahara FKTP Tahun Anggaran 2025 dan 2024	226
Tabel 5.88	Rekening Kas di Bendahara BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024	226
Tabel 5.89	Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	227
Tabel 5.90	Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025	227
Tabel 5.91	Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	228
Tabel 5.92	Piutang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	229
Tabel 5.93	Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	230
Tabel 5.94	Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	230
Tabel 5.95	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2024	231
Tabel 5.96	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ...	232
Tabel 5.97	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Menurut SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	232
Tabel 5.98	Piutang Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	233
Tabel 5.99	Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	233
Tabel 5.100	Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	234



Tabel 5.101	Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur	234
Tabel 5.102	Beban Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2025 dan 2024	236
Tabel 5.103	Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	337
Tabel 5.104	Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	238
Tabel 5.105	Investasi Jangka Panjang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	240
Tabel 5.106	Investasi Non Permanen Tahun Anggaran 2025 dan 2024	241
Tabel 5.107	Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	242
Tabel 5.108	Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	246
Tabel 5.109	Rincian Mutasi Aset.....	246
Tabel 5.110	Nilai Buku Aset Tetap	253
Tabel 5.111	Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	254
Tabel 5.112	Properti Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	254
Tabel 5.113	Akumulasi Properti Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	255
Tabel 5.114	Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	256
Tabel 5.115	Tagihan Jangka Panjang Tahun Anggaran 2025 dan 2024	256
Tabel 5.116	Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2025 dan 2024	256
Tabel 5.117	Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per 31 Desember 2025 ..	253
Tabel 5.118	Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dan 2024	257
Tabel 5.119	Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dan 2024	259
Tabel 5.120	Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2025 dan 2024	259
Tabel 5.121	Amortisasi Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	262
Tabel 5.122	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	263
Tabel 5.123	Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan 2024	265
Tabel 5.124	Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	265
Tabel 5.125	Kewajiban Pihak Ketiga	266
Tabel 5.126	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2025 dan 2024	268
Tabel 5.127	Utang Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	269
Tabel 5.128	Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2025 dan 2024	269
Tabel 5.129	Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 dan 2024	270
Tabel 5.130	Utang Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	271
Tabel 5.131	Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	274
Tabel 5.132	Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	274
Tabel 5.133	Rincian Utang JPL	275
Tabel 5.134	Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	278



Tabel 5.135	Realisasi Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	278
Tabel 5.136	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	279
Tabel 5.137	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	279
Tabel 5.138	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024..	281
Tabel 5.139	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	282
Tabel 5.140	Lain – lain PAD Yang Sah - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	283
Tabel 5.141	Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	283
Tabel 5.142	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	284
Tabel 5.143	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	284
Tabel 5.144	Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	285
Tabel 5.145	Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	285
Tabel 5.146	Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
Tabel 5.147	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	286
Tabel 5.148	Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	287
Tabel 5.149	Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	287
Tabel 5.150	Beban – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	288
Tabel 5.151	Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	288
Tabel 5.152	Beban Pegawai – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	289
Tabel 5.153	Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
Tabel 5.154	Beban Barang - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	291
Tabel 5.155	Beban Jasa – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	294
Tabel 5.156	Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	295
Tabel 5.157	Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	295
Tabel 5.158	Beban Barang dan Jasa Lainnya - L Tahun Anggaran 2025 dan 2024	296
Tabel 5.159	Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	304
Tabel 5.160	Beban Bantuan Sosial - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	305
Tabel 5.161	Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	305
Tabel 5.162	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	306
Tabel 5.163	Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	307
Tabel 5.164	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	308

P



Tabel 5.165	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	310
Tabel 5.166	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	311
Tabel 5.167	Beban Penyusutan Properti Investasi - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	311
Tabel 5.168	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	312
Tabel 5.169	Beban Lain - Lain – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	313
Tabel 5.170	Beban Transfer - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	313
Tabel 5.171	Beban Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	313
Tabel 5.172	Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	314
Tabel 5.173	Beban Tidak Terduga – LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	314
Tabel 5.174	Beban Keseluruhan Per SKPD-LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024	315
Tabel 5.175	Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2025 dan 2024	317
Tabel 5.176	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	318
Tabel 5.177	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	318
Tabel 5.178	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	319
Tabel 5.179	Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	319
Tabel 5.180	Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	320
Tabel 5.181	Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	320
Tabel 5.182	Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	321
Tabel 5.183	Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	321
Tabel 5.184	Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024	321
Tabel 5.185	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	322
Tabel 5.186	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	323
Tabel 5.187	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	324
Tabel 5.188	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	324

P



Tabel 5.189	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	326
Tabel 5.190	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	327
Tabel 5.191	Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024	328
Tabel 5.192	Kenaikan dan Penurunan Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	328
Tabel 5.193	Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024	328
Tabel 5.194	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024	329
Tabel 5.195	Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	330

P



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025	34
Gambar 3.2	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 (dalam %).....	35
Gambar 3.3	Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan Tahun 2024	35
Gambar 3.4	Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan 2024	37
Gambar 3.5	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	38
Gambar 3.6	Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	39
Gambar 3.7	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024	40
Gambar 3.8	Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024	40
Gambar 3.9	Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	41
Gambar 5.1	Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	112
Gambar 5.2	Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	113
Gambar 5.3	Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025	114
Gambar 5.4	Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024	114
Gambar 5.5	Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025	132
Gambar 5.6	Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	132
Gambar 5.7	Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	146
Gambar 5.8	Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah TA 2025	147
Gambar 5.9	Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025.....	148
Gambar 5.10	Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	149
Gambar 5.11	Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025.....	150
Gambar 5.12	Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	151



Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	184
Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	185
Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025	212
Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	213

P



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 2 Rekapitulasi Bankeu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi Bankeu ADK, PKK, LPMK, KTK, RTK
- Lampiran 4 Rincian Belanja BLUD
- Lampiran 5 Rekapitulasi Rincian Belanja Hibah 2025
- Lampiran 6 Rincian Piutang Retribusi RSUD Abdul Rivai
- Lampiran 7 Rekapitulasi Retribusi Piutang Pasar Sanggam Adjudilayas
- Lampiran 8 Daftar Obat / Alkes / BMHP Rusak / Kadaluarsa RSUD dr.Abdul Rivai Tanjung Redeb Tahun 2025
- Lampiran 9 Laporan Perumdam Batiwakkal Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025
- Lampiran 10 Laporan Auditor Independen PT Hutan Sanggam Berau Tahun yang berakhir 31 Desember 2025
- Lampiran 11 Laporan Keuangan PT Indo Pusaka Berau Per 31 Desember 2025
- Lampiran 12 Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja Per 31 Desember 2025
- Lampiran 13 Rincian JJI yang dimanfaatkan Perumdam Batiwakkal Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2025 dan 2024
- Lampiran 14 Properti Investasi SKPD dan Akumulasi Penyusutan
- Lampiran 15 Rincian kurang volume atas denda pekerjaan pihak ketiga
- Lampiran 16 Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud
- Lampiran 17 Rincian Utang Belanja yang belum direviu oleh Inspektorat

P



DAFTAR SINGKATAN

A	
ADD	: Alokasi Dana Desa
Admnduk	: Administrasi Kependudukan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
B	
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BAPELITBANG	: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
BARJAS	: Barang dan Jasa
BAS	: Bagan Akun Standar
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKPP	: Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan
BKS	: Bangun, Kelola, Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BLK	: Balai Latihan Kerja
BMD	: Barang Milik Daerah
BNI	: Bank Negara Indonesia
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BOKB	: Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOKKB	: Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana
BOP PAUD	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	: Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD Kaltimara	: Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Utara
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
C	
CaLK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
Covid 19	: Corona Viruses Disease 19
D	
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAK-DBH	: Dana Alokasi Khusus-Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil

[Handwritten signature]



DED	: Detail Engineer Design
DID	: Dana Insentif Daerah
DISPORA	: Dinas Pemuda dan Olahraga
DINAS PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISDUKCAPIL	: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informasi
DPMPK	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DTU	: Dana Transfer Umum
F	
FASOS	: Fasilitas Sosial
FASUM	: Fasilitas Umum
FIFO	: First In First Out
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G	
Gn.	: Gunung
H	
HSL	: Harapan Lama Sekolah
I	
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
IMTA	: Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
J	
JAMKESMAS	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
K	
Kaltimara	: Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
KB	: Keluarga Berencana
KDP	: Kontruksi Dalam Pengerjaan
KDH	: Kepala Daerah
Kec.	: Kecamatan
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	: Kartu Inventaris Barang
Koperindag	: Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
KORPRI	: Korps. Pegawai Republik Indonesia
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
L	
L/C	: <i>Letter Of Credit</i>
LAK	: Laporan Arus Kas
Linmas	: Perlindungan Masyarakat
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangann Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas

P



LP SAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LS	: Langsung
N	
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
O	
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P	
P3D	: Personel, Pendanaan, Sarana, Prasarana Serta Dokumen
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PARPOL	: Partai Politik
PBB	: Pajak Bumi Bangunan
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDH	: Pakaian Dinas Harian
PDL	: Pakaian Dinas Lapangan
PDU	: Pakaian Dinas Upacara
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Perbub	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	: Peraturan Presiden
PERUMDA	: Perusahaan Umum Daerah
PERUMDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PFK	: Pinjaman Pihak Ketiga
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PPh	: Pajak Penghasilan
PK2UKM	: Rekrutmen Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PKM	: Puskesmas
PMD	: Penyertaan Modal Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSH	: Pakaian Sipil Harian
PSR	: Pakaian Sipil Resmi
PSL	: Pakaian Sipil Lengkap
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PT	: Perseroan Terbatas
P3D	: Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

A



R	
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
S	
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SETWAN	: Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah
SILPA	: Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPT	: Surat Keterangan Penguasaan Tanah
SKPKD	: Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKTJM	: Surat Keterangan Tanjung Jawab Mutlak
SLTP	: Sekolah Lanjutan tingkat Pertama
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D - LS	: Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D - TU	: Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
	:
	:
T	
TA	: Tahun Anggaran
TASPEN	: Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TKD	: Transfer Ke Daerah
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
TU	: Tambah Uang
	:
U	
UKM	: Usaha Kecil Menengah
W	
WKDH	: Wakil Kepala Daerah
WP	: Wajib Pajak

P



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu wajib disusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit Pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Berau sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas sumber daya; dan
- h. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, Transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

P



1.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6914);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan



kebijakan pembiayaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

P



- a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

P



- l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);
- o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 7);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 6);
- s. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau (Kebijakan Akuntansi Nomor 11 “Beban” dan Kebijakan Akuntansi Nomor 12 “Akuntansi Aset”);
- t. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 21);
- u. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53); dan
- v. Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 33).

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.



BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)
 - 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.6 Inflasi
 - 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau
 - 2.1.8 Penanganan Stunting
 - 2.1.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
 - 2.2.3 Program Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.4 Kebijakan Pembiayaan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum
 - 3.1.1 Pendapatan Daerah
 - 3.1.2 Belanja Daerah
 - 3.1.3 Belanja Transfer

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
 - 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
 - 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban



- 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
- 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
 - 4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
 - 4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap
 - 4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
 - 4.4.11.4 Dana Cadangan
 - 4.4.11.5 Aset Lainnya
- 4.4.12 Akuntansi Kewajiban
- 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja Daerah
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus / Defisit
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan – LO
 - 5.4.2 Beban - LO
 - 5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
 - 5.4.5 Surplus/Defisit – LO
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Invenstasi



- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
- 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5. Kenaikan / Penurunan Kas
- 5.5.6. Saldo Awal Kas
- 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus / Defisit – LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili
- 6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
- 6.3. Struktur Organisasi

BAB VII Penutup



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan senilai 4,44 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 4,40 persen
- c. Gini Ratio senilai 0,294
- d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 77,72
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 2,48 persen
- f. Tingkat Inflasi senilai 2,82 persen
- g. Penanganan Stunting
- h. Struktur Perekonomian Kabupaten Berau dalam PDRB senilai Rp51.306,61 (miliar).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu.

Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari Pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau (%)	5,88	5,65	5,54	5,08	4,44
2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau (ribu jiwa)	13,62	13,31	13,26	12,35	10,96
3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,54	6,31	6,11	5,78	5,17
4	Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	9,03	8,47
5	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	3	4	4	4	4
6	Peringkat pada tingkat Nasional	90	93	73	73	73

Sumber : BPS Kabupaten Berau dan BPS Kaltim

Persentase penduduk miskin Kabupaten Berau Tahun 2025 4,44% mengalami penurunan 0,64 dari Tahun 2024 5,08%. Selanjutnya angka ini diharapkan dapat berkurang pada Tahun 2026. Jika dibandingkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Berau masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Meskipun demikian, dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. 2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau	0,95	0,98	0,16	0,41	0,55
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	1,22	0,99	0,77	0,80	0,88
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,59	1,53	1,46	1,37
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	3	4	4	3	3*
5	Peringkat pada tingkat Nasional	139	157	194	157	157

Sumber : BPS Kabupaten Berau

* diurutkan dari indeks kedalaman kemiskinan yang nilainya paling rendah

Tabel 2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau	0,20	0,22	0,01	0,07	0,11
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,29	0,23	0,14	0,15	0,22
3	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38	0,35	0,32
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur	3	4	4	3	3*
5	Peringkat pada tingkat Nasional	136	166	120	125	130

Sumber : BPS Kabupaten Berau

* diurutkan dari indeks keparahan kemiskinan yang nilainya paling rendah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i)



mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah senilai 4,40%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau (%)	5,82	5,02	4,95	5,15	4,40
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,83	5,71	5,31	5,14	5,18
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85
4	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	5	5	3*

Sumber : BPS Kabupaten Berau

* diurutkan dari tingkat pengangguran terbuka yang nilainya paling rendah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 4,40 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah senilai 5,82 persen atau berkurang dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur, TPT Kabupaten Berau baik pada Tahun 2021 sampai Tahun 2025 memiliki angka yang lebih kecil. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, TPT Kabupaten Berau baik Tahun 2021 maupun 2025 juga masih dibawah dibandingkan TPT Indonesia.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau gini ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

P



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian *gini ratio* Kabupaten Berau dapat dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Gini Ratio Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	<i>Gini Ratio</i> Kabupaten Berau	0,377	0,352	0,327	0,317	0,294
2	<i>Gini Ratio</i> Provinsi Kalimantan Timur	0,334	0,327	0,322	0,321	0,321
3	<i>Gini Ratio</i> Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379	0,375

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Berau yang diukur melalui *gini ratio* adalah senilai 0,294. Angka ini naik jika dibandingkan dengan *gini ratio* selama 5 Tahun terakhir yakni Tahun 2021 yang senilai 0,377. Pada Tahun 2021, *gini ratio* Kabupaten Berau lebih tinggi dibandingkan *gini ratio* Provinsi Kalimantan Timur dan pada Tahun 2025 Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* juga lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, jika dibandingkan angka *gini ratio* nasional, Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* yang lebih rendah baik pada Tahun 2021 hingga Tahun 2025.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah senilai 77,72 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau	75,69	76,24	76,71	77,17	77,72
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur	76,6	77,36	78,2	78,79	79,93
3	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,9



No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4	Peringkat pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	4	4	4	4	4*
5	Peringkat pada Tingkat Nasional*	94	92	101	101	101

Sumber : BPS Kabupaten Berau

* diurutkan dari IPM yang nilainya paling tinggi

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau pada Tahun 2025 adalah senilai 77,72 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2021 yang senilai 75,69. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tujuh tahun dimasa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pada Tahun 2025, besarnya IPM Kabupaten Berau mencapai 77,72. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Berau telah memasuki pembangunan manusia dengan status “tinggi” yang ditunjukkan oleh nilai IPM yang diatas 70. Indikator IPM ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin baiknya akses masyarakat terhadap memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin meningkat walaupun di beberapa kecamatan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Namun hal ini tidak lantas membuat Kabupaten Berau berbangga diri, harus tetap meningkatkan pembangunan yang ada.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

P



Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau

No	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB atas dasar harga konstan 2010 (Miliar Rp)	28.802.649,7 miliar	29.940.780,5 miliar	31.570,05 miliar	33.868,49 miliar	34.707,40 miliar	889,07 triliun	23.821 triliun
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,36	3,95	5,44	7,28	2,48	4,53	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan 2025, perekonomian Kabupaten Berau mengalami fluktuasi peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Adapun besaran pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2021 sampai 2025 adalah 1,48 persen. Selama kurun waktu tersebut, besar rata-rata pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya adalah senilai 4,90% sedangkan untuk skala provinsi pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi 4,53% dan untuk skala nasional senilai 5,11%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, tingkat inflasi Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai 2,82 persen ,Provinsi Kalimantan Timur senilai 2,68 persen serta inflasi nasional senilai 2,92 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Inflasi Kabupaten Berau	-	-	-	2,69	2,82
2	Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	2,15	5,35	3,46	1,47	2,68
3	Inflasi Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur



2.1.7. Penanganan Stunting

Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 ditekankan memiliki komitmen kuat untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting yang ada, ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di daerah. Data informasi realisasi Laporan Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 9 Data Informasi Laporan Tematik Terkait Penurunan Stunting

NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	8.629.839.342,20	6.670.375.844,71	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	21.918.595.834,21	18.915.781.700,11	Dinas Kesehatan
3	1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Kampung Bugis	1.394.982.059,70	912.474.365,08	Puskesmas Kampung Bugis
4	1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Tanjung Redeb	1.648.357.073,25	1.327.236.400,07	Puskesmas Tanjung Redeb
5	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Sambaliung	2.220.112.897,00	1.548.192.142,53	Puskesmas Sambaliung
6	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Suaran	1.327.669.260,00	972.419.971,86	Puskesmas Suaran
7	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tubaan	2.207.423.176,00	1.663.564.148,88	Puskesmas Tubaan
8	1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Biatan Lempake	1.911.094.775,40	1.265.059.967,89	Puskesmas Biatan Lempake
9	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Talisayan	1.638.908.809,75	1.234.669.408,65	Puskesmas Talisayan
10	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Batu Putih	1.982.291.166,57	1.399.680.336,72	Puskesmas Batu Putih
11	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Biduk Biduk	2.140.613.552,00	1.449.107.316,37	Puskesmas Biduk Biduk
12	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Gunung Tabur	1.949.176.550,00	1.419.752.796,86	Puskesmas Gunung Tabur
13	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Merancang	1.771.921.554,81	1.321.476.505,39	Puskesmas Merancang
14	1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Tanjung Batu	2.100.202.894,25	1.536.671.067,11	Puskesmas Tanjung Batu
15	1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pulau Derawan	1.377.816.450,00	1.031.323.638,07	Puskesmas Pulau Derawan
16	1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Teluk Bayur	1.383.200.783,58	867.161.226,77	Puskesmas Teluk Bayur
17	1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Labanan	1.928.636.022,50	1.293.107.263,21	Puskesmas Labanan
18	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Tepian Buah	1.807.952.934,75	1.332.531.012,25	Puskesmas Tepian Buah
19	1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Long Laai	892.520.309,00	698.600.987,61	Puskesmas Long Laai



NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB
20	1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kelay	1.889.226.955,00	1.296.301.711,92	Puskesmas Kelay
21	1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Merapun	2.171.536.550,00	1.234.930.055,92	Puskesmas Merapun
22	1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Long Boy	1.553.790.730,00	797.095.285,94	Puskesmas Long Boy
23	1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Maratua	2.460.637.578,00	1.523.372.951,77	Puskesmas Maratua
24	1.02.0.00.0.00.01.0024 R S U D Dr. Abdul Rivai	122.841.512.464,80	110.276.145.485,30	R S U D Dr. Abdul Rivai
25	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.935.193.778,25	92.554.412.890,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	105.305.985,40	93.933.438,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	41.500.000,00	40.125.252,00	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
28	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.527.320,00	60.627.457,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	1.101.192.549,21	815.199.898,00	Dinas Sosial
30	2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.890.983,20	64.768.948,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan	631.266.169,70	545.510.315,26	Dinas Pangan
32	2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan	45.746.589,40	44.648.751,20	Dinas Pertanahan
33	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.500.208.890,70	2.432.064.626,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
34	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	54.999.940,00	49.740.062,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
35	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	932.895.830,15	754.685.225,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
36	2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.620.356.789,20	1.338.157.740,38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	57.841.969,20	57.698.274,00	Dinas Perhubungan
38	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	169.140.918,06	165.170.080,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
39	2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	649.515.409,40	606.846.404,40	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
40	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	169.379.095,20	143.633.162,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.384.511,40	40.560.273,40	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
42	2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	78.943.524,80	69.478.428,40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
43	2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.200.000,00	44.155.125,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB
44	3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan	262.653.088,80	236.794.218,40	Dinas Perikanan
45	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	194.595.242,80	162.186.554,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
46	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	210.347.366,20	203.382.876,20	Dinas Perkebunan
47	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	739.085.996,60	648.011.291,60	Sekretariat Daerah
48	4.01.0.00.0.00.01.0001 Kantor Penghubung	18.000.000,00	18.000.000,00	Kantor Penghubung
49	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	125.221.875,20	112.132.179,80	Sekretariat DPRD
50	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	656.109.585,70	616.338.357,41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
51	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	142.307.382,00	113.189.902,20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
52	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah	109.594.590,00	86.637.738,20	Badan Pendapatan Daerah
53	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.068.407,20	51.516.622,20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
54	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	49.489.877,80	40.068.093,80	Inspektorat
55	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tanjung Redeb	508.843.390,10	350.438.979,02	Kecamatan Tanjung Redeb
56	7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Tanjung Redeb	886.505.977,60	875.274.585,60	Kelurahan Tanjung Redeb
57	7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sungai Bedungun	466.675.429,80	422.841.159,20	Kelurahan Sungai Bedungun
58	7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Gayam	462.370.650,40	448.010.324,20	Kelurahan Gayam
59	7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bugis	532.120.463,40	507.991.166,20	Kelurahan Bugis
60	7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Gunung Panjang	443.003.144,60	385.684.288,60	Kelurahan Gunung Panjang
61	7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Karang Ambun	558.669.680,60	537.682.758,00	Kelurahan Karang Ambun
62	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Gunung Tabur	1.830.673.652,00	1.584.673.171,57	Kecamatan Gunung Tabur
63	7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Gunung Tabur	494.379.630,00	461.180.386,20	Kelurahan Gunung Tabur
64	7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Sambaliung	457.785.280,80	399.697.032,89	Kecamatan Sambaliung
65	7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan sambaliung	614.067.011,40	608.000.154,60	Kelurahan sambaliung
66	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Teluk Bayur	365.627.713,40	303.979.083,87	Kecamatan Teluk Bayur
67	7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Teluk Bayur	601.115.056,00	588.444.755,60	Kelurahan Teluk Bayur
68	7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Rinding	384.601.336,20	8.176.211,20	Kelurahan Rinding



NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB
69	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Segah	574.160.773,50	498.782.967,22	Kecamatan Segah
70	7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kelay	454.497.342,00	416.714.588,16	Kecamatan Kelay
71	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Pulau Derawan	228.445.105,00	202.569.506,89	Kecamatan Pulau Derawan
72	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Talisayan	308.454.080,58	240.109.256,68	Kecamatan Talisayan
73	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Biduk Biduk	343.616.647,40	284.781.308,91	Kecamatan Biduk Biduk
74	7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Maratua	441.172.047,60	310.125.569,59	Kecamatan Maratua
75	7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tabalar	425.353.064,10	361.621.249,64	Kecamatan Tabalar
76	7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Batu Putih	476.036.498,30	435.872.703,76	Kecamatan Batu Putih
77	7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Biatan	290.704.101,00	267.692.783,98	Kecamatan Biatan
78	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.000.000,00	37.466.431,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		310.202.861.464,12	274.734.516.203,31	

2.1.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Berau

Struktur perekonomian Kabupaten Berau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,73	9,33	11,26	12,42	13,47
2	Pertambangan dan Penggalian	59,68	66,98	58,27	53,08	48,11
3	Industri Pengolahan	4,32	3,49	4,33	4,94	5,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05
6	Konstruksi	3,74	3,36	4,47	5,15	5,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	4,99	6,48	7,23	8,20
8	Transportasi dan Pergudangan	5,41	4,47	5,91	6,67	7,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	0,81	1,02	1,17	1,37
10	Informasi dan Komunikasi	0,95	0,72	0,90	0,99	1,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	0,41	0,53	0,60	0,63
12	<i>Real Estate</i>	0,83	0,62	0,74	0,79	0,85
13	Jasa Perusahaan	0,09	0,07	0,09	0,11	0,12



No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,03	0,80	1,03	1,35	1,64
15	Jasa Pendidikan	2,77	2,22	2,76	3,07	3,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,37	1,10	1,38	1,50	1,68
17	Jasa lainnya	0,71	0,57	0,73	0,85	0,95

Sumber: BPS Kabupaten Berau

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Agar pencapaian pendapatan dapat terpenuhi dan senantiasa meningkat maka kebijakan di bidang pendapatan pada Tahun 2025 adalah menetapkan target pendapatan secara realistis dengan mempedomani perolehan pada tahun-tahun sebelumnya dengan senantiasa mengoptimalkan pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pengelola pendapatan daerah, strategi dalam bidang pendapatan ditekankan pada kegiatan sebagai berikut.

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan batas kemampuan bayar masyarakat sehingga pungutan pajak dan retribusi bukan merupakan beban tapi kewajiban yang disadari untuk kemaslahatan masyarakat Berau;
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi, ekstensifikasi, potensi pajak, dan efisiensi pengelolaan perusahaan milik Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah;
- Meningkatkan dana transfer Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang lebih besar;
- Meningkatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar;
- Meningkatkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar;
- Melakukan kerjasama usaha (kemitraan) dengan pihak swasta untuk mengelola potensi unggulan sumber daya daerah;
- Berupaya untuk memperoleh bantuan luar-negeri dalam bentuk Hibah (*Grant*); dan
- Berupaya untuk tidak menerbitkan obligasi dan tidak melakukan pinjaman dalam dan luar negeri (*Loan*).

2.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib



dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja penyelenggara urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Untuk melaksanakan arah pengelola belanja daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran belanja untuk program-program prioritas yang mendatangkan manfaat yang besar terhadap masyarakat sesuai dengan visi, misi dan isu strategis/masalah-masalah mendesak untuk Kabupaten Berau; dan
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk alokasi Anggaran Belanja Aparatur.

2.2.3. Program Kebijakan Keuangan Daerah

Program Kebijakan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Program Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Program Intensifikasi Peningkatan Dana Perimbangan.
- c. Program Kemitraan Pemerintah Daerah-Swasta untuk Pengelolaan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah;
- d. Program Kemitraan dan Hubungan Luar-Negeri;
- e. Program Sosialisasi dan Implementasi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran Belanja Daerah yang Berbasis Kinerja; dan
- f. Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keuangan Daerah.

2.2.4. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan investasi Pemerintah Daerah serta pembayaran pokok utang yang dialokasikan melalui pengeluaran pembayaran.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Struktur APBD akan optimal jika pencapaian seluruh komponen pendapatan dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat *output* dari suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis Penerimaan Daerah, target Pendapatan Daerah Tahun 2025 senilai Rp5.367.930.573.905,72. Sumber-sumber pendanaan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut;



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun 2025 target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp401.156.435.995,00.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat {Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa} dan Pendapatan Transfer Antar Daerah {Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan} Target Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp4.949.130.788.110,72.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 ditargetkan senilai Rp17.643.349.800,00.

Rencana Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp6.041.361.617.000,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2025 direncanakan senilai Rp2.458.375.030.613,47 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2025 direncanakan senilai Rp3.091.908.012.785,76 terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dialokasikan senilai Rp27.092.917.600,77.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp463.985.656.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Rp11.105.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi Rp452.880.656.000,00.

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan



Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp673.431.043.094,28.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman. Untuk Tahun 2025 Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan senilai Rp0,00.

Pencapaian target kinerja keuangan APBD selama Tahun 2025 menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kinerja keuangan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 86,75% dari anggaran Rp834.725.586.672,16 terealisasi senilai Rp724.123.916.687,20.

2) Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kinerja keuangan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 85,08% dari anggaran Rp704.816.298.360,40 terealisasi senilai Rp599.631.611.110,52.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kinerja keuangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 96,34% dari anggaran Rp2.731.943.289.072,90 terealisasi senilai Rp2.631.942.917.649,00.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kinerja keuangan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 93,16%, dari anggaran Rp35.372.610.194,00 terealisasi senilai Rp32.953.640.148,00.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu:

a) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 74,55% dari anggaran Rp26.658.713.440,00 terealisasi senilai Rp19.873.558.286,00.

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 71,46% dari anggaran Rp25.672.098.234,50 atau terealisasi senilai Rp18.345.724.635,00.

6) Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kinerja keuangan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 80,15%, dari anggaran Rp31.732.706.142,00 terealisasi senilai Rp25.434.113.994,00.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kinerja keuangan urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 82,77%, dari anggaran Rp18.580.478.396,00 terealisasi senilai Rp15.379.227.932,00.

2) Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan yang oleh Dinas Pangan. Kinerja keuangan urusan Pangan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 84,70%, dari anggaran Rp14.722.468.779,20 terealisasi senilai Rp12.470.488.188,00.

3) Pertanahan

Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan. Kinerja keuangan urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 56,57% dari anggaran Rp26.314.052.568,00 terealisasi senilai Rp14.886.629.371,00.

4) Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kinerja keuangan urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 86,50%, dari anggaran Rp70.471.013.691,00 terealisasi senilai Rp60.955.124.945,00.



5) Administrasi Kependudukan dan Capil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja keuangan urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 76,18%, dari anggaran Rp17.524.149.673,00 terealisasi senilai Rp13.349.505.912,00.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kinerja keuangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 82,56%, dari anggaran Rp17.524.149.673,00 terealisasi senilai Rp14.468.534.980,00.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja keuangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 78,07%, dari anggaran Rp23.242.862.497,00 terealisasi senilai Rp18.146.745.717,00.

8) Perhubungan

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kinerja keuangan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 93,87%, dari anggaran Rp122.015.911.710,00 terealisasi senilai Rp114.534.289.452,68.

9) Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja keuangan urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 83,27% dari anggaran Rp36.660.951.023,80 terealisasi senilai Rp30.528.178.776,00.

10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja keuangan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 71,99%, dari anggaran Rp40.257.574.346,50 terealisasi senilai Rp28.982.753.740,00.

11) Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja keuangan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai



83,43%, dari anggaran Rp12.969.951.513,50 terealisasi senilai Rp10.821.003.487,00.

12) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kinerja keuangan urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 84,60%, dari anggaran Rp33.107.931.125,00 terealisasi senilai Rp28.008.168.733,00.

13) Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kinerja keuangan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 85,74%, dari anggaran Rp68.157.582.975,98 terealisasi senilai Rp58.441.281.597,95.

14) Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kinerja keuangan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 90,26%, dari anggaran Rp15.946.913.437,00 terealisasi senilai Rp14.393.080.979,00.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Kinerja keuangan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 87,44%, dari anggaran Rp22.036.539.509,00 terealisasi senilai Rp19.268.184.897,00.

2) Pertanian

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu:

a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 83,49% dari anggaran Rp49.835.772.253,00 terealisasi senilai Rp41.609.107.508,03.

b) Dinas Perkebunan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 79,94% dari anggaran Rp18.678.799.759,00 terealisasi senilai Rp14.932.145.792,00.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan



Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu:

a) Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Kinerja keuangan urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 81,17%, dari anggaran Rp154.577.532.820,00 terealisasi senilai Rp125.476.831.121,00.

b) Kantor Penghubung

Urusan Kantor Penghubung dilaksanakan oleh Kantor Penghubung. Kinerja keuangan urusan Kantor Penghubung yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 96,21%, dari anggaran Rp1.963.695.939,00 terealisasi senilai Rp1.889.279.952,00.

2) Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Kinerja Keuangan urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 86,15% dari anggaran Rp24.245.509.131,00 terealisasi senilai Rp20.888.544.370,00.

3) Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG). Kinerja keuangan urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 88,94% dari anggaran Rp24.851.171.906,00 terealisasi senilai Rp22.103.595.148,00.

4) Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 91,35% dari anggaran Rp522.294.533.005,77 terealisasi senilai Rp477.130.268.381,00.

b) Badan Pendapatan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kinerja Keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 76,41% dari anggaran Rp32.746.937.806,00 terealisasi senilai Rp25.022.823.059,30.

5) Kepegawaian

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kinerja keuangan urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai



85,92% dari anggaran Rp24.851.171.906,00 terealisasi senilai Rp21.351.553.081,00.

6) Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Kinerja keuangan urusan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 85,62% dari anggaran Rp96.230.951.308,00 terealisasi senilai Rp82.389.720.235,00.

7) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Berau. Kinerja keuangan urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 86,56% dari anggaran Rp140.415.150.998,96 terealisasi senilai Rp121.541.991.209,50.

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas. Kinerja keuangan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut mencapai 84,54% dari anggaran Rp21.405.465.476,97 terealisasi senilai Rp18.097.037.906,00.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun 2025 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD murni Kabupaten Berau.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan target pada perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Adanya tambahan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
2. Adanya penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
3. Adanya Prakiraan Bertambah/berkurang pada penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Adanya Instruksi Presiden terkait efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan perubahan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan besaran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.



3. Adanya keadaan dimana saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Adanya tambahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau pada perubahan APBD 2025.
5. Adanya Instruksi Presiden terkait efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Berau melakukan perubahan kebijakan dalam perubahan APBD 2025 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 **naik** senilai Rp603.341.909.905,72 atau senilai 12,66% menjadi Rp5.367.930.573.905,72 dengan rincian *Pendapatan Asli Daerah* mengalami **kenaikan** senilai Rp1.156.435.995,00 atau naik senilai 0,29% dari Rp400.000.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp401.156.435.995,00 di anggaran perubahan, *Pendapatan Transfer* mengalami **kenaikan** senilai Rp595.901.183.710,72 atau 13,69% dari Rp4.353.229.604.400,00 di anggaran perubahan menjadi Rp4.949.130.788.110,72 dan *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* mengalami **kenaikan** Rp6.284.290.200,00 atau senilai 55,32% dari Rp11.359.059.600,00 di anggaran murni menjadi Rp17.643.349.800,00 di anggaran perubahan.

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	4.764.588.664.000,00	5.367.930.573.905,72	603.341.909.905,72	12,66
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000.000,00	401.156.435.995,00	1.156.435.995,00	0,29
	Pajak Daerah	154.950.000.000,00	175.513.778.000,00	20.563.778.000,00	13,27
	Restribusi Daerah	119.182.903.206,00	120.583.732.356,00	1.400.829.150,00	1,18
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.500.000.000,00	11.997.643.845,00	(3.502.356.155,00)	(22,60)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.367.096.794,00	93.061.281.794,00	(17.305.815.000,00)	(15,68)
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.353.229.604.400,00	4.949.130.788.110,72	595.901.183.710,72	13,69

P



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.377.952.788.604,00	3.919.303.252.265,72	541.350.463.661,72	16,03
	Dana Bagi Hasil	2.582.597.547.604,00	3.252.374.465.265,72	669.776.917.661,72	25,93
	Dana Alokasi Umum	603.905.158.000,00	513.054.929.000,00	(90.850.229.000,00)	(15,04)
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	38.746.321.000,00	978.979.000,00	(37.767.342.000,00)	(97,47)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	152.703.762.000,00	152.894.879.000,00	191.117.000,00	0,13
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	108.529.946.000,00	108.529.946.000,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	0,00	0,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	101.530.656.000,00	101.530.656.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	866.746.869.796,00	921.297.589.845,00	54.550.720.049,00	6,29
	Pendapatan Bagi Hasil	529.146.869.796,00	583.697.589.845,00	54.550.720.049,00	10,31
	Bantuan keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.359.059.600,00	17.643.349.800,00	6.284.290.200,00	55,32
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.359.059.600,00	17.643.349.800,00	6.284.290.200,00	55,32

[Handwritten signature]



2. Belanja Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat senilai Rp788.768.617.000,00 atau senilai 15,02% dari Rp5.252.593.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp6.041.361.617.000,00 di anggaran perubahan 2025 dengan rincian *Belanja Operasi* mengalami **kenaikan** senilai Rp346.795.813.246,69 atau 16,42% dari Rp2.111.579.217.366,78 di anggaran murni menjadi Rp2.458.375.030.613,47 di anggaran perubahan 2025. *Belanja Modal* mengalami **kenaikan** senilai Rp444.579.886.152,54 atau senilai 16,79% dari Rp2.647.328.126.633,22 di anggaran murni menjadi Rp3.091.908.012.785,76 di anggaran perubahan 2025. Belanja Tidak Terduga mengalami **penurunan** senilai Rp2.907.082.399,23 atau senilai 9,69% dari Rp30.000.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp27.092.917.600,77 di anggaran perubahan 2025. dan Belanja Transfer mengalami **kenaikan** senilai Rp300.000.000,00 atau senilai 0,06% dari Rp463.685.656.000,00 di anggaran murni menjadi Rp463.985.656.000,00 di anggaran perubahan 2025.

Tabel 3. 2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	5.252.593.000.000,00	6.041.361.617.000,00	788.768.617.000,00	15,02
BELANJA OPERASI	2.111.579.217.366,78	2.458.375.030.613,47	346.795.813.246,69	16,42
Belanja Pegawai	1.012.406.992.519,10	1.240.784.884.524,50	228.377.892.005,40	22,56
Belanja Barang dan Jasa	973.335.418.825,68	1.041.220.505.794,97	67.885.086.969,29	6,97
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	120.221.306.022,00	166.224.640.294,00	46.003.334.272,00	38,27
Belanja Bantuan Sosial	5.615.500.000,00	10.145.000.000,00	4.529.500.000,00	80,66
BELANJA MODAL	2.647.328.126.633,22	3.091.908.012.785,76	444.579.886.152,54	16,79
Belanja Modal Tanah	5.386.704.763,00	15.391.573.880,00	10.004.869.117,00	185,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.034.321.584,22	266.970.783.032,28	75.936.461.448,06	39,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.415.526.131,00	360.389.632.338,48	93.974.106.207,48	35,27

P



URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.172.854.040.839,00	2.432.439.129.612,00	259.585.088.773,00	11,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.984.341.816,00	14.282.893.923,00	4.298.552.107,00	43,05
Belanja Modal Aset Lainnya	1.653.191.500,00	2.434.000.000,00	780.808.500,00	47,23
BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	27.092.917.600,77	(2.907.082.399,23)	(9,69)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	27.092.917.600,77	(2.907.082.399,23)	(9,69)
BELANJA TRANSFER	463.685.656.000,00	463.985.656.000,00	300.000.000,00	0,06
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	9.855.000.000,00	9.855.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(488.004.336.000,00)	(673.431.043.094,28)	(185.426.707.094,28)	38,00

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan dan dicatat secara defenitif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2024 senilai Rp673.431.043.094,28 mengalami **kenaikan** senilai Rp185.426.707.094,28 atau senilai 38,00% dari sebelumnya Rp488.004.336.000,00 pada anggaran murni menjadi Rp673.431.043.094,28 dianggarkan perubahan 2025.

Selisih lebih atas proyeksi SILPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan yang bersipat spesifik grant, bersifat wajib dan mengikat seperti Program kegiatan

P



yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan (JKN) dana BOSNAS, dana BLUD RSUD A.Rivai yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan, DAK DBH DR, DAK Non Fisik, serta Penegeluaran Pembiayaan.

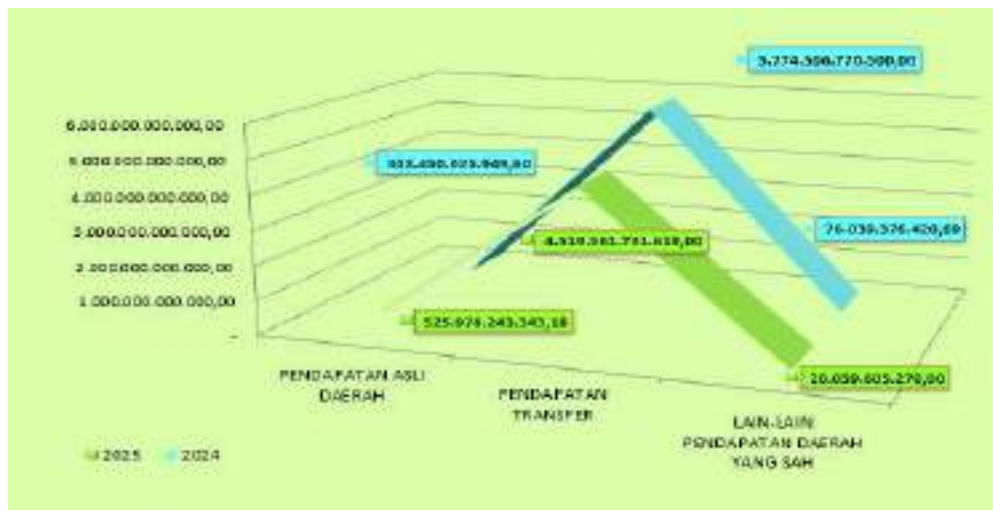
Tabel 3.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28	38,00
	Penggunaan SILPA	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28	38,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28	38,00

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 Rp5.367.930.573.905,72 terealisasi sejumlah Rp5.071.599.580.232,18 atau 94,48% dari target, mengalami **penurunan** sejumlah Rp1.122.396.592.638,11 atau 18,12% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp6.193.996.172.870,29.

Realisasi Pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD senilai Rp343.450.025.949,60, Pendapatan Transfer senilai Rp5.774.506.770.500,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp76.039.376.420,69 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan 2024

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp401.156.435.995,00 terealisasi senilai Rp525.978.243.343,18 atau 131,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 senilai Rp343.450.025.949,60, maka realisasi PAD mengalami **kenaikan** senilai Rp182.528.217.393,58 atau 53,15%.

(Handwritten signature)

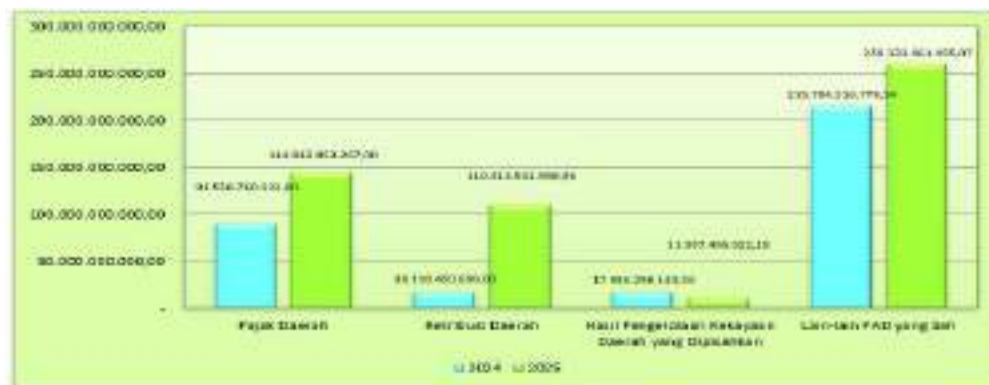


Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp144.942.853.267,00; Retribusi Daerah Rp110.313.931.998,96; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp11.397.496.922,15 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp259.323.961.155,07 sebagaimana gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 (dalam %)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Berau selama Tahun 2025 dan perbandingannya dengan Tahun 2024 ditunjukkan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2025 maupun 2024 sumber utama PAD adalah dari Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp525.978.243.343,18 atau 131,12% dari Anggaran yang ditetapkan senilai Rp401.156.435.995,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp182.528.217.393,58 atau 53,15% dibandingkan pada Tahun 2024 senilai Rp343.450.025.949,60.



Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp175.513.778.000,00 terealisasi senilai Rp144.942.853.267,00 atau 82,58%, mengalami **kenaikan** senilai Rp53.384.092.935,00 atau 58,31% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp91.558.760.332,00.

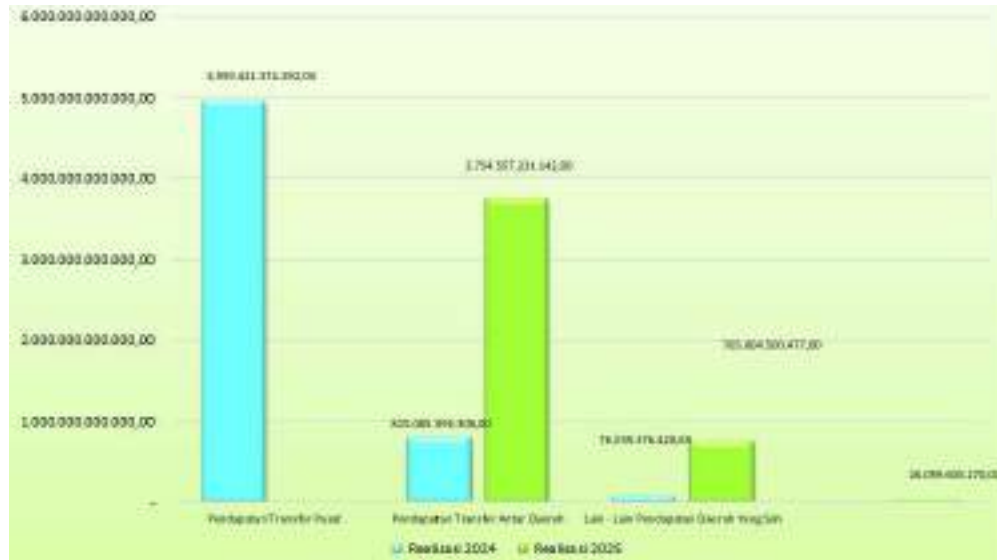
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi Rp110.313.931.998,96 atau senilai 91,48% dari target senilai Rp120.583.732.356,00 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp92.203.481.302,96 atau 509,12% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.110.450.696,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp11.397.496.922,15 atau 95,00% dari target senilai Rp11.997.643.845,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 mengalami **penurunan** senilai Rp6.588.801.221,11 atau 36,63% sedangkan untuk Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp259.323.961.155,07 atau senilai 278,66% mengalami **kenaikan** senilai Rp43.529.444.376,73 atau 20,17% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp215.794.516.778,34.

Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Transfer senilai Rp4.949.130.788.110,72 dengan realisasi senilai Rp4.519.561.731.619,00 atau 91,32% dan target Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp17.643.349.800,00 dengan realisasi senilai Rp26.059.605.270,00 atau 147,70%. Pendapatan Transfer Kabupaten Berau terdiri dari; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi senilai Rp3.754.557.231.142,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi senilai Rp765.004.500.477,00. Sedangkan untuk Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp26.059.605.270,00 terdiri dari; Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp12.629.276.824,00; Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi Rp13.203.878.146,00, serta Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi Rp226.450.300,00.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Transfer dari Pemerintah serta Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan Tahun 2024 ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut.

A



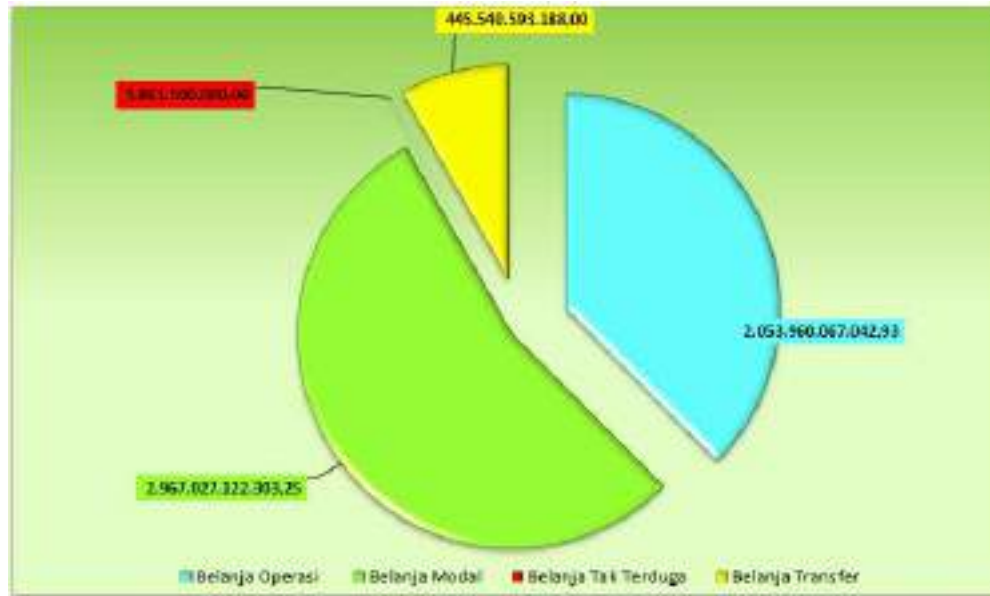
Gambar 3.4 Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan 2024

Dari Grafik diatas digambarkan bahwa; Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.754.557.231.142,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.959.421.374.192,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.204.864.143.050,00 atau 24,29%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 senilai Rp765.004.500.477,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 Rp815.085.396.308,00 mengalami **penurunan** senilai Rp50.080.895.831,00 atau 6,14% serta realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 Rp26.059.605.270,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp76.039.376.420,69 mengalami **penurunan** senilai Rp49.979.771.150,69 atau 65,73%

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.5 dibawah ini, target anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp6.041.361.617.000,00 realisasinya mencapai 90,58% atau senilai Rp5.472.389.282.534,18. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Modal senilai Rp2.967.027.122.303,25 atau 95,96% dari target, sedangkan Belanja Operasi senilai Rp2.053.960.067.042,93 atau 83,55% dari target, Belanja Tidak Terduga senilai Rp5.861.500.000,00 atau 21,63% dari target dan Realisasi Belanja Transfer senilai Rp445.540.593.188,00 atau 96,02% dari target.

A



Gambar 3.5 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ditunjukkan dalam grafik 3.6 dibawah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.036.493.514.973,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34 mengalami **penurunan** senilai Rp1.666.551.735,34 atau senilai 0,16%;

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 senilai Rp854.413.659.354,62 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp868.596.837.598,25 mengalami **penurunan** senilai Rp14.183.178.243,63 atau senilai 1,63%;

Realisasi Belanja Bunga dan Belanja subsidi tidak ada dikarenakan tidak ada penganggaran.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp153.051.392.715,31 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp189.599.952.449,00 mengalami **penurunan** senilai Rp36.548.559.733,69 atau senilai 19,28%;

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 senilai Rp10.001.500.000,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp15.174.000.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp5.172.500.000,00 atau senilai 34,09%.



Gambar 3.6 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ditunjukkan dalam grafik 3.7 dibawah. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.967.027.122.303,25 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.828.768.208.935,46 mengalami **penurunan** senilai Rp861.741.086.632,21 atau senilai 22,51%;

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.937.492.376,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.352.415.463,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.585.076.913,00 atau senilai 412,97%;

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp252.680.070.744,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp259.968.567.330,29 mengalami **penurunan** senilai Rp7.288.496.586,29 atau senilai 2,80%;

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp336.504.709.092,25 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp472.685.076.375,72 mengalami **penurunan** senilai Rp136.180.367.283,47 atau senilai 28,81%;

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.354.928.778.730,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45 mengalami **penurunan** senilai Rp726.818.517.026,45 atau senilai 23,58%;

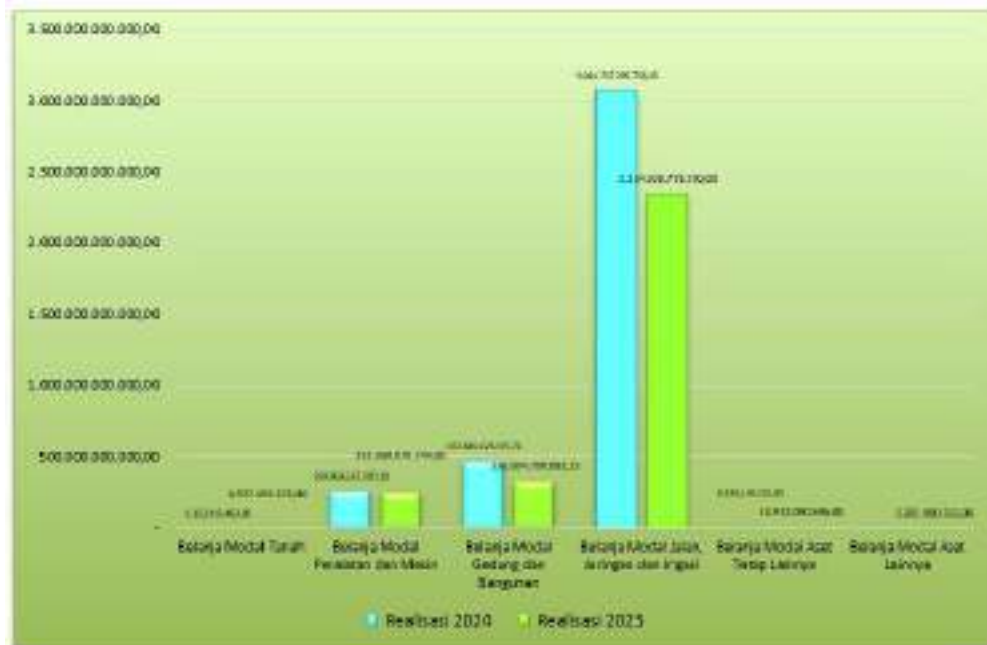
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.974.090.596,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.338.136.101,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.635.954.495,00 atau senilai 67,59%;

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.001.980.765,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai

[Handwritten signature]



Rp4.676.717.909,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.674.737.144,00 atau 57,19%.



Gambar 3.7 Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ditunjukkan dalam grafik 3.8 dibawah. Realisasi Belanja tak Terduga Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.861.500.000,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Tak terduga senilai Rp5.774.799.583,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp86.700.417,00 atau senilai 1,50%.

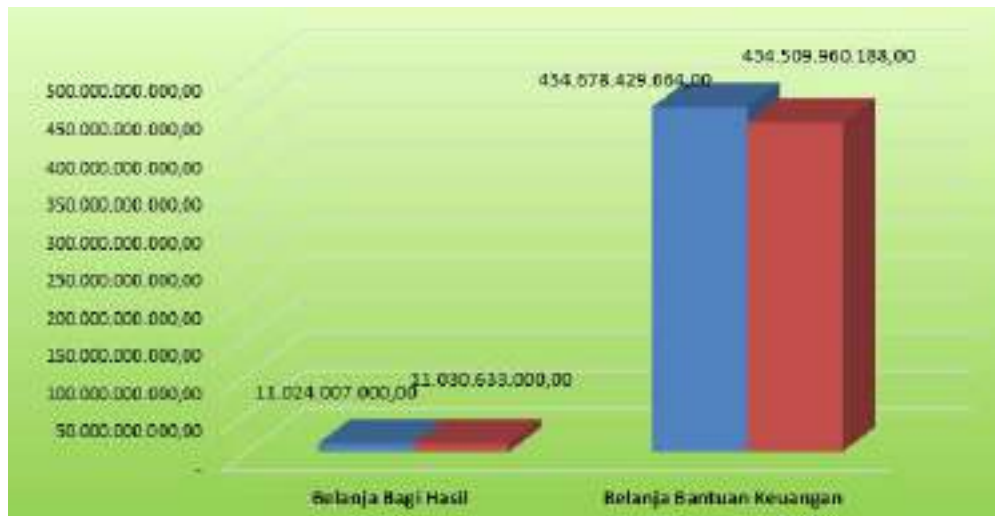


Gambar 3.8 Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024



3.1.3. Belanja Transfer

Perbandingan kinerja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ditunjukkan dalam grafik 3.9 dibawah. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 senilai Rp445.540.593.188,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp465.702.436.664,00 mengalami **penurunan** senilai Rp20.161.843.476,00 atau senilai 4,33%. Dengan rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 senilai Rp11.030.633.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.626.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai Rp11.024.007.000,00 atau 0,06%; Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp434.509.960.188,00 mengalami **penurunan** senilai Rp20.168.469.476,00 atau 106,64% dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai Rp454.678.429.664,00.



Gambar 3.9 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

3.2. *Mandatory Spending*

Dalam Anggaran belanja daerah Tahun 2025 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan senilai 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);



- c. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tabel 3.4 Rekap Alokasi Anggaran Mandatory Spending Tahun 2025

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	% SESUAI REGULASI	JUMLAH BELANJA PADA APBD	% DALAM APBD	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20	854.558.935.676,61	14	723.186.081.739,20	84,63
B	Belanja Fungsi Pengawasan	0,6	11.061.758.311,00	0,18	8.719.848.048,00	78,83
C	Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU	25	3.637.996.868.182,87	65	3.422.965.025.659,13	94,09
D	Alokasi dana Desa (ADD)	10	362.155.010.000,00	10	361.902.229.496,00	99,93
JUMLAH			4.865.772.572.170,48		4.516.773.184.942,33	92,83

Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2025

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pada Fungsi Pendidikan :	854.558.935.676,61	723.186.081.739,20
	Dinas Pendidikan	801.609.870.304,61	677.305.733.252,20
	Dinas Kesehatan	1.105.878.494,00	843.465.064,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.472.509.500,00	6.391.715.105,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.203.590.561,00	1.109.993.873,00
	Dinas Sosial	611.040.055,00	478.248.455,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.830.228.008,00	2.562.414.056,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.373.251.206,00	1.230.906.798,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.648.471.772,00	1.241.660.747,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.959.633.307,00	1.618.387.981,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	232.955.476,00	230.045.014,00
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20.280.126.221,00	17.298.537.161,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.247.230.174,00	4.435.602.155,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.646.556.638,00	2.535.096.671,00
	Dinas Perikanan	1.500.014.172,00	1.361.378.538,00
	Dinas Perkebunan	300.651.554,00	226.741.427,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.653.795.635,00	1.575.201.112,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.046.304,00	13.865.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	683.185.731,00	600.909.982,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.150.900.564,00	2.126.179.348,00

[Handwritten signature]



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	854.558.935.676,61	723.186.081.739,20
3	Total Belanja Daerah	6.041.361.617.000,00	5.477.482.999.028,18
4	Rasio Anggaran Pendidikan	14,15	13,20

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2025

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	11.061.758.311,00	8.719.848.048,00
2	Anggaran Fungsi Pengawasan	11.061.758.311,00	8.719.848.048,00
3	Total Belanja Daerah	6.041.361.617.000,00	5.477.482.999.028,18
4	Rasio Anggaran Pengawasan	0,18	0,16

Tabel 3. 7 Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum Tahun 2025

(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	133.368.573.734,55	126.761.467.517,20	95,05
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	86.919.410.038,00	71.221.535.961,42	81,94
3	1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Kampung Bugis	1.417.994.680,00	828.922.904,00	58,46
4	1.02.0.00.0.00.01.0002 - Puskesmas Tanjung Redeb	1.711.933.431,00	1.411.850.485,00	82,47
5	1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Sambaliung	2.462.255.020,00	1.459.141.357,00	59,26
6	1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Suaran	1.595.486.080,00	1.149.985.257,00	72,08
7	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Tubaan	2.729.067.424,00	2.012.809.389,00	73,75
8	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Biatan Lempake	2.338.988.000,00	1.523.597.207,00	65,14
9	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Talisayan	1.825.415.245,00	1.438.894.203,00	78,83
10	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Batu Putih	2.258.504.715,00	1.816.127.542,00	80,41
11	1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Biduk Biduk	2.555.412.000,00	1.868.747.954,00	73,13
12	1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Gunung Tabur	2.181.887.000,00	1.450.017.449,00	66,46
13	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Merancang	2.185.017.407,00	1.614.227.856,00	73,88
14	1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Tanjung Batu	2.446.311.059,00	1.838.908.548,00	75,17
15	1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Pulau Derawan	1.741.987.000,00	1.371.633.219,00	78,74
16	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Teluk Bayur	1.418.813.650,00	998.775.476,00	70,40
17	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Labanan	2.337.720.030,00	1.627.045.341,00	69,60
18	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Tepian Buah	2.074.504.617,00	1.623.664.360,00	78,27
19	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Long Laai	1.116.523.132,00	946.457.048,00	84,77
20	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Kelay	2.380.827.780,00	1.681.573.018,00	70,63

P



No.	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI	(%)
21	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Puskesmas Merapun	2.655.325.000,00	1.573.151.001,00	59,25
22	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Long Boy	1.921.691.000,00	1.000.841.435,00	52,08
23	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Maratua	3.103.281.984,00	1.976.073.988,00	63,68
24	1.02.0.00.0.00.01.0024 - R S U D Dr. Abdul Rivai	202.349.836.548,00	180.815.941.576,10	89,36
25	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	11.929.841.663,36	11.256.215.883,00	94,35
26	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.706.891.500.862,90	2.612.092.483.115,00	96,50
27	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.414.947.765,00	3.869.942.833,00	87,66
28	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.149.881.990,00	1.714.165.568,00	79,73
29	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	9.981.384.013,00	8.950.747.943,00	89,67
30	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	49.339.635.398,00	45.477.774.661,00	92,17
31	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	102.176.374.806,00	98.294.182.348,68	96,20
32	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	2.123.623.631,00	1.754.844.874,00	82,63
33	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Maratua	2.175.058.853,00	1.613.871.598,50	74,20
34	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.533.450.717,00	25.716.683.757,00	96,92
35	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	28.009.236.898,00	22.426.258.750,00	80,07
36	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Kantor Penghubung	1.849.317.939,00	1.774.901.952,00	95,98
37	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.395.442.943,00	1.187.843.018,00	85,12
38	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.309.227.408,00	8.749.481.988,00	65,74
39	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	4.035.776.476,00	3.485.764.838,00	86,37
40	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.704.174.827,00	3.560.607.207,00	75,69
41	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan	4.678.086.868,20	3.604.375.065,00	77,05
42	2.10.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian	20.372.700.557,00	10.334.824.566,00	50,73
43	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.586.560.560,00	4.295.981.697,00	76,90
44	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.615.096.069,00	1.824.221.330,00	69,76
45	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	23.572.968.031,88	20.129.408.263,00	85,39
46	2.17.3.31.3.30.01.0000 - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	16.586.538.506,50	13.465.360.534,00	81,18
47	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.895.261.829,50	2.100.376.305,00	72,55
48	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.373.534.626,00	8.224.068.726,00	79,28
49	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.976.524.899,00	7.299.167.997,00	81,31
50	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	14.640.260.139,00	12.861.640.318,03	87,85
51	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	4.413.083.571,00	3.965.061.556,00	89,85
52	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.196.668.614,00	3.877.460.336,00	92,39
53	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45.037.032.534,98	38.707.956.633,95	85,95

[Handwritten signature]



No.	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI	(%)
54	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	13.999.179.822,00	11.365.662.056,00	81,19
55	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Gunung Tabur	1.469.408.778,00	1.160.245.488,00	78,96
56	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Tanjung Redeb	1.311.523.617,00	930.175.875,25	70,92
57	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.147.758.070,00	970.755.246,00	84,58
58	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sambaliung	921.647.631,00	821.042.654,00	89,08
59	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Teluk Bayur	1.689.924.968,00	1.475.761.596,00	87,33
60	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Segah	1.482.068.594,00	1.166.222.789,00	78,69
61	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kelay	1.292.984.244,00	1.231.576.016,00	95,25
62	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Pulau Derawan	1.518.891.576,00	1.260.610.831,00	83,00
63	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Talisayan	1.381.095.844,00	1.244.454.361,00	90,11
64	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Biduk Biduk	1.642.757.799,00	1.581.254.597,00	96,26
65	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tabalar	1.437.356.869,00	1.281.948.066,00	89,19
66	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Batu Putih	1.076.132.703,00	1.047.946.844,00	97,38
67	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Biatan	1.411.948.018,00	1.283.603.190,00	90,91
68	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah	4.154.230.079,00	3.516.702.297,00	84,65
JUMLAH DANA TRANSFER UMUM		3.637.996.868.182,87	3.422.965.025.659,13	94,09
JUMLAH BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER		5.577.375.961.000,00	5.031.941.705.840,18	90,22
RASIO BELANJA WAJIB DTU		65,23	68,02	

Tabel 3. 8 Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2025

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	362.155.010.000,00	361.902.229.496,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	362.155.010.000,00	361.902.229.496,00
	Alokasi Anggaran Belanja Daerah	6.041.361.617.000,00	5.472.389.282.534,18
	Alokasi Dana Perimbangan*	3.765.429.394.265,72	3.525.734.989.813,00
	Rasio Anggaran Dana Desa	10	10

*) Anggaran setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

[Handwritten signature]



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) SKPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan Pendapatan dan Beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Sedangkan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas Pendapatan Tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;



- c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis Kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Pendapatan-LRA;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan sampai dengan rincian obyek Pendapatan-LRA; dan
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas Pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan Kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya



pendapatan atas jasa giro;

- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi Piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya Piutang diakhir tahun.
- f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan Kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- 2) Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan Kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto



(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.



Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran Kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah dalam jumlah dan persentase yang signifikan, kebijakan akuntansi mengenai Belanja, penjelasan sebab-sebab realisasi Belanja yang melebihi Anggaran dan pengungkapan realisasi Belanja yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun Kas belum dikeluarkan;

P



- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun Kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
- c. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan aset tetap/amortisasi, Beban Transfer, Beban tak terduga dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Non Operasional;
- c. Beban Luar Biasa; dan
- d. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:



- a. Pengeluaran Beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/Tahun Anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas Transfer Keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran Transfer Keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.



Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, Pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat senilai Kewajiban Transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.



- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya. Realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber Pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



Pengukuran

Akuntansi penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan Dana Cadangan, penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Kas Jangka Pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek harus segera dapat diubah menjadi Kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

P



- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas Penerimaan Pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

- d. Pengeluaran Kas dalam rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau



- b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
- e. **Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer**
- Penerimaan Transfer (Transfer Masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- f. **Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**
- Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.
- g. **Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya**
- Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi Kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar Rekening Kas Umum Daerah.
- h. **Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.**
- Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke Kas Daerah masuk sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen Kas dan

P



bukan merupakan bagian dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian Kas dan Setara Kas;
- b. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

- a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

P



b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;

[Handwritten signature]



- c. Perubahan harga pasar baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas Piutang untuk penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya Piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan atau dokumen yang sah dan belum dibayarkan/dilunasi; dan atau
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi



Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan
- b. jumlah Piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak Dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak diakui;
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer;
- e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang Transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika



kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

- g. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.
 - 1) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
 - 2) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan
 - 3) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.
- b. Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa Barang/Jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas Barang/Jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

P



- 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut.
 - 1) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran Piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
 - 1) Disajikan sebagai Aset Lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - 2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan Piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*). Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal Piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut :

P



Tabel 4. 1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,50%
b	Kurang Lancar	10%
c	Diragukan	50%
d	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa Piutang benar benar tidak dapat ditagi, atas Piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

Apabila kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas Piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan



sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Penghapusan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapustagihan dan penghapusbukuan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran Ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan Ekuitas; dan
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan

P



dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan Piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan morel lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/Ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.



4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah; dan
- c. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada Beban Persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan senilai:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:



- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Aset Tetap;
- c. Dana Cadangan; dan
- d. Aset Lainnya.

4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- 4) investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

P



b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.



c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Terhadap investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Jangka Panjang non permanen:
 - 1) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;
 - 2) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga; dan
 - 3) Investasi Jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

P



a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilainya perolehan.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode Ekuitas; dan
- d. Kepemilikan atas Investasi Jangka Panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

P



4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

- a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

P



Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
- 2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas;
- 3) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan



- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi jalan dan jaringan senilai Rp15.000.000,00 ke atas.

Tabel 4. 3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	500.000
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	500.000
1.3.2.1.03	Alat Bantu	500.000
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	500.000
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	500.000
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	500.000
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000
1.3.2.3.03	Alat Ukur	500.000
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	500.000
1.3.2.5.01	Alat Kantor	500.000
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	500.000
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000
1.3.2.6.01	Alat Studio	500.000
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	500.000
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	500.000
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	500.000
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	500.000
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	500.000
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	500.000
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	500.000
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	500.000
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000



Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	500.000
1.3.2.9.01	Senjata Api	500.000
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	500.000
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	500.000
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	500.000
1.3.2.10.01	Komputer Unit	500.000
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	500.000
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	500.000
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	500.000
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	500.000
1.3.2.13.01	Sumur	500.000
1.3.2.13.02	Produksi	500.000
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	500.000
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	500.000
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	500.000
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	500.000
1.3.2.15.03	Alat Sar	500.000
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	500.000
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	500.000
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	500.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.000.000
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	20.000.000
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	20.000.000
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000
1.3.4.1.01	Jalan	20.000.000
1.3.4.1.02	Jembatan	20.000.000

P



Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	20.000.000
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20.000.000
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	20.000.000
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.000.000
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	20.000.000
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.000.000
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	20.000.000
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	15.000.000
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	15.000.000
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	15.000.000
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	15.000.000
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	15.000.000
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	15.000.000
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	15.000.000
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	15.000.000
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	15.000.000
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	15.000.000
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	15.000.000
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	15.000.000
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.2.01	Bahan Perpustakaan	1
1.3.5.2.02	Barang Bercorak Kesenian	1
1.3.5.2.03	Hewan	1
1.3.5.2.04	Biota Perairan	1
1.3.5.2.05	Tanaman	1
1.3.5.2.06	Barang Koleksi Non Budaya	1
1.3.5.2.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

P



Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

P



c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi Dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	



Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10



Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	2	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	40
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

A



Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4
1	3	5	7	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.



Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Berau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

P



d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap Kas atau Setara Kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat Aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi Kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi Kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan senilai nilai yang tercatat di neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat senilai nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; dan
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

P



f. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
- 4) pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

1) Batasan minimal Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

- a) pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke atas;
- b) pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke atas.



2) Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan.

4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait, dengan ruang lingkup ;

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD
2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk :
 - aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Perngertian istilah – istilah yang digunakan dalam kebijakan ini ;

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- f. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- g. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- h. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:



- a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
- b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

P



- c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
 - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
 - a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
 7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
 8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan.
 9. konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
 10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala

A



Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
 3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
 5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
 6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:



- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
 7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
 10. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

P



11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/ penurunan dalam ekuitas.

P



9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Penyajian Properti Investasi

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

P



- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - f. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - g. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - h. pelepasan;
 - i. penyusutan;
 - j. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - k. perubahan lain.
2. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
 - i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - j. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - l. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - m. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - n. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

P



- o. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- p. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
- q. informasi lain terkait dengan properti investasi.

Ahli Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

P



6. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. pelepasan; atau
 - b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.



4.5 Tabel Neraca dengan Properti Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Kas di BLUD				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang PAD lainnya				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Persediaan Alat Tuis Kantor				
Persediaan Alat Listrik				
Persediaan Material/Bahan				
Persediaan Benda Pos				
Persediaan Bahan Bakar				
Persediaan Bahan Makanan Pokok				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat berat				
Alat-alat angkutan darat bermotor				
Alat-alat angkutan darat tidak bermotor				
Alat-alat angkutan di air bermotor				
Alat-alat angkutan di air tidak bermotor				
Alat-alat angkutan udara				
Alat-alat bengkel				
Alat-alat pertanian dan peternakan				
Peralatan kantor				
Perlengkapan kantorkomputer				
Mebeleir				
Peralatan dapur				
Penghias ruangan rumah tangga				
Alat-alat studio				
Alat-alat komunikasi				
Alat-alat ukur				
Alat-alat kedokteran				
Alat-alat laboratorium				

P



Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
Alat-alat persenjataan/keamanan				
Gedung dan Bangunan				
Gedung kantor				
Gedung rumah jabatan				
Gedung rumah dinas				
Gedung gudang				
Bangunan bersejarah				
Bangunan monumen				
Tugu peringatan				
Jalan, Jaringan dan Instalasi				
Jalan				
Jembatan				
Jaringan air				
Penerangan jalan, taman dan hutan kota				
Instalasi listrik dan telepon				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan kepustakaan				
Barang bercorak kesenian, kebudayaan				
Hewan/ternak dan tanaman				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi penyusutan aset tetap				
Jumlah				
Properti Investasi				
Properti Investasi				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan piutang penjualan angsuran				
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah				
Kemitraan dengan pihak ketiga				
Aset tidak berwujud				
Aset lai-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang perhitungan pihak ketiga				
Utang bunga				
Utang pajak				
Bagian lancar utang jangka panjang				
Pendapatan diterima dimuka				
Utang jangka pendek lainnya				

[Handwritten signature]



Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
Jumlah				
EKUITAS				
Ekuitas				
Ekuitas untuk dikonsolidasikan				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

4.4.11.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa TA untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.4.11.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Aetap, dan Dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Piutang penjualan angsuran disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung

P



dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

P



Aset yang diserahkan dalam rangka Bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

- a) Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai senilai nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai senilai harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat senilainilai perolehan aset yang dibangun, yaitu senilai nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Aset Tidak Berwujud meliputi:

- 1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- 2) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

P



3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen *master plan*, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, *Detail Engineer Design* (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

5) Aset Tidak Berwujud lainnya, termasuk Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Nilai Aset Tidak Berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

A



- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan Aset Tidak Berwujud;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke Aset Tidak Berwujud tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi:

- 1) Biaya bahan yang digunakan dalam Aset Tidak Berwujud;
- 2) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 3) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 4) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Aset Tidak Berwujud, seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/narasumber.

Penilaian Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 (lima) tahun.

Penyajian Aset Tidak Berwujud

ATB disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

e. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

P



Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena dipinjamkan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

f. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran Kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai Belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah

P



digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

4.4.12. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai Kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, Utang Jangka Pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

P



b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan Kewajiban Jangka Panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Jumlah setiap Kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan Laporan Keuangan membuktikan bahwa substansi Kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang hanya jika:

- a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:



a. Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-Related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan Kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

P



d. Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi Kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui Kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan Kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui senilai jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan Kewajiban sebagai berikut.

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran

A



dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;

- b) Utang Bunga sebagai bagian dari Kewajiban atas pokok utang berupa Kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga Kewajiban itu menjadi Kewajiban Jangka Pendek;
- d) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;
- e) Utang Beban, diakui pada saat:
 - (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f) Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g) Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:
 - (1) barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - (2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH

A



yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- i) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang Kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal atas Kewajiban mencerminkan nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat Kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan Ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos Kewajiban adalah sebagai berikut.

- a. Utang PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan;
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

P



- c. Utang Transfer dicatat senilai nilai kekurangan transfer;
- d. Utang Bunga Atas Utang Pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan;
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan Kewajiban Lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Kewajiban Lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo Kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

P



- 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, dimana dalam prosesnya juga ditentukan oleh Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode yang bersangkutan serta koreksi kesalahan atas pembukuan tahun sebelumnya.

P



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 meliputi pendapatan-LRA, belanja, Surplus/defisit – LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Perbup Berau Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Anggaran pendapatan menjadi senilai Rp5.367.930.573.905,72, dari anggaran murni senilai Rp4.764.588.664.000,00. Target belanja senilai Rp6.041.361.617.000,00, dari anggaran murni senilai Rp5.252.593.000.000,00 dan pembiayaan netto senilai Rp673.431.043.094,28. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebagai berikut :

5.1.1 Pendapatan-LRA

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan	<u>5.071.599.580.232,18</u>	<u>6.193.996.172.870,29</u>

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Berau, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi



menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel 5.1 dan 5.2 berikut :

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	401.156.435.995,00	525.978.243.343,18	131,12
2	Pendapatan Transfer	4.949.130.788.110,72	4.519.561.731.619,00	91,32
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70
	Jumlah	5.367.930.573.905,72	5.071.599.580.232,18	94,48

Gambaran dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp5.367.930.573,72 dengan Realisasi senilai Rp5.071.599.580.232,18 atau 94,48%.

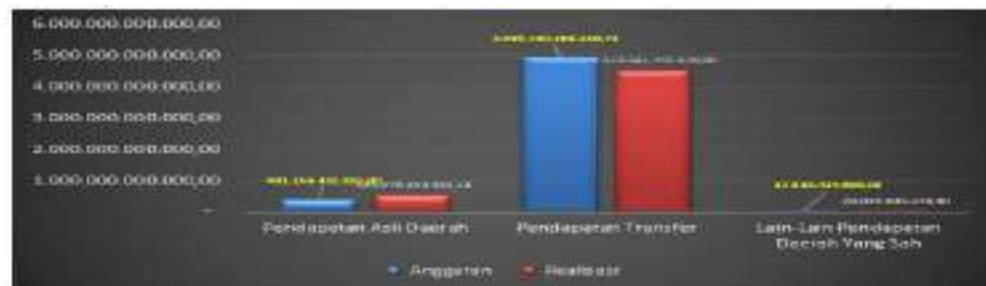
**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	525.978.243.343,18	343.450.025.949,60	182.528.217.393,58	53,15
2	Pendapatan Transfer	4.519.561.731.619,00	5.774.506.770.500,00	(1.254.945.038.881,00)	(21,73)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.059.605.270,00	76.039.376.420,69	(49.979.771.150,69)	(65,73)
	Jumlah	5.071.599.580.232,18	6.193.996.172.870,29	(1.122.396.592.638,11)	(18,12)

Gambaran dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp5.071.599.580.232,18 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.193.996.172.870,29, mengalami **penurunan** senilai Rp1.122.396.592.638,11 atau 18,12%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 5.1 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025**



Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.2 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Masing-masing anggaran dan realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	525.978.243.343,18	343.450.025.949,60

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2025 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Pajak Daerah	175.513.778.000,00	144.942.853.267,00	82,58
2	Pendapatan Retribusi Daerah	120.583.732.356,00	110.313.931.998,96	91,48
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.997.643.845,00	11.397.496.922,15	95,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	93.061.281.794,00	259.323.961.155,07	278,66
	Jumlah	401.156.435.995,00	525.978.243.343,18	131,12

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp401.156.435.995,00 dengan Realisasi senilai Rp525.978.243.343,18 atau 131,12%.



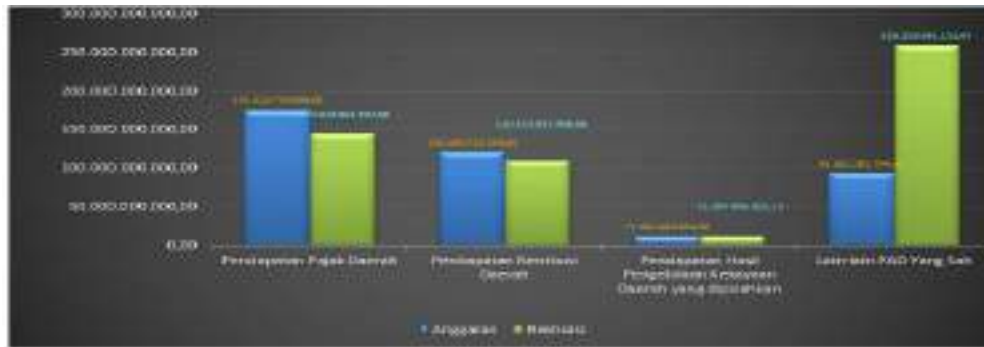
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	144.942.853.267,00	91.558.760.332,00	53.384.092.935,00	58,31
2	Pendapatan Retribusi Daerah	110.313.931.998,96	18.110.450.696,00	92.203.481.302,96	509,12
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.397.496.922,15	17.986.298.143,26	(6.588.801.221,11)	(36,63)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	259.323.961.155,07	215.794.516.778,34	43.529.444.376,73	20,17
	Jumlah	525.978.243.343,18	343.450.025.949,60	182.528.217.393,58	53,15

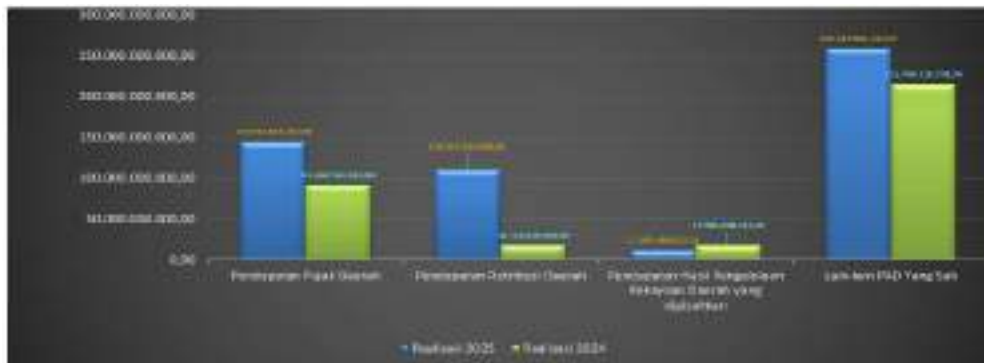
Dari penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp525.978.243.343,18 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp343.450.025.949,60, mengalami **kenaikan** senilai Rp19.095.861.559,42 atau 53,15%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.3 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.4 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

[Handwritten signature]



Dengan melihat tabel dan gambar di atas menunjukkan anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>144.942.853.267,00</u>	<u>91.558.760.332,00</u>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Berau.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Berau memungut Pajak Daerah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selaku instansi pemungut dan pengelola pajak daerah selalu melakukan intensifikasi dan eksensifikasi serta menetapkan tarif berdasarkan dengan Peraturan Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*.

Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran dan realisasi pendapatan pajak mengalami **kenaikan** dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 serta realisasi Tahun Anggaran 2024 dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pajak Reklame	600.000.000,00	338.763.210,00	56,46
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	65.424.000,00	43,62
3	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	49.560.758,00	3,30
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	109.770.200,00	18,30
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	5.724.234.995,00	104,08



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000,00	17.549.985.013,00	109,69
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	75.401.139.000,00	73.050.865.313,00	96,88
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33.762.639.000,00	18.841.643.938,00	55,81
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	42.000.000.000,00	29.212.605.840,00	69,55
Jumlah		175.513.778.000,00	144.942.853.267,00	82,58

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pajak Daerah senilai Rp175.513.778.000,00 dengan realisasi senilai Rp144.942.853.267,00 atau 82,58%.

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Reklame	338.763.210,00	290.417.433,00	48.345.777,00	16,65
2	Pajak Air Tanah	65.424.000,00	555.240,00	64.868.760,00	11.683,01
3	Pajak Sarang Burung Walet	49.560.758,00	62.532.000,00	(12.971.242,00)	(20,74)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	109.770.200,00	194.609.268,00	(84.839.068,00)	(43,59)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.724.234.995,00	4.361.315.759,00	1.362.919.236,00	31,25
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.549.985.013,00	15.277.432.416,00	2.272.552.597,00	14,88
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	73.050.865.313,00	71.371.898.216,00	1.678.967.097,00	2,35
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.841.643.938,00	0,00	18.841.643.938,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	29.212.605.840,00	0,00	29.212.605.840,00	0,00
Jumlah		144.942.853.267,00	91.558.760.332,00	53.384.092.935,00	58,31

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp144.942.853.267,00 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp91.558.760.332,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp53.384.092.935 atau 58,31%.

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi **kenaikan** dan **penurunan** realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Reklame

Target Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp600.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp338.763.210,00 atau 56,46%. Tidak tercapainya target Pajak Reklame dari yang telah direncanakan

P



dikarenakan menurunnya pajak penarikan reklame yang insidental. Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp48.345.777,00 atau 16,65% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp290.417.433,00.

b. Pajak Air Tanah

Target Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp65.424.000,00 atau 43,62%. Tercapainya target tersebut dikarenakan Pajak Air Bawah Tanah ada beberapa objek yang kembali dibuka sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan. Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp64.868.760,00 atau 11,683,01% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp555.240,00.

c. Pajak Sarang Burung Walet

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp49.560.758,00 atau 3,30%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan objek sarang burung walet alami (Goa) mengalami penurunan hasil panen yang disebabkan faktor alam, pajak sarang burung rumahan belum dipungut secara maksimal dan untuk Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat izin atau tidak ada izin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp12.971.242,00 atau 20,74% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp62.532.000,00.

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp600.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp109.770.200,00 atau 18,30%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala, utamanya terkait dengan proses perizinan usaha tambang galian C yang dinilai masih rumit.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp84.839.068,00 atau 43,59% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp194.609.268,00.

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Target Pajak PBBP2 Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp5.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp5.724.234.995,00 atau 104,08%. Tercapainya target realisasi pajak dikarenakan adanya tunggakan pajak beberapa Wajib Pajak yang telah dilunasi dan telah ditindaklanjuti pada proses penagihan bersama dengan pihak Kejaksaan selaku pengacara negara dan dikarenakan PT Kertas Nusantara telah melakukan pembayaran. Penerimaan PBBP2 Tahun Anggaran 2025 mengalami **kenaikan** senilai



Rp1.362.919.236,00 atau 31,25% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.361.315.759,00.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Target Pajak BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp16.000.000.000,00, telah direalisasikan senilai Rp17.549.985.013,00 atau 109,69%. Tercapainya target pajak yang melebihi angka yang telah ditetapkan tersebut karena objek pajak tersebut adalah objek pajak insidental atas transaksi terjadinya peralihan hak disebabkan karena jual beli, hibah dan wasiat. Penerimaan BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.272.552.597,00 atau 14,88% dari penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp15.277.432.416,00.

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Target Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan senilai Rp75.401.139.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp73.050.865.313,00 atau 96,88%. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari:

- 1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman anggaran senilai Rp36.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp28.725.469.945,00 atau 79,79%;
- 2) PBJT-Tenaga Listrik anggaran senilai Rp30.531.123.000,00 dengan realiasi senilai Rp32.535.776.075,00 atau 106,57%;
- 3) PBJT-Jasa Perhotelan anggaran senilai Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp10.203.711.173,00 atau 136,05%;
- 4) PBJT-Jasa Parkir anggaran senilai Rp400.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp180.291.072,00 atau 45,07%; dan
- 5) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan anggaran senilai Rp970.016.000,00 dengan realiasi senilai Rp1.405.617.048,00 atau 144,91%.

Penerimaan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.678.967.097,00 atau 2,35% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp71.371.898.216,00.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target Pajak Opsen Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp33.762.639.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.841.643.938,00 atau 55,81%. Opsen Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) baru diterapkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dan kemudian dibagi ke kabupaten/kota. Dalam sistem baru ini, pemerintah kabupaten/kota akan menerima bagian pajak secara langsung tanpa melalui pemerintah provinsi. Opsi ini merupakan pungutan tambahan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

P



tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Target Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp42.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp29.212.605.840,00 atau 69,55%. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru di diterapkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dan kemudian dibagi ke kabupaten/kota. Dalam sistem baru ini, pemerintah kabupaten/kota akan menerima bagian pajak secara langsung tanpa melalui pemerintah provinsi. Opsi ini merupakan pungutan tambahan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>110.313.931.998,96</u>	<u>18.110.450.696,00</u>

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun organisasi perangkat daerah pemungut berdasarkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- g. Dinas Perhubungan
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
- j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- l. Kantor Penghubung (Sekretariat Daerah)
- m. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- n. Badan Pendapatan Daerah
- o. Dinas Perikanan.

A



Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai unit penghasil. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	110.648.391.556,00	97.809.928.746,04	88,40
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.500.000.000,00	2.826.007.000,00	113,04
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.000.000,00	119.376.000,00	72,35
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.500.000.000,00	3.046.532.153,00	121,86
	Subtotal Retrubi Jasa Umum	115.813.391.556,00	103.801.843.899,04	89,63
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	251.050.000,00	0,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00	56.160.000,00	280,80
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.000.000,00	43.855.000,00	84,34
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila	610.000.000,00	489.975.000,00	80,32
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	611.000.000,00	804.486.065,00	131,67
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	328.000.000,00	597.164.000,00	182,06
13	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.850.000,00	266.235.000,00	119,47
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	521.000.000,00	578.105.000,00	110,96
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.696.490.800,00	1.603.962.050,00	94,55
	Subtotal Retrubi Jasa Usaha	4.086.340.800,00	4.715.992.115,00	115,41
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	504.000.000,00	1.599.324.495,00	317,33
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	196.771.489,92	109,32
	Subtotal Retrubi Perizinan Tertentu	684.000.000,00	1.796.095.984,92	262,59
	Jumlah	120.583.732.356,00	110.313.931.998,96	91,48

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp120.583.732.356,00 dengan realisasi senilai Rp110.313.931.998,96 atau 91,48%.

[Handwritten signature]



**Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	97.809.928.746,04	6.562.891.800,00	91.247.036.946,04	1.390,35
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.826.007.000,00	2.379.568.000,00	446.439.000,00	18,76
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	119.376.000,00	140.928.000,00	(21.552.000,00)	(15,29)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.046.532.153,00	3.809.459.072,00	(762.926.919,00)	(20,03)
	Subtotal Retrubsusi Jasa Umum	103.801.843.899,04	12.892.846.872,00	90.908.997.027,04	705,11
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	251.050.000,00	2.326.518.250,00	(2.075.468.250,00)	(89,21)
6	Retribusi Tempat Pelelangan	56.160.000,00	22.350.000,00	33.810.000,00	151,28
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.855.000,00	70.305.000,00	(26.450.000,00)	(37,62)
8	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	489.975.000,00	633.700.000,00	(143.725.000,00)	(22,68)
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	263.313.000,00	(263.313.000,00)	(100,00)
10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	804.486.065,00	440.700.710,00	363.785.355,00	82,55
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	435.620.000,00	(435.620.000,00)	(100,00)
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	597.164.000,00	158.358.000,00	438.806.000,00	277,10
13	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	266.235.000,00	0,00	266.235.000,00	0,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	578.105.000,00	0,00	578.105.000,00	0,00
15	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
16	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.603.962.050,00	5.950.000,00	1.598.012.050,00	26.857,35
	Subtotal Retrubsusi Jasa Usaha	4.715.992.115,00	4.356.814.960,00	359.177.155,00	8,24
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.599.324.495,00	670.066.804,00	929.257.691,00	138,68
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	196.771.489,92	190.722.060,00	6.049.429,92	3,17
	Subtotal Retrubsusi Perizinan Tertentu	1.796.095.984,92	860.788.864,00	935.307.120,92	108,66
	Jumlah	110.313.931.998,96	18.110.450.696,00	92.203.481.302,96	509,12

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp110.313.931.998,96 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.110.450.696,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp92.203.481.302,96 atau 509,12%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat **kenaikan** dan **penurunan** nilai retribusi antara Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

P



- a. Target Retribusi Jasa Umum dianggarkan senilai Rp115.813.391.556,00 dan telah direalisasikan senilai Rp103.801.843.899,04 atau 89,63%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Target Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp110.648.391.556,00 dan direalisasikan senilai Rp97.809.928.746,04 atau 88,40%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami **kenaikan** senilai Rp91.247.036.946,04 atau 1.390,35% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.562.891.800,00. Pemungutan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD. Adapun penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan diantaranya:

- a) Tagihan BPJS Kesehatan yang boleh diklaimkan ke kantor BPJS dan telah dibayarkan oleh BPJS kesehatan.
- b) Karena adanya peningkatan kunjungan pasien RSUD Talisayan.
- c) Tersedianya pelayanan spesialis pada RSUD Talisayan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis bedah.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp2.826.007.000,00 atau 113,04%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan mengalami **kenaikan** senilai Rp446.439.000,00 atau 18,76% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.379.568.000,00. **Kenaikan** realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bekerja sama dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakal dalam pemungutan retribusinya.

3) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp165.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp119.376.000,00 atau 72,35%. Penerimaan Retribusi Parkir mengalami **penurunan** senilai Rp21.552.000,00 atau 15,29% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp140.928.000,00. **Penurunan** Retribusi Pelayanan Parkir disebabkan Dinas Perhubungan melakukan kegiatan penertiban retribusi parkir belum secara maksimal yang saat ini pembayaran retribusi parkir masih dilakukan secara manual melalui pembayaran langsung di loket Dinas Perhubungan Berau.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp3.046.532.153,00 atau 121,86%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar mengalami **penurunan**

P



senilai Rp762.926.919,00 atau 20,03% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.809.459.072,00. Penurunan Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan karena masih banyaknya tunggakan yang berasal dari puluhan petak pedagang pasar yang kini belum menyelesaikan kewajibannya. Retribusi pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

- b. Target Retribusi Jasa Usaha dianggarkan senilai Rp4.086.340.800,00 dan telah direalisasikan senilai Rp4.715.992.115,00 atau 115,41%. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp251.050.000,00 atau 0,00%. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami **penurunan** senilai Rp2.075.468.250,00 atau 89,21% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.326.518.250,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan (SKB)
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- e) Sekretariat Daerah (Kantor Penghubung/Mess Berau)

2) Retribusi Tempat Pelelangan

Target Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp20.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp56.160.000,00 atau 280,80%. Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan mengalami **kenaikan** senilai Rp33.810.000 atau 151,28% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp22.350.000,00.

3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp52.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp43.855.000,00 atau 84,34%. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami **penurunan** senilai Rp26.450.000,00 atau 37,62% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp70.305.000,00.

4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Target Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dianggarkan senilai Rp610.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp489.975.000,00 atau 80,32%. Penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila mengalami **penurunan** senilai Rp143.725.000,00 atau 22,68% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp633.700.000,00. Penurunan realisasi dikarenakan menurunnya jumlah wisatawan asing maupun lokal didaerah

P



wisata di Kabupaten Berau sehingga pendapatan terhadap Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila menurun.

5) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Target Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp611.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp804.486.065,00 atau 131,67%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami **kenaikan** senilai Rp363.785.355,00 atau 82,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp440.700.710,00. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut oleh Dinas Perhubungan.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp328.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp597.164.000,00 atau 182,06%. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp438.806.000,00 atau 277,10% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp158.358.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perikanan.

7) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Retribusi rumah potong hewan berubah nomenklatur menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak. Target Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp222.850.000,00 dan direalisasikan senilai Rp266.235.000,00 atau 119,47%. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami **kenaikan** senilai Rp2.922.000,00 atau 1,11% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp263.313.000,00. Hal ini disebabkan oleh cukup tingginya konsumsi masyarakat terhadap hewan potong dan naik turunnya harga hewan potong. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berubah nomenklatur menjadi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dengan Anggaran Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp521.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp578.105.000,00 atau 110,96%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga mengalami **kenaikan** senilai Rp142.485.000,00 atau 32,71% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp158.358.000,00. Kenaikan dikarenakan banyak tempat usaha rekreasi baru.

9) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp25.000.000,00 dan direalisasikan

P



senilai Rp25.000.000,00 atau 100,00%. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami **penurunan** senilai Rp133.358.000,00 atau 84,21% jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp158.358.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perikanan.

10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Target Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.696.490.800,00 dan direalisasikan senilai Rp1.603.962.050,00 atau 94,54%. Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp1.598.012.050,00 atau 26,857,35% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.950.000,00.

- c. Target Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan senilai Rp684.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp1.796.095.984,92 atau 262,59%. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp504.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp1.599.324.495,00 atau 317,33%. Penerimaan Persetujuan Bangunan Gedung mengalami **kenaikan** senilai Rp929.257.691,00 atau 138,68% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp670.066.804,00. Kenaikan disebabkan semakin banyaknya pembangunan di Kabupaten Berau sehingga melonjaknya penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Target Retribusi TKA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp180.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp196.771.489,92 atau 109,32%. Penerimaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengalami **kenaikan** senilai Rp6.049.429,92 atau 3,17% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp190.722.060,00.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>11.397.496.922,15</u>	<u>17.986.298.143,26</u>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya dikelola Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Bagian Perekonomian) yaitu berupa dividen dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.



Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dividen PT BPD Kaltimara	11.369.643.845,00	11.369.643.845,15	100,00
2	Dividen PT Hutan Sanggam Berau	28.000.000,00	27.853.077,00	99,48
3	Dividen PT. Indo Pusaka Berau	0,00	0,00	0,00
4	Dividen Perumda Air Minum Batiwakal	600.000.000,00	0,00	0,00
5	Dividen Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.997.643.845,00	11.397.496.922,15	95,00

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp11.997.643.845,00 dengan realisasi senilai Rp11.397.496.922,15 atau 95,00%.

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Deviden PT BPD Kaltimara	11.369.643.845,15	14.981.036.885,26	(3.611.393.040,11)	(24,11)
2	Dividen PT Hutan Sanggam Berau	27.853.077,00	28.658.559,00	(805.482,00)	(2,81)
3	Deviden PT. Indo Pusaka Berau	0,00	1.499.991.300,00	(1.499.991.300,00)	(100,00)
4	Deviden Perumda Air Minum Batiwakal	0,00	1.476.611.399,00	(1.476.611.399,00)	(100,00)
5	Deviden Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.397.496.922,15	17.986.298.143,26	(6.588.801.221,11)	(36,63)

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp11.397.496.922,15 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.986.298.143,26 mengalami **penurunan** senilai Rp6.588.801.221,11 atau 36,63%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah Mengalami **penurunan** karena tidak adanya realisasi pada PT Indo Pusaka Berau, Perumda Air Minum Batiwakal dan Perumda Bhakti Praja.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain - Lain PAD Yang Sah	259.323.961.155,07	215.794.516.778,34

P



Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang terdiri dari 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Berau yaitu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	171.535.851,00	42,88
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	15.544.432.794,00	16.348.756.794,68	105,17
4	Pendapatan Bunga	49.222.664.000,00	218.517.001.091,75	443,94
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.818.705.000,00	20.111.997.343,82	228,06
6	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	18.000.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	161.779.799,91	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.080.351.647,60	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	67.203.389,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.076.953.169,83	0,00
11	Pendapatan BLUD	1.075.480.000,00	763.403.934,48	70,98
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	24.978.133,00	0,00
Jumlah		93.061.281.794,00	259.323.961.155,07	278,66

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah senilai Rp93.061.281.794,00 dengan realisasi senilai Rp259.323.961.155,07 atau 278,66%.

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	171.535.851,00	1.640.646.616,88	(1.469.110.765,88)	(89,54)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	35.993.000,00	(35.993.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro	16.348.756.794,68	9.993.490.434,68	6.355.266.360,00	63,59
4	Pendapatan Bunga	218.517.001.091,75	87.224.951.102,32	131.292.049.989,43	150,52
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.111.997.343,82	18.336.886.530,20	1.775.110.813,62	9,68

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
6	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	161.779.799,91	2.383.324.421,20	(2.221.544.621,29)	(93,21)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.080.351.647,60	717.916.612,00	362.435.035,60	50,48
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	67.203.389,00	29.598.682,00	37.604.707,00	127,05
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.076.953.169,83	0,00	2.076.953.169,83	0,00
11	Pendapatan BLUD	763.403.934,48	95.399.283.552,06	(94.635.879.617,58)	(99,20)
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	24.978.133,00	32.425.827,00	(7.447.694,00)	(22,97)
	Jumlah	259.323.961.155,07	215.794.516.778,34	43.529.444.376,73	20,17

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah senilai Rp259.323.961.155,07 dan Tahun Anggaran 2024 merealisasikan senilai Rp215.794.516.778,34 mengalami **kenaikan** senilai Rp43.529.444.376,73 atau 20,17%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat kenaikan dan penurunan nilai Lain-lain PAD yang sah antara Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp400.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp171.535.851,00 atau 42,88% mengalami **penurunan** senilai Rp1.469.110.765,88 atau 89,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.640.646.616,88.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00%. mengalami **penurunan** senilai Rp35.993.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp35.993.000,00.

c. Pendapatan Jasa Giro

Target Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp15.544.432.794,00 dan direalisasikan senilai Rp16.348.756.794,68 atau 105,17% mengalami **kenaikan** senilai Rp6.355.266.360,00 atau 63,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.993.490.434,68. Naik turunnya Pendapatan Jasa Giro dipengaruhi jumlah dana yang ada dalam RKUD, jika anggaran dalam RKUD tinggi maka pendapatan jasa giro akan meningkat begitu pula sebaliknya.

(Handwritten signature)



d. Pendapatan Bunga

Target Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp49.222.664.000,00 dan direalisasikan senilai Rp218.517.001.091,75 atau 443,94% mengalami **kenaikan** senilai Rp131.292.049.989,43 atau 150,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp87.224.951.102,32. Penurunan terjadi dikarenakan pada tahun tersebut adanya pengurangan deposito Bank dan suku bunga kredit mengalami penurunan, Penurunan bunga itu otomatis akan mengurangi manfaat yang bisa diperoleh.

e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Target Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp8.818.705.000,00 dan direalisasikan Rp20.111.997.343,82 atau 228,06% mengalami **kenaikan** senilai Rp1.775.110.813,62 atau 9,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.336.886.530,20. Kenaikan realisasi dikarenakan adanya setoran pengembalian kelebihan volume pekerjaan dan setoran lainnya.

f. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing.

Target Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing Tahun Anggaran 2025 Senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp0,00. Tidak ada realisasi dikarenakan kesalahan dalam penganggaran.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Target Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 namun ada realisasi senilai Rp161.779.799,91 atau 00,00% mengalami **penurunan** senilai Rp2.221.544.621,29 atau 93,21% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.383.324.421,20. Penurunan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor begitu baik serta tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran dalam pekerjaan menurun serta progress pelaksanaan pekerjaan tepat waktu sehingga denda keterlambatan pekerjaan menurun.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Target Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 namun ada realisasi senilai Rp1.080.351.647,60 atau 0,00% mengalami **kenaikan** senilai Rp362.435.035,60 atau 50,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp717.916.612,00. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan tunggakan pokok pajak daerah yang melebihi masa waktu pembayaran sehingganya kenaikan denda pajak juga meningkat.

P



i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan namun ada realiasi senilai Rp67.203.389,00 atau 0,00% mengalami **kenaikan** senilai Rp37.604.707,00 atau 127,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29.598.682,00.

j. Pendapatan dari Pengembalian

Target Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan, namun terdapat realisasi senilai Rp2.076.953.169,83.

k. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.075.480.000,00 dan direalisasikan senilai Rp763.403.934,48 atau 70,98% mengalami **penurunan** senilai Rp94.635.879.617,58 atau 99,20% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp95.399.283.552,06. Menurunnya realisasi pendapatan ini di tahun 2025 karena pendapatan Retribusi BLUD bukan lagi masuk dikomponen dari Pendapatan BLUD Lain-lain PAD tetapi masuk di Pendapatan Retribusi .

l. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp24.978.133,00 atau 0,00% mengalami **penurunan** senilai Rp7.447.694,00 atau 22,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp32.425.827,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer	<u>4.519.561.731.619,00</u>	<u>5.774.506.770.500,00</u>

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.919.303.252.265,72	3.663.934.001.298,00	93,48
-	Dana Bagi Hasil	3.252.374.465.265,72	2.966.189.771.800,00	91,20
-	Dana Alokasi Umum	513.054.929.000,00	559.545.218.013,00	109,06
-	Dana Alokasi Khusus	153.873.858.000,00	138.199.011.485,00	89,81

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	108.529.946.000,00	90.623.229.844,00	83,50
-	Dana Desa	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36
-	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,04
-	Pendapatan Bagi Hasil	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22
-	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	4.949.130.788.110,72	4.519.561.731.619,00	91,32

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Pendapatan Transfer senilai Rp4.949.130.788.110,72 dan direalisasikan senilai Rp4.519.561.731.619,00 atau 91,32%.

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.663.934.001.298,00	4.847.083.601.192,00	(1.183.149.599.894,00)	(24,41)
-	Dana Bagi Hasil	2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00	(1.087.193.793.200,00)	(26,82)
-	Dana Alokasi Umum	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00	(29.445.784.315,00)	(5,00)
-	Dana Alokasi Khusus	138.199.011.485,00	204.709.033.864,00	(66.510.022.379,00)	(32,49)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	90.623.229.844,00	112.337.773.000,00	(21.714.543.156,00)	(19,33)
-	Dana Desa	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00	(11.844.702.156,00)	(12,41)
-	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	765.004.500.477,00	815.085.396.308,00	(50.080.895.831,00)	(6,14)
-	Pendapatan Bagi Hasil	427.404.500.477,00	459.125.396.308,00	(31.720.895.831,00)	(6,91)
-	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah Pendapatan Transfer	4.519.561.731.619,00	5.774.506.770.500,00	(1.254.945.038.881,00)	(21,73)

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Transfer senilai Rp4.519.561.731.619,00 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.774.506.770.500,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.254.945.038.881,00 atau 21,73%.

Dari tabel diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

(Handwritten signature)



Gambar 5.5 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025



Gambar 5.6 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan disajikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2025	Tahun 2024
	3.663.934.001.298,00	4.847.083.601.192,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 setelah adanya perubahan nomenkatur terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tahun Anggaran 2024 sebelum adanya perubahan nomenklatur masih dalam satu bagian yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Uraian Anggaran



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dalam mendanai kewenangannya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.252.374.465.265,72	2.966.189.771.800,00	91,20
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	513.054.929.000,00	559.545.218.013,00	109,06
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.873.858.000,00	138.199.011.485,00	89,81
Jumlah		3.919.303.252.265,72	3.663.934.001.298,00	93,48

Dari penjelasan tabel diatas Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.919.303.252.265,72 dan direalisasikan senilai Rp3.663.934.001.298,00 atau 93,48%.

**Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00	(1.087.193.793.200,00)	(26,82)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00	(29.445.784.315,00)	(5,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	138.199.011.485,00	204.709.033.864,00	(66.510.022.379,00)	(32,49)
Jumlah		3.663.934.001.298,00	4.847.083.601.192,00	(1.183.149.599.894,00)	(24,41)

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai Rp3.663.934.01.298,00 dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.847.083.601.192,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.183.149.599.894,00 atau 24,41%.

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil

	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Bagi Hasil	2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00

P



Anggaran Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.252.374.465.265,72 dengan Realisasi senilai Rp2.966.189.771.800,00 atau 91,20% dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	129.786.577.000,00	158.765.479.300,00	122,33
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	62.849.704.700,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	56.236.093.000,00	1.084.695.000,00	1,93
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	16.960.086.000,00	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	48.738.956.000,00	45.204.701.000,00	92,75
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	8.200.341.000,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.999.017.903.265,72	2.657.472.736.000,00	88,61
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.357.268.000,00	4.414.360.800,00	60,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.367.337.000,00	3.367.337.000,00	100,00
12	DBH Sawit	7.870.331.000,00	7.870.331.000,00	100,00
Jumlah		3.252.374.465.265,72	2.966.189.771.800,00	91,20

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.966.189.771.800,00 mengalami **penurunan** senilai Rp885.569.714.247,00 atau 26,82% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.053.383.565.000,00 dengan rincian perbandingan realisasi pada tabel berikut :

**Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	158.765.479.300,00	45.872.254.465,00	112.893.224.835,00	246,10
2	DBH PPh Pasal 21	62.849.704.700,00	24.421.164.600,00	38.428.540.100,00	157,36
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.084.695.000,00	8.763.872.200,00	(7.679.177.200,00)	(87,62)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	21.000,00	(21.000,00)	0,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.960.086.000,00	39.717.237.135,00	(22.757.151.135,00)	(57,30)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	45.204.701.000,00	46.954.028.600,00	(1.749.327.600,00)	(3,73)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	8.200.341.000,00	0,00	8.200.341.000,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.657.472.736.000,00	3.844.519.642.750,00	(1.187.046.906.750,00)	(30,88)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.414.360.800,00	17.846.819.000,00	(13.432.458.200,00)	(75,27)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	2.520.152.250,00	(2.520.152.250,00)	100,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.367.337.000,00	4.617.478.000,00	(1.250.141.000,00)	(27,07)
12	DBH Sawit	7.870.331.000,00	18.150.895.000,00	(10.280.564.000,00)	(56,64)
Jumlah		2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00	(1.087.193.793.200,00)	(26,82)

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai berikut :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp158.765.479.300,00 atau 122,33% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp129.786.577.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp112.893.224.835,00 atau 246,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp45.872.254.465,00. Terjadi **kenaikan** realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2025 disebabkan realisasi transfer pusat yang masuk ke daerah melebihi dari target yang sudah di tetapkan.
- DBH PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp62.849.704.700,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp38.428.540.100,00 atau 157,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp24.421.164.600,00. Penurunan dikarenakan penambahan nilai transfer.
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp1.084.695.000,00 atau 1,92% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp56.236.093.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp7.679.177.200,00 atau 87,62%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.763.872.200,00.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00, mengalami penurunan 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp21.000,00.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp16.960.086.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai

P



- Rp22.757.151.135,00 atau 57,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp39.717.237.135,00. Terjadi penurunan dikarenakan transfer pusat ke daerah berkurang karena efisiensi anggaran.
- f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp45.204.701.000,00 atau 92,75% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp48.738.956.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.749.327.600,00 atau 3,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp46.954.028.600,00. Terjadi penurunan dikarenakan transfer pusat ke berkurang karena efisiensi anggaran.
- g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp8.200.341.000,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 atau 0,00%. Mengalami **kenaikan** senilai Rp8.200.341.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Terjadi kenaikan dikarenakan adanya realisasi namun target pagu Anggaran Tahun 2025 tidak dianggarkan.
- h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp2.657.472.736.000,00 atau 88,61% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp2.999.017.903.265,72 mengalami **penurunan** senilai Rp1.187.046.906.750,00 atau 30,88% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.844.519.642.750,00. Terjadi penurunan realisasi dikarenakan transfer pusat berkurang karena efisiensi anggaran.
- i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp4.414.360.800,00 atau 60,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp7.357.268.000,00, mengalami **penurunan** senilai Rp13.432.458.200,00 atau 75,27%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.846.819.000,00. Terjadi penurunan dikarenakan kurangnya transfer Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- j. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00, mengalami **penurunan** senilai Rp2.520.152.250,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024.
- k. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.367.337.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp3.367.337.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.250.141.000,00 atau 27,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.617.478.000,00.

A



Terjadi **penurunan** realisasi Tahun 2025 dikarenakan realisasi tranfser dan target anggaran kurang dari yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan perpres.

1. DBH Sawit Bagi Rata Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp7.870.331.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.870.331.000,00 atau 100,00% dan mengalami **penurunan** senilai Rp10.280.564.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.150.895.000,00 atau 56,64%.

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>559.545.218.013,00</u>	<u>588.991.002.328,00</u>

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp559.545.218.013,00 atau 109,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp513.054.929.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp588.991.002.328,00, Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum mengalami **penurunan** senilai Rp29.445.784.315,00 atau 5,00%.

5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp138.199.011.485,00 atau 89,81% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp153.873.858.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp204.709.033.864,00, Pendapatan Dana Alokasi Khusus mengalami **penurunan** senilai Rp66.510.022.379,00 atau 32,49%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.3.1 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Fisik

Pendapatan Transfer - Dana Alokasi - Khusus Fisik	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>934.635.000,00</u>	<u>80.364.880.846,00</u>

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2025 senilai Rp978.979.000,00 dengan realisasi senilai Rp934.635.000,00 atau 95,47%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%.
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Fisik				

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%. Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	237.479.000,00	224.775.000,00	94,65
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00	198.750.000,00	99,38
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	541.500.000,00	511.110.000,00	94,39
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		978.979.000,00	934.635.000,00	95,47

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2025 senilai Rp934.635.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp79.430.245.846,00 atau 98,84% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp80.364.880.846,00. Rincian realisasi DAK Fisik Tahun Anggran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%. Realisasi
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Fisik					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	224.775.000,00	268.401.000,00	(43.626.000,00)	(16,25)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	198.750.000,00	1.645.194.000,00	(1.446.444.000,00)	(87,92)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	511.110.000,00	5.191.408.680,00	(4.680.298.680,00)	(90,15)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	4.184.437.540,00	(4.184.437.540,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	101.409.000,00	(101.409.000,00)	(100,00)

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%.
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	4.695.319.180,00	(4.695.319.180,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	1.958.974.649,00	(1.958.974.649,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	14.433.828.072,00	(14.433.828.072,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	39.919.421.425,00	(39.919.421.425,00)	(100,00)
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	6.854.311.300,00	(6.854.311.300,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	1.112.176.000,00	(1.112.176.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		934.635.000,00	80.364.880.846,00	(79.430.245.846,00)	(98,84)

5.1.1.2.1.3.2 Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	137.264.376.485,00	124.344.153.018,00

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025 senilai Rp152.894.879.000,00 dengan realisasi senilai Rp137.264.376.485,00 atau 89,78. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.262.202.000,00	48.646.429.180,00	98,75
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	1.118.750.000,00	1.118.750.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	67.141.380.000,00	62.276.025.436,00	92,75
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.910.500.000,00	914.102.541,00	47,85
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.076.609.000,00	2.403.990.029,00	78,14
7	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.762.342.000,00	5.287.090.903,00	91,75
8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.016.460.000,00	1.964.973.950,00	97,45
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.856.831.000,00	3.577.532.123,00	45,53
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	291.747.000,00	291.747.000,00	100,00



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.684.658.000,00	7.302.069.312,00	68,34
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.516.900.000,00	3.024.836.011,00	86,01
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	200.330.000,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00
19	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	256.500.000,00	256.500.000,00	100,00
	Jumlah	152.894.879.000,00	137.264.376.485,00	89,78

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025 senilai Rp137.264.376.485,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp12.920.223.467,00 atau 10,39% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp124.344.153.018,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.646.429.180,00	48.017.939.126,00	628.490.054,00	1,31
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	1.118.750.000,00	0,00	1.118.750.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	1.232.500.000,00	(1.232.500.000,00)	(100,00)
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.276.025.436,00	45.623.286.000,00	16.652.739.436,00	36,50
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	914.102.541,00	2.678.071.000,00	(1.763.968.459,00)	(65,87)
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.403.990.029,00	3.044.013.000,00	(640.022.971,00)	(21,03)
7	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.287.090.903,00	4.945.740.544,00	341.350.359,00	6,90
8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.964.973.950,00	1.835.467.881,00	129.506.069,00	7,06
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.577.532.123,00	3.036.206.711,00	541.325.412,00	17,83
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	291.747.000,00	0,00	291.747.000,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.302.069.312,00	8.746.069.380,00	(1.444.000.068,00)	(16,51)
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.024.836.011,00	2.288.873.008,00	735.963.003,00	32,15
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	203.411.880,00	(203.411.880,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	179.981.088,00	(179.981.088,00)	(100,00)

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	151.452.400,00	(151.452.400,00)	(100,00)
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	2.286.141.000,00	(2.286.141.000,00)	(100,00)
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	200.330.000,00	0,00	200.330.000,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
19	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	256.500.000,00	0,00	256.500.000,00	0,00
	Jumlah	137.264.376.485,00	124.344.153.018,00	12.920.223.467,00	10,39

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024
Pemerintah Pusat Lainnya	90.623.229.844,00	112.337.773.000,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp108.529.946.000,00 dengan realisasi senilai Rp90.623.229.844,00 atau 83,50%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Desa	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	6.999.290.000,00	100,00
	Jumlah	108.529.946.000,00	90.623.229.844,00	83,50

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp90.623.229.844,00 mengalami **penurunan** senilai Rp21.714.543.156,00 atau 19,33% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp112.337.773.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Desa	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00	(11.844.702.156,00)	(12,41)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
	Jumlah	90.623.229.844,00	112.337.773.000,00	(21.714.543.156,00)	(19,33)

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp101.530.656.000,00 dengan realisasi senilai Rp83.623.939.844,00 atau 82,36%. Tidak tercapainya target realisasi dikarenakan efisiensi anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Desa	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36
	Jumlah	101.530.656.000,00	83.623.939.844,00	82,36

*)Rincian anggaran pendapatan Dana Desa pada **Lampiran 1**

Dana Desa Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp83.623.939.844,00 mengalami **penurunan** senilai Rp11.844.702.156,00 atau 12,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp95.468.642.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Desa	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00	(11.844.702.156,00)	(12,41)
	Jumlah	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00	(11.844.702.156,00)	(12,41)

*)Rincian realisasi pendapatan Dana Desa pada **Lampiran 1**

5.1.1.2.2.2 Insentif Fiskal

Anggaran Insentif Fiskal Tahun 2025 senilai Rp6.999.290.000,00 dengan realisasi senilai Rp6.999.290.000,00 atau 100,00%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp16.869.131.000,00 mengalami penurunan senilai Rp9.869.841.000,00 atau 58,51%.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>765.004.500.477,00</u>	<u>815.085.396.308,00</u>

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp921.297.589.845,00 dengan realisasi senilai Rp765.004.500.477,00

(Handwritten signature)



atau 83,04%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22
2	Bantuan keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00
	Jumlah	921.297.589.845,00	765.004.500.477,00	83,04

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp765.004.500.477,00 mengalami **penurunan** senilai Rp50.080.895.831,00 atau 6,14% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp815.085.396.308,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5.28 Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	427.404.500.477,00	459.125.396.308,00	(31.720.895.831,00)	(6,91)
2	Bantuan keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah	765.004.500.477,00	815.085.396.308,00	(50.080.895.831,00)	(6,14)

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil	<u>427.404.500.477,00</u>	<u>459.125.396.308,00</u>

Anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp583.697.589.845,00 dengan realiasi senilai Rp427.404.500.477,00 atau 73.22%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.064.371.000,00	80,60
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.531.112.000,00	93,79
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	567.972.608.845,00	402.468.690.845,00	93,58
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.493.116.000,00	704.616.000,00	65,16



(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.231.865.000,00	17.635.710.632,00	95,26
	Jumlah	583.697.589.845,00	427.404.500.477,00	73,22

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp427.404.500.477 mengalami **penurunan** senilai Rp31.720.895.831,00 atau 6,91% dari Tahun Anggaran 2024 Rp459.125.396.308,00. Kenaikan realisasi terjadi karena bertambahnya pendapatan pajak bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor sesuai SK Gubernur dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.064.371.000,00	28.590.282.000,00	(25.525.911.000,00)	(89,28)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.531.112.000,00	38.281.610.000,00	(34.750.498.000,00)	(90,78)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	402.468.690.845,00	375.153.405.000,00	27.315.285.845,00	7,28
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	704.616.000,00	759.297.000,00	(54.681.000,00)	(7,20)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.635.710.632,00	16.340.802.308,00	1.294.908.324,00	7,92
	Jumlah	427.404.500.477,00	459.125.396.308,00	(31.720.895.831,00)	(6,91)

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan

Tahun 2025
337.600.000.000,00

Tahun 2024
355.960.000.000,00

Anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp337.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp337.600.000.000,00 atau 100,00%. Anggaran Bantuan Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00
	Jumlah	337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	100,00

(Handwritten signature)



Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp337.600.000.000,00 mengalami **penurunan** Rp18.360.000.000,00 atau 5,16% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp355.960.000.000,00. **Penurunan** realisasi Tahun Anggaran 2025 terjadi karena sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan SK Gubernur Kalimantan Timur. Realisasi Bantuan Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>26.059.605.270,00</u>	<u>76.039.376.420,69</u>

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 senilai Rp17.643.349.800,00 dengan realisasi senilai Rp26.059.605.270,00 atau 147,70% yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.339.290.200,00	12.629.276.824,00	94,68
2	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	13.203.878.146,00	0,00
3	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	4.304.059.600,00	226.450.300,00	5,26
	Jumlah	17.643.349.800,00	26.059.605.270,00	147,70

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26.059.605.270,00 mengalami **penurunan** senilai R49.979.771.150,69 atau 65,73% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp76.039.376.420,69 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

P



**Tabel 5.34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024/5	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.629.276.824,00	10.420.888.331,00	2.208.388.493,00	21,19
2	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	13.203.878.146,00	65.618.488.089,69	(52.414.609.943,69)	(79,88)
3	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	226.450.300,00	0,00	226.450.300,00	0,00
Jumlah		26.059.605.270,00	76.039.376.420,69	(49.979.771.150,69)	(65,73)

5.1.2 BELANJA DAERAH

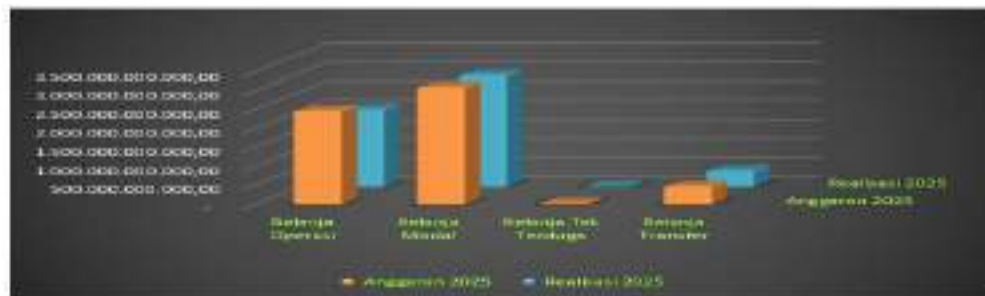
Belanja Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	5.472.389.282.534,18	6.411.776.301.938,05

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp6.041.361.617.000,00 dengan realisasi Rp5.472.389.282.534,18 atau 90,58%. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	2.458.375.030.613,47	2.053.960.067.042,93	83,55
2	Belanja Modal	3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96
3	Belanja Tak Terduga	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63
4	Belanja Transfer	463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02
	Jumlah	6.041.361.617.000,00	5.472.389.282.534,18	90,58



**Gambar 5.7 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025**

[Handwritten signature]

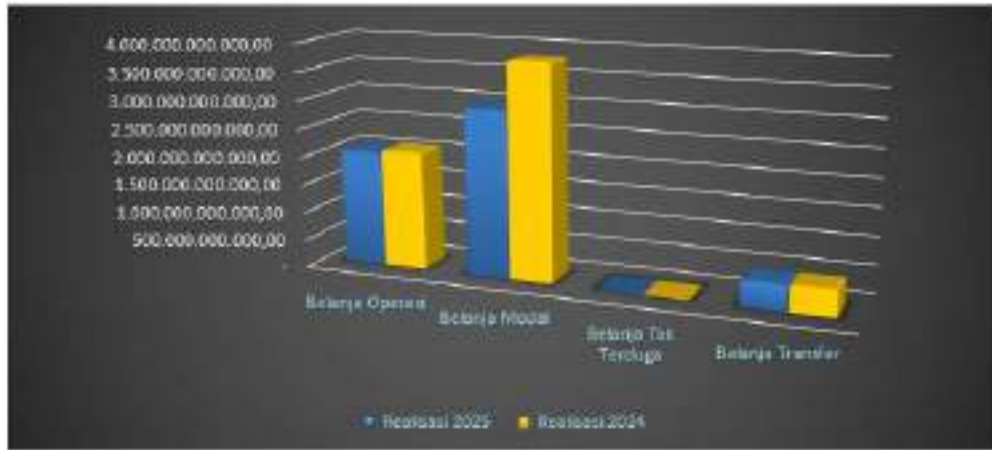


Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.472.389.282.534,18 mengalami **penurunan** Rp939.387.019.403,87 atau 14,65% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.411.776.301.938,05. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Operasi	2.053.960.067.042,93	2.111.530.856.755,59	(57.570.789.712,66)	(2,73)
2	Belanja Modal	2.967.027.122.303,25	3.828.768.208.935,46	(861.741.086.632,21)	(22,51)
3	Belanja Tak Terduga	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
4	Belanja Transfer	445.540.593.188,00	465.702.436.664,00	(20.161.843.476,00)	(4,33)
	Jumlah	5.472.389.282.534,18	6.411.776.301.938,05	(939.387.019.403,87)	(14,65)



Gambar 5.8 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.053.960.067.042,93 mengalami **penurunan** senilai Rp57.570.789.712,66 atau 2,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.111.530.856.755,59. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.967.027.122.303,25 mengalami **penurunan** senilai Rp861.741.086.632,21 atau 22,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.828.768.208.935,46. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.861.500.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp86.700.417,00 atau 1,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024

(Handwritten signature)



senilai Rp5.774.799.583,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 senilai Rp445.540.593.188,00 mengalami **penurunan** senilai Rp20.161.843.476,00 atau 4,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp465.702.436.664,00. Rincian Belanja Daerah disajikan sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi

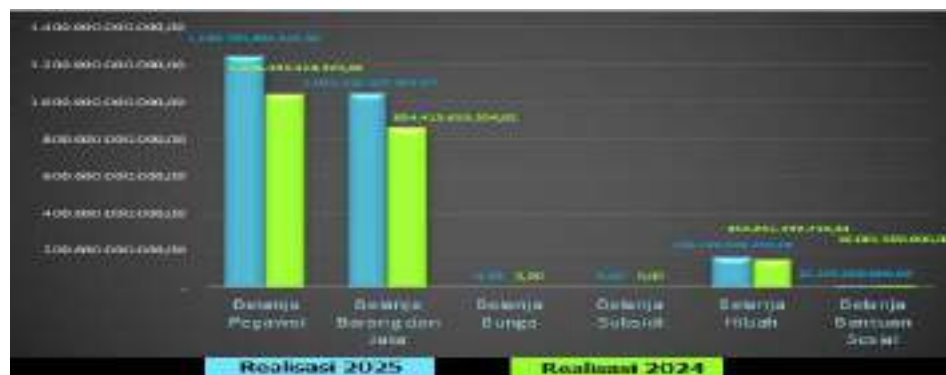
	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Operasi	<u>2.053.960.067.042,93</u>	<u>2.111.530.856.755,59</u>

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp2.458.375.030.613,47 dengan realisasi senilai Rp2.053.960.067.042,93 atau 83,55%. Rincian Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	1.240.784.884.524,50	1.036.493.514.973,00	83,54
2	Belanja Barang dan Jasa	1.041.220.505.794,97	854.413.659.354,62	82,06
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	166.224.640.294,00	153.051.392.715,31	92,08
6	Belanja Bantuan Sosial	10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,59
	Jumlah	2.458.375.030.613,47	2.053.960.067.042,93	83,55



Gambar 5.9 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

A

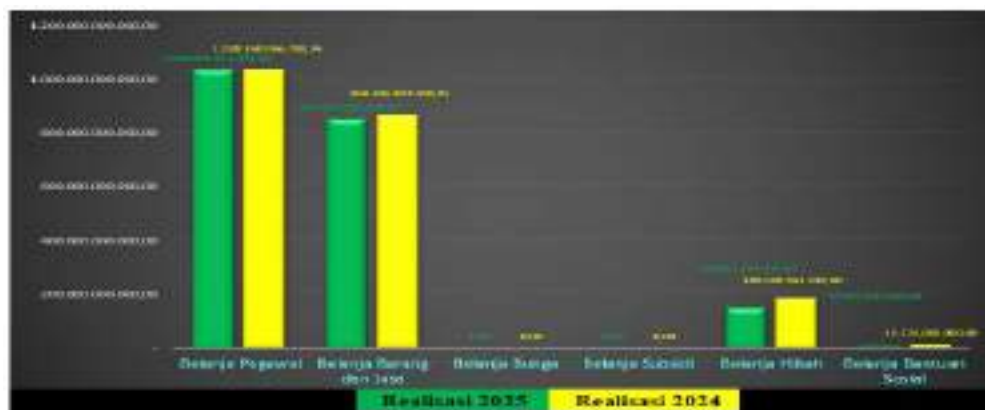


Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp2.053.960.067.042,93 mengalami **penurunan** senilai Rp57.570.789.712,66 atau 2,73% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.111.530.856.755,59. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

**Tabel 5.38 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	1.036.493.514.973,00	1.038.160.066.708,34	(1.666.551.735,34)	(0,16)
2	Belanja Barang dan Jasa	854.413.659.354,62	868.596.837.598,25	(14.183.178.243,63)	(1,63)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	153.051.392.715,31	189.599.952.449,00	(36.548.559.733,69)	(19,28)
6	Belanja Bantuan Sosial	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
	Jumlah	2.053.960.067.042,93	2.111.530.856.755,59	(57.570.789.712,66)	(2,73)



**Gambar 5.10 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi yaitu sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>1.036.493.514.973,00</u>	<u>1.038.160.066.708,34</u>

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/PPPK Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS / Non PNS dan uang lembur. Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

[Handwritten signature]



senilai Rp1.240.784.884.524,50 dengan realisasi senilai Rp1.036.493.514.973,00 atau 83,54% yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	582.097.614.379,50	476.440.970.481,00	81,85
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	622.833.861.081,00	527.315.626.638,00	84,66
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.297.502.940,00	20.172.941.944,00	90,47
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.357.166.124,00	669.011.910,00	49,29
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	925.500.000,00	912.480.000,00	98,59
7	Belanja Pegawai BLUD	11.273.240.000,00	10.982.484.000,00	97,42
	Jumlah	1.240.784.884.524,50	1.036.493.514.973,00	83,54



Gambar 5.11 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.036.493.514.973,00 mengalami **penurunan** Rp1.666.551.735,34 atau 0,16% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34 yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

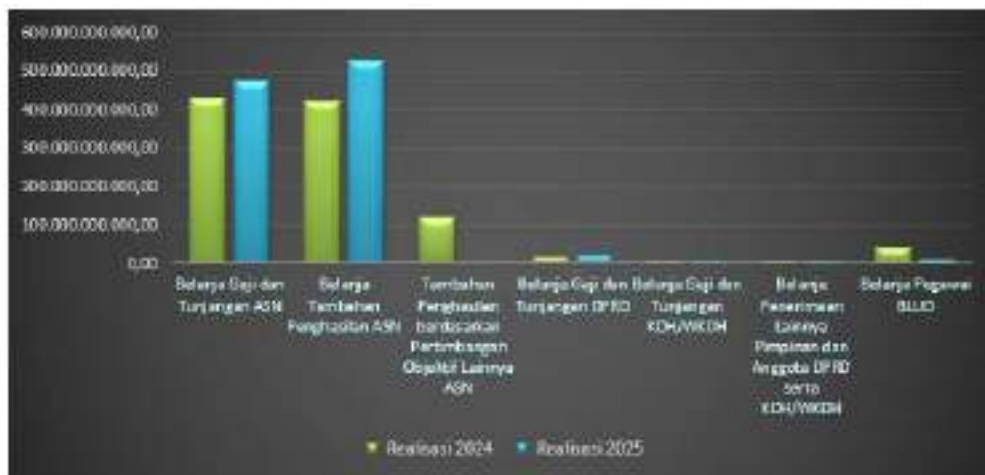
No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	476.440.970.481,00	432.431.609.487,00	44.009.360.994,00	10,18
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	527.315.626.638,00	423.491.512.345,00	103.824.114.293,00	24,52

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	118.309.086.797,05	(118.309.086.797,05)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.172.941.944,00	19.235.787.269,00	937.154.675,00	4,87
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	669.011.910,00	448.013.086,00	220.998.824,00	49,33
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	860.400.000,00	52.080.000,00	6,05
7	Belanja Pegawai BLUD	10.982.484.000,00	43.383.657.724,29	(32.401.173.724,29)	(74,69)
	Jumlah	1.036.493.514.973,00	1.038.160.066.708,34	(1.666.551.735,34)	(0,16)



Gambar 5.12 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.240.784.884.524,50 dengan realisasi senilai Rp1.036.493.514.973,00 atau 83,54%. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing AKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	488.828.061.467,00	424.026.583.023,00	86,74
2	Dinas Kesehatan	286.435.898.658,00	243.458.424.357,00	85,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24.051.331.570,00	18.917.768.328,00	78,66
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	7.845.964.266,00	6.383.449.624,00	81,36
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	14.790.683.120,00	10.750.201.136,00	72,68
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.105.699.305,50	8.493.888.331,00	76,48
7	Dinas Sosial	10.095.212.777,00	5.771.618.473,00	57,17

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
8	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	7.175.162.984,00	5.983.216.567,00	83,39
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	8.770.791.995,00	6.757.225.081,00	77,04
10	Dinas Pangan	6.650.991.958,00	5.784.814.112,00	86,98
11	Dinas Pertanahan	5.159.333.176,00	3.962.858.943,00	76,81
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	18.284.439.652,00	12.897.738.026,00	70,54
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	10.208.627.161,00	7.569.286.964,00	74,15
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	6.513.152.929,00	5.853.735.370,00	89,88
15	Dinas Perhubungan	17.846.255.005,00	14.394.769.907,00	80,66
16	Dinas Komunikasi & Informatika	9.582.105.385,00	7.318.536.510,00	76,38
17	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	16.238.361.060,00	9.296.684.766,00	57,25
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.071.143.495,00	5.991.953.785,00	84,74
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	7.637.733.604,00	6.573.350.044,00	86,06
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	10.688.294.207,00	8.122.046.013,00	75,99
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8.356.620.832,00	7.328.128.822,00	87,69
22	Dinas Perikanan	8.346.193.767,00	6.885.560.940,00	82,50
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	26.701.857.300,00	20.922.066.186,00	78,35
24	Dinas Perkebunan	11.079.257.394,00	8.189.943.872,00	73,92
25	Sekretariat Daerah	33.873.326.597,00	28.002.349.260,00	82,67
26	Inspektorat	13.183.750.820,00	12.168.696.322,00	92,30
27	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	10.036.828.191,00	7.540.850.919,00	75,13
28	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	12.756.861.701,00	10.391.302.716,00	81,46
29	Badan Pendapatan Daerah	20.857.504.167,00	14.730.457.604,00	70,62
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.565.552.145,00	7.875.097.401,00	82,33
31	Sekretariat DPRD	33.014.481.255,00	29.152.641.817,00	88,30
32	Kec Tg Redeb	13.490.695.603,00	11.239.758.754,00	83,31
33	Kec Gn Tabur	7.159.938.281,00	5.820.315.465,00	81,29
34	Kec Sambaliung	6.917.154.174,00	5.587.867.157,00	80,78
35	Kec Teluk Bayur	7.776.845.633,00	6.725.190.935,00	86,48
36	Kec Segah	3.482.588.779,00	3.233.838.629,00	92,86
37	Kec Kelay	3.266.988.855,00	2.766.646.095,00	84,68
38	Kec Pulau Derawan	3.636.937.333,00	3.108.153.928,00	85,46
39	Kec Talisayan	4.352.048.186,00	3.574.088.993,00	82,12
40	Kec Biduk - Biduk	4.536.262.974,00	3.904.632.105,00	86,08
41	Kec Maratua	4.753.317.870,00	3.895.547.798,00	81,95
42	Kec Tabalar	3.710.452.496,00	3.138.478.639,00	84,58
43	Kec Batu Putih	3.757.259.094,00	3.092.204.344,00	82,30
44	Kec Biatan	3.228.010.902,00	2.546.200.100,00	78,88

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
45	Badan Kesbang, Politik & Linmas	7.964.906.401,00	6.365.346.812,00	79,92
	Jumlah	1.240.784.884.524,50	1.036.493.514.973,00	83,54

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.036.493.514.973,00 mengalami penurunan senilai Rp1.666.551.735,34 atau 0,16% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024 pada masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	424.026.583.023,00	387.444.304.646,00	36.582.278.377,00	9,44
2	Dinas Kesehatan	243.458.424.357,00	273.550.115.733,34	(30.091.691.376,34)	(11,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	18.917.768.328,00	29.821.959.090,00	(10.904.190.762,00)	(36,56)
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	6.383.449.624,00	7.177.868.546,00	(794.418.922,00)	(11,07)
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	10.750.201.136,00	8.010.056.461,00	2.740.144.675,00	34,21
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.493.888.331,00	7.025.016.841,00	1.468.871.490,00	20,91
7	Dinas Sosial	5.771.618.473,00	6.157.899.083,00	(386.280.610,00)	(6,27)
8	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5.983.216.567,00	6.180.676.613,00	(197.460.046,00)	(3,19)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	6.757.225.081,00	7.656.039.463,00	(898.814.382,00)	(11,74)
10	Dinas Pangan	5.784.814.112,00	6.698.129.682,00	(913.315.570,00)	(13,64)
11	Dinas Pertanahan	3.962.858.943,00	4.248.316.328,00	(285.457.385,00)	(6,72)
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	12.897.738.026,00	12.331.234.256,00	566.503.770,00	4,59
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	7.569.286.964,00	6.540.874.787,00	1.028.412.177,00	15,72
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5.853.735.370,00	6.510.999.944,00	(657.264.574,00)	(10,09)
15	Dinas Perhubungan	14.394.769.907,00	14.568.557.230,00	(173.787.323,00)	(1,19)
16	Dinas Komunikasi & Informatika	7.318.536.510,00	7.338.942.030,00	(20.405.520,00)	(0,28)
17	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	9.296.684.766,00	10.333.235.825,00	(1.036.551.059,00)	(10,03)
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.991.953.785,00	5.991.096.799,00	856.986,00	0,01
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	6.573.350.044,00	7.162.278.718,00	(588.928.674,00)	(8,22)
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	8.122.046.013,00	8.060.267.799,00	61.778.214,00	0,77
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	7.328.128.822,00	8.282.924.327,00	(954.795.505,00)	(11,53)
22	Dinas Perikanan	6.885.560.940,00	7.190.222.035,00	(304.661.095,00)	(4,24)
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	20.922.066.186,00	19.071.845.427,00	1.850.220.759,00	9,70
24	Dinas Perkebunan	8.189.943.872,00	8.947.868.277,00	(757.924.405,00)	(8,47)

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
25	Sekretariat Daerah	28.002.349.260,00	27.993.767.323,00	8.581.937,00	0,03
26	Inspektorat	12.168.696.322,00	12.070.122.367,00	98.573.955,00	0,82
27	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	7.540.850.919,00	8.384.571.148,00	(843.720.229,00)	(10,06)
28	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	10.391.302.716,00	11.560.215.779,00	(1.168.913.063,00)	(10,11)
29	Badan Pendapatan Daerah	14.730.457.604,00	12.018.698.424,00	2.711.759.180,00	22,56
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.875.097.401,00	7.468.462.670,00	406.634.731,00	5,44
31	Sekretariat DPRD	29.152.641.817,00	28.956.085.279,00	196.556.538,00	0,68
32	Kec Tg Redeb	11.239.758.754,00	11.392.606.321,00	(152.847.567,00)	(1,34)
33	Kec Gn Tabur	5.820.315.465,00	5.618.505.982,00	201.809.483,00	3,59
34	Kec Sambaliung	5.587.867.157,00	5.486.126.132,00	101.741.025,00	1,85
35	Kec Teluk Bayur	6.725.190.935,00	6.581.018.090,00	144.172.845,00	2,19
36	Kec Segah	3.233.838.629,00	3.128.398.311,00	105.440.318,00	3,37
37	Kec Kelay	2.766.646.095,00	2.679.614.748,00	87.031.347,00	3,25
38	Kec Pulau Derawan	3.108.153.928,00	2.983.536.642,00	124.617.286,00	4,18
39	Kec Talisayan	3.574.088.993,00	3.648.517.900,00	(74.428.907,00)	(2,04)
40	Kec Biduk - Biduk	3.904.632.105,00	3.681.816.461,00	222.815.644,00	6,05
41	Kec Maratua	3.895.547.798,00	3.640.314.456,00	255.233.342,00	7,01
42	Kec Tabalar	3.138.478.639,00	3.060.752.770,00	77.725.869,00	2,54
43	Kec Batu Putih	3.092.204.344,00	2.726.944.964,00	365.259.380,00	13,39
44	Kec Biatan	2.546.200.100,00	2.580.381.229,00	(34.181.129,00)	(1,32)
45	Badan Kesbang, Politik & Linmas	6.365.346.812,00	6.198.879.772,00	166.467.040,00	2,69
Jumlah		1.036.493.514.973,00	1.038.160.066.708,34	(1.666.551.735,34)	(0,16)

Data tabel diatas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.240.784.884.524,50 dan terealisasi senilai Rp1.036.493.514.973,00 atau 83,54% mengalami **kenaikan** senilai Rp1.666.551.735,34 atau 0,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34. Tidak tercapainya realisasi anggaran karena jumlah pengurangan dan penambahan pegawai tidak bisa diprediksi karena ada beberapa kriteria seperti teknis dan non teknis antara lain mutasi pegawai, pensiunan, meninggal dunia, dan perubahan gaji pokok.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>854.413.659.354,62</u>	<u>868.596.837.598,25</u>

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari bahan habis pakai, belanja bahan/material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, honorarium, uang yang diberikan

P



kepada pihak ketiga, belanja barang BOS, BOSNAS, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, barang di bawah nilai kapitalisasi, Beasiswa, Tunjangan Non Pegawai.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.041.220.505.794,97 dengan realisasi senilai Rp854.413.659.354,62 atau 82,06%, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.43 Anggaran dan Realsasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
1	(A+B+C)	Belanja Barang dan Jasa	178.581.017.012,43	145.484.674.484,72	81,47
A	Jumlah A (1 s/d 52)	Belanja Barang Pakai Habis	176.838.844.050,43	143.880.341.305,72	81,36
		1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.994.527.035,00	10.766.703.423,00	97,93
		2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.975.287.484,00	4.598.421.549,00	92,43
		3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.330.347.270,00	19.755.782.030,00	72,29
		4 Belanja Bahan-Bahan Baku	296.365.004,00	287.887.500,00	97,14
		5 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	120.684.700,00	109.949.766,00	91,10
		6 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	102.383.624,00	64.614.100,00	63,11
		7 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	649.830.585,00	406.377.704,00	62,54
		8 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	91.446.456,00	73.000.000,00	79,83
		9 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.083.285.693,00	6.361.459.496,00	89,81
		10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.874.920,00	33.929.000,00	81,02
		11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.399.356.599,00	1.240.659.816,00	88,66
		12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	182.784.984,00	91.034.434,00	49,80
		13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
		14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.593.103,00	5.765.800,00	75,93
		15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.880.052,00	9.377.170,00	86,19
		16 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	44.653.328,00	41.449.965,00	92,83
		17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.023.350.364,90	5.195.957.165,00	86,26
		18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.711.360.910,00	5.848.827.479,00	87,15
		19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.654.854.182,53	7.449.308.267,00	77,16
		20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	901.027.907,00	788.032.530,00	87,46
		21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.307.676.795,00	3.904.205.106,00	90,63

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.245.546.455,00	3.677.403.005,00	86,62
		23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.772.334.410,00	1.496.799.303,00	84,45
		24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.612.706.027,00	1.523.408.798,00	94,46
		25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.973.831.262,00	1.716.206.250,00	86,95
		26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	945.121.027,00	832.351.068,00	88,07
		27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.828.423.048,00	1.459.198.829,00	79,81
		28 Belanja Obat-Obatan-Obat	5.236.185.433,00	4.950.023.298,00	94,53
		29 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	583.219.601,00	367.108.227,72	62,95
		30 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.426.516.613,00	7.429.065.030,00	88,16
		31 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	295.762.035,00	82.603.600,00	27,93
		32 Belanja Natura dan Pakan-Natura	8160113828,00	5021979631,00	0,00
		33 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	151.030.000,00	121.168.000,00	80,23
		34 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.347.920.000,00	2.300.176.474,00	97,97
		35 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.866.500,00	5.150.000,00	87,79
		36 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.248.096.000,00	18.764.886.557,00	77,39
		37 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.222.814.000,00	2.895.570.610,00	68,57
		38 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	499.501.000,00	452.090.784,00	90,51
		39 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.317.827.000,00	1.833.631.300,00	79,11
		40 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.594.524.000,00	15.168.170.540,00	77,41
		41 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	98.516.440,00	98.516.440,00	100,00
		42 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	203.200.000,00	90.831.800,00	44,70
		43 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	33.600.000,00	33.150.000,00	98,66
		44 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.537.542.640,00	1.374.056.800,00	89,37
		45 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	500.140.000,00	443.060.400,00	88,59
		46 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	119.600.000,00	105.006.800,00	87,80
		47 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	609.455.100,00	579.215.500,00	95,04
		48 Belanja Pakaian KORPRI	86.850.000,00	82.810.000,00	95,35
		49 Belanja Pakaian Adat Daerah	514.364.000,00	431.517.300,00	83,89
		50 Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.283.060.855,00	2.145.173.531,00	93,96
		51 Belanja Pakaian Olahraga	1.443.492.780,00	1.360.369.630,00	94,24
		52 Belanja Pakaian Paskibraka	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2025		%
				Anggaran	Realisasi	
		53	Belanja Barang Sampel Pangan	10.043.000,00	4.829.500,00	48,09
B	Jumlah B (1 s/d 3)		Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.118.193.161,00	1.112.698.216,00	99,51
		1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.210.480,00	4.051.080,00	96,21
		2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.108.446.681,00	1.104.200.136,00	99,62
		3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.536.000,00	4.447.000,00	80,33
C	Jumlah C (1 s/d 11)		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	623.979.801,00	491.634.963,00	78,79
		1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	35.121.800,00	31.748.848,00	90,40
		2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.262.240,00	2.500.000,00	76,63
		4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.956.800,00	3.060.000,00	38,46
		5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use),	479.468.375,00	449.860.000,00	93,82
		6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.958.946,00	1.953.600,00	99,73
		9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.976.000,00	1.350.900,00	45,39
		10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	63.000.000,00	0,00	0,00
		11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	0,00	0,00	0,00
		12	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	20.445.840,00	0,00	0,00
		14	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	9.789.800,00	1.161.615,00	11,87
		15	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00
2	(A+B+C+D+E+F+G+H+I)		Belanja Jasa	508.180.351.231,38	400.993.530.810,00	78,91

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
A	Jumlah A (1 s/d 54)	Belanja Jasa Kantor	416.616.497.850,38	325.738.006.107,00	78,19
		1 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.508.300.000,00	2.308.400.000,00	92,03
		2 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.748.240.000,00	8.499.355.000,00	72,35
		3 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.909.720.000,00	12.390.832.500,00	77,88
		4 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	443.704.000,00	137.599.000,00	31,01
		5 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.486.800.000,00	1.358.440.814,00	91,37
		6 Honorarium Rohaniwan	15.992.400.000,00	15.861.200.000,00	99,18
		7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
		8 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.234.150.000,00	1.745.975.000,00	78,15
		9 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	835.100.000,00	722.400.000,00	86,50
		10 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	63.773.350.000,00	40.210.023.491,00	63,05
		11 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.429.284.000,00	14.090.664.553,00	65,75
		12 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	845.766.400,00	561.799.716,00	66,42
		13 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.177.142.500,00	6.315.500.300,00	87,99
		14 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.830.500.000,00	3.430.240.814,00	71,01
		15 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.764.450.000,00	1.036.700.000,00	58,75
		16 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	134.348.000,00	104.044.000,00	77,44
		17 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	322.600.000,00	257.500.000,00	79,82
		18 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	47.757.196.400,00	30.784.505.451,00	64,46
		19 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.428.575.000,00	2.195.965.000,00	90,42
		20 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.750.000,00	1.250.000,00	33,33
		21 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.888.346.900,00	2.581.932.880,00	89,39
		22 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.191.202.220,00	35.601.143.553,00	84,38
		23 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.016.444.255,00	13.612.969.392,00	80,00
		24 Belanja Jasa Tenaga Caraka	120.150.000,00	107.775.000,00	89,70
		25 Belanja Jasa Tenaga Supir	4.195.200.000,00	3.070.658.332,00	73,19
		26 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	240.000.000,00	178.662.345,00	74,44
		27 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.319.625.000,00	1.126.450.000,00	83,56
		28 Belanja Jasa Tata Rias	229.250.000,00	156.450.000,00	68,24
		29 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
		30 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.329.800.000,00	1.273.372.373,00	95,76
		31 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00
		32 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	34.560.000,00	15.600.000,00	45,14
		33 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		34 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.603.400.000,00	1.983.157.000,00	76,18
		35 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.825.596.000,00	1.395.892.494,00	76,46
		36 Belanja Jasa Kalibrasi	420.016.600,00	258.755.550,00	61,61
		37 Belanja Jasa Pengolahan Sampah	115.350.000,00	110.850.000,00	96,10
		38 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	826.544.900,00	674.249.486,00	81,57
		39 Belanja Jasa Pengukuran Tanah	185.262.120,00	158.618.720,00	85,62
		40 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	27.391.165.000,00	25.247.283.656,00	92,17
		41 Belanja Tagihan Telepon	124.455.000,00	117.344.370,00	94,29
		42 Belanja Tagihan Air	2.560.266.549,68	1.611.690.168,00	62,95
		43 Belanja Tagihan Listrik	17.511.307.451,70	14.357.579.235,00	81,99
		44 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.266.629.000,00	1.009.240.000,00	79,68
		45 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.436.712.474,00	17.366.953.773,00	84,98
		46 Belanja Paket/Pengiriman	1.087.780.000,00	796.994.028,00	73,27
		47 Belanja Penambahan Daya	168.358.524,00	120.325.690,00	71,47
		48 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.650.362.000,00	1.017.905.719,00	61,68
		49 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.200.000.000,00	5.079.806.225,00	97,69
		50 Belanja Pengolahan Air Limbah	232.560.000,00	231.321.000,00	99,47
		51 Belanja Lembur	6.689.816.000,00	4.891.192.000,00	73,11
		52 Belanja Medical Check Up	277.767.200,00	117.224.704,00	42,20
		53 Belanja Sewa Jasa Internet	1.448.700,00	166.500,00	11,49
		54 Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	43.317.000,00	41.957.822,00	96,86
		55 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.735.817.656,00	43.752.563.456,00	89,77
		56 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.909.861.000,00	5.502.774.997,00	93,11
		57 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	18.750.000,00	12.750.000,00	68,00
B	Jumlah B (1 s/d 9)	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.060.354.709,00	44.258.236.117,00	85,01
		1 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.305.598.640,00	1.177.075.760,00	90,16
		2 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	126.000.000,00	6.563.200,00	5,21
		3 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.939.142.800,00	36.007.638.600,00	97,48
		4 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.386.529.642,00	4.912.694.499,00	52,34
		5 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.127.910.944,00	609.096.558,67	54,00
		6 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.049.482.683,00	326.320.449,33	31,09
		7 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	318.346.000,00	240.213.450,00	75,46
		8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.075.800.000,00	582.520.000,00	54,15

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		9 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	731.544.000,00	396.113.600,00	54,15
		Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1 s/d 16)	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.499.252.800,00	8.181.015.395,00	65,45
		1 Belanja Sewa Excavator	100.000.000,00	0,00	0,00
		2 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	283.582.800,00	242.580.000,00	85,54
		3 Belanja Sewa Electric Generating Set	45.000.000,00	42.000.000,00	93,33
		4 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00	198.975.000,00	39,80
		5 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	550.000.000,00	309.300.000,00	56,24
		6 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	748.500.000,00	425.909.999,00	56,90
		7 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	142.500.000,00	60.000.000,00	42,11
		8 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.882.500.000,00	4.647.436.396,00	67,53
		9 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	298.000.000,00	186.200.000,00	62,48
		10 Belanja Sewa Mebel	887.528.000,00	680.650.000,00	76,69
		11 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.197.332.000,00	750.154.000,00	62,65
		12 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.250.000,00	0,00	0,00
		13 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	659.000.000,00	467.250.000,00	70,90
		14 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	97.500.000,00	64.000.000,00	65,64
		15 Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
		16 Belanja Sewa Komputer Jaringan	106.560.000,00	106.560.000,00	100,00
D	Jumlah D (1 s/d 8)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.333.140.000,00	3.599.437.201,00	83,07
		1 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	554.000.000,00	441.350.000,00	79,67
		2 Belanja Sewa Bangunan Gudang	93.840.000,00	87.000.000,00	92,71
		3 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.054.050.000,00	1.631.936.093,00	79,45
		4 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	131.850.000,00	92.100.000,00	69,85
		5 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	52.900.000,00	52.900.000,00	100,00
		6 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00
		7 Belanja Sewa Taman	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		8 Belanja Sewa Asrama	298.000.000,00	288.000.000,00	96,64
		9 Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongkan	882.000.000,00	807.394.000,00	91,54

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		2025		%
				Anggaran	Realisasi	
		10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	214.000.000,00	191.257.108,00	89,37
E	Jumlah E (1 s/d 4)		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	337.020.000,00	265.560.000,00	78,80
		1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	103.020.000,00	43.020.000,00	41,76
		2	Belanja Sewa Tanaman	234.000.000,00	222.540.000,00	95,10
F	Jumlah F (1 s/d 11)		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.553.139.800,00	3.303.097.909,00	92,96
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	141.253.000,00	141.037.480,00	99,85
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	22.024.600,00	21.656.100,00	98,33
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	350.000.000,00	336.550.224,00	96,16
		8	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	1.899.862.200,00	1.897.631.500,00	99,88
		9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	510.000.000,00	508.096.630,00	99,63
		10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	630.000.000,00	398.125.975,00	63,19
G	Jumlah G (1 s/d 8)		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.542.408.100,00	4.072.422.542,00	89,65
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	202.000.000,00	194.669.000,00	96,37
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	353.908.000,00	336.729.636,00	95,15
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.200.000.000,00	1.199.921.700,00	99,99
		7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	430.000.100,00	426.488.850,00	99,18
		8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.925.000.000,00	1.483.113.356,00	77,04

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		9 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00
H	Jumlah H (1 s/d 2)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	615.000.000,00	615.000.000,00	100,00
		1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
		2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00
		3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
I	Jumlah I (1 s/d 4)	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.137.641.600,00	9.819.552.557,00	80,90
		1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.801.780.000,00	2.302.252.600,00	82,17
		2 Belanja Sosialisasi	1.805.911.000,00	1.716.744.941,00	95,06
		3 Belanja Bimbingan Teknis	7.529.950.600,00	5.800.555.016,00	77,03
		4 Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00
J	Jumlah J (1 s/d 12)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
		3 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
		4 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
		5 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
		6 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
		7 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
		8 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
		9 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
		10 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J),PBJT],	0,00	0,00	0,00
K	Jumlah K (1)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
L	Jumlah L (1)	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.485.896.372,00	1.141.202.982,00	76,80
		1 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		2 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.275.896.372,00	981.403.482,00	76,92

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		3 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian	195.000.000,00	144.799.500,00	74,26
3	(A+B+C+D+E+F)	Belanja Pemeliharaan	42.750.097.352,55	37.765.345.618,00	88,34
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.200.000.000,00	2.131.352.100,00	96,88
		1 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	2.200.000.000,00	2.131.352.100,00	96,88
B	Jumlah B (1 s/d 34)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.114.319.108,55	16.301.104.781,00	81,04
		1 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	100.000.000,00	99.864.480,00	99,86
		2 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00	99.908.237,00	99,91
		3 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	60.000.000,00	59.992.126,00	99,99
		4 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	500.000.000,00	469.253.419,00	93,85
		5 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	90.000.000,00	87.185.500,00	96,87
		6 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	830.000,00	0,00	0,00
		7 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00
		8 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.306.572.000,00	823.924.461,00	63,06
		9 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.220.014.200,00	6.108.648.836,00	84,61
		10 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.750.000,00	7.488.000,00	76,80
		11 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.702.598.800,00	1.231.522.163,00	72,33
		12 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	135.000.000,00	95.154.514,00	70,48
		13 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	32.515.400,00	31.153.188,00	95,81
		14 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	900.000.000,00	899.954.886,00	99,99
		15 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	149.742.000,00	139.392.400,00	93,09
		16 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	178.883.200,00	46.090.000,00	25,77

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		17 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	2.200.000,00	1.925.000,00	87,50
		18 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00
		19 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000,00	5.431.000,00	90,52
		20 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.545.985.000,00	1.099.863.659,00	71,14
		21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	81.600.000,00	32.369.350,00	39,67
		22 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.201.627.039,00	1.050.338.670,00	87,41
		23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	781.250.000,00	683.777.150,00	87,52
		24 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	40.937.650,00	81,88
		25 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	9.580.000,00	95,80
		26 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	54.680.000,00	54.510.000,00	99,69
		27 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.873.243.470,00	1.315.307.376,00	70,22
		28 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	63.603.000,00	63.117.375,00	99,24
		29 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	424.485.000,00	412.660.367,00	97,21
		30 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		31 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	50.000.000,00	49.844.100,00	99,69
		32 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		33 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	432.160.000,00	368.669.074,00	85,31
		34 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	246.330.000,00	176.753.000,00	71,75
		35 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	422.999.999,55	379.664.500,00	89,76
		36 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	52.250.000,00	27.657.000,00	52,93

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		37 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	200.000.000,00	199.167.300,00	99,58
C	Jumlah C (1 s/d 12)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.393.448.288,00	6.581.159.832,00	89,01
		1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.224.224.600,00	5.503.888.238,00	88,43
		2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	130.000.000,00	119.649.935,00	92,04
		3 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00
		4 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	20.000.000,00	18.969.000,00	94,85
		5 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00
		6 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	277.783.688,00	276.753.250,00	99,63
		7 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	399.295.809,00	99,82
		8 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	321.440.000,00	242.603.600,00	75,47
		9 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		10 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
D	Jumlah D (1 s/d 8)	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.183.125.456,00	12.007.842.405,00	98,56
		1 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	44.424.000,00	44.424.000,00	100,00
		2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00
		3 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	10.294.594.200,00	10.125.835.549,00	98,36
		4 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	776.107.256,00	773.790.856,00	99,70
		5 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	38.000.000,00	37.074.000,00	97,56
		6 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		7 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.030.000.000,00	1.026.718.000,00	99,68
E	Jumlah E (1 s/d 2)	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00
F	Jumlah F (1 s/d 1)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	859.204.500,00	743.886.500,00	86,58
		1 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	859.204.500,00	743.886.500,00	86,58
4	(A+B)	Belana Perjalanan Dinas	156.422.254.630,00	133.706.507.937,80	85,48
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.197.254.630,00	133.489.680.079,80	85,46
		1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.373.804.941,00	90.187.207.745,80	88,10
		2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.923.760.689,00	40.797.465.334,00	80,11
		3 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.578.890.000,00	2.211.687.000,00	85,76
		4 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	320.799.000,00	293.320.000,00	91,43
B	Jumlah B (1)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	225.000.000,00	216.827.858,00	96,37
		1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	225.000.000,00	216.827.858,00	96,37
5	(A+B)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.916.980.412,00	21.128.299.434,00	92,19
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.641.980.412,00	20.855.799.434,00	92,11
		1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.132.181.412,00	3.781.849.434,00	91,52
		2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.605.750.000,00	3.153.450.000,00	87,46
		3 Belanja Beasiswa	14.859.049.000,00	13.920.500.000,00	93,68
		4 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.000.000,00	272.500.000,00	99,09
		1 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	275.000.000,00	272.500.000,00	99,09
6	(A)	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
7		Belanja Barang dan Jasa BOSP	30.741.221.756,61	29.390.360.499,00	95,61
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	29.811.608.758,61	28.577.626.501,00	95,86
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	28.816.427.116,61	27.602.445.084,00	95,79

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		2 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	995.181.642,00	975.181.417,00	97,99
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	730.743.007,00	661.183.718,00	90,48
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	670.743.007,00	646.183.718,00	96,34
		2 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	15.000.000,00	25,00
C	Jumlah C (1)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	198.869.991,00	151.550.280,00	76,21
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	198.869.991,00	151.550.280,00	76,21
8	(A)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.698.661.200,00	7.588.407.298,00	70,93
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.698.661.200,00	7.588.407.298,00	70,93
		1 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.698.661.200,00	7.588.407.298,00	70,93
9	(A)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.929.922.200,00	78.356.533.273,10	86,17
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.929.922.200,00	78.356.533.273,10	86,17
		1 Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.929.922.200,00	78.356.533.273,10	86,17
JUMLAH			1.041.220.505.794,97	854.413.659.354,62	82,06

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 senilai Rp854.413.659.354,62 mengalami **penurunan** senilai Rp14.183.178.243,63 atau 1,63% dari Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp868.596.837.598,25, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
1	(A+B+C)	Belanja Barang dan Jasa	145.484.674.484,72	147.945.200.469,75	(2.460.525.985,03)	(1,66)
A	Jumlah A (1 s/d 52)	Belanja Barang Pakai Habis	143.880.341.305,72	146.788.793.219,75	(2.908.451.914,03)	(1,98)
		1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.766.703.423,00	12.232.705.358,00	(1.466.001.935,00)	(11,98)
		2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.598.421.549,00	4.229.888.671,00	368.532.878,00	8,71
		3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.755.782.030,00	20.309.751.940,00	(553.969.910,00)	(2,73)
		4 Belanja Bahan-Bahan Baku	287.887.500,00	174.511.135,00	113.376.365,00	64,97
		5 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	109.949.766,00	369.243.343,00	(259.293.577,00)	(70,22)
		6 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	64.614.100,00	20.588.000,00	44.026.100,00	213,84
		7 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	406.377.704,00	590.593.300,00	(184.215.596,00)	(31,19)
		8 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	73.000.000,00	194.380.000,00	(121.380.000,00)	(62,44)

(Handwritten signature)



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		9 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.361.459.496,00	7.580.864.735,00	(1.219.405.239,00)	(16,09)
		10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	33.929.000,00	71.167.000,00	(37.238.000,00)	(52,32)
		11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.240.659.816,00	109.755.142,00	1.130.904.674,00	1.030,39
		12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	91.034.434,00	39.188.835,00	51.845.599,00	132,30
		13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	244.000,00	(244.000,00)	(100,00)
		14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.765.800,00	5.448.000,00	317.800,00	5,83
		15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.377.170,00	2.520.000,00	6.857.170,00	272,11
		16 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	41.449.965,00	23.598.800,00	17.851.165,00	75,64
		17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.195.957.165,00	5.394.696.819,00	(198.739.654,00)	(3,68)
		18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.848.827.479,00	5.324.931.950,00	523.895.529,00	9,84
		19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.449.308.267,00	10.575.604.645,00	(3.126.296.378,00)	(29,56)
		20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	788.032.530,00	640.722.000,00	147.310.530,00	22,99
		21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.904.205.106,00	3.787.170.952,00	117.034.154,00	3,09
		22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.677.403.005,00	3.503.784.405,00	173.618.600,00	4,96
		23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.496.799.303,00	1.314.972.050,00	181.827.253,00	13,83
		24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.523.408.798,00	1.403.424.962,00	119.983.836,00	8,55
		25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.716.206.250,00	2.141.599.079,00	(425.392.829,00)	(19,86)
		26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	832.351.068,00	2.706.868.782,00	(1.874.517.714,00)	(69,25)
		27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.459.198.829,00	3.382.192.928,00	(1.922.994.099,00)	(56,86)
		28 Belanja Obat-Obatan-Obat	4.950.023.298,00	4.321.252.669,75	628.770.628,25	14,55
		29 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	367.108.227,72	237.291.114,00	129.817.113,72	54,71
		30 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.429.065.030,00	5.189.101.960,00	2.239.963.070,00	43,17

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		31 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	82.603.600,00	904.523.500,00	(821.919.900,00)	(90,87)
		32 Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.021.979.631,00	0,00	5.021.979.631,00	0,00
		33 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	121.168.000,00	3.347.839.372,00	(3.226.671.372,00)	(96,38)
		34 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.300.176.474,00	111.625.000,00	2.188.551.474,00	1.960,63
		35 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.150.000,00	1.652.978.210,00	(1.647.828.210,00)	(99,69)
		36 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.764.886.557,00	17.389.250,00	18.747.497.307,00	107.810,84
		37 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.895.570.610,00	17.433.733.699,00	(14.538.163.089,00)	(83,39)
		38 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	452.090.784,00	2.877.127.762,00	(2.425.036.978,00)	(84,29)
		39 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.833.631.300,00	147.024.420,00	1.686.606.880,00	1.147,16
		40 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.168.170.540,00	3.208.656.756,00	11.959.513.784,00	372,73
		41 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	98.516.440,00	14.214.240.400,00	(14.115.723.960,00)	(99,31)
		42 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.831.800,00	114.330.000,00	(23.498.200,00)	(20,55)
		43 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	33.150.000,00	183.900.000,00	(150.750.000,00)	(81,97)
		44 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.374.056.800,00	1.487.418.210,00	(113.361.410,00)	(7,62)
		45 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	443.060.400,00	851.594.666,00	(408.534.266,00)	(47,97)
		46 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	105.006.800,00	481.370.000,00	(376.363.200,00)	(78,19)
		47 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	579.215.500,00	293.572.000,00	285.643.500,00	97,30
		48 Belanja Pakaian KORPRI	82.810.000,00	49.800.000,00	33.010.000,00	66,29
		49 Belanja Pakaian Adat Daerah	431.517.300,00	446.162.000,00	(14.644.700,00)	(3,28)
		50 Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.145.173.531,00	1.494.466.900,00	650.706.631,00	43,54
		51 Belanja Pakaian Olahraga	1.360.369.630,00	1.512.448.500,00	(152.078.870,00)	(10,06)
		52 Belanja Pakaian Paskibraka	2.070.000,00	80.530.000,00	(78.460.000,00)	(97,43)
		53 Belanja Barang Sampel Pangan	4.829.500,00	0,00	4.829.500,00	0,00
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.112.698.216,00	618.717.550,00	493.980.666,00	79,84
		1 Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.051.080,00	18.242.250,00	(14.191.170,00)	(77,79)
		2 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.104.200.136,00	595.359.300,00	508.840.836,00	85,47
		3 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.447.000,00	5.116.000,00	(669.000,00)	(13,08)
C	Jumlah C (1 s/d 11)	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	491.634.963,00	537.689.700,00	(46.054.737,00)	(8,57)
		1 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	31.748.848,00	0,00	31.748.848,00	0,00
		2 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	0,00	14.900.000,00	(14.900.000,00)	(100,00)
		3 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		4 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00
		5 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	449.860.000,00	0,00	449.860.000,00	0,00
		6 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	83.860.000,00	(83.860.000,00)	(100,00)
		7 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	46.953.000,00	(46.953.000,00)	(100,00)
		8 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.953.600,00	0,00	1.953.600,00	0,00
		9 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.350.900,00	10.925.000,00	(9.574.100,00)	(87,63)
		10 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	0,00	15.440.000,00	(15.440.000,00)	(100,00)
		12 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	130.720.000,00	(130.720.000,00)	(100,00)
		13 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	1.161.615,00	0,00	1.161.615,00	0,00
		15 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	234.891.700,00	(234.891.700,00)	(100,00)
2	(A+B+C+D+E+F+G+H+I)	Belanja Jasa	400.993.530.810,00	394.952.774.306,00	6.040.756.504,00	1,53
A	Jumlah A (1 s/d 54)	Belanja Jasa Kantor	325.738.006.107,00	327.189.696.735,00	(1.451.690.628,00)	(0,44)
		1 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.308.400.000,00	0,00	2.308.400.000,00	0,00
		2 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.499.355.000,00	7.425.646.337,00	1.073.708.663,00	14,46
		3 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.390.832.500,00	16.067.509.500,00	(3.676.677.000,00)	(22,88)
		4 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	137.599.000,00	294.600.000,00	(157.001.000,00)	(53,29)
		5 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.358.440.814,00	1.322.600.000,00	35.840.814,00	2,71
		6 Honorarium Rohaniwan	15.861.200.000,00	13.885.850.000,00	1.975.350.000,00	14,23

P



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000,00	92.700.000,00	(32.700.000,00)	(35,28)
		8 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.745.975.000,00	831.040.000,00	914.935.000,00	110,10
		9 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	722.400.000,00	705.900.000,00	16.500.000,00	2,34
		10 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40.210.023.491,00	52.089.516.823,00	(11.879.493.332,00)	(22,81)
		11 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.090.664.553,00	21.529.748.341,00	(7.439.083.788,00)	(34,55)
		12 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	561.799.716,00	307.380.200,00	254.419.516,00	82,77
		13 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.315.500.300,00	6.756.906.900,00	(441.406.600,00)	(6,53)
		14 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.430.240.814,00	6.244.700.000,00	(2.814.459.186,00)	(45,07)
		15 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.036.700.000,00	2.150.100.000,00	(1.113.400.000,00)	(51,78)
		16 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	104.044.000,00	136.600.000,00	(32.556.000,00)	(23,83)
		17 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	257.500.000,00	404.250.000,00	(146.750.000,00)	(36,30)
		18 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.784.505.451,00	56.066.541.450,00	(25.282.035.999,00)	(45,09)
		19 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.195.965.000,00	2.043.545.000,00	152.420.000,00	7,46
		20 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.250.000,00	82.726.000,00	(81.476.000,00)	(98,49)
		21 Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.581.932.880,00	2.951.058.135,00	(369.125.255,00)	(12,51)
		22 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.601.143.553,00	38.322.904.623,00	(2.721.761.070,00)	(7,10)
		23 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.612.969.392,00	16.067.310.000,00	(2.454.340.608,00)	(15,28)
		24 Belanja Jasa Tenaga Caraka	107.775.000,00	100.575.000,00	7.200.000,00	7,16
		25 Belanja Jasa Tenaga Supir	3.070.658.332,00	4.432.697.500,00	(1.362.039.168,00)	(30,73)
		26 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	178.662.345,00	99.250.000,00	79.412.345,00	80,01
		27 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.126.450.000,00	668.500.000,00	457.950.000,00	68,50
		28 Belanja Jasa Tata Rias	156.450.000,00	164.150.000,00	(7.700.000,00)	(4,69)
		29 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.000.000,00	16.500.000,00	(7.500.000,00)	(45,45)
		30 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.273.372.373,00	809.384.120,00	463.988.253,00	57,33
		31 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	39.500.000,00	(39.500.000,00)	(100,00)
		32 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.600.000,00	210.323.628,00	(194.723.628,00)	(92,58)
		33 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	149.930.000,00	(74.930.000,00)	(49,98)
		34 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.983.157.000,00	6.291.815.700,00	(4.308.658.700,00)	(68,48)
		35 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.395.892.494,00	3.254.205.000,00	(1.858.312.506,00)	(57,10)
		36 Belanja Jasa Kalibrasi	258.755.550,00	459.885.089,00	(201.129.539,00)	(43,73)
		37 Belanja Jasa Pengolahan Sampah	110.850.000,00	439.450.000,00	(328.600.000,00)	(74,78)

[Handwritten signature]



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian		Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
						Penurunan	
		38	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	674.249.486,00	1.380.773.100,00	(706.523.614,00)	(51,17)
		39	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	158.618.720,00	100.200.000,00	58.418.720,00	58,30
		40	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25.247.283.656,00	22.151.481.921,00	3.095.801.735,00	13,98
		41	Belanja Tagihan Telepon	117.344.370,00	87.656.748,00	29.687.622,00	33,87
		42	Belanja Tagihan Air	1.611.690.168,00	1.783.612.321,00	(171.922.153,00)	(9,64)
		43	Belanja Tagihan Listrik	14.357.579.235,00	13.151.917.352,00	1.205.661.883,00	9,17
		44	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.009.240.000,00	1.677.464.000,00	(668.224.000,00)	(39,84)
		45	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.366.953.773,00	12.859.788.698,00	4.507.165.075,00	35,05
		46	Belanja Paket/Pengiriman	796.994.028,00	342.078.316,00	454.915.712,00	132,99
		47	Belanja Penambahan Daya	120.325.690,00	53.199.490,00	67.126.200,00	126,18
		48	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.017.905.719,00	476.575.536,00	541.330.183,00	113,59
		49	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.079.806.225,00	5.159.267.720,00	(79.461.495,00)	(1,54)
		50	Belanja Pengolahan Air Limbah	231.321.000,00	0,00	231.321.000,00	0,00
		51	Belanja Lembur	4.891.192.000,00	4.920.759.672,00	(29.567.672,00)	(0,60)
		52	Belanja Medical Check Up	117.224.704,00	129.622.515,00	(12.397.811,00)	(9,56)
		53	Belanja Sewa Jasa Internet	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00
		54	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	41.957.822,00	0,00	41.957.822,00	0,00
		55	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43.752.563.456,00	0,00	43.752.563.456,00	0,00
		56	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.502.774.997,00	0,00	5.502.774.997,00	0,00
		57	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00
B	Jumlah B (1 s/d 9)	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		44.258.236.117,00	41.446.760.681,00	2.811.475.436,00	6,78
		1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.177.075.760,00	1.063.846.480,00	113.229.280,00	10,64
		2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	6.563.200,00	264.902.400,00	(258.339.200,00)	(97,52)
		3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	36.007.638.600,00	29.782.795.500,00	6.224.843.100,00	20,90
		4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.912.694.499,00	7.748.240.548,00	(2.835.546.049,00)	(36,60)
		5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	609.096.558,67	732.082.222,36	(122.985.663,69)	(16,80)
		6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	326.320.449,33	503.406.552,64	(177.086.103,31)	(35,18)
		7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	240.213.450,00	182.862.178,00	57.351.272,00	31,36

[Handwritten signature]



No	Point	Uraian		Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
						Penurunan	
		8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	582.520.000,00	695.610.000,00	(113.090.000,00)	(16,26)
		9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	396.113.600,00	473.014.800,00	(76.901.200,00)	(16,26)
		Belanja Sewa Tanah		0,00	66.800.000,00	(66.800.000,00)	(100,00)
		1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	16.800.000,00	(16.800.000,00)	(100,00)
C	Jumlah C (1 s/d 16)	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		8.181.015.395,00	8.646.430.750,00	(465.415.355,00)	(5,38)
		1	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	242.580.000,00	15.190.000,00	227.390.000,00	1.496,97
		3	Belanja Sewa Electric Generating Set	42.000.000,00	81.000.000,00	(39.000.000,00)	(48,15)
		4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	198.975.000,00	126.300.000,00	72.675.000,00	57,54
		5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	309.300.000,00	234.100.000,00	75.200.000,00	32,12
		6	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	425.909.999,00	272.900.000,00	153.009.999,00	56,07
		7	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	60.000.000,00	89.500.000,00	(29.500.000,00)	(32,96)
		8	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.647.436.396,00	4.602.930.000,00	44.506.396,00	0,97
		9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	186.200.000,00	155.847.500,00	30.352.500,00	19,48
		10	Belanja Sewa Mebel	680.650.000,00	123.656.000,00	556.994.000,00	450,44
		11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.154.000,00	2.319.562.250,00	(1.569.408.250,00)	(67,66)
		12	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	467.250.000,00	0,00	467.250.000,00	0,00
		14	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	64.000.000,00	487.250.000,00	(423.250.000,00)	(86,87)
		15	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	31.635.000,00	(31.635.000,00)	(100,00)
		16	Belanja Sewa Komputer Jaringan	106.560.000,00	106.560.000,00	0,00	0,00
D	Jumlah D (1 s/d 8)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		3.599.437.201,00	4.100.682.333,00	(501.245.132,00)	(12,22)
		1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	441.350.000,00	537.083.333,00	(95.733.333,00)	(17,82)
		2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	87.000.000,00	52.404.000,00	34.596.000,00	66,02
		3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.631.936.093,00	1.387.605.000,00	244.331.093,00	17,61
		4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	92.100.000,00	0,00	92.100.000,00	0,00
		5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	52.900.000,00	22.600.000,00	30.300.000,00	134,07
		6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Sewa Taman	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	150,00
		8	Belanja Sewa Asrama	288.000.000,00	261.200.000,00	26.800.000,00	10,26

A



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian		Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
						Penurunan	
		9	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongon	807.394.000,00	1.712.904.000,00	(905.510.000,00)	(52,86)
		10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	191.257.108,00	123.886.000,00	67.371.108,00	54,38
E	Jumlah E (1 s/d 4)	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		265.560.000,00	236.580.000,00	28.980.000,00	12,25
		1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	43.020.000,00	0,00	43.020.000,00	0,00
		2	Belanja Sewa Tanaman	222.540.000,00	236.580.000,00	(14.040.000,00)	(5,93)
F	Jumlah F (1 s/d 11)	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		3.303.097.909,00	2.791.506.921,00	511.590.988,00	18,33
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	97.569.000,00	(97.569.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	141.037.480,00	28677000,00	112.360.480,00	391,81
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	63.981.000,00	(63.981.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	21.656.100,00	0,00	21.656.100,00	0,00
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	611.106.400,00	(611.106.400,00)	(100,00)
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	336.550.224,00	676.535.010,00	(339.984.786,00)	(50,25)
		8	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	1.897.631.500,00	0,00	1.897.631.500,00	0,00
		9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	508.096.630,00	103.390.800,00	404.705.830,00	391,43
		10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	398.125.975,00	1.210.247.711,00	(812.121.736,00)	(67,10)
G	Jumlah G (1 s/d 8)	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		4.072.422.542,00	2.955.027.479,00	1.117.395.063,00	37,81
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	194.669.000,00	100.014.000,00	94.655.000,00	94,64
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	100.000.000,00	811.763.200,00	(711.763.200,00)	(87,68)
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	336.729.636,00	559.560.000,00	(222.830.364,00)	(39,82)

[Handwritten signature]



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian		Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
						Penurunan	
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.199.921.700,00	0,00	1.199.921.700,00	0,00
		7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	426.488.850,00	495.772.700,00	(69.283.850,00)	(13,97)
		8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.483.113.356,00	929.258.279,00	553.855.077,00	59,60
		9	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	0,00	58.659.300,00	(58.659.300,00)	(100,00)
H	Jumlah H (1 s/d 2)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		615.000.000,00	450.000.000,00	165.000.000,00	36,67
		1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	520.000.000,00	415.000.000,00	105.000.000,00	25,30
		3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
I	Jumlah I (1 s/d 4)	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		9.819.552.557,00	5.345.844.975,00	4.473.707.582,00	83,69
		1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.302.252.600,00	1.672.380.573,00	629.872.027,00	37,66
		2	Belanja Sosialisasi	1.716.744.941,00	37.995.400,00	1.678.749.541,00	4.418,30
		3	Belanja Bimbingan Teknis	5.800.555.016,00	3.620.469.002,00	2.180.086.014,00	60,22
		4	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
J	Jumlah J (1 s/d 11)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		0,00	641.747.447,00	(641.747.447,00)	(100,00)
		1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	22.950.004,00	(22.950.004,00)	(100,00)
		2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	61.200.010,00	(61.200.010,00)	(100,00)
		3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	1.147.491,00	(1.147.491,00)	(100,00)
		4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	1.020.004,00	(1.020.004,00)	(100,00)
		5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	103.274.995,00	(103.274.995,00)	(100,00)
		6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	1.530.000,00	(1.530.000,00)	(100,00)
		7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.034.943,00	(1.034.943,00)	(100,00)
		8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	19.800.000,00	(19.800.000,00)	(100,00)
		9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	119.625.000,00	(119.625.000,00)	(100,00)
		10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(,PBJT].	0,00	310.165.000,00	(310.165.000,00)	(100,00)
K	Jumlah K (1)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian		Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
						Penurunan	
		1	Belanja Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Jumlah L (1)	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud		1.141.202.982,00	1.081.696.985,00	59.505.997,00	0,00
		1	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	15.000.000,00	1.800.000,00	13.200.000,00	733,33
		2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	981.403.482,00	1.079.896.985,00	(98.493.503,00)	(9,12)
		3	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian	144.799.500,00	0,00	144.799.500,00	0,00
						-	
3	(A+B+C+D+E+F)	Belanja Pemeliharaan		37.765.345.618,00	48.129.553.534,56	(10.364.207.916,56)	(21,53)
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Pemeliharaan Tanah		2.131.352.100,00	997.409.300,00	1.133.942.800,00	113,69
		1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	2.131.352.100,00	997.409.300,00	1.133.942.800,00	113,69
B	Jumlah B (1 s/d 34)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		16.301.104.781,00	13.375.029.392,00	2.926.075.389,00	21,88
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	99.864.480,00	0,00	99.864.480,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	99.908.237,00	299.223.317,00	(199.315.080,00)	(66,61)
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	59.992.126,00	119.992.037,00	(59.999.911,00)	(50,00)
		4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	469.253.419,00	484.829.280,00	(15.575.861,00)	(3,21)
		5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	87.185.500,00	0,00	87.185.500,00	0,00
		6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	0,00	53.449.830,00	(53.449.830,00)	(100,00)
		8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	823.924.461,00	29.531.000,00	794.393.461,00	2.690,03
		9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.108.648.836,00	5.981.436.650,00	127.212.186,00	2,13
		10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.488.000,00	0,00	7.488.000,00	0,00
		11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.231.522.163,00	934.097.383,00	297.424.780,00	31,84
		12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	95.154.514,00	0,00	95.154.514,00	0,00
		13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	31.153.188,00	0,00	31.153.188,00	0,00

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		14 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	899.954.886,00	1.313.109.810,00	(413.154.924,00)	(31,46)
		15 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	139.392.400,00	10.916.850,00	128.475.550,00	1.176,86
		16 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	46.090.000,00	21.640.000,00	24.450.000,00	112,99
		17 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00
		18 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	4.082.000,00	(4.082.000,00)	(100,00)
		19 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	5.431.000,00	0,00	5.431.000,00	0,00
		20 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.099.863.659,00	614.393.134,00	485.470.525,00	79,02
		21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	32.369.350,00	19.325.000,00	13.044.350,00	67,50
		22 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.050.338.670,00	521.233.551,00	529.105.119,00	101,51
		23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	683.777.150,00	911.555.950,00	(227.778.800,00)	(24,99)
		24 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	40.937.650,00	0,00	40.937.650,00	0,00
		25 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.580.000,00	56.500.000,00	(46.920.000,00)	(83,04)
		26 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	54.510.000,00	0,00	54.510.000,00	0,00
		27 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.315.307.376,00	0,00	1.315.307.376,00	0,00
		28 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	63.117.375,00	63.356.640,00	(239.265,00)	(0,38)
		29 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	412.660.367,00	659.928.690,00	(247.268.323,00)	(37,47)
		30 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	80.000.000,00	79.985.340,00	14.660,00	0,02
		31 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	49.844.100,00	142.347.180,00	(92.503.080,00)	(64,98)

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
		32 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
		33 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	368.669.074,00	368.545.700,00	123.374,00	0,03
		34 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	176.753.000,00	187.081.050,00	(10.328.050,00)	(5,52)
		35 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	379.664.500,00	179.585.000,00	200.079.500,00	111,41
		36 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	27.657.000,00	10.460.000,00	17.197.000,00	164,41
		37 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	199.167.300,00	308.424.000,00	(109.256.700,00)	(35,42)
C	Jumlah C (1 s/d 12)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.581.159.832,00	10.168.922.512,56	(3.587.762.680,56)	(35,28)
		1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.503.888.238,00	7.731.672.556,56	(2.227.784.318,56)	(28,81)
		2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	119.649.935,00	59.982.626,00	59.667.309,00	99,47
		3 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	1672667500,00	(1.672.667.500,00)	(100,00)
		4 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.969.000,00	19.995.000,00	(1.026.000,00)	(5,13)
		5 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	58.139.580,00	(58.139.580,00)	(100,00)
		6 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	276.753.250,00	112.876.250,00	163.877.000,00	145,18
		7 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	399.295.809,00	386.686.000,00	12.609.809,00	3,26
		8 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	242.603.600,00	117.870.000,00	124.733.600,00	105,82
		9 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		10 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	9.033.000,00	(9.033.000,00)	(100,00)

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
D	Jumlah D (1 s/d 8)	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.007.842.405,00	22.967.483.330,00	(10.959.640.925,00)	(47,72)
		1 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	44.424.000,00	5.837.000.000,00	(5.792.576.000,00)	99,24
		2 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	336376000,00	(336.376.000,00)	(100,00)
		3 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	10.125.835.549,00	16.137.948.330,00	(6.012.112.781,00)	(37,25)
		4 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	773.790.856,00	0,00	773.790.856,00	0,00
		5 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	37.074.000,00	0,00	37.074.000,00	0,00
		6 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	149.334.000,00	(149.334.000,00)	(100,00)
		7 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.026.718.000,00	506.825.000,00	519.893.000,00	102,58
E	Jumlah E (1 s/d 2)	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Jumlah F (1 s/d 1)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	743.886.500,00	620.709.000,00	123.177.500,00	19,84
		1 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	743.886.500,00	620.709.000,00	123.177.500,00	19,84
4	(A+B)	Belanja Perjalanan Dinas	133.706.507.937,80	177.636.934.571,30	(43.930.426.633,50)	(24,73)
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.489.680.079,80	177.428.297.775,30	(43.938.617.695,50)	(24,76)
		1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.187.207.745,80	124.122.383.848,30	(33.935.176.102,50)	(27,34)
		2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.797.465.334,00	47.445.503.927,00	(6.648.038.593,00)	(14,01)
		3 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.211.687.000,00	5.240.565.000,00	(3.028.878.000,00)	(57,80)
		4 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293.320.000,00	619.845.000,00	(326.525.000,00)	(52,68)
B	Jumlah B (1)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	216.827.858,00	208.636.796,00	8.191.062,00	3,93
		1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	216.827.858,00	208.636.796,00	8.191.062,00	3,93

P



Pemerintah Kabupaten Berau

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
5	(A+B)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.128.299.434,00	14.566.901.400,00	6.561.398.034,00	45,04
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.855.799.434,00	14.566.901.400,00	6.288.898.034,00	43,17
		1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.781.849.434,00	2.232.151.400,00	1.549.698.034,00	69,43
		2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.153.450.000,00	1.517.750.000,00	1.635.700.000,00	107,77
		3 Belanja Beasiswa	13.920.500.000,00	10.783.000.000,00	3.137.500.000,00	29,10
		4 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	34.000.000,00	(34.000.000,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	272.500.000,00	0,00	272.500.000,00	0,00
		1 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	272.500.000,00	0,00	272.500.000,00	0,00
6	(A+B+C+D)	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	26.890.101.822,00	(26.890.101.822,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	26.890.101.822,00	(26.890.101.822,00)	(100,00)
		1 Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	26.890.101.822,00	(26.890.101.822,00)	(100,00)
7		Belanja Barang dan Jasa BOSP	29.390.360.499,00	406.914.888,00	28.983.445.611,00	7.122,73
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	28.577.626.501,00	391.914.888,00	28.185.711.613,00	7.191,79
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	27.602.445.084,00	0,00	27.602.445.084,00	0,00
		2 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	975.181.417,00	391.914.888,00	583.266.529,00	148,82
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	661.183.718,00	15.000.000,00	646.183.718,00	4.307,89
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	646.183.718,00	0,00	646.183.718,00	0,00
		2 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	151.550.280,00	0,00	151.550.280,00	0,00
		1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	151.550.280,00	0,00	151.550.280,00	0,00
8	(A)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.588.407.298,00	6.165.347.825,00	1.423.059.473,00	23,08
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.588.407.298,00	6.165.347.825,00	1.423.059.473,00	23,08
		1 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.588.407.298,00	6.165.347.825,00	1.423.059.473,00	23,08
9	(A)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.356.533.273,10	51.903.108.781,64	26.453.424.491,46	50,97
A	Jumlah A (1)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.356.533.273,10	51.903.108.781,64	26.453.424.491,46	50,97

P



No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan	%
					Penurunan	
	1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.356.533.273,10	51.903.108.781,64	26.453.424.491,46	50,97
JUMLAH			854.413.659.354,62	868.596.837.598,25	(14.183.178.243,63)	(1,63)

Data tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 854.413.659.354,62 atau 82,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp1.041.220.505.794,97. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp868.596.837.598,25, Belanja Barang dan Jasa mengalami **penurunan** senilai Rp14.183.178.243,63 atau 1,63%. Tidak tercapainya realisasi anggaran dikarenakan adanya beberapa kendala seperti Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kebutuhan, belanja yang tidak terlaksana, dan pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara dalam melakukan proses belanja. Selain itu Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Hibah	153.051.392.715,31	189.599.952.449,00

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp166.224.640.294,00 dengan realisasi senilai Rp153.051.392.715,31 atau 92,08%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per SKPD
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	22.938.432.480,00	21.738.254.348,00	94,77
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	102.446.012.469,00	97.455.931.541,00	95,13
4	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pangan	287.418.000,00	266.293.200,00	92,65
6	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.205.650.650,00	1.200.969.345,00	99,61
7	Dinas Kepemudaan & Olahraga	2.949.710.294,00	2.032.267.097,00	68,90
8	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	296.151.138,00	295.477.120,00	99,77
9	Dinas Perikanan	3.782.970.134,00	3.515.880.990,00	92,94
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	11.595.580.539,00	10.804.856.815,31	93,18
11	Dinas Perkebunan	1.652.192.245,00	1.618.181.500,00	97,94
12	Sekretariat Daerah	17.067.112.889,00	12.123.232.000,00	71,03
13	Kec Tg Redeb	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
14	Kec Teluk Bayur	0,00	0,00	0,00
15	Badan Kesbang, Politik & Linmas	1.253.409.456,00	1.250.048.759,00	99,73
	Jumlah	166.224.640.294,00	153.051.392.715,31	92,08

Realisasi Belanja Hibah Tahu Anggaran 2025 adalah senilai Rp153.051.392.715,31 mengalami **penurunan** senilai Rp36.548.559.733,69,00 atau 19,28% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp189.599.952.449,00. Rincian realisasi Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah per SKPD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	21.738.254.348,00	22.156.883.912,00	(418.629.564,00)	(1,89)
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	97.455.931.541,00	74.404.397.385,00	23.051.534.156,00	30,98
4	Dinas Sosial	0,00	73.681.800,00	(73.681.800,00)	(100,00)
5	Dinas Pangan	266.293.200,00	424.332.646,00	(158.039.446,00)	(37,24)
6	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.200.969.345,00	650.525.000,00	550.444.345,00	84,62
7	Dinas Kepemudaan & Olahraga	2.032.267.097,00	2.849.252.225,00	(816.985.128,00)	(28,67)
8	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	295.477.120,00	1.477.730.760,00	(1.182.253.640,00)	(80,00)
9	Dinas Perikanan	3.515.880.990,00	4.483.930.148,00	(968.049.158,00)	(21,59)
10	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	10.804.856.815,31	6.133.885.450,00	4.670.971.365,31	76,15
11	Dinas Perkebunan	1.618.181.500,00	1.695.052.550,00	(76.871.050,00)	(4,54)
12	Sekretariat Daerah	12.123.232.000,00	20.298.400.000,00	(8.175.168.000,00)	(40,27)
13	Kec Tg Redeb	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
14	Kec Teluk Bayur	0,00	254.177.111,00	(254.177.111,00)	(100,00)
15	Badan Kesbang, Politik & Linmas	1.250.048.759,00	53.847.703.462,00	(52.597.654.703,00)	(97,68)
	Jumlah	153.051.392.715,31	189.599.952.449,00	(36.548.559.733,69)	(19,28)

*) Rekap Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada Lampiran 5

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>10.001.500.000,00</u>	<u>15.174.000.000,00</u>

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp10.145.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp10.001.500.000,00 atau 98,59%, dengan rincian sebagai berikut:

P



**Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Sosial	10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,59
JUMLAH		10.145.000.000,00	10.001.500.000,00	98,59

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp10.001.500.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp5.172.500.000,00 atau 34,09% dibandingkan dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp15.174.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.48 Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
JUMLAH		10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)

5.1.2.2. Belanja Modal

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Modal	2.967.027.122.303,25	3.828.768.208.935,46

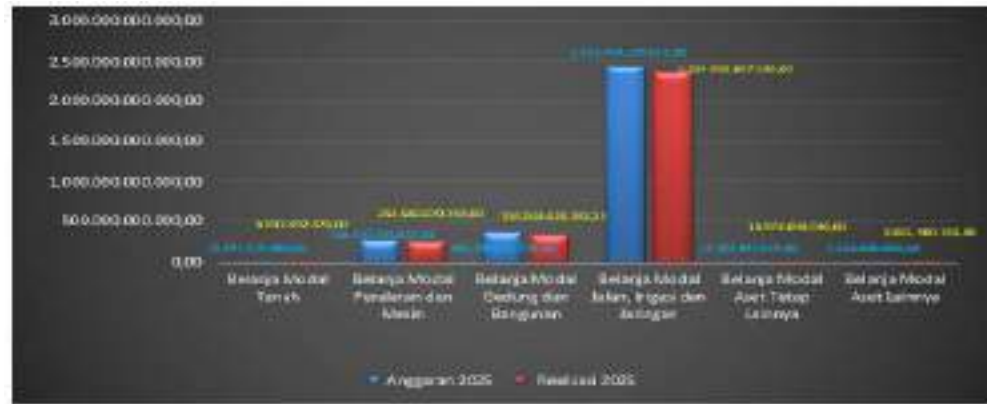
Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp3.091.908.012.785,76 dengan realisasi senilai Rp2.967.027.122.303,25 atau 95,96%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Tanah	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,65
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.389.632.338,48	336.504.709.092,25	93,37
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.432.439.129.612,00	2.354.928.778.730,00	96,81
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,84
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25
JUMLAH		3.091.908.012.785,76	2.967.027.122.303,25	95,96

(Handwritten signature)



Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

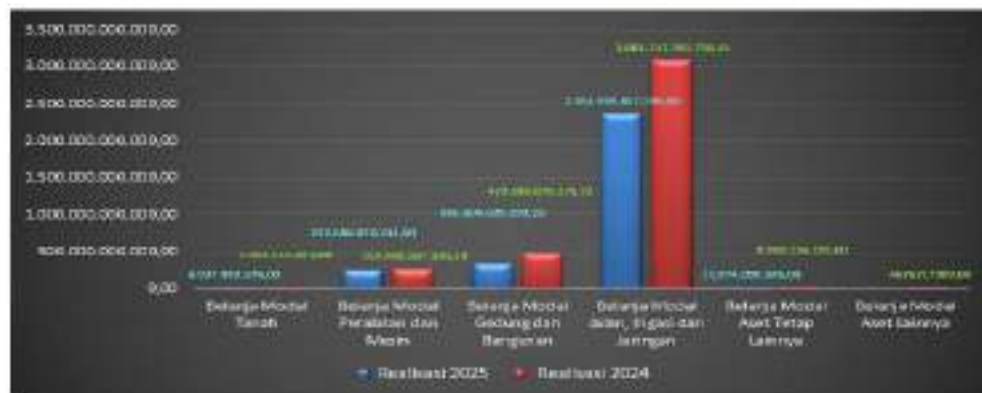
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp2.967.027.122.303,25 mengalami **penurunan** senilai Rp861.741.086.632,21 atau 22,51% dibandingkan dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.828.768.208.935,46. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024		Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
			Murni	Pembayaran Utang			
1	Belanja Modal Tanah	6.937.492.376,00	1.352.415.463,00	0,00	1.352.415.463,00	5.585.076.913,00	412,97
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.680.070.744,00	259.968.567.330,29	0,00	259.968.567.330,29	(7.288.496.586,29)	(2,80)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.504.709.092,25	472.685.076.375,72	0,00	472.685.076.375,72	(136.180.367.283,47)	(28,81)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.354.928.778.730,00	3.081.747.295.756,45	0,00	3.081.747.295.756,45	(726.818.517.026,45)	(23,58)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.974.090.596,00	8.338.136.101,00	0,00	8.338.136.101,00	5.635.954.495,00	67,59
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.001.980.765,00	4.676.717.909,00	0,00	4.676.717.909,00	(2.674.737.144,00)	(57,19)
	JUMLAH	2.967.027.122.303,25	3.828.768.208.935,46	0,00	3.828.768.208.935,46	(861.741.086.632,21)	(22,51)

[Handwritten signature]



Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>6.937.492.376,00</u>	<u>1.352.415.463,00</u>

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.391.573.880,00 dengan realisasi senilai Rp6.937.492.376,00 atau 45,07%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Tanah				
1	Belanja Modal Tanah Persil	5.310.000.000,00	4.061.700.000,00	76,49
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.280.210.000,00	4.061.700.000,00	76,92
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	29.790.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	10.081.573.880,00	2.875.792.376,00	28,53
	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	5.605.259.117,00	2.570.625.000,00	45,86
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	4.076.314.763,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	400.000.000,00	305.167.376,00	76,29
	Jumlah	15.391.573.880,00	6.937.492.376,00	45,07

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.937.492.376,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.585.076.913,00 atau 412,97% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.352.415.463,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan penurunan	%
Belanja Modal Tanah					
1	Belanja Modal Tanah Persil	4.061.700.000,00	361.051.000,00	3.700.649.000,00	1.024,97
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.061.700.000,00	361.051.000,00	3.700.649.000,00	1.024,97
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Lapangan	2.875.792.376,00	991.364.463,00	1.884.427.913,00	190,08
	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	2.570.625.000,00	0,00	2.570.625.000,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	991.364.463,00	(991.364.463,00)	(100,00)
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	305.167.376,00	0,00	305.167.376,00	0,00
	Jumlah	6.937.492.376,00	1.352.415.463,00	5.585.076.913,00	412,97

Dari tabel diatas tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah secara maksimal disebabkan adanya kegiatan pengadaan tanah pembangunan skala kecil yang dialokasikan di APBD-Perubahan sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk merealisasikannya.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 <u>252.680.070.744,00</u>	Tahun 2024 <u>259.968.567.330,29</u>

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp266.970.783.032,28 dengan realisasi senilai Rp252.680.070.744,00 atau 94,65%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,65
1	(A+B+C)	Belanja Modal Alat Besar	1.081.859.159,00	1.027.859.216,00	95,01
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Alat Besar Darat	218.119.853,00	212.581.000,00	97,46
	1	Belanja Modal Tractor	218.119.853,00	212.581.000,00	97,46
	2	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Bantu	863.739.306,00	815.278.216,00	94,39
	1	Belanja Modal Electric Generating Set	475.175.355,00	465.679.994,00	98,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
	2	Belanja Modal Pompa	85.675.724,00	58.576.550,00	68,37
	3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	61.899.985,00	54.023.729,00	87,28
	4	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	240.988.242,00	236.997.943,00	98,34
2	(A+B+C+D)	Belanja Modal Alat Angkutan	26.465.264.009,00	24.918.092.453,00	94,15
A	Jumlah A (1 s/d 6)	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	26.190.581.686,00	24.650.631.833,00	94,12
	1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.800.000.000,00	5.247.540.000,00	90,47
	2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.679.760.886,00	5.453.810.001,00	96,02
	3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.623.958.000,00	4.251.410.000,00	91,94
	4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.023.723.700,00	1.786.471.832,00	88,28
	5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	110.000.000,00	0,00	0,00
	6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.953.139.100,00	7.911.400.000,00	99,48
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25.144.017,00	24.939.120,00	99,19
	1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	25.144.017,00	24.939.120,00	99,19
C	Jumlah C (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	249.538.306,00	242.521.500,00	97,19
	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	78.632.400,00	75.924.000,00	96,56
	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	170.905.906,00	166.597.500,00	97,48
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
3	(A+B+C)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	268.468.907,00	201.633.314,00	75,10
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	55.670.100,00	49.057.243,00	88,12
	1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	8.452.200,00	3.139.029,00	37,14
	2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	17.755.900,00	17.673.514,00	99,54
	3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	29.462.000,00	28.244.700,00	95,87
	4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.582.145,00	4.580.000,00	99,95
	1	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
	3	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.582.145,00	4.580.000,00	
C	Jumlah C (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Ukur	208.216.662,00	147.996.071,00	71,08
	1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	10.722.000,00	9.703.620,00	90,50
	2	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	17.619.092,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	148.983.570,00	121.452.451,00	81,52
	4	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	30.892.000,00	16.840.000,00	54,51
4	(A)	Belanja Modal Alat Pertanian	349.603.126,00	338.160.757,00	96,73
A	Jumlah A (1 s/d 5)	Belanja Modal Alat Pengolahan	349.603.126,00	338.160.757,00	96,73
	1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	53.893.803,00	51.310.757,00	95,21
	2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	265.709.323,00	257.350.000,00	96,85
	3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00
	5	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33
5	(A+B+C)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.484.311.035,00	32.552.575.353,00	94,40
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Kantor	5.959.455.907,00	5.640.152.586,00	94,64
	1	Belanja Modal Mesin Ketik	18.349.176,00	18.308.000,00	99,78
	2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	178.591.436,00	177.828.000,00	99,57
	3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.694.735.059,00	2.607.718.514,00	96,77
	4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.067.780.236,00	2.836.298.072,00	92,45
B	Jumlah B (1 s/d 6)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.163.622.495,00	26.579.774.248,00	94,38
	1	Belanja Modal Mebel	21.670.246.294,00	20.999.646.217,00	96,91
	2	Belanja Modal Alat Pembersih	357.419.714,00	281.686.818,00	78,81
	3	Belanja Modal Alat Pendingin	2.294.747.160,00	2.048.885.258,00	89,29
	4	Belanja Modal Alat Dapur	268.263.601,00	233.531.165,00	87,05
	5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.049.717.984,00	2.584.579.760,00	84,75
	6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	523.227.742,00	431.445.030,00	82,46
C	Jumlah C (1 s/d 6)	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	361.232.633,00	332.648.519,00	92,09
	1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.151.132,00	17.220.000,00	89,92
	2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	110.079.977,00	103.917.170,00	94,40
	3	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	92.355.720,00	89.153.188,00	96,53
	4	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	43.544.412,00	40.811.500,00	93,72
	5	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00
	6	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	96.101.392,00	81.546.661,00	84,85

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
6	(A+B+C+D)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.603.588.712,28	5.356.545.180,00	95,59
A	Jumlah A (1 s/d 5)	Belanja Modal Alat Studio	5.247.313.281,36	5.015.670.458,00	95,59
	1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	453.902.181,00	432.289.826,00	95,24
	2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.417.088.326,36	3.288.611.898,00	96,24
	3	Belanja Modal Peralatan Cetak	25.100.000,00	24.475.000,00	97,51
	4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	896.771.409,00	845.836.960,00	94,32
	5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	454.451.365,00	424.456.774,00	93,40
B	Jumlah B (1 s/d 5)	Belanja Modal Alat Komunikasi	210.479.430,92	195.742.222,00	93,00
	1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	155.398.076,92	141.092.222,00	90,79
	2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	49.466.500,00	49.250.000,00	99,56
	3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	5.614.854,00	5.400.000,00	96,17
	5	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Peralatan Pemancar	145.796.000,00	145.132.500,00	99,54
	1	Belanja Modal Sumber Tenaga	145.796.000,00	145.132.500,00	99,54
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
7	(A+B)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	75.476.783.329,00	69.442.041.955,00	92,00
A	Jumlah A (1 s/d 15)	Belanja Modal Alat Kedokteran	68.547.128.579,00	63.860.926.533,00	93,16
	1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.710.801.700,00	5.481.359.520,00	81,68
	2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.894.087.894,00	1.588.621.324,00	83,87
	3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	22.017.441.523,00	21.693.784.469,00	98,53
	4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.659.904.042,00	3.484.954.734,00	61,57
	5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	174.900.346,00	68.551.110,00	39,19
	6	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.343.111.461,00	990.260.415,00	73,73
	7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.124.504.084,00	1.095.429.424,00	97,41
	8	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	21.400.000,00	21.000.000,00	98,13
	9	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	17.665.088,00	16.000.000,00	90,57
	10	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	6.832.072,00	6.832.072,00	100,00
	11	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.006.957.060,00	1.913.398.465,00	95,34
	12	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00
	13	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	11.951.453.309,00	11.882.665.000,00	99,42
	14	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	15.618.070.000,00	15.618.070.000,00	100,00
	15	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00

A



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025		%
				Anggaran	Realisasi	
B	Jumlah B (1 s/d 2)		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.929.654.750,00	5.581.115.422,00	80,54
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	85.964.000,00	84.760.000,00	98,60
		2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.843.690.750,00	5.496.355.422,00	80,31
8	(A+B+C+D)		Belanja Modal Alat Laboratorium	11.099.239.640,00	9.454.740.698,00	85,18
A	Jumlah A (1 s/d 13)		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	9.195.219.062,00	7.760.929.771,00	84,40
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.884.000,00	20.884.000,00	100,00
		4	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	6.525.743.477,00	6.265.796.807,00	96,02
		5	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	883.591.600,00	392.091.960,00	44,37
		7	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	269.500.000,00	266.000.004,00	98,70
		9	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	15.800.000,00	12.850.000,00	81,33
		10	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	25.852.000,00	25.850.000,00	99,99
		11	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	281.740.226,00	133.700.000,00	47,46
		12	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	657.682.759,00	132.647.000,00	20,17
		13	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	514.425.000,00	511.110.000,00	99,36
B	Jumlah B (1 s/d 2)		Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	670.926.575,00	649.775.000,00	96,85
		1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	433.447.575,00	425.000.000,00	98,05
		2	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	237.479.000,00	224.775.000,00	94,65
C	Jumlah C (1)		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	378.394.003,00	366.535.927,00	96,87
		1	Belanja Modal System/Power Supply	378.394.003,00	366.535.927,00	96,87
D	Jumlah D (1 s/d 2)		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	854.700.000,00	677.500.000,00	79,27
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	854.700.000,00	677.500.000,00	79,27
E	Jumlah E (1)		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00
9	(A+B)		Belanja Modal Komputer	34.996.029.426,00	34.122.362.985,00	97,50
A	Jumlah A (1 s/d 3)		Belanja Modal Komputer Unit	30.339.379.463,00	29.871.451.211,00	98,46
		1	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.664.120.652,00	1.585.768.100,00	95,29
		2	Belanja Modal Personal Computer	21.274.150.923,00	20.947.184.690,00	98,46
		3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.401.107.888,00	7.338.498.421,00	99,15
B	Jumlah B (1 s/d 5)		Belanja Modal Peralatan Komputer	4.656.649.963,00	4.250.911.774,00	91,29
		1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	47.487.600,00	36.496.800,00	76,86

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
	2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.013.002.976,00	2.687.302.113,00	89,19
	4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.147.219.135,00	1.101.024.793,00	95,97
	5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	448.940.252,00	426.088.068,00	94,91
10	(A)	Belanja Modal Alat Eksplorasi	21.151.085,00	20.949.000,00	99,04
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	21.151.085,00	20.949.000,00	99,04
	1	Belanja Modal Ukur/Instrumen	21.151.085,00	20.949.000,00	99,04
11	(A)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	260.006.400,00	250.612.470,00	96,39
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	260.006.400,00	250.612.470,00	96,39
	1	Belanja Modal Elektrik	260.006.400,00	250.612.470,00	96,39
12	(A)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00
13	(A+B)	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	296.955.321,00	286.581.700,00	96,51
A	Jumlah A (1 + 2)	Belanja Modal Alat Pelindung	86.618.221,00	80.104.000,00	92,48
	1	Belanja Modal Sepatu Lapangan	21.701.421,00	16.200.000,00	74,65
	2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	64.916.800,00	63.904.000,00	98,44
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat SAR	210.337.100,00	206.477.700,00	98,17
	1	Belanja Modal Alat Penolong	10.837.100,00	7.599.000,00	70,12
	2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	199.500.000,00	198.878.700,00	99,69
	3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00
14	(A)	Belanja Modal Rambu-Rambu	61.884.463.200,00	60.664.228.985,00	98,03
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	61.884.463.200,00	60.664.228.985,00	98,03
	1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	344.671.200,00	344.615.040,00	99,98
	2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	61.539.792.000,00	60.319.613.945,00	98,02
15	(A)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	70.989.000,00	67.364.000,00	94,89
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	70.989.000,00	67.364.000,00	94,89
	1	Belanja Modal Peralatan Permainan	70.989.000,00	67.364.000,00	94,89
	2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	(A)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
17	(A+B+C)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.402.306.633,00	11.245.636.823,00	98,63

P



(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025		%
				Anggaran	Realisasi	
A	Jumlah A (1 s/d 2)		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11.292.527.583,00	11.138.097.773,00	98,63
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	11.269.370.583,00	11.114.940.773,00	98,63
		2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	23.157.000,00	23.157.000,00	100,00
B			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	80.979.050,00	80.979.050,00	100,00
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	80.979.050,00	80.979.050,00	100,00
C			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	28.800.000,00	26.560.000,00	92,22
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	28.800.000,00	26.560.000,00	92,22
18	(A)		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.209.764.050,00	2.730.685.855,00	85,07
A	Jumlah A (1)		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.209.764.050,00	2.730.685.855,00	85,07
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.209.764.050,00	2.730.685.855,00	85,07
			Jumlah	266.970.783.032,28	252.680.070.744,00	94,65

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp252.680.070.744,00 mengalami **penurunan** senilai Rp7.288.496.586,29 atau 2,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp259.968.567.330,29. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025	2024	kenaikan	%
						penurunan	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.680.070.744,00	259.968.567.330,29	(7.288.496.586,29)	(2,80)
1	(A+B)		Belanja Modal Alat Besar	1.027.859.216,00	4.143.312.274,00	(3.115.453.058,00)	(75,19)
A	Jumlah A (1 s/d 2)		Belanja Modal Alat Besar Darat	212.581.000,00	3.806.399.000,00	(3.593.818.000,00)	(94,42)
		1	Belanja Modal Tractor	212.581.000,00	44.944.000,00	167.637.000,00	372,99
		2	Belanja Modal Excavator	0,00	3.761.455.000,00	(3.761.455.000,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1)		Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1 s/d 4)		Belanja Modal Alat Bantu	815.278.216,00	336.913.274,00	478.364.942,00	141,98
		1	Belanja Modal Electric Generating Set	465.679.994,00	0,00	465.679.994,00	0,00
		2	Belanja Modal Pompa	58.576.550,00	329.434.760,00	(270.858.210,00)	(82,22)
		3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	54.023.729,00	0,00	54.023.729,00	0,00

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025	2024	kenaikan	%
					penurunan	
	4	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	236.997.943,00	7.478.514,00	229.519.429,00	3.069,05
2	(A+B+C+D)	Belanja Modal Alat Angkutan	24.918.092.453,00	38.702.110.978,00	(13.784.018.525,00)	(35,62)
A	Jumlah A (1 s/d 6)	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.650.631.833,00	36.174.472.728,00	(11.523.840.895,00)	(31,86)
	1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.247.540.000,00	9.517.380.014,00	(4.269.840.014,00)	(44,86)
	2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.453.810.001,00	7.587.500.000,00	(2.133.689.999,00)	(28,12)
	3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.251.410.000,00	1.357.100.000,00	2.894.310.000,00	213,27
	4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.786.471.832,00	4.466.095.714,00	(2.679.623.882,00)	(60,00)
	5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	483.520.000,00	(483.520.000,00)	(100,00)
	6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.911.400.000,00	12.762.877.000,00	(4.851.477.000,00)	(38,01)
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	24.939.120,00	1.050.000,00	23.889.120,00	2.275,15
	1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	24.939.120,00	1.050.000,00	23.889.120,00	2.275,15
C	Jumlah C (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	242.521.500,00	2.526.588.250,00	(2.284.066.750,00)	(90,40)
	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	542.425.000,00	(542.425.000,00)	(100,00)
	2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	75.924.000,00	1.278.493.250,00	(1.202.569.250,00)	(94,06)
	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	166.597.500,00	705.670.000,00	(539.072.500,00)	(76,39)
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(A+B+C)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	201.633.314,00	103.819.392,00	97.813.922,00	94,22
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	49.057.243,00	65.843.692,00	(16.786.449,00)	(25,49)
	1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.139.029,00	0,00	3.139.029,00	0,00
	2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	17.673.514,00	0,00	17.673.514,00	0,00
	3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	28.244.700,00	59.243.622,00	(30.998.922,00)	(52,32)
	4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	6.600.070,00	(6.600.070,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.580.000,00	34.090.500,00	(29.510.500,00)	(86,57)

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025	2024	kenaikan	%
					penurunan	
	1	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	3.441.000,00	(3.441.000,00)	(100,00)
	2	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	26.952.900,00	(26.952.900,00)	(100,00)
	3	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.580.000,00	3.696.600,00	883.400,00	23,90
C	Jumlah C (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Ukur	147.996.071,00	3.885.200,00	144.110.871,00	3.709,23
	1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	9.703.620,00	0,00	9.703.620,00	0,00
	2	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	121.452.451,00	0,00	121.452.451,00	0,00
	4	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	16.840.000,00	3.885.200,00	12.954.800,00	333,44
4	(A)	Belanja Modal Alat Pertanian	338.160.757,00	126.507.550,00	211.653.207,00	167,30
A	Jumlah A (1 s/d 5)	Belanja Modal Alat Pengolahan	338.160.757,00	126.507.550,00	211.653.207,00	167,30
	1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	51.310.757,00	29.437.420,00	21.873.337,00	74,30
	2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	257.350.000,00	36.910.130,00	220.439.870,00	597,23
	3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	53.880.000,00	(53.880.000,00)	(100,00)
	4	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	6.280.000,00	(6.280.000,00)	(100,00)
	5	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00
5	(A+B+C)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.552.575.353,00	45.851.028.127,00	(13.298.452.774,00)	(29,00)
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Alat Kantor	5.640.152.586,00	2.827.995.120,00	2.812.157.466,00	99,44
	1	Belanja Modal Mesin Ketik	18.308.000,00	0,00	18.308.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	177.828.000,00	121.750.000,00	56.078.000,00	46,06
	3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.607.718.514,00	283.671.500,00	2.324.047.014,00	819,27
	4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.836.298.072,00	2.422.573.620,00	413.724.452,00	17,08
B	Jumlah B (1 s/d 6)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.579.774.248,00	42.467.230.917,00	(15.887.456.669,00)	(37,41)
	1	Belanja Modal Mebel	20.999.646.217,00	36.981.886.449,00	(15.982.240.232,00)	(43,22)
	2	Belanja Modal Alat Pembersih	281.686.818,00	203.612.900,00	78.073.918,00	38,34
	3	Belanja Modal Alat Pendingin	2.048.885.258,00	2.224.292.290,00	(175.407.032,00)	(7,89)
	4	Belanja Modal Alat Dapur	233.531.165,00	234.656.685,00	(1.125.520,00)	(0,48)
	5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.584.579.760,00	2.575.252.593,00	9.327.167,00	0,36

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025	2024	kenaikan	%
						penurunan	
		6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	431.445.030,00	247.530.000,00	183.915.030,00	74,30
C	Jumlah C (1 s/d 6)		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	332.648.519,00	555.802.090,00	(223.153.571,00)	(40,15)
		1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.220.000,00	36.451.200,00	(19.231.200,00)	(52,76)
		2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	103.917.170,00	96.120.000,00	7.797.170,00	8,11
		3	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	89.153.188,00	28.975.500,00	60.177.688,00	207,68
		4	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	40.811.500,00	30.240.000,00	10.571.500,00	34,96
		5	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	174.732.500,00	(174.732.500,00)	(100,00)
		6	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	81.546.661,00	189.282.890,00	(107.736.229,00)	(56,92)
6	(A+B+C+D)		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.356.545.180,00	14.596.736.251,00	(9.240.191.071,00)	(63,30)
A	Jumlah A (1 s/d 5)		Belanja Modal Alat Studio	5.015.670.458,00	11.583.911.351,00	(6.568.240.893,00)	(56,70)
		1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	432.289.826,00	603.860.770,00	(171.570.944,00)	(28,41)
		2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.288.611.898,00	9.345.981.561,00	(6.057.369.663,00)	(64,81)
		3	Belanja Modal Peralatan Cetak	24.475.000,00	0,00	24.475.000,00	0,00
		4	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	845.836.960,00	234.470.500,00	611.366.460,00	260,74
		5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	424.456.774,00	1.399.598.520,00	(975.141.746,00)	(69,67)
B	Jumlah B (1 s/d 3)		Belanja Modal Alat Komunikasi	195.742.222,00	142.207.700,00	53.534.522,00	37,65
		1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	141.092.222,00	71.454.000,00	69.638.222,00	97,46
		2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	49.250.000,00	0,00	49.250.000,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	49.743.200,00	(49.743.200,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	5.400.000,00	8.710.500,00	(3.310.500,00)	(38,01)
		5	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	12.300.000,00	(12.300.000,00)	(100,00)
C	Jumlah C (1)		Belanja Modal Peralatan Pemancar	145.132.500,00	2.870.617.200,00	(2.725.484.700,00)	(94,94)
		1	Belanja Modal Sumber Tenaga	145.132.500,00	2.870.617.200,00	(2.725.484.700,00)	(94,94)
D	Jumlah D (1)		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	(A+B)		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	69.442.041.955,00	10.269.880.156,00	59.172.161.799,00	576,17

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025	2024	kenaikan	%
						penurunan	
A	Jumlah A (1 s/d 15)		Belanja Modal Alat Kedokteran	63.860.926.533,00	8.997.374.666,00	54.863.551.867,00	609,77
		1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.481.359.520,00	2.014.909.196,00	3.466.450.324,00	172,04
		2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.588.621.324,00	940.735.200,00	647.886.124,00	68,87
		3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	21.693.784.469,00	511.717.400,00	21.182.067.069,00	4.139,41
		4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.484.954.734,00	962.979.870,00	2.521.974.864,00	261,89
		5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	68.551.110,00	38.272.000,00	30.279.110,00	79,12
		6	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	990.260.415,00	88.476.000,00	901.784.415,00	1.019,24
		7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.095.429.424,00	1.566.500.000,00	(471.070.576,00)	(30,07)
		8	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
		9	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
		10	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	6.832.072,00	0,00	6.832.072,00	0,00
		11	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.913.398.465,00	459.861.000,00	1.453.537.465,00	316,08
		12	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	13.760.000,00	(13.760.000,00)	(100,00)
		13	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	11.882.665.000,00	2.396.452.000,00	9.486.213.000,00	395,84
		14	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	15.618.070.000,00	0,00	15.618.070.000,00	0,00
		15	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	3.712.000,00	(3.712.000,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1 s/d 2)		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.581.115.422,00	1.272.505.490,00	4.308.609.932,00	338,59
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	84.760.000,00	0,00	84.760.000,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.496.355.422,00	1.272.505.490,00	4.223.849.932,00	331,93
							#DIV/0!
8	(A+B+C+D)		Belanja Modal Alat Laboratorium	9.454.740.698,00	4.015.496.170,00	5.439.244.528,00	135,46
A	Jumlah A (1 s/d 13)		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.760.929.771,00	3.368.526.170,00	4.392.403.601,00	130,40
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	66.400.000,00	(66.400.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	0,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.884.000,00	0,00	20.884.000,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025	2024	kenaikan	%
					penurunan	
	4	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	6.265.796.807,00	1.053.833.734,00	5.211.963.073,00	494,57
	5	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
	6	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	392.091.960,00	451.488.300,00	(59.396.340,00)	(13,16)
	7	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	96.570.000,00	(96.570.000,00)	(100,00)
	8	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	266.000.004,00	0,00	266.000.004,00	0,00
	9	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00	0,00
	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00	0,00
	11	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	133.700.000,00	24.280.136,00	109.419.864,00	450,66
	12	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	132.647.000,00	1.283.654.000,00	(1.151.007.000,00)	(89,67)
	13	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	511.110.000,00	381.600.000,00	129.510.000,00	33,94
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	649.775.000,00	262.508.000,00	387.267.000,00	147,53
	1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	425.000.000,00	134.335.000,00	290.665.000,00	216,37
	2	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	224.775.000,00	128.173.000,00	96.602.000,00	75,37
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	366.535.927,00	279.244.200,00	87.291.727,00	31,26
	1	Belanja Modal System/Power Supply	366.535.927,00	279.244.200,00	87.291.727,00	31,26
D	Jumlah D (1 s/d 2)	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	677.500.000,00	2.308.800,00	675.191.200,00	29.244,25
	1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	2.308.800,00	(2.308.800,00)	(100,00)
		Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	677.500.000,00	0,00	677.500.000,00	0,00
E	Jumlah E (1)	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	102.909.000,00	(102.909.000,00)	(100,00)
		Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	102.909.000,00	(102.909.000,00)	(100,00)
9	(A+B)	Belanja Modal Komputer	34.122.362.985,00	32.765.178.511,00	1.357.184.474,00	4,14
A	Jumlah A (1 s/d 3)	Belanja Modal Komputer Unit	29.871.451.211,00	27.600.416.016,00	2.271.035.195,00	8,23
	1	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.585.768.100,00	48.300.000,00	1.537.468.100,00	3.183,16
	2	Belanja Modal Personal Computer	20.947.184.690,00	21.262.336.616,00	(315.151.926,00)	(1,48)

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025	2024	kenaikan	%
					penurunan	
	3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.338.498.421,00	6.289.779.400,00	1.048.719.021,00	16,67
B	Jumlah B (1 s/d 5)	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.250.911.774,00	5.164.762.495,00	(913.850.721,00)	(17,69)
	1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	36.496.800,00	0,00	36.496.800,00	0,00
	2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	3.555.000,00	(3.555.000,00)	(100,00)
	3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.687.302.113,00	2.064.805.020,00	622.497.093,00	30,15
	4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.101.024.793,00	1.096.371.599,00	4.653.194,00	0,42
	5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	426.088.068,00	2.000.030.876,00	(1.573.942.808,00)	(78,70)
10	(A)	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.949.000,00	0,00	20.949.000,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	20.949.000,00	0,00	20.949.000,00	0,00
	1	Belanja Modal Ukur/Instrumen	20.949.000,00	0,00	20.949.000,00	0,00
11	(A)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	250.612.470,00	0,00	250.612.470,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	250.612.470,00	0,00	250.612.470,00	0,00
	1	Belanja Modal Elektrik	250.612.470,00	0,00	250.612.470,00	0,00
12	(A)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
		Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
13	(A+B)	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	286.581.700,00	253.850.620,00	32.731.080,00	12,89
A	Jumlah A (1 + 2)	Belanja Modal Alat Pelindung	80.104.000,00	19.106.620,00	60.997.380,00	319,25
	1	Belanja Modal Sepatu Lapangan	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	63.904.000,00	19.106.620,00	44.797.380,00	234,46
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat SAR	206.477.700,00	234.744.000,00	(28.266.300,00)	(12,04)
	1	Belanja Modal Alat Penolong	7.599.000,00	0,00	7.599.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	198.878.700,00	151.544.000,00	47.334.700,00	31,23
		Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	83.200.000,00	(83.200.000,00)	(100,00)
14	(A)	Belanja Modal Rambu-Rambu	60.664.228.985,00	92.388.565.817,29	(31.724.336.832,29)	(34,34)
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	60.664.228.985,00	92.388.565.817,29	(31.724.336.832,29)	(34,34)

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025	2024	kenaikan	%
					penurunan	
	1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	344.615.040,00	400.180.000,00	(55.564.960,00)	(13,88)
	2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	60.319.613.945,00	91.988.385.817,29	(31.668.771.872,29)	(34,43)
15	(A)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	67.364.000,00	270.840.000,00	(203.476.000,00)	(75,13)
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	67.364.000,00	270.840.000,00	(203.476.000,00)	(75,13)
	1	Belanja Modal Peralatan Permainan	67.364.000,00	75.320.000,00	(7.956.000,00)	(10,56)
	2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	195.520.000,00	(195.520.000,00)	(100,00)
16	(A)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	12.541.998.984,00	(12.541.998.984,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	12.541.998.984,00	(12.541.998.984,00)	(100,00)
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	12.541.998.984,00	(12.541.998.984,00)	(100,00)
17	(A+B+C)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.245.636.823,00	586.060.150,00	10.659.576.673,00	1.818,85
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11.138.097.773,00	586.060.150,00	10.552.037.623,00	1.800,50
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	11.114.940.773,00	0,00	11.114.940.773,00	0,00
	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	23.157.000,00	586.060.150,00	(562.903.150,00)	(96,05)
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	80.979.050,00	0,00	80.979.050,00	0,00
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	80.979.050,00	0,00	80.979.050,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	26.560.000,00	0,00	26.560.000,00	0,00
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	26.560.000,00	0,00	26.560.000,00	0,00
18	(A)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.730.685.855,00	3.342.682.350,00	(611.996.495,00)	(18,31)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.730.685.855,00	3.342.682.350,00	(611.996.495,00)	(18,31)
	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.730.685.855,00	3.342.682.350,00	(611.996.495,00)	(18,31)
		Jumlah	252.680.070.744,00	259.968.567.330,29	(7.288.496.586,29)	(2,80)

Dari tabel diatas tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak tersedia, barang yang

P



dianggarkan di DPA tidak relevan dengan harga di pasaran (harga di pasaran lebih tinggi), keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup dan gagal lelang karena tidak ada penyedia yang berminat.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>336.504.709.092,25</u>	<u>472.685.076.375,72</u>

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp360.389.632.338,48 dengan realisasi senilai Rp336.504.709.092,25 atau 93,37%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.389.632.338,48	336.504.709.092,25	93,37
1	(A+B)	Belanja Modal Bangunan Gedung	332.511.455.909,48	311.111.722.831,25	93,56
A	Jumlah A (1 s/d 17)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	332.511.455.909,48	311.111.722.831,25	93,56
		1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	114.150.642.617,48	106.658.615.389,95	93,44
		2 Belanja Modal Bangunan Gudang	150.871.000,00	150.511.000,00	99,76
		3 Belanja Modal Bangunan Kesehatan	37.436.558.011,00	30.173.936.267,42	80,60
		4 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.771.274.000,00	6.077.805.749,00	78,21
		5 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
		6 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	70.359.584.946,00	66.596.806.859,20	94,65
		7 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.440.209.500,00	1.410.451.069,00	97,93
		8 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00
		9 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	195.000.000,00	194.691.381,00	99,84
		10 Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00
		11 Belanja Modal Bangunan Terbuka	145.175.820,00	144.410.000,00	99,47
		12 Belanja Modal Bangunan Industri	223.992.600,00	223.039.903,00	99,57
		13 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	150.000.000,00	148.350.545,00	98,90
		14 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.063.059.720,00	45.940.721.609,68	97,62
		15 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	51.975.566.335,00	51.975.566.335,00	100,00
		16 Belanja Modal Bangunan Parkir	500.500.000,00	474.567.723,00	94,82
		17 Belanja Modal Taman	949.021.360,00	942.249.000,00	99,29

A



(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2025		%
				Anggaran	Realisasi	
B	Jumlah B (1 s/d 2)		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	(A)		Belanja Modal Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00
			Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	(A)		Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
4	(A)		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.863.176.429,00	1.679.048.261,00	90,12
A	Jumlah A (1 s/d 2)		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.863.176.429,00	1.679.048.261,00	90,12
		1	Belanja Modal Pagar	1.863.176.429,00	1.679.048.261,00	90,12
		2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	(A)		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.015.000.000,00	23.713.938.000,00	91,15
	Jumlah A (1)		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.015.000.000,00	23.713.938.000,00	91,15
		1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	26.015.000.000,00	23.713.938.000,00	91,15
Jumlah				360.389.632.338,48	336.504.709.092,25	93,37

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp336.504.709.092,25 mengalami **penurunan** senilai Rp136.180.367.283,47 atau 28,81% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp472.685.076.375,72. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

(Handwritten signature)



**Tabel 5.56 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.504.709.092,25	472.685.076.375,72	(136.180.367.283,47)	(28,81)
1	(A+B)	Belanja Modal Bangunan Gedung	311.111.722.831,25	429.750.956.792,72	(118.639.233.961,47)	(27,61)
A	Jumlah A (1 s/d 17)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	311.111.722.831,25	428.863.032.792,72	(117.751.309.961,47)	(27,46)
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	106.658.615.389,95	58.499.852.776,51	48.158.762.613,44	82,32
	2	Belanja Modal Bangunan Gudang	150.511.000,00	0,00	150.511.000,00	0,00
	3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	30.173.936.267,42	26.607.079.130,14	3.566.857.137,28	13,41
	4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.077.805.749,00	2.211.853.081,35	3.865.952.667,65	174,78
	5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	14.346.168.310,00	(14.346.168.310,00)	(100,00)
	6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	66.596.806.859,20	86.464.885.023,91	(19.868.078.164,71)	(22,98)
	7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.410.451.069,00	1.635.149.259,00	(224.698.190,00)	(13,74)
	8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	10.019.642.985,67	(10.019.642.985,67)	(100,00)
	9	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	194.691.381,00	0,00	194.691.381,00	0,00
	10	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,0	257.017.959,00	(257.017.959,00)	(100,00)
	11	Belanja Modal Bangunan Terbuka	144.410.000,00	30.900.000,00	113.510.000,00	367,35
	12	Belanja Modal Bangunan Industri	223.039.903,00	4.695.319.180,00	(4.472.279.277,00)	(95,25)
	13	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	148.350.545,00	23.213.000,00	125.137.545,00	539,08
	14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.940.721.609,68	33.777.240.477,19	12.163.481.132,49	36,01
	15	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	51.975.566.335,00	188.047.368.418,04	(136.071.802.083,04)	(72,36)
	16	Belanja Modal Bangunan Parkir	474.567.723,00	109.500.000,00	365.067.723,00	333,40
	17	Belanja Modal Taman	942.249.000,00	2.137.843.191,91	(1.195.594.191,91)	(55,93)
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	887.924.000,00	(887.924.000,00)	(100,00)
	1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	681.055.000,00	(681.055.000,00)	(100,00)
	2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	206.869.000,00	(206.869.000,00)	(100,00)

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
2	(A)	Belanja Modal Bangunan Monumen	0,00	358.859.195,00	(358.859.195,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	358.859.195,00	(358.859.195,00)	(100,00)
		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	358.859.195,00	(358.859.195,00)	(100,00)
3	(A)	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	49.998.000,00	(49.998.000,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	49.998.000,00	(49.998.000,00)	(100,00)
		1 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	49.998.000,00	(49.998.000,00)	(100,00)
4	(A)	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.679.048.261,00	2.966.595.088,00	(1.287.546.827,00)	(43,40)
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.679.048.261,00	2.966.595.088,00	(1.287.546.827,00)	(43,40)
		1 Belanja Modal Pagar	1.679.048.261,00	2.929.595.088,00	(1.250.546.827,00)	(42,69)
		2 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	37.000.000,00	(37.000.000,00)	(100,00)
5	(A)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	23.713.938.000,00	39.558.667.300,00	(15.844.729.300,00)	(40,05)
	Jumlah A (1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	23.713.938.000,00	39.558.667.300,00	(15.844.729.300,00)	(40,05)
		1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	23.713.938.000,00	39.558.667.300,00	(15.844.729.300,00)	(40,05)
Jumlah			336.504.709.092,25	472.685.076.375,72	(136.180.367.283,47)	(28,81)

Dari tabel diatas Belanja Modal Gedung dan Bangunan realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 disebabkan belum tuntasnya pembebasan lahan tanah (*clear dan clean*), tidak sepakatnya antara SKPD teknis dengan kepala wilayah (Camat) di dalam penempatan lokasi bangunan, tidak siapnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan, gagal lelang karena tidak ada yang berminat, keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>2.354.928.778.730,00</u>	<u>3.081.747.295.756,45</u>

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.432.439.129.612,00 dengan realisasi senilai Rp2.354.928.778.730,00

P



atau 96,81% . Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan serta realisasi 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
	Jumlah (1+2+3+4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.432.439.129.612,00	2.354.928.778.730,00	96,81
1	(A+B)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.426.521.095.718,00	1.385.914.179.099,00	97,15
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Jalan	1.354.735.034.988,00	1.316.702.421.415,00	97,19
		1 Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.354.735.034.988,00	1.316.702.421.415,00	97,19
		2 Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Jembatan	71.786.060.730,00	69.211.757.684,00	96,41
		1 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	71.786.060.730,00	69.211.757.684,00	96,41
2	(A+B+C+D+E)	Belanja Modal Bangunan Air	980.034.848.074,00	945.329.245.295,00	96,46
A	Jumlah A (1 s/d 3)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	184.390.825.750,00	170.161.750.104,00	92,28
		1 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	184.390.825.750,00	170.161.750.104,00	92,28
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	297.939.093.656,00	293.082.068.980,00	98,37
		1 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	297.939.093.656,00	293.082.068.980,00	98,37
C	Jumlah C (1 + 2)	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	135.636.946.266,00	130.915.528.559,00	96,52
		1 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	135.636.946.266,00	130.915.528.559,00	96,52
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	360.860.385.403,00	349.965.069.414,00	96,98
		1 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	360.860.385.403,00	349.965.069.414,00	96,98
E	Jumlah E (1)	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.207.596.999,00	1.204.828.238,00	99,77
		1 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.207.596.999,00	1.204.828.238,00	99,77
3	(A+B+C)	Belanja Modal Instalasi	25.070.135.820,00	22.912.064.087,00	91,39
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	683.008.288,00	650.000.000,00	95,17
		1 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	683.008.288,00	650.000.000,00	0,00
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.371.000.000,00	4.360.000.000,00	99,75
		1 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.371.000.000,00	4.360.000.000,00	99,75
C	Jumlah C (1 s/d 2)	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	19.705.022.532,00	17.591.264.087,00	89,27
		1 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	395.000.000,00	390.000.000,00	98,73
		2 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	19.310.022.532,00	17.201.264.087,00	89,08
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	311.105.000,00	310.800.000,00	99,90
		1 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00
		2 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	311.105.000,00	310.800.000,00	99,90

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Realisasi	
4	(A)	Belanja Modal Jaringan	657.250.000,00	620.407.000,00	94,39
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Jaringan Listrik	657.250.000,00	620.407.000,00	94,39
	1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	657.250.000,00	620.407.000,00	94,39
5	(A)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	155.800.000,00	152.883.249,00	98,13
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	155.800.000,00	152.883.249,00	98,13
	1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	155.800.000,00	152.883.249,00	98,13
		Jumlah	2.432.439.129.612,00	2.354.928.778.730,00	96,81

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.354.928.778.730,00 mengalami **penurunan** senilai Rp726.818.517.026,45 atau 23,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
	Jumlah (1+2+3+4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.354.928.778.730,00	3.081.747.295.756,45	(726.818.517.026,45)	(23,58)
1	(A+B)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.385.914.179.099,00	1.859.571.958.318,60	(473.657.779.219,60)	(25,47)
A	Jumlah A (1 s/d 4)	Belanja Modal Jalan	1.316.702.421.415,00	1.859.351.935.145,60	(542.649.513.730,60)	(29,18)
	1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.316.702.421.415,00	1.855.541.140.642,60	(538.838.719.227,60)	(29,04)
	2	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	3.810.794.503,00	(3.810.794.503,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Jembatan	69.211.757.684,00	220.023.173,00	68.991.734.511,00	31.356,58
	1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	69.211.757.684,00	220.023.173,00	68.991.734.511,00	31.356,58
2	(A+B+C+D+E)	Belanja Modal Bangunan Air	945.329.245.295,00	1.201.639.662.369,85	(256.310.417.074,85)	(21,33)
A	Jumlah A (1 s/d 3)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	170.161.750.104,00	236.148.734.770,00	(65.986.984.666,00)	(27,94)
	1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	170.161.750.104,00	236.148.734.770,00	(65.986.984.666,00)	(27,94)
B	Jumlah B (1 s/d 2)	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	293.082.068.980,00	516.659.397.260,85	(223.577.328.280,85)	(43,27)
	1	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	293.082.068.980,00	516.659.397.260,85	(223.577.328.280,85)	(43,27)
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	130.915.528.559,00	241.903.747.044,00	(110.988.218.485,00)	(45,88)
	1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	199.873.000,00	(199.873.000,00)	100,00

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
	2	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	130.915.528.559,00	241.703.874.044,00	(110.788.345.485,00)	(45,84)
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	349.965.069.414,00	205.945.083.661,00	144.019.985.753,00	69,93
	1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	349.965.069.414,00	205.945.083.661,00	144.019.985.753,00	69,93
E	Jumlah E (1)	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.204.828.238,00	982.699.634,00	222.128.604,00	22,60
	1	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.204.828.238,00	982.699.634,00	222.128.604,00	22,60
3	(A+B+C)	Belanja Modal Instalasi	22.912.064.087,00	20.535.675.068,00	2.376.389.019,00	11,57
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00
	1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.360.000.000,00	1.942.000.000,00	2.418.000.000,00	124,51
	1	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.360.000.000,00	1.942.000.000,00	2.418.000.000,00	124,51
C	Jumlah C (1 s/d 2)	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	17.591.264.087,00	18.444.325.068,00	(853.060.981,00)	4,63
	1	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	17.201.264.087,00	18.444.325.068,00	(1.243.060.981,00)	(6,74)
D	Jumlah D (1)	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	310.800.000,00	149.350.000,00	161.450.000,00	108,10
	1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	149.350.000,00	(149.350.000,00)	(100,00)
		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	310.800.000,00	0,00	310.800.000,00	0,00
4	(A)	Belanja Modal Jaringan	620.407.000,00	0,00	620.407.000,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Jaringan Listrik	620.407.000,00	0,00	620.407.000,00	0,00
	1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	620.407.000,00	0,00	620.407.000,00	0,00
5	(A)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	152.883.249,00	0,00	152.883.249,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	152.883.249,00	0,00	152.883.249,00	0,00
	1	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	152.883.249,00	0,00	152.883.249,00	0,00
		Jumlah	2.354.928.778.730,00	3.081.747.295.756,45	(726.818.517.026,45)	(23,58)

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

Tahun 2025
13.974.090.596,00

Tahun 2024
8.338.136.101,00

P



Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp14.282.893.923,00 dengan realisasi senilai Rp13.974.090.596,00 atau 97,84%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Jumlah	
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,84
1	(A+B+C)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.890.802.852,00	7.779.145.565,00	98,58
A	Jumlah A (1 s/d 8)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	7.890.802.852,00	7.779.145.565,00	98,58
	1	Belanja Modal Buku Umum	7.890.802.852,00	7.779.145.565,00	98,58
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Musik	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	(A+B)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	99.000.000,00	98.790.000,00	99,79
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	99.000.000,00	98.790.000,00	99,79
	1	Belanja Modal Alat Musik	99.000.000,00	98.790.000,00	99,79
	2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	(A)	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
4	(A)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00
5	(A)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	2025		%
			Anggaran	Jumlah	
		1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
6	A+B+C	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.293.091.071,00	6.096.155.031,00	96,87
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.186.265.671,00	5.989.329.631,00	96,82
		1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.160.388.671,00	5.967.776.631,00	96,87
		2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	25.877.000,00	21.553.000,00	83,29
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	86.325.400,00	86.325.400,00	100,00
		1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	86.325.400,00	86.325.400,00	100,00
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
		1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
		Jumlah	14.282.893.923,00	13.974.090.596,00	97,84

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.974.090.596,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.635.954.495,00 atau 67,59% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.338.136.101,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.974.090.596,00	8.251.575.351,00	5.722.515.245,00	69,35
1	(A+B+C)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.779.145.565,00	1.695.729.650,00	6.083.415.915,00	358,75
A	Jumlah A (1 s/d 8)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	7.779.145.565,00	1.643.729.650,00	6.135.415.915,00	373,26
		1 Belanja Modal Buku Umum	7.779.145.565,00	1.643.729.650,00	6.135.415.915,00	373,26
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	52.000.000,00	(52.000.000,00)	(100,00)
		1 Belanja Modal Audio Visual	0,00	52.000.000,00	(52.000.000,00)	(100,00)
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Belanja Modal Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(A+B)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	98.790.000,00	5.013.000,00	93.777.000,00	1.870,68

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	98.790.000,00	5.013.000,00	93.777.000,00	1.870,68
	1	Belanja Modal Alat Musik	98.790.000,00	0,00	98.790.000,00	0,00
	2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	5.013.000,00	(5.013.000,00)	(100,00)
B	Jumlah B (1 s/d 3)	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	A	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
5	A	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.550.832.701,00	(6.550.832.701,00)	(100,00)
A	Jumlah A (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.550.832.701,00	(6.550.832.701,00)	(100,00)
	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	6.550.832.701,00	(6.550.832.701,00)	(100,00)
6	A+B+C	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.096.155.031,00	86.560.750,00	6.009.594.281,00	6.942,63
A	Jumlah A (1 s/d 2)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.989.329.631,00	86.560.750,00	5.902.768.881,00	6.819,22
	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.967.776.631,00	0,00	5.967.776.631,00	0,00
	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	21.553.000,00	86.560.750,00	(65.007.750,00)	(75,10)
B	Jumlah B (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	86.325.400,00	0,00	86.325.400,00	0,00
	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	86.325.400,00	0,00	86.325.400,00	0,00

P



(dalam rupiah)

No	Point	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
C	Jumlah C (1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00
	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00
		Jumlah	13.974.090.596,00	8.338.136.101,00	5.635.954.495,00	67,59

Dari tabel diatas tidak tercapainya Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya disebabkan keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Modal Aset Lainnya	2.001.980.765,00	4.676.717.909,00

Rp2.434.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.001.980.765,00 atau 82,25%. Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	834.000.000,00	776.492.370,00	93,10
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.600.000.000,00	1.225.488.395,00	76,59
	Jumlah	2.434.000.000,00	2.001.980.765,00	82,25

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.001.980.765,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.674.737.144,00 atau 57,19% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.676.717.909,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.62 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	776.492.370,00	1.276.007.500,00	(499.515.130,00)	(39,15)
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.225.488.395,00	3.400.710.409,00	(2.175.222.014,00)	(63,96)
	Jumlah	2.001.980.765,00	4.676.717.909,00	(2.674.737.144,00)	(57,19)

P



5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Tidak Terduga	<u>5.861.500.000,00</u>	<u>5.774.799.583,00</u>

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 senilai Rp27.092.917.600,77 dengan realisasi senilai Rp5.861.500.000,00 atau 21,63% . Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Tidak Terduga	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63
	Jumlah	27.092.917.600,77	5.861.500.000,00	21,63

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.861.500.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp86.700.417,00 atau 1,50% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.774.799.583,00. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.64 Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Tidak Terduga	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
	Jumlah	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah.

5.1.2.4. Belanja Transfer

	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Transfer	<u>445.540.593.188,00</u>	<u>465.702.436.664,00</u>

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp463.985.656.000,00 dengan realisasi senilai Rp445.540.593.188,00 atau 96,02%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

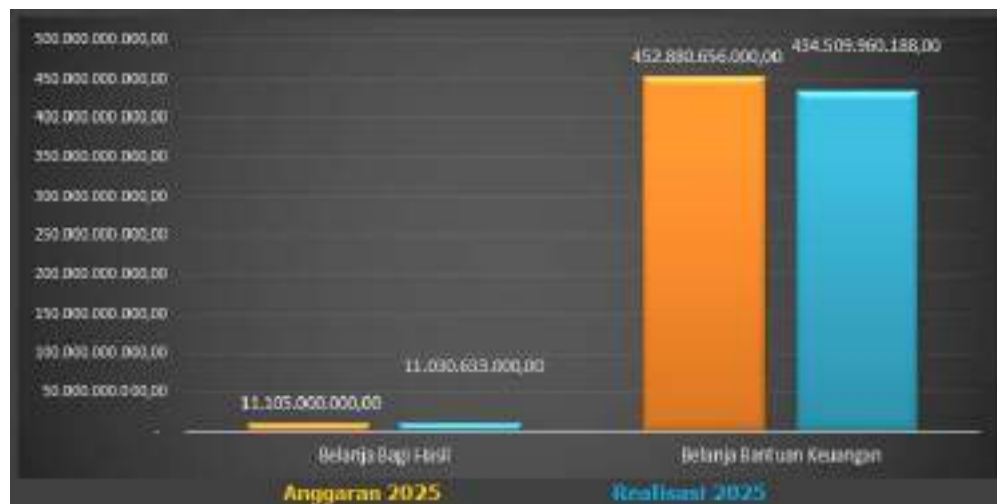
P



**Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.030.633.000,00	99,33
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.855.000.000,00	9.789.254.000,00	99,33
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.241.379.000,00	99,31
2	Belanja Bantuan Keuangan	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	300.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	434.509.960.188,00	96,01
Jumlah		463.985.656.000,00	445.540.593.188,00	96,02



**Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025**

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp445.540.593.188,00 mengalami penurunan senilai Rp20.161.843.476,00 atau 4,33% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp465.702.436.664,00. Rincian Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

**Tabel 5.66 Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

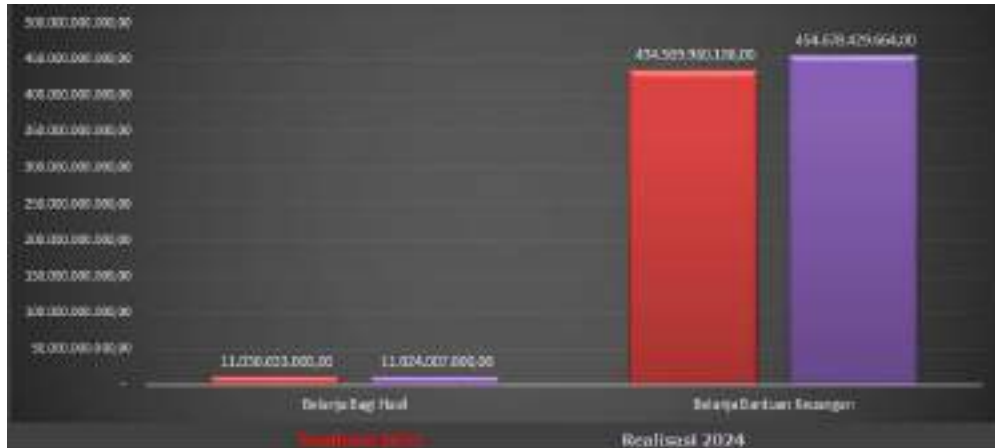
No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Bagi Hasil	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.789.254.000,00	9.538.723.000,00	250.531.000,00	2,63

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.241.379.000,00	1.485.284.000,00	(243.905.000,00)	(16,42)
	Belanja Bantuan Keuangan	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)
	Jumlah	445.540.593.188,00	465.702.436.664,00	(20.161.843.476,00)	(4,33)



Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

5.1.2.4.1 Belanja Transfer – Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>11.030.633.000,00</u>	<u>11.024.007.000,00</u>

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan transfer kepada Pemerintahan Desa sebagai Bantuan Keuangan pendapatan pajak daerah. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp11.105.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp11.030.633.000,00 atau 99,33%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%. %
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.030.633.000,00	99,33
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.855.000.000,00	9.789.254.000,00	99,33

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.241.379.000,00	99,31
	Jumlah	11.105.000.000,00	11.030.633.000,00	99,33

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp11.030.633.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.626.000,00 atau 0,06% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp11.024.007.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.68 Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%.
	Belanja Bagi Hasil	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06
1	Belanja Bantuan Keuangan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.789.254.000,00	9.538.723.000,00	250.531.000,00	2,63
2	Belanja Bantuan Keuangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.241.379.000,00	1.485.284.000,00	(243.905.000,00)	(16,42)
	Jumlah	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

	Tahun 2025	Tahun 2024
Bantuan Keuangan	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp452.880.656.000,00 dengan realisasi senilai Rp434.509.960.188,00 atau 95,94% . Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Bantuan Keuangan	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	300.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	434.509.960.188,00	96,01
	Jumlah	452.880.656.000,00	434.509.960.188,00	95,94

P



Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp434.509.960.188,00 mengalami **penurunan** senilai Rp20.168.469.476,00 atau 4,44% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp454.678.429.664,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.70 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
	Belanja Bantuan Keuangan	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)
	Jumlah	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja. Pada Tahun Anggaran 2025 Anggaran *Surplus/Defisit* Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp673.431.043.094,28 dengan realisasi senilai Rp400.789.702.302,00 atau 59,51% , dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025		%.
		Anggaran	Realisasi	
1	SURPLUS / DEFISIT	(673.431.043.094,28)	(400.789.702.302,00)	59,51
	Jumlah	(673.431.043.094,28)	(400.789.702.302,00)	59,51

Realisasi *surplus/defisit* Tahun Anggaran 2025 senilai Rp400.789.702.302,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp183.009.573.234,24 atau 84,03 dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp217.780.129.067,76, dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.72 Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	SURPLUS / DEFISIT	(400.789.702.302,00)	(217.780.129.067,76)	(183.009.573.234,24)	84,03
	Jumlah	(400.789.702.302,00)	(217.780.129.067,76)	(183.009.573.234,24)	84,03

P



Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Berau mengalami *defisit* senilai Rp400.789.702.302,00 dengan demikian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 lebih kecil dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>673.434.236.594,08</u>	<u>893.211.172.162,04</u>

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp673.431.043.094,28 dengan realisasi senilai Rp673.434.236.594,08 atau 100,00%. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penggunaan SILPA	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00
	Jumlah	673.431.043.094,28	673.434.236.594,08	100,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp673.434.236.594,08 mengalami **penurunan** senilai Rp219.776.935.567,96 atau 24,61% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan senilai Rp893.211.172.162,04. Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.74 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Penggunaan SILPA	673.434.236.594,08	893.211.172.162,04	(219.776.935.567,96)	(24,61)
	Jumlah	673.434.236.594,08	893.211.172.162,04	(219.776.935.567,96)	(24,61)



5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%. Tabel rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	2025		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100,00%, dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi 2025	Realisasi 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00, mengalami **penurunan** senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp2.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Bhakti Praja..

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun Anggaran 2025 senilai Rp272.644.534.292,08 merupakan selisih lebih antara Surplus dan Defisit dengan Pembiayaan Netto.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal SILPA/SiKPA. Koreksi SAL Akhir dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2025. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 senilai Rp673.431.043.094,28 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan senilai Rp673.434.236.594,08 merupakan penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2024 pada Tahun Anggaran 2025.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan senilai Rp272.644.534.292,08.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya senilai Rp3.193.499,80 merupakan koreksi tambah/kurang diantaranya; Saldo kurang Kas FKTP di Puskesmas Derawan Senilai Rp0,20, Saldo tambah di Puskesmas Tepian Buah senilai Rp3.200.000,00 dan saldo kurang di Puskesmas Tubaan senilai Rp6.500,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp272.644.534.292,08. Saldo akhir mengalami **penurunan** senilai Rp400.786.508.802,20 atau 59,51% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Tahun Anggaran 2024 senilai Rp673.431.043.094,28.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan Pos-pos Neraca ini menguraikan posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

P



Tabel 5.77 Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
ASET	14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10	334.652.993.050,40	2,28
KEWAJIBAN	42.713.229.688,00	45.378.771.461,24	(2.665.541.773,24)	(5,87)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42.713.229.688,00	45.378.771.461,24	(2.665.541.773,24)	(5,87)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86	337.318.534.823,64	2,31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10	334.652.993.050,40	2,28

5.3.1.1 Aset

Posisi Keuangan Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset senilai Rp14.992.045.781.398,50 mengalami **kenaikan** senilai Rp334.652.993.050,40 atau 2,28% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp14.657.392.788.348,10 yang dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.78 Nilai Aset
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Aset	14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10	334.652.993.050,40	2,28
Jumlah	14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10	334.652.993.050,40	2,28

Total Aset Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp14.992.045.781.398,50 mengalami **kenaikan** senilai Rp334.652.993.050,40 dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp14.657.392.788.348,10 atau 2,28%. Total Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79 Aset Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
a. Aset Lancar	606.819.780.237,10	1.061.460.610.782,74	(454.640.830.545,64)	(42,83)
b. Investasi Jangka Panjang	557.916.107.080,51	596.513.621.017,22	(38.597.513.936,71)	(6,47)
c. Aset Tetap	12.951.007.131.649,64	12.135.472.037.536,93	815.535.094.112,71	6,72
d. Properti Investasi	268.922.205.610,00	276.251.850.254,00	(7.329.644.644,00)	(2,65)
e. Aset lainnya	607.380.556.821,25	587.694.668.757,21	19.685.888.064,04	3,35
Jumlah	14.992.045.781.398,50	14.657.392.788.348,10	334.652.993.050,40	2,28

P



5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar		
	<u>606.819.780.237,10</u>	<u>1.061.460.610.782,74</u>

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 senilai Rp606.819.780.237,10 mengalami **penurunan** senilai Rp454.640.830.545,64 atau 42,83% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.061.460.610.782,74. Saldo Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.80 Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas dan Setara Kas	275.156.424.266,08	673.454.617.561,28	(398.298.193.295,20)	(59,14)
2	Piutang Pajak Daerah	46.396.218.124,41	45.578.464.831,41	817.753.293,00	1,79
3	Piutang Retribusi Daerah	17.442.211.893,97	4.807.662.932,00	12.634.548.961,97	262,80
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.075.852.141,15	30.728.060.808,80	(15.652.208.667,65)	(50,94)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	226.167.000,00	81.333.530.845,00	(81.107.363.845,00)	(99,72)
7	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang	(50.507.779.130,51)	(48.053.411.608,77)	(2.454.367.521,74)	5,11
9	Beban Dibayar Dimuka	564.241.353,31	363.442.949,18	200.798.404,13	55,25
10	Persediaan	302.466.444.588,69	273.248.242.463,84	29.218.202.124,85	10,69
	Jumlah	606.819.780.237,10	1.061.460.610.782,74	(454.640.830.545,64)	(42,83)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas dan Setara Kas		
	<u>275.156.424.266,08</u>	<u>673.454.617.561,28</u>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp275.156.424.266,08 mengalami **penurunan** senilai Rp398.298.193.295,20 atau 59,14% dibandingkan dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp673.454.617.561,28. Rincian jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dilihat pada tabel berikut;

P



Tabel 5.81 Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	KAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	265.205.595.916,35	644.036.295.948,04	(378.830.700.031,69)	(58,82)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	33.906.867,00	(33.906.867,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	65.628.500,00	(65.628.500,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	3.418.169.467,57	24.859.854.694,32	(21.441.685.226,75)	(86,25)
5	Kas Dana BOS	1.015.510.076,16	742.867.460,16	272.642.616,00	36,70
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	404.086.306,76	(404.086.306,76)	(100,00)
7	Kas Lainnya	5.517.148.806,00	3.311.977.785,00	2.205.171.021,00	66,58
8	Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	275.156.424.266,08	673.454.617.561,28	(398.298.193.295,20)	(59,14)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Kas Daerah	<u>265.205.595.916,35</u>	<u>644.036.295.948,04</u>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp265.205.595.916,35 mengalami **kenaikan** senilai Rp378.830.700.031,69 atau 58,82% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp644.036.295.948,04. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari rekening giro dan deposito pada Bank BPD Kaltimara, giro dan deposito pada Bank BNI dan deposito pada Bank Danamon, serta deposito pada Bank BRI. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.82 Rekening Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
BPD Kaltimara Cabang Tanjung Redeb				
1 Giro - 0061300014	286.251.646.869,35	644.036.766.638,04	(357.785.119.768,69)	(55,55)
2 Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah BPD	286.251.646.869,35	644.036.766.638,04	(357.785.119.768,69)	(55,55)
BNI 1946				
1 Giro- 02104813388	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00

P



KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Jumlah BNI	0,00	0,00	0,00	0,00
BRI				
1 Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Rekening Titipan Bunga Deposito-0213.0100940.99.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah BRI	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Danamon				
1 Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Danamon	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bank keseluruhan	286.251.646.869,35	644.036.766.638,04	(357.785.119.768,69)	(55,55)
Koreksi kesalahan Bank/ Bank kurang posting	21.046.050.953,00	470.690,00	21.045.580.263,00	4.471.218,90
Jumlah Saldo Kas Daerah	265.205.595.916,35	644.036.295.948,04	(378.830.700.031,69)	(58,82)

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Rekening Giro

Penggunaan masing-masing rekening giro tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Rekening giro Nomor – 0061300014 pada BPD Kaltimara merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan PAD serta transfer dari provinsi dan dana pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 senilai Rp286.251.646.869,35 mengalami **penurunan** senilai Rp357.785.119.768,69 atau 55,55% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp644.036.766.638,04;
- Rekening Giro Nomor – 021048133388 pada BNI Cabang Berau merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Berau, menampung Pajak Daerah BPHTB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 tidak ada perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00;

2) Rekening Deposito

Rekening Deposito adalah rekening Pemerintah Kabupaten Berau yang penempatan rekeningnya pada empat Bank, dengan rincian:

- Penempatan deposito pada BPD Kaltimara Cabang Tanjung Redeb dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan

P



- kas. Nominal deposito per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00;
- b) Penempatan deposito pada BNI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00;
- c) Penempatan deposito pada BRI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00; selain itu juga terdapat saldo Titipan Bunga Deposito (0213.0100940.99.8) per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.
- d) Penempatan deposito pada Bank Danamon Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

Dari saldo Bank keseluruhan per 31 Desember 2025 terdapat koreksi saldo Bank BPD senilai Rp21.046.050.953,00; yaitu nilai pengurangan Bank lebih posting senilai Rp40,00, SP2D kurang posting senilai Rp20.570.292.281,00 tanggal cair 2 Januari 2026, SP2D kurang posting senilai Rp504.692.580,00 tanggal cair 5 Januari 2026 dan nilai penambahan saldo Silpa JKN yang disetor tanggal 7 Januari 2026 terdiri dari Puskesmas Gunung Tabur senilai Rp1.051.660,00, Puskesmas Suaran senilai Rp1.190.000,00 dan Puskesmas Tubaan senilai Rp26.692.288,00, sehingga total Saldo Kas Daerah senilai Rp265.205.595.916,35 dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp644.036.295.948,04 mengalami penurunan senilai Rp378.830.700.031,69 atau 58,81%.

Dari penjelasan sisa saldo diatas pada point 1.a Rekening Giro BPD Kaltimara 0061300014, terdapat sisa penggunaan dana alokasi khusus non fisik senilai Rp4.182.856.466,00 dan sisa Dana Forest Carbon Pernertship (FCPF) senilai Rp2.152.622.383,00 yang dibatasi penggunaan sisanya dikarenakan akan dianggarkan kembali penggunaannya dengan kegiatan yang sama di tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.83 Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan FCPF
Tahun Anggaran 2025**

(dalam rupiah)

NO	ALOKASI KHUSUS NON FISIK	
1	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BOK) DINAS	123.669.781,00
2	DANA BANTUAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (BOP)	9.500.000,00
3	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	36.923.600,00
4	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)	1.229.993.384,00
5	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (TKG)	5.732.400,00



6	DANA TUNJANGAN NON SERTIFIKASI (TAMSIL)	934.250.405,00
8	DANA SISA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DINAS	732.058.162,00
9	DANA SISA BANTUAN OPERASIOANAL KELUARGA BERENCANA	1.110.728.734,00
Jumlah		4.182.856.466,00
NO	FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF)	
1	DANA SISA FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY (FCPF)	2.152.622.383,00
Jumlah		2.152.622.383,00
Jumlah		6.335.478.849,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>33.906.867,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp33.906.867,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp33.906.867,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	33.906.867,00	(33.906.867,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	(33.906.867,00)	(100,00)

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penerimaan	<u>0,00</u>	<u>65.628.500,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan kas akhir tahun yang masih berada pada Bendahara Penerimaan SKPD. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp65.628.500,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp65.628.500,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.85 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	65.628.500,00	(65.628.500,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	65.628.500,00	(65.628.500,00)	(100,00)



5.3.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	<u>3.418.169.467,57</u>	<u>24.859.854.694,32</u>

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Abdul Rivai per 31 Desember 2025 senilai Rp3.418.169.467,57 mengalami **penurunan** senilai Rp21.441.685.226,75 atau 86,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp24.859.854.694,32. Rincian saldo Kas di BLUD disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.86 Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)					
NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas BLUD					
1	Kas Tunai dan Surat berharga	45.318.186,00	33.355.993,00	11.962.193,00	35,86
2	BPD 0061435697	3.372.851.281,57	24.823.318.249,32	(21.450.466.967,75)	(86,41)
3	BNI 0360133440	0,00	3.180.452,00	(3.180.452,00)	(100,00)
4	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.418.169.467,57	24.859.854.694,32	(21.441.685.226,75)	(86,25)

Rincian Mutasi Kas di BLUD sebagai berikut ;

Saldo Awal BLUD 1 Januari 2025	24.859.854.694,32
<u>Pendapatan BLUD 1 Januari s/d 31 Desember 2025</u>	<u>94.494.839.150,35</u>
Total Kas BLUD	119.354.693.844,67

BELANJA BLUD

Belanja Pegawai BLUD	10.982.484.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.356.533.273,10
Belanja Modal BLUD	
Peralatan dan Mesin BLUD	2.730.685.855,00
Modal Gedung dan Bangunan BLUD	23.713.938.000,00
<u>Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</u>	<u>152.883.249,00</u>
<u>BLUD</u>	-
Total Belanja BLUD	115.936.524.377,10
<u>Sisa Kas BLUD 31 Desember 2025</u>	<u>3.418.169.467,57</u>

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara BOS	<u>1.015.510.076,16</u>	<u>742.867.460,16</u>

P



Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 senilai Rp1.015.510.076,16 mengalami **kenaikan** senilai Rp272.642.616,00 atau 36,70% dibandingkan Per 31 Desember 2024 senilai Rp742.867.460,16.

Saldo Kas di Bendahara BOSP adalah dana yang masih berada ditangan Bendahara Dana BOS pada TK, SD dan SLTP yang merupakan dana non APBD yang disalurkan langsung ke sekolah. Rincian saldo Kas di Bendahara BOSP disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.87 Rekening Kas di Bendahara BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara BOS	1.015.510.076,16	742.867.460,16	272.642.616,00	36,70
	Jumlah	1.015.510.076,16	742.867.460,16	272.642.616,00	36,70

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara FKTP	<u>0,00</u>	<u>404.086.306,76</u>

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp404.086.306,76 atau 100,00% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp404.086.306,76. Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rekening Kas di Bendahara FKTP

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Unit Kerja FKTP JKN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Kel. Bugis	0,00	128.905,67	(128.905,67)	(100,00)
2	Puskesmas Tanjung Redeb	0,00	27.480.426,65	(27.480.426,65)	(100,00)
3	Puskesmas Teluk Bayur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Labanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Sambaliung	0,00	1.862.930,20	(1.862.930,20)	(100,00)
6	Puskesmas Suaran	0,00	50.000,77	(50.000,77)	(100,00)
7	Puskesmas GN. Tabur	0,00	578.361,31	(578.361,31)	(100,00)
8	Puskesmas Merancang Ulu	0,00	483.871,46	(483.871,46)	(100,00)
9	Puskesmas Tanjung Batu	0,00	16.683.181,54	(16.683.181,54)	(100,00)
10	Puskesmas Pl. Derawan	0,00	99.315,74	(99.315,74)	(100,00)
11	Puskesmas Maratua	0,00	880.178,89	(880.178,89)	(100,00)
12	Puskesmas Tubaan	0,00	4.976.048,19	(4.976.048,19)	(100,00)
13	Puskesmas Biatan Lempake	0,00	177.972.035,24	(177.972.035,24)	(100,00)
14	Puskesmas Talisayan	0,00	9.376.233,19	(9.376.233,19)	(100,00)



(dalam rupiah)

NO	Unit Kerja FKTP JKN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
15	Puskesmas Batu Putih	0,00	49.007.747,21	(49.007.747,21)	(100,00)
16	Puskesmas Biduk-Biduk	0,00	8.759.124,01	(8.759.124,01)	(100,00)
17	Puskesmas Kelay	0,00	13.808.432,38	(13.808.432,38)	(100,00)
18	Puskesmas Tepian Buah	0,00	56.461.862,23	(56.461.862,23)	(100,00)
19	Puskesmas Long La'ai	0,00	10.674.200,08	(10.674.200,08)	(100,00)
20	Merapun	0,00	15.575.452,00	(15.575.452,00)	(100,00)
21	Long Boy	0,00	9.228.000,00	(9.228.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	404.086.306,76	(404.086.306,76)	(100,00)

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>5.517.148.806,00</u>	<u>3.311.977.785,00</u>

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp5.517.148.806,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.205.171.021,00 atau 66,58% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.311.977.785,00. Saldo Kas Lainnya adalah Utang PFK senilai Rp2.510.442.459,00, Pendapatan Diterima Dimuka RSUD senilai Rp1.447.515,00 serta Saldo BOK Puskesmas senilai Rp3.005.258.832,00. Rincian saldo Kas Lainnya dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.89 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas Lainnya	5.517.148.806,00	3.311.977.785,00	2.205.171.021,00	66,58
Jumlah		5.517.148.806,00	3.311.977.785,00	2.205.171.021,00	66,58

Dengan rincian tabel SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.90 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	
	UTANG PFK	Jumlah
1	PPh 22	9.339.109,00
2	PPh 23	438.000,00
3	PPh 4 (2)	415.440.043,00
4	PPN	2.085.225.307,00
	Sub Total	2.510.442.459,00
No	RSUD	Jumlah
2	Pendapatan Diterima Dimuka (JAMKESNAS)	1.447.515,00



Sub Total		1.447.515,00
No	BOK PUSKESMAS	Jumlah
1	Batu Putih	159.292.285,00
2	Biatan Lempake	85.741.953,00
3	Biduk-Biduk	78.138.000,00
4	Gunung Tabur	222.754.000,00
5	Kampung Bugis	162.451.381,00
6	Muara Lesan/Kelay	142.426.500,00
7	Labanan	75.886.207,00
8	Long Boy	94.116.865,00
9	Long Laai	47.415.813,00
10	Maratua	87.914.110,00
11	Merancang Ulu	118.143.134,00
12	Merapun	135.531.832,00
13	Pulau Derawan	24.499.422,00
14	Sambaliung	225.024.000,00
15	Suaran	83.310.443,00
16	Talisayan	265.980.371,00
17	Tanjung Batu	112.603.350,00
18	Tanjung Redeb	269.455.573,00
19	Teluk Bayur	330.690.419,00
20	Tepian Buah/Segah	212.370.600,00
21	Tubaan	71.512.574,00
Sub Total		3.005.258.832,00
Jumlah		5.517.148.806,00

5.3.1.1.1.8 Setara Kas

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Setara Kas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Setara Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan di Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Tabel rincian Setara Kas disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.91 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00



5.3.1.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	79.140.449.159,53	162.447.719.417,21

Piutang Daerah merupakan hak pemerintah Kabupaten Berau berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 senilai Rp79.140.449.159,53 mengalami **penurunan** senilai Rp83.307.270.257,68 atau 51,28% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp162.447.719.417,21. Rincian Saldo Piutang Pendapatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.92 Piutang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	JENIS PIUTANG	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2024	Penambahan Piutang Baru Selama Tahun 2025	Pembayaran/ Penghapusan Piutang Selama Tahun 2025	Nilai Piutang Brutto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Piutang Pajak Daerah	45.578.464.831,41	8.774.600.390,00	7.956.847.097,00	46.396.218.124,41	817.753.293,00	1,79
2	Piutang Retribusi Daerah	4.807.662.932,00	27.531.744.000,79	14.897.195.038,82	17.442.211.893,97	12.634.548.961,97	262,80
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.728.060.808,80	16.871.961.226,42	1.796.109.085,27	15.075.852.141,15	(15.652.208.667,65)	(50,94)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	81.333.530.845,00	0,00	81.333.530.845,00	226.167.000,00	(81.107.363.845,00)	(99,72)
	Jumlah	162.447.719.417,21	53.178.305.617,21	105.983.682.066,09	79.140.449.159,53	(83.307.270.257,68)	(51,28)

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>46.396.218.124,41</u>	<u>45.578.464.831,41</u>

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp46.396.218.124,41 dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp45.578.464.831,41 mengalami **kenaikan** senilai Rp817.753.293,00 atau 1,79%. Terkait *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak daerah adalah selain melakukan penagihan rutin dengan menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak Bapenda juga melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan selaku pengacara negara dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah. Disamping hal tersebut *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak adalah memberikan keringanan pembayaran piutang dengan cara diangsur dengan membuat perjanjian pembayaran secara angsuran kepada wajib pajak yang menunggak. Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut :

P



**Tabel 5.93 Piutang Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang 31 Desember 2024	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang/ Koreksi	Piutang 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	815.215.637,47	142.018.878,00	123.978.805,00	833.255.710,47	18.040.073,00	2,21
2	Pajak Restoran	3.323.874.597,00	757.700.904,00	2.587.385.803,00	1.494.189.698,00	(1.829.684.899,00)	(55,05)
3	Pajak Hiburan	57.163.390,00	20.309.250,00		77.472.640,00	20.309.250,00	35,53
4	Pajak Reklame	84.727.014,00	5.899.560,00	6.884.572,00	83.742.002,00	(985.012,00)	(1,16)
5	Pajak Penerangan Jalan	2.734.658.326,94	3.076.259.913,00	2.729.276.845,00	3.081.641.394,94	346.983.068,00	12,69
6	Pajak Parkir	1.128.400,00	20.168.372,00	0,00	21.296.772,00	20.168.372,00	1.787,34
7	Pajak Air Tanah	976.648,00	0,00	0,00	976.648,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	456.809.000,00	0,00	0,00	456.809.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.269.705.934,00	0,00	1.106.000,00	1.268.599.934,00	(1.106.000,00)	(0,09)
10	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.834.205.884,00	4.752.243.513,00	2.508.215.072,00	39.078.234.325,00	2.244.028.441,00	6,09
Jumlah		45.578.464.831,41	8.774.600.390,00	7.956.847.097,00	46.396.218.124,41	817.753.293,00	1,79

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	17.442.211.893,97	4.807.662.932,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak pemerintah daerah melalui SKPD terkait, yang belum dilunasi sampai dengan akhir per 31 Desember oleh Wajib Retribusi Daerah. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp17.442.211.893,97 mengalami **kenaikan** senilai Rp12.634.548.961,97 atau 262,80% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.807.662.932,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.94 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2024	Perpindahan dari Piutang Lainnya ke Piutang Retribusi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	4.378.544.832,00	0,00	792.643.762,00	1.891.072.411,00	3.280.116.183,00	(1.098.428.649,00)	(25,09)
2	Badan Pendapatan Daerah	428.606.100,00	0,00	3.595.600,00	3.613.600,00	428.588.100,00	(18.000,00)	(0,00)
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	512.000,00	0,00	600.000,00	512.000,00	600.000,00	88.000,00	17,19
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	410.549.000,00	97.635.000,00	0,00	508.184.000,00	508.184.000,00	123,78
4	RSUD Abdul Rivai*	0,00	14.349.316.065,79	11.877.404.573,00	13.001.997.027,82	13.224.723.610,97	1.124.592.454,82	7,84
Jumlah		4.807.662.932,00	14.759.865.065,79	12.771.878.935,00	14.897.195.038,82	17.442.211.893,97	12.634.548.961,97	262,80

*)Rincian Piutang Retribusi RSUD Abdul Rivai dapat dilihat pada Lampiran 6



Piutang Retribusi Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Retribusi Pasar Sanggam Adji Dilayas dan Retribusi Pasar Teluk serta Kios 4x6 dengan jumlah total Rp3.280.116.183,00 terdiri dari Kios Pasar Sanggam Adji Dilayas senilai Rp1.551.802.433,00, Los Pasar Sanggam Adji Dilayas senilai Rp607.538.750, Kios 4x6 Pasar Teluk Bayur senilai Rp1.108.750.000,00 Los Pasar Teluk Bayur senilai Rp12.025.000,00. Piutang Retribusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdapat pada penjelasan *Lampiran 7*.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau atas piutang dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami penurunan/kenaikan dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.95 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Piutang 31 Desember 2024	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Piutang Dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau (Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00)	(0,00

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>15.075.852.141,15</u>	<u>30.728.060.808,80</u>

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau dari pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 senilai Rp15.075.852.141,15 mengalami **penurunan** senilai Rp15.652.208.667,65 atau 50,94% dibandingkan per 31



Desember 2024 senilai Rp30.728.060.808,80. Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut:

**Tabel 5.96 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lainnya	Piutang 31 Desember 2024	Perpindahan dari Piutang Lainnya ke Piutang Retribusi	Saldo awal Piutang Lainnya 2025	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Piutang BLUD	14.349.316.065,79	(14.349.316.065,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.349.316.065,79)	(100,00)
1	Piutang Angsuran Rumah Dinas	2.940.805.678,02	0,00	2.940.805.678,02	0,00	596.856.137,98	2.343.949.540,04	(596.856.137,98)	(20,30)
2	Piutang Denda Pajak	12.884.036.286,96	0,00	12.884.036.286,96	903.765.483,41	1.150.994.442,68	12.636.807.327,69	(247.228.959,27)	(1,92)
3	Piutang Denda Retribusi	143.353.778,03	0,00	143.353.778,03	0,00	48.258.504,61	95.095.273,42	(48.258.504,61)	(33,66)
4	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	410.549.000,00	(410.549.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(410.549.000,00)	(100,00)
Jumlah		30.728.060.808,80	(14.759.865.065,79)	15.968.195.743,01	903.765.483,41	1.796.109.085,27	15.075.852.141,15	(15.652.208.667,65)	(50,94)

Rincian Piutang Lainnya menurut SKPD pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.97 Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah Menurut SKPD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2024	Perpindahan dari Piutang Lainnya ke Piutang Retribusi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	RSUD A. Rivai								
	Piutang BLUD	14.349.316.065,79	(14.349.316.065,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.349.316.065,79)	(100,00)
2	Badan Pendapatan Daerah								
	Piutang Angsuran Rumah Dinas	2.940.805.678,02	0,00	2.940.805.678,02	0,00	596.856.137,98	2.343.949.540,04	(596.856.137,98)	(20,30)
3	Badan Pendapatan Daerah								
	Piutang Denda Pajak	12.884.036.286,96	0,00	12.884.036.286,96	903.765.483,41	1.150.994.442,68	12.636.807.327,69	(247.228.959,27)	(1,92)
4	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan								
	Piutang Denda Retribusi	143.353.778,03	0,00	143.353.778,03	0,00	48.258.504,61	95.095.273,42	(48.258.504,61)	(33,66)
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	410.549.000,00	(410.549.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(410.549.000,00)	(100,00)
Jumlah		30.728.060.808,80	(14.759.865.065,79)	15.968.195.743,01	903.765.483,41	1.796.109.085,27	15.075.852.141,15	(15.652.208.667,65)	(50,94)

Atas piutang lainnya tersebut nilai Piutang Angsuran Rumah Dinas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya akibat pencatatan nilai sisa Angsuran belum dapat di andalkan, surat perjanjian yang tidak lengkap, pembayaran tagihan tidak sesuai perjanjian, angsuran telah lunas namun belum didukung SK pelepasan, denda yang tidak dicatat sebagai piutang.

[Handwritten signature]



5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>226.167.000,00</u>	<u>81.333.530.845,00</u>

Piutang Transfer per 31 Desember 2025 senilai Rp226.167.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp81.107.363.845,00 atau 99,72% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp81.333.530.845,00. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.98 Piutang Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.064.371.000,00	0,00	3.064.371.000,00	137.017.000,00	(2.927.354.000,00)	(95,53)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.531.112.000,00	0,00	3.531.112.000,00	89.150.000,00	(3.441.962.000,00)	(97,48)
3	PBB-KB	74.670.547.845,00	0,00	74.670.547.845,00	0,00	(74.670.547.845,00)	(100,00)
4	AP	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	(67.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	81.333.530.845,00	0,00	81.333.530.845,00	226.167.000,00	(81.107.363.845,00)	(99,72)

5.3.1.1.2.6 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang Lainnya merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau terhadap pihak ketiga diluar piutang pajak dan retribusi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 tidak terjadi **kenaikan/penurunan** jika dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 karena tidak ada realisasi. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.99 Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)



5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(50.507.779.130,51)	(48.053.411.608,77)

Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Berau bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai Rp50.507.779.130,51 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.454.367.521,74 atau 5,11% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp48.053.411.608,77. Penyisihan Piutang pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 5.100 Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	PENYISIHAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Daerah	(32.290.190.763,78)	(30.562.122.695,37)	(1.728.068.068,41)	5,65
2	Piutang Retribusi Daerah	(4.573.482.059,92)	(3.799.601.299,13)	(773.880.760,79)	20,37
3	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	(13.644.106.306,82)	(13.691.687.614,27)	47.581.307,45	(0,35)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(50.507.779.130,51)	(48.053.411.608,77)	(2.454.367.521,74)	5,11

Rincian perhitungan penyisihan Piutang sesuai umur pada tabel berikut :

Tabel 5.101 Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
I	Piutang Pajak daerah		8.078.081.273,00	5.091.171.330,00	2.972.564.594,00	30.254.400.927,41	46.396.218.124,41
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		40.390.406,37	509.117.133,00	1.486.282.297,00	30.254.400.927,41	32.290.190.763,78
	Piutang Pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	8.078.081.273,00	5.091.171.330,00	2.972.564.594,00	30.254.400.927,41	46.396.218.124,41
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		40.390.406,37	509.117.133,00	1.486.282.297,00	30.254.400.927,41	32.290.190.763,78
II	Piutang Retribusi Daerah		11.895.634.813,00	529.878.650,18	1.111.364.819,91	3.905.333.610,88	17.442.211.893,97
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		59.478.174,07	52.987.865,02	555.682.409,96	3.905.333.610,88	4.573.482.059,93
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	486.000,00	428.102.100,00	428.588.100,00
	Penyisihan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	0,00	243.000,00	428.102.100,00	428.345.100,00
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan		97.635.000,00	175.110.000,00	184.254.000,00	51.185.000,00	508.184.000,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		488.175,00	17.511.000,00	92.127.000,00	51.185.000,00	161.311.175,00
	Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	11.721.300.201,00	136.157.750,18	485.147.419,91	882.118.239,88	13.224.723.610,97
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		58.606.501,01	13.615.775,02	242.573.709,96	882.118.239,88	1.196.914.225,87
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	76.699.612,00	218.010.900,00	441.477.400,00	2.543.928.271,00	3.280.116.183,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		383.498,06	21.801.090,00	220.738.700,00	2.543.928.271,00	2.786.851.559,06
III	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		124.122.414,35	804.386.522,60	950.797.841,38	13.087.648.121,80	15.075.852.141,15
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		620.612,07	80.438.652,26	475.398.920,69	13.087.648.121,80	13.644.106.306,82
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD	0,00	0,00	110.021.757,00	2.125.030.542,02	2.235.052.299,02
	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00	55.010.878,50	2.125.030.542,02	2.180.041.420,52
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2024 yang belum disisihkan		0,00	0,00	0,00	0,00	108.897.241,02
	Piutang Denda Pajak	Badan Pendapatan Daerah	116.741.767,35	786.799.771,60	821.316.678,38	10.911.949.110,36	12.636.807.327,69
	Penyisihan Piutang Denda Pajak		583.708,84	78.679.977,16	410.658.339,19	10.911.949.110,36	11.401.871.135,55
	Piutang Denda Retribusi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.380.647,00	17.586.751,00	19.459.406,00	50.668.469,42	95.095.273,42
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi		36.903,24	1.758.675,10	9.729.703,00	50.668.469,42	62.193.750,76
IV	Piutang Transfer Antar Daerah		226.167.000,00	0,00	0,00	0,00	226.167.000,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	BPKAD	226.167.000,00	0,00	0,00	0,00	226.167.000,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang		20.097.838.500,35	6.425.436.502,78	5.034.727.255,29	47.247.382.660,09	79.140.449.159,53
	Nilai Penyisihan		100.489.192,50	642.543.650,28	2.517.363.627,65	47.247.382.660,09	50.507.779.130,51

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>564.241.353,31</u>	<u>363.442.949,18</u>

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2025 yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2025 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 senilai Rp564.241.353,31 mengalami **kenaikan** senilai Rp200.798.404,13 atau 55,25% dibandingkan per 31 Desember 2024

P



senilai Rp363.442.949,18. Tabel rincian Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.102 Beban Dibayar Dimuka
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Dibayar Dimuka	564.241.353,31	363.442.949,18	200.798.404,13	55,25
	Jumlah	564.241.353,31	363.442.949,18	200.798.404,13	55,25

Beban dibayar dimuka terdapat pada di beberapa SKPD yaitu :

- a. Sekretariat DPRD
 - Atas pemeriksaan premi asuransi BMD - Gedung dengan nilai SP2D senilai Rp147.950.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp26.752.602,74 dan sisa polis asuransi senilai Rp121.197.397,26.
 - Atas pemeriksaan premi asuransi BMD – Kendaraan dengan nilai SP2D senilai Rp89.384.200,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp13.958.628,49 dan sisa polis asuransi senilai Rp75.425.571,51.
- b. Dinas Perikanan

Atas pemeriksaan premi asuransi nelayan dengan nilai SP2D sesuai surat Keputusan Bupati Berau Nomor 403 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025 senilai Rp141.120.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp94.724.383,56 dan sisa polis asuransi senilai Rp46.395.616,44.
- c. Sekretariat Daerah

Atas pemeriksaan terdapat belanja sewa asrama dan asuransi barang milik daerah senilai Rp215.041.095,89 dengan rincian sebagai berikut :

 - Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/433/VIII/Umum/2025 Tanggal 15 Agustus 2025. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000419/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025 senilai Rp70.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp26.465.753,42 dan sisa manfaat yang belum terpakai senilai Rp43.534.246,58;
 - Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putra Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/682/XI/Umum/2025 Tanggal 28 Nopember 2025. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000742/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 senilai Rp70.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp5.945.205,48 dan sisa manfaat yang belum terpakai senilai Rp64.054.794,52;
 - Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Makasar dengan No surat Perjanjian 900/493/IX/Umum/2025 Tanggal 23 September 2025. Nilai SP2D Nomor 64.03/04.0/000446/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P3/9/2025 senilai Rp148.000.000,00,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp40.547.945,21 dan sisa manfaat yang belum terpakai senilai Rp107.452.054,79;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)



Atas Pemeriksaan Belanja Sewa Gedung Bangunan Kantor senilai Rp106.181.672,22 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Sewa Bangunan Kantor dengan Nomor Surat Perjanjian 800.1.11.1/393/SPK/BKPSDM/2025 Tanggal 23 Juni 2025. Dengan SP2D Nomor 64.03/04.0/000139/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P3/9/2025 senilai Rp148.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai senilai Rp77.639.344,26 dan sisa manfaat yang belum terpakai senilai Rp70.360.655,74;
- Belanja Sewa Bangunan Kantor (Gudang Aset) dengan Nomor Surat Perjanjian 800.1.11.1/765/SPK/BKPSDM/2025 Tanggal 1 Desember 2025. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 64.03/04.0/000232/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PR/12/2025 senilai Rp43.175.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai senilai Rp7.353.983,52 dan sisa manfaat yang belum terpakai senilai Rp35.821.016,48.

5.3.1.1.5 Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	<u>302.466.444.588,69</u>	<u>273.248.242.463,84</u>

Persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp302.466.444.588,69 mengalami **kenaikan** senilai Rp 29.218.202.124,85 atau 10,69% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp273.248.242.463,84. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.103 Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	769.567.811,00	443.425.600,00	326.142.211,00	73,55
	Persediaan Bahan Kimia	1.691.432.190,04	1.679.344.208,36	12.087.981,68	0,72
	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	1.161.600,00	2.377.000,00	(1.215.400,00)	(51,13)
	Persediaan Bahan Baku	39.570.707,44	48.581.970,00	(9.011.262,56)	(18,55)
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	513.045.620,00	594.094.500,00	(81.048.880,00)	(13,64)
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20.963.460,00	21.663.460,00	(700.000,00)	(3,23)
	Persediaan Isi Tabung Gas	2.838.000,00	8.060.000,00	(5.222.000,00)	(64,79)
	Persediaan Bahan Lainnya	798.679.709,60	815.405.239,59	(16.725.529,99)	(2,05)
	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel	6.630.200,00	0,00	6.630.200,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	4.009.380.979,42	3.064.849.725,26	944.531.254,16	30,82

P



(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	426.267.064,62	588.328.246,65	(162.061.182,03)	(27,55)
	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Lainnya	17.590.606,00	0,00	17.590.606,00	0,00
	Persediaan Alat Tulis Kantor	879.428.348,00	845.445.851,11	33.982.496,89	4,02
	Persediaan Kertas dan Cover	439.386.938,25	306.210.483,30	133.176.454,95	43,49
	Persediaan Bahan Cetak	686.462.412,00	835.286.400,00	(148.823.988,00)	(17,82)
	Persediaan Benda Pos	18.672.000,00	8.556.000,00	10.116.000,00	118,23
	Persediaan Bahan Komputer	332.392.780,00	204.356.600,00	128.036.180,00	62,65
	Persediaan Perabot Kantor	539.728.782,92	650.985.284,81	(111.256.501,89)	(17,09)
	Persediaan Alat Listrik	283.590.614,26	201.068.958,26	82.521.656,00	41,04
	Persediaan Perlengkapan Dinas	641.213.464,69	1.717.359.701,20	(1.076.146.236,51)	(62,66)
	Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00
	Persediaan Suvenir/Cendera Mata	437.462.600,00	499.371.000,00	(61.908.400,00)	(12,40)
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	120.861.708,00	148.397.000,00	(27.535.292,00)	(18,56)
	Persediaan Obat	14.864.003.803,81	17.701.111.448,19	(2.837.107.644,38)	(16,03)
	Persediaan Obat-Obatan Lainnya	5.227.987.508,67	392.100,00	5.227.595.408,67	1.333.230,15
	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	247.153.277.574,60	223.423.009.641,60	23.730.267.933,00	10,62
	Persediaan Natura	172.419.814,53	180.171.172,46	(7.751.357,93)	(4,30)
	Persediaan Pakan	0,00	57.945.020,00	(57.945.020,00)	(100,00)
	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Komponen Jembatan Baja	22.345.619.234,84	19.202.445.853,05	3.143.173.381,79	16,37
	Persediaan Komponen Komponen Peralatan	3.416.580,00	0,00	3.416.580,00	0,00
	Persediaan Komponen Rambu-Rambu	1.582.476,00	0,00	1.582.476,00	0,00
	Jumlah	302.466.444.588,69	273.248.242.463,84	29.218.202.124,85	10,69

Selain persediaan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut terdapat Persediaan berupa obat-obatan yang sudah kadaluarsa pada RSUD dr. Abdul Rivai yang sudah dihapuskan dengan rincian pada **Lampiran 8**. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 pada SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.104 Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	8.516.000,00	5.755.600,00	2.760.400,00	47,96
2	Dinas Kesehatan	13.669.988.978,64	11.765.461.105,82	1.904.527.872,82	16,19
3	Rsud Abdul Rivai	13.875.524.130,17	12.310.111.414,77	1.565.412.715,40	12,72
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	268.513.175.559,28	239.252.725.712,05	29.260.449.847,23	12,23

P



(dalam rupiah)					
No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	3.819.675,00	1.478.402.069,00	(1.474.582.394,00)	(99,74)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.128.400,00	747.592.000,00	(687.463.600,00)	(91,96)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	9.652.500,00	18.495.000,00	(8.842.500,00)	(47,81)
8	Dinas Sosial	611.624.200,00	463.320.000,00	148.304.200,00	32,01
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	3.425.202,00	7.561.900,00	(4.136.698,00)	(54,70)
10	Dinas Pangan	605.365.691,16	852.896.631,60	(247.530.940,44)	(29,02)
11	Dinas Pertanahan	7.510.000,00	7.003.000,00	507.000,00	7,24
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.627.703.733,00	1.979.789.315,00	(352.085.582,00)	(17,78)
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	907.535.130,00	1.149.523.464,00	(241.988.334,00)	(21,05)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	7.312.000,00	4.741.200,00	2.570.800,00	54,22
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.584.978,00	97.297.210,00	(44.712.232,00)	(45,95)
16	Dinas Perhubungan	30.419.476,00	38.301.000,00	(7.881.524,00)	(20,58)
17	Dinas Komunikasi & Informatika	4.297.857,00	3.095.300,00	1.202.557,00	38,85
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	189.646.494,00	198.089.180,00	(8.442.686,00)	(4,26)
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.820.000,00	14.837.000,00	(1.017.000,00)	(6,85)
20	Dinas Kepemudaan & Olahraga	895.916.505,00	1.529.694.982,00	(633.778.477,00)	(41,43)
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	248.221.200,00	201.594.000,00	46.627.200,00	23,13
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.820.047,00	3.636.400,00	1.183.647,00	32,55
23	Dinas Perikanan	4.183.892,00	83.748.340,00	(79.564.448,00)	(95,00)
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	135.877.770,00	103.524.614,60	32.353.155,40	31,25
25	Dinas Perkebunan	9.044.288,00	11.231.600,00	(2.187.312,00)	(19,47)
26	Sekretariat Daerah	361.699.874,00	420.208.245,00	(58.508.371,00)	(13,92)
27	Kantor Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Inspektorat	43.622.039,00	33.949.600,00	9.672.439,00	28,49
29	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	30.803.454,00	15.278.000,00	15.525.454,00	101,62
30	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	217.964.307,44	175.218.970,00	42.745.337,44	24,40
31	Badan Pendapatan Daerah	66.315.000,00	54.616.000,00	11.699.000,00	21,42
32	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.265.500,00	7.226.110,00	2.039.390,00	28,22
33	Sekretariat DPRD	117.110.150,00	114.356.200,00	2.753.950,00	2,41
34	Kec Tg Redeb	3.029.600,00	2.856.000,00	173.600,00	6,08
35	Kec Gunung Tabur	8.822.500,00	8.063.000,00	759.500,00	9,42
36	Kec Sambaliung	5.462.000,00	648.000,00	4.814.000,00	742,90

P



(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
37	Kec Teluk Bayur	1.503.000,00	1.635.000,00	(132.000,00)	(8,07)
38	Kec Segah	24.302.000,00	2.660.000,00	21.642.000,00	813,61
39	Kec Kelay	3.770.000,00	3.208.000,00	562.000,00	17,52
40	Kec Talisayan	5.976.000,00	6.640.000,00	(664.000,00)	(10,00)
41	Kec Biduk-Biduk	1.214.500,00	1.237.800,00	(23.300,00)	(1,88)
42	Kec Maratua	13.033.208,00	12.811.500,00	221.708,00	1,73
43	Kecamatan Pulau Derawan	2.729.600,00	8.457.700,00	(5.728.100,00)	(67,73)
44	Kec Tabalar	2.047.600,00	2.801.000,00	(753.400,00)	(26,90)
45	Kec Batu Putih	3.186.250,00	7.482.000,00	(4.295.750,00)	(57,41)
46	Kec Biatan	291.000,00	295.000,00	(4.000,00)	(1,36)
47	Badan Kesbang, Politik & Linmas	44.183.300,00	40.166.300,00	4.017.000,00	10,00
Jumlah		302.466.444.588,69	273.248.242.463,84	29.218.202.124,85	10,69

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, metode pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik, sedangkan metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*).

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	557.916.107.080,51	596.513.621.017,22

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp557.916.107.080,51 mengalami **penurunan** senilai Rp38.597.513.936,72 atau 6,47% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp596.513.621.017,22. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.105 Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	557.916.107.080,51	596.513.621.017,22	(38.597.513.936,72)	(6,47)
Jumlah		557.916.107.080,51	596.513.621.017,22	(38.597.513.936,72)	(6,47)

P



5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Investasi Non Permanen merupakan dana bergulir Pemerintah Kabupaten Berau telah disisihkan seluruhnya (100%) sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau yang berada pada Dinas Koperindag dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sejak tahun 2002 yang bekerja sama dengan BPD Kaltimara Cabang Tanjung Redeb yang berfungsi sebagai bank penyalur. Dana bergulir yang diterima masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan bunga sebesar 2% yang digunakan untuk operasional BPD Kaltimara Cabang Tanjung Redeb. Penyajian pada laporan keuangan sebesar nilai yang belum tertagih. Jumlah Dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan beberapa kondisi diantaranya debitur telah meninggal dunia; alamat tidak ditemukan/berbeda dan masa jatuh tempo dana bergulir 5 tahun.

**Tabel 5.106 Penyisihan Investasi Non Permanen
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Sisa Dana Bergulir 2024	Penyisihan Dana Bergulir 2024	31 Desember 2024	Penerimaan Dana Bergulir	Sisa Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	31 Desember 2025	%
1	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada Dinas Perindagkop	1.214.914.430,44	1.214.914.430,44	0,00	8.197.100,00	(8.197.100,00)	(8.197.100,00)	0,00	0,00
2	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada bagian perekonomian Sekretariat Daerah	1.214.914.430,44	1.214.914.430,44	0,00	16.781.033,00	(16.781.033,00)	(16.781.033,00)	0,00	0,00
Jumlah				0,00	24.978.133,00	(24.978.133,00)	(24.978.133,00)	0,00	0,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah

Investasi Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	557.916.107.080,51	596.513.621.017,22

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp557.916.107.080,51 mengalami **penurunan** senilai Rp38.597.513.936,72 atau 6,47% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.513.621.017,22. Investasi Permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Rincian Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 5.107 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai Penyertaan Modal	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	PT BPD Kaltimara	304.165.000.000,00	3,97	304.165.000.000,00	304.165.000.000,00	0,00	0,00
2	Perumda Air Minum Batiwakkal	171.320.860.000,00	100,00	201.424.235.040,00	206.674.022.312,79	(5.249.787.272,79)	(2,54)
3	PT Hutansanggam Labanan Lestari	6.000.000.000,00	50,00	5.454.172.619,50	2.082.295.820,50	3.371.876.799,00	161,93
4	PT Indo Pusaka Berau	65.890.000.000,00	49,48	43.093.121.600,00	79.701.471.052,94	(36.608.349.452,94)	(45,93)
5	Perumda Bhakti Praja	4.000.000.000,00	100,00	3.779.577.821,00	3.890.831.831,00	(111.254.010,00)	(2,86)
Jumlah		551.375.860.000,00		557.916.107.080,51	596.513.621.017,23	(38.597.513.936,72)	(6,47)

Uraian lebih lanjut Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

a. PT BPD Kaltimara

Investasi dalam Saham pada PT BPD Kaltimara per 31 Desember 2025 sebesar Rp304.165.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara. Pemerintah Kabupaten Berau tidak menambah penyertaan modal pada BPD Kaltim pada Tahun Anggaran 2024. Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPD Kaltimara disajikan berdasarkan metode biaya.

b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal (PERUMDAM Batiwakkal) Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp201.424.235.040,00, mengalami **penurunan** senilai Rp5.249.787.272,79 atau 2,54% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp206.674.022.312,79. Investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Batiwakkal disajikan dengan metode ekuitas karena modal PERUMDAM Batiwakkal Kabupaten Berau seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Penyajian investasi Pemerintah Kabupaten Berau atas PERUMDAM Batiwakkal per 31 Desember 2025 didasarkan atas laporan keuangan per 31 Desember 2025 (*Audited*) **Lampiran 9**.

c. PT Hutan Sanggam Berau

Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I, dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera dengan Nomor 127/V/Inh/2003 tanggal 4 Februari 2003, disepakati pembentukan usaha patungan dalam areal Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten Berau dengan Nama PT Hutansanggam Berau. Komposisi Pemerintah Kabupaten Berau sebesar 50%, PT Inhutani I sebesar 30%, dan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera sebesar 20%.

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Hutan Sanggam Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp5.454.172.619,50, mengalami **kenaikan** senilai

P



Rp3.371.876.799,00 atau 161,93% dibandingkan per 31 Desember 2024 yang dihitung berdasarkan kepemilikan sebesar 50% dari nilai Ekuitas Perusda Hutan Sanggam Labanan Lestari per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp10.908.345.239,00 **Lampiran 10.**

d. PT Indo Pusaka Berau

PT Indo Pusaka Berau adalah perusahaan *joint venture* yang melanjutkan usaha Konsorsium Indo Pusaka Berau yang dibentuk oleh PT Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau, dan PT Pusaka Jaya Baru. Konsorsium tersebut dibentuk sesuai Surat Perjanjian Konsorsium Nomor 015/2088/UM-I/IX/2002 tanggal 23 September 2002 dalam rangka pembangunan PLTU Mulut Tambang (2 x 7 MW) di Lati - Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Sejak Desember 2015 perusahaan PLTU telah menambah satu unit pembangkit dengan membangun turbin Generator berkapasitas 7 MW untuk melengkapi boiler unit 3 yang telah beroperasi sebelumnya sehingga total kapasitas terpasang PLTU Lati mencapai 3 x 7 MW.

Investasi pada PLTU Mulut Tambang pada Tahun 2017 mengalami kenaikan karena adanya Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT Indo Pusaka Berau berupa Tanah seluas 129.662m² senilai Rp777.972.000,00. Adanya penambahan investasi tersebut mempengaruhi porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Berau menjadi 49,48%. Penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Pembagian saham sesuai surat Dewan Eksekutif Proyek PLTU Mulut Tambang Nomor 002.K/010/RUPS-IPB/2017, adalah sebagai berikut.

1. PT. Indonesia Power (46,53%)	Rp	61.950.000.000,00
2. Pemkab Berau (49,48%)	Rp	65.890.000.000,00
3. PT. Pusaka Jaya Baru (3,99%)	Rp	5.310.000.000,00
Jumlah	Rp	133.150.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau diperhitungkan dengan metode Ekuitas. Dalam laporan keuangan 2025 *Audited (Lampiran 11)*, PT Indo Pusaka Berau membukukan Ekuitas sebesar Rp87.092.000.000,00 sehingga Investasi Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 pada PT Indo Pusaka Berau diakui sebesar Rp43.093.121.600,00 atau 49,48% dari total Ekuitas perusahaan. Mengalami **penurunan** senilai Rp36.608.349.452,94 atau 45,93% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp79.701.471.052,94.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemkab Berau sampai dengan 31 Desember 2020 telah menetapkan

A



penyertaan modal pada PT. IPB dengan menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp53.364.792.235,00 terdiri dari penyertaan modal Tahun 2005 sebesar Rp43.365.000.000,00 dan Tahun 2009 sebesar Rp9.999.792.235,00;
 - b. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2011 sebesar Rp17.500.000.000,00. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005, 2009, dan 2011 keseluruhan berjumlah Rp70.864.792.235,00;
 - c. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2014 sebesar Rp777.972.000,00 berupa tanah. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005, 2009, 2011, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 96 dan 2014 keseluruhan berjumlah Rp71.533.014.235,00 .
- e. Perumda Bhakti Praja
1. Pendirian
Perumda Bhakti Praja didirikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Daerah Tingkat II Berau No.05 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.
 2. Bidang Usaha
Berdasarkan pasal 5 Perda 14/2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut :
 - a. Kehutanan,
 - b. Pertanian tanaman pangan,
 - c. Perkebunan,
 - d. Peternakan,
 - e. Perikanan,
 - f. Pariwisata,
 - g. Pertambangan dan penggalian,
 - h. Minyak dan gas bumi,
 - i. Ketenagalistrikan,
 - j. Perhubungan/kepelabuhanan,



- k. Industri pengolahan dan,
- l. Pergudangan

Disamping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/2020, sebagaimana disebutkan diatas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada Tahun 2023, yang meliputi :

- a. Pengangkutan CPO
- b. Perdagangan TBS Kelapa Sawit
- c. Perdagangan Cangkang Kelapa Sawit
- d. Perdagangan Karet
- e. Supplier Industri

3. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal senilai Rp50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Perumda Bhakti Praja menaikan setoran modal Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp4.000.000.000,00. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja dan diakui dengan metode Ekuitas di Tahun 2025 senilai Rp3.779.577.821,00, sehingga Investasi Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp3.779.577.821,00 dihitung berdasarkan kepemilikan sebesar 100,00% dari nilai Ekuitas. Mengalami **penurunan** senilai Rp111.254.010,00 atau 2,86% jika dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.890.831.831,00. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja dapat dilihat pada **Lampiran 12 (Audited)**.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>12.951.007.131.649,64</u>	<u>12.135.472.037.536,93</u>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal dan/atau lainnya yang dikapitalisasi dalam nilai Aset Tetap tahun berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp12.951.007.131.649,64 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp815.535.094.112,71 atau 6,72% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.135.472.037.536,93. Dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

[Handwritten signature]



**Tabel 5.108 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Tanah	1.083.193.249.915,83	1.072.297.219.600,83	10.896.030.315,00	1,02
Peralatan dan Mesin	1.633.057.034.429,78	1.370.551.524.477,78	262.505.509.952,00	19,15
Gedung dan Bangunan	2.839.476.170.013,43	2.370.435.810.216,46	469.040.359.796,97	19,79
Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.306.736.778.991,45	11.880.709.415.429,90	2.426.027.363.561,55	20,42
Aset Tetap Lainnya	109.529.404.810,00	95.663.258.267,00	13.866.146.543,00	14,49
Konstruksi Dalam Pengerjaan	623.194.354.588,52	886.641.620.568,26	(263.447.265.979,74)	(29,71)
Akumulasi Penyusutan	(7.644.179.861.099,37)	(5.540.826.811.023,30)	(2.103.353.050.076,07)	37,96
Jumlah	12.951.007.131.649,64	12.135.472.037.536,93	815.535.094.112,71	6,72

Ringkasan mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.109 Rincian Mutasi Aset

(dalam rupiah)

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	JUMLAH
Saldo Awal	1.072.297.219.600,83	1.370.551.524.477,78	2.370.435.810.216,46	11.880.709.415.429,90	95.663.258.267,00	886.641.620.568,26	17.676.298.848.560,23
Koreksi	0,00	0,00	0,00	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
Saldo Awal Setelah Koreksi	1.072.297.219.600,83	1.370.551.524.477,78	2.370.435.810.216,46	11.880.709.415.429,88	95.663.258.267,00	886.641.620.568,26	17.676.298.848.560,21
PENAMBAHAN							
LRA	6.937.492.376,00	252.680.070.744,00	336.504.709.092,25	2.354.928.778.730,00	13.974.090.596,00	0,00	2.965.025.141.538,25
Hutang + Hibah	0,00	7.501.136.000,00	14.486.843.363,01	60.212.097.333,00	0,00	14.201.171.263,51	96.401.247.959,52
Reklas + Koreksi	4.823.797.939,00	53.493.748.798,96	734.703.887.435,26	334.129.269.843,56	137.160.600,00	316.757.231.947,40	1.444.045.096.564,18
TOTAL MUTASI TAMBAH	11.761.290.315,00	313.674.955.542,96	1.085.695.439.890,52	2.749.270.145.906,56	14.111.251.196,00	330.958.403.210,91	4.505.471.486.061,95
PENGURANGAN							
SK PENGHAPUSAN/ Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUTANG PIHAK KE_3	0,00	0,00	11.606.201.631,00	20.635.118.295,33	0,00	Rp1.179.834.000,00	33.421.153.926,33
Reklas + Koreksi	865.260.000,00	50.853.090.649,96	605.037.928.462,55	302.407.864.049,66	245.104.653,00	593.225.835.190,65	1.552.635.083.005,82
NILAI DIBAWAH KAPITALISASI	0,00	316.354.941,00	10.950.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00	527.104.941,00
SALDO AKHIR	1.083.193.249.915,83	1.633.057.034.429,78	2.839.476.170.013,43	14.306.736.778.991,45	109.529.404.810,00	623.194.354.588,52	20.595.186.992.749,01

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	1.072.297.219.600,83
Koreksi	Rp	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	1.072.297.219.600,83
Mutasi Tambah	Rp	11.761.290.315,00
Mutasi Kurang	Rp	865.260.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	1.083.193.249.915,83

[Handwritten signature]



Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.083.193.249.915,83 mengalami **kenaikan** senilai Rp10.896.030.315,00 atau 1,02% dibandingkan dengan nilai perolehan aset Tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.072.297.219.600,83.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal Tanah Ta 2025	Rp	6.937.492.376,00
Reklasifikasi :		
Dinas Kesehatan		
Mutasi internal Aset Tanah ke Puskesmas Gunung Tabur Pencatatan BLUD	Rp	865.260.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tanah	Rp	223.039.903,00
Pencatatan tanah hasil inventarisasi Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Kios	Rp	3.199.125.000,00
	Rp	3.422.164.903,00
Dinas Perikanan		
Hasil Inventarisasi Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU	Rp	8,00
Dinas Pendidikan		
Koreksi Reklasifikasi dari GB ke Tanah Pematangan lahan TK Negeri Teluk Bayur 2	Rp	331.008.808,00
Koreksi penambahan Pencatatan Tanah TK Negeri 2 Teluk Bayur, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Bangunan di atas Tanah Negara Luas 2.500 M2	Rp	12.500.000,00
	Rp	343.508.808,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
Koreksi Reklasifikasi dari GB ke Tanah Pematangan lahan Perencanaan SPPG	Rp	192.864.220,00
Jumlah Penambahan Aset Tanah (Reklasifikasi)	Rp	4.823.797.939,00
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	Rp	11.761.290.315,00

Rincian mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Dinas Kesehatan		
Mutasi internal Aset Tanah ke Puskesmas Gunung Tabur Pencatatan BLUD	Rp	865.260.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tanah (Reklasifikasi)	Rp	865.260.000,00

P



5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	1.370.551.524.477,78
Koreksi	Rp	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	1.370.551.524.477,78
Mutasi Tambah	Rp	313.674.955.542,96
Mutasi Kurang	Rp	51.169.445.590,96
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	1.633.057.034.429,78

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp1.633.057.034.429,78 mengalami **kenaikan** senilai Rp262.505.509.952,00 atau 19,15% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.370.551.524.477,78.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal peralatan & mesin Ta 2025	Rp	252.680.070.744,00
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Peralatan & Mesin	Rp	1.076.807.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin	Rp	245.104.653,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin	Rp	5.680.847.652,00
Reklasifikasi dari Barang & Jasa ke Peralatan & Mesin	Rp	313.637.880,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Peralatan & Mesin	Rp	46.177.351.613,96
Jumlah Penambahan Peralatan & Mesin (Reklasifikasi)	Rp	53.493.748.798,96
Hibah :		
Jumlah Penambahan Peralatan & Mesin (Hibah)	Rp	7.501.136.000,00
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	Rp	313.674.955.542,96

Rincian mutasi kurang peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	120.279.600,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Gedung & Bangunan	Rp	199.800.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Barang & Jasa	Rp	405.274.721,00
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	287.614.656,00
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Lainnya	Rp	3.820.795.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Tak Berwujud	Rp	158.330.000,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Peralatan & Mesin	Rp	46.177.351.613,96
Jumlah Pengurangan Peralatan & Mesin (Reklasifikasi)	Rp	51.169.445.590,96
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	Rp	51.169.445.590,96



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	2.370.435.810.216,46
Koreksi	Rp	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	2.370.435.810.216,46
Mutasi Tambah	Rp	1.085.695.439.890,52
Mutasi Kurang	Rp	616.655.080.093,55
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	<u>2.839.476.170.013,43</u>

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp2.839.476.170.013,43 mengalami **kenaikan** senilai Rp469.040.359.796,97 atau 19,79%. dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.370.435.810.216,46.

Rincian mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal gedung & bangunan Ta 2025	Rp	336.504.709.092,25

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan	Rp	256.827.524.597,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Gedung & Bangunan	Rp	199.800.000,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	477.676.562.838,26
Jumlah Penambahan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi)	Rp	734.703.887.435,26

Hibah :

Jumlah Penambahan Hibah	Rp	13.292.444.243,00

Utang :

Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Gedung & Bangunan		1.194.399.120,01

Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	Rp	<u>1.085.695.439.890,52</u>

Adapun pengurangan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	103.814.862.319,63
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin	Rp	5.680.847.652,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tak Berwujud	Rp	2.140.739.886,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya	Rp	5.195.270.311,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Barang & Jasa	Rp	10.950.000,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Persediaan	Rp	8.253.052.977,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Tanah	Rp	746.912.931,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	477.676.562.838,26
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya - TGR	Rp	1.529.679.547,66



Jumlah Pengurangan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi) Rp 605.048.878.462,55

Utang :

Jumlah Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung & Bangunan Rp 11.606.201.631,00

Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya Rp 616.655.080.093,55

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	11.880.709.415.429,90
Koreksi	Rp	(0,02)
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	11.880.709.415.906,88
Mutasi Tambah	Rp	2.749.270.145.906,56
Mutasi Kurang	Rp	323.242.782.344,99
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	14.306.736.778.991,45

Nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 senilai Rp14.306.736.778.991,45 dan mengalami **kenaikan** senilai Rp2.426.027.363.561,54 atau 20,42%. Dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp11.880.709.415.429,90.

Dari nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM Batiwakkal senilai Rp304.647.279.784,81 (Rincian nilai JJI aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM dan dilihat pada **Lampiran 13**).

Rincian mutasi Tambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut.

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Ta 2025 Rp 2.354.928.778.730,00

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 334.129.269.843,56

Jumlah Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi (Reklasifikasi) Rp 334.129.269.843,56

Hibah :

Jumlah Penambahan Hibah Rp 59.794.207.000,00

Utang :

Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 417.890.333,00

Total Mutasi Penambahan Seluruhnya Rp 2.749.270.145.906,56

Rincian mutasi Kurang Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:



Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	212.654.754.971,77
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Aset Tak Berwujud	Rp	20.587.253.843,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Barang & Jasa	Rp	60.062.849.158,11
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Peralatan & Mesin	Rp	1.076.807.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Persediaan	Rp	6.100.473.676,00
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan & Irigasi ke Aset Lainnya	Rp	48.153.600,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya - TGR	Rp	2.077.371.800,78

Jumlah Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi (Reklasifikasi) **Rp 302.607.664.049,66**

Utang :

Jumlah Pengurangan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp 20.635.118.295,33**

Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya **Rp 323.242.782.344,99**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	95.663.258.267,00
Koreksi	Rp	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	95.663.258.267,00
Mutasi Tambah	Rp	14.111.251.196,00
Mutasi Kurang	Rp	245.104.653,00
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	109.529.404.810,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 Rp109.529.404.810,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp13.866.146.543,00 atau 14,49% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp95.663.258.267,00.

Rincian nilai mutasi tambah Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Ta 2025 **Rp 13.974.090.596,00**

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	120.279.600,00
Reklasifikasi dari Barang & Jasa ke Aset Tetap Lainnya	Rp	16.881.000,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	Rp	137.160.600,00
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	Rp	14.111.251.196,00

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

(Handwritten signature)



Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan & Mesin	Rp	245.104.653,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	Rp	245.104.653,00
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	Rp	245.104.653,00

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	886.641.620.568,26
Koreksi	Rp	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	886.641.620.568,26
Mutasi Tambah	Rp	330.958.403.210,91
Mutasi Kurang	Rp	594.405.669.190,65
Saldo akhir per 31 Desember 2025	Rp	623.194.354.588,52

Nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp623.194.354.588,52 mengalami **penurunan** senilai Rp263.447.265.979,74 atau 29,71% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp886.641.620.568,26.

Rincian Mutasi Tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi:

Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	103.814.862.319,63
Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	212.654.754.971,77
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	287.614.656,00

Jumlah Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi)	Rp	316.757.231.947,40

Utang :

Jumlah Penambahan Utang Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	14.201.171.263,51

Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	Rp	330.958.403.210,91

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan	Rp	256.827.524.597,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp	334.069.741.843,56
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Persediaan	Rp	180.000.930,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya - TGR	Rp	2.148.567.820,09

P



Jumlah Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi) Rp 593.225.835.190,65

Utang :

Jumlah Pengurangan Utang Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 1.179.834.000,00

Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya Rp 594.405.669.190,65

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(7.644.179.861.099,37)	(5.540.826.811.023,30)

Akumulasi Penyusutan merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan tanggal neraca, sedangkan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 senilai Rp7.644.179.861.099,37 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.103.353.050.076,07 atau 37,96% dibandingkan dengan nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp5.540.826.811.023,30.

Nilai buku Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.110 Nilai Buku Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	Nilai Buku (per 31-Des-2025)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Tanah	1.083.193.249.915,83	0,00	1.083.193.249.915,83	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.633.057.034.429,78	(1.010.314.840.057,85)	622.742.194.371,93	(848.123.363.873,13)	(162.191.476.184,72)	19,12
3	Gedung dan Bangunan	2.839.476.170.013,43	(513.989.212.087,79)	2.325.486.957.925,64	(466.754.156.502,04)	(47.235.055.585,75)	10,12
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.306.736.778.991,45	(6.109.767.491.515,12)	8.196.969.287.476,33	(4.223.919.776.044,11)	(1.885.847.715.471,01)	44,65
5	Aset Tetap Lainnya	109.529.404.810,00	(10.108.317.438,61)	99.421.087.371,39	(2.029.514.604,00)	(8.078.802.834,61)	398,07
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	623.194.354.588,52	0,00	623.194.354.588,52	0,00	0,00	0,00
Jumlah		20.595.186.992.749,01	(7.644.179.861.099,37)	12.951.007.131.649,64	(5.540.826.811.023,30)	(2.103.353.050.076,07)	37,96

5.3.1.4. Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	268.922.205.610,00	276.251.850.254,00

Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 senilai Rp268.922.205.610,00, jika dibandingkan dengan per 31

[Handwritten signature]



Desember 2024 senilai Rp276.251.850.254,00, mengalami **penurunan** senilai Rp7.329.644.644,00 atau 2,65% dengan rincian tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.111 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Properti Investasi	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(100.726.871.175,00)	(93.397.226.531,00)	(7.329.644.644,00)	7,85
Jumlah		268.922.205.610,00	276.251.850.254,00	(7.329.644.644,00)	(2,65)

5.3.1.4.1. Properti Investasi

Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00

Properti Investasi per 31 Desember 2025 senilai Rp369.649.076.785,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp369.649.076.785,00 tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Penyajian informasi Properti Investasi ini sudah didukung dengan Kebijakan Akuntansi. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

**Tabel 5.112 Properti Investasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Properti Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	BPKAD	Tanah	3.161.844.520,00	3.161.844.520,00	0,00	0,00
2	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Gedung dan Bangunan	286.207.413.000,00	0,00	286.207.413.000,00	0,00
3	DPPKBP3A	Gedung dan Bangunan	460.494.000,00	0,00	460.494.000,00	0,00
4	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Gedung dan Bangunan	77.497.325.265,00	0,00	77.497.325.265,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	0,00	364.165.232.265,00	(364.165.232.265,00)	(100,00)
6	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	2.322.000.000,00	2.322.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah			369.649.076.785,00	369.649.076.785,00	0,00	0,00

5.3.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	Tahun 2025	Tahun 2024
Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(100.726.871.175,00)	(93.397.226.531,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 dengan nilai Rp100.726.871.175,00 dan senilai Rp93.397.226.531,00 per 31 Desember 2024.

P



Mengalami **kenaikan** senilai Rp7.329.644.644,00 atau 78,5%. Rincian Akumulasi penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Tabel 5.113 Akumulasi Properti Investasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	(100.726.871.175,00)	(93.397.226.531,00)	(7.329.644.644)	0,00
	Jumlah	(100.726.871.175,00)	(93.397.226.531,00)	(7.329.644.644,00)	7,85

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	<u>607.380.556.821,25</u>	<u>587.694.668.757,21</u>

Nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp607.380.556.821,25 mengalami **kenaikan** senilai Rp19.685.888.064,04 atau 3,35% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp587.694.668.757,21. Rincian Aset lainnya dapat disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.114 Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Tagihan Jangka Panjang	5.091.711.581,16	5.388.712.858,92	(297.001.277,76)	(5,51)
2	Aset Tidak Berwujud	81.125.270.300,00	56.236.812.306,00	24.888.457.994,00	44,26
3	Aset lain-lain	783.704.689.770,13	775.825.834.590,86	7.878.855.179,27	1,02
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(37.909.758.366,88)	(29.922.257.419,24)	(7.987.500.947,64)	26,69
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(224.631.356.463,16)	(219.834.433.579,33)	(4.796.922.883,83)	2,18
	Jumlah	607.380.556.821,25	587.694.668.757,21	19.685.888.064,04	3,35

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	<u>5.091.711.581,16</u>	<u>5.388.712.858,92</u>

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp5.091.711.581,16 mengalami **penurunan** senilai Rp297.001.277,76 atau 5,51% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp5.388.712.858,92. Tagihan Jangka Panjang berupa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan tagihan penjualan angsuran rumah dinas yang dikelola BPKAD dan jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan rincian berikut.

P



**Tabel 5.115 Tagihan Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.040.486.224,10	615.165.937,12	425.320.286,98	69,14
2	Tuntutan Ganti Rugi	4.051.225.357,06	4.773.546.921,80	(722.321.564,74)	(15,13)
Jumlah		5.091.711.581,16	5.388.712.858,92	(297.001.277,76)	(5,51)

Tabel 5.116 Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun Kejadian	Tgl. SKTJM	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pembayaran Selama 2025 & Koreksi	Saldo 31 Desember 2025
1	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Tabur	2011	21 September 2011	67.380.150,00	0,00 0,00	67.380.150,00	0,00
2	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau	2012	Desember 2012	138.197.480,00	0,00	0,00	138.197.480,00
3	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau	2012	10 Desember 2012	68.640.000,00	0,00	15.000.000,00	53.640.000,00
4	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Berau	2012	18 April 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TP/TGR pada Pihak ketiga atas denda keterlambatan pekerjaan*)	2024		4.499.329.291,80	0,00	4.499.329.281,79	10,01
6	TP/TGR pada Pihak ketiga atas Kurang Volume atas Pekerjaan*)	2025		0,00	3.859.387.867,05		3.859.387.867,05
JUMLAH				4.773.546.921,80			4.051.225.357,06

*) Rincian kurang volume atas denda pekerjaan pihak ketiga terdapat pada **Lampiran 15**.

Tabel 5.117 Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO.	N A M A	NO.& TGL.SK BUPATI PENJUALAN ASET	NO.& TGL.PERJANJIAN JUAL BELI	JATUH TEMPO PELUNASAN	KETETAPAN	Aset Lainnya - Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 2025
1	ROHANA, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/033/BPKAD-E/2018 TGL.15-02-2018	10 JANUARI 2038	104.765.400,00	55.511.482,12
2	JUNAIDI. (Alm)	535 TGL 6 JULI 2015	030/36/BPKAD-F/2016 TGL.21-3-2016	10 SEPTEMBER 2026	40.448.000,00	827.376,00
3	SABRANSYAH, A.MA,PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/007/BPKAD-E/2017 TGL.14-09-2017	10 MARET 2035	194.162.000,00	82.081.930,00
4	DRS.HARNO	452 TGL.06 JULI 2017	030/ /BPKAD-E/2019 TGL.02-09-2019	10 SEPTEMBER 2039	203.500.000,00	140.993.740,00

P



(dalam rupiah)

NO.	N A M A	NO.& TGL.SK BUPATI PENJUALAN ASET	NO.& TGL.PERJANJIAN JUAL BELI	JATUH TEMPO PELUNASAN	KETETAPAN	Aset Lainnya - Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 2025
5	HJ.CHAIRUNNISAH, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017		06 JULI 2027	97.528.000,00	3.615.256,00
6	H.SUKIRMAN(TANAH)	452 TGL.06 JULI 2017	030/005/BPKAD-E/2017 TGL.22-08-2017	10 AGUSTUS 2037	45.000.000,00	11.934.375,00
7	H.M. RUSLIE DJAFAR	452 TGL.06 JULI 2017	030/010/BPKAD-E/2018 TGL.04-01-2018	10 JANUARI 2038	145.941.000,00	73.952.354,00
8	HJ.SERI TUTI HANDAYANI,S.PD.SD	452 TGL.06 JULI 2017	030/001/BPKAD-E/2017 TGL.24-08-2017	10 AGUSTUS 2027	81.061.000,00	59.032.325,00
9	RITA HARYANTI	452 TGL.06 JULI 2017	030/669/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	57.175.025,00
10	ELYANA	452 TGL.06 JULI 2017	030/670/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	59.947.487,00
11	DRH.MUSTAKIM SUHARJANA	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2039	421.869.435,20	204.961.184,83
12	GAFUR YUSUF	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2039	51.373.000,00	41.059.782,50
13	IDA IRIANI	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2039	45.318.000,00	33.543.903,00
14	PARWANTO	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2029	64.899.000,00	27.708.093,00
15	AMY AULIA,S.PD.SD	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2039	97.743.000,00	59.013.057,50
16	WATI SRI MAISARAH	591 TGL.18 OKTOBER 2019		18 OKTOBER 2039	169.216.902,00	129.128.853,16
JUMLAH						1.040.486.224,10

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025

31 Desember 2024

81.125.270.300,00

56.236.812.306,00

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp81.125.270.300,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp24.888.457.994,00 atau 30,68% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp56.236.812.306,00. Aset Tidak Berwujud tersebut berupa perangkat lunak sistem operasi dan hasil kajian. Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada tabel berikut;

Tabel 5.118 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	973.850.000,00	79.800.000,00	0,00	1.053.650.000,00	79.800.000,00	8,19
2	Dinas Kesehatan	369.757.400,00	0,00	0,00	369.757.400,00	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
3	RSUD Dr. Rivai	2.273.102.700,00	99.500.000,00	0,00	2.372.602.700,00	99.500.000,00	4,38
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	36.123.026.250,00	21.753.200.729,00	0,00	57.876.226.979,00	21.753.200.729,00	60,22
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	248.490.000,00	287.388.700,00	0,00	535.878.700,00	287.388.700,00	115,65
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	225.239.000,00	0,00	0,00	225.239.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Pertanahan	49.500.000,00	78.810.000,00	0,00	128.310.000,00	78.810.000,00	159,21
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2.070.801.573,00	299482082,00	0,00	2.370.283.655,00	299482082,00	14,46
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	144.280.000,00	0,00	0,00	144.280.000,00	0,00	0,00
11	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	92.880.000,00	0,00	0,00	92.880.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Perhubungan	220.369.000,00	58.830.000,00	0,00	279.199.000,00	58.830.000,00	26,70
13	Dinas Komunikasi & Informatika	2.879.079.650,00	164.613.000,00	0,00	3.043.692.650,00	164.613.000,00	5,72
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	451.617.220,00	198.046.644,00	0,00	649.663.864,00	198.046.644,00	43,85
15	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.964.300,00	581.967.669,00	0,00	1.082.931.969,00	581.967.669,00	116,17
16	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	299.170.549,00	0,00	0,00	299.170.549,00	0,00	0,00
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2.032.321.300,00	926.250.000,00	0,00	2.958.571.300,00	926.250.000,00	45,58
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	34.410.000,00	0,00	0,00	34.410.000,00	0,00	0,00
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	725.609.000,00	0,00	0,00	725.609.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Perkebunan	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	468.768.350,00	260569170,00	0,00	729.337.520,00	260569170,00	55,59
23	Kantor Penghubung	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	255.550.114,00	0,00	0,00	255.550.114,00	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	752.141.600,00	0,00	0,00	752.141.600,00	0,00	0,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	947.650.000,00	0,00	0,00	947.650.000,00	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	3.296.600.000,00	100.000.000,00	0,00	3.396.600.000,00	100.000.000,00	3,03
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	332.350.000,00	0,00	0,00	332.350.000,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanjung Redeb	50.834.300,00	0,00	0,00	50.834.300,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Biatan	3950000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	100,00
Jumlah		56.236.812.306,00	24.888.457.994,00	0,00	81.125.270.300,00	24.888.457.994,00	30,68

Untuk rekap rincian kenaikan Pos Aset Tak Berwujud terdapat pada **Lampiran 16**.

(Handwritten signature)



5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-Lain	<u>783.704.689.770,13</u>	<u>775.825.834.590,86</u>

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp783.704.689.770,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.878.855.179,27 atau 1,02% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp775.825.834.590,86. Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.119 Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Aset rusak berat	242.230.330.546,49	234.352.419.384,49	7.877.911.162,00	3,36
2	Aset Perusda Bhakti Praja	288.371.844,42	288.371.844,42	0,00	0,00
3	Jaminan Reklamasi & Jaminan Kesungguhan	375.828.068,88	374.884.051,61	944.017,27	0,25
4	Aset Lancar yang direncanakan untuk dihapus (Piutang)	6.982.067.000,00	6.982.067.000,00	0,00	0,00
5	Perpindahan kewenangan Kabupaten Keprovinsi	269.050.025.310,34	269.050.025.310,34	0,00	0,00
6	TDF/TKD	264.778.067.000,00	264.778.067.000,00	0,00	0,00
Jumlah		783.704.689.770,13	775.825.834.590,86	7.878.855.179,27	1,02

Rincian Aset Lain-lain sebagai berikut :

a. Aset Rusak berat

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 senilai Rp242.230.330.546,49 mengalami **kenaikan** Rp7.877.911.162,00 atau 3,36% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp234.352.419.384,49 merupakan reklasifikasi Aset Tetap yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum dihapusbukukan. Rincian aset rusak berat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.120 Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	23.867.661.184,99	0,00	0,00	23.867.661.184,99	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	61.134.588.748,00	1.495.777.120,00	0,00	62.630.365.868,00	1.495.777.120,00	2,45
3	RSUD Dr A. Rivai	15.563.448.280,00	162.000.000,00	0,00	15.725.448.280,00	162.000.000,00	1,04
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	59.761.847.677,50	0,00	0,00	59.761.847.677,50	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	870.350.300,00	0,00	0,00	870.350.300,00	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik & Linmas	427.860.000,00	433.700.000,00	0,00	861.560.000,00	433.700.000,00	101,36

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.341.488.291,00	943.500.000,00	0,00	3.284.988.291,00	943.500.000,00	40,29
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	609.989.500,00	0,00	117.752.500,00	492.237.000,00	(117.752.500,00)	(19,30)
9	Dinas Sosial	688.772.000,00	0,00		688.772.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga & Transmigrasi	392.775.000,00	0,00	36.355.000,00	356.420.000,00	(36.355.000,00)	(9,26)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	258.540.000,00	0,00	0,00	258.540.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	1.838.365.600,00	0,00	0,00	1.838.365.600,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	371.386.350,00	0,00	0,00	371.386.350,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	2.288.459.600,00	0,00	0,00	2.288.459.600,00	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.119.807.600,00	1.159.135.600,00	0,00	2.278.943.200,00	1.159.135.600,00	103,51
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	451.429.500,00	0,00	0,00	451.429.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	10.410.698.675,00	521.900.000,00	0,00	10.932.598.675,00	521.900.000,00	5,01
18	Dinas Komunikasi & Informatika	2.193.403.250,00	0,00	0,00	2.193.403.250,00	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	2.705.351.150,00	171.600.000,00	0,00	2.876.951.150,00	171.600.000,00	6,34
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.556.012.203,00	0,00	87.492.500,00	1.468.519.703,00	(87.492.500,00)	(5,62)
21	Dinas Kepemudaan & Olahraga	481.710.340,00	0,00	0,00	481.710.340,00	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.889.426.500,00	0,00	0,00	1.889.426.500,00	0,00	0,00
23	Kantor Perpustakaan & Kearsipan	1.174.600.667,00	0,00	0,00	1.174.600.667,00	0,00	0,00
24	Dinas Kelautan & Perikanan	3.193.326.900,00	0,00	0,00	3.193.326.900,00	0,00	0,00
25	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	2.821.085.490,00	0,00	0,00	2.821.085.490,00	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	512.478.300,00	0,00	0,00	512.478.300,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	7.313.399.150,00	115.000.000,00	0,00	7.428.399.150,00	115.000.000,00	1,57
28	Sekretariat DPRD	6.599.605.360,00	212.500.000,00	0,00	6.812.105.360,00	212.500.000,00	3,22
29	Kec. Tanjung Redeb	2.772.039.516,00	15.750.000,00	0,00	2.787.789.516,00	15.750.000,00	0,57
30	Kec. Gunung Tabur	2.300.147.050,00	0,00	85.943.500,00	2.214.203.550,00	(85.943.500,00)	(3,74)
31	Kec. Sambaliung	1.964.801.489,00	0,00	0,00	1.964.801.489,00	0,00	0,00
32	Kec. Teluk Bayur	734.268.100,00	0,00	0,00	734.268.100,00	0,00	0,00
33	Kec. Segah	2.560.389.300,00	1.717.626.000,00	0,00	4.278.015.300,00	1.717.626.000,00	67,08
34	Kec. Kelay	348.085.193,00	0,00	0,00	348.085.193,00	0,00	0,00
35	Kec. Talisayan	586.225.250,00	0,00	0,00	586.225.250,00	0,00	0,00
36	Kec. Biduk-biduk	1.288.550.601,00	0,00	0,00	1.288.550.601,00	0,00	0,00
37	Kec. Maratua	615.127.700,00	0,00	0,00	615.127.700,00	0,00	0,00
38	Kec. Tabalar	211.000.850,00	0,00	0,00	211.000.850,00	0,00	0,00
39	Kec. Batu Putih	912.186.088,00	0,00	0,00	912.186.088,00	0,00	0,00
40	Kec. Biatan	479.433.750,00	0,00	0,00	479.433.750,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

NO	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
41	Sekretariat KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Inspektorat	912.697.208,00	0,00	0,00	912.697.208,00	0,00	0,00
43	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	2.588.320.361,00	0,00	0,00	2.588.320.361,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2.746.421.063,00	1.244.845.000,00	705.549.000,00	3.285.717.063,00	539.296.000,00	19,64
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	494.858.249,00	870.885.191,00	153.215.249,00	1.212.528.191,00	717.669.942,00	145,03
Jumlah		234.352.419.384,49	9.064.218.911,00	1.186.307.749,00	242.230.330.546,49	7.877.911.162,00	3,36

- b. Investasi pada Perusahaan Daerah Bhakti Praja senilai Rp288.371.844,42. Tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, aset-aset yang dimiliki Perusda Bhakti Praja untuk sementara diamankan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 428 Tahun 2007 tentang Pembekuan Sementara Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau. Penyebab berhentinya operasi Perusda Bhakti Praja karena belum pernah membukukan keuntungan dan aktifitas perusahaan yang pasif mengakibatkan beban anggaran Pemerintah Daerah selaku pemilik modal. Reklasifikasi Perusda Bhakti Praja dari investasi permanen ke aset lainnya pada Tahun 2013. Aset yang masih dikuasai Pemda adalah Tanah;
- c. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan senilai Rp375.828.068,88 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan;
- d. Aset yang direncanakan untuk dihapus (Piutang) senilai Rp6.982.067.000,00 yaitu senilai Rp46.950.000,00 merupakan kesalahan transfer Pendapatan Retribusi Daerah ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi pada Tahun 2009 yang sudah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan yang menyatakan Piutang tersebut tidak dapat dikembalikan dan Piutang Retribusi atas Ijin Pertambangan senilai Rp6.935.117.000,00 yang tidak dapat dipungut lagi karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; dan
- e. Aset yang akan diserahkan kepada Pemprov Kaltim akibat perpindahan kewenangan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltim senilai Rp269.050.025.310,34 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Aset SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan yang tersebar berupa di wilayah Kabupaten Berau senilai Rp12.683.123.350,01;
 - 2) Aset pada Dinas Perhubungan berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen senilai Rp48.480.000,00;
 - 3) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp635.160.000,00 yang terdiri atas Tanah SMAN 04 Berau senilai

[Handwritten signature]



Rp472.640.000,00, Buku Laporan Lain-lain senilai Rp75.400.000,00, dan Kontur Zonasi Kecamatan Teluk Bayur (Dinas Kehutanan) senilai Rp87.120.000,00.

4) Aset P3D Senilai Rp255.322.585.723,33 terdiri atas Gedung dan Bangunan senilai Rp248.492.354.190,33 dan Peralatan dan Mesin senilai Rp6.830.231.533,00

5) Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan sebesar Rp360.676.237,00 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan.

f. *Treasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai senilai Rp264.778.067.000,00.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(37.909.758.366,88)	(29.922.257.419,24)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada per 31 Desember 2025 senilai Rp37.909.758.366,88 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.987.500.947,61 atau 26,69% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp29.922.257.419,24. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.121 Amortisasi Per SKPD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Beban Amortisasi TA 2025	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	(451.865.833,33)	(112.280.000,00)	(564.145.833,33)	(112.280.000,00)	24,85
2	Dinas Kesehatan	(295.139.233,33)	(37.766.000,00)	(332.905.233,33)	(37.766.000,00)	12,80
3	RSUD Dr. Rivai	(810.602.700,00)	(453.373.333,33)	(1.263.976.033,33)	(453.373.333,33)	55,93
4	Dnas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(20.084.567.683,60)	(4.895.870.319,05)	(24.980.438.002,65)	(4.895.870.319,05)	24,38
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(55.565.000,00)	(55.966.111,67)	(111.531.111,67)	(55.966.111,67)	100,72
6	Dinas Perhubungan	(138.987.633,33)	(40.170.600,00)	(179.158.233,33)	(40.170.600,00)	28,90
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(913.094.739,48)	(361.852.682,63)	(1.274.947.422,11)	(361.852.682,63)	39,63
8	Dinas Komunikasi & Informatika	(1.584.118.197,50)	(393.143.796,67)	(1.977.261.994,17)	(393.143.796,67)	24,82
9	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(113.712.790,67)	(83.868.177,40)	(197.580.968,07)	(83.868.177,40)	73,75
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(109.610.000,00)	(10.753.333,33)	(120.363.333,33)	(10.753.333,33)	9,81
11	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(147.437.280,00)	(110.830.311,92)	(258.267.591,92)	(110.830.311,92)	75,17
12	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(26.631.175,82)	(59.834.109,80)	(86.465.285,62)	(59.834.109,80)	224,68
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(885.405.025,00)	(339.595.760,01)	(1.225.000.785,01)	(339.595.760,01)	38,35
14	Sekretariat Daerah	(205.294.579,17)	(76.761.809,00)	(282.056.388,17)	(76.761.809,00)	37,39
15	Sekretariat DPRD	(86.971.858,03)	(41.254.022,80)	(128.225.880,83)	(41.254.022,80)	47,43
16	Kantor Penghubung	(45.000.000,00)	0,00	(45.000.000,00)	0,00	0,00

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024	Beban Amortisasi TA 2025	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(50.000.000,00)	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
18	Dinas Perikanan	(15.484.500,00)	(6.882.000,00)	(22.366.500,00)	(6.882.000,00)	44,44
19	Dinas Perkebunan	(19.500.000,00)	0,00	(19.500.000,00)	0,00	0,00
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	(317.584.583,33)	(119.601.800,00)	(437.186.383,33)	(119.601.800,00)	37,66
21	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	(92.880.000,00)	0,00	(92.880.000,00)	0,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	(1.635.463.333,33)	(526.124.166,67)	(2.161.587.500,00)	(526.124.166,67)	32,17
23	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	(694.854.426,67)	(18.194.453,33)	(713.048.880,00)	(18.194.453,33)	2,62
24	BPKAD	(593.793.333,33)	(135.830.000,00)	(729.623.333,33)	(135.830.000,00)	22,87
25	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(122.865.316,67)	(36.067.800,00)	(158.933.116,67)	(36.067.800,00)	29,36
26	Dinas Pertanahan	(49.500.000,00)	(1.313.500,00)	(50.813.500,00)	-1313500,00	2,65
27	Kecamatan Tanjung Redeb	(22.028.196,67)	(10.166.860,00)	(32.195.056,67)	(10.166.860,00)	46,15
28	Kecamatan Biatan	(3.950.000,00)	0,00	(3.950.000,00)	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	(332.350.000,00)	0,00	(332.350.000,00)	0,00	0,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(18.000.000,00)	(60.000.000,00)	(78.000.000,00)	(60.000.000,00)	333,33
Jumlah		(29.922.257.419,24)	(7.987.500.947,61)	(37.909.758.366,88)	(7.987.500.947,61)	26,69

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(224.631.356.463,16)	(219.834.433.579,33)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada per 31 Desember 2025 senilai Rp224.631.356.463,16 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.796.922.883,83 atau 2,18% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp219.834.433.579,33. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.122 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	(77.787.632.748,33)	0,00	0,00	(77.787.632.748,33)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(40.831.736.159,00)	(900.987.387,44)	0,00	(41.732.723.546,44)	(900.987.387,44)	2,21
3	RSUD Dr. Rivai	(13.856.244.734,00)	(162.000.000,00)	0,00	(14.018.244.734,00)	(162.000.000,00)	1,17
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(13.420.699.140,00)	0,00	0,00	(13.420.699.140,00)	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(817.497.992,00)	0,00	0,00	(817.497.992,00)	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	(188.322.708,00)	(433.700.000,00)	0,00	(622.022.708,00)	(433.700.000,00)	230,30
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.211.234.145,00)	(943.344.000,00)	0,00	(3.154.578.145,00)	(943.344.000,00)	42,66
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	(608.330.333,00)	0,00	(117.752.500,00)	(490.577.833,00)	117.752.500,00	(19,36)
9	Dinas Sosial	(665.448.520,00)	0,00	0,00	(665.448.520,00)	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(389.383.333,00)	0,00	(36.355.000,00)	(353.028.333,00)	36.355.000,00	(9,34)

[Handwritten signature]



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(243.771.613,00)	0,00	0,00	(243.771.613,00)	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	(343.835.151,00)	0,00	0,00	(343.835.151,00)	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(1.101.924.582,00)	(394.155.916,00)	0,00	(1.496.080.498,00)	(394.155.916,00)	35,77
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	(324.743.084,00)	0,00	0,00	(324.743.084,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	(9.663.396.255,00)	(481.900.000,00)	0,00	(10.145.296.255,00)	(481.900.000,00)	4,99
18	Dinas Komunikasi & Informatika	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(2.607.209.958,00)	(166.600.000,00)	0,00	(2.773.809.958,00)	(166.600.000,00)	6,39
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(792.523.118,00)	0,00	(87.492.500,00)	(705.030.618,00)	87492500,00	(11,04)
21	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(386.918.755,00)	0,00	0,00	(386.918.755,00)	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(1.154.845.145,00)	0,00	0,00	(1.154.845.145,00)	0,00	0,00
24	Dinas Perikanan	(2.726.885.031,00)	0,00	0,00	(2.726.885.031,00)	0,00	0,00
25	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	(511.744.622,00)	0,00	0,00	(511.744.622,00)	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	(6.391.495.146,00)	(111.819.130,06)	0,00	(6.503.314.276,06)	(111.819.130,06)	1,75
28	Sekretariat DPRD	(6.161.472.218,00)	(212.500.000,00)	0,00	(6.373.972.218,00)	(212.500.000,00)	3,45
29	Sekretariat Korpri	(118.952.500,00)	0,00	0,00	(118.952.500,00)	0,00	0,00
30	Kec. Tanjung Redeb	(2.752.033.234,00)	(15.750.000,00)	0,00	(2.767.783.234,00)	(15.750.000,00)	0,57
31	Kec. Gunung Tabur	(1.379.030.327,00)	0,00	-85943500,00	(1.293.086.827,00)	85.943.500,00	-6,23
32	Kec. Sambaliung	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00
33	Kec. Teluk Bayur	(709.389.145,00)	0,00	0,00	(709.389.145,00)	0,00	0,00
34	Kec. Segah	(2.545.898.325,00)	(670.292.785,33)	0,00	(3.216.191.110,33)	(670.292.785,33)	26,33
35	Kec. Kelay	(314.999.604,00)	0,00	0,00	(314.999.604,00)	0,00	0,00
36	Kec. Talisayan	(560.744.273,00)	0,00	0,00	(560.744.273,00)	0,00	0,00
37	Kec. Biduk-Biduk	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00
38	Kec. Maratua	(587.889.552,00)	0,00	0,00	(587.889.552,00)	0,00	0,00
39	Kec. Tabalar	(158.730.350,00)	0,00	0,00	(158.730.350,00)	0,00	0,00
40	Kec. Batu Putih	(888.329.576,00)	0,00	0,00	(888.329.576,00)	0,00	0,00
41	Kec. Biatan	(468.850.598,00)	0,00	0,00	(468.850.598,00)	0,00	0,00
42	Inspektorat	(868.588.630,00)	0,00	0,00	(868.588.630,00)	0,00	0,00
43	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	(3.083.407.876,00)	(1.237.051.619,00)	(705.549.000,00)	(3.614.910.495,00)	(531.502.619,00)	17,24
45	Badan Pendapatan Daerah	(6.982.067.000,00)	0,00	0,00	(6.982.067.000,00)	0,00	0,00
46	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(368.485.957,00)	(253.129.795,00)	(153.215.249,00)	(468.400.503,00)	(99.914.546,00)	27,11
Jumlah		(219.834.433.579,33)	(5.983.230.632,83)	(1.186.307.749,00)	(224.631.356.463,16)	(4.796.922.883,83)	2,18

[Handwritten signature]



5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>42.713.229.688,00</u>	<u>45.378.771.461,24</u>

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang beban, Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Transfer. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp42.713.229.688,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.665.541.773,24 atau 5,87% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp45.378.771.461,24. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.123 Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
Utang PFK	22.126.952,00	22.126.952,00	2.510.442.459,00	2.510.442.459,00	2.488.315.507,00	11.245,63
Pendapatan diterima dimuka	1.447.515,00	0,00	0,00	1.447.515,00	0,00	0,00
Utang Belanja	12.212.185.939,75	12.212.185.939,75	39.825.511.645,12	39.825.511.645,12	27.613.325.705,37	226,11
Utang Jangka Pendek Lainnya	33.143.011.054,49	33.143.011.054,49	375.828.068,88	375.828.068,88	(32.767.182.985,61)	(98,87)
Jumlah	45.378.771.461,24	45.377.323.946,24	42.711.782.173,00	42.713.229.688,00	(2.665.541.773,24)	(5,87)

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>2.510.442.459,00</u>	<u>22.126.952,00</u>

PFK Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp2.510.442.459,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.488.315.507,00 atau 11.245,63% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp22.126.952,00. Perhitungan Fihak Ketiga oleh Bendahara Pengeluaran (pajak) belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian :

Tabel 5.124 Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Utang PFK	22.126.952,00	22.126.952,00	2.510.442.459,00	2.510.442.459,00	2.488.315.507,00	11.245,63
	Jumlah	22.126.952,00	22.126.952,00	2.510.442.459,00	2.510.442.459,00	2.488.315.507,00	11.245,63

(Handwritten signature)



Tabel 5.125 Kewajiban Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

NO	UTANG PFK 2025					
	SKPD	NTPN	KETERANGAN	TANGGAL		NOMINAL
				BUKU	SETOR	
1	Kecamatan Biduk-Biduk	67AF51Q0R8BOD2RQ	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	47.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	512D23IRQRENT06H	PPN	30/01/2026	30/01/2026	313.400,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	83D95015RESCDCH7	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	67.600,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	DBD274F9BKCG22Q4	PPh 23	30/01/2026	30/01/2026	120.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	8796F2MECDOOAIGH	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	39.624,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	85F951Q0SID1A8FT	PPN	30/01/2026	30/01/2026	376.080,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	FC0873IRQ1VUIVGE	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	104.325,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	838DC015TFLBQE0S	PPh 23	30/01/2026	30/01/2026	100.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	90E635BMS5Q6C5T6	PPh 23	30/01/2026	30/01/2026	100.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	3A3E1015SFOU58UC	PPN	30/01/2026	30/01/2026	963.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	DD31374HQ0JHDTIT	PPh 23	30/01/2026	30/01/2026	100.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	6F2035BMQDI93VMA	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	39.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	16490684C3NFT2UN	PPh 22	30/01/2026	30/01/2026	47.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	CC7BF015TJ5200TAC	PPN	30/01/2026	30/01/2026	316.900,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	760FB1Q0RK66DM23	PPN	30/01/2026	30/01/2026	541.320,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	B92A01Q0U6RFSE84	PPN	27/02/2026	27/02/2026	1.080.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	B63AF74HSQFR4QM3	PPh 22	27/02/2026	27/02/2026	126.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	82B930TJETSFDPC9	PPN	27/02/2026	27/02/2026	376.000,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	EF1864F9DRMLJ6RP	PPh 22	27/02/2026	27/02/2026	44.775,00
	Kecamatan Biduk-Biduk	0DE782MEFDN642OJ	PPN	27/02/2026	27/02/2026	358.000,00
						5.260.024,00
2	Dinas Pertanahan	EF9222MEB9GOR2LF	PPh 23	14/01/2026	14/01/2026	18.000,00
	Dinas Pertanahan	994981Q0R0UEM3EA	PPh 22	14/01/2026	14/01/2026	40.149,00
	Dinas Pertanahan	F72280TJBHJ3D130	PPh 22	14/01/2026	14/01/2026	68.919,00
	Dinas Pertanahan	2AD3A4F9BK932L22	PPN	14/01/2026	14/01/2026	505.406,00
	Dinas Pertanahan	00B8A0TJBVB0LLCT	PPN	14/01/2026	14/01/2026	405.712,00
	Dinas Pertanahan	C502D2MEBN1UEO17	PPh 22	14/01/2026	14/01/2026	55.250,00
						1.093.436,00
3	Dinas Kesehatan	FC0F51Q0O0EJ7321	PPh 22	05/01/2026	05/01/2026	6.820.170,00
	Dinas Kesehatan	D200B015OBQJVJLE	PPN	05/01/2026	05/01/2026	50.014.580,00
						56.834.750,00
4	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	C50F574HMQ19E17H	PPh 22	05/01/2026	05/01/2026	1.839.297,00
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	ECEF85BMP1E92ET7	PPN	05/01/2026	05/01/2026	11.561.297,00
						13.400.594,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B8AE074HOLDUKLKC	PPN	02/01/2026	02/01/2026	79.286.240,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	906532MB7A7KMS67	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	25.227.440,00

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

NO	UTANG PFK 2025					
	SKPD	NTPN	KETERANGAN	TANGGAL		NOMINAL
				BUKU	SETOR	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8443A2ME7ULBH466	PPN	02/01/2026	02/01/2026	7.133.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	919FB1Q0PDLPJBCB	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	2.269.750,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342874F994SQ50TM	PPN	02/01/2026	02/01/2026	116.664.248,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	217960TJ9VEBNUMD	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	18.560.221,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	AAB4374HN09PNHD9	PPN	02/01/2026	02/01/2026	1.980.991,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	AFEBA6848HR4HB3L	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	630.315,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	559F01Q00MQB2EHM	PPN	02/01/2026	02/01/2026	5.944.686,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A28476846L8A4MMA	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	1.891.491,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	094DD74HP91L7BRJ	PPN	02/01/2026	02/01/2026	3.844.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	940DE4F98LB2QV9V	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	1.223.250,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8224F74HP00QKHCB	PPN	02/01/2026	02/01/2026	878.026.280,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BF3C56846PTG72DR	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	139.685.999,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0072774HOTOA6RIU	PPN	02/01/2026	02/01/2026	1.485.495,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	E1B832ME8BFFT62D	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	472.658,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C67155BMNLM8LUSI	PPN	02/01/2026	02/01/2026	71.299.950,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	995A54F98209HCK7	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	22.686.348,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	F9B9431RNF4P4F7F	PPN	02/01/2026	02/01/2026	9.509.896,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	D831C2ME7N275P55	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	3.025.876,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1D88274HND119M85	PPN	02/01/2026	02/01/2026	796.231.814,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	AOF8E4K98J6NBLQD	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	191.819.482,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7836E6847M2T6BDY	PPN	02/01/2026	02/01/2026	979.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	E0B372ME7TTM749N	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	311.500,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DBD9868484KN443C	PPN	02/01/2026	02/01/2026	984.450,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	752B61Q00F9D5UJO	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	313.234,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150BA74HN1M149FT	PPN	02/01/2026	02/01/2026	984.450,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B1E875BMP4L3M3RC	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	313.234,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	D361A6848NBTOU03	PPN	02/01/2026	02/01/2026	44.058.112,00

P



(dalam rupiah)

NO	UTANG PFK 2025					
	SKPD	NTPN	KETERANGAN	TANGGAL		NOMINAL
				BUKU	SETOR	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	AA2AF4F986KGARE2	PPh 4 (2)	02/01/2026	02/01/2026	7.009.245,00
						2.433.853.655,00
Jumlah						2.510.442.459,00

5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025	Tahun 2024
	1.447.515,00	1.447.515,00

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp1.447.515,00 tidak ada perbedaan dengan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp1.447.515,00. Pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.447.515,00 yaitu saldo pada BRI atas dana Jamkesmas dari pusat yang tidak dapat dipergunakan sebelum ada verifikasi tagihan. Adapun penjelasan terkait Saldo Jamkesmas sebagai berikut:

- Jamkesmas membuka rekening bank BRI atas nama RSUD dr. Abdul Rivai untuk melakukan droppingan dana atau pembayaran klaim. Setiap bulan RSUD menarik uang dari BRI dengan jumlah nominal berdasarkan hasil verifikasi klaim Jamkesmas, sehingga terdapat sisa uang di bank BRI yang seharusnya dikembalikan ke jamkesmas tetapi per 1 Januari 2014 Jamkesmas resmi diahlikan ke BPJS Kesehatan sehingga sisa dana Jamkesmas yg ada di rekening BRI tidak bisa dikembalikan ke jamkesmas.

Tabel 5.126 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.447.515,00	1.447.515,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.447.515,00	1.447.515,00	0,00	0,00

5.3.2.3 Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	<u>39.825.511.250,12</u>	<u>12.212.185.939,75</u>

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp39.825.511.250,12 mengalami **kenaikan** senilai Rp27.613.325.705,37 atau 226,11% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.212.182.939,75. Utang Belanja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(Handwritten signature)



Tabel 5.127 Utang Belanja Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2024	Perpindahan dari Utang JPL ke Utang Belanja	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	10.121.505.500,70	0,00	10.121.505.500,70	14.285.011.250,06	14.285.011.250,06	4.163.505.749,36	41,14
2	Utang Belanja Barang & Jasa	2.090.680.439,05	0,00	2.090.680.439,05	12.721.090.579,00	12.721.090.579,00	10.630.410.139,95	508,47
3	Utang Belanja Modal	0,00	32.768.127.002,33	32.768.127.002,33	12.715.841.597,01	12.715.841.597,01	12.715.841.597,01	0,00
4	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	103.568.219,05	103.568.219,05	103.568.219,05	0,00
Jumlah		12.212.185.939,75	32.768.127.002,33	44.980.312.942,08	39.825.511.645,12	39.825.511.645,12	27.613.325.705,37	226,11

Selain data utang belanja diatas, masih terdapat utang belanja yang belum direviu oleh Inspektorat senilai Rp12.793.623.852,04 dengan rincian pada Lampiran 17.

5.3.2.3.1 Utang Beban Pegawai

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja (Beban Pegawai)	<u>14.285.011.250,06</u>	<u>10.121.505.500,70</u>

Utang Belanja (Beban Pegawai) adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi akibat perikatan dengan pegawai, utang belanja (beban pegawai) ini terdiri dari Utang pegawai belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi daerah, utang jasa pelayanan kesehatan asn, dan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pppk dan utang belanja iuran jaminan kesehatan pppk. Utang Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2025 senilai Rp14.285.011.250,06, mengalami **kenaikan** senilai Rp4.163.505.749,36 atau 41,14% dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 senilai Rp10.121.505.500,70. Dengan rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.128 Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	74.262.000,00	74.262.000,00	0,00	0,00	(74.262.000,00)	(100,00)
2	RSUD Abd Rivai	10.047.243.500,70	10.047.243.500,70	14.285.011.250,06	14.285.011.250,06	4.237.767.749,36	42,18
Jumlah		10.121.505.500,70	10.121.505.500,70	14.285.011.250,06	14.285.011.250,06	4.163.505.749,36	41,14

5.3.2.3.2 Utang Jasa Kantor

	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Jasa Kantor	12.721.090.579,00	2.090.680.439,05

(Handwritten signature)



Utang Jasa Kantor (Air, Listrik, telepon, Internet) dari beberapa SKPD yang belum melakukan realisasi pembayaran sampai tanggal per 31 Desember 2025. Adapun saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp12.721.090.579,00. Terjadi **kenaikan** senilai Rp10.630.410.139,95 atau 508,47% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2024 senilai Rp2.090.680.439,05. Rincian utang jasa kantor dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.129 Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	733.400,00	733.400,00	1.431.500,00	1.431.500,00	698.100,00	95,19
2	Dinas Kesehatan	192.461.000,00	192.461.000,00	170.289.200,00	170.289.200,00	(22.171.800,00)	(11,52)
3	RSUD Abd Rivai	651.381.027,05	651.381.027,05	11.327.879.407,00	11.327.879.407,00	10.676.498.379,95	1.639,06
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	71.096.037	71.096.037,00	57.509.611,00	57.509.611,00	(13.586.426,00)	(19,11)
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	208.500,00	208.500,00	112.200,00	112.200,00	(96.300,00)	(46,19)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	884500,00	884500,00	922.200,00	922.200,00	37.700,00	4,26
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	1.316.500,00	1.316.500,00	1.316.500,00	0,00
8	Dinas Sosial	420.520,00	420.520,00	1.247.900,00	1.247.900,00	827.380,00	196,75
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	21.258.815,00	21.258.815,00	21.978.144,00	21.978.144,00	719.329,00	3,38
10	Dinas Pangan	5.484.550,00	5.484.550,00	989.200,00	989.200,00	(4.495.350,00)	(81,96)
11	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	5.568.000,00	5.568.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	(2.093.000,00)	(37,59)
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	4.381.765,00	4.381.765,00	559.000,00	559.000,00	(3.822.765,00)	(87,24)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	4.031.950,00	4.031.950,00	3.479.050,00	3.479.050,00	(552.900,00)	(13,71)
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	3.636.116,00	3.636.116,00	32.542.277,00	32.542.277,00	28.906.161,00	794,97
15	Dinas Perhubungan	26.656.975,00	26.656.975,00	29.340.138,00	29.340.138,00	2.683.163,00	10,07
16	Dinas Komunikasi & Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	208.511.827,00	208.511.827,00	220.311.809,00	220.311.809,00	11.799.982,00	5,66
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.989.575,00	12.989.575,00	15.561.200,00	15.561.200,00	2.571.625,00	19,80
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	75.183.275,00	75.183.275,00	82.435.966,00	82.435.966,00	7.252.691,00	9,65
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	8.532.587,00	8.532.587,00	15.013.663,00	15.013.663,00	6.481.076,00	75,96
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	21.944.965,00	21.944.965,00	15.742.302,00	15.742.302,00	(6.202.663,00)	(28,26)
22	Dinas Pertanahan	0,00	0,00	2.250.810,00	2.250.810,00	2.250.810,00	0,00
23	Dinas Perikanan	20.793.444,00	20.793.444,00	22.131.306,00	22.131.306,00	1.337.862,00	6,43
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	22.938.407,00	22.938.407,00	22.643.550,00	22.643.550,00	(294.857,00)	(1,29)
25	Dinas Perkebunan	13.917.934,00	13.917.934,00	14.270.638,00	14.270.638,00	352.704,00	2,53
26	Sekretariat Daerah	592.687.543,00	592.687.543,00	584.480.134,00	584.480.134,00	(8.207.409,00)	(1,38)
27	Kantor Penghubung	1.486.028,00	1.486.028,00	0,00	0,00	(1.486.028,00)	(100,00)

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	Kenaikan (Penurunan)	%
28	Inspektorat	15.972.957,00	15.972.957,00	16.632.196,00	16.632.196,00	659.239,00	4,13
29	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	919.200,00	919.200,00	749.300,00	749.300,00	(169.900,00)	(18,48)
30	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Pendapatan Daerah	2607000,00	2607000,00	1.360.300,00	1.360.300,00	(1.246.700,00)	(47,82)
32	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.959.127,00	13.959.127,00	11.360.875,00	11.360.875,00	(2.598.252,00)	(18,61)
33	Sekretariat DPRD	49.186.567,00	49.186.567,00	0,00	0,00	(49.186.567,00)	(100,00)
34	Kecamatan Tanjung Redeb	14247168,00	14247168,00	4.343.607,00	4.343.607,00	(9.903.561,00)	(69,51)
35	Kecamatan Gunung Tabur	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
36	Kecamatan Sambaliung	12.740.369,00	12.740.369,00	9.249.985,00	9.249.985,00	(3.490.384,00)	(27,40)
37	Kecamatan Talisayan	0,00	0,00	1.522.100,00	1.522.100,00	1.522.100,00	0,00
38	Kecamatan Teluk Bayur	0,00	0,00	1.996.490,00	1.996.490,00	1.996.490,00	0,00
39	Kecamatan Segah	0,00	0,00	1.746.550,00	1.746.550,00	1.746.550,00	0,00
40	Kecamatan Maratua	2.949.223,00	2.949.223,00	1.483.911,00	1.483.911,00	(1.465.312,00)	(49,68)
41	Kecamatan Batu Putih	804.500,00	804.500,00	2.559.499,00	2.559.499,00	1.754.999,00	218,15
42	Kecamatan Biatan	10.105.588,00	10.105.588,00	10.848.444,00	10.848.444,00	742.856,00	7,35
43	Badan Kesbang, Politik & Linmas	0,00	0,00	8.994.617,00	8.994.617,00	8.994.617,00	0,00
Jumlah		2.090.680.439,05	2.090.680.439,05	12.721.090.579,00	12.721.090.579,00	10.630.410.139,95	508,47

5.3.2.3.3 Utang Belanja Modal

Tahun 2025

Tahun 2024

Utang Belanja Modal

12.715.841.597,01

32.768.127.002,33

Utang Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp12.715.841.597,01 mengalami **penurunan** senilai Rp20.052.285.405,32 dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp32.768.127.002,33, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.130 Utang Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Utang Belanja Modal 2024	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	Utang Belanja Modal 2025
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	153.161.498,00	153.161.498,00	0,00	0,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Pemagaran Lap Bola Kampung Biatan Lempake	8.769.000,00	8.769.000,00	0,00	0,00
	Hutang Pengawasan Pembayaran Rehab Pendopo Lap Pemuda	9.879.000,00	9.879.000,00	0,00	0,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Pembuatan Lanjutan Kanopi Lahan Parkir Kolam Renang	9.879.000,00	9.879.000,00	0,00	0,00
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Renovasi Kolam Renang Kakaban Aquatic	11.377.500,00	11.377.500,00	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Utang Belanja Modal 2024	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	Utang Belanja Modal 2025
	Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Rehab Ruang WC Lap Bola Batiwakal	9.768.000,00	9.768.000,00	0,00	0,00
	Pembangunan Lapangan Bola Labanan Makarti	103.488.998,00	103.488.998,00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	32.614.965.504,33	32.614.965.504,33	1.248.769.235,51	1.248.769.235,51
	Revitalisasi Jalan Dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pulau Derawan Kec. Tanjung Redeb	1.424.999.500,00	1.424.999.500,00	0,00	0,00
	Penataan Tepian Kalimarau	211.303.021,80	211.303.021,80	0,00	0,00
	Peningkatan Jalan Poros Muara Lesan	1.198.747.507,45	1.198.747.507,45	0,00	0,00
	Peningkatan Jalan Kawasan Pendidikan - Jl. Gunung Agung Kel. Gunung Panjang (APBD-P)	731.227.285,00	731.227.285,00	0,00	0,00
	Pembangunan TPA Baru	779.169.335,83	779.169.335,83	0,00	0,00
	Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO A)	7.668,48	7.668,48	0,00	0,00
	Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO B)	7.864.237,44	7.864.237,44	0,00	0,00
	Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Batu Putih	257.632.118,50	257.632.118,50	0,00	0,00
	Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Raja Alam (Samburakat - Sambakungan)	449.755.442,56	449.755.442,56	0,00	0,00
	Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kampung Maluang	227.939.625,83	227.939.625,83	0,00	0,00
	Pembangunan Reservoir Batu Batu Kampung Batumbuk	137.107.165,29	137.107.165,29	0,00	0,00
	Pembangunan Turap Sambaliung	1.451.030.927,00	1.451.030.927,00	0,00	0,00
	Pembangunan Turap Sheet Pile Belakang Kantor Bupati	1.973.197.255,76	1.973.197.255,76		0,00
	Pembangunan Embung Air Baku Maratua	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Cut Nya Dien - Jl. Raja Alam Kel. Rinding Dan Sekitarnya	447.782.130,00	447.782.130,00	0,00	0,00
	Pembangunan Saluran Pembuang Gang Elang Kel. Rinding Dan Sekitarnya	683.722.315,00	683.722.315,00	0,00	0,00
	Normalisasi Sungai Kampung Campur Sari Kec. Talisayan (APBD-P)	177.124.618,13	177.124.618,13	0,00	0,00
	Pembangunan Drainase Kawasan Jalan Cemara RT 09 Kel. Rinding (APBD-P)	450.532.616,00	450.532.616,00	0,00	0,00
	pembangunan jembatan Muara Lesan	285.280.180,39	285.280.180,39	0,00	0,00
	pembangunan Jalan Mantaritip-Buyung-Buyung	693.971.430,00	693.971.430,00	0,00	0,00
	pembangunan Jalan Kampung Maluang (Jalan Poros Tanjung Batu)-Paribau (Jalan Poros Tanjung Selor)	291.062.070,00	291.062.070,00	0,00	0,00
	Pembangunan Jalan Buah PURI RT. 11 Kampung Maluang Poros Bulungan	79.595.819,00	79.595.819,00	0,00	0,00
	Pembangunan Jalan Buyung-Buyung - Semurut Jalur 2	1.095.910.400,00	1.095.910.400,00	0,00	0,00
	pembangunan Jalan Kampung Jagung Samburakat dan sekitarnya	676.685.750,00	676.685.750,00	0,00	0,00
	Pembangunan Gedung RSUD Tanjung Redeb Kabupaten Berau (MYC)	11.475.125.035,00	11.475.125.035,00	0,00	0,00
	Pembangunan Taman makam Pahlawan	81.404.096,00	81.404.096,00	0,00	0,00
	Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Kelurahan Rinding dan Sekitarnya (APBD-P)	447.507.315,00	447.507.315,00	0,00	0,00
	Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam Kec. Teluk Bayur dan Sekitarnya (APBD-P)	825.350.680,04	825.350.680,04	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Utang Belanja Modal 2024	Pelunasan /Penghapusan	Penambahan	Utang Belanja Modal 2025
	Lanjutan Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Kampung Baru - Stasiun Kec. Teluk Bayur (APBD-P)	703.377.641,05	703.377.641,05	0,00	0,00
	Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam I Sambaliung dan Sekitarnya (APBD-P)	683.874.600,00	683.874.600,00	0,00	0,00
	Lanjutan Peningkatan Jalan Rahmat Hidayat Kec. Gunung Tabur (APBD-P)	161.717.883,00	161.717.883,00	0,00	0,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Tabalar Muara	905.396.310,00	905.396.310,00	0,00	0,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Makam Datu Si Panaik	194.712.430,48	194.712.430,48	0,00	0,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Semurut	1.166.669.132,20	1.166.669.132,20	0,00	0,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang	1.594.086.797,85	1.594.086.797,85	0,00	0,00
	Lanjutan pembangunan Jalan Kawasan Kampung Sukan Tengah	220.777.086,25	220.777.086,25	0,00	0,00
	Pemagaran dan Gapura Kodim	91.596.864,00	91.596.864,00	0,00	0,00
	Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) beserta Meubelair Sat Reskrim dan SatbNarkoba Mako Polres Km5	266.997.639,00	266.997.639,00	0,00	0,00
	Lanjutan Pembangunan Masjid Mapolres	64.723.575,00	64.723.575,00	0,00	0,00
	Utang Aset GB KDP pembangunan Masjid Tanjung Batu progres Fisik 3,83% sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	250.098.999,96	250.098.999,96
	Utang Aset GB KDP pembangunan gedung kantor BKPSDM Progres fisik 1,19 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	166.897.500,00	166.897.500,00
	Utang Aset KDP JIJ Peningkatan dan Perluasan SPAM Merancang progres fisik 0,582 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	122.335.333,00	122.335.333,00
	Utang Aset GB KDP Lanjutan pembangunan penataan Taman Makam Pahlawan Progres fisik 2,61 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	83.582.490,55	83.582.490,55
	Pembangunan Gedung Serbaguna & Prasarana Camat Kelay	0,00	0,00	67.110.650,00	67.110.650,00
	Koreksi penambahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Kelay berdasarkan reviu utang Inspektorat	0,00	0,00	63.755.118,00	63.755.118,00
	Koreksi penambahan Peningkatan Jalan Permukiman Rt 05 Sukan Tengah Kec. Sambaliung berdasarkan reviu utang Inspektorat	0,00	0,00	160.255.000,00	160.255.000,00
	Koreksi penambahan Peningkatan Jalan Usaha Tani, Kampung Eka Sapta, Kec. Talisayan berdasarkan reviu utang Inspektorat	0,00	0,00	135.300.000,00	135.300.000,00
	Koreksi penambahan Pengawasan Teknis Lanjutan Perbaikan Jalan Jembatan Pulau Besing berdasarkan reviu Inspektorat	0,00	0,00	199.434.144,00	199.434.144,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	562.954.361,50	562.954.361,50
	Rehab Total Pustu Long Pelay	0,00	0,00	530.986.361,50	530.986.361,50
	Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengerjaan	0,00	0,00	31.968.000,00	31.968.000,00
4	RSUD ABD RIVAI	0,00	0,00	10.904.118.000,00	10.904.118.000,00
	Utang KDP fisik pekerjaan pembangunan gedung RSUD Abdul Rivai BAST No : 445/1278/TU-1/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025	0,00	0,00	10.904.118.000,00	10.904.118.000,00
Jumlah		32.768.127.002,33	32.768.127.002,33	12.715.841.597,01	12.715.841.597,01

P



5.3.2.3.4

	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Belanja Hibah	103.568.219,05	0,00

Utang Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp103.568.219,05 mengalami **penurunan** senilai Rp103.568.219,05 atau 0,00% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.131 Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Utang Belanja Hibah 31 Desember 2024	Pelunasan / Penghapusan	Penambahan	Utang Belanja Hibah 31 Desember 2025	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultural & Peternakan							
		Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	103.568.219,05	103.568.219,05	103.568.219,05	0,00
Jumlah			0,00	0,00	103.568.219,05	103.568.219,05	103.568.219,05	0,00

5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	375.828.068,88	33.143.011.054,49

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2025 senilai Rp375.828.068,88 mengalami **penurunan** senilai Rp32.767.182.984,51 atau 98,87% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp33.143.011.054,49, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132 Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2025	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Kepemudaan dan olahraga	153.161.498,00	0,00	0,00	0,00	(153.161.498,00)	(100,00)
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	374.884.051,61	0,00	944.017,27	375.828.068,88	944.017,27	0,25
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	32.614.965.504,33	0,00	0,00	0,00	(32.614.965.504,33)	(100,00)
Jumlah		33.143.011.054,49	0,00	944.017,82	375.828.068,88	(32.767.182.984,51)	(98,87)

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 kewajiban Pemerintah kabupaten Berau kepada pihak Ketiga sesuai reviu Inspektorat, dengan total rincian sebagai berikut;

[Handwritten signature]



Tabel 5.133 Rincian Utang JPL

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2024	Pelunasan / Penghapusan	Penambahan	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2025
1	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah		374.884.051,61	0,00	944.017,27	375.828.068,88
		BNI 0140845262 (PT Karya Lestari)	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
		BNI 0139158051 (PT Berau Abadi Perkasa)	36.510.000,00	0,00	0,00	36.510.000,00
		BNI 0130207618 / 10140207610 (PT Extraindo)	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
		BPD 0062307366 (PT Berlian Biduk Jaya)	232.783.189,54	0,00	800.419,07	233.583.608,61
		BPD 0062305657 (CV Star)	68.840.862,07	0,00	143.598,20	68.984.460,27
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		153.161.498,00	0,00	0,00	0,00
		Hutang Pembayaran Pengawasan Pemagaran Lap Bola Kampung Biatan Lempake	8.769.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hutang Pengawasan Pembayaran Rehab Pendopo Lap Pemuda	9.879.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Pembuatan Lanjutan Kanopi Lahan Parkir Kolam Renang	9.879.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Renovasi Kolam Renang Kakaban Aquatic	11.377.500,00	0,00	0,00	0,00
		Hutang Pembayaran Pengawasan Teknis Rehab Ruang WC Lap Bola Batiwakal	9.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Lapangan Bola Labanan Makarti	103.488.998,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang		32.614.965.504,33	0,00	0,00	0,00
		Revitalisasi Jalan Dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pulau Derawan Kec. Tanjung Redeb	1.424.999.500,00	0,00	0,00	0,00
		Penataan Tepian Kalimantan	211.303.021,80	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Jalan Poros Muara Lesan	1.198.747.507,45	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan Jalan Kawasan Pendidikan - Jl. Gunung Agung Kel. Gunung Panjang (APBD-P)	731.227.285,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan TPA Baru	779.169.335,83	0,00	0,00	0,00
		Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO A)	7.668,48	0,00	0,00	0,00
		Perluasan Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan (Jl. PENDIDIKAN GG. WERKUDURO B)	7.864.237,44	0,00	0,00	0,00
		Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Batu Putih	257.632.118,50	0,00	0,00	0,00
		Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Raja Alam (Samburakat - Sambakungan)	449.755.442,56	0,00	0,00	0,00
		Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kampung Maluang	227.939.625,83	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Reservoir Batu Batu Kampung Batumbuk	137.107.165,29	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Turap Sambaliung	1.451.030.927,00	0,00	0,00	0,00

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2024	Pelunasan / Penghapusan	Penambahan	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2025
		Pembangunan Turap Sheet Pile Belakang Kantor Bupati	1.973.197.255,76	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Embung Air Baku Maratua	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Cut Nya Dien - Jl. Raja Alam Kel. Rinding Dan Sekitarnya	447.782.130,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Saluran Pembuang Gang Elang Kel. Rinding Dan Sekitarnya	683.722.315,00	0,00	0,00	0,00
		Normalisasi Sungai Kampung Campur Sari Kec. Talisayan (APBD-P)	177.124.618,13	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Drainase Kawasan Jalan Cemara RT 09 Kel. Rinding (APBD-P)	450.532.616,00	0,00	0,00	0,00
		pembangunan jembatan Muara Lesan	285.280.180,39	0,00	0,00	0,00
		pembangunan Jalan Mantaritip-Buyung-Buyung	693.971.430,00	0,00	0,00	0,00
		pembangunan Jalan Kampung Maluang (Jalan Poros Tanjung Batu)-Paribau (Jalan Poros Tanjung Selor)	291.062.070,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Jalan Buah PURI RT. 11 Kampung Maluang Poros Bulungan	79.595.819,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Jalan Buyung-Buyung - Semurut Jalur 2	1.095.910.400,00	0,00	0,00	0,00
		pembangunan Jalan Kampung Jagung Samburakat dan sekitarnya	676.685.750,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Gedung RSUD Tanjung Redeb Kabupaten Berau (MYC)	11.475.125.035,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Taman makam Pahlawan	81.404.096,00	0,00	0,00	0,00
		Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Kelurahan Rinding dan Sekitarnya (APBD-P)	447.507.315,00	0,00	0,00	0,00
		Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam Kec. Teluk Bayur dan Sekitarnya (APBD-P)	825.350.680,04	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan Preservasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Kampung Baru - Stasiun Kec. Teluk Bayur (APBD-P)	703.377.641,05	0,00	0,00	0,00
		Preservasi Kawasan Jalan Raja Alam 1 Sambaliung dan Sekitarnya (APBD-P)	683.874.600,00	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan Peningkatan Jalan Rahmat Hidayat Kec. Gunung Tabur (APBD-P)	161.717.883,00	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Tabalar Muara	905.396.310,00	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan pembangunan Jalan Makam Datu Si Panaik	194.712.430,48	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan pembangunan Jalan Tubaan-Semurut	1.166.669.132,20	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang	1.594.086.797,85	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan pembangunan Jalan Kawasan Kampung Sukan Tengah	220.777.086,25	0,00	0,00	0,00
		Pemagaran dan Gapura Kodim	91.596.864,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) beserta Meubelair Sat Reskrim dan SatbNarkoba Mako Polres Km5	266.997.639,00	0,00	0,00	0,00
		Lanjutan Pembangunan Masjid Mapolres	64.723.575,00	0,00	0,00	0,00

P



(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2024	Pelunasan / Penghapusan	Penambahan	Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2025
		Utang Aset GB KDP pembangunan Masjid Tanjung Batu progres Fisik 3,83% sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Aset GB KDP pembangunan gedung kantor BKPSDM Progres fisik 1,19 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Aset KDP JIJ Peningkatan dan Perluasan SPAM Merancang progres fisik 0,582 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Aset GB KDP Lanjutan pembangunan penataan Taman Makam Pahlawan Progres fisik 2,61 % sampai 31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Gedung Serbaguna & Prasarana Camat Kelay	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Kesehatan		0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehab Total Pustu Long Pelay	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RSUD Abdul Rivai		0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang KDP fisik pekerjaan pembangunan gedung RSUD Abdul Rivai BAST No : 445/1278/TU-1/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			33.143.011.054,49	0,00	944.017,27	375.828.068,88

5.3.2.5 Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki kasus hukum yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga.

5.3.3 Ekuitas

EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Berau pada kondisi tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp14.949.332.551.710,50 mengalami **kenaikan** senilai Rp337.318.534.823,64 atau 2,31% dibandingkan per 31 Desember 2024 senilai Rp14.612.014.016.886,86.

(Handwritten signature)



Tabel 5.134 Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Ekuitas	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86	337.318.534.823,64	2,31
	Jumlah	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86	337.318.534.823,64	2,31

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>4.988.383.405.021,09</u>	<u>5.520.083.482.717,53</u>

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO Tahun 2025 adalah senilai Rp4.988.157.238.021,09 mengalami **penurunan** senilai Rp531.700.077.696,44 atau 9,63% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp5.520.083.482.717,53. Rincian pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.135 Realisasi Pendapatan - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	Kenaikan (penurunan) (%)	Proporsi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	526.905.584.578,09	369.009.759.034,84	157.895.825.543,25	42,79	10,56
2	Pendapatan Transfer - LO	4.354.830.427.930,00	5.116.371.062.500,00	(761.540.634.570,00)	(14,88)	87,30
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	106.647.392.513,00	34.702.661.182,69	71.944.731.330,31	207,32	2,14
	Jumlah	4.988.383.405.021,09	5.520.083.482.717,53	(531.700.077.696,44)	(9,63)	

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>526.905.584.578,09</u>	<u>369.009.759.034,84</u>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 senilai

P



Rp526.905.584.578,09 mengalami **kenaikan** senilai Rp157.895.825.543,25 atau 42,79% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp369.009.759.034,84. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.136 Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	145.064.087.443,00	92.949.213.837,00	52.114.873.606,00	56,07
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	109.992.335.412,96	19.045.230.067,00	90.947.105.345,96	477,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	17.278.359.856,65	38.077.899.738,26	(20.799.539.881,61)	(54,62)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	254.570.801.865,48	218.937.415.392,58	35.633.386.472,90	16,28
	Jumlah	526.905.584.578,09	369.009.759.034,84	157.895.825.543,25	42,79

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>145.064.087.443,00</u>	<u>92.949.213.837,00</u>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp145.064.087.443,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp52.114.873.606,00 atau 56,07% dibanding dengan Tahun 2024 senilai Rp92.949.213.837,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.137 Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Reklame - LO	337.733.159,00	283.862.700,00	53.870.459,00	18,98
2	Pajak Air Tanah - LO	65.424.000,00	555.240,00	64.868.760,00	11.683,01
3	Pajak Sarang Burung Walet LO	49.560.758,00	14.745.000,00	34.815.758,00	236,12
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	108.664.200,00	166.622.768,00	(57.958.568,00)	(34,78)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	7.271.789.358,00	6.874.212.505,00	397.576.853,00	5,78
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	17.549.985.013,00	15.277.432.416,00	2.272.552.597,00	14,88
7	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	26.895.785.046,00	30.117.286.511,00	(3.221.501.465,00)	(10,70)
8	PBJT-Tenaga Listrik-LO	32.882.759.143,00	31.793.099.131,00	1.089.660.012,00	3,43
9	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	10.221.751.246,00	7.738.735.657,00	2.483.015.589,00	32,09

P



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
10	PBJT-Jasa Parkir-LO	200.459.444,00	219.597.201,00	(19.137.757,00)	(8,71)
11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	1.425.926.298,00	463.064.708,00	962.861.590,00	207,93
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	18.841.643.938,00	0,00	18.841.643.938,00	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	29.212.605.840,00	0,00	29.212.605.840,00	0,00
Jumlah		145.064.087.443,00	92.949.213.837,00	52.114.873.606,00	56,07

Tercapainya target pajak daerah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah banyak potensi-potensi pajak daerah mengalami kenaikan/bertambah.

Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 144.942.853.267,00

Pengurangan 7.956.847.097,00

Penambahan 8.078.081.273,00

Pendapatan LO Pajak 145.064.087.443,00

Mutasi Tambah :

Penambahan Piutang pada Badan Pendapatan Daerah

Pajak Reklame 5.854.521

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.055.769.435

PBJT-Makanan dan/atau Minuman 757.700.904

PBJT-Tenaga Listrik 3.076.259.913

PBJT-Jasa Perhotelan 142.018.878

PBJT-Jasa Parkir 20.168.372

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 20.309.250

Jumlah Mutasi Tambah 8.078.081.273

Pengurangan Penerimaan Pembayaran Piutang pada Badan Pendapatan Daerah

Mutasi Kurang :

Pajak Reklame 6.884.572,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.106.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.508.215.072,00

PBJT-Makanan dan/atau Minuman 2.587.385.803,00

PBJT-Tenaga Listrik 2.729.276.845,00

PBJT-Jasa Perhotelan 123.978.805,00

Jumlah Mutasi Kurang 7.956.847.097,00

Total Pendapatan Pajak Daerah - LO 145.064.087.443,00

[Handwritten signature]



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>109.992.335.412,96</u>	<u>19.045.230.067,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dipungut dan dikelola oleh beberapa SKPD penghasil antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penghubung serta Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp109.992.335.412,96 mengalami **kenaikan** senilai Rp90.947.105.345,96 atau 477,53% dibanding dengan Tahun 2024 senilai Rp19.045.230.067,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.138 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)						
No	SKPD	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	104.250.000,00	33.000.000,00	71.250.000,00	215,91
2	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	97.247.057.927,04	6.562.891.800,00	90.684.166.127,04	1.381,77
3	DPUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.649.450,00	1.050.210.150,00	439.300,00	0,04
4	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	196.771.489,92	190.722.060,00	6.049.429,92	3,17
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan & Pelindung	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	219.750.000,00	179.250.000,00	40.500.000,00	22,59
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyediaan Penyedot Kakus	2.831.707.000,00	2.390.498.000,00	441.209.000,00	18,46
7	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Ret. Pelayanan Pasar, Ret. Pelayanan Tera/Tera ulang dan Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	3.595.051.386,00	5.277.656.443,00	(1.682.605.057,00)	(31,88)
8	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, PKB, Pelayanan Kepelabuhan, dan Pelayanan Tempat Khusus Parkir	951.674.065,00	618.186.710,00	333.487.355,00	53,95
9	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.599.324.495,00	670.066.804,00	929.257.691,00	138,68
10	Dinas Kepemudaan & Olahraga	Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan, Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Penyewaan Tanah, Penyewaan Bangunan	612.115.000,00	505.176.500,00	106.938.500,00	21,17
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	578.105.000,00	435.620.000,00	142.485.000,00	32,71
12	Dinas Perikanan	Retribusi Penyewaan Bangunan, Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih & Ret. Penyediaan Tempat Pelelangan	210.724.000,00	174.208.000,00	36.516.000,00	20,96

(Handwritten signature)



(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
13	Dinas Pertanian & Peternakan	Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	291.235.000,00	288.313.000,00	2.922.000,00	1,01
14	Sekretariat Daerah/Kantor Penghubung	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Vila	489.975.000,00	633.700.000,00	(143.725.000,00)	(22,68)
15	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.945.600,00	35.730.600,00	(21.785.000,00)	(60,97)
16	BPKAD					
Jumlah			109.992.335.412,96	19.045.230.067,00	90.947.105.345,96	477,53

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2025 <u>17.278.359.856,65</u>	Tahun 2024 <u>38.077.899.738,26</u>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemkab Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 senilai Rp17.278.359.856,65 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada Perusda pada Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp20.799.539.881,61 atau 54,62% dibanding dengan Tahun 2024 senilai Rp38.077.899.738,26, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.139 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dividen BPD Kaltim	11.369.643.845,15	14.981.036.885,26	(3.611.393.040,11)	(24,11)
2	Laba PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	3.472.729.390,00	28.658.559,00	3.444.070.831,00	12.017,60
3	Perumda Air Minum Batiwakal	2.435.986.621,50	21.563.367.968,00	(19.127.381.346,50)	(88,70)
4	PT. Indo Pusaka Berau	0,00	1.499.991.300,00	(1.499.991.300,00)	(100,00)
5	Perumda Bhakti Praja	0,00	4.845.026,00	(4.845.026,00)	0,00
Jumlah		17.278.359.856,65	38.077.899.738,26	(20.799.539.881,61)	(54,62)

5.4.1.1.4 Lain - Lain PAD Yang Sah- LO

Lain-lain PAD Yang Sah -LO	Tahun 2025 <u>254.570.801.865,48</u>	Tahun 2024 <u>218.937.415.392,58</u>

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025 senilai Rp254.570.801.865,48 mengalami **kenaikan** senilai Rp35.633.386.472,90 atau 16,28% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp218.937.415.392,58, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.140 Lain – lain PAD Yang Sah - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN, BLUD RSU	2.840.357.104,31	0,00	2.840.357.104,31	0,00
2	RSUD Abdul Rivai	Pendapatan BLUD	0,00	98.821.943.927,06	(98.821.943.927,06)	(100,00)
3	Dinas Perhubungan	Pendapatan Denda Retribusi		0,00	0,00	0,00
3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pendapatan Denda Retribusi	64.134.424,00	0,00	64.134.424,00	0,00
4	BPKAD (SKPKD) :	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	248.439.412.302,95	116.243.492.088,40	132.195.920.214,55	113,72
5	Badan Pendapatan	Pendapatan Denda Retribusi & Lain- lain PAD yang Sah Lainnya, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak	3.226.822.634,22	3.871.795.937,12	(644.973.302,90)	(16,66)
6	Dinas Kepemudaan & Olahraga	Pendapatan Denda Retribusi	75.400,00	183.440,00	(108.040,00)	(58,90)
Jumlah			254.570.801.865,48	218.937.415.392,58	35.633.386.472,90	16,28

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>4.354.830.427.930,00</u>	<u>5.116.371.062.500,00</u>

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima dan telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Transfer – LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2025 adalah senilai Rp4.354.830.427.930,00 mengalami **penurunan** senilai Rp761.540.634.570,00 atau 14,88% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp5.116.371.062.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.141 Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	3.663.934.001.298,00	4.264.173.583.192,00	(600.239.581.894,00)	(14,08)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	683.897.136.632,00	835.328.348.308,00	(151.431.211.676,00)	(18,13)
Jumlah		4.354.830.427.930,00	5.116.371.062.500,00	(761.540.634.570,00)	(14,88)



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	3.663.934.001.298,00	4.264.173.583.192,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2025 senilai Rp3.663.934.001.298,00 mengalami **penurunan** senilai Rp600.239.581.894,00 atau 14,08% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp4.264.173.583.192,00. Rincian transfer pemerintah pusat - LO sebagai berikut:

**Tabel 5.142 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil	2.966.189.771.800,00	3.470.473.547.000,00	(504.283.775.200,00)	(14,53)
2	Dana Alokasi Umum	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00	(29.445.784.315,00)	(5,00)
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	934.635.000,00	80.364.880.846,00	(79.430.245.846,00)	(98,84)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	137.264.376.485,00	124.344.153.018,00	12.920.223.467,00	10,39
Jumlah		3.663.934.001.298,00	4.264.173.583.192,00	(600.239.581.894,00)	(14,08)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO Tahun 2025 senilai Rp6.999.290.000,00, mengalami **penurunan** senilai Rp9.869.841.000,00 atau 58,51,% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp16.869.131.000,00. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut;

**Tabel 5.143 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat Lainnya - LO					
1	Dana Insentif Daerah	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)

[Handwritten signature]



5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	683.897.136.632,00	835.328.348.308,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO Tahun 2025 senilai Rp683.897.136.632,00 mengalami **penurunan** senilai Rp151.431.211.676,00 atau 18,13% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp835.328.348.308,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah –LO tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 5.144 Transfer Pemerintah Provinsi – LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Provinsi - LO					
1	Pendapatan Bagi Hasil	346.297.136.632,00	479.368.348.308,00	(133.071.211.676,00)	(27,76)
2	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
Jumlah		683.897.136.632,00	835.328.348.308,00	(151.431.211.676,00)	(18,13)

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	346.297.136.632,00	479.368.348.308,00

Bagi Hasil Tahun 2025 adalah senilai Rp346.297.136.632,00 mengalami **penurunan** senilai Rp133.071.211.676,00 atau 27,76% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp479.368.348.308,00. Pendapatan bagi hasil mencatat beberapa akun pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.145 Bagi Hasil - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil - LO					
1	Pendapatan Bagi Hasil	346.297.136.632,00	479.368.348.308,00	(133.071.211.676,00)	(27,76)
Jumlah		346.297.136.632,00	479.368.348.308,00	(133.071.211.676,00)	(27,76)

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Tahun 2025	Tahun 2024
	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00

Bantuan Keuangan Tahun 2025 adalah senilai Rp337.600.000.000,00, mengalami **penurunan** senilai Rp18.360.000.000,00 atau 5,16% dibandingkan

[Handwritten signature]



Tahun 2024 senilai Rp355.960.000.000,00. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sarana pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota; mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat serta untuk kegiatan yang mendukung hal yang berkaitan dengan tanggungjawab atau kesepakatan yang dibangun antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.146 Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
Bantuan Keuangan					
1	Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>106.647.392.513,00</u>	<u>34.702.661.182,69</u>
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya senilai Rp106.647.392.513,00. Kondisi ini mengalami kenaikan senilai Rp71.944.731.330,31 atau 207,32% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp34.702.661.182,69. Dengan rincian pada tabel berikut :		

**Tabel 5.147 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah	80.587.787.243,00	6.076.320.302,00	74.511.466.941,00	1.226,26
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	26.059.605.270,00	28.626.340.880,69	(2.566.735.610,69)	(8,97)
	Jumlah	106.647.392.513,00	34.702.661.182,69	71.944.731.330,31	207,32

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah	<u>80.587.787.243,00</u>	<u>6.076.320.302,00</u>

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp80.587.787.243,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp74.511.466.941,00 atau

P



1.226,26% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp6.076.320.302,00. Dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5.148 Pendapatan Hibah - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

N0	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah Dinas Pendidikan	20.793.580.243,00	0,00	20.793.580.243,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.794.207.000,00	0,00	59.794.207.000,00	0,00
3	Pendapatan Hibah pada KOMINFO	0,00	13.220.000,00	(13.220.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah pada Dinas Koperasi, perindustrian & Perdagangan	0,00	4.436.250,00	(4.436.250,00)	(100,00)
5	Pendapatan Hibah DPMPTSP	0,00	141.950.000,00	(141.950.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan Hibah Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	5.916.714.052,00	(5.916.714.052,00)	(100,00)
Jumlah		80.587.787.243,00	6.076.320.302,00	74.511.466.941,00	1.226,26

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Lainnya	26.059.605.270,00	28.626.340.880,69

Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp26.059.605.270,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.566.735.610,69 atau 8,97% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp28.626.340.880,69. Dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.149 Pendapatan Lainnya - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	(%)
1	Pendapatan Lainnya	26.059.605.270,00	28.626.340.880,69	(2.566.735.610,69)	(8,97)
Jumlah		26.059.605.270,00	28.626.340.880,69	(2.566.735.610,69)	(8,97)

5.4.2 Beban - LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban - LO	<u>3.639.754.285.486,73</u>	<u>3.127.403.344.632,32</u>

Beban – LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Tahun 2025 senilai Rp3.639.754.285.486,73 mengalami **kenaikan** senilai Rp512.350.940.854,41 atau 16,38% dibandingkan

P



Tahun 2024 senilai Rp3.127.403.344.632,32. Rincian Beban – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.150 Beban – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	BEBAN OPERASI	3.271.976.132.142,73	2.751.394.750.385,32	520.581.381.757,41	18,92
2	BEBAN TRANSFER	361.916.653.344,00	370.233.794.664,00	(8.317.141.320,00)	(2,25)
3	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
	JUMLAH	3.639.754.285.486,73	3.127.403.344.632,32	512.350.940.854,41	16,38

5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp3.271.976.132.142,73 mengalami **kenaikan** senilai Rp520.581.381.757,41 atau 18,92% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp2.751.394.750.385,32 Beban Operasi – LO terdiri dari; Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain – Lain. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.151 Beban Operasi – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.040.657.020.722,36	1.041.266.704.121,13	(609.683.398,77)	(0,06)
2	Beban Barang dan Jasa	909.802.598.151,67	857.982.324.607,43	51.820.273.544,24	6,04
3	Beban Hibah	153.051.471.936,36	114.803.338.322,00	38.248.133.614,36	33,32
4	Beban Bantuan Sosial	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
5	Beban Penyisihan Piutang	2.454.367.521,74	293.512.532,82	2.160.854.988,92	736,21
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.156.009.173.810,60	721.874.870.801,94	434.134.303.008,66	60,14
7	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.271.976.132.142,73	2.751.394.750.385,32	520.581.381.757,41	18,92

5.4.2.1.1 Beban Pegawai –LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	<u>1.040.657.020.722,36</u>	<u>1.041.266.704.121,13</u>

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang ataupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai Imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2025 yang terealisasi senilai Rp1.040.657.020.722,36 mengalami **penurunan** senilai Rp609.683.398,77 atau 0,06% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp1.041.266.704.121,13. Rincian Beban Pegawai sebagai berikut :



**Tabel 5.152 Beban Pegawai – LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	355.064.036.898,00	319.667.130.155,00	35.396.906.743,00	11,07
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	31.401.380.010,00	29.018.359.403,00	2.383.020.607,00	8,21
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.813.340.000,00	6.345.019.000,00	(531.679.000,00)	(8,38)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.461.139.953,00	25.560.431.700,00	(1.099.291.747,00)	(4,30)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.354.023.890,00	3.599.935.000,00	1.754.088.890,00	48,73
6	Beban Tunjangan Beras ASN	19.544.667.355,00	17.523.901.920,00	2.020.765.435,00	11,53
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	788.211.922,00	786.978.465,00	1.233.457,00	0,16
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.055.291,00	4.274.013,00	781.278,00	18,28
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.034.269.335,00	27.295.087.726,00	3.739.181.609,00	13,70
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	743.716.337,00	656.658.479,00	87.057.858,00	13,26
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.231.129.490,00	1.973.724.826,00	257.404.664,00	13,04
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	342.354.799.484,00	319.723.731.109,00	22.631.068.375,00	7,08
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	77.142.290.658,00	74.421.369.400,00	2.720.921.258,00	3,66
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	28.301.465.535,00	29.343.691.836,00	(1.042.226.301,00)	(3,55)
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	10.997.250,00	0,00	10.997.250,00	0,00
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.087.216.723,00	2.828.373.159,00	2.258.843.564,00	79,86
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	761.768.788,00	1.983.593.833,00	(1.221.825.045,00)	(61,60)
19	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	42.113.029.669,00	40.641.820.016,00	1.471.209.653,00	3,62
20	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.311.764.526,00	1.896.246.600,00	(584.482.074,00)	(30,82)
21	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	263.810.041,00	1.170.750.000,00	(906.939.959,00)	(77,47)
22	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	21.764.558.020,06	11.457.709.245,84	10.306.848.774,22	89,96
23	Beban Honorarium	0,00	50.683.667.356,00	(50.683.667.356,00)	(100,00)
24	Beban Jasa Pengelolaan BMD	111.800.000,00	2.471.400.000,00	(2.359.600.000,00)	(95,48)
25	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	2.022.884.8167,00	6.221.391.200,00	14.007.456.967,00	225,15
26	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	1.092.225.503,00	1.232.601.600,00	(140.376.097,00)	(11,39)
27	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	650.292.500,00	831.000.000,00	(180.707.500,00)	(21,75)
28	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	666.435.000,00	5.355.000,00	0,80
29	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	83.930.700,00	85.035.300,00	(1.104.600,00)	(1,30)
30	Beban Tunjangan Beras DPRD	91.394.040,00	92.045.820,00	(651.780,00)	(0,71)
31	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.046.500,00	535.500,00	0,94
32	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	966.330.750,00	7.764.750,00	0,80
33	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.922.350,00	71.207.325,00	25.715.025,00	36,11
34	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	5.262.600.000,00	29.400.000,00	0,56
35	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	837.900.000,00	485.100.000,00	57,89

A



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
36	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.525.690,00	0,00	71.525.690,00	0,00
37	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.544.081.664,00	6.271.646.574,00	272.435.090,00	4,34
38	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.966.620.000,00	4.643.930.000,00	322.690.000,00	6,95
39	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	281.610.000,00	(281.610.000,00)	(100,00)
40	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
41	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.492.000,00	3.528.000,00	(36.000,00)	(1,02)
42	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
43	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.996.980,00	5.069.400,00	(72.420,00)	(1,43)
44	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.362.297,00	1.320.246,00	42.051,00	3,19
45	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.140,00	1.060,00	80,00	7,55
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.361.120,00	5.362.560,00	(1.440,00)	(0,03)
47	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
48	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
49	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	500.469.093,00	279.402.540,00	221.066.553,00	79,12
49	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	260.400.000,00	52.080.000,00	20,00
50	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
51	Beban Pegawai BLUD	1.266.749.523,30	43.383.657.724,29	(42.116.908.200,99)	(97,08)
Jumlah		1.040.657.020.722,36	1.041.266.704.121,13	(609.683.398,77)	(0,06)

Penjelasan Beban Pegawai – LO dapat dilihat sebagai berikut:

Belanja Pegawai - LRA **1.036.493.514.973,00**

Mutasi Kurang :

Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2024

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 74.262.000,00

Belanja Pegawai BLUD 10.047.243.500,70

Jumlah Mutasi Kurang **10.121.505.500,70**

Mutasi Tambah :

Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2025

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 13.953.502.226,06

Belanja Pegawai BLUD 331.509.024,00

Jumlah Mutasi Tambah **14.285.011.250,06**

Total Beban Pegawai - LO **1.040.657.020.722,36**

(Handwritten signature)



5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang dan Jasa	909.802.598.151,67	857.982.324.607,43

Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi senilai Rp909.802.598.151,67 mengalami **kenaikan** senilai Rp51.820.273.544,24 atau 6,04% dibandingkan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp857.982.324.607,43. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 termasuk realisasi Belanja Modal Tahun 2025 yang tidak menghasilkan aset.

Akun Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dan beban barang dan jasa lainnya dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.153 Barang dan Jasa - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Barang	199.785.093.495,90	141.813.511.255,93	57.971.582.239,97	40,88
2	Beban Jasa	401.169.148.424,86	396.643.164.598,32	4.525.983.826,54	1,14
3	Beban Pemeliharaan	38.165.343.759,00	44.650.405.911,54	(6.485.062.152,54)	(14,52)
4	Beban Perjalanan Dinas	133.680.407.937,80	177.302.434.571,30	(43.622.026.633,50)	(24,60)
5	Beban Barang Dan Jasa Lainnya	137.002.604.534,10	97.572.808.270,34	39.429.796.263,76	40,41
	Jumlah	909.802.598.151,67	857.982.324.607,43	51.820.273.544,24	6,04

Rincian Beban Barang dan Jasa – LO di rincikan sebagai berikut:

a. Beban Barang - LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	199.785.093.495,90	141.813.511.255,93

Beban Barang merupakan saldo Beban Persediaan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp199.785.093.495,90 mengalami **kenaikan** senilai Rp57.971.582.239,97 atau 4,88% dibandingkan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp141.813.511.255,93.

Tabel 5.154 Beban Barang - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Beban Barang Pakai Habis	189.982.940.025,69	140.272.375.149,93	49.710.564.875,76	35,44
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.440.561.212,00	11.814.721.658,00	(1.374.160.446,00)	(11,63)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.667.736.567,32	4.481.630.032,14	186.106.535,18	4,15
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.759.030.430,00	19.683.992.157,00	75.038.273,00	0,38
4	Beban Bahan-Bahan Baku	296.898.762,56	175.103.981,00	121.794.781,56	69,56
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	190.998.646,00	590.744.143,00	(399.745.497,00)	(67,67)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	65.314.100,00	19.888.000,00	45.426.100,00	228,41
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	408.449.704,00	589.983.300,00	(181.533.596,00)	(30,77)

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	73.000.000,00	194.380.000,00	(121.380.000,00)	(62,44)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.383.135.025,99	7.720.746.962,35	(1.337.611.936,36)	(17,32)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	33.929.000,00	71.167.000,00	(37.238.000,00)	(52,32)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	296.128.561,84	109.755.142,00	186.373.419,84	169,81
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	555.237.541,32	161.591.474,71	393.646.066,61	243,61
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	244.000,00	(244.000,00)	(100,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.355.800,00	5.448.000,00	(1.092.200,00)	(20,05)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.746.970,00	2.912.000,00	(165.030,00)	(5,67)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.859.359,00	24.918.800,00	(1.059.441,00)	(4,25)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.239.013.868,11	5.933.195.172,36	(694.181.304,25)	(11,70)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.715.651.024,05	5.250.772.687,70	464.878.336,35	8,85
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.598.132.255,00	10.349.903.536,87	(2.751.771.281,87)	(26,59)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	777.916.530,00	634.436.000,00	143.480.530,00	22,62
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.776.168.926,00	3.716.076.652,00	60.092.274,00	1,62
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.583.755.306,89	3.402.397.800,00	181.357.506,89	5,33
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.605.817.847,00	1.293.830.040,70	311.987.806,30	24,11
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.606.507.034,51	1.069.210.004,30	1.537.297.030,21	143,78
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.695.806.250,00	1.868.015.104,00	(172.208.854,00)	(9,22)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	894.259.468,00	2.504.339.932,00	(1.610.080.464,00)	(64,29)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.482.283.521,00	3.008.904.048,00	(1.526.620.527,00)	(50,74)
28	Beban Obat-Obatan-Obat	7.904.335.722,38	2.562.528.622,04	5.341.807.100,34	208,46
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.906.452.622,71	697.530.062,34	4.208.922.560,37	603,40
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.526.195.195,08	1.629.496.270,40	43.896.698.924,68	2.693,88
31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	82.603.600,00	904.523.500,00	(821.919.900,00)	(90,87)
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	410.000,00	(410.000,00)	(100,00)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.037.950.188,93	3.210.750.314,02	1.827.199.874,91	56,91
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	179.113.020,00	61.269.980,00	117.843.040,00	192,33
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.300.176.474,00	1.654.998.210,00	645.178.264,00	38,98
36	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.150.000,00	17.389.250,00	(12.239.250,00)	(70,38)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.764.155.557,00	17.433.459.699,00	1.330.695.858,00	7,63

P



Pemerintah Kabupaten Berau

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.895.570.610,00	2.877.127.762,00	18.442.848,00	0,64
39	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	452.090.784,00	147.024.420,00	305.066.364,00	207,49
40	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.833.674.300,00	3.188.419.756,00	(1.354.745.456,00)	(42,49)
41	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.168.170.540,00	14.213.547.400,00	954.623.140,00	6,72
42	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	98.516.440,00	0,00	98.516.440,00	0,00
43	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.831.800,00	114.330.000,00	(23.498.200,00)	(20,55)
44	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	33.150.000,00	183.900.000,00	(150.750.000,00)	(81,97)
45	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.374.056.800,00	1.487.418.210,00	(113.361.410,00)	(7,62)
46	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	443.060.400,00	851.594.666,00	(408.534.266,00)	(47,97)
47	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	105.006.800,00	481.370.000,00	(376.363.200,00)	(78,19)
48	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	579.215.500,00	293.572.000,00	285.643.500,00	97,30
49	Beban Pakaian KORPRI	82.810.000,00	49.800.000,00	33.010.000,00	66,29
50	Beban Pakaian Adat Daerah	431.517.300,00	446.162.000,00	(14.644.700,00)	(3,28)
51	Beban Pakaian Batik Tradisional	2.145.173.531,00	1.494.466.900,00	650.706.631,00	43,54
52	Beban Pakaian Olahraga	1.360.369.630,00	1.512.448.500,00	(152.078.870,00)	(10,06)
53	Beban Pakaian Paskibraka	2.070.000,00	80.530.000,00	(78.460.000,00)	(97,43)
54	Beban Barang Sampel Pangan	4.829.500,00	0,00	4.829.500,00	0,00
	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.559.120.513,21	618.717.550,00	7.940.402.963,21	1.283,36
55	Beban Komponen-Komponen Peralatan	7.452.055.853,21	18.242.250,00	7.433.813.603,21	40.750,53
56	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.102.617.660,00	595.359.300,00	507.258.360,00	85,20
57	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.447.000,00	5.116.000,00	(669.000,00)	(13,08)
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.243.032.957,00	922.418.556,00	320.614.401,00	34,76
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	31.748.848,00	0,00	31.748.848,00	0,00
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	16.105.080,00	14.900.000,00	1.205.080,00	8,09
60	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	35.196.000,00	0,00	35.196.000,00	0,00
61	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.510.000,00	552.241.856,00	(548.731.856,00)	(99,36)
62	Beban, Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use],	449.860.000,00	0,00	449.860.000,00	0,00
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	20.557.860,00	0,00	20.557.860,00	0,00

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
67	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.350.900,00	10.925.000,00	(9.574.100,00)	(87,63)
68	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	0,00	15.440.000,00	(15.440.000,00)	(100,00)
69	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	84.946.000,00	83.920.000,00	1.026.000,00	1,22
70	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	574.158.654,00	0,00	574.158.654,00	0,00
71	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	25.599.615,00	0,00	25.599.615,00	0,00
72	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	10.100.000,00	(10.100.000,00)	(100,00)
73	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	234.891.700,00	(234.891.700,00)	(100,00)
Jumlah		199.785.093.495,90	141.813.511.255,93	57.971.582.239,97	40,88

b. Beban Jasa - LO

Beban Jasa	Tahun 2025 401.169.148.424,86	Tahun 2024 396.643.164.598,32

Beban Jasa yang sudah diterima selama Tahun 2025 terealisasi senilai Rp401.169.148.424,86 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.525.983.826,54 atau 1,14% dibandingkan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp396.643.164.598,32.

Tabel 5.155 Beban Jasa – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	325.638.924.795,00	326.791.150.446,00	(1.152.225.651,00)	(0,35)
2	Beban Iuran Jaminan Asuransi	44.166.520.159,72	41.394.011.431,22	2.772.508.728,50	6,70
3	Beban Sewa Tanah	0,00	66.800.000,00	(66.800.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.149.125.095,00	8.642.830.750,00	(493.705.655,00)	(5,71)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.487.635.797,14	4.078.250.569,10	(590.614.771,96)	(14,48)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	265.560.000,00	236.580.000,00	28.980.000,00	12,25
7	Beban Jasa Konsultansi Kontruksi	3.909.003.997,00	4.959.224.516,00	(1.050.220.519,00)	(21,18)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi	4.072.422.542,00	2.955.027.479,00	1.117.395.063,00	37,81
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	615.000.000,00	450.000.000,00	165.000.000,00	36,67
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.819.552.557,00	5.345.844.975,00	4.473.707.582,00	83,69
11	Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	641.747.447,00	(641.747.447,00)	(100,00)
12	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.045.403.482,00	1.081.696.985,00	(36.293.503,00)	(3,36)

P



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Jumlah	401.169.148.424,86	396.643.164.598,32	4.525.983.826,54	1,14

c. Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 <u>38.165.343.759,00</u>	Tahun 2024 <u>44.650.405.911,54</u>

Beban Pemeliharaan meliputi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 terealisasi senilai Rp38.165.343.759,00 mengalami **penurunan** senilai Rp6.485.062.152,54 atau 14,52% dibandingkan Tahun 2024 terealisasi senilai Rp44.650.405.911,54 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.156 Beban Pemeliharaan - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.131.352.100,00	997.409.300,00	1.133.942.800,00	113,69
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.339.128.872,00	13.375.029.392,00	2.964.099.480,00	22,16
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.592.109.832,00	9.985.562.666,56	(3.393.452.834,56)	(33,98)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.358.866.455,00	19.671.695.552,98	(7.312.829.097,98)	(37,17)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	743.886.500,00	620.709.000,00	123.177.500,00	19,84
	Jumlah	38.165.343.759,00	44.650.405.911,54	(6.485.062.152,54)	(14,52)

d. Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 <u>133.680.407.937,80</u>	Tahun 2024 <u>177.302.434.571,30</u>

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 terealisasi senilai Rp133.680.407.937,80 mengalami **penurunan** senilai Rp43.622.026.633,50 atau 24,60% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp177.302.434.571,30, Dengan rincian tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.157 Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.463.580.079,80	177.093.797.775,30	(43.630.217.695,50)	(24,64)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	216.827.858,00	208.636.796,00	8.191.062,00	3,93
	Jumlah	133.680.407.937,80	177.302.434.571,30	(43.622.026.633,50)	(24,60)

[Handwritten signature]



e. Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO

Beban Barang dan Jasa Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	137.002.604.534,10	97.572.808.270,34

Beban Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2025 terealisasi senilai Rp137.002.604.534,10 mengalami **kenaikan** senilai Rp39.429.796.263,76 atau 40,41% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp97.572.808.270,34.

Tabel 5.158 Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.855.799.434,00	14.566.901.400,00	6.288.898.034,00	43,17
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	272.500.000,00	0,00	272.500.000,00	0,00
3	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	27.297.016.710,00	(27.297.016.710,00)	(100,00)
4	Beban Barang dan Jasa BOSP	28.640.635.431,00	0,00	28.640.635.431,00	0,00
5	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	661.183.718,00	0,00	661.183.718,00	0,00
6	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	151.550.280,00	0,00	151.550.280,00	0,00
9	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.588.407.298,00	6.166.040.825,00	1.422.366.473,00	23,07
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	78.832.528.373,10	49.542.849.335,34	29.289.679.037,76	59,12
Jumlah		137.002.604.534,10	97.572.808.270,34	39.429.796.263,76	40,41

Penjelasan Beban Barang dan Jasa – LO dapat dilihat sebagai berikut:

Belanja Barang - LRA **Rp** **145.484.674.484,72**

Mutasi Tambah :

a.	Penyesuaian Persediaan TA 2024	Rp	273.248.242.463,84
b.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2025	Rp	10.825.317.497,00
c.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa		
	Reklas ke Barang & Jasa Alat Ukur Ph Air/Kertas Lakmus , No BASTP : 426/02/PPK-KERTAS LAKMUS/BASTP/XI/2025 10 Kotak @ 330.000	Rp	3.300.000,00
	Nilai di bawah kapitalisasi Lampu Solar Cell 15 buah harga satuan Rp. 13.320.000 Nomor Bast: 072/11.06.03.51/BA-STB.PJU/XII/2025	Rp	199.800.000,00
	Nilai di bawah kapitalisasi Pengadaan Alat Penolong-Pelampung (Life Jacket) Merk YAMAHA eastern Typr GB4304-84 Kafasitas 90 Kg Up 10	Rp	4.824.000,00
	Unit harga satuan Rp.482.400,-		
	Nilai Dibawah Kapitalisasi, belanja Papan Visual Nama sebanyak 20 unit @Rp.330.000	Rp	6.600.000,00
	Nilai Dibawah Kapitalisasi, belanja arit 2 bh @Rp.225.000	Rp	450.000,00

(Handwritten signature)



Reklas ke Barjas Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Kegiatan DAU 2025) di Kelurahan Gunung Tabur SPK NO. 100.3.3.2/029/Kel-Gun/SPK/XI/2025 Diserahkan ke RT 07 an. Mardiana, dengan Berita Acara serah terima barang NO. BASTB/029.4/Kel-Gun/XII/2025	Rp	11.795.956,00
Reklas ke Barjas Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Kegiatan DAU 2025) di Kelurahan Gunung Tabur SPK NO. 100.3.3.2/029/Kel-Gun/SPK/XI/2025 Diserahkan ke RT 14 an. Umar Said , dengan Berita Acara serah terima barang NO. BASTB/029.4/Kel-Gun/XII/2025		11.795.956,00
Reklas ke Barjas Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Kegiatan DAU 2025) di Kelurahan Gunung Tabur SPK NO. 100.3.3.2/029/Kel-Gun/SPK/XI/2025 Diserahkan ke RT 12 an. Yulius Seli Patattan, dengan Berita Acara serah terima barang NO. BASTB/029.4/Kel-Gun/XII/2025		11.795.956,00
Reklas ke Barjas Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Kegiatan DAU 2025) di Kelurahan Gunung Tabur SPK NO. 100.3.3.2/029/Kel-Gun/SPK/XI/2025 Diserahkan ke RT 13 an. Hasamin, dengan Berita Acara serah terima barang NO. BASTB/029.4/Kel-Gun/XII/2025		11.795.956,00
Reklas ke Barjas Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran (Kegiatan DAU 2025) di Kelurahan Gunung Tabur SPK NO. 100.3.3.2/029/Kel-Gun/SPK/XI/2025 Diserahkan ke RT 10 an. Shalyhun, dengan Berita Acara serah terima barang NO. BASTB/029.4/Kel-Gun/XII/2025		11.795.956,00
Belanja Alat Pengukur Tinggi Badan Digital sebanyak 24 Unit @Rp.461.785	Rp	11.082.840,00
Belanja Alat Pengukur Tinggi Badan sebanyak 24 Unit @Rp.209.260	Rp	5.022.240,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 4 Gunung Tabur 2 papan pengumuman @450.000; 3 alat kebersihan @200.000; 30 kursi kerja @300.000; 1 alat kebersihan	Rp	10.700.000,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 3 Biduk-Biduk 1 tiang bendera @444.000; 29 kursi siswa @285.000; 7 tempat sampah @138.000	Rp	9.675.000,00
Belanja Hibah Kementrian Media Penyimpanan Eksternal / Hard Disk pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) @12 sekolah x 408.000 = 4.896.000	Rp	4.896.000,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 4 Segah 4 Tungku Tiang Bendera @250.000 ; 7 Kotak Sampah @150.000	Rp	2.050.000,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 6 Kelay 1 kursi lipat @250.000; 1 papan pengumuman @350.000; 5 tempat sampah @250.000	Rp	1.850.000,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 1 Segah 5 guling @150.000; 5 selimut wool @188.000	Rp	1.690.000,00
Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 4 Kelay 2 Papan Visual @380.000; 1 Papan Tulis @300.000; Tempat Sampah @25.000	Rp	1.085.000,00

(Handwritten signature)



Belanja Hibah Kementrian Mebeulair pada Bangunan SMPN 1 Kelay 3 Kursi Lipat @250.000	Rp	750.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Rice Cooker 1 buah No. BAST : 25/BAST1PPRT/III/2025	Rp	450.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi/Belanja Alat Kedokteran Gigi - Light Curing - Scaller - Set Handpiece/Bor Gigi sebanyak 20 unit @ Rp.392,113 = Rp.7.842,260 untuk 20 Puskesmas	Rp	7.842.260,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi/Belanja Alat Kedokteran Gigi - Alat Suntik Intra Ligamen, Bein Set, Bein Root Elevator bengkok & lurus, sebanyak 16 Unit @ Rp.438,250 = 7,012,000 pada RSUD Talisayan	Rp	7.012.000,00
Nilai di bawah kapitalisasi Ambu bag anak, bayi dan dewasa Harga satuan 6 buah Rp. 255.000 3 buah Rp. 315.000	Rp	2.475.000,00
Nilai Dibawah Kapitalisasi/Alat Kesehatan Umum Lainnya - Berupa Unit Pengukur Tinggi Badan untuk RSUD Tanjung Redeb Sebanyak 3 Unit @ Rp.425.000 TA 2025	Rp	1.275.000,00
Belanja Connector/Zyrex / Connector VHD 2 Unit @Rp.245.000 = Rp.490.000	Rp	490.000,00
Belanja Hibah Kementrian Media Penyimpanan Eksternal / Hard Disk pada jenjang Sekolah Dasar (SD) @158 sekolah x 408.000 = 64.464.000	Rp	64.464.000,00
Belanja Hibah Kementrian Media Penyimpanan Eksternal / Hard Disk pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) @49 sekolah x 408.000 = 19.992.000	Rp	19.992.000,00
Reklas ke Barjas Belanja sepatu lapangan 9 buah harga satuan Rp.1.800.000 noBAST 007/1.05.03.2.02.0022/BPBD-I/2025 TANGGAL 23/9/2025	Rp	16.200.000,00
Nilai di bawah kapitalisasi Carabiner besar 11 buah harga satuan Rp. 348.000 No SPK : 027/097/SPK/BPBD-SEKR/2025 tgl 8/12/2025	Rp	3.828.000,00
Belanja Pelampung Life Jacket sebanyak 18 buah @Rp.245.000 SDN 002 Long Lanuk	Rp	4.410.000,00
Reklas JIJ ke Beban Barang-Jasa dikarenakan kesalahan penganggaran (Koreksi)	Rp	58.272.432.366,11
Reklas JIJ ke Beban Barang-Jasa dikarenakan kesalahan penganggaran (Koreksi)	Rp	389.340.654,00
Reklas JIJ ke Beban Barang-Jasa dikarenakan kesalahan penganggaran (Koreksi)	Rp	184.818.000,00
Koreksi Lebih catat persediaan atas beban barang	Rp	10.202.377.993,17
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	353.573.722.094,12
Mutasi Kurang :		
a. Penyesuaian Persediaan TA 2025	Rp	298.578.241.894,89
b. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	533.103.788,05
c. Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap		
Reklas dari Barjas ke PM Kursi Lipat 8.4 merk :Chitose; Jumlah : 71 Buah; Harga Satuan : Rp 915.000; BAST Nomor :	Rp	64.965.000,00

[Handwritten signature]



900/06/BAPST/LS/TAB/X/2025; Tanggal 27
Oktober 2025

Reklas dari Barjas ke PM Kursi Lipat 3.2 merk :
Chitose; Jumlah : 72 Buah; Harga satuan : Rp
915.000; BAST Nomor :

Rp 65.880.000,00

900/07/BAPST/LS/TAB/X/2025; Tanggal 27
Oktober 2025

Reklas dari Barjas ke PM Kursi Lipat 3.2 merk :
Chitose; Jumlah : 12 buah; Harga satuan : Rp
915.000; BAST Nomor : 03/BAST-7.01.01/TAB;

Rp 10.980.000,00

Tanggal 1 November 2025

Reklas dari barjas ke PM Brankas 1 buah Nomor
BAST :

Rp 2.500.000,00

Reklas dari belanja Barjas ke Peralatan dan Mesin 2
buah Jet Cleaner, harga satuan Rp. 2.300.000
Nomor BAST : BAST/884/BKPSDM/XII/2025

Rp 4.600.000,00

Reklas dari Barjas ke PM 3 buah Lampu sorot harga
satuan Rp 510.600 BAST No :1630 /Pusk-
TB/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025

Rp 1.531.800,00

Reklas dari Barjas : GAWANGAN KAYU BATIK
4 buah x @ Rp. 1.770.400,- digunakan di Rumah
Tenun SukanNo BAST

Rp 7.081.600,00

:BAST/KPA/III/PBP/DKPP-PERIN/V/2025Tanggal
8 mei 2025

Reklas dari barjas ke PM Semprotan rumput 1 buah
Nomor : 107/BASTP/CPD-XI/2025

Rp 1.500.000,00

Reklas dari Barjas ke PM Ambal 3 buah harga
satuan Rp. 973.000 No BAST : 37/BAST-
PPSPGKB/VIII/2025 Tanggal 4 Agustus 2025

Rp 2.919.000,00

Jumlah Mutasi Kurang

Rp 299.273.303.082,94

Jumlah Saldo Beban Barang - LO

Rp 199.785.093.495,90

Belanja Jasa - LRA

Rp 400.993.530.810,00

Mutasi Tambah :

a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2025	Rp	1.390.106.382,00
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa		
	Reklas ke barjas kesalahan Penganggaran Honor PPTK	Rp	10.440.000,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Pemasangan Jembatan Bailey (APBD-P) T.A 2025 No. BAST : 08/BASTHP/PMSNGN BLY/PRJJ/XII/2025	Rp	199.791.000,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Lanjutan Normalisasi Sungai Kalimantan Rt 06 Tembudan (APBD-P) No. BAST :	Rp	169.954.850,00
	07/BASTP/PPK/PSD/Normalisasi kalimanting/APBD-P/SDA/XII/2025		
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Kasai No. BAST : 06/BASTHP/PPK- PPMSPALD/PERC SPALD-S KASAI/XI/2025	Rp	64.921.236,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan SPALD-S Di Kelurahan Sambaliung (APBD-P) TA. 2025 No. BAST : 04/BASTHP/PPK/Pws SPALD-S Sambaliung/XII/2025	Rp	61.990.836,00

(Handwritten signature)



c.	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Tanjung Batu No. BAST : 06/BASTHP/PPK- PPMSPALD/PERC SPALD-S TANJUNGBATU/XI/2025	Rp	61.913.136,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Kasai No. BAST : 04/BASTHP/PPK- SPALD/PWS.SPALD-S.KASAI/XII/2025	Rp	36.907.500,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Tanjung Batu (APBD-P) No. BAST : 05/BASTP/PPK-PPMSPALD/PENGWS.SPALD-S TANJUNGBATU/XII/2025	Rp	34.990.530,00
	Reklas JIJ ke Barjas Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan SPALD-S Di Kelurahan Sambaliung (APBD-P) TA. 2025 No. BAST : 04/BASTHP/PPK/Pws SPALD-S Sambaliung/XII/2025	Rp	34.965.000,00
	Reklas ke Barjas Kajian Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 TA 2025	Rp	49.000.000,00
	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2024	Rp	363.442.949,18
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	2.478.423.419,18
	Mutasi Kurang :		
	a. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	1.502.346.651,00
	b. Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap		
	Reklas ke PM Kursi Rapat - Nemo Working Chair Low Back Black sebanyak 10 buah @ Rp 1.097.790 di Bagian PBJ	Rp	10.977.900,00
	Reklas ke PM Pembuatan Meja Sedang Tipe 1 ukuran 160x70 (Spesifikasi Rangka Baja Hollow, Top Table Multiplek 19 mm + HPL dan Aksesoris) sebanyak 4 buah @ Rp 1.929.180 di Bagian PBJ	Rp	7.716.720,00
	Reklas ke PM Pembuatan Meja Besar Ukuran 220x90 (Spesifikasi Rangka Baja Hollow, Top Table Multiplek 19 mm + HPL) sebanyak 2 buah @ Rp 2.970.360 di Bagian PBJ	Rp	5.940.720,00
	Reklas ke PM Bangku Panjang ukuran 205x35 (Spesifikasi Rangka Baja Hollow, Top Table Multiplek 19 mm + HPL) sebanyak 4 buah @ Rp 1.105.560 di Bagian PBJ	Rp	4.422.240,00
	Reklas ke PM Pembuatan Meja Sedang Tipe 2 ukuran 140x70 (Spesifikasi Rangka Baja Hollow, Top Table Multiplek 19 mm + HPL dan Aksesoris) sebanyak 1 buah @ Rp 1.723.830 di Bagian PBJ	Rp	1.723.830,00
	Reklas ke PM Pembuatan Meja Kecil ukuran 120x60 (Spesifikasi Rangka Baja Hollow, Top Table Multiplek 19 mm + HPL) sebanyak 1 buah @ Rp 1.108.890 di Bagian PBJ	Rp	1.108.890,00
	Reklas Barjas ke JIJ Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Drainase RT.09 Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan No. BAST : 04-BAST-PPK- PSDL/RT 09 Kamp Bumi Jaya/APBD/SDA/VIII/2025	Rp	14.907.000,00

(Handwritten signature)



c.	Reklas Barjas ke JIJ Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Merpati Kampung Labanan Jaya Kec.Teluk Bayur No. BAST : 02/BAST-PSDL/JI merpati/APBD/SDA/X/2025	Rp	14.901.000,00	
	Reklas Barjas ke JIJ Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Drainase Jalan Teluk Berukang Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan No. BAST : 03-BAP-KPA-PSDL/Kamp Dumaring/APBD/SDA/VIII/2025	Rp	14.896.000,00	
	Reklas Barjas ke JIJ Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah RT 09 Labanan Makmur Nomor BAST : 02/BAP-PSDL/RT 09 Labanan makmur/APBD/SDA/X/2025	Rp	14.824.000,00	
	Reklas dari Barjas ke ATB Belanja Pengembangan Modul Absensi dan Kinerja No BAST236/BAPP/DISKOMINFO-II/XII/2025 tanggal 15/12/2025	Rp	79.809.000,00	
	Reklas dari Barjas ke ATB Belanja Modal Tak Berwujud Aplikasi eSPPD no BAST 229/BAPP/DISKOMINFO-II/XII/2025 tanggal 15/12/2025	Rp	64.990.500,00	
	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2025	Rp	564.241.353,31	
	Jumlah Mutasi Kurang			Rp 2.302.805.804,31
	Jumlah Saldo Beban Jasa - LO			Rp 401.169.148.424,87
	Beban Pemeliharaan - LRA			Rp 37.765.345.618,00
	Mutasi Tambah :			
a	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa			
	Reklas ke Barjas penyusunan dokumen Renstra BPBD Nomor BA.STP-026/1,05.01,2,01,0001/BPBD-SEKR/2025 tanggal 28/8/2025	Rp	95.646.000,00	
	Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat rumah tangga lainnya/Tempat Sampah sebanyak 6 buah @Rp.287.879 BM : 5.2.02.05.02.0006 No : 445/176A/Kep-1/XI/2025	Rp	1.727.271,00	
	Nilai Di bawah Kapitalisasi Gordyn Nomor : 021/998/SPK/UM/XI/2025 Tanggal 10/12/2025	Rp	24.720.000,00	
	Nilai Bangunan di bawah kapitalisasi Canopy Parkir Kelurahan Sei Bedungun No BAST : BASTP/153.2/KSB-KEU/XI/2025	Rp	10.950.000,00	
	Reklas ke Barjas Konsultan Perencanaan Normalisasi Drainase Gg. Akor, Celebes, Gt. Royong RT. 22 Kel. Tanjung Redeb pada CV. Archantara Consultant sesuai No.SP.K.03/PPK/DPKP/MURNI-PRCN Normalisasi Drainase/2025 Tgl.10/02/2025	Rp	12.560.000,00	
	Reklas ke Barjas Konsultan Perencanaan Normalisasi Parit Jl. H. Machlan tembus Jl. Bahtera Kel. Karang Ambun pada CV. Archantara Consultant sesuai No.SP.K.03/PPK/DPKP/MURNI-PRCN Parit Jl. H. Machlan/2025 Tgl.10/02/2025	Rp	12.560.000,00	
	Reklas ke Barjas Konsultan Perencanaan Normalisasi Drainase Gg. Labour 2 Rt. 8 Kel. Sungai Bedungun pada CV. Archantara Consultant	Rp	12.560.000,00	

(Handwritten signature)



Reklas ke Barjas Pembersihan Lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Talisayan No BAST : 04/BASTHP/PPK/PLTPS-TALISAYAN/Sapras/DLHK/XII/2025			
	Rp	214.015.700,00	
Reklas ke Barjas perencanaan penutupan open Dumping TPA No BAST : 04/BASTP/PPK/Percn. Open Dumping/SAPRAS/DLHK/XI/2025			
	Rp	99.328.350,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp		484.067.321,00
Mutasi Kurang :			
a. Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap			
Reklas ke PM Pendingin Ruangan / AC - Daikin FTC25YV14 - 1 PK sebanyak 1 unit di Bagian PBJ	Rp	5.260.290,00	
Reklas ke PM Belanja Karpet 100 M2 @Rp.732.600 untuk Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Rp	73.260.000,00	
Reklas ke PM Wastafel - Holdyn Bathroom Cabinet Set White (U/3) sebanyak 1 buah di Bagian PBJ	Rp	5.548.890,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp		84.069.180,00
Jumlah Saldo Beban Pemeliharaan - LO	Rp		38.165.343.759,00
Belanja Perjalanan Dinas - LRA	Rp		133.706.507.937,80
Mutasi Tambah :			
a. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2025	Rp	29.130.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp		29.130.000,00
Mutasi Kurang :			
a. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2024	Rp	55.230.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp		55.230.000,00
Jumlah Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO	Rp		133.680.407.937,80
Belanja Barang dan Jasa Lainnya - LRA	Rp		136.463.600.504,10
Mutasi Tambah :			
a. Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2025	Rp	476.536.700,00	
b. Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa			
Nilai Dibawah Kapitalisasi BOSP	Rp	113.710.930,00	
Nilai kapitalisasi belanja modal Alat dapur (Regulator Tabung LPG) sebanyak 6 unit @Rp. 226.400 BM : 5.2.02.99.99.9999 BAST No. 445/1082/BPJ-1/IX/2025	Rp	1.358.400,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp		591.606.030,00
Mutasi Kurang :			
a. Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap			

P



Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Peralatan dan Mesin SDN 002 Long Lanuk (Laptop: 14.000.000 x 1 = 14.000.000)	Rp	14.000.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Peralatan dan Mesin SDN 002 Long Lanuk (Infocus: 8.500.000 x 1 = 8.500.000)	Rp	8.500.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Peralatan dan Mesin SDN 001 Manunggal Jaya (Pagar Besi: 950.000 x 5 = 4.750.000)	Rp	4.750.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Peralatan dan Mesin SDN 009 Tanjung Redeb (Printer L3110: 4.051.000 x 1 = 4.051.000)	Rp	4.051.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Peralatan dan Mesin SMPN 1 Biatan (Adaptor Komputer: 504.000 x 5 = 2.520.000)	Rp	2.520.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Aset Tetap Lainnya TKN Pembina Tanjung Redeb (Pakaian Adat : 420.000 x 20 = 8.400.000)	Rp	8.400.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Aset Tetap Lainnya SMPN 1 Talisayan (Pakai Adat : 660.000 x 6 = 3.960.000)	Rp	3.960.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Aset Tetap Lainnya SMPN 1 Talisayan (Pakai Adat : 550.000 x 6 = 3.300.000)	Rp	3.300.000,00	
Reklas Belanja Barang dan Jasa BOSP ke Aset Tetap Lainnya SMPN 1 Talisayan (Belanja net volley : 244.200 x 5 = 1.221.000)	Rp	1.221.000,00	
Reklas dari Barjas ke PM Boster D 500 (TV Kabel) Kode Barang : 1.3.2.06.0310.999 Harga Rp. 1.900.000 BAST No. 445/88/Keg - TKRS / III/2025	Rp	1.900.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	52.602.000,00	
Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO	Rp	137.002.604.534,10	
TOTAL BEBAN BARANG & JASA - LO		909.802.598.151,67	

5.4.2.1.3 Beban Hibah - LO

Beban Hibah	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>153.051.471.936,36</u>	<u>114.803.338.322,00</u>

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada Tahun 2025. Beban Hibah Tahun 2025 terealisasi senilai Rp153.051.471.936,36 mengalami **kenaikan** senilai Rp38.248.133.614,36 atau 33,32% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp114.803.338.322,00. Dengan rincian sebagai berikut :

(Handwritten signature)



Tabel 5.159 Beban Hibah - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Hibah Dinas Pendidikan	21.738.254.348,00	22.156.883.912,00	(418.629.564,00)	(1,89)
2	Beban Hibah Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	97.352.442.543,00	0,00	97.352.442.543,00	0,00
4	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Hibah Pangan	266.293.200,00	424.332.646,00	(158.039.446,00)	(37,24)
7	Beban Hibah Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.200.969.345,00	650.525.000,00	550.444.345,00	84,62
8	Beban Hibah Dinas Pemberdayaan Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Hibah Dinas Kepemudaan & Olah Raga	2.032.267.097,00	2.457.035.483,00	(424.768.386,00)	(17,29)
11	Beban Hibah Dinas Kebudayaan & Pariwisata	295.477.120,00	1.477.730.760,00	(1.182.253.640,00)	(80,00)
12	Beban Hibah Perpustakaan & Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Hibah Dinas Perikanan	3.515.880.990,00	4.483.930.148,00	(968.049.158,00)	(21,59)
14	Beban Hibah Pertanian & Peternakan	10.908.425.034,36	6.133.885.450,00	4.774.539.584,36	77,84
15	Beban Hibah Perkebunan	1.618.181.500,00	1.695.052.550,00	(76.871.050,00)	(4,54)
16	Beban Hibah Sekretariat Daerah	12.123.232.000,00	20.298.400.000,00	(8.175.168.000,00)	(40,27)
17	Beban Hibah Kec Tg Redeb	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
18	Beban Hibah Kec Gn Tabur	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Hibah Kec Teluk Bayur	0,00	254.177.111,00	(254.177.111,00)	(100,00)
20	Beban Hibah Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Beban Hibah Badan Kesbang, Politik dan Linmas	1.250.048.759,00	53.847.703.462,00	(52.597.654.703,00)	(97,68)
22	Beban Hibah Dinas Sosial	0,00	73.681.800,00	(73.681.800,00)	(100,00)
J u m l a h		153.051.471.936,36	114.803.338.322,00	38.248.133.614,36	33,32

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>10.001.500.000,00</u>	<u>15.174.000.000,00</u>

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 terealisasi senilai Rp10.001.500.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp5.172.500.000,00 atau 34,09%. dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp15.174.000.000,00. Beban Bantuan Sosial

P



digunakan untuk mencatat biaya – biaya yang sudah digunakan untuk Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, serta tunjangan yatim piatu, lansia, kebakaran dan kematian. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 terdapat pada SKPD ; Dinas Sosial senilai Rp8.551.500.000,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1.440.000.000,00, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp10.000.000,00. Tabel Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.160 Beban Bantuan Sosial - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
J u m l a h		10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang	2.454.367.521,74	293.512.532,83

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 terealisasi senilai Rp2.454.367.521,74 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.160.854.988,92 atau 736,21% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang senilai Rp293.512.532,83 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.161 Beban Penyisihan Piutang - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Beban Penyisihan Piutang Pajak		1.728.068.068,41	1.106.091.788,52	621.976.279,89	56,23
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak daerah	Bapenda	1.728.068.068,41	1.106.091.788,52	621.976.279,89	56,23
II	Beban Penyisihan Piutang Retribusi daerah		(545.968.015,51)	172.663.514,22	(718.631.529,72)	(416,20)
1	Beban Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bapenda	234.000,00	426.600,00	(192.600,00)	(45,15)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Koperindag	(584.636.080,07)	172.234.354,22	(756.870.434,29)	(439,44)
		Dispora	71.998.640,00	2.560,00	71.996.080,00	2.812.346,88
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD		(33.564.575,44)	0,00	(33.564.575,44)	0,00
III	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		1.272.267.468,84	(985.242.769,91)	2.257.510.238,75	(229,13)

P



(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD	620.627.646,51	278.180,67	620.349.465,84	223.002,36
2	Beban Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	BPKAD	0,00	44.826.060,00	(44.826.060,00)	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	Bapenda	668.562.355,22	630.325.917,86	38.236.437,36	6,07
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	0,00	130.455.033,02	(130.455.033,02)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Denda retribusi	Koperindag	(16.922.532,89)	(1.791.127.961,46)	1.774.205.428,57	(99,06)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang			2.454.367.521,74	293.512.532,82	2.160.854.988,92	736,21

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 terealisasi senilai Rp1.156.009.173.810,60 mengalami **kenaikan** senilai Rp434.134.303.008,66 atau 60,14% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp721.874.870.801,94. Dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.162 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161.902.007.817,93	121.316.236.137,17	40.585.771.680,76	33,45
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.209.131.081,89	47.121.839.777,78	1.087.291.304,11	2,31
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	930.171.323.438,71	539.663.018.067,47	390.508.305.371,24	72,36
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	409.565.880,46	468.938.909,00	(59.373.028,54)	(12,66)
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	7.329.644.644,00	7.329.644.644,00	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Amortisasi Tak Berwujud	7.987.500.947,61	5.975.193.266,52	2.012.307.681,09	33,68
J u m l a h		1.156.009.173.810,60	721.874.870.801,94	434.134.303.008,66	60,14

5.4.2.1.6.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	<u>161.902.007.817,93</u>	<u>121.316.236.137,17</u>

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2025 terealisasi senilai Rp161.902.007.817,93 mengalami **kenaikan** senilai Rp40.585.771.680,76 atau 33,45% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp121.316.236.137,17 dengan rincian sebagai berikut :

(Handwritten signature)



Tabel 5.163 Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	44.153.589.344,14	36.291.641.621,00	7.861.947.723,14	21,66
2	Dinas Kesehatan	15.325.855.169,73	13.216.273.480,50	2.109.581.689,23	15,96
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	15.923.795.747,34	12.501.110.580,00	3.422.685.167,34	27,38
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.678.035.021,17	4.205.056.791,40	472.978.229,77	11,25
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	363.670.728,78	292.826.194,00	70.844.534,78	24,19
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	603.269.614,41	599.099.695,00	4.169.919,41	0,70
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.173.907.543,69	9.245.049.219,00	928.858.324,69	10,05
8	Dinas Sosial	566.322.911,36	303.006.394,00	263.316.517,36	86,90
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	461.909.054,13	314.059.377,00	147.849.677,13	47,08
10	Dinas Pangan	525.709.164,62	286.862.170,00	238.846.994,62	83,26
11	Dinas Pertanahan	520.237.924,67	452.155.931,00	68.081.993,67	15,06
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.846.568.798,31	4.006.960.110,00	2.839.608.688,31	70,87
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.322.185.708,03	856.744.278,00	465.441.430,03	54,33
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	512.159.017,91	300.274.913,00	211.884.104,91	70,56
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.890.177,57	500.984.182,00	81.905.995,57	16,35
16	Dinas Perhubungan	30.712.675.659,83	16.150.807.851,27	14.561.867.808,56	90,16
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.166.364.338,84	1.922.153.363,00	1.244.210.975,84	64,73
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.109.921.408,96	775.525.905,00	334.395.503,96	43,12
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	558.837.129,84	409.095.443,00	149.741.686,84	36,60
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	698.593.255,81	505.444.587,00	193.148.668,81	38,21
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	855.333.717,76	688.962.870,00	166.370.847,76	24,15
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	862.301.901,82	588.395.097,00	273.906.804,82	46,55
23	Dinas Perikanan	593.514.362,94	491.478.207,00	102.036.155,94	20,76
24	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	878.269.086,02	740.147.553,00	138.121.533,02	18,66
25	Dinas Perkebunan	573.852.129,86	569.612.155,00	4.239.974,86	0,74
26	Sekretariat Daerah	4.783.777.925,11	3.885.263.475,00	898.514.450,11	23,13
27	Inspektorat	1.457.300.536,62	1.174.513.017,00	282.787.519,62	24,08
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.337.240.363,34	1.038.031.340,00	299.209.023,34	28,82
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.532.424.767,26	1.911.389.434,00	621.035.333,26	32,49
30	Badan Pendapatan Daerah	740.555.047,94	554.910.803,00	185.644.244,94	33,45
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	441.249.934,75	341.608.365,00	99.641.569,75	29,17
32	Sekretariat DPRD	3.593.814.030,49	2.871.441.169,00	722.372.861,49	25,16
33	Kecamatan Tanjung Redeb	1.006.203.392,46	810.709.301,00	195.494.091,46	24,11
34	Kecamatan Gunung Tabur	252.767.358,09	183.555.636,00	69.211.722,09	37,71
35	Kecamatan Sambaling	160.057.942,62	119.364.611,00	40.693.331,62	34,09
36	Kecamatan Teluk Bayur	372.008.449,68	245.213.763,00	126.794.686,68	51,71
37	Kecamatan Segah	276.225.159,37	290.206.695	(13.981.535,63)	(4,82)
38	Kecamatan Kelay	267.539.405,29	255.521.856	12.017.549,29	4,70
39	Kecamatan Pulau Derawan	154.799.481,71	95.745.581	59.053.900,71	61,68
40	Kecamatan Talisayan	203.076.649,48	160.625.405	42.451.244,48	26,43
41	Kecamatan Biduk-Biduk	274.941.642,63	195.688.708	79.252.934,63	40,50
42	Kecamatan Maratua	464.972.818,49	337.559.728	127.413.090,49	37,75

P



(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
43	Kecamatan Tabalar	308.361.002,25	215.936.987	92.424.015,25	42,80
44	Kecamatan Batu Putih	357.382.131,11	182.427.615	174.954.516,11	95,90
45	Kecamatan Biatan	198.530.934,41	161.064.733	37.466.201,41	23,26
46	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	149.009.927,29	71.729.948	77.279.979,29	107,74
	Jumlah	161.902.007.817,93	121.316.236.137,17	40.585.771.680,76	33,45

5.4.2.1.6.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	<u>48.209.131.081,89</u>	<u>47.121.839.777,78</u>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp48.209.131.081,89 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.087.291.304,11 atau 2,31% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp47.121.839.777,78 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.164 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	17.362.085.599,40	15.860.480.014,00	1.501.605.585,40	9,47
2	Dinas Kesehatan	7.289.783.628,18	6.232.823.549,00	1.056.960.079,18	16,96
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	1.466.875.960,12	1.476.779.853,00	(9.903.892,88)	(0,67)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.467.514.389,15	15.442.937.329,42	(2.975.422.940,27)	(19,27)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	183.756.714,96	177.865.395,00	5.891.319,96	3,31
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	31.130.860,00	31.130.860,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	621.450.783,06	637.503.632,00	(16.052.848,94)	(2,52)
8	Dinas Sosial	58.629.866,18	64.668.490,00	(6.038.623,82)	(9,34)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.648.180,00	47.015.675,00	10.632.505,00	22,61
10	Dinas Pangan	132.869.395,02	132.770.110,00	99.285,02	0,07
	Dinas Pertanahan	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	923.511.142,18	865.208.786,00	58.302.356,18	6,74
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.205.204,00	22.439.161,00	(21.233.957,00)	(94,63)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	5.956.060,00	3.799.060,00	2.157.000,00	56,78
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.345.203,62	65.310.965,00	8.034.238,62	12,30
15	Dinas Perhubungan	766.110.542,60	674.635.644,00	91.474.898,60	13,56
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.877.500,00	10.877.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	636.181.055,89	540.496.579,00	95.684.476,89	17,70

[Handwritten signature]



(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.413.865,34	1.413.866,00	(0,66)	(0,00)
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	613.561.344,15	575.742.166,00	37.819.178,15	6,57
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.681.501.228,28	714.628.018,36	966.873.209,92	135,30
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.263.617,60	14.494.225,00	2.769.392,60	19,11
22	Dinas Perikanan	277.270.850,18	243.444.269,00	33.826.581,18	13,90
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	239.053.244,87	234.402.100,00	4.651.144,87	1,98
24	Dinas Perkebunan	115.587.224,00	115.961.079,00	(373.855,00)	(0,32)
25	Sekretariat Daerah	777.237.868,60	721.333.510,00	55.904.358,60	7,75
	Inspektorat	207.294.666,01	0,00	207.294.666,01	0,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	8.791.828,60	4.758.190,00	4.033.638,60	84,77
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	532.373.445,86	518.078.570,00	14.294.875,86	2,76
28	Badan Pendapatan Daerah	3647376,00	3.647.380,00	(4,00)	(0,00)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	18.311.028,00	(18.311.028,00)	(100,00)
30	Sekretariat DPRD	743.603.411,42	745.325.272,00	(1.721.860,58)	(0,23)
31	Kecamatan Tanjung Redeb	69.326.305,61	66.007.734,00	3.318.571,61	5,03
32	Kecamatan Gunung Tabur	13.669.400,00	13.834.138,00	(164.738,00)	(1,19)
33	Kecamatan Sambaling	8.484.320,00	8.484.320,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bayur	58.984.460,00	62.776.148,00	(3.791.688,00)	(6,04)
35	Kecamatan Segah	34.557.500,00	70.518.590,00	(35.961.090,00)	(51,00)
36	Kecamatan Kelay	84.159.999,98	84.159.998,00	1,98	0,00
37	Kecamatan Pulau Derawan	50.380.000,00	50.380.000,00	0,00	(0,00)
38	Kecamatan Talisayan	115.018.260,00	115.018.260,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Biduk-Biduk	81.040.000,00	80.627.220,00	412.780,00	0,51
40	Kecamatan Maratua	67.724.603,40	68.601.581,00	(876.977,60)	(1,28)
41	Kecamatan Tabalar	104.106.901,72	100.104.996,00	4.001.905,72	4,00
42	Kecamatan Batu Putih	83.149.680,04	79.969.139,00	3.180.541,04	3,98
43	Kecamatan Biatan	91.810.095,33	91.988.430,00	(178.334,67)	(0,19)
44	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	39.105.000,54	31.086.948,00	8.018.052,54	25,79
	Jumlah	48.209.131.081,89	47.121.839.777,78	1.087.291.304,11	2,31

5.4.2.1.6.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan
Irigasi

Tahun 2025 Tahun 2024
930.171.323.438,71 539.663.018.067,47

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 terealisasi senilai
Rp930.171.323.438,71 mengalami **kenaikan** senilai Rp390.508.305.371,24

(Handwritten signature)



atau 72,36% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp539.663.018.067,47. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.165 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	201.340.063,18	283.444.304,00	(82.104.240,82)	(28,97)
2	Dinas Kesehatan	469.168.214,25	414.667.580,00	54.500.634,25	13,14
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	184.590.197,59	96.823.032,00	87.767.165,59	90,65
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	894.530.084.432,41	520.440.735.594,47	374.089.348.837,94	71,88
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.174.591.587,77	6.201.498.690,00	15.973.092.897,77	257,57
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.124.402,32	132.124.400,00	2,32	0,00
8	Dinas Sosial	14.556.919,32	14.556.920,00	(0,68)	(0,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pangan	1.900.149,96	1.900.150,00	(0,04)	(0,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	178.722.211,20	120.486.779,00	58.235.432,20	48,33
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	1.203.840,00	(1.203.840,00)	(100,00)
13	Dinas Perhubungan	11.270.163.704,72	10.530.887.175,00	739.276.529,72	7,02
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.369.100,08	12.369.100,00	0,08	0,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	60.384.199,92	10.426.206,00	49.957.993,92	479,16
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.284.500,04	4.284.500,00	0,04	0,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	660.375,00	660.375,00	0,00	0,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93.061.123,44	60.704.830,00	32.356.293,44	53,30
19	Dinas Perikanan	154.142.977,51	517.435.977,00	(363.292.999,49)	(70,21)
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	283.106.849,22	321.104.562,00	(37.997.712,78)	(11,83)
21	Dinas Perkebunan	22.160.000,00	25.016.700,00	(2.856.700,00)	(11,42)
22	Sekretariat Daerah	11.717.624,96	12.022.625,00	(305.000,04)	(2,54)
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	272.165.800,00	150.830.700,00	121.335.100,00	80,44
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	491.675,04	491.675,00	0,04	0,00
25	Sekretariat DPRD	36.174.103,32	36.174.104,00	(0,68)	(0,00)
26	Kecamatan Tanjung Redeb	(13.431.155,94)	196.373.865,00	(209.805.020,94)	(106,84)
27	Kecamatan Gunung Tabur	23.603.800,08	23.603.800,00	0,08	0,00
28	Kecamatan Teluk Bayur	49.357.250,04	49.357.250,00	0,04	0,00
29	Kecamatan Kelay	833.333,28	833.334,00	(0,72)	(0,00)
30	Kecamatan Biatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	930.171.323.438,71	539.663.018.067,47	390.508.305.371,24	72,36

5.4.2.1.6.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya – LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	409.565.880,46	468.938.909,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 terealisasi senilai Rp409.565.880,46 mengalami **penurunan** senilai Rp59.373.028,54 atau 12,66% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp468.938.909,00. Dengan rincian sebagai berikut :

[Handwritten signature]



**Tabel 5.166 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	400.415.242,50	460.677.283,00	(60.262.040,50)	(13,08)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.797.657,00	8.157.188,00	(1.359.531,00)	(16,67)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.253.256,00	104.438,00	1.148.818,00	1.100,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.099.724,96	0,00	1.099.724,96	0,00
Jumlah		409.565.880,46	468.938.909,00	(59.373.028,54)	(12,66)

5.4.2.1.6.5 Beban Penyusutan Properti Investasi – LO

Beban Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	7.329.644.644,00	7.329.644.644,00

Beban Penyusutan Properti investasi Tahun 2025 terdapat nilai penyusutan senilai Rp7.329.644.644,00 , tidak mengalami **kenaikan/penurunan** senilai atau 0,00% dibanding Tahun 2024 senilai Rp7.329.644.644,00.

**Tabel 5.167 Beban Penyusutan Properti Investasi - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akun	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	DPUPR	Gedung dan Bangunan	0,00	7.283.204.644,00	(7.283.204.644,00)	(100,00)
2	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	Gedung dan Bangunan	5.724.048.260,00	0,00	5.724.048.260,00	0,00
3	DPPKBP3A	Gedung dan Bangunan	9.209.880,00	0,00	9.209.880,00	0,00
4	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Gedung dan Bangunan	1.549.946.504,00	0,00	1.549.946.504,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00	0,00
Jumlah			7.329.644.644,00	7.329.644.644,00	0,00	0,00

5.4.2.1.6.6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud – LO

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
	7.987.500.947,61	5.975.193.266,53

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 terealisasi senilai Rp7.987.500.947,61 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.012.307.681,09 atau 33,68% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp5.975.193.266,53. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan pada tabel rincian berikut :



Tabel 5.168 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	112.280.000,00	19.465.833,34	92.814.166,67	476,81
2	Dinas Kesehatan	37.766.000,00	37.766.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	393.143.796,67	359.652.246,67	33.491.550,00	9,31
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.753.333,33	13.091.333,33	(2.338.000,00)	(17,86)
5	Dinas Perhubungan	40.170.600,00	39.190.100,00	980.500,00	2,50
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.067.800,00	36.067.800,00	0,00	0,00
7	Dinas Pertanahan	1.313.500,00	0,00	1.313.500,00	0,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.966.111,67	31.216.666,67	24.749.445,00	79,28
9	Badan Pendapatan Daerah	526.124.166,67	441.036.666,66	85.087.500,00	19,29
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135.830.000,00	163.146.666,67	(27.316.666,67)	(16,74)
11	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	18.194.453,33	128.649.193,34	(110.454.740,00)	(85,86)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	26.484.000,00	(26.484.000,00)	(100,00)
13	Kecamatan Biatan	0,00	65.833,33	(65.833,33)	(100,00)
14	Kecamatan Tanjung Redeb	10.166.860,00	10.166.860,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.830.311,92	39.663.405,00	71.166.906,92	179,43
16	Sekretariat DPRD	41.254.022,80	38.944.022,80	2.310.000,00	5,93
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.895.870.319,05	3.276.969.368,29	1.618.900.950,75	49,40
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	83.868.177,40	55.727.450,00	28.140.727,40	50,50
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	59.834.109,80	14.143.675,82	45.690.433,98	323,04
20	Dinas Perikanan	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	0,00
21	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	119601800,00	96.550.916,67	23.050.883,33	23,87
22	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	361.852.682,63	356.861.314,60	4.991.368,03	1,40
23	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	339.595.760,01	270.419.426,67	69.176.333,34	25,58
24	Sekretariat Daerah	76.761.809,00	45.032.486,67	31.729.322,33	70,46
25	RSUD Dr. Rivai	453.373.333,33	450.000.000,00	3.373.333,33	0,75
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	18.000.000,00	42.000.000,00	233,33
Jumlah		7.987.500.947,61	5.975.193.266,53	2.012.307.681,09	33,68

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain - LO

Beban lain-lain	Tahun 2025	Tahun 2024
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

P



Beban Lain-lain Tahun 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp0,00. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.169 Beban Lain - Lain – LO Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Lain - Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	J u m l a h	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.2.2 Beban Transfer - LO

Beban Transfer
Tahun 2025
Tahun 2024

361.916.653.344,00
370.233.794.664,00

Beban Transfer Tahun 2025 terealisasi senilai Rp361.916.653.344,00 mengalami **penurunan** senilai Rp8.317.141.320,00 atau 2,25% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp370.233.794.664,00. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.170 Beban Transfer - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06
2	Beban Bantuan Keuangan	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)
	Jumlah	361.916.653.344,00	370.233.794.664,00	(8.317.141.320,00)	(2,25)

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil - LO

Beban Bagi Hasil
Tahun 2025
Tahun 2024

11.030.633.000,00
11.024.007.000,00

Beban Bagi Hasil Tahun 2025 terealisasi senilai Rp11.030.633.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.626.000,00 atau 0,06% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp11.024.007.000,00. Beban Bagi Hasil disajikan pada rincian tabel berikut :

Tabel 5.171 Beban Bagi Hasil - LO
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Beban Bagi Hasil				
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	9.789.254.000,00	9.538.723.000,00	250.531.000,00	2,63
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.241.379.000,00	1.485.284.000,00	(243.905.000,00)	(16,42)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06

(Handwritten signature)



5.4.2.2 Beban Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp350.886.020.344,00 mengalami **penurunan** senilai Rp8.323.767.320,00 atau 2,32% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp359.209.787.664,00. Rincian Realisasi Beban Bantuan Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 5.172 Beban Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
	Beban Bantuan Keuangan Lainnya	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)
	Jumlah	350.886.020.344,00	359.209.787.664,00	(8.323.767.320,00)	(2,32)

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga – LO

Beban Tak Terduga -LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00

Beban Tidak Terduga - LO Tahun 2025 terealisasi senilai Rp5.861.500.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp86.700.417,00 atau 1,50% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp5.774.799.583,00. Beban Tidak Terduga terdapat pada dinas BPKAD di peruntukan untuk pembayaran ganti rugi Pemerintah Daerah atas putusan Pengadilan Negeri, pembayaran restitusi rumah dinas, bantuan sosial santunan kematian, bantuan sosial bencana alam, dan bantuan tak terduga lainnya.

**Tabel 5.173 Beban Tidak Terduga – LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Tidak Terduga	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
	Jumlah	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50

5.4.2.4 Jumlah Beban Keseluruhan per SKPD - LO

Beban Keseluruhan Per SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
	3.639.754.285.486,73	3.127.403.344.632,32

(Handwritten signature)



Pemerintah Kabupaten Berau

Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Berau pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp3.639.754.285.486,73 mengalami **kenaikan** senilai Rp512.350.940.854,41 atau 16,38% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp3.172.403.344.632,32. Rincian Beban per SKPD Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

**Tabel 5.174 Beban Keseluruhan Per SKPD - LO
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	(%)
1	Dinas Pendidikan	642.648.769.737,22	614.581.629.352,34	28.067.140.384,88	4,57
2	Dinas Kesehatan	509.852.948.710,30	496.736.217.245,12	13.116.731.465,18	2,64
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1.115.268.036.882,63	613.659.186.220,55	501.608.850.662,08	81,74
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	35.651.406.725,18	27.875.016.215,65	7.776.390.509,53	27,90
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.917.191.596,07	26.053.844.138,00	2.863.347.458,07	10,99
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	19.930.486.124,41	21.031.114.545,00	(1.100.628.420,59)	(5,23)
7	Dinas Sosial	24.700.604.920,86	20.220.316.375,00	4.480.288.545,86	22,16
8	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	14.582.915.379,13	14.875.847.729,00	(292.932.349,87)	(1,97)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	17.974.795.366,19	20.611.362.708,00	(2.636.567.341,81)	(12,79)
10	Dinas Pangan	11.988.240.318,04	12.552.664.329,40	(564.424.011,36)	(4,50)
11	Dinas Pertanahan	8.109.989.729,67	7.965.771.926,00	144.217.803,67	1,81
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	55.466.393.158,32	51.129.015.034,60	4.337.378.123,72	8,48
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	13.164.376.052,36	12.183.163.870,33	981.212.182,03	8,05
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	14.425.239.578,91	15.910.207.231,00	(1.484.967.652,09)	(9,33)
15	Dinas Perhubungan	68.756.661.777,15	53.116.100.485,27	15.640.561.291,88	29,45
16	Dinas Komunikasi & Informatika	31.426.798.552,59	25.188.938.218,67	6.237.860.333,92	24,76
17	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	33.420.250.739,22	31.566.474.690,76	1.853.776.048,46	5,87
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.395.010.250,14	13.844.612.911,00	(3.449.602.660,86)	(24,92)
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	29.010.622.126,76	25.970.934.187,38	3.039.687.939,38	11,70
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	28.522.259.225,48	26.762.100.131,01	1.760.159.094,47	6,58
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	14.575.089.167,38	15.739.895.801,00	(1.164.806.633,62)	(7,40)
22	Dinas Perikanan	17.043.943.743,20	19.383.954.335,00	(2.340.010.591,80)	(12,07)
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Peternakan	41.259.790.182,77	34.198.062.360,07	7.061.727.822,70	20,65
24	Dinas Perkebunan	15.407.998.211,86	15.915.025.491,00	(507.027.279,14)	(3,19)
25	Sekretariat Daerah	126.440.296.910,03	130.346.773.879,77	(3.906.476.969,74)	(3,00)
26	Inspektorat	21.843.894.321,63	20.953.529.055,00	890.365.266,63	4,25
27	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	22.744.707.739,29	22.351.938.644,33	392.769.094,96	1,76
28	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	395.985.727.612,19	412.041.447.692,68	(16.055.720.080,49)	(3,90)
29	Badan Pendapatan Daerah	27.755.533.873,53	25.187.071.999,05	2.568.461.874,48	10,20
30	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.592.980.376,57	22.550.096.862,00	(957.116.485,43)	(4,24)

P



(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	(%)
31	Sekretariat DPRD	82.536.106.804,19	82.602.577.918,02	(66.471.113,83)	(0,08)
32	Kec Tanjung Redeb	30.279.661.773,63	30.416.765.452,00	(137.103.678,37)	(0,45)
33	Kec Gunung Tabur	12.931.468.100,17	11.001.382.226,00	1.930.085.874,17	17,54
34	Kec Sambaliung	11.005.210.081,62	11.109.950.935,00	(104.740.853,38)	(0,94)
35	Kec Teluk Bayur	13.733.836.038,72	14.309.122.198,00	(575.286.159,28)	(4,02)
36	Kec Segah	5.808.260.075,37	6.545.077.756,00	(736.817.680,63)	(11,26)
37	Kec Kelay	5.414.495.293,55	6.204.967.496,00	(790.472.202,45)	(12,74)
38	Kec Pulau Derawan	5.132.829.517,71	5.023.124.085,00	109.705.432,71	2,18
39	Kec Talisayan	6.050.929.223,48	6.930.554.727,00	(879.625.503,52)	(12,69)
40	Kec Biduk - Biduk	6.577.313.281,63	6.406.994.333,00	170.318.948,63	2,66
41	Kec Maratua	7.040.969.054,89	7.043.358.782,00	(2.389.727,11)	(0,03)
42	Kec Tabalar	5.825.876.853,97	5.749.754.976,00	76.121.877,97	1,32
43	Kec Batu Putih	6.242.952.796,15	6.091.049.995,00	151.902.801,15	2,49
44	Kec Biatan	4.669.586.815,74	4.861.294.702,00	(191.707.886,26)	(3,94)
45	Badan Kesbang, Politik, dan Linmas	17.641.830.686,83	72.605.055.387,32	(54.963.224.700,49)	(75,70)
Jumlah		3.639.754.285.486,73	3.127.403.344.632,32	512.350.940.854,41	16,38

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 senilai Rp1.348.629.119.534,36 mengalami penurunan senilai Rp1.044.051.018.550,85 atau 43,64% dari Tahun 2024 senilai Rp2.392.680.138.085,21

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus Defisit Non Operasional merupakan Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 adalah Rp31.960.309.524,49, mengalami **kenaikan** senilai Rp6.103.464.743,17 atau 23,60 % dari Tahun 2024 senilai Rp25.856.844.781,32.

5.4.5 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 senilai Rp1.316.668.810.009,87 mengalami **penurunan** senilai Rp1.050.154.483.294,02 atau 44,37% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp2.366.823.293.303,89.

5.4.6 Pos Luar Biasa - LO

Pos Luar Biasa - LO Tahun 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp0,00. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

A



5.4.7 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan *surplus/defisit* dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. *Surplus/Defisit* pada Laporan Operasional Tahun 2025 senilai Rp1.316.668.810.009,87 mengalami **penurunan** senilai Rp1.050.154.483.294,02 atau 44,37% dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp2.366.823.293.303,89.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pendanaan, dan Transitoris. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta setara kas selama Tahun 2025 dan saldo Tahun 2024. Arus kas bersih pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan Tahun 2024 terinci dalam tabel berikut.

**Tabel 5.175 Arus Kas Bersih
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

NO	Arus Kas	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.566.065.884.150,25	3.609.343.542.250,82	(1.043.277.658.100,57)	(28,90)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.966.855.586.452,25)	(3.829.123.671.318,58)	862.268.084.866,33	(22,52)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.491.509.006,80	(13.709.168,00)	2.505.218.174,80	(18.274,04)
	Jumlah Arus Kas Bersih	(398.298.193.295,20)	(219.793.838.235,76)	(178.504.355.059,44)	81,21

Data tabel pada Realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2025 senilai Rp398.298.193.295,20 dan Tahun 2024 senilai Rp219.793.838.235,76. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Arus Kas Bersih mengalami **kenaikan** senilai Rp178.504.355.059,44 atau 81,21%. Realisasi Arus Kas Bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2025 senilai Rp2.566.065.884.150,25 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

P



Tabel 5.176 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Arus Masuk Kas	5.071.428.044.381,18	6.192.351.635.253,41	(1.120.923.590.872,23)	(18,10)
2	Arus Keluar Kas	2.505.362.160.230,93	2.583.008.093.002,59	(77.645.932.771,66)	(3,01)
Jumlah Aktivitas Operasi		2.566.065.884.150,25	3.609.343.542.250,82	(1.043.277.658.100,57)	(28,90)

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp5.071.428.044.381,18 dan Rp6.192.351.635.253,41. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Masuk Kas Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp1.120.923.590.872,23 atau 18,10% yang terdiri dari:

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 senilai Rp144.942.853.267,00 dan Tahun 2024 senilai Rp91.558.760.332,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp53.384.092.935,00 atau 58,31%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.177 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Reklame	338.763.210,00	290.417.433,00	48.345.777,00	16,65
2	Pajak Air Tanah	65.424.000,00	555.240,00	64.868.760,00	11.683,01
3	Pajak Sarang Burung Walet	49.560.758,00	62.532.000,00	(12.971.242,00)	(20,74)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	109.770.200,00	194.609.268,00	(84.839.068,00)	(43,59)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.724.234.995,00	4.361.315.759,00	1.362.919.236,00	31,25
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.549.985.013,00	15.277.432.416,00	2272552597,00	14,88
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	73.050.865.313,00	71.371.898.216,00	1.678.967.097,00	2,35
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.841.643.938,00	0,00	18.841.643.938,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	29.212.605.840,00	0,00	29.212.605.840,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah		144.942.853.267,00	91.558.760.332,00	53.384.092.935,00	58,31

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 senilai Rp110.313.931.998,96 dan Tahun 2024 senilai Rp18.110.450.696,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan

(Handwritten signature)



Retribusi Daerah Tahun 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp92.203.481.302,96 atau 509,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Retribusi Jasa Umum	103.801.843.899,04	12.892.846.872,00	90.908.997.027,04	705,11
2	Retribusi Jasa Usaha	4.715.992.115,00	4.356.814.960,00	359.177.155,00	8,24
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.796.095.984,92	860.788.864,00	935.307.120,92	108,66
	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	110.313.931.998,96	18.110.450.696,00	92.203.481.302,96	509,12

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Saldo Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Tahun 2025 senilai Rp11.397.496.922,15 dan Tahun 2024 senilai Rp17.986.298.143,26. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp6.588.801.221,11 atau 36,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.179 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT BPD Kaltimara	11.369.643.845,15	14.981.036.885,26	(3.611.393.040,11)	(24,11)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT Hutan Sanggam Berau	27.853.077,00	28.658.559,00	(805.482,00)	(2,81)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Indo Pusaka Berau	0,00	1.499.991.300,00	(1.499.991.300,00)	(100,00)
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - Perumda Air Minum Batiwakal	0,00	1.476.611.399,00	(1.476.611.399,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.397.496.922,15	17.986.298.143,26	(6.588.801.221,11)	(36,63)

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Realisasi Penerimaan Lain-lain Yang Sah Tahun 2025 senilai Rp259.152.425.304,07 dan Tahun 2024 senilai Rp214.149.979.161,46. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan

P



Lain-lain Yang Sah Tahun 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp45.002.446.142,61 atau 21,01% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.180 Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	32.102.000,00	(32.102.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro	16.348.756.794,68	9.993.490.434,68	6.355.266.360,00	63,59
4	Pendapatan Bunga	218.517.001.091,75	87.224.951.102,32	131.292.049.989,43	150,52
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.111.997.343,82	18.336.886.530,20	1.775.110.813,62	9,68
6	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	161.779.799,91	2.383.324.421,20	(2.221.544.621,29)	(93,21)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.080.351.647,60	717.916.612,00	362.435.035,60	50,48
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	67.203.389,00	29.598.682,00	37.604.707,00	127,05
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.076.953.169,83	0,00	2.076.953.169,83	0,00
11	Pendapatan BLUD	763.403.934,48	95.399.283.552,06	(94.635.879.617,58)	(99,20)
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	24.978.133,00	32.425.827,00	(7.447.694,00)	(22,97)
	Jumlah Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah	259.152.425.304,07	214.149.979.161,46	45.002.446.142,61	21,01

5.5.1.1.5 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 senilai Rp3.663.934.001.298,00 dan Tahun 2024 senilai Rp4.847.083.601.192,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp1.183.149.599.894,00 atau 21,41% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil	2.966.189.771.800,00	4.053.383.565.000,00	(1.087.193.793.200,00)	(26,82)
2	Penerimaan Dana Alokasi Umum	559.545.218.013,00	588.991.002.328,00	(29.445.784.315,00)	(5,00)
3	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	934.635.000,00	80.364.880.846,00	(79.430.245.846,00)	(98,84)
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	137.264.376.485,00	124.344.153.018,00	12.920.223.467,00	10,39
	Jumlah Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.663.934.001.298,00	4.847.083.601.192,00	(1.183.149.599.894,00)	(24,41)

5.5.1.1.6 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 senilai Rp90.623.229.844,00 dan Tahun 2024 senilai Rp112.337.773.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp21.714.543.156,00 atau 19,33% dengan rincian sebagai berikut :

(Handwritten signature)



**Tabel 5.182 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Dana Desa	83.623.939.844,00	95.468.642.000,00	(11.844.702.156,00)	(12,41)
5	Insentif Fiskal	6.999.290.000,00	16.869.131.000,00	(9.869.841.000,00)	(58,51)
	Jumlah Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	90.623.229.844,00	112.337.773.000,00	(21.714.543.156,00)	(19,33)

5.5.1.1.7 Penerimaan Transfer Antar Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer antar Daerah Tahun 2025 senilai Rp765.004.500.477,00 dan Tahun 2024 senilai Rp815.085.396.308,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp50.080.895.831,00 atau 6,14% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.183 Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	427.404.500.477,00	459.125.396.308,00	(31.720.895.831,00)	(6,91)
2	Penerimaan Bantuan Keuangan	337.600.000.000,00	355.960.000.000,00	(18.360.000.000,00)	(5,16)
	Jumlah Penerimaan Transfer Antar Daerah	765.004.500.477,00	815.085.396.308,00	(50.080.895.831,00)	(6,14)

5.5.1.1.8 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk periode Tahun 2025 senilai Rp26.059.605.270,00 dan Tahun 2024 senilai Rp76.039.376.420,69. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp49.979.771.150,69 atau 65,73%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.184 Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	26.059.605.270,00	76.039.376.420,69	(49.979.771.150,69)	(65,73)
	Jumlah Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	26.059.605.270,00	76.039.376.420,69	(49.979.771.150,69)	(65,73)

(Handwritten signature)



5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 senilai Rp2.505.362.160.230,93 dan Tahun 2024 senilai Rp2.583.008.093.002,59. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Keluar Kas Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp77.645.932.771,66 atau 3,01% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.185 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pembayaran Pegawai	1.036.493.514.973,00	1.038.160.066.708,34	(1.666.551.735,34)	(0,16)
2	Pembayaran Barang dan Jasa	854.413.659.354,62	868.596.837.598,25	(14.183.178.243,63)	(1,63)
3	Pembayaran Belanja Hibah	153.051.392.715,31	189.599.952.449,00	(36.548.559.733,69)	(19,28)
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	10.001.500.000,00	15.174.000.000,00	(5.172.500.000,00)	(34,09)
5	Pembayaran Tak Terduga	5.861.500.000,00	5.774.799.583,00	86.700.417,00	1,50
6	Pembayaran Bagi Hasil	11.030.633.000,00	11.024.007.000,00	6.626.000,00	0,06
7	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	434.509.960.188,00	454.678.429.664,00	(20.168.469.476,00)	(4,44)
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.505.362.160.230,93	2.583.008.093.002,59	(77.645.932.771,66)	(3,01)

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Saldo Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2025 senilai Rp1.036.493.514.973,00 dan Tahun 2024 senilai Rp1.038.160.066.708,34. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp1.666.551.735,34 atau 0,16%.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Saldo Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 senilai Rp854.413.659.354,62 dan Tahun 2024 senilai Rp868.596.837.598,25. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp14.183.178.243,63 atau 1,63%.

5.5.1.2.3 Pembayaran Belanja Hibah

Saldo Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2025 senilai Rp153.051.392.715,31 dan Tahun 2024 senilai Rp189.599.952.449,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp36.548.559.733,69 atau 19,28%.

5.5.1.2.4 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025 senilai Rp10.001.500.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp15.174.000.000,00. Jika

P



dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp5.172.500.000,00 atau 34,09%.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Saldo Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2025 senilai Rp5.861.500.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp5.774.799.583,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp86.700.417,00 atau 1,50%.

5.5.1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil

Saldo Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2025 senilai Rp11.030.633.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp11.024.007.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2025 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.626.000,00 atau 0,06%.

5.5.1.2.7 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp434.509.960.188,00 dan Tahun 2024 senilai Rp454.678.429.664,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2025 mengalami **penurunan** senilai Rp20.168.469.476,00 atau 4,44%.

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2025 defisit senilai Rp2.966.855.586.452,25 dan Tahun 2024 defisit senilai Rp3.829.123.671.318,58. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mengalami **penurunan** senilai Rp862.268.084.866,33 atau 22,52% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.186 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk	171.535.851,00	1.644.537.616,88	(1.473.001.765,88)	(89,57)
2	Arus Kas Keluar	2.967.027.122.303,25	3.830.768.208.935,46	(863.741.086.632,21)	(22,55)
	Jumlah Arus Kas Bersih	(2.966.855.586.452,25)	(3.829.123.671.318,58)	862.268.084.866,33	(22,52)

Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.



5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp171.535.851,00 dan Rp1.644.537.616,88. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Arus Kas Masuk mengalami **penurunan** senilai Rp1.473.001.765,88,00 atau 89,57%.

**Tabel 5.187 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penjualan atas Tanah	171.535.851,00	0,00	171.535.851,00	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	1.431.875.000,00	(1.431.875.000,00)	(100,00)
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	212.662.616,88	(212.662.616,88)	(100,00)
	Jumlah Arus Keluar	171.535.851,00	1.644.537.616,88	(1.473.001.765,88)	(89,57)

5.5.2.1.1 Penjualan atas Tanah

Saldo Realisasi Penjualan atas Tanah Tahun 2025 senilai Rp171.535.851,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan atas Tanah mengalami kenaikan senilai Rp171.535.851,00.

5.5.2.1.2 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Saldo Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp1.431.875.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin mengalami **penurunan** senilai Rp1.431.875.000,00 atau 100,00%.

5.5.2.1.3 Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Saldo Realisasi Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp212.662.616,88. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan Gedung dan Bangunan mengalami **penurunan** senilai Rp212.662.616,88 atau 100,00%.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp2.967.027.122.303,25 dan Rp3.830.768.208.935,46. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi mengalami **penurunan** senilai Rp863.741.086.632,21 atau 22,55%, dengan dirincian sebagai berikut:

**Tabel 5.188 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Perolehan Tanah	6.937.492.376,00	1.352.415.463,00	5.585.076.913,00	412,97
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	252.680.070.744,00	259.968.567.330,29	(7.288.496.586,29)	(2,80)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	336.504.620.292,25	472.685.076.375,72	(136.180.456.083,47)	(28,81)
4	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.354.928.867.530,00	3.081.747.295.756,45	(726.818.428.226,45)	(23,58)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	13.974.090.596,00	8.338.136.101,00	5.635.954.495,00	67,59
6	Perolehan Aset Lainnya	2.001.980.765,00	4.676.717.909,00	(2.674.737.144,00)	(57,19)
7	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Keluar	2.967.027.122.303,25	3.830.768.208.935,46	(863.741.086.632,21)	(22,55)

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Saldo Realisasi Perolehan Tanah Tahun 2025 senilai Rp6.937.492.376,00 dan Tahun 2024 senilai Rp1.352.415.463,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Tanah mengalami **kenaikan** senilai Rp5.585.076.913,00 atau 412,97%.

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Saldo Realisasi Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 senilai Rp252.680.070.744,00 dan Tahun 2024 senilai Rp259.968.567.330,29. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Peralatan dan Mesin mengalami **penurunan** senilai Rp7.288.496.586,29 atau 2,80%.

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Saldo Realisasi Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp336.504.620.292,25 dan Tahun 2024 senilai Rp472.685.076.375,72. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Gedung dan Bangunan mengalami **penurunan** senilai Rp136.180.456.083,47 atau 28,81%.

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Realisasi Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 senilai Rp2.354.928.867.530,00 dan Tahun 2024 senilai Rp3.081.747.295.756,45. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami **penurunan** senilai Rp726.818.428.226,45 atau 23,58%.

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Saldo Realisasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 senilai Rp13.974.090.596,00 dan Tahun 2024 senilai Rp8.338.136.101,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Aset Tetap Lainnya mengalami **kenaikan** senilai Rp5.635.954.495,00 atau 67,59%.

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Saldo Realisasi Perolehan Aset Lainnya Tahun 2025 senilai Rp2.001.980.765,00 dan Tahun 2024 senilai Rp4.676.717.909,00. Jika

P



dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Aset Lainnya mengalami **penurunan** senilai Rp2.674.737.144,00 atau 57,19%.

5.5.2.2.7 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Saldo Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 senilai Rp00,00 dan Tahun 2024 senilai Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah mengalami **penurunan** senilai 2.000.000.000,00 atau 100,00%.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00, sehingga tidak terdapat kenaikan dan penurunan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas transitoris Tahun 2025 senilai Rp2.491.509.006,80 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.189 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Arus Kas Masuk	428.554.293.656,80	491.827.584.194,00	(63.273.290.537,20)	(12,86)
2	Arus Kas Keluar	426.062.784.650,00	491.841.293.362,00	(65.778.508.712,00)	(13,37)
	Arus Kas Bersih	2.491.509.006,80	(13.709.168,00)	2.505.218.174,80	(18.274,04)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 senilai Rp428.554.293.659,80 dan Tahun 2024 senilai Rp491.827.584.194,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami **penurunan** senilai Rp63.273.290.537,20 atau 12,86% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.190 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	428.551.100.157,00	491.827.584.194,00	(63.276.484.037,00)	(12,87)
2	Koreksi Saldo Awal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Saldo Awal BOSNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Saldo Awal JKN	3.193.499,80	0,00	3.193.499,80	0,00
5	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TDF-TKD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk	428.554.293.656,80	491.827.584.194,00	(63.273.290.537,20)	(12,86)

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Kas Masuk Tahun 2025 senilai Rp428.551.100.157,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh BUD yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai serta Saldo Rekening Bank Bendahara pengeluaran SKPD atas transaksi yang belum disalurkan kepada penerima. Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024 senilai Rp491.827.584.194,00, mengalami **penurunan** senilai Rp63.276.484.037,00 atau 12,87% dari Tahun 2024.

5.5.4.1.2 Koreksi Saldo Awal BLUD

Arus Kas Masuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 sementara Tahun 2024 senilai Rp0,00 adalah pembayaran atas Piutang Pegawai BLUD yang merupakan bagian dari SILPA BLUD.

5.5.4.1.3 Koreksi Saldo Awal BOSNAS

Arus kas masuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.5.4.1.4 Koreksi Saldo Awal JKN

Arus Kas Masuk Tahun 2025 senilai Rp3.193.499,80 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp3.193.499,80 yang merupakan Koreksi Saldo Awal JKN.

5.5.4.1.5 Remunerasi

Arus kas masuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.5.4.1.6 TDF-TKD

Arus kas masuk Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 senilai Rp426.062.784.650,00 dan Tahun 2024 senilai Rp491.841.293.362,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas



Transitoris mengalami **penurunan** senilai Rp65.778.508.712,00 atau 13,37%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.191 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	426.062.784.650,00	491.841.293.362,00	(65.778.508.712,00)	(13,37)
2	Koreksi Saldo BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar	426.062.784.650,00	491.841.293.362,00	(65.778.508.712,00)	(13,37)

5.5.5 Kenaikan/ Penurunan Kas

Kas selama Tahun 2025 senilai Rp398.298.193.295,20 dan Tahun 2024 senilai Rp219.793.838.235,76 mengalami **penurunan** kas senilai Rp178.504.355.059,44 atau 81,21%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.192 Kenaikan dan Penurunan Kas
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.566.065.884.150,25	3.609.343.542.250,82	(1.043.277.658.100,57)	(28,90)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.966.855.586.452,25)	(3.829.123.671.318,58)	862.268.084.866,33	(22,52)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.491.509.006,80	(13.709.168,00)	2.505.218.174,80	(18.274,04)
	Kenaikan (Penurunan) Kas	(398.298.193.295,20)	(219.793.838.235,76)	(178.504.355.059,44)	81,21

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp673.454.617.561,28 dan Rp893.248.455.797,04. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Awal Kas mengalami **penurunan** senilai Rp219.793.838.235,76 atau 24,61%.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp275.156.424.266,08 dan Rp673.454.617.561,28. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Akhir Kas mengalami **penurunan** senilai Rp398.298.193.295,20 atau 59,14%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.193 Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	265.205.595.916,35	644.036.295.948,04	(378.830.700.031,69)	(58,82)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	65.628.500,00	(65.628.500,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	33.906.867,00	(33.906.867,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	3.418.169.467,57	24.859.854.694,32	(21.441.685.226,75)	(86,25)



(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
5	Kas Dana BOS	0,00	742.867.460,16	(742.867.460,16)	(100,00)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	404.086.306,76	(404.086.306,76)	(100,00)
7	Kas Lainnya	2.511.889.974,00	3.311.977.785,00	(800.087.811,00)	(24,16)
8	Kas Dana BOSP	1.015.510.076,16	0,00	1.015.510.076,16	0,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	3.005.258.832,00	0,00	3.005.258.832,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	275.156.424.266,08	673.454.617.561,28	(398.298.193.295,20)	(59,14)

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024, dirincikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.194 Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	14.612.014.016.886,86	12.833.337.341.600,50
SURPLUS/DEFISIT - LO	1.316.668.810.009,87	2.366.823.293.303,89
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	(979.350.275.186,23)	(588.146.618.017,53)
Koreksi Ekuitas - Kas	3.193.499,80	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	(1.320.393.707,90)	(212.791.884,97)
Koreksi Ekuitas - TP/TGR	(82.380.150,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00	(208.835.630,00)
Koreksi Ekuitas - Investasi	(12.518.067.346,72)	(18.009.475.955,59)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	3.298.803.978,00	37.760.932.453,03
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(1.186.307.749,05)	(607.476.447.000,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,55	0,00
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(967.545.123.710,91)	0,00
EKUITAS AKHIR	14.949.332.551.710,50	14.612.014.016.886,86

[Handwritten signature]



5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 senilai Rp14.612.014.016.886,86 merupakan saldo Ekuitas akhir Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Audited.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Penambahan Ekuitas Tahun 2025 bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp1.316.668.810.009,87 yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada LPE terdapat koreksi Ekuitas senilai Rp979.350.275.186,23. Hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar.

Tabel 5.195 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)				
NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
1	Dinas Kesehatan			
	Puskesmas Derawan (Koreksi saldo awal Dana FKTP)		0,20	(0,20)
	Puskesmas Tubaan (Koreksi saldo awal dana BOK biaya admin yang diakui sebagai belanja bulan desember = 6.500		6.500,00	(6.500,20)
	Puskesmas Tepian Buah/Segah			
	belanja yang batal 3.200.000 (dikembalikan di bulan januari 2025)	3.200.000,00		3.193.499,80
2	Badan Pendapatan Daerah;			
	Pajak Reklame	45.039,00		3.238.538,80
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	696.474.078,00		699.712.616,80
	Koreksi Aset Rusak Berat:			
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	No. SK 030/1049/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		153.215.249,00	546.497.367,80
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(153.215.249,00)	699.712.616,80
4	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI			

P



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
	Penghapusan Aset Lainnya PM No. SK 030/1053/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		36.355.000,00	663.357.616,80
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(36.355.000,00)	699.712.616,80
5	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	Penghapusan Aset Lainnya RB No. SK 030/1050/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		87.492.500,00	612.220.116,80
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(87.492.500,00)	699.712.616,80
6	KEC GUNUNG TABUR			
	Penghapusan Aset Lainnya RB No. SK 030/1052/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		85.943.500,00	613.769.116,80
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(85.943.500,00)	699.712.616,80
7	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	Penghapusan Aset Lainnya No. SK 030/1048/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		117.752.500,00	581.960.116,80
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(117.752.500,00)	699.712.616,80
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	Penghapusan Aset Lainnya Rusak Berat No. SK 030/1051/BPKAD-E/2025, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah, Peralatan Mesin Kondisi Rusak Berat		705.549.000,00	(5.836.383,20)
	Penghapusan ak. Penyusutan Barang yang dihapuskan		(705.549.000,00)	699.712.616,80
9	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN			
	Pencatatan tanah hasil inventarisasi Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Kios 4x6 Jl. AKB Sanipah 1 luas 5.100 M2 Perolehan Tahun 1975 Nilai berdasarkan NJOP	1.453.500.000,00		2.153.212.616,80
	Pencatatan tanah hasil inventarisasi Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Kios 4x6 Jl. AKB Sanipah 1 luas 4.500 M2 Perolehan Tahun 1975 Nilai berdasarkan NJOP	1.282.500.000,00		3.435.712.616,80
	Pencatatan tanah hasil inventarisasi Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Kios 4x6 Jl. AKB Sanipah 1 luas 1.625 M2 Perolehan Tahun 1975 Nilai berdasarkan NJOP	463.125.000,00		3.898.837.616,80
10	Dinas Perikanan			
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU RABU-RABU A SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah :	1,00		3.898.837.617,80

P



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
	267000 M2 M2			
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU KAKABAN, SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 11320000 M2	1,00		3.898.837.618,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU SANGALAKI SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 149580 M2	1,00		3.898.837.619,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU BLAMBANGAN SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 94271 M2	1,00		3.898.837.620,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU MATAHA, SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 182170 M2	1,00		3.898.837.621,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU BILANG-BILANGAN SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 289570 M2	1,00		3.898.837.622,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU PULAU PANJANG SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 5588000 M2	1,00		3.898.837.623,80
	Pencatatan Tanah berdasarkan SK BUPATI NOMOR 470 TAHUN 2024 TTG PENETAPAN STATUS PULAU PULAU SEMAMA SEBAGAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BERAU Luas Tanah : 974860 M2	1,00		3.898.837.624,80
	Dinas			
11	Koreksi Atas TPTGR (Hasil Reviu Inspektorat)		15.000.000,00	3.883.837.624,80
	Dinas			
12	Koreksi Atas TPTGR (Hasil Reviu Inspektorat)		67.380.150,00	3.816.457.474,80
13	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan			
	PIUTANG Retribusi LOS		676.686.984,00	3.139.770.490,80
	PIUTANG KIOS		565.310.898,00	2.574.459.592,80
14	Dinas Kesehatan (RSUD Dr. Rivai)			
	Koreksi Piutang RSU		404.126.658,82	2.170.332.933,98
15	Badan Pendapatan Daerah			
	Piutang denda Pajak		213.193.305,84	1.957.139.628,14
16	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah			

P



(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
	Koreksi Saldo Awal Ekuitas Perumda		4.514.021.383,62	(2.556.881.755,48)
			7.412.726.480,00	(9.969.608.235,48)
			591.319.483,10	(10.560.927.718,58)
17	Koreksi Akumulasi Penyusutan		968.731.431.459,91	(979.292.359.178,49)
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
18	Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan JJI (Tahun 2024)		0,02	(979.292.359.178,51)
19	Koreksi Saldo Awal Ak. Amortisasi			
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		0,01	(979.292.359.178,52)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,33		(979.292.359.178,19)
	Kecamatan Biatan		0,01	(979.292.359.178,20)
	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan		0,34	(979.292.359.178,54)
	Sekretariat Daerah		0,01	(979.292.359.178,55)
	Dinas Kesehatan		0,01	(979.292.359.178,56)
20	Koreksi atas nilai sp2d atas utang aset KDP			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,55		(979.292.359.178,01)
21	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,02		(979.292.359.177,99)
22	Koreksi Akumulasi Penyusutan ATL			
	RSU (Dinas Kesehatan)		10.890.000,00	(979.303.249.177,99)
	Sekretariat Daerah	99.818.970,00		(979.203.430.207,99)
	Kec Tg Redeb		1.750.000,00	(979.205.180.207,99)
23	Koreksi Piutang RSU & Penyisihan Piutang RSU (sesuai Data laporan Audited RSU BLUD)			
	RSU (Dinas Kesehatan)		157.594.977,00	(979.362.775.184,99)
24	Koreksi Piutang Lainnya:		1,24	(979.362.775.186,23)
25	Tanah baru dicatat/bukukan berdasarkan NJOP			
	Dinas Pendidikan	12.500.000,00		(979.350.275.186,23)

(Handwritten signature)



5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2025 senilai Rp14.949.332.551.710,50 yang terdiri dari Ekuitas awal senilai Rp14.612.014.016.886,86 ditambah *Surplus/Defisit LO* senilai Rp1.316.668.810.009,87 dan dikurangi koreksi Ekuitas senilai Rp979.350.275.186,23.

P



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili

Kabupaten Berau secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Utara Pulau Kalimantan, antar Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Berau terletak pada posisi antara 1160 sampai dengan 1190 bujur timur dan 10 sampai dengan 20 33' lintang utara.

Kabupaten Berau di bentuk berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); dan
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Berau.

Luas wilayah Kabupaten Berau 34.127,47 Km², terdiri dari luas laut 11.962,42 Km² dan luas daratan 21.951,71 Km². Sedangkan secara administratif, Kabupaten Berau mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan
- b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Timur
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau

6.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Berau;
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025;
- c. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025; dan
- e. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025.



6.3. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2025, ditunjang dengan susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD

b. Badan

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
- 3) Badan Pendapatan Daerah
- 4) Badan Kesbang, Politik dan Linmas
- 5) Badan Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) RSUD Dr. A. Rivai
- 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 9) Inspektorat

c. Dinas

- 1) Dinas Perhubungan
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 5) Dinas Pangan
- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 8) Dinas Pertanahan
- 9) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- 10) Dinas Perkebunan
- 11) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 13) Dinas Pendidikan
- 14) Dinas Perikanan
- 15) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 18) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 19) Dinas Sosial
- 20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 21) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 22) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Kantor
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Perangkat Daerah lainnya
 - 1) Kecamatan Tanjung Redeb
 - 2) Kecamatan Tabalar
 - 3) Kecamatan Talisayan
 - 4) Kecamatan Teluk Bayur
 - 5) Kecamatan Batu Putih
 - 6) Kecamatan Biatan
 - 7) Kecamatan Biduk-Biduk
 - 8) Kecamatan Gunung Tabur
 - 9) Kecamatan Kelay
 - 10) Kecamatan Maratua
 - 11) Kecamatan Pulau Derawan
 - 12) Kecamatan Sambaliung
 - 13) Kecamatan Segah

P



BAB VII

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun periode pelaporan, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peran antara lain akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. LKPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Berau selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi Laporan Keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna meskipun upaya telah kami lakukan.

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Berau mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Kabupaten Berau di masa yang akan datang.

P



Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat atas segala upaya yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Berau yang lebih baik.



A

**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**



**DAFTAR LAMPIRAN LKPD
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**



LAMPIRAN 1

Penyaluran Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025

REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025											
NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	REALISASI 1_REG	REALISASI 2_REG	REALISASI 1_EARMARK	REALISASI 2_EARMARK	TOTALPENYALURAN	%	TIDAK SALUR
1	Ampen Medang	Batu Putih	BERKEMBANG	781.508.000,00	68.013.600,00	102.020.400,00	366.884.400,00	244.589.600,00	781.508.000,00	100,00	-
2	Balikukup	Batu Putih	BERKEMBANG	716.132.000,00	171.529.600,00	-	172.384.800,00	114.923.200,00	458.837.600,00	64,07	257.294.400,00
3	Batu Putih	Batu Putih	MANDIRI	1.058.936.000,00	292.481.400,00	-	342.880.200,00	228.586.800,00	863.948.400,00	81,59	194.987.600,00
4	Batu Rajang	Segah	BERKEMBANG	745.296.000,00	172.278.400,00	-	188.760.000,00	125.840.000,00	486.878.400,00	65,33	258.417.600,00
5	Batu-Batu	Gunung Tabur	BERKEMBANG	947.978.000,00	152.480.000,00	228.720.000,00	340.066.800,00	226.711.200,00	947.978.000,00	100,00	-
6	Bena Baru	Sambaliung	MAJU	890.303.000,00	246.016.800,00	369.025.200,00	165.156.600,00	110.104.400,00	890.303.000,00	100,00	-
7	Biatan Bapinang	Biatan	BERKEMBANG	822.776.000,00	131.162.000,00	-	296.922.600,00	197.948.400,00	626.033.000,00	76,09	196.743.000,00
8	Biatan Baru	Biatan	BERKEMBANG	676.388.000,00	27.756.400,00	-	364.198.200,00	242.798.800,00	634.753.400,00	93,84	41.634.600,00
9	Biatan Ilir	Biatan	MAJU	759.332.000,00	211.115.840,00	-	138.925.440,00	92.616.960,00	442.658.240,00	58,30	316.673.760,00
10	Biatan Lempake	Biatan	MAJU	975.665.000,00	95.600.860,00	-	441.997.710,00	-	537.598.570,00	55,10	438.066.430,00
11	Biatan Ulu	Biatan	BERKEMBANG	1.263.932.000,00	356.436.800,00	534.655.200,00	223.704.000,00	149.136.000,00	1.263.932.000,00	100,00	-
12	Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	MANDIRI	944.652.000,00	139.602.600,00	-	427.188.600,00	284.792.400,00	851.583.600,00	90,15	93.068.400,00
13	Birang	Gunung Tabur	BERKEMBANG	1.109.255.000,00	249.259.200,00	373.888.800,00	291.664.200,00	194.442.800,00	1.109.255.000,00	100,00	-
14	Bohe Silian	Maratua	BERKEMBANG	693.194.000,00	142.877.600,00	214.316.400,00	201.600.000,00	134.400.000,00	693.194.000,00	100,00	-
15	Bukit Makmur	Segah	MAJU	815.097.000,00	200.400.000,00	300.600.000,00	188.458.200,00	125.638.800,00	815.097.000,00	100,00	-
16	Bukit Makmur Jaya	Biatan	BERKEMBANG	683.516.000,00	163.638.400,00	245.457.600,00	164.652.000,00	109.768.000,00	683.516.000,00	100,00	-
17	Bumi Jaya	Talisayan	MAJU	806.607.000,00	76.802.320,00	-	368.760.720,00	245.840.480,00	691.403.520,00	85,72	115.203.480,00
18	Buyung-Buyung	Tabalar	MAJU	1.008.543.000,00	157.810.000,00	-	368.410.800,00	245.607.200,00	771.828.000,00	76,53	236.715.000,00
19	Campur Sari	Talisayan	MAJU	698.003.000,00	104.881.200,00	-	261.480.000,00	174.320.000,00	540.681.200,00	77,46	157.321.800,00
20	Capuak	Talisayan	MAJU	849.456.000,00	178.579.600,00	-	241.804.200,00	161.202.800,00	581.586.600,00	68,47	267.869.400,00
21	Dumaring	Talisayan	MAJU	1.268.208.000,00	167.870.000,00	251.805.000,00	509.119.800,00	339.413.200,00	1.268.208.000,00	100,00	-
22	Eka Sapta	Talisayan	MANDIRI	979.343.000,00	354.338.400,00	-	233.267.400,00	155.511.600,00	743.117.400,00	75,88	236.225.600,00
23	Giring-Giring	Biduk-Biduk	MAJU	781.358.000,00	139.371.600,00	209.057.400,00	259.757.400,00	173.171.600,00	781.358.000,00	100,00	-
24	Gunung Sari	Segah	MAJU	2.314.108.000,00	709.383.200,00	-	324.390.000,00	216.260.000,00	1.250.033.200,00	54,02	1.064.074.800,00
25	Gurimbang	Sambaliung	MANDIRI	877.800.000,00	304.320.000,00	-	222.360.000,00	148.240.000,00	674.920.000,00	76,89	202.880.000,00
26	Harapan Jaya	Segah	MAJU	1.150.296.000,00	146.952.000,00	-	469.749.600,00	313.166.400,00	929.868.000,00	80,84	220.428.000,00
27	Harapan Maju	Tabalar	MAJU	989.390.000,00	135.600.000,00	-	390.234.000,00	260.156.000,00	785.990.000,00	79,44	203.400.000,00
28	Inaran	Sambaliung	MAJU	1.069.151.000,00	301.958.320,00	452.937.480,00	188.553.120,00	125.702.080,00	1.069.151.000,00	100,00	-
29	Karangan	Biatan	BERKEMBANG	732.143.000,00	10.854.000,00	-	423.004.800,00	282.003.200,00	715.862.000,00	97,78	16.281.000,00
30	Kasai	Pulau Derawan	MAJU	1.058.297.000,00	187.145.716,00	-	354.259.626,00	236.173.084,00	777.578.426,00	73,47	280.718.574,00
31	Kayu Indah	Batu Putih	MAJU	684.494.000,00	137.377.340,00	-	204.630.390,00	136.420.260,00	478.427.990,00	69,90	206.066.010,00
32	Labanan Jaya	Teluk Bayur	MANDIRI	935.030.000,00	274.588.800,00	-	286.429.200,00	190.952.800,00	751.970.800,00	80,42	183.059.200,00
33	Labanan Makarti	Teluk Bayur	MANDIRI	1.087.035.000,00	280.837.080,00	187.224.720,00	371.383.920,00	247.589.280,00	1.087.035.000,00	100,00	-
34	Labanan Makmur	Teluk Bayur	MANDIRI	1.260.992.000,00	465.048.600,00	310.032.400,00	291.546.600,00	194.364.400,00	1.260.992.000,00	100,00	-
35	Lesan Dayak	Kelay	BERKEMBANG	753.876.000,00	59.638.800,00	-	362.867.400,00	241.911.600,00	664.417.800,00	88,13	89.458.200,00
36	Lobang Kelatak	Batu Putih	BERKEMBANG	654.603.000,00	7.877.236,00	-	380.945.946,00	253.963.964,00	642.787.146,00	98,19	11.815.854,00
37	Long Ayan	Segah	BERKEMBANG	1.414.616.000,00	408.556.800,00	-	235.934.400,00	157.289.600,00	801.780.800,00	56,68	612.835.200,00
38	Long Ayap	Segah	BERKEMBANG	1.105.947.000,00	296.437.484,00	-	218.911.974,00	145.941.316,00	661.290.774,00	59,79	444.656.226,00
39	Long Bellu	Kelay	MAJU	1.527.854.000,00	101.024.000,00	-	765.176.400,00	510.117.600,00	1.376.318.000,00	90,08	151.536.000,00
40	Long Duhung	Kelay	BERKEMBANG	805.134.000,00	194.453.600,00	-	191.400.000,00	127.600.000,00	513.453.600,00	63,77	291.680.400,00
41	Long Keluh	Kelay	BERKEMBANG	905.382.000,00	214.687.600,00	-	221.197.800,00	147.465.200,00	583.350.600,00	64,43	322.031.400,00
42	Long La'ai	Segah	BERKEMBANG	1.787.117.000,00	305.725.404,00	-	613.682.094,00	409.121.396,00	1.328.528.894,00	74,34	458.588.106,00
43	Long Lamcin	Kelay	BERKEMBANG	1.366.470.000,00	16.397.640,00	-	795.285.540,00	530.190.360,00	1.341.873.540,00	98,20	24.596.460,00
44	Long Lanuk	Sambaliung	MAJU	1.079.231.000,00	274.172.400,00	411.258.600,00	157.520.000,00	107.231.000,00	1.079.231.000,00	100,00	-
45	Long Pelay	Kelay	BERKEMBANG	1.086.267.000,00	13.000.000,00	-	632.260.200,00	421.506.800,00	1.066.767.000,00	98,20	19.500.000,00
46	Long Sului	Kelay	BERKEMBANG	1.785.951.000,00	93.854.800,00	-	930.788.400,00	620.525.600,00	1.645.168.800,00	92,12	140.782.200,00
47	Maluang	Gunung Tabur	MANDIRI	1.572.901.000,00	358.585.200,00	239.056.800,00	585.155.400,00	390.103.600,00	1.572.901.000,00	100,00	-
48	Manunggal Jaya	Biatan	BERKEMBANG	715.310.000,00	177.989.000,00	-	162.202.500,00	108.135.000,00	448.326.500,00	62,68	266.983.500,00
49	Mapulu	Kelay	BERKEMBANG	791.044.000,00	184.270.048,00	-	198.221.328,00	132.147.552,00	514.638.928,00	65,06	276.405.072,00
50	Melati Jaya	Gunung Tabur	MAJU	936.021.000,00	51.400.000,00	-	484.512.600,00	323.008.400,00	858.921.000,00	91,76	77.100.000,00
51	Merabu	Kelay	MAJU	844.257.000,00	170.004.240,00	-	251.547.840,00	167.698.560,00	589.250.640,00	69,80	255.006.360,00
52	Merancang Ilir	Gunung Tabur	BERKEMBANG	865.893.000,00	196.469.200,00	-	224.832.000,00	149.888.000,00	571.189.200,00	65,97	294.703.800,00
53	Merancang Ulu	Gunung Tabur	MANDIRI	1.056.864.000,00	234.772.000,00	-	399.334.200,00	266.230.800,00	900.349.200,00	85,19	156.514.800,00
54	Merapun	Kelay	MAJU	1.477.137.000,00	394.427.840,00	-	294.640.440,00	196.426.960,00	885.495.240,00	59,95	591.641.760,00
55	Merasa	Kelay	MAJU	939.473.000,00	268.351.360,00	-	161.156.760,00	107.437.840,00	536.945.960,00	57,15	402.527.040,00
56	Muara Lesan	Kelay	MAJU	1.045.433.000,00	178.423.920,00	267.635.880,00	359.623.920,00	239.749.280,00	1.045.433.000,00	100,00	-
57	Panaan	Kelay	BERKEMBANG	1.195.098.000,00	14.341.176,00	-	695.547.036,00	463.698.024,00	1.173.586.236,00	98,20	21.511.764,00
58	Pandan Sari	Segah	BERKEMBANG	767.318.000,00	114.090.400,00	-	289.255.200,00	192.836.800,00	596.182.400,00	77,70	171.135.600,00
59	Pantai Harapan	Biduk-Biduk	MAJU	927.392.000,00	156.656.800,00	-	321.450.000,00	214.300.000,00	692.406.800,00	74,66	234.985.200,00
60	Payung-Payung	Maratua	BERKEMBANG	688.286.000,00	200.354.400,00	300.531.600,00	112.440.000,00	74.960.000,00	688.286.000,00	100,00	-
61	Pegat Batumbuk	Pulau Derawan	BERKEMBANG	1.099.457.000,00	257.450.000,00	-	273.499.200,00	182.332.800,00	713.282.000,00	64,88	386.175.000,00
62	Pegat Bukur	Sambaliung	MANDIRI	1.136.169.000,00	405.813.120,00	270.542.080,00	275.888.280,00	183.925.520,00	1.136.169.000,00	100,00	-
63	Pesayan	Sambaliung	MAJU	906.609.000,00	224.674.880,00	337.012.320,00	206.953.080,00	137.968.720,00	906.609.000,00	100,00	-
64	Pilanjau	Sambaliung	MAJU	1.044.711.000,00	129.042.280,00	-	433.263.180,00	288.842.120,00	851.147.580,00	81,47	193.563.420,00
65	Pulau Besing	Gunung Tabur	BERKEMBANG	607.635.000,00	92.634.800,00	-	225.628.800,00	150.419.200,00	468.682.800,00	77,13	138.952.200,00
66	Pulau Derawan	Pulau Derawan	MANDIRI	1.050.759.000,00	312.275.400,00	-	318.180.000,00	212.120.000,00	842.575.400,00	80,19	208.183.600,00
67	Punan Mahkam	Segah	BERKEMBANG	1.215.336.000,00	351.122.400,00	-	202.518.000,00	135.012.000,00	688.652.400,00	56,66	526.683.600,00
68	Punan Malinau	Segah	MAJU	1.018.271.000,00	214.551.200,00	321.826.800,00	289.135.800,00	192.757.200,00	1.018.271.000,00	100,00	-
69	Punan Segah	Segah	BERKEMBANG	983.871.000,00	235.335.120,00	-	237.319.920,00	158.213.280,00	630.868.320,00	64,12	353.002.680,00
70	Purna Sari Jaya	Talisayan	BERKEMBANG	691.793.000,00	88.223.200,00	132.334.800,00	282.741.000,00	188.494.000,00	691.793.000,00	100,00	-
71	Rantau Panjang	Sambaliung	MAJU	884.078.000,00	222.284.960,00	333.427.440,00	197.019.360,00	131.346.240,00	884.078.000,00	100,00	-
72	Sambakungan	Gunung Tabur	MAJU	986.955.000,00	257.060.000,00	-	206.583.000,00	137.722.000,00	601.365.000,00	60,93	385.590.000,00
73	Samburakat	Gunung Tabur	BERKEMBANG	843.252.000,00	209.199.200,00	-	192.152.400,00	128.101.600,00	529.453.200,00	62,79	313.798.800,00
74	Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	MANDIRI	1.206.443.000,00	302.611.800,0						



LAMPIRAN 2

Rekapitulasi Bankeu Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahun 2025

Lampiran 2

7



LAMPIRAN 3

Rekapitulasi Bankeu ADK, PKK, LPMK, KTK, RTK

REKAPITULASI SP2D BANKEU ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
PERIODE TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 3

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH
1	64.03/04.0/000016/2025	17/02/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN BPJS KESEHATAN KAMPUNG	BPJS KESEHATAN TAHAP 1	146.440.632
2	64.03/04.0/000065/2025	12/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PEGAT BUKUR	1.342.328.528
3	64.03/04.0/000066/2025	12/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	RANTAU PANJANG	1.112.050.696
4	64.03/04.0/000067/2025	12/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	INARAN	1.128.641.012
5	64.03/04.0/000069/2025	12/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BANGUN	1.790.837.980
6	64.03/04.0/000070/2025	17/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LABANAN MAKARTI	1.447.061.896
7	64.03/04.0/000077/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MUARA LESAN	1.071.978.232
8	64.03/04.0/000078/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIATAN LEMPAKE	1.436.448.928
9	64.03/04.0/000080/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TUBAAN	1.369.333.728
10	64.03/04.0/000081/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TABALAR ULU	1.107.183.496
11	64.03/04.0/000083/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BENA BARU	1.162.715.180
12	64.03/04.0/000084/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TANIUNG PERANGAT	1.155.973.812
13	64.03/04.0/000085/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SUARAN	1.734.153.728
14	64.03/04.0/000086/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	GURIMBANG	1.311.138.612
15	64.03/04.0/000087/2025	19/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SEMURUT	1.280.488.212
16	64.03/04.0/000091/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	KASAI	1.854.666.296
17	64.03/04.0/000092/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BATU PUTIH	1.589.499.096
18	64.03/04.0/000093/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TUNGGAH BUMI	1.125.023.496
19	64.03/04.0/000094/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PURNASARI JAYA	1.160.923.664
20	64.03/04.0/000095/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	CAMPUR SARI	1.259.307.980
21	64.03/04.0/000096/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SIDO BANGEN	1.062.723.012
22	64.03/04.0/000097/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TABALAR MUARA	1.101.905.812
23	64.03/04.0/000098/2025	20/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	GIRING2	1.269.865.812
24	64.03/04.0/000100/2025	21/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TANIUNG BATU	2.462.633.812
25	64.03/04.0/000101/2025	24/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BUMI JAYA	1.309.612.212
26	64.03/04.0/000102/2025	24/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MELATI JAYA	1.416.551.328
27	64.03/04.0/000105/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TUMBIT DAYAK	1.547.963.412
28	64.03/04.0/000106/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PULAU BESING	1.003.508.696
29	64.03/04.0/000107/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BUKIT MAKMUR JAYA	1.082.064.612
30	64.03/04.0/000108/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BATU BATU	1.169.788.212
31	64.03/04.0/000109/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TASUK	1.547.895.412
32	64.03/04.0/000110/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LONG AYAT	1.068.286.864
33	64.03/04.0/000111/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MALUANG	1.859.405.412
34	64.03/04.0/000112/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIRANG	1.300.403.012
35	64.03/04.0/000113/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SAMBUKANGAN	1.450.360.128
36	64.03/04.0/000114/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MERANCANG ILIR	1.253.500.380
37	64.03/04.0/000115/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TUMBIT MELAYU	1.546.979.812
38	64.03/04.0/000116/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MANUNGAL JAYA	1.191.427.896
39	64.03/04.0/000117/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TEMBUDAN	1.555.082.528
40	64.03/04.0/000118/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PUNAN SEGAH	1.009.467.748
41	64.03/04.0/000119/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TANIUNG PEREPAT	1.157.011.412
42	64.03/04.0/000120/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SUKAN TENGAH	1.602.136.296
43	64.03/04.0/000121/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LONG LANUK	1.253.516.296
44	64.03/04.0/000122/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PULAU DERAWAN	1.231.931.896
45	64.03/04.0/000123/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PANAAN	1.043.328.464
46	64.03/04.0/000124/2025	25/03/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MERAPUN	1.414.132.696
47	64.03/04.0/000157/2025	17/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	DUMARING	1.281.139.496
48	64.03/04.0/000168/2025	21/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TEPIAN BUAH	1.242.532.148
49	64.03/04.0/000169/2025	21/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PILANAU	1.358.097.012
50	64.03/04.0/000170/2025	21/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TALISAYAN	1.732.985.180
51	64.03/04.0/000172/2025	22/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SUMBER AGUNG	1.256.662.296
52	64.03/04.0/000173/2025	22/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BATU RAJANG	1.043.763.664
53	64.03/04.0/000174/2025	22/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	AMPEN MEDANG	1.113.391.496
54	64.03/04.0/000199/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PESAYAN	1.293.296.780
55	64.03/04.0/000200/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIODUK	1.378.971.728
56	64.03/04.0/000201/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MERANCANG ULU	1.328.521.328
57	64.03/04.0/000208/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MERASA	1.217.855.496
58	64.03/04.0/000209/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LESAN DAYAK	1.022.238.064
59	64.03/04.0/000230/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIATAN ULU	1.170.611.012
60	64.03/04.0/000231/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PANDAN SARI	1.228.083.096
61	64.03/04.0/000232/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LABANAN MAKMUR	1.624.578.780
62	64.03/04.0/000233/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	EKA SAPTA	1.139.857.096
63	64.03/04.0/000234/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	CAPUAK	1.271.945.496
64	64.03/04.0/000316/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	KAYU INDAH	1.088.693.096
65	64.03/04.0/000317/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SUKA MURYA	1.252.626.296
66	64.03/04.0/000318/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BALIKKUP	1.228.716.212
67	64.03/04.0/000328/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BUKIT MAKMUR	1.255.047.812
68	64.03/04.0/000346/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MERABU	1.050.296.464
69	64.03/04.0/000347/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LOBANG KELATAS	1.038.373.896
70	64.03/04.0/000348/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TELUK SUMBANG	1.195.575.896
71	64.03/04.0/000349/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TELUK ALULU	1.311.525.412
72	64.03/04.0/000350/2025	14/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SUMBER MULYA	1.134.220.696
73	64.03/04.0/000373/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TELUK SULAIMAN	1.349.218.212
74	64.03/04.0/000374/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PUNAN MALINAU	1.139.993.580
75	64.03/04.0/000375/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PAYUNG2	1.117.411.580
76	64.03/04.0/000376/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BOHE SILIAN	1.122.699.896
77	64.03/04.0/000412/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	HARAPAN JAYA	1.401.504.696
78	64.03/04.0/000413/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PANTAI HARAPAN	1.143.160.696
79	64.03/04.0/000416/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	HARAPAN MAJU	1.204.371.896
80	64.03/04.0/000417/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TELUK HARAPAN	1.230.563.412
81	64.03/04.0/000418/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	PEGAT BATUMBUK	1.213.762.212
82	64.03/04.0/000419/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BUYUNG-BUYUNG	1.445.437.328
83	64.03/04.0/000420/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	MAPULU	979.942.064
84	64.03/04.0/000430/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	SAMBURAKAT	1.219.052.780
85	64.03/04.0/000431/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIATAN ILIR	1.247.466.212
86	64.03/04.0/000452/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	KARANGAN	1.130.473.496
87	64.03/04.0/000546/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LONG DUHUNG	994.641.580
88	64.03/04.0/000547/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	BIATAN BAPINANG	1.121.186.212
89	64.03/04.0/000548/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	LABANAN JAYA	1.491.219.812
90	64.03/04.0/000559/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 1	TELUK SEMANTING	1.177.098.464
91	64.03/04.0/000562/2025	12/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada			

REKAPITULASI SP2D BANKEU ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

PERIODE TAHUN II
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 3

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH
1	64.03/04.0/000549/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PEGAT BUKUR	2.014.472.328
2	64.03/04.0/000550/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MALUANG	2.789.965.212
3	64.03/04.0/000556/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BATU-BATU	1.755.539.412
4	64.03/04.0/000563/2025	12/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIATAN LEMPAKE	2.155.652.928
5	64.03/04.0/000564/2025	12/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TABALAR ULU	1.661.265.012
6	64.03/04.0/000604/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LABANAN MAKARTI	2.171.327.496
7	64.03/04.0/000628/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	P. DERAWAN	1.848.632.496
8	64.03/04.0/000629/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	INARAN	1.693.818.612
9	64.03/04.0/000630/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SEI BEBANIR BANGUN	2.686.869.180
10	64.03/04.0/000630/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PULAU BESING	1.505.997.696
11	64.03/04.0/000630/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	GIRING GIRING	1.905.655.812
12	64.03/04.0/000634/2025	23/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SEMURUT	1.921.589.412
13	64.03/04.0/000637/2025	25/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SAMBAKUNGAN	2.176.519.728
14	64.03/04.0/000638/2025	25/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIRANG	1.951.461.612
15	64.03/04.0/000643/2025	25/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PAYUNG2	1.676.484.696
16	64.03/04.0/000687/2025	07/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MELATI JAYA	2.125.806.528
17	64.03/04.0/000688/2025	07/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	AMPEN MEDANG	1.670.577.012
18	64.03/04.0/000698/2025	09/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	RANTAU PANIANG	1.668.810.696
19	64.03/04.0/000704/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TASUK	2.322.700.212
20	64.03/04.0/000720/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BATU PUTIH	2.384.983.296
21	64.03/04.0/000735/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LONG AYAP	1.602.675.180
22	64.03/04.0/000737/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MERANCANG ILIR	1.880.862.780
23	64.03/04.0/000748/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TELUK ALULU	1.698.145.212
24	64.03/04.0/000757/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TEMBUDAN	2.333.603.328
25	64.03/04.0/000758/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PUNAN SEGAH	1.514.324.064
26	64.03/04.0/000759/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BUMI JAYA	1.965.275.412
27	64.03/04.0/000771/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LONG LAAI	1.806.642.864
28	64.03/04.0/000772/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BATU RAJANG	1.566.135.264
29	64.03/04.0/000773/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN BPJS KESEHATAN KAMPUNG	BPJS KESEHATAN TAHAP 2	147.420.168
30	64.03/04.0/000774/2025	18/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	GUNUNG SARI	3.304.224.696
31	64.03/04.0/000775/2025	18/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TEPIAN BUAH	1.864.165.548
32	64.03/04.0/000779/2025	22/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BOHE SILIAN	1.684.784.496
33	64.03/04.0/000781/2025	22/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TJG PERANGAT	1.734.817.812
34	64.03/04.0/000783/2025	22/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TUNGGAJ BUMI	1.688.269.896
35	64.03/04.0/000794/2025	23/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BUKIT MAKMUR	1.883.428.812
36	64.03/04.0/000795/2025	29/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BUKIT MAKMUR JAYA	1.623.954.012
37	64.03/04.0/000796/2025	29/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PUNAN MALINAU	1.710.602.580
38	64.03/04.0/000797/2025	29/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TANJUNG PREPAT	1.736.374.212
39	64.03/04.0/000798/2025	29/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PANDAN SARI	1.842.614.412
40	64.03/04.0/000801/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TALISAYAN	2.599.845.096
41	64.03/04.0/000804/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PESAYAN	1.940.802.264
42	64.03/04.0/000815/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LABANAN JAYA	2.237.686.812
43	64.03/04.0/000828/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	CAMPUR SARI	1.890.023.134
44	64.03/04.0/000837/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PUNAN MAHKAM	1.656.993.334
45	64.03/04.0/000838/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	HARAPAN MAJU	1.807.578.194
46	64.03/04.0/000839/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	HARAPAN JAYA	2.102.991.696
47	64.03/04.0/000840/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TUMBIT DAYAK	2.322.802.212
48	64.03/04.0/000900/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PILANJAU	2.038.369.938
49	64.03/04.0/000901/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MUARA LESAN	1.607.722.464
50	64.03/04.0/000911/2025	08/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MANUNGAL JAYA	1.787.876.496
51	64.03/04.0/000914/2025	08/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TUBAN	2.054.980.128
52	64.03/04.0/000916/2025	08/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MERANCANG ULU	1.993.761.528
53	64.03/04.0/000930/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIATAN ULU	1.756.773.612
54	64.03/04.0/000932/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LONG LANUK	1.881.009.096
55	64.03/04.0/000933/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BENA BARU	1.744.684.980
56	64.03/04.0/000935/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	GURIMBANG	1.967.565.012
57	64.03/04.0/000943/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SIDO BANGEN	1.594.941.612
58	64.03/04.0/000948/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SUARAN	2.602.495.826
59	64.03/04.0/000953/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	KAYU INDAH	1.633.774.296
60	64.03/04.0/000955/2025	21/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TUMBIT MELAYU	2.321.081.928
61	64.03/04.0/000956/2025	21/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TELUK SULAIMAN	2.024.684.412
62	64.03/04.0/000957/2025	22/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SUMBER AGUNG	1.886.136.236
63	64.03/04.0/000958/2025	22/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LOBANG KELATAK	1.558.295.496
64	64.03/04.0/000964/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PEGAT BATUMBUK	1.821.867.738
65	64.03/04.0/000967/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TELUK HARAPAN	1.846.702.212
66	64.03/04.0/000974/2025	01/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TELUK SUMBANG	1.794.098.496
67	64.03/04.0/000975/2025	01/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LABANAN MAKMUR	2.436.990.612
68	64.03/04.0/001023/2025	09/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SUKAN TENGAH	2.403.399.096
69	64.03/04.0/001025/2025	09/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TABALAR MUARA	1.653.715.812
70	64.03/04.0/001026/2025	09/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PANTAI HARAPAN	1.715.475.696
71	64.03/04.0/001034/2025	15/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BUYUNG2	2.169.135.528
72	64.03/04.0/001035/2025	15/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TANJUNG BATU	3.694.807.812
73	64.03/04.0/001036/2025	15/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	CAPUK	1.908.652.896
74	64.03/04.0/001037/2025	15/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PURNASARI JAYA	1.741.630.380
75	64.03/04.0/001040/2025	17/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	DUMARING	1.922.443.896
76	64.03/04.0/001043/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SUKA MURYA	1.879.674.096
77	64.03/04.0/001048/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	KASAI	2.782.897.352
78	64.03/04.0/001053/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIATAN BAPINANG	1.682.636.412
79	64.03/04.0/001054/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SIDJUNG INDAH	1.578.288.138
80	64.03/04.0/001056/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MERASA	1.827.926.036
81	64.03/04.0/001075/2025	08/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	KARANGAN	1.696.444.896
82	64.03/04.0/001083/2025	10/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIOLUK2	2.069.437.128
83	64.03/04.0/001088/2025	15/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BALIKUKUP	1.843.931.412
84	64.03/04.0/001087/2025	15/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	BIATAN ILIR	1.872.056.412
85	64.03/04.0/001095/2025	20/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	TELUK SEMANTING	1.766.137.464
86	64.03/04.0/001103/2025	21/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	SAMBUKURAT	1.829.191.380
87	64.03/04.0/001114/2025	23/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MERAPUN	2.121.933.696
88	64.03/04.0/001115/2025	23/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LESAN DAYAK	1.533.846.864
89	64.03/04.0/001116/2025	23/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	MAPULU	1.470.402.864
90	64.03/04.0/001169/2025	29/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	LONG BELIU	2.057.193.180
91	64.03/04.0/001170/2025	29/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	PENCAIRAN ADK TAHAP 2	PANAAN	1.565.890.604
92	64.						

Lampiran 3

7

REKAPITULASI SP2D BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BK3) LPM KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 3

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH
1	64.03/04.0/000178/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TEPIAN BUAH	5.000.000,00
2	64.03/04.0/000183/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BATU2	5.000.000,00
3	64.03/04.0/000188/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PURNASARI JAYA	5.000.000,00
4	64.03/04.0/000193/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIDUK - BIDUK	5.000.000,00
5	64.03/04.0/000206/M/4/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TUMBIT DAYAK	5.000.000,00
6	64.03/04.0/000219/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SAMBUKUNGAN	5.000.000,00
7	64.03/04.0/000220/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PULAU BESING	5.000.000,00
8	64.03/04.0/000221/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MALUANG	5.000.000,00
9	64.03/04.0/000267/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TASUK	5.000.000,00
10	64.03/04.0/000268/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MERANCANG ULU	5.000.000,00
11	64.03/04.0/000273/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TEMBUDAN	5.000.000,00
12	64.03/04.0/000324/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SEMURUT	5.000.000,00
13	64.03/04.0/000326/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LABANAN MAKARTI	5.000.000,00
14	64.03/04.0/000330/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TIG PERANGAT	5.000.000,00
15	64.03/04.0/000333/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SEI BEBANIR BANGUN	5.000.000,00
16	64.03/04.0/000338/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BUKIT MAKMUR JAYA	5.000.000,00
17	64.03/04.0/000340/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	KAYU INDAH	5.000.000,00
18	64.03/04.0/000342/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	AMPEN MEDANG	5.000.000,00
19	64.03/04.0/000356/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TABALAR MUARA	5.000.000,00
20	64.03/04.0/000359/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TUNGGAL BUMI	5.000.000,00
21	64.03/04.0/000366/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	INARAN	5.000.000,00
22	64.03/04.0/000378/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SIDO BANGEN	5.000.000,00
23	64.03/04.0/000382/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MUARA LESAN	5.000.000,00
24	64.03/04.0/000388/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	GURIMBANG	5.000.000,00
25	64.03/04.0/000397/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PULAU DERAWAN	5.000.000,00
26	64.03/04.0/000402/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	GIRING-GIRING	5.000.000,00
27	64.03/04.0/000406/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MELATI JAYA	5.000.000,00
28	64.03/04.0/000409/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TELUK ALULU	5.000.000,00
29	64.03/04.0/000439/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MERABU	5.000.000,00
30	64.03/04.0/000448/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	DUMARING	5.000.000,00
31	64.03/04.0/000468/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TANJUNG BATU	5.000.000,00
32	64.03/04.0/000469/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TABALAR ULU	5.000.000,00
33	64.03/04.0/000470/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PUNAN SEGAH	5.000.000,00
34	64.03/04.0/000471/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PANDAN SARI	5.000.000,00
35	64.03/04.0/000472/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MANUNGKAL JAYA	5.000.000,00
36	64.03/04.0/000473/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PUNAN MALINAU	5.000.000,00
37	64.03/04.0/000474/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BUMI JAYA	5.000.000,00
38	64.03/04.0/000475/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIRANG	5.000.000,00
39	64.03/04.0/000477/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TUBAAN	5.000.000,00
40	64.03/04.0/000478/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TANJUNG PEREPAT	5.000.000,00
41	64.03/04.0/000506/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PEGAT BUKUR	5.000.000,00
42	64.03/04.0/000522/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	HARAPAN MAJU	5.000.000,00
43	64.03/04.0/000523/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	HARAPAN JAYA	5.000.000,00
44	64.03/04.0/000524/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BUKIT MAKMUR	5.000.000,00
45	64.03/04.0/000527/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PANTAI HARAPAN	5.000.000,00
46	64.03/04.0/000532/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BUYUNG2	5.000.000,00
47	64.03/04.0/000541/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MAPULU	5.000.000,00
48	64.03/04.0/000553/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LOBANG KELATAK	5.000.000,00
49	64.03/04.0/000573/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SUMBER AGUNG	5.000.000,00
50	64.03/04.0/000579/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LESAN DAYAK	5.000.000,00
51	64.03/04.0/000581/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BENA BARU	5.000.000,00
52	64.03/04.0/000585/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BATU PUTIH	5.000.000,00
53	64.03/04.0/000597/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SAMBURAKAT	5.000.000,00
54	64.03/04.0/000600/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TELUK SUMBANG	5.000.000,00
55	64.03/04.0/000625/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG DUHUNG	5.000.000,00
56	64.03/04.0/000667/2025	04/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PANAAN	5.000.000,00
57	64.03/04.0/000670/2025	04/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PAYUNG2	5.000.000,00
58	64.03/04.0/000674/2025	04/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG BELIU	5.000.000,00
59	64.03/04.0/000678/2025	07/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MERANCANG ILIR	5.000.000,00
60	64.03/04.0/000707/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	RANTAU PANJANG	5.000.000,00
61	64.03/04.0/000713/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PUNAN MAHKAM	5.000.000,00
62	64.03/04.0/000717/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG LAAI	5.000.000,00
63	64.03/04.0/000723/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PILANIAU	5.000.000,00
64	64.03/04.0/000728/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SUMBER MULYA	5.000.000,00
65	64.03/04.0/000732/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MERAPUN	5.000.000,00
66	64.03/04.0/000740/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SUKA MURYA	5.000.000,00
67	64.03/04.0/000743/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	GUNUNG SARI	5.000.000,00
68	64.03/04.0/000762/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BATU RAJANG	5.000.000,00
69	64.03/04.0/000765/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG LANUK	5.000.000,00
70	64.03/04.0/000767/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TUMBIT MEAYU	5.000.000,00
71	64.03/04.0/000782/2025	22/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BOHE SILIAN	5.000.000,00
72	64.03/04.0/000787/2025	23/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TELUK SULAIMAN	5.000.000,00
73	64.03/04.0/000791/2025	23/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG LAMCIN	5.000.000,00
74	64.03/04.0/000802/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LABANAN JAYA	5.000.000,00
75	64.03/04.0/000807/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PESAYAN	5.000.000,00
76	64.03/04.0/000813/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LABANAN MAKMUR	5.000.000,00
77	64.03/04.0/000824/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	CAMPUR SARI	5.000.000,00
78	64.03/04.0/000830/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	EKA SAPTA	5.000.000,00
79	64.03/04.0/000835/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	CAPUAK	5.000.000,00
80	64.03/04.0/000842/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	MERASA	5.000.000,00
81	64.03/04.0/000927/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIATAN ULU	5.000.000,00
82	64.03/04.0/000946/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SUARAN	5.000.000,00
83	64.03/04.0/000951/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	KARANGAN	5.000.000,00
84	64.03/04.0/000965/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	PEGAT BATUMBUK	5.000.000,00
85	64.03/04.0/000968/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TELUK HARAPAN	5.000.000,00
86	64.03/04.0/000998/2025	03/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIATAN BAPINANG	5.000.000,00
87	64.03/04.0/001002/2025	03/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG AYAP	5.000.000,00
88	64.03/04.0/001021/2025	09/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SUKAN TENGAH	5.000.000,00
89	64.03/04.0/001045/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	KASAI	5.000.000,00
90	64.03/04.0/001049/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIATAN BARU	5.000.000,00
91	64.03/04.0/001101/2025	21/10/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	BIATAN ILIR	5.000.000,00
92	64.03/04.0/001256/2025	12/11/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	SIDIUNG INDAH	5.000.000,00
93	64.03/04.0/001300/2025	19/11/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG AYAN	5.000.000,00
94	64.03/04.0/001308/2025	21/11/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TELUK SEMANTING	5.000.000,00
95	64.03/04.0/001316/2025	21/11/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	LONG KELUH	5.000.000,00
96	64.03/04.0/001386/2025	11/12/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA LPM	TALISAYAN	5.000.000,00

	NO SP2D	TGL SP2D	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH
1	64.03/04/000179/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TEPIAN BUAH	5.000.000,00
2	64.03/04/000184/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	BATU2	5.000.000,00
3	64.03/04/000192/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	BIDUK - BIDUK	5.000.000,00
4	64.03/04/000198/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	PURNASARI JAYA	5.000.000,00
5	64.03/04/000207/M/4/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TUMBIT DAYAK	5.000.000,00
6	64.03/04/000222/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	PULAU BESING	5.000.000,00
7	64.03/04/000226/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	SAMBAKUNGAN	5.000.000,00
8	64.03/04/000229/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	MALUANG	5.000.000,00
9	64.03/04/000266/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TASUK	5.000.000,00
10	64.03/04/000272/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TEMBUDAN	5.000.000,00
11	64.03/04/000275/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	MERANCANG ULU	5.000.000,00
12	64.03/04/000327/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	LABANAN MAKARTI	5.000.000,00
13	64.03/04/000332/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TIG PERANGAT	5.000.000,00
14	64.03/04/000334/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	SEI BEBANIR BANGUN	5.000.000,00
15	64.03/04/000339/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	BUKIT MAKMUR	5.000.000,00
16	64.03/04/000357/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TABALAR MUARA	5.000.000,00
17	64.03/04/000360/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TUNGGAL BUMI	5.000.000,00
18	64.03/04/000364/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	SEMURUT	5.000.000,00
19	64.03/04/000367/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	INARAN	5.000.000,00
20	64.03/04/000371/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	AMPEN EMDANG	5.000.000,00
21	64.03/04/000372/M/4/2025	20/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	KAYU INDAH	5.000.000,00
22	64.03/04/000380/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	SIDO BANGEN	5.000.000,00
23	64.03/04/000383/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	MUARA LESAN	5.000.000,00
24	64.03/04/000389/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	GURIMBANG	5.000.000,00
25	64.03/04/000398/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	PULAU DERAWAN	5.000.000,00
26	64.03/04/000407/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	MELATI JAYA	5.000.000,00
27	64.03/04/000410/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TELUK ALULU	5.000.000,00
28	64.03/04/000415/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	GIRING-GIRING	5.000.000,00
29	64.03/04/000440/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	MERABU	5.000.000,00
30	64.03/04/000449/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	DUMARING	5.000.000,00
31	64.03/04/000479/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TANJUNG PEREPAT	5.000.000,00
32	64.03/04/000490/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA KRG TARUNA	TANJUNG BATU	

**REKAPITULASI SP2D BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BK3) DANA RT KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

								Lampiran 3
NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	
1	64.03/04.0/000176/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TEPIAN BUAH	250.000.000,00	
2	64.03/04.0/000186/M/4/2025	23/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BATU2	100.000.000,00	
3	64.03/04.0/000190/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BIDUK - BIDUK	200.000.000,00	
4	64.03/04.0/000197/M/4/2025	28/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PURNASARI JAYA	250.000.000,00	
5	64.03/04.0/000204/M/4/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TUMBIT DAYAK	400.000.000,00	
6	64.03/04.0/000210/M/4/2025	30/04/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MALLUANG	650.000.000,00	
7	64.03/04.0/000224/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PULAU BESING	100.000.000,00	
8	64.03/04.0/000225/M/4/2025	06/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SAMBAKUNGAN	400.000.000,00	
9	64.03/04.0/000264/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TABALAR MUARA	200.000.000,00	
10	64.03/04.0/000270/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TASUK	350.000.000,00	
11	64.03/04.0/000271/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TEMBUDAN	350.000.000,00	
12	64.03/04.0/000276/M/4/2025	08/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MERANCANG ULU	300.000.000,00	
13	64.03/04.0/000329/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TIG PERANGAT	350.000.000,00	
14	64.03/04.0/000336/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SEI BEBANIR BANGUN	650.000.000,00	
15	64.03/04.0/000337/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BUKIT MAKMUR JAYA	250.000.000,00	
16	64.03/04.0/000344/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	KAYU INDAH	300.000.000,00	
17	64.03/04.0/000345/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	AMPEN EMDANG	150.000.000,00	
18	64.03/04.0/000354/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LABANAN MAKARTI	450.000.000,00	
19	64.03/04.0/000362/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TUNGGAL BUMI	300.000.000,00	
20	64.03/04.0/000363/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SEMURUT	250.000.000,00	
21	64.03/04.0/000365/M/4/2025	19/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	INARAN	150.000.000,00	
22	64.03/04.0/000377/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SIDO BANGEN	250.000.000,00	
23	64.03/04.0/000381/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MUARA LESAN	100.000.000,00	
24	64.03/04.0/000387/M/4/2025	22/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	GURIMBANG	400.000.000,00	
25	64.03/04.0/000396/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PULAU DERAWAN	200.000.000,00	
26	64.03/04.0/000403/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	GIRING-GIRING	200.000.000,00	
27	64.03/04.0/000405/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MELATI JAYA	650.000.000,00	
28	64.03/04.0/000408/2025	28/05/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TELUK ALULU	150.000.000,00	
29	64.03/04.0/000437/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MERABU	100.000.000,00	
30	64.03/04.0/000441/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BIATAN LEMPAKE	500.000.000,00	
31	64.03/04.0/000446/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	DUMARING	450.000.000,00	
32	64.03/04.0/000451/2025	02/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TUBAAN	250.000.000,00	
33	64.03/04.0/000456/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BUMI JAYA	550.000.000,00	
34	64.03/04.0/000457/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BIRANG	200.000.000,00	
35	64.03/04.0/000480/2025	04/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TIG PEREPAT	300.000.000,00	
36	64.03/04.0/000502/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TANJUNG BATU	650.000.000,00	
37	64.03/04.0/000503/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TABALAR ULU	200.000.000,00	
38	64.03/04.0/000504/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PEGAT BUKUR	300.000.000,00	
39	64.03/04.0/000507/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PUNAN SEGAI	50.000.000,00	
40	64.03/04.0/000508/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PANDAN SARAH	400.000.000,00	
41	64.03/04.0/000509/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MAPULU	50.000.000,00	
42	64.03/04.0/000510/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MANUNGGAL JAYA	250.000.000,00	
43	64.03/04.0/000511/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PUNAN MALINAU	300.000.000,00	
44	64.03/04.0/000512/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	HARAPAN MAJU	350.000.000,00	
45	64.03/04.0/000513/2025	05/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BUKIT MAKMUR	250.000.000,00	
46	64.03/04.0/000525/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PANTAI HARAPAN	250.000.000,00	
47	64.03/04.0/000534/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BUYUNG2	550.000.000,00	
48	64.03/04.0/000537/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BALIKUKUP	150.000.000,00	
49	64.03/04.0/000545/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	HARAPAN JAYA	350.000.000,00	
50	64.03/04.0/000551/2025	10/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LOBANG KELATAK	150.000.000,00	
51	64.03/04.0/000574/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SUMBER AGUNG	250.000.000,00	
52	64.03/04.0/000580/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LESAN DAYAK	100.000.000,00	
53	64.03/04.0/000583/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BENA BARU	250.000.000,00	
54	64.03/04.0/000587/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BATU PUTIH	350.000.000,00	
55	64.03/04.0/000596/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SAMBUKAKAT	150.000.000,00	
56	64.03/04.0/000601/2025	17/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TELUK SUMBANG	250.000.000,00	
57	64.03/04.0/000626/2025	20/06/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG DUHUNG	50.000.000,00	
58	64.03/04.0/000636/2025	04/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PANAAN	100.000.000,00	
59	64.03/04.0/000672/2025	04/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PAYUNG2	100.000.000,00	
60	64.03/04.0/000681/2025	07/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MERANCANG ILIR	200.000.000,00	
61	64.03/04.0/000683/2025	07/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG BELIU	200.000.000,00	
62	64.03/04.0/000703/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TUBMBIT MELAYU	700.000.000,00	
63	64.03/04.0/000706/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	RANTAU PANJANG	150.000.000,00	
64	64.03/04.0/000712/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PUNAN MAHKAM	100.000.000,00	
65	64.03/04.0/000716/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG LAI	200.000.000,00	
66	64.03/04.0/000721/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PILANJAU	450.000.000,00	
67	64.03/04.0/000726/2025	15/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SUMBER MULYA	250.000.000,00	
68	64.03/04.0/000734/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MERAPUN	200.000.000,00	
69	64.03/04.0/000736/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG AYAP	100.000.000,00	
70	64.03/04.0/000739/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SUKA MURYA	250.000.000,00	
71	64.03/04.0/000746/2025	16/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	GUNUNG SARI	450.000.000,00	
72	64.03/04.0/000760/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG LANUK	250.000.000,00	
73	64.03/04.0/000763/2025	17/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BATU RAJANG	150.000.000,00	
74	64.03/04.0/000780/2025	22/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BOHE SILIAN	200.000.000,00	
75	64.03/04.0/000789/2025	23/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TELUK SULAIMAN	300.000.000,00	
76	64.03/04.0/000792/2025	23/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LONG LAMCIN	50.000.000,00	
77	64.03/04.0/000805/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LABANAN JAYA	550.000.000,00	
78	64.03/04.0/000810/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PESAYAN	400.000.000,00	
79	64.03/04.0/000812/2025	30/07/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	LABANAN MAKMUR	650.000.000,00	
80	64.03/04.0/000825/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	CAMPUR SARI	350.000.000,00	
81	64.03/04.0/000833/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	EKA SAPTA	350.000.000,00	
82	64.03/04.0/000833/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	CAPUAK	500.000.000,00	
83	64.03/04.0/000841/2025	04/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	MERASA	250.000.000,00	
84	64.03/04.0/000928/2025	12/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BIATAN ULU	150.000.000,00	
85	64.03/04.0/000949/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SUARAN	300.000.000,00	
86	64.03/04.0/000950/2025	14/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	KARANGAN	200.000.000,00	
87	64.03/04.0/000963/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	PEGAT BATUMBUK	150.000.000,00	
88	64.03/04.0/000969/2025	27/08/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	TELUK HARAPAN	150.000.000,00	
89	64.03/04.0/000997/2025	03/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	BIATAN BAPINANG	150.000.000,00	
90	64.03/04.0/001024/2025	09/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SUKAN TENGAH	700.000.000,00	
91	64.03/04.0/001044/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	SIDUUNG INDAH	200.000.000,00	
92	64.03/04.0/001046/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	DANA RT	KASAI	500.000.000,00	
93	64.03/04.0/001051/2025	30/09/2025	5.4.02.05.02.0003</					



LAMPIRAN 4
Rincian Belanja BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA
RSUD DR. ABDUL RIVAI
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 4

(Dalam Rupiah)

B.	Belanja Barang dan Jasa APBD	16.908.800.814,00	13.339.604.089,00	78,89	3.569.196.725,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		-		0,00
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas		-		0,00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	972.000,00	950.000,00	97,74	22.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	77.341.687,00	62.676.000,00	81,04	14.665.687,00
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan		-		0,00
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	1.335.629.669,00	1.192.076.546,00	89,25	143.553.123,00
	Belanja Suku Cadang Lainnya		-		0,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	34.521.064,00	30.228.630,00	87,57	4.292.434,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	129.609.269,00	117.313.178,00	90,51	12.296.091,00
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	411.514.218,00	389.590.720,00	94,67	21.923.498,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda pos	7.462.000,00	5.854.000,00	78,45	1.608.000,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	36.417.126,00	33.221.400,00	91,22	3.195.726,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas		-		0,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33	1.000.000,00
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	13.851.980,00	7.205.454,00	52,02	6.646.526,00
	Belanja Obat-Obat-Obatan Lainnya	32.191.531,00		-	32.191.531,00
	Belanja Natura dan Pakan Natura	2.500.000.000,00	2.499.974.600,00	100,00	25.400,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.313.000,00	100.239.000,00	98,94	1.074.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	299.000.000,00	274.290.000,00	91,74	24.710.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.710.000,00	23.350.000,00	98,48	360.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tan	392.000.000,00	392.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	9.789.800,00	1.161.615,00	11,87	8.628.185,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	44.000.000,00	28.800.000,00	65,45	15.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	111.700.000,00	84.700.000,00	75,83	27.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		-		0,00
	Honorarium Rohaniawan		-		0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.318.200.000,00	600.200.000,00	45,53	718.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	237.650.000,00	91.635.000,00	38,56	146.015.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana		-		0,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		-		0,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	638.700.000,00	183.400.000,00	28,71	455.300.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	34.800.000,00	29.700.000,00	85,34	5.100.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	542.200.000,00	494.200.000,00	91,15	48.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		-		0,00
	Belanja Jasa Tenaga Caraka	3.375.000,00	3.375.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	100.000.000,00	99.830.000,00	99,83	170.000,00
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	22.500.000,00	8.880.000,00	39,47	13.620.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis	106.000.000,00	90.597.500,00	85,47	15.402.500,00
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00	22.000.000,00	68,75	10.000.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi	53.245.100,00	39.980.000,00	75,09	13.265.100,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		-		0,00
	Belanja Tagihan Air	260.300.000,00	198.285.800,00	76,18	62.014.200,00
	Belanja Tagihan Listrik	1.496.000.000,00	1.496.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Tagihan Telepon	43.600.000,00	43.388.552,00	99,52	211.448,00
	Belanja Paket / Pengiriman	370.576.000,00	333.666.328,00	90,04	36.909.672,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	40.000.000,00	4.125.200,00	10,31	35.874.800,00
	Belanja Lembur	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	599.389.000,00	489.629.000,00	81,69	109.760.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	98.600.000,00	90.440.000,00	91,72	8.160.000,00
	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19		-		0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	135.000.000,00	34.376.000,00	25,46	100.624.000,00

Lampiran 4

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.229.200,00	137.134,00	2,20	6.092.066,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.786.500,00	171.418,00	2,20	7.615.082,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)		-		0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		-		0,00
Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongon	819.000.000,00	744.394.000,00	90,89	74.606.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung		-		0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	73.810.000,00	60.000.000,00	81,29	13.810.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	1.137.619.200,00	669.250.440,00	58,83	468.368.760,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		-		0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	40.411.000,00	67,35	19.589.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	372.000.000,00	335.400.000,00	90,16	36.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat kantor-Alat Kantor Lainnya		-		0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga- Mebel		-		0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.873.243.470,00	1.315.307.376,00	70,22	557.936.094,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lain		-		0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-peralatan Jaringan		-		0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.310.000,00	33.955.000,00	98,97	355.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	130.586.000,00	130.352.750,00	99,82	233.250,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	452.500.000,00	323.072.448,00	71,40	129.427.552,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000,00	19.755.000,00	71,84	7.745.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54.058.000,00	54.058.000,00	100,00	0,00
B. Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.929.922.200,32	78.356.533.273,10	86,17	12.573.388.927,22
Biaya Perlengkapan Ruangan Pelayanan (BLUD)	588.800.000,00	477.295.700,00	81,06	111.504.300,00
Biaya Peralatan Kesehatan (BLUD)	19.650.000,00	9.272.940,00	47,19	10.377.060,00
Biaya Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BLUD)	27.049.783.388,00	19.468.396.847,15	71,97	7.581.386.540,85
Biaya Bahan Kerja Pelayanan (BLUD)	181.582.100,00	49.972.200,00	27,52	131.609.900,00
Biaya Bahan dan Alat Laboratorium (BLUD)	2.258.881.380,00	1.418.135.603,00	62,78	840.745.777,00
Biaya Bahan dan Alat Radiologi (BLUD)	728.650.700,00	718.803.250,00	98,65	9.847.450,00
Biaya Bahan Makanan Pasien (BLUD)	460.000.000,00	430.158.934,00	93,51	29.841.066,00
Biaya Makan Minum Kegiatan (BLUD)	361.646.000,00	305.872.000,00	84,58	55.774.000,00
Biaya makan minum rapat (BLUD)	234.187.500,00	190.510.000,00	81,35	43.677.500,00
Biaya Gas Medik (Pengisian O2) (BLUD)	2.159.949.300,00	2.159.820.000,00	99,99	129.300,00
Biaya Bahan dan Alat Kedokteran Gigi (BLUD)	542.000.000,00	440.418.224,00	81,26	101.581.776,00
Biaya Bahan dan Alat PMI (BLUD)	1.350.000.000,00	1.153.697.000,00	85,46	196.303.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor (BLUD)	316.572.000,00	264.031.290,00	83,40	52.540.710,00
Biaya Cetak (BLUD)	773.961.674,00	587.036.674,00	75,85	186.925.000,00
Biaya Benda Pos (BLUD)	11.420.000,00	10.696.000,00	93,66	724.000,00
Biaya Pengiriman Dokumen dan Sampel Pemeriksaan (BLUD)	3.000.000,00	1.162.500,00	38,75	1.837.500,00
Biaya Bahan / Alat Peralatan Lainnya (BLUD)	161.389.000,00	115.370.840,00	71,49	46.018.160,00
Biaya Bahan Alat Listrik / Elektronik (BLUD)	250.000.000,00	90.841.000,00	36,34	159.159.000,00
Biaya Bahan / Alat Kebersihan dan Bahan Habis Pakai (BLUD)	322.000.000,00	261.553.094,00	81,23	60.446.906,00
Biaya Bahan Bakar dan Pelumas incenerator serta genset (BLUD)	353.350.000,00	243.635.200,00	68,95	109.714.800,00
Biaya Isi Ulang Gas LPG(BLUD)	111.450.000,00	96.460.000,00	86,55	14.990.000,00
Biaya Bahan/Alat Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga (BLUD)	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
Biaya Pengeluaran untuk Sarana dan Prasarana Lainnya (BLUD)	100.000.000,00	50.685.000,00	50,69	49.315.000,00
Biaya Bahan/ alat/ peralatan/perlengkapan apotik lainnya (BLUD)	70.000.000,00	64.023.600,00	91,46	5.976.400,00
Biaya Filter Hepa Filter (BLUD)		-		0,00
Biaya Peralatan Olahraga /baju olahraga (BLUD)	20.000.000,00	13.525.000,00	67,63	6.475.000,00
Biaya Bahan bahan Alat Dapur/ Pantry (BLUD)	28.300.000,00	9.113.800,00	32,20	19.186.200,00
Biaya Bahan Pemulasaraan Jenazah dan pengadaan peti jenazah	20.000.000,00	-		20.000.000,00
Biaya Administrasi Bank (BLUD)	2.000.000,00	2.900,00	0,15	1.997.100,00
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
Biaya Return Billing Pasien Pembayaran Rawat Jalan dan Rawat Inap (BLUD)	75.000.000,00	4.173.196,00	5,56	70.826.804,00
Biaya Pakaian Dinas Pegawai dan Id-Card Pegawai Rumah Sakit (BLUD)		-		0,00

Lampiran 4

Biaya Perjalanan Dalam Daerah (BLUD)	25.000.000,00	17.050.000,00	68,20	7.950.000,00
Biaya Perjalanan Luar Daerah (BLUD)	716.000.000,00	361.357.553,00	50,47	354.642.447,00
In House Training Tenaga Kesehatan RS (BLUD)	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	10.000.000,00
Biaya Jasa Pelayanan Medis, Non Medis, Farmasi dan RSD Chantika (BLUD)	35.000.009.364,32	34.743.226.987,91	99,27	256.782.376,41
Biaya Pembuatan Penerbitan Izin Radiologi (BLUD)	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00	0,00
Biaya perizinan RS	100.000.000,00	26.000.000,00	26,00	74.000.000,00
Biaya Jasa Telepon (BLUD)	40.000.000,00	1.026.644,00	2,57	38.973.356,00
Biaya Jasa Air (BLUD)	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
Biaya Jasa Listrik (BLUD)	250.000.000,00	54.699.370,00	21,88	195.300.630,00
Biaya Barang dan Jasa Pengembangan SIM RS (BLUD)		-		0,00
Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa (BLUD)		-		0,00
Biaya Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli Pem.Emisi Incenerator (BLUD)		-		0,00
Biaya Jasa Konsultan Perencanaan /Pengawasan Bangunan (BLUD)	100.000.000,00	81.534.000,00	81,53	18.466.000,00
Konsultan Perencanaan Design Meubelair Gedung Walet	15.000.000,00	14.973.900,00	99,83	26.100,00
Jasa Konsultansi Penyusunan Perbup tentang BLUD	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
Biaya Jasa Konsultan Penyusunan Remunerasi (BLUD)		-		0,00
Biaya Jasa Konsultan Evaluasi Struktur Tarip (BLUD)		-		0,00
Jasa Konsultan Pendampingan Penyusunan RENSTRA	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	15.000.000,00
Jasa Konsultan Akreditasi	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
Konsultan Appraisal Bangunan (pendesainan, pemberian angka, serta penilaian dari analisa yang nyata)		-		0,00
Biaya Jasa Penyusunan PPLH RS (Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup)		-		0,00
Jasa Konsultansi Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD		-		0,00
Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi BLUD		-		0,00
Jasa Konsultan pembuatan Feasibility Study (FS) study kajian pengembangan RS		-		0,00
Biaya Jasa Pemeriksaan Film Badge (BLUD)	12.300.000,00	11.400.000,00	92,68	900.000,00
Jasa Instruktur Senam/Olahraga lainnya		-		0,00
Biaya Jasa Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium (BLUD)	14.575.000,00	14.575.000,00	100,00	0,00
Biaya Jasa Pemantapan Mutu Eksternal CSSD	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Cleaning Service 2025 (BLUD)	4.100.000.000,00	4.093.803.000,00	99,85	6.197.000,00
Pengadaan Pekerjaan Barang dan Satuan Pengamanan 2025 (BLUD)	1.500.000.000,00	1.498.223.000,04	99,88	1.776.999,96
Biaya pemeriksaan alat instrumen dan linen untuk uji mikrobiologi usap (kultur-identifikasi bakteri)		-		0,00
Biaya Jasa Sertifikasi Pemeriksaan Endotoxin (BLUD)		-		0,00
Biaya Sertifikasi Pemeriksaan Emisi Incenerator (BLUD)		-		0,00
Biaya Sertifikasi Alat-alat K3 (BLUD)		-		0,00
Biaya Sertifikasi Pemeriksaan Kualitas Limbah (BLUD)		-		0,00
Biaya Sertifikasi Kalibrasi RS (BLUD)	278.411.310,00	278.411.310,00	100,00	0,00
Biaya Sertifikasi ISO-15189 2012 ISO Laboratorium Medik (BLUD)	100.005.000,00	99.975.000,00	99,97	30.000,00
Sertifikasi ISO K3 Faskes ISO 45001:2018 (BLUD)		-		0,00
Biaya Sertifikasi ISO Manajemen Mutu RS (BLUD)		-		0,00
Biaya Honor dokter spesialis Jantung, syaraf, bedah, rehab medik dll (BLUD)	559.200.000,00	507.600.000,00	90,77	51.600.000,00
Biaya Honor Dokter Spesialis Patologi Klinis (BLUD)		-		0,00
Honor Tenaga Pembimbingan kerohanian (BLUD)		-		0,00
Honor Tenaga Pengamanan dari TNI AD (BLUD)		-		0,00
Biaya Operasional Ruang Haemodialisa (BLUD)	-	-		0,00
Biaya Honor Fisikawan Medik Radiologi (BLUD)	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Pelaksanaan Program Pelayanan DH (visitasi,honorarium,Akomodasi dan transportasi)		-		0,00
Biaya Honorarium Narasumber Pendampingan Penyusun RSB/RBA (BLUD)	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
Biaya Honor Rohaniawan Jenazah Covid-19/ Jenazah Lainnya		-		0,00
Honor Ustad dalam rangka siraman rohani / ceramah agama	-	-		0,00
Honor narasumber pendampingan penyusunan Sistem Akuntansi /Kebijakan Akuntansi		-		0,00
Honor / Jasa Pendampingan Hukum	105.000.000,00	90.000.000,00	85,71	15.000.000,00
Konsultan Hukum / Pendampingan Hukum Advokat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
honor tim pendampingan hukum Pengembangan RS		-		0,00
Honor narasumber percepatan Perbup (6 orang)	50.000.000,00	14.400.000,00	28,80	35.600.000,00
Narasumber (Pendampingan Tim Kejaksaaan)		-		0,00
Biaya Pengadaan Vaccin Karyawan RS (BLUD)		-		0,00

Lampiran 4

Biaya Honor Tim Auditor (BLUD)	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
Biaya Jasa Pembuangan sampah ke TPA (BLUD)	35.000.000,00	34.512.120,00	98,61	487.880,00
Biaya Jasa Penyerahan Limbah B3 (BLUD)	1.350.000.000,00	1.343.655.000,00	99,53	6.345.000,00
Jasa Pembuangan Sampah Limbah B3 yang terhutang di tahun 2024	1.733.125.000,00	1.733.125.000,00	100,00	0,00
Biaya publikasi dan promosi (BLUD)	70.000.000,00	67.185.000,00	95,98	2.815.000,00
Biaya Kunjungan Persahabatan Untuk Kegiatan Olah Raga (BLUD)		-		0,00
Biaya penanggulangan krisis kesehatan (BLUD)		-		0,00
Biaya Pengisian Tabung Damkar (BLUD)	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
Biaya Jasa Sewa Rumah (BLUD)	200.000.000,00	55.500.000,00	27,75	144.500.000,00
Biaya Jasa Sewa Tempat (BLUD)	30.000.000,00	29.990.000,00	99,97	10.000,00
Biaya Jasa Sewa Genset (BLUD)		-		0,00
Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah (BLUD)	15.000.000,00	4.320.000,00	28,80	10.680.000,00
Biaya Jasa Langganan TV Kabel (BLUD)	15.000.000,00	13.200.000,00	88,00	1.800.000,00
Jasa Komunikasi Cepat Petugas MPP dan customer service (BLUD)	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Biaya Paket Internet Corporate 10 MBPS (BLUD)	90.000.000,00	47.175.000,00	52,42	42.825.000,00
Biaya langganan Hosting ,Webside, langganan zoom, cloud (BLUD)	20.000.000,00	19.550.000,00	97,75	450.000,00
Paket Internet Corporate 100 Mbps (BLUD)	200.000.000,00	185.016.576,00	92,51	14.983.424,00
Biaya Pemeriksaan Kesehatan Karyawan RS (BLUD)		-		0,00
Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Karyawan BLUD RS (BLUD)	1.000.000.000,00	834.029.404,00	83,40	165.970.596,00
Biaya Kontribusi/Kepesertaan (BLUD)	243.000.000,00	75.412.500,00	31,03	167.587.500,00
Biaya pemeriksaan Berkala Kesehatan Karyawan RSUD yang rentan terhadap penularan penyakit (BLUD)	75.000.000,00	57.621.850,00	76,83	17.378.150,00
Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Mesin Lainnya (BLUD)	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan Kerja (BLUD)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (BLUD)	225.000.000,00	172.020.000,00	76,45	52.980.000,00
Biaya Pemeliharaan Aplikasi SIM RS (software) (BLUD)	508.581.816,00	508.581.816,00	100,00	0,00
Pemeliharaan IPAL (BLUD)	99.274.000,00	20.944.000,00	21,10	78.330.000,00
Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga (BLUD)	100.000.000,00	78.555.000,00	78,56	21.445.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung RS (BLUD)	1.400.000.000,00	1.379.048.282,00	98,50	20.951.718,00
Biaya Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit (BLUD)	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
Biaya pemeliharaan Mesin Pengering Laundry BLUD)		-		0,00
Biaya Pemeliharaan Mesin GSS dan Washer Disinfector S46 (BLUD)		-		0,00
Biaya Pemeliharaan Genset Rumah Sakit (BLUD)	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
Biaya Pemeliharaan alat-alat Gizi (BLUD)		-		0,00
Biaya penyedotan Saptik tank (BLUD)	50.000.000,00	7.825.500,00	15,65	42.174.500,00
Biaya Pemeliharaan / Pengadaan Kabel LAN dan Perangkat Pendukung Jaringan	35.000.000,00	30.480.000,00	87,09	4.520.000,00
Pemeliharaan Fisik Lainnya (BLUD)		-		0,00
Biaya Pemeliharaan/perbaikan Alat Kedokteran/Penunjang RS(Uji Kesesuaian Alat X-ray dan CT Scan ser		-		0,00
Biaya Pemeliharaan /perbaikan sparepart dan assesoris alat kedokteran /kesehatan RS (BLUD)	461.787.668,00	441.787.668,00	95,67	20.000.000,00



LAMPIRAN 5
Rekapitulasi Rincian Belanja Hibah 2025

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Kepeluaran	Nilai
1	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	PEMBAYARAN 100% Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar dan Rehab WC PAUD KB Sri Rezeki Kampung Semurut	10.752.000,00
2	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs.Negeri Berau An.Gatot Subroto,S.Ag Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	243.502.000,00
3	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik Mts-Al Ridho An.Sukarti Supardi,S.Pd.I Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	90.000.000,00
4	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Bya Personil Peserta Didik SMP PGRI TG.REDEB An.Ali Syahbana,S.Pd,M.Pd Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	19.800.000,00
5	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Muhammadiyah Tg.Redeb An.M.Yunus,S.Pd.I,M.Pd Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	43.800.000,00
6	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs DDI Biduk-Biduk An.Fitriadi,S.Pd.I Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	86.850.000,00
7	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Katolik WR Seopratman TG.RDB An.Afia AI,S.Pd Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	67.500.000,00
8	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Ibnu Katsir An.Drh.Siti Syamsiyah Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	27.900.000,00
9	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs AL-Kholil NU Berau An.Fathullah GZ Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	51.750.000,00
10	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Nurul Muhajirin An.Sitti Jubaidah,SE Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	30.600.000,00
11	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Ma'arif NU 03 Berau An.Sitti Khodijah,S.Pd Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	15.314.000,00
12	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Ma'Arif NU 02 Berau An.Neri,S.Pd Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	39.600.000,00
13	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMPIT ASH SHOHWAH An.H.Sahara,S.Pd.I Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	104.501.000,00
14	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMPIT Madani Tanjung Redeb An.Zulkipli,S.Pd Smstr I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	36.000.000,00
15	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP AL IHSAN An.Majidi,S.Pd Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	116.064.000,00
16	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP IT AL-I'Tisham Biatan An.Shiddiqi Rajab,S.Pd.I,Gr,M.Pd Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	57.750.000,00
17	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs As'AdiyahH.M.Yusuf Bukit Kasai An.M.Arifin,S.GZ.M.PD Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	11.250.000,00
18	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs Nurul Huda An.Madani Ashari,S.Pd.I Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	34.365.000,00
19	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs Labanan Makmur An.Saman Siregar Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	72.900.000,00
20	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP Insan Mulia Kab.Berau An.Ridwan Ponamon,SH Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	11.700.000,00
21	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Pembangunan Pagar dan Rehab WC PAUD KB Sri Rezeki Kampung Semurut	127.546.000,00
22	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP Kristen Harvest Berau An.Lim Fei Lien,M.M Semester I (Jan-Jun 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	20.700.000,00
23	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrnn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP Tahfidzul Qur'an Al Maher An.Hj.Aan Diana,SE,MAP Semester I & II (Jan-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	32.400.000,00
24	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Ma'arif NU 02 Berau An.Neri,S.Pd Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	39.600.000,00
25	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Bya Personil Peserta Didik SMP PGRI TG.REDEB An.Ali Syahbana,S.Pd,M.Pd Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	19.800.000,00
26	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP AL IHSAN An.Majidi,S.Pd Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	117.036.000,00
27	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Pagar dan Rehab WC PAUD KB Sri Rezeki Kampung Semurut	8.868.000,00
28	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Ma'arif NU 03 Berau An.Sitti Khodijah,S.Pd Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	13.486.000
29	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs DDI Biduk-Biduk An.Fitriadi,S.Pd.I Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	86.850.000
30	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik Mts-Al Ridho An.Sukarti Supardi,S.Pd.I Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	90.000.000,00
31	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMPIT ASH SHOHWAH An.H.Sahara,S.Pd.I Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	107.899.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
32	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs AL-Kholil NU Berau An.Fathullah GZ Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	51.750.000,00
33	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs Labanan Makmur An.Saman Siregar Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	72.900.000,00
34	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Ibnu Katsir An.Drh.Siti Syamsiyah Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	27.900.000,00
35	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP Insan Mulia Kab.Berau An.Takdir,S.H Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	11.700.000,00
36	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, BOSDA MIS DDI Biduk-Biduk Tahap 1 dan 2, Triwulan 1,2,3 dan 4 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	60.000.000,00
37	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, BOSDA SDS Teladan Prima 01 Tahap 1 dan 2, Triwulan 1,2,3 dan 4 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	140.800.000,00
38	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0002	100% Penataan Halaman MTs Negeri Tg.Redeb Sub Keg.02.0012 TA.2025	199.759.971,00
39	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Perencanaan Teknis Renovasi TK Tunas Harapan Baru Merancang Ilir Gunung Tabur	16.150.400,00
40	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs Nurul Muhajirin An.Sitti Jubaidah,SE Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	30.600.000,00
41	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdskrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs Nurul Huda An. Abdul Qohar,M.Ag Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	34.035.000,00
42	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0002	100% Pengawasan Teknis Penataan Halaman MTs Negeri Tg.Redeb Sub Keg.02.0012 TA.2025	9.000.000,00
43	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0002	100% Perencanaan Teknis Penataan Halaman MTs Negeri Tg. Redeb Sub Keg.02.0012 TA.2025	10.800.713,00
44	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, BOSDA MIN 1 Tanjung Redeb Tahap 1 dan 2, Triwulan 1,2,3 dan 4 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	253.300.000,00
45	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Perencanaan Rehab TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0051	25.335.750,00
46	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Perencanaan Penataan Halaman dan Pagar TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0002	381.500,00
47	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Perencanaan Penataan Halaman dan Pagar TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0002	24.954.250,00
48	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SD Katolik WR Supratman Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	170.800.000,00
49	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SDIT Ash Shohwah Berau Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	330.000.000,00
50	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SDIT Madani Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	167.300.000,00
51	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MIS Al - Ridho Berau Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	51.400.000,00
52	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MIS Al Maarif Attaqwa Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	70.000.000,00
53	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MI Ma'arif NU 02 Berau Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	30.000.000,00
54	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MIS Al Ihsan Tanjung Redeb Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	310.600.000,00
55	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MI Nurul Huda Sambaliung Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	12.000.000,00
56	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MIS NW Qodri Melati Jaya Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	6.000.000,00
57	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SD Muhammadiyah Tanjung Redeb Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	61.600.000,00
58	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SD Annisa Berau Tahap 1 dan 2 , (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	93.600.000,00
59	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK SAODA CENDEKIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NUR Khayati	22.500.000,00
60	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kepada Badan & Lembaga yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik MTs.Negeri Berau An.Gatot Subroto,S.Ag Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	240.698.000,00
61	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Tegal Sari Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Suriani	33.000.000,00
62	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Katolik WR Seopratman TG.RDB An.Afia Al,S.Pd Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	67.500.000,00
63	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK CERIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Halijah, S.Pd	20.500.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
64	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB ANAK CERIA JAYA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RAHMASARI	14.000.000,00
65	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan BOSDA SDTK Harvest Kota Berau Tahap 1 dan 2 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	100.400.000,00
66	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan BOSDA MI NW Labanan Jaya Berau Tahap 1 dan 2 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	120.400.000,00
67	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan BOSDA MI Nurul Amin Berau Tahap 1 dan 2 (Januari s.d Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	33.600.000,00
68	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MIS Daarul Ilmi Wazzikri Tanjung Batu Tahap 1 dan 2, (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	13.800.000,00
69	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SDS Al Qur'an Wahdah Islamiyah Berau Tahap 1 dan 2, (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	71.200.000,00
70	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMP Muhammadiyah Tg.Redeb An.M.Yunus,S.Pd.I,M.Pd Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	40.800.000,00
71	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Bdn & Lmbg yg Bersifat Nirlaba,Sukarela & Sosial yg Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Hibah Biaya Personil Peserta Didik SMPIT Madani Tanjung Redeb An.Zulkipli,S.Pd Smstr II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	36.000.000,00
72	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdsrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs As'Adiyah H.M.Yusuf Bukit Kasai An.M.Arifin,S.GZ.M.PD Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	11.250.000,00
73	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdsrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik MTs Darul Qur'an An. Fathor Rahman,S.Pd Semester I-II (Jan-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	8.100.000,00
74	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	100% Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba,Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,Pembangunan USB SMP Muhammadiyah Tanjung Redeb Sub Keg.02.0001 TA.2025	2.500.000.000,00
75	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KBPangaan Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Fitriyah, S.Pd	22.000.000,00
76	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Tunas Kasih Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Dahniar, S.Pd	19.000.000,00
77	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TERATAI EKA SAPTA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Yuliana Pratiwi	19.000.000,00
78	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA SD Ibnu Katsir Berau Tahap 1 dan 2, (Januari-Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	188.600.000,00
79	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NUR AINI	14.500.000,00
80	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA PAUD TUNAS CERIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Yosefina Ostokia	5.000.000,00
81	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB KASTURI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Hj. Fatimah	17.500.000,00
82	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK HOSIANA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Derhana Lisa, S.Pd	30.000.000,00
83	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA XX Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Ennike Kesumawati	21.500.000,00
84	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MELATI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Rosmilawati, S.Pd	19.000.000,00
85	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PERMATA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RUSIYAH	14.500.000,00
86	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK SANGGAM Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Darmatasia, S.Pd	28.000.000,00
87	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AT-TAQWA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Susi Sanawati	21.500.000,00
88	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Penerus Bangsa Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Novi Irmayani, A.Ma	22.000.000,00
89	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Mekar Sari Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Tumiyem, S.Pd	27.000.000,00
90	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA IV Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Yessi Rusly	18.000.000,00
91	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK CAHAYA ANNISA XXI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Emmy Paramolita, S.Pd	22.500.000,00
92	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS CEMPAKA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Ruslana, S.Pd	9.000.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
93	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Cempaka Merah Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Ruslana, S.Pd	18.000.000,00
94	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AL-INAYAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Muslina, S.pd.I	24.500.000,00
95	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB HARAPAN GEMILANG Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Norhidayat, S.Pd	17.000.000,00
96	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MUTIARA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n LYNDANGGARA KUSUMAH	18.500.000,00
97	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD KASIH BUNDA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Suryati	22.000.000,00
98	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MUTIARA BOHE SILIAN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ASLIANA	12.000.000,00
99	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Permata Hati Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ERMAYANA GINTING, S.Pd	16.000.000,00
100	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Pelopor Bangsa Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Karni	23.500.000,00
101	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TUNAS BAHARI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RUMIYASTUTI	21.500.000,00
102	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PERMATA INDAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Hamidah DM	25.000.000,00
103	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Harapan Bangsa Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Murtini	27.000.000,00
104	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK GAMELINA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Maria Antonius	17.000.000,00
105	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS JAYATriwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Joni Tabang Sudi	36.500.000,00
106	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdsrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP IT AL-I'tisham Biatan An.Shiddiqi Rajab,S.Pd.I,Gr,M.Pd Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	57.450.000,00
107	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Bel.Hibah Uang Kpd Badan & Lmbga yg Brsfat Nrlba,Sukarela & Sosial yg Dibntk Brdsrkn Prtrn Prundang-Undangan Hibah Bya Prsonil Peserta Didik SMP Kristen Harvest Berau An.Lim Fei Lien,M.M Semester II (Jul-Des 2025) Sub Keg.02.0032 TA.2025	20.700.000,00
108	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB Karya Bangsa Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI MAIMUNAH ARSAD,S.Pd	15.500.000,00
109	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BUNGA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MASTIAH, S.Pd	22.000.000,00
110	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA PAUD TERPADU NUSA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Fatimah	15.500.000,00
111	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD PELITA TERPADU Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Abdul Rauf.M	20.500.000,00
112	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB NUSA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RUSDIANA, S.Pd	25.500.000,00
113	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK BHAKTI BERSAMA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Mely Nor Hardiyanti, S.Pd	10.500.000,00
114	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS PERTIWI VII Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Murni, S.Pd	26.500.000,00
115	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS PERTIWI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Hasnawati Mur	13.500.000,00
116	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB KIDS GENIUS Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Imrani Nirwan	14.000.000,00
117	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL-MARIF II Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Kusumawati, S.Pd	14.000.000,00
118	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PELITA BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Arbaiyah	22.500.000,00
119	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MI Ma'arif Darud Dhiyak Berau Tahap 1 dan 2 (Januari - Desember) TA. 2025 Keg. 01.0054	12.000.000,00
120	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB HAUR GADING Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Siti Jubaidah, S.Pd	32.500.000,00
121	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB HARAPAN INDAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RATNA DILLA,S.Pd	19.500.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
122	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB IKHSAN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SALMAH	14.500.000,00
123	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MULIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n YUSTINA DAU HAYATI, S.Pd	24.000.000,00
124	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MELATI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Hj. Seri Tuti Andayani, S.Pd.SD	47.000.000,00
125	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BINA BALITA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Rostiana Ipai Ului, S.Pd	10.500.000,00
126	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AISIYAH BUSTANUL ATHFA I Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n IRMAYANTI,M.Pd	8.500.000,00
127	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL IV Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ARPINI, S.Pd.i	8.500.000,00
128	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANAK CERDAS Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SARI MAHDALENA ROSANTY, S.Pd	29.500.000,00
129	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TPA MUTIARAKU Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Lulik Hariyadi	5.000.000,00
130	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUMBIT INDAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n JAMALIAH, S.Pd	13.000.000,00
131	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BINA MUTIARA BUNDA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Murdiani	22.000.000,00
132	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD CENDRAWASIH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Darnaningsih, S.Pd	29.000.000,00
133	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AISIYAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NUR OKTAVIANI, S.ST	30.500.000,00
134	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL-FURQON Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Iim, S.Pd, M.Pd	17.500.000,00
135	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS MEKAR Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MAEMUNA, S.Pd	18.000.000,00
136	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB NURUL ISLAM Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Misja Zubaidah	28.500.000,00
137	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA RA AL-IHSAN II Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Wiji Astuti,S.Pd	19.500.000,00
138	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TUNAS MANDIRI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n BUN	16.500.000,00
139	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK JAMIUL MUTTAQIN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NURBAYA	8.500.000,00
140	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PRIMA NUSANTARA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n LULU ATUL HASANAH, S.Pd	30.000.000,00
141	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS BANGSA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NURANIA	15.500.000,00
142	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK PERMATA ANNISA XIV Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NURHAYATI, S.Pd	9.500.000,00
143	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS HARAPAN BARU Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MERSI NURPRATIWI	14.500.000,00
144	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK PERMATA KASAI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ANDI SUTRA, SP	24.000.000,00
145	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TKIT ASH- SHOHWAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NOVITA WINDA HUSADA, S.Pd	51.000.000,00
146	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK EL-SHADDAL Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ENDRAWATI	18.000.000,00
147	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PERTIWI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n JUMARNI, S.Pd	12.000.000,00
148	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK Aisyiah Bustnul Athfal III Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Syafrina Hidayanti	12.500.000,00
149	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS MULIANA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Dwi Sulistiani, S.Pd	40.000.000,00
150	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TPA AR RIZKY Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n FRANSISCA WELIYANTI	16.500.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
151	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TPA BAITUL ATHFALTriwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Hj. Nikmatus Solichah, S.Pd	21.000.000,00
152	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL MU'MIN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ROSE DIANY	10.500.000,00
153	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL II Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n GAYATRI,S.Pd	28.000.000,00
154	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PAYUNG LESTARI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HENNY, S.Pd	6.500.000,00
155	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MARRANG SUNGGU Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NORLENA, S.Pd	11.500.000,00
156	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL BINA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Maska	12.000.000,00
157	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK KARTIKA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Febby Yurinda, SE	16.000.000,00
158	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD MEKAR BERSERI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Ernawati, S.Pd	9.000.000,00
159	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS RIMBATriwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n DESI YANTI,S.Pd	12.500.000,00
160	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TKIT ASH-SHOHWAH 2 Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n DEWI SARTIKA, SE	75.500.000,00
161	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA SPS MUTIARA HATI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n UMI ROSIDAH	19.500.000,00
162	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL-AMANAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ANDI FAKHRUN NUR AKHAR, SE	13.000.000,00
163	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB NURUL AMIN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Nurhikmah, S.Pd	17.000.000,00
164	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB QURROTA A'YUN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI NUR AISYAH	8.500.000,00
165	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA RA AL- IHSAN I Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HAFSAH SULAIMAN, S.Pd	38.000.000,00
166	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB ITAM JUNA DI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Sarinah, S.Pd	43.500.000,00
167	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB SRI JEJEKI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HUSNI	21.500.000,00
168	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BUAH HATI BUNDA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Seri Azizah, S.Pd	8.500.000,00
169	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK IKHSAN BATIWAKKAL Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MARHAWAIDA	24.000.000,00
170	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB SERUNAI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RUSDIANA	12.000.000,00
171	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK NURUL MUHAJIRIN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n QITROTUL HIDAYAH,S.Pd	22.000.000,00
172	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK DHARMA PERTIWI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI UMI NADUHOH	6.500.000,00
173	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK MANDIRITriwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n IIN EVAYANTI, S.Pd	22.500.000,00
174	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD AL LATIF Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ELIS NINGRUM, S.Pd.AUD	12.500.000,00
175	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA VI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI AFSYAH, A.P.A.B	37.000.000,00
176	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Pengawasan Penataan Halaman dan Pagar TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0002	20.601.600,00
177	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Pengawasan Teknis Renovasi TK Tunas Harapan Baru Merancang Ilir Gunung Tabur Keg. 03.0051	14.112.000
178	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Pengawasan Rehab TK Kemala Bhayangkari Keg. 03. 0051	20.102.100
179	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Renovasi TK Tunas Harapan Baru Merancang Ilir Gunung Tabur Keg. 03.0051	165.999.000
180	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS BANGSA III Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Femmy Pongoh, S.Pd.AUD	13.000.000,
181	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TERATAI I Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n A. RAFIKA DURI, S.Pd	14.500.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
182	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA PAUD TERPAUD AL-HIDAYAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n KALIMAH, S.Pd	19.000.000,00
183	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TERATAI II Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RUSMIATI, S.Pd	26.000.000,00
184	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MUARA HARAPAN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SRI DAMAYANTI	9.500.000,00
185	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK IBNU KATSIR Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MURNIYATI, SE	38.000.000,00
186	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TKIT IBNU MAJAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ISNAYNI SAHABUDDIN, ST	15.000.000,00
187	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD ANNORA PELANGI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n AGUSTINA RINING	20.500.000,00
188	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AR - RAUDHOH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Siti Umamah, S.Pd	56.500.000,00
189	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BELIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Safriah, S.Pd	19.500.000,00
190	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB QOLBUN SALIM Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n KHADIJATUL JANNAH	18.500.000,00
191	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TERATAI KUNING Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n BERNADETHA DUALISE DA SILVA	15.000.000,00
192	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MUTIARA BUNDA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITTI MARWAH, S.Sos	14.500.000,00
193	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TKIT AZ-ZAHRO Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ISTI AZIZAH, S.Pd	65.500.000,00
194	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK MASARI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITTI AINI	11.500.000,00
195	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA II Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n DAMAYANTI	21.500.000,00
196	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA XI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ARIATI, S.Pd	19.000.000,00
197	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK DARUL ULUM Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MEILANI, S.Pd	66.000.000,00
198	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK Annisa V Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011	29.500.000,00
199	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB GEMILANG Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N SUHERNI	22.500.000,00
200	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA X AL HIDAYAH Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N RATNAWATI, S. Pd	9.500.000,00
201	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB CUT NYAK DIEN Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N ARDIAH, S. Pd	13.000.000,00
202	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BARINTAK Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N HASNIAH, S. Pd	13.000.000,00
203	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BANGUN PINTAR Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Martina, S.Pd	9.500.000
204	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB SEHAT CERIA Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N ANDI SURIANI	22.000.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
205	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA XII Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Dian Afriani, S.Pd	13.500.000,00
206	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB ANAK SHOLEH Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N SAHRIAH, HS	14.500.000,00
207	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS MULYA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SYERLI KARTIKA	21.500.000,00
208	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK HARVEST Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NOLA SUMBRA, S.Pd	18.500.000,00
209	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA IX Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI SUNARIYAH	6.000.000,00
210	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB AL-WILDAN Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MEILANI	18.500.000,00
211	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB KARTIKA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Drs.M. YUSUF AMIN	28.000.000,00
212	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA POS PAUD GIDEON Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n MEDIATRIS LAPU' RURA	9.000.000,00
213	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA RA.UMDI BIDUK - BIDUK Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Rohani, S.Pd	22.500.000,00
214	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB BANGUN MANDIRI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n RIKA HARTATI, S.Pdi	9.500.000,00
215	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK. ANNISA III Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SITI KHAIRIAH	15.000.000,00
216	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS PERTIWI VI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HARINI, S.Pd	6.000.000,00
217	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB HARVEST Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NOLA SUMBRA, S.Pd	5.500.000,00
218	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK KARTIKA V-13 Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n IRAWATI, S.Pd	16.000.000,00
219	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK AL BAROKAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Ery Puspita, S.Pd	12.000.000,00
220	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK MUTIARA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n SRI WAHYUNI, S.Pd.GR	33.000.000,00
221	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TKIT AL-HUDA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HASNAWATI	36.000.000,00
222	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB ANAK CERIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Suriyah, S.Pd	22.000.000,00
223	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Rehab TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0051	398.892.000,00
224	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0002	Pembayaran 100% Penataan Halaman dan Pagar TK Kemala Bhayangkari Keg. 03.0002	355.850.000,00
225	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PANCALUNGA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n HAJRAH, S.Pd	15.500.000,00
226	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB PERMATA HATI Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Eleana, S.Pd	39.000.000,00
227	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB HARAPAN KITA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Andi Nisbawati, SE	6.500.000,00
228	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB YAA BUNAYYA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ALMARATUN MUTHMAINNAH,SH	21.500.000,00
229	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TPA SALIMAH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Agustinah, S.Pd	9.000.000,00
230	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KBIT AZ ZAHROH Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n ASRIANI	28.000.000,00
231	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB ANGGREK CERIA Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Dahlia	14.500.000,00
232	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB MANDALIKE Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n NUR SUHAINI, S.Pd	6.500.000,00
233	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK TUNAS MELATI Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.n Ade Tanjung Sari	15.000.000,00
234	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA TK ANNISA XIII Triwulan I s.d IV (Januari sd Desember) TA. 2025 Keg. 03.0011 a.n Halimatus Sakdiyah	17.000.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
235	Dinas Pendidikan	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOPDA KB TUNAS INDONESIA Triwulan 1 s/d IV (Januari-Desember) Ta. 2025 Keg. 03.0011 A.N SRI RAMADANIA, S. Pd	4.500.000,00
236	Dinas Kesehatan	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (PALANG MERAH INDONESIA)	750.000.000,00
237	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Perencana Mako Ditsamapta 3 Lantai T.A. 2025 (APBD - Kab)	999.480.408,00
238	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Talisayan	255.000.000,00
239	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Biatan Lempake	255.000.000,00
240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Balikukup	255.000.000,00
241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Batu Putih	255.000.000,00
242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Gayam	255.000.000,00
243	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Teluk Bayur	255.000.000,00
244	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Buyung Buyung	255.000.000,00
245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang Kampung Semurut	255.000.000,00
246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Sukan Tengah	255.000.000,00
247	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap I 60% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Sambaliung	255.000.000,00
248	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (Km.2 RT.09) Tahap I T.A. 2025 (APBD - Kab)	2.792.693.537,00
249	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 20 % Pekerjaan MAKO DITSAMAPTA 3 LANTAI	9.064.838.000,00
250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Lanjutan Rehab Rutan	22.588.500,00
251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 20 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Mako Ditsamapta 3 Lantai	200.017.560,00
252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Sukan Tengah	127.500.000,00
253	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Sambaliung	122.500.000,00
254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Sambaliung	5.000.000,00
255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Talisayan	127.500.000,00
256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Biatan Lempake	127.500.000,00
257	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Buyung Buyung	127.500.000,00
258	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Semurut	127.500.000,00
259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Gayam	127.500.000,00
260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Teluk Bayur	127.500.000,00
261	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Balikukup	127.500.000,00
262	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap II 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Batu Putih	127.500.000,00
263	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 31,96 % Pekerjaan Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (Km.2 RT.09) Tahap I	1.815.250.799,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025
Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
264	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 20 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (KM. 2 RT. 09) Tahap I	72.484.154,00
265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Rehab Jaringan Listrik Kantor Kejaksaan	199.378.622,00
266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehab Jaringan Listrik Kantor Kejaksaan	24.975.000,00
267	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termin Ke 2 (45 %) Pekerjaan Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (Km. 2 RT. 09) Tahap I	907.625.399,00
268	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Sambaliung	42.500.000,00
269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 30% Pekerjaan Mako DITSAMAPTA 3 LANTAI	10.197.942.792,00
270	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 75% Pekerjaan Pembangunan Gedung mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (Km.2 Rt.09) Tahap 1	1.943.901.610,00
271	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 70,7953 % Pekerjaan Pembangunan Gedung KPU	3.131.378.000,00
272	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Teluk Bayur	42.500.000,00
273	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kelurahan Gayam	42.500.000,00
274	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan Hutang Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Beserta Meubelair Sat Reskrim dan Sat Narkoba Mako Polres KM 5	5.467.419.712,00
275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kepala Pengadilan Agama Tanjung Redeb	89.700.210,00
276	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Buyung Buyung	42.500.000,00
277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Semurut	42.500.000,00
278	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Batu Putih	42.500.000,00
279	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Balikukup	42.500.000,00
280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 50% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Tanjung Batu (APBD-P) TA. 2025	185.546.194,00
281	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 50% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Kasai (APBD-P) TA. 2025	194.323.708,00
282	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Konsultan Perencana Peningkatan Sarpras Kejati Kaltim	97.669.344,00
283	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Pengadaan Interior Rumdinjab Kapolres	27.965.118,00
284	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Rehab Rumdinjab Kapolres	27.965.118,00
285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Konsultan Pengawas Lanjutan Rehab Rutan	20.102.100,00
286	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Lanjutan Rehab Rutan	176.909.400,00
287	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Uang Muka 30 % Pekerjaan Peningkatan Sarpras Kejati Kaltim	2.297.381.149,00
288	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Rehab Aula Pramuka	28.007.520,00
289	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Rehab Rumah Dinas Dandim	23.310.000,00
290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Hutang Pemagaran dan Gapura Kodim (APBD - P)	549.581.185
291	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 75 % Pekerjaan Mako Ditsamapta 3 Lantai	7.321.434.763,00
292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 75 % Pekerjaan Mako Ditsamapta 3 Lantai	7.975.479.292,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5				
NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
293	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Sukan Tengah	42.500.000,00
294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Hutang Lanjutan Pembangunan Masjid Mapolres	616.067.522,00
295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	UM 30% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kelurahan Sambaliung (APBD-P) TA. 2025	112.004.070,00
296	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Penataan Kantor dan Halaman Polres Berau	97.801.511,00
297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Talisayan	42.500.000,00
298	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Tahap III 10% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Penunjang ODF Kampung Biatan Lempake	42.500.000,00
299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Perencanaan Master Plan Polsek Tanjung Redeb	89.765.700,00
300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (KM 2 RT. 09) Tahap I	289.936.618,00
301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termin 1 Pekerjaan Pengadaan Video Tron Outdoor Ktr Kapolres	1.588.881.750,00
302	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung KPU	221.112.000,00
303	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan konsultan Perencana Asrama Kodim	226.318.344,00
304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Pembangunan Gedung Mako Kompi 3 Batalyon C Satbrimob Polda Kaltim (KM.2 RT.09) Tahap I	2.030.069.655,00
305	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Rehab Rumah Jabatan Dandim	123.881.692,00
306	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Rumah Dinas Polres Berau	92.518.500,00
307	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Sat Polairud Polres Berau	193.374.876,00
308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Rehab Rumdinjab Kapolres	198.827.418,00
309	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Pengadaan Interior Rumdinjab Kapolres	199.279.000,00
310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencanaan Sarpras Kejaksaan Negeri	302.251.890,00
311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Tanjung Batu (APBD-P) TA. 2025	185.546.195,00
312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kampung Kasai (APBD-P) TA. 2025	194.323.710,00
313	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehab Rumdinjab Kapolres	22.106.421,00
314	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Rehab Rumah Dinas Dandim	13.113.000,00
315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Penataan Kantor dan Halaman Polres Berau	78.861.504,00
316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Sarpras Kejati Kaltim	336.974.688,00
317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Peningkatan Sarpras Kejati Kaltim	5.612.514.339,00
318	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Polsubsektor Biatan	99.600.401,00
319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pengadaan Interior Rumdinjab Kapolres	22.106.421,00
320	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 97 % Pekerjaan Mako Ditsamapta 3 Lantai	8.499.206.137,00
321	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus Beserta Meubelair Satreskrim dan Satnarkoba	222.275.280,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
322	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Perwira dan Fasilitas Umum Lainnya	99.608.958,00
323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Masjid Polres Berau	96.982.920,00
324	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Konsultan Perencanaan Penataan Rehab Kawasan Kantor Kodim	99.402.942,00
325	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Lanjutan Rehab Aula Pramuka	193.806.968,00
326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Lanjutan Rehab Aula Pramuka	18.470.400,00
327	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Pelayanan Khusus Beserta Meubelair Satreskrim dan Satnarkoba	4.548.856.397,00
328	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Polres Berau	2.323.093.800,00
329	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Mako Ditsamapta 3 Lantai	800.070.240,00
330	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung KPU	1.566.472.000,00
331	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	MC 100% Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Di Kelurahan Sambaliung (APBD-P) TA. 2025	261.342.830,00
332	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.1.05.05.03.0002	Termyn 100 % Pekerjaan Penataan Kantor dan Halaman Polres Berau	5.673.756.250,00
333	Dinas Pangan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan pada Totok Sariyono (Direktur CV. Pramita Adhipramana) sesuai Surat Pesanan No : EP-01/K1AJ27S77P125M7WQF81GOZC Tanggal 31 Juli 2025	199.813.200,00
334	Dinas Pangan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada CV. PRAMITA ADHIPRAMANA berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor EP-01K37J4TG056G8YKT2BXNT4AZ5 tanggal 25 Agustus 2025 (2.09.03.2.01.0006)	66.480.000,00
335	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Motor Roda 3 sesuai SP No : 01/PPK-Penyediaan/Roda 3 /DLHK/VI/2025, tgl 26 Juni 2025 Pada PT. KINARYA ADIKA ASKARI	448.200.000,00
336	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	KONSULTAN PERENCANAAN PEMBUATAN TPS 3R DI KAMPUNG GIRING-GIRING PADA CV. KAIZEN KONSULTAN	12.618.000,00
337	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	KONSULTAN PERENCANAAN PEMBUATAN TPS 3R DI KAMPUNG GIRING-GIRING PADA CV. KAIZEN KONSULTAN	1.800.000,00
338	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Pembuatan Bangunan TPS 3R di Kampung Giring-Giring Sesuai SPK Nomor : 03/PPK/TPS3R-GIRING-GIRING/Sapras/DLHK/VIII/2025	194.029.000,00
339	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Konsultan Pengawasan Pembuatan TPS 3R di Kampung GiringGiring Sesuai SPK Nomor : 04/PPK-PGWS PEMB.TPS 3R GIRING-GIRING /VIII/2025	12.654.000,00
340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Konsultan Perencanaan Pembuatan Bangunan (TPS 3R) di Kamp. Bebanir Bangun Kec. Sambaliung Pada CV. HASTA PRIMA ARADHA	14.325.000,00
341	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Motor Roda 3 Sesuai SP Nomor EP-01K8CS420HXB7MABDX8QNM4HFT Pada CV. Morga Makmur Motor (Kode Bayar 0195400486060)	199.200.000,00
342	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Mesin Pencacah Sampah Organik sesuai SP No : EP 01K6EXKWC82P83P94TCTA46J, Pada PT.ARQOM TECHNOLOGY INNOVATION (Kode Bayar 0195400486108)	44.922.810,00
343	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Mesin Pencacah Organik,Belanja Tangki Air Plastik, Mesin Air / Sedotan, dan Tong Sampah sesuai SPK No 03/PPK/Tanki Air-Masn Air-Tong Sampah-MS Pencacah/DLHK/XI/2025, tgl 17 November 2025 Pada CV BUJANGA NUGRAHA JAYA	66.245.910,00
344	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Pembuatan Bangunan (TPS 3R) di Kamp. Bebanir Bangun Kec. Sambaliung sesuai SPK No :03/PPK/ TPS3R-Bebanir Bangun /Sapras/DLHK/XI/2025, tgl 17 November 2025,Pada CV BATUAH ABADI	194.474.625,00
345	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.1.05.05.03.0002	Konsultan Pengawasan Pembuatan Bangunan (TPS 3R) di Kamp. Bebanir Bangun Kec. Sambaliung sesuai SPK No : 03/PPK/DLHK/PWS BANGUNAN(TPS 3R)/XI/2025, tgl 17 November 2025, Pada CV KAIZEN KONSULTAN	12.500.000,00
346	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Berau Tahun 2025	700.000.000,00
347	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang untuk Pramuka (Genset) pada CV. Green Turtle Sesuai Bukti Terlampir	20.535.000,00
348	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pengadaan Peralatan Cabor ISSI) An. Rekanan CV. MANDIRI KARYA PERKASA	223.950.000,00
349	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Belanja Pengadaan Peralatan Cabor KICK BOXING) pada CV. SATRIA BERMUDA 2025.	99.289.500,00
350	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (BelanjaPeralatan Cabor Gateball) pada CV. NAJAH KARUNIA 2025	72.971.400,00
351	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pengadaan Peralatan Cabor POBSI) pada CV. NAJAH KARUNIA 2025	54.090.280,00
352	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pengadaan Peralatan Cabor POBSI) pada CV. NAJAH KARUNIA 2025.	95.759.720
353	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pengadaan Peralatan Cabor PELTI) pada CV. BERKAH RAHMAT PERKASA 2025.	79.698.000
354	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, (Pengadaan Peralatan Cabor JUDO) pada CV. SATRIA BERMUDA, Nomor Pesanan EP-01K84SWAXFD13V6VEW65TG567F Tanggal 22 Okt 2025.	104.184.600,00
355	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, (Pengadaan Peralatan Cabor BULUTANGKIS) pada CV. BATARA WAJO, Nomor Pesanan EP-01K8D0AEFBPYDGV57W46T4HGR1 Tanggal 25 Okt 2025.	82.961.400,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
356	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba, (Pengadaan Peralatan Cabor TAEKWONDO) pada CV. BATARA WAJO, Nomor Pesanan EP-01K8MNZ7DQ2AYSQMEYGXVCW3QA Tanggal 30 Okt 2025.	46.420.200,00
357	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.03.0002	Pembangunan Lapangan Bola Kp.Labanan Makarti Kec. Teluk Bayur (Pembayaran Utang Dispora T.A 2024) pada CV. PUTRA KEMBAR BETON	103.488.998,00
358	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba,(Pengadaan Peralatan Cabor SKY AIR pada CV. BATARA WAJO, Nomor Pesanan EP-01KAYXWS41SSVQ6VKYTZHN7DBQ Tanggal 27 Nov 2025.	96.570.000,00
359	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Bersifat Nirlaba (Pengadaan Peralatan Cabor PASI) pada CV. ABADI JAYA UTAMA, Nomor Pesanan EP-01KADE366DDCXJYM964MQX44X2 23 Nov 2025.	156.443.999,00
360	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Sound System dan Panggung Senam Pagi CerianTepian Segah (Car Free Day) pada CV. GREEN TURTLE 2025	95.904.000,00
361	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Pengadaan Paguyuban Turonggo Adi Joyo)	97.684.000,00
362	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Microphone Wireless Hand Held Dusen Beng), Surat Pesanan No : EP-01KAWV49PROHXBZTNZMMWKN1H Tgl. 25 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486226) Inaproc	11.988.000,00
363	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Gitar Bass), Surat Pesanan No : EP-01KASXWFEMGQGKAJRE60F67PNT Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486302) Inaproc	4.995.000,00
364	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Mic Kabel (3 Unit 1500 GR), Surat Pesanan No : EP-01KAWTB9AN28T9CWS2VTQCZB76 Tgl. 25 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486286) Inaproc	2.380.950,00
365	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Stand Mic), Surat Pesanan No : EP-01KAAEZYSYG78W65MJ4N5WGB2PA Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486393) Inaproc	3.563.100,00
366	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Gitar Akustik), Surat Pesanan No : EP-01KAJ4FQ6GNAR3W9H93K61PTJT Tgl. 21 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486318) Inaproc	4.995.000,00
367	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Stand Keyboard), Surat Pesanan No : EP-01KAADHVK52QH0WVND66CPSVH Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486337) Inaproc	2.974.800,00
368	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Kabel Sound Jack), Surat Pesanan No : EP-01KAJ3MX0ZDQ1ZTBJ22FX2FV5 Tgl. 21 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486346) Inaproc	4.395.600,00
369	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Gitar Electric), Surat Pesanan No : EP-01KAJ45SDC35YR067C4D5TBR89 Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486379) Inaproc	7.381.500,00
370	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Terminal Soket), Surat Pesanan No : EP-01KASYFV4K01M267F84NE7RXQG Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400488288) Inaproc	719.280,00
371	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Terpal Plastik 6x8 M), Surat Pesanan No : EP-01KAT6D8V4CATARY6WVOR0VHVA Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400488314) Inaproc	1.900.320,00
372	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Kabel Speaker Jack Spikon), Surat Pesanan No : EP-01KAJ43FBV0P59R0D5JB3S219R Tgl. 25 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400486363) Inaproc	3.996.000,00
373	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Kursi Plastik), Surat Pesanan No : EP-01KAAC2K97SMWB8X29DY2B8605 Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523384) Inaproc	1.798.200,00
374	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Speaker Aktif Konzert), Surat Pesanan No : EP-01KBC520CD2Y13N1YQT5FV1F8A Tgl. 01 Desember 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523417) Inaproc	31.968.000,00
375	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Tenda Lipat 3x6 M), Surat Pesanan No : EP-01KAABTVNMHNKYNXPY21YARP3N Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523467) Inaproc	2.997.000,00
376	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Kabel Terminal), Surat Pesanan No : EP-01KAWVA361SR13FBZP4FQ2Q8TK Tgl. 26 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523543) Inaproc	1.998.000,00
377	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Saxophone Digital), Surat Pesanan No : EP-01KASZA13S65KKX3Y90SWZ3V3Z Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523486) Inaproc	5.994.000,00
378	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Drum Set Electrics), Surat Pesanan No : EP-01KAZACSYHJ2Q5KNR8DPM3B98A Tgl. 26 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523363) Inaproc	15.997.320,00
379	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Lighting Beam), Surat Pesanan No : EP-01KAACZA2AJZ0P8HSNJWAKCXBE Tgl. 18 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523354) Inaproc	5.994.000,00
380	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Subwoofer Aktif Konzert), Surat Pesanan No : EP-01KBC5748W38431KYWWZ3DZ8Q6 Tgl. 01 Desember 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523427) Inaproc	31.990.200,00
381	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Keyboard Yamaha), Surat Pesanan No : EP-01KAWT749REZVES8SDKZ8STFVA Tgl. 26 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523532) Inaproc	17.982.000,00
382	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Keyboard Roland), Surat Pesanan No : EP-01KB1M289MZEQJ4213Z6HASRZH Tgl. 28 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523449) Inaproc	15.995.100,00
383	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Mixer Ashley), Surat Pesanan No : EP-01KAJ4A3EBR6VCVWPD79C0MT1Y Tgl. 21 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523328) Inaproc	5.994.000,00
384	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (Paket Par LED Panggung), Surat Pesanan No : EP-01KAAHD0F3W6M2KV9WMB38CN60 Tgl. 24 November 2025 An. CV. BAM (Kode Bayar : 0195400523510) Inaproc	9.795.750,00
385	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Gunung Tabur-Sambaliung) sesuai dengan SPK No. 523/G.1/PDSPP. 03.0002 /44/II/2025 tanggal 17 Februari 2025	57.609.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
386	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Jasa Perencanaan Teknis Pembuatan Lantai Jemur (Batu Putih) sesuai SPK No. 523/G.1/PDSP. 03.0002 /46/ II /2025 tanggal 28 Februari 2025	48.618.000,00
387	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Genset sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-74/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025, an. CV. GG Jaya Mandiri	122.877.000,00
388	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kamp. Payung-Payung) sesuai dengan SP No. 523/G.1/PDSP. 03.0002 /129/V/2025 tanggal 26 Mei 2025	27.839.400,00
389	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Kampung Teluk Semanting) sesuai dengan SP. No. 523/G.1/PDSP. 03.0002 /157/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025	17.360.800,00
390	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Tempel sesuai Surat Pesanan Nomor : #EP-01JXKDZ43DD3F28KSNZQM3F5 Tanggal 16 Juni 2025 An. CV. Solusi Klik Tanjung Pura	465.534.000,00
391	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar belanja Barang yg akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Trammel Net sesuai SPK No. EP-01JYZGA8ZQWRNXTT8X92EWC0E Tanggal 2 Juli 2025, An. CV. Syifa Anugerah	264.957.000,00
392	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Kapal sesuai SPK No. EP-01JZQ5RQCZ64RQ07RDYD9R28H Tanggal 10 Juli 2025, An. CV. Ondihon Mas Globalindo	887.112.000,00
393	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja Barag yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Perahu Beserta Mesin Ketinting dan Alat Tangkap Ikan sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-132/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025, An. CV. Batara Wajo	183.111.200,00
394	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja Barag yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Perahu Beserta Mesin Ketinting dan Alat Tangkap Ikan sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-132/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025, An. CV. Batara Wajo	15.356.800,00
395	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja barang yg akan diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Ketinting sesuai Surat Pesanan No : EP-01K337WVEW3VB7GBQ7X5F481HN Tanggal 21 Agustus 2025, an. CV. Batara Wajo (Kode bayar: 0195400260814)	432.178.500,00
396	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras budidaya kolam dan kolam terpal sesuai surat pesanan EP-01K19V0BM05XCBG0M1602F7G4 tanggal 5 Agustus 2025 (kode bayar 0195400303821)	92.915.724,00
397	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras budidaya kolam dan kolam terpal sesuai surat pesanan EP-01K19V0BM05XCBG0M1602F7G4 tanggal 5 Agustus 2025 (kode bayar 0195400303821)	300.733.476,00
398	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Gearbox dan Baling-baling Kapal sesuai SPK No 523/G.1/P3T-408/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, an. CV. Seibun Prima Sukses	132.756.000,00
399	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Perahu Fiber sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-312/IX/2025 Tanggal 4 September 2025, An. CV. Syifa Marine	164.280.000,00
400	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - belanja sapras UPR sesuai surat pesanan EP-01K5D42PB34JBWPXE06ZE0H0SR tanggal 19 September 2025 (kode bayar 0195400341147)	22.377.440,00
401	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Bayar Belanja yg akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Ketinting (lengkap) dan Jaring Insang (lengkap) Surat Pesanan No : EP-01K9C1SP786XN9FYMHX1DZ58GW Tanggal 10 November 2025, An. CV. Batara Wajo (Kode Bayar : 0195400476784)	198.523.500,00
402	Dinas Perikanan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras budidaya kolam terpal sesuai surat pesanan EP-01K9TX7451QYJ0J15RR95SP79Q tanggal 12 November 2025 (kode bayar 0195400500022)	81.741.150,00
403	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Perencanaan teknis jalan usaha tani pada CV. Yasa Pratama Consultant	15.207.000,00
404	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Perencanaan teknis rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada CV. Yasa Pratama Consultant	15.207.000,00
405	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Perencanaan kontruksi jalan usaha tani pada CV. Diayu Consultant	15.251.000,00
406	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Belanja Hibah Alsintan pada CV . RISQI MELATI JAYA sesuai SPK Nomor: 521.4/225/SPK/DTPHP.4/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.	120.789.000,00
407	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dam lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pengawasan teknis pembangunan jalan usaha tani pada CV. Marga Consultant Associate	9.351.000,00
408	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dam lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pembangunan jalan usaha tani pada CV. Dwi Sukses	193.800.000,00
409	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Pada CV. Karya Hidup Sentosa sesuai Surat Pesanan No: #EP-01JW355TEXPQNXIC1HD8X42 tanggal 10 Juni 2025.	452.352.000,00
410	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan -Belanja Hibah Alsintan Cultivator di Kab.Berau pada CV.Rizqi Melati Jaya sesuai dengan SPK Nomor: 521.4/315/SPK/DTPHP.4/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025.	105.228.000,00
411	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba ,Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan (Pupuk hayati Majemuk)pada PT. PABRIK GULA RAJAWALI (Nanik Soelistiyawati) sesuai Surat Pesanan : #EP-013XKBNB6ZRGXMYDGGQIAC39MX tanggal 17 Juni 2025.	733.013.475,00
412	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat kemasyarakatan - pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada CV. Marga Consultant Associate	10.073.000,00
413	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada CV. Rata Kanan Abadi	119.720.000,00
414	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani pada CV. Rata Kanan Abadi	59.770.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
415	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pembangunan jalan usaha tani pada CV. Mitra Jaya Kontraktor	181.491.000,00
416	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pembangunan jalan usaha tani pada CV. Mitra Jaya Kontraktor	13.358.000,00
417	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pengawasan kontruksi jalan usaha tani pada CV. Rakarya teknik consultant	10.073.000,00
418	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang bersifat Sosial Kemasyarakatan (213.950 kg Pupuk NPK 16-16-16) pada PT CIPTO LANGGENG JOYO (H.Sulton Nawawi) Sesuai Surat Pesanan No: EP-01JZ2FSHGKADHG9B24ET5TPTB tanggal 3 Juli 2025.	2.300.369.625,00
419	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang bersifat Sosial Kemasyarakatan (213.950 kg Pupuk NPK 16-16-16) pada PT CIPTO LANGGENG JOYO (H.Sulton Nawawi) Sesuai Surat Pesanan No: EP-01JZ2FSHGKADHG9B24ET5TPTB tanggal 3 Juli 2025.	732.358.726,00
420	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Perencanaan kontruksi pintu air pada CV. Duta Indo Karya	13.384.000,00
421	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada PT Mitra Balai Industri (Andar Nugraha Sofian) sesuai SP No: #5EP-01JXEDBG10A9BA469HZYK8SK47 tanggal 30 Juni 2025.	48.882.000,00
422	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada PT Mitra Balai Industri (Andar Nugraha Sofian) sesuai SP No: #5EP-01JXEDBG10A9BA469HZYK8SK47 tanggal 30 Juni 2025.	421.631.000,00
423	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (2 Unit MBI YMM20 YANMAR 23 HP) pada PT Mitra Balai Industri (Andar Nugraha Sofian) sesuai SP No: #EP-01JXEFXZ79X7MS76GDYJBVFJJ tanggal 30 Juni 2025.	229.744.000,00
424	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (1 Unit Corn Combine) pada PT. Pura Barutama (Bambang Handoko) sesuai SP No: EP-01JYGDKYMHR8219JM8CMEJGTH	435.752.700,00
425	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Bibit Ternak Sapi pada CV. SINAR ALAM JAYA sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01JZSPV8B8AZQB8B8XDNQ9W6EB Tanggal 14 Juli 2025 An. Adi Prawoto	779.500.000,00
426	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Chopper Rumput pada PT Mitra Balai Industri sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01K30K6EHW8R1QJA4D4AA2F4NK Tanggal 25 Agustus 2025 An. Andar Nugraha Sofian	119.976.002,00
427	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Bibit Ternak Kambing pada CV. BERKAH TERNAK PACITAN sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01K44K5WA0SYBDCWERTODZQAXQ Tanggal 16 September 2025 An. Mudhakir	243.638.150,00
428	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa 1 Unit Kandang Kambing pada CV. AVIA LESTARI JAYA sesuai Surat Pesanan Nomor : 027/521/DTPHP.3/VII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 An. Alvia Dwi Samudra	49.506.000,00
429	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang diserahkan kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - perencanaan dam parit pada CV. Diayu Consultant	15.204.000,00
430	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Blnj. Hibah Brg. kpd. Bdn. dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Brsft. Sosial Kemasy. - Benih Jagung Hibrida Pertiwi 3 pada PT. Agri Makmur Pertiwi sesuai SP dgn. No. : EP-01K2KQ7TX2QCTSVB7R6YEJQXS0 tgl. 15 Agt 2025 (Kode Bayar : 0195400349127) INAPROC	452.257.575,00
431	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.02.0002	Biaya Perencanaan Teknis Kandang Sapi - pada CV. Hasta Prima Aradha sesuai SPK Nomor : 027/696/DTPHP.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 An. Ismanto	27.899.850,00
432	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga Pembangunan Rumah Dryer	70.545.000,00
433	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Kemasyarakatan - Bibit Durian pada CV. Mitra Persada sesuai SP No. : EP-01K8A3N7KT4GBKR603Z6F7R70 tgl. 28 Oktober 2025 (Kode Bayar : 0195400397417)	72.000.000,00
434	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Benih Bawang Merah pada UD. PAREWA MULIA sesuai SP No. : EP-01K8A4V7EMS6PGN4PA17QZB58K-AD02 TGL. 28 Oktober 2025 (Kode Bayar : 0195400374181) INAPROC	60.805.000,00
435	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pengawasan Kontruksi Pintu Air pada CV. Kaizen Konsultan	7.448.000,00
436	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pembuatan Pintu Air pada CV. Adara Tri Jaya	46.616.000,00
437	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - Pembuatan Pintu Air pada CV. Adara Tri Jaya	27.194.000,00
438	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Benih Cabe Keriting dan Benih Cabe Rawit pada CV. Avia Lestari Jaya sesuai SPK No. : 521.2/287/DTPHP2/XI/2025 Tgl. 13 November 2025	33.244.500,00
439	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hubah Barang berupa Chopper Rumput pada CV. Revano Karya Bhakti sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01K93Q7A31P9E4F7RBA9HPJVM Tanggal 4 November 2025 An. Rahman Rahim (Kode Bayar : 0195400481081 INAPROC)	86.580.000,00
440	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang berupa Bibit Ternak Kambing pada CV. BERKAH TERNAK PACITAN sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01K9CHHZ5XY8KFKOCRCR892X88 Tanggal 07 November 2025 An. Mudhakir (Kode Bayar : 0195400509380) Inaproc	72.150.000,00
441	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - belanja hibah alsintan kendaraan roda 3 dan RMU di Kab.Berau pada CV.Pramita Adhipramana sesuai dengan SPK no: 521.4/777/SPK/DTPHP/XII/2025 tanggal 04 Desember 2025.	69.652.000
442	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (2 Unit Combine Harvester Besar Padi MAXXI BIMO 110 PLUS) pada PT . Corin Mulia Gemilang an. Ir. Hari Prabowo sesuai SP No. EP-01K8T2QAEK5B81RY2K694STAX8 tanggal 4 November 2025. (Kode Bayar : 0195400560997)	922.465.001,
443	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Belanja Hibah Barang Kepada Masyarakat dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan -Bibit Durian pada CV. Mitra Persada sesuai SP No. : EP-01K86R3QM9K9R44ZYRRCRJQKR tgl. 30 Nov 2025 Kode Bayar : 0195400509377 INAPROC	71.200.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
444	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang berupa Biaya Pengawasan Teknis Kandang Sapi pada CV. Konstruksi Rekayasa Design sesuai SPK Nomor : 027/767/DTPHP.3/XI/2025 Tanggal 13 November 2025 An. Arlang Ibrahim	18.004.200,00
445	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Blnj Hbh Brg kpd Bdn dan Lmbg Nirlaba, Sukarela Brsft Sos Kmsay - Benih Jagung Hibrida pada PT. Agri Makmur Pertiwi sesuai SP No. : EP-01KAG2AWQ4JA6NM3C3QB45QNR tgl 20 Nov 2025 (Kode Bayar : 0195400565594) INAPROC	117.075.000,00
446	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Pengawasan Kontruksi Dam Parit pada CV. Yasa Pratama Consultant sesuai dengan SPK Nomor: 521.4/640/SPK/DTPHP.4/XI/2025 Tanggal 14 November 2025	10.045.000,00
447	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang Kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Kontruksi Dam Parit pada CV. Nata Alam Banua sesuai dengan SPK Nomor: 521.4/639/SPK/DTPHP.4/XI/2025 Tanggal 14 November 2025	173.959.000,00
448	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	TPH Blnj Benih Padi Pertiwi Inpari 42 pd PT. Agri Makmur Pertiwi sesuai SP No. : EP-01KAG7X1A7XZ17BZ7R8NZAG0S4 tgl. 21 Nov 25 / Addendum SP No. : EP-01KAG7X1A7XZ17BZ7R8NZAG0S4-AD01 tgl. 21 Nov 25 Kd Byr : 0195400575162 INAPROC	60.850.000,00
449	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah (3 Unit MBI -YMM20YANMAR23HP dan 1 Unit Power Thresher Merk MBI Tipe IP 400-PT 1000B) pada PT . PT Mitra Balai Industri sesuai SP No. EP-01K8SWMQS2AFK2BK9Y6R9DBYJO tanggal 4 November 2025. (Kode Bayar : 0195400558768)	405.999.999,00
450	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah berupa Kandang Sapi pada CV. Berau Sentosa Jaya sesuai SPK Nomor : 027/770/DTPHP.3/XI/2025 Tanggal 13 November 2025, Addendum Nomor : 027/858/DTPHP.3/XII/2025 Tanggal 12 Desember An. Murjani	234.890.012,31
451	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Alsintan Traktor Roda 2 pada CV.Rizqi Melati Jaya sesuai SPK no: 521.4/783/SPK/DTPHP.4/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025	151.737.000,00
452	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Alsintan Traktor Roda 2 Rotary dan Cultivator pada CV. Rifadiaz Sejahtera Sesuai SPK no: 521.4/780/SPK/DTPHP.4/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025	167.610.000,00
453	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Lantai Jemur Lokasi Akhir Kampung Suaran Kec. Sambaliung An.Paskal Deni Setia Jaya (CV. Sehati Jaya Makmur)	127.626.000,00
454	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK dan Pupuk Urea Lokasi Akhir Kampung Pesayan Kec. Sambaliung An. Dwi Putriani (CV. Salsabil)	193.845.500,00
455	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK dan Mesin Rumpit Lokasi Akhir Kampung Merancang Ulu Kec. Gunung Tabur An. Sunar (CV. Winda Adha)	102.100.000,00
456	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Benih Kelapa Lokasi Akhir Kampung Pилanjau Kec. Sambaliung An. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	162.250.000,00
457	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Bibit Kakao Lokasi Akhir Kelurahan Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur An. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	139.625.000,00
458	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Bibit Kakao Lokasi Akhir Kampung Teluk Semanting Kec. Pulau Derawan An. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	115.743.000,00
459	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK Lokasi Akhir Kampung Sido Bangen Kec. Kelay An. Muhammad Ridwansyah (CV. Kulanta)	169.500.000,00
460	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK,Pestisida Nabati,Hansprayer dan Gerobak Arco Segi Empat Lokasi Akhir Kampung Suaran dan Kampung Pилanjau Kec. Sambaliung, An. Muhammad Ridwansyah (CV. Kulanta)	106.745.500,00
461	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK,Pestisida Nabati,Hansprayer dan Gerobak Arco Segi Empat Lokasi Akhir Kampung Suaran dan Kampung Pилanjau Kec. Sambaliung, An. Muhammad Ridwansyah (CV. Kulanta)	34.554.500,00
462	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Mesin Hidrolik Pres dan Timbangan Gantung Digital Lokasi Akhir Kampung Sido Bangen Kec. Kelay , An.Paskal Deni Setia Jaya (CV. Sehati Jaya Makmur)	178.137.000,00
463	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Bibit kakao Lokasi Akhir Kampung Long Ayap Kec, Segah an. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	2.750.000,00
464	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Bibit kakao Lokasi Akhir Kampung Long Ayap Kec, Segah an. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	92.805.000,00
465	Dinas Perkebunan	5.1.05.05.03.0002	Pengadaan Pupuk NPK Lokasi Akhir Kelurahan Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur An. Agus Wahyudi (CV. Fachri Akbar)	192.500.000,00
466	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Katolik Paroki ST. Eugenius De Mazenod Jl. APT. Pranoto No. 766 Kec. Tanjung Redeb An. Jaria Saragi Rp. 100.000.000	100.000.000,00
467	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Kibaid Kerapatan Injil Bangsa Jl. Pembangunan I RT. 10 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb An. Yunus Barapadang Rp. 300.000.000	300.000.000,00
468	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - A' Laa Jl. Kemakmuran Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb An. H. M. Fadliansyah, SP Rp. 200.000.000	200.000.000,00
469	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Aswaja Darussalam Jl. P. Semama RT. 08 Kec. Tanjung Redeb An. Mujahid Rp. 125.000.000	125.000.000,00
470	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Jami' Al - Muhajirin Jl. Gajah Mada RT. 01 Kamp. Labanan Makarti Kec. Teluk Bayur An. Santosa Rp. 250.000.000	250.000.000,00
471	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Surau An - Nur Jl. Silo Gg. Kesuma Bangsa Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur An. Basuki Rahmat Rp. 180.000.000	180.000.000,00
472	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus TPA Baitul Athfal Jl. P. Semama No. 113 RT. 08 Kec. Tanjung Redeb An. Hj. Nikmatu Solichah, S. Pd. I Rp. 200.000.000	200.000.000,00
473	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Generasi Batiwakkal Mandiri Jl. Karang Mulyo Gg. Bijaksana Kec. Tanjung Redeb An. Rahmawati, S.S. M.Pd Rp. 400.000	400.000.000,00
474	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus YPI Ponpes Tahfidz Al - Qur'an Al - Maher Jl. Murjani III Gg. Pelopor RT. 14 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb An. H. Usman Effendy, ST. MT	250.000.000
475	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus TPA Aisyiyah Gunung Tabur An. Ahmad Basuki Rp. 200.000.000	200.000.000
476	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid At - Tanwir An. Ahmad Basuki Rp. 130.000.000	130.000.000
477	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Mujahadah Jl. Soekarno Hatta RT. 12 Kamp. Talisayan Kec. Talisayan An. Abdul Bais, S. Sos Rp. 150.000.000	150.000.000,00
478	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Jemaat GPDl Shekinah Glory Kamp. Tunggal Bumi Talisayan An. Jhonny Jufry Matindas Rp. 250.000.000	250.000.000,00

RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2025

Lampiran 5

NO	SKPD	Kode Rekening	Keperluan	Nilai
479	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Ar - Royan Kel. Gayam An. Islay, S. Pd. I Rp. 400.000.000	400.000.000,00
480	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid As - Sunnah Kel. Sambaliung An. Ervan, S. PD. I Rp. 400.000.000	400.000.000,00
481	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Jami' Al - Ikhlash Bumi Jaya Talisayan An. M. Syafi'i Rp. 250.000.000	250.000.000,00
482	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Nurussu'ada Tunggal Bumi Talisayan An. Sodikin Rp. 200.000.000	200.000.000,00
483	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Surau Al - Mujahadah Tembudan Batu Putih An. Muhammad Azhar Rp. 120.000.000	120.000.000,00
484	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Katolik Stasi St. Cristoforus Binungan An. Nikolaus Sama Rp. 150.000.000	150.000.000,00
485	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Yayasan Darul Aman Saudijah Tanjung Redeb An. Muzdalifah Rp. 433.500.000	433.500.000,00
486	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al - Ihsan Berau An. Adri Al Amin, S. Pd. I Rp. 400.000.000	400.000.000,00
487	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Muhajirin Mantaritip An. Syamsuddin Rp. 120.000.000	120.000.000,00
488	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Munir Sambaliung An. M. Amin Rp. 125.000.000	125.000.000,00
489	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Musholla Muharram Melati Jaya An. Jono Rp. 50.000.000	50.000.000,00
490	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Darul Ulum Eka Sapta Talisayan An. Abdul Rojak Rp. 160.000.000	160.000.000,00
491	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Baabus Salam Sambaliung An. Hadi Sutempo Rp. 150.000.000	150.000.000,00
492	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Hikmah An. Nurdin Rp. 350.000.000	350.000.000,00
493	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Kepada Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Berau An. DR. H. Syarifuddin, M. Pd Rp. 500.000.000	500.000.000,00
494	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja GPIB Hosiana Tanjung Redeb An. Pdt. Elmy Tumondo, S. Th Rp. 238.700.000	238.700.000,00
495	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Jami' Al - Hidayah An. Wiji Sutrisno Rp. 160.000.000	160.000.000,00
496	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Katolik Stasi Santa Maria Imakulata Suka Murya Talisayan An. Yuliana Jani Rp. 400.000.000	400.000.000,00
497	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Kelenteng Tri Dharma Thian Te Kong Berau An. Andreas Tobing Rp. 500.000.000	500.000.000,00
498	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Musholla An - Nur Tabalar Ulu An. Syamsul Bahri Rp. 250.000.000	250.000.000,00
499	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Vihara Santi Graha Berau An. Lim Hendra Hartanto Salim, ST Rp. 500.000.000	500.000.000,00
500	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Musholla Al - Jannah Talisayan An. Sultan, S. Pd Rp. 200.000.000	200.000.000,00
501	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) An. H. M. Kafrawi, AD Rp. 158.032.000	158.032.000,00
502	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Huda Kamp. Biduk - Biduk An. Hasman Rp. 250.000.000	250.000.000,00
503	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Gerakan Pantekosta (GGP) Poros Bulungan An. Ishak Sampe Manda Rp. 400.000.000	400.000.000,00
504	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Manarul Iman Sambaliung An. Iskandar Zulkarnain, SE Rp. 400.000.000	400.000.000,00
505	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hadiah Rumah Ibadah Pengurus Surau Al - Amanah Rinding An. Moh. Yusuf Rp. 93.000.000	93.000.000,00
506	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Green Bethany Tanjung Redeb An. Sungkono Hisdrianto Rp. 300.000.000	300.000.000,00
507	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Nurul Hidayah Segah An. Mas'ud Rp. 350.000.000	350.000.000,00
508	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Iman Sambaliung An. David Pamuji Rp. 300.000.000	300.000.000,00
509	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Bantuan Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Nurul A'laa Jl. Murjani II Tanjung Redeb An. Suharno, M. PD Rp. 300.000.000	300.000.000,00
510	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Nurul Yaqin Jln. Poros Talisayan RT. 02 Kamp. Biatan Kec. Biatan An. Burhan Rp. 130.000.000	130.000.000,00
511	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Masjid Al - Ansor Nurul Yasin Labanan An. H. Nuruddin Rp. 250.000.000	250.000.000,00
512	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Pondok Tahfidz Daarul Huffazh An. Abdul Rasyid Rp. 250.000.000	250.000.000,00
513	Sekretariat Daerah	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Rumah Ibadah Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan Labanan An. Anita Handayani, S. Pd Rp. 150.000.000	150.000.000,00
514	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepada Polres Berau Alat Tes Urine	45.600.000,00
515	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Berau Tahun 2025	90.000.000,00
516	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Berau Tahun 2025	84.439.864,00
517	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Gerakan Indonesia Raya Kab.Berau Tahun 2025	131.383.170,00
518	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Golongan Karya Kab.Berau Tahun 2025	148.098.411,00
519	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Keadilan Sejahtera Kab.Berau Tahun 2025	140.898.705,00
520	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Persatuan Indonesia Kab.Berau Tahun 2025	34.630.433,00
521	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Kebangkitan Bangsa Kab.Berau Tahun 2025	42.273.433,00
522	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Nasional Demokrat Kab.Berau Tahun 2025	198.954.933,00
523	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Persatuan Pembangunan Kab.Berau Tahun 2025	140.730.559,00
524	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada. Partai Demokrat Kab.Berau Tahun 2025	111.205.650,00
525	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pada Partai Hati Nurani Rakyat Kab.Berau Tahun 2025	81.833.601,00
JUMLAH				143.038.943.651,31

SALUR DANA BOSP REGULER & KINERJA SD

Lampiran 5

NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
1	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404173	SD MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB	REGULER	116.820.000	58.410.000	56.951.700	115.361.700
2	KEC. SAMBALIUNG	SD	69988765	SDS AL-QURAN WAHDAH ISLAMIYAH BERAU	REGULER	133.650.000	66.825.000	51.920.250	118.745.250
3	KEC. TANJUNG REDEB	SD	69937851	SDS ANNISA	REGULER	177.210.000	88.605.000	88.241.427	176.846.427
4	KEC. TALISAYAN	SD	69878011	SDS TELADAN PRIMA 01	REGULER	237.600.000	118.800.000	118.800.000	237.600.000
5	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404172	SD KATOLIK WR SUPRATMAN	REGULER	288.090.000	144.045.000	134.894.549	278.939.549
6	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404306	SD IT MADANI	REGULER	298.980.000	149.490.000	149.490.000	298.980.000
7	KEC. TANJUNG REDEB	SD	69937848	SDS IBNU KATSIR	REGULER	346.500.000	173.250.000	173.250.000	346.500.000
8	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404139	SD IT ASH SHOHWAH	REGULER	577.170.000	288.585.000	288.585.000	577.170.000
1	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404139	SD IT ASH SHOHWAH	KINERJA	22.500.000	0,00	22.500.000	22.500.000
2	KEC. TANJUNG REDEB	SD	30404173	SD MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB	KINERJA	22.500.000	0,00	22.500.000	22.500.000
JUMLAH						2.221.020.000	1.088.010.000	1.107.132.926	2.195.142.926

SALUR DANA BOSP REGULER SMP

Lampiran 5

NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
1	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	30404348	SMP PGRI TANJUNG REDEB	REGULER	36.300.000	18.150.000	18.150.000	36.300.000
2	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	70007831	SMP KRISTEN HARVEST	REGULER	64.130.000	32.065.000	32.065.000	64.130.000
3	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	70036595	SMP TAHFIDZUL QURAN AL-MAHER	REGULER	64.130.000	32.065.000	32.065.000	64.130.000
4	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	69786194	SMPS IT MADANI	REGULER	82.280.000	41.140.000	40.155.210	81.295.210
5	KEC. SAMBALIUNG	SMP	69991470	SMPS IBNU KATSIR	REGULER	83.490.000	41.745.000	41.745.000	83.490.000
6	KEC. TALISAYAN	SMP	70029660	SMP INSAN MULIA KABUPATEN BERAU	REGULER	85.910.000	42.955.000	42.955.000	85.910.000
7	KEC. BIATAN	SMP	69988628	SMP IT AL-ITISHAM	REGULER	125.840.000	62.920.000	62.920.000	125.840.000
8	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	30404292	SMP MUHAMMADIYAH	REGULER	163.350.000	81.675.000	81.675.000	163.350.000
9	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	30404349	SMP KATOLIK WR SOEPRATMAN BERAU	REGULER	179.080.000	89.540.000	86.296.382	175.836.382
10	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	30404242	SMP AL IHSAN	REGULER	302.500.000	151.250.000	151.250.000	302.500.000
11	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	30407713	SMP IT ASH SHOHWAH	REGULER	306.130.000	153.065.000	153.065.000	306.130.000
12	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	69786194	SMPS IT MADANI	KINERJA	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000
13	KEC. TANJUNG REDEB	SMP	70007831	SMP KRISTEN HARVEST	KINERJA	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000
JUMLAH						1.563.140.000	746.570.000	812.341.592	1.558.911.592

SALUR DANA BOSP REGULER & KINERJA

TK PAUD

Lampiran 5									
NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
1	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875813	BAITUL ATHFAL	REGULER	27.720.000	13.860.000	13.860.000	27.720.000
2	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875779	HANDAYANI 1	REGULER	21.120.000	10.560.000	10.560.000	21.120.000
3	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875774	HARAPAN INDAH	REGULER	25.740.000	12.870.000	12.870.000	25.740.000
4	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69875807	KARYA BANGSA	REGULER	20.460.000	10.230.000	8.642.100	18.872.100
5	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	70039172	KB AISYIYAH	REGULER	40.260.000	20.130.000	19.792.000	39.922.000
6	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875768	KB AL-AMANA	REGULER	17.160.000	8.580.000	8.580.000	17.160.000
7	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875760	KB AL-BINA	REGULER	15.840.000	7.914.200	-	7.914.200
8	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875780	KB AL-FURQON	REGULER	23.100.000	11.550.000	11.550.000	23.100.000
9	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875781	KB AL-MA ARIF II	REGULER	18.480.000	9.240.000	9.240.000	18.480.000
10	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875769	KB AL-MU MIN	REGULER	13.860.000	6.930.000	6.930.000	13.860.000
11	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875763	KB AL-WILDAN	REGULER	24.420.000	12.210.000	12.210.000	24.420.000
12	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875792	KB ANAK CERIA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
13	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69881327	KB ANAK CERIA JAYA	REGULER	18.480.000	9.240.000	9.240.000	18.480.000
14	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69974277	KB ANAK SOLEH	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.550.000	19.120.000
15	KEC. BATU PUTIH	PAUD	70027620	KB ANAK TERANG	REGULER	3.960.000	1.980.000	-	1.980.000
16	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69989255	KB ANGGREK CERIA	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.570.000	19.140.000
17	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69975052	KB ANNISA MAWAR	REGULER	7.920.000	3.960.000	3.960.000	7.920.000
18	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875740	KB AT-TAQWA	REGULER	28.380.000	14.190.000	14.190.000	28.380.000
19	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	70039978	KB BAKULA BARAYAK	REGULER	9.900.000	4.950.000	4.950.000	9.900.000
20	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69985735	KB BANGUN MANDIRI	REGULER	12.540.000	6.270.000	5.955.000	12.225.000
21	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69881328	KB BANGUN PINTAR	REGULER	12.540.000	6.270.000	6.270.000	12.540.000
22	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875749	KB BARINTAK	REGULER	17.160.000	8.580.000	8.580.000	17.160.000
23	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875795	KB BELIA	REGULER	7.260.000	3.630.000	-	3.630.000
24	KEC. TALISAYAN	PAUD	69875733	KB BHINEKA TUNGGAL IKA	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
25	KEC. SEGAIH	PAUD	69875790	KB BINA BALITA	REGULER	13.860.000	6.930.000	-	6.930.000
26	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875759	KB BINA HARAPAN	REGULER	10.560.000	5.280.000	-	5.280.000
27	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	69980479	KB BINA MUTIARA BUNDA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
28	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	69878743	KB BINTANG KECIL	REGULER	27.720.000	13.860.000	13.860.000	27.720.000
29	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875803	KB BUAH HATI BUNDA	REGULER	11.220.000	5.610.000	5.610.000	11.220.000
30	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875750	KB BUNGA BANGSA	REGULER	3.300.000	1.650.000	-	1.650.000
31	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69875806	KB BUNGA BANGSA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
32	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875751	KB CEMPAKA MERAH	REGULER	23.760.000	11.880.000	11.779.075	23.659.075
33	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875796	KB CUT NYAK DIEN	REGULER	17.160.000	8.580.000	8.580.000	17.160.000
34	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69971168	KB GEMILANG	REGULER	29.700.000	14.850.000	14.820.000	29.670.000
35	KEC. TALISAYAN	PAUD	69875732	KB HARAPAN BANGSA	REGULER	35.640.000	17.820.000	17.820.000	35.640.000
36	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69943101	KB HARAPAN GEMILANG	REGULER	22.440.000	11.220.000	11.220.000	22.440.000
37	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	70035076	KB HARAPAN KITA	REGULER	22.217.000	11.108.500	11.108.500	22.217.000
38	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875772	KB HAUR GADING	REGULER	42.900.000	21.450.000	21.450.000	42.900.000
39	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875776	KB IBNU KATSIR	REGULER	1.980.000	990.000	990.000	1.980.000
40	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875747	KB IKHSAN	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.282.900	18.852.900
41	KEC. KELAY	PAUD	69878742	KB ITAM JUNA DI	REGULER	57.420.000	28.710.000	27.561.600	56.271.600
42	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69988696	KB KARTIKA	REGULER	6.600.000	3.300.000	3.300.000	6.600.000
43	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69878746	KB KARTIKA	REGULER	36.960.000	18.480.000	18.428.000	36.908.000
44	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875786	KB KASTURI	REGULER	23.100.000	11.550.000	11.550.000	23.100.000
45	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	70045437	KB KIDS GENIUS	REGULER	18.480.000	9.240.000	9.240.000	18.480.000
46	KEC. TALISAYAN	PAUD	69881326	KB MANDALIKE	REGULER	8.580.000	4.290.000	4.290.000	8.580.000
47	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875833	KB MARRANG SUNGGU	REGULER	15.180.000	7.590.000	7.590.000	15.180.000
48	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875801	KB MEKAR SARI	REGULER	35.640.000	17.820.000	17.820.000	35.640.000
49	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	70027732	KB MELATI	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
50	KEC. KELAY	PAUD	69971298	KB MUARA HARAPAN	REGULER	12.540.000	3.306.800	-	3.306.800
51	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875744	KB MULIA	REGULER	31.680.000	15.840.000	15.840.000	31.680.000
52	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875777	KB MUTIARA BANGSA	REGULER	24.420.000	12.210.000	12.210.000	24.420.000
53	KEC. PULAU MARATUA	PAUD	70004528	KB MUTIARA BOHE SILIAN	REGULER	15.840.000	7.920.000	7.761.600	15.681.600
54	KEC. TALISAYAN	PAUD	69875736	KB NURUL ISLAM	REGULER	37.620.000	18.810.000	18.810.000	37.620.000
55	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875741	KB NUSA BANGSA	REGULER	33.660.000	16.830.000	16.830.000	33.660.000
56	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875748	KB NUSANTARA	REGULER	9.900.000	4.950.000	-	4.950.000
57	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875752	KB PANCALUNGA	REGULER	20.460.000	10.230.000	10.230.000	20.460.000
58	KEC. TALISAYAN	PAUD	69875734	KB PANGAAN	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
59	KEC. PULAU MARATUA	PAUD	69875743	KB PAYUNG LESTARI	REGULER	8.580.000	4.290.000	4.290.000	8.580.000
60	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875738	KB PELITA BANGSA	REGULER	29.700.000	14.850.000	14.850.000	29.700.000
61	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69986829	KB PELOPOR BANGSA	REGULER	31.020.000	15.510.000	15.310.000	30.820.000
62	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875785	KB PENERUS BANGSA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000

SALUR DANA BOSP REGULER & KINERJA

TK PAUD

Lampiran 5									
NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
63	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69875805	KB PERMATA BANGSA	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.570.000	19.140.000
64	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69875808	KB PERMATA HATI	REGULER	21.120.000	10.560.000	10.080.000	20.640.000
65	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	70010720	KB PERMATA HATI	REGULER	51.480.000	25.740.000	-	25.740.000
66	KEC. BIATAN	PAUD	69875812	KB PERMATA INDAH	REGULER	33.000.000	16.500.000	16.500.000	33.000.000
67	KEC. KELAY	PAUD	69971432	KB PERMATA MULIA	REGULER	15.381.000	7.690.500	-	7.690.500
68	KEC. TABALAR	PAUD	69875819	KB PERTIWI	REGULER	15.840.000	7.920.000	7.920.000	15.840.000
69	KEC. SEGAH	PAUD	69875788	KB PRIMA NUSANTARA	REGULER	39.600.000	19.800.000	19.404.000	39.204.000
70	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	69878744	KB QOLBUN SALIM	REGULER	24.420.000	12.210.000	-	12.210.000
71	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875761	KB QURROTA A YUN	REGULER	11.220.000	5.610.000	5.421.600	11.031.600
72	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69944247	KB SEHAT CERIA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
73	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875753	KB SERUNAI	REGULER	15.840.000	7.920.000	7.920.000	15.840.000
74	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	70004526	KB SETIA BUNDA	REGULER	7.920.000	3.960.000	3.884.400	7.844.400
75	KEC. TABALAR	PAUD	69875737	KB SRI REJEKI	REGULER	28.380.000	14.190.000	14.189.988	28.379.988
76	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69971012	KB TEGAL SARI	REGULER	43.560.000	21.780.000	21.780.000	43.560.000
77	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	70004563	KB TERATAI KUNING	REGULER	19.800.000	9.900.000	9.900.000	19.800.000
78	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69875784	KB TERKINI	REGULER	18.480.000	9.240.000	-	9.240.000
79	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69972915	KB TUNAS BANGSA	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.570.000	19.140.000
80	KEC. PULAU MARATUA	PAUD	70004530	KB TUNAS HARAPAN	REGULER	21.780.000	10.890.000	-	10.890.000
81	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875765	KB TUNAS INDONESIA	REGULER	5.940.000	2.970.000	-	2.970.000
82	KEC. BIATAN	PAUD	69875811	KB TUNAS JAYA	REGULER	48.180.000	24.090.000	24.023.400	48.113.400
83	KEC. TALISAYAN	PAUD	69990985	KB TUNAS KASIH	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
84	KEC. KELAY	PAUD	69971433	KB TUNAS KENCANA	REGULER	15.381.000	7.690.500	-	7.690.500
85	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875739	KB TUNAS MEKAR	REGULER	23.760.000	11.880.000	11.880.000	23.760.000
86	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875773	KB TUNAS MULIANA	REGULER	52.800.000	26.400.000	26.400.000	52.800.000
87	KEC. TALISAYAN	PAUD	69875735	KB TUNAS MULYA	REGULER	28.380.000	14.190.000	14.189.251	28.379.251
88	KEC. TALISAYAN	PAUD	70039069	KB YAA BUNAYYA	REGULER	28.380.000	14.190.000	13.906.200	28.096.200
89	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69971169	KBIT AZ-ZAHRO	REGULER	36.960.000	18.480.000	17.910.000	36.390.000
90	KEC. SEGAH	PAUD	69881324	MELATI	REGULER	62.040.000	31.020.000	31.020.000	62.040.000
91	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875762	MUTIARA BUNDA	REGULER	19.140.000	9.570.000	-	9.570.000
92	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875771	NURUL AMIN	REGULER	22.440.000	11.220.000	11.220.000	22.440.000
93	KEC. SEGAH	PAUD	69875787	NUSA INDAH	REGULER	23.926.000	11.963.000	-	11.963.000
94	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875802	PAUD TERPADU AL-HIDAYAH	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
95	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875822	PAUD TERPADU NUSA BANGSA	REGULER	20.460.000	10.230.000	10.230.000	20.460.000
96	KEC. SEGAH	PAUD	69949264	PAUD TUNAS CERIA	REGULER	17.090.000	8.545.000	8.327.000	16.872.000
97	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P9934545	PKBM ANGGREK PRESTASI	REGULER	11.880.000	5.940.000	-	5.940.000
98	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875832	POS PAUD AL-LATIF	REGULER	16.500.000	8.250.000	8.250.000	16.500.000
99	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875826	POS PAUD ANGGREK	REGULER	11.880.000	5.940.000	-	5.940.000
100	KEC. TABALAR	PAUD	69875820	POS PAUD ANNORA PELANGI	REGULER	27.060.000	13.530.000	13.530.000	27.060.000
101	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875830	POS PAUD CENDRAWASIH	REGULER	38.280.000	19.140.000	19.140.000	38.280.000
102	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875827	POS PAUD GIDEON	REGULER	11.880.000	5.940.000	5.940.000	11.880.000
103	KEC. BIATAN	PAUD	69875835	POS PAUD KASIH BUNDA	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
104	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875821	POS PAUD PELITA TERPADU	REGULER	27.060.000	13.530.000	13.530.000	27.060.000
105	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69943625	SPS BUNGA CEMPAKA	REGULER	33.000.000	16.500.000	16.486.200	32.986.200
106	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69985180	SPS MUTIARA HATI	REGULER	25.740.000	12.870.000	12.870.000	25.740.000
107	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406386	TK ABA III	REGULER	16.500.000	8.250.000	7.706.640	15.956.640
108	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406189	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I	REGULER	11.220.000	5.610.000	4.590.162	10.200.162
109	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406207	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL II	REGULER	36.960.000	18.480.000	18.102.646	36.582.646
110	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69940312	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV	REGULER	11.220.000	5.610.000	5.610.000	11.220.000
111	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406238	TK AKASIA	REGULER	23.100.000	11.550.000	11.550.000	23.100.000
112	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	30406391	TK AL- IKHLAS	REGULER	11.220.000	5.469.800	5.497.800	10.967.600
113	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406389	TK AL INAYAH	REGULER	32.340.000	16.170.000	16.170.000	32.340.000
114	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	70039049	TK AL-BAROKAH	REGULER	15.840.000	7.920.000	7.920.000	15.840.000
115	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875726	TK ANAK CERDAS	REGULER	38.940.000	19.470.000	19.470.000	38.940.000
116	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406223	TK ANNISA I	REGULER	21.780.000	10.890.000	-	10.890.000
117	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30406227	TK ANNISA II	REGULER	28.380.000	14.190.000	14.181.516	28.371.516
118	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406233	TK ANNISA III	REGULER	19.800.000	9.900.000	9.765.000	19.665.000
119	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406190	TK ANNISA IV	REGULER	23.760.000	11.880.000	-	11.880.000
120	KEC. SEGAH	PAUD	30406219	TK ANNISA IX	REGULER	7.920.000	3.960.000	3.853.200	7.813.200
121	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406243	TK ANNISA MAWAR	REGULER	52.800.000	26.400.000	26.400.000	52.800.000
122	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406191	TK ANNISA V	REGULER	38.940.000	19.470.000	19.470.000	38.940.000
123	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406228	TK ANNISA VI	REGULER	48.840.000	24.420.000	24.420.000	48.840.000
124	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30406220	TK ANNISA VII	REGULER	30.360.000	15.180.000	15.180.000	30.360.000
125	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406402	TK ANNISA X ALHIDAYAH	REGULER	12.540.000	6.270.000	-	6.270.000

SALUR DANA BOSP REGULER & KINERJA

TK PAUD

Lampiran 5

NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
126	KEC. TALISAYAN	PAUD	30406403	TK ANNISA XI	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
127	KEC. BIATAN	PAUD	30406209	TK ANNISA XII	REGULER	17.820.000	8.910.000	8.909.992	17.819.992
128	KEC. SEGAH	PAUD	30406221	TK ANNISA XIII	REGULER	22.440.000	11.220.000	11.200.000	22.420.000
129	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30406235	TK ANNISA XV	REGULER	17.820.000	8.910.000	-	8.910.000
130	KEC. TABALAR	PAUD	30406210	TK ANNISA XVI	REGULER	12.540.000	6.270.000	5.969.000	12.239.000
131	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30406231	TK ANNISA XVII	REGULER	13.200.000	6.600.000	-	6.600.000
132	KEC. TABALAR	PAUD	30406211	TK ANNISA XVIII	REGULER	16.500.000	8.250.000	8.085.000	16.335.000
133	KEC. PULAU MARATUA	PAUD	69942670	TK ANNISA XX	REGULER	28.380.000	14.190.000	13.906.200	28.096.200
134	KEC. PULAU MARATUA	PAUD	70004772	TK ANNISA XXII	REGULER	7.920.000	3.960.000	-	3.960.000
135	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30406264	TK AR-RAUDHOH	REGULER	74.580.000	37.290.000	37.290.000	74.580.000
136	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406375	TK BARUNAWATI	REGULER	3.960.000	1.980.000	1.980.000	3.960.000
137	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	30407314	TK BELIA	REGULER	25.740.000	12.870.000	12.870.000	25.740.000
138	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406408	TK BHAKTI BERSAMA	REGULER	13.860.000	6.930.000	6.930.000	13.860.000
139	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875720	TK CAHAYA ANNISA XXI	REGULER	29.700.000	14.850.000	14.680.000	29.530.000
140	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69952078	TK CERIA	REGULER	27.060.000	13.530.000	13.530.000	27.060.000
141	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406411	TK DARUL ULUM	REGULER	87.120.000	43.560.000	43.560.000	87.120.000
142	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406369	TK DHARMA PERTIWI	REGULER	8.580.000	4.290.000	4.290.000	8.580.000
143	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	69936208	TK EL-SHADDAI	REGULER	23.760.000	11.880.000	11.880.000	23.760.000
144	KEC. BATU PUTIH	PAUD	30406412	TK GAMELINA	REGULER	22.440.000	11.220.000	11.220.000	22.440.000
145	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69970368	TK HARVEST	REGULER	24.420.000	12.210.000	-	12.210.000
146	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406254	TK HOSIANA	REGULER	37.620.000	18.810.000	18.810.000	37.620.000
147	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875728	TK IBNU KATSIR	REGULER	50.160.000	25.080.000	25.080.000	50.160.000
148	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69878740	TK IKHSAN BATIWAKKAL	REGULER	31.680.000	15.840.000	15.838.274	31.678.274
149	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406236	TK IT ASH-SHOWWAH	REGULER	67.320.000	33.660.000	32.818.760	66.478.760
150	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69989638	TK IT ASH-SHOWWAH 2	REGULER	99.660.000	49.830.000	48.866.400	98.696.400
151	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875725	TK JAMIUL MUTTAQIN	REGULER	11.220.000	5.610.000	-	5.610.000
152	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69970326	TK KARTIKA TELUK BAYUR	REGULER	21.120.000	10.560.000	10.240.000	20.800.000
153	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406197	TK KARTIKA V-13	REGULER	21.120.000	10.560.000	10.560.000	21.120.000
154	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406377	TK KEMALA BAYANGKARI	REGULER	51.480.000	25.740.000	25.740.000	51.480.000
155	KEC. TABALAR	PAUD	30406415	TK MANDIRI	REGULER	29.700.000	14.850.000	14.850.000	29.700.000
156	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406378	TK MARIA IMACULATA 1	REGULER	39.600.000	19.800.000	19.606.000	39.406.000
157	KEC. TALISAYAN	PAUD	69881325	TK MUTIARA	REGULER	43.560.000	21.780.000	21.780.000	43.560.000
158	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69938950	TK NURUL MUHAJIRIN	REGULER	29.040.000	14.520.000	14.520.000	29.040.000
159	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406423	TK PERMATA ANNISA XIV	REGULER	12.540.000	6.270.000	6.270.000	12.540.000
160	KEC. PULAU DERAWAN	PAUD	69875722	TK PERMATA KASAI	REGULER	31.680.000	15.840.000	15.840.000	31.680.000
161	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	70045769	TK QURAN TERPADU BINA INSAN	REGULER	7.260.000	3.630.000	3.630.000	7.260.000
162	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406192	TK SANGGAM	REGULER	36.960.000	18.480.000	18.480.000	36.960.000
163	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	70028790	TK SAODA CENDEKIA	REGULER	29.700.000	14.850.000	14.850.000	29.700.000
164	KEC. TALISAYAN	PAUD	30407714	TK TERATAI EKASAPTA	REGULER	25.080.000	12.540.000	12.540.000	25.080.000
165	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406193	TK TERATAI I	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.570.000	19.140.000
166	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406201	TK TERATAI II	REGULER	34.320.000	17.160.000	17.160.000	34.320.000
167	KEC. BATU PUTIH	PAUD	69990369	TK TUNAS BAHARI	REGULER	73.487.000	36.743.500	36.431.500	73.175.000
168	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	30406195	TK TUNAS BANGSA III	REGULER	17.160.000	8.580.000	8.576.132	17.156.132
169	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	70026317	TK TUNAS CEMPAKA	REGULER	11.880.000	5.940.000	5.940.000	11.880.000
170	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406225	TK TUNAS HARAPAN BARU	REGULER	19.140.000	9.570.000	9.516.000	19.086.000
171	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	30406434	TK TUNAS MELATI	REGULER	19.800.000	9.900.000	9.900.000	19.800.000
172	KEC. TALISAYAN	PAUD	30407256	TK TUNAS PERTIWI VI	REGULER	7.920.000	3.960.000	2.146.260	6.106.260
173	KEC. BIDUK BIDUK	PAUD	69875721	TK TUNAS PERTIWI VII	REGULER	34.980.000	17.490.000	17.490.000	34.980.000
174	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406384	TK TUNAS RIMBA	REGULER	16.500.000	8.250.000	8.250.000	16.500.000
175	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69973657	TKIT AL-HUDA	REGULER	47.520.000	23.760.000	23.760.000	47.520.000
176	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875727	TKIT AZ-ZAHRO	REGULER	86.460.000	43.230.000	42.999.300	86.229.300
177	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69985345	TKIT IBNU MAJAH	REGULER	19.800.000	9.900.000	9.867.600	19.767.600
178	KEC. GUNUNG TABUR	PAUD	70012117	TK-IT IBNU MAJAH 2	REGULER	4.620.000	2.310.000	2.308.800	4.618.800
179	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69992572	TPA CAHAYA HATI	REGULER	22.440.000	11.220.000	11.220.000	22.440.000
180	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875815	TPA MUTIARAKU	REGULER	6.600.000	3.300.000	3.300.000	6.600.000
181	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875814	TPA SALIMAH	REGULER	11.880.000	5.940.000	4.735.800	10.675.800
182	KEC. TELUK BAYUR	PAUD	69875804	TUMBIT INDAH	REGULER	17.160.000	8.580.000	8.448.000	17.028.000
183	KEC. BIATAN	PAUD	69875810	TUNAS BANGSA	REGULER	20.460.000	10.230.000	10.150.000	20.380.000
184	KEC. SAMBALIUNG	PAUD	69875746	TUNAS PERTIWI	REGULER	17.820.000	8.910.000	8.910.000	17.820.000
1	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69971169	KBIT AZ-ZAHRO	KINERJA	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
2	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	30406411	TK DARUL ULUM	KINERJA	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
3	KEC. TANJUNG REDEB	PAUD	69875727	TKIT AZ-ZAHRO	KINERJA	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
JUMLAH						4.677.382.000	2.313.081.800	2.130.448.796	4.443.531.596

SALUR DANA BOSP REGULER PKBM

Lampiran 5

NO	KECAMATAN	JENJANG	NPSN	SEKOLAH	JENIS BOS	PAGU 1 TAHUN	TAHAP 1	TAHAP 2	TOTAL SALUR
1	KEC. GUNUNG TABUR	PKBM	P9984785	PKBM HARAPAN BARU	REGULER	41.790.000	20.895.000	20.825.000	41.720.000
2	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P9934623	PKBM PUSAKA INDONESIA	REGULER	57.170.000	28.585.000	28.085.000	56.670.000
3	KEC. TALISAYAN	PKBM	P2965818	PKBM MANDALIKE	REGULER	91.660.000	45.830.000	45.000.000	90.830.000
4	KEC. TELUK BAYUR	PKBM	P9934776	PKBM NUSA BANGSA	REGULER	121.890.000	60.945.000	60.943.950	121.888.950
5	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P9984619	PKBM AL-QAHHAR	REGULER	123.560.000	61.780.000	61.780.000	123.560.000
6	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P9934657	PKBM BATIWAKKAL	REGULER	206.960.000	103.480.000	103.461.500	206.941.500
7	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P9934545	PKBM ANGGREK PRESTASI	REGULER	235.170.000	117.585.000	117.492.500	235.077.500
8	KEC. TELUK BAYUR	PKBM	P9934656	PKBM AR-RIZKY	REGULER	345.420.000	172.710.000	172.710.000	345.420.000
9	KEC. TANJUNG REDEB	PKBM	P2965810	PKBM GLOBAL	REGULER	503.750.000	251.875.000	250.881.000	502.756.000
1	KEC. GUNUNG TABUR	PKBM	P9984785	PKBM HARAPAN BARU	KINERJA	45.000.000	0,00	45.000.000	45.000.000
2	KEC. TELUK BAYUR	PKBM	P9934776	PKBM NUSA BANGSA	KINERJA	45.000.000	0,00	45.000.000	45.000.000
JUMLAH						1.817.370.000	863.685.000	951.178.950	1.814.863.950



LAMPIRAN 6

Rincian Piutang Retribusi RSUD Abdul Rivai

Outstanding Piutang Perusahaan
Per 31 Desember 2025

Lampiran 6

No	Nama Perusahaan	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025		Jurnal Koreksi/ Penyesuaian		Saldo Akhir
			Debit	Kredit	Debit	Kredit	
1	Asuransi Bumida	1.276.676,00	-	-	-	-	Rp 1.276.676,00
2	PT. Mandiri Inhealt	2.056.393,00	6.405.573,00	5.603.829,00	-	33.749,00	Rp 2.824.388,00
3	PT. Berau Coal	29.968.814,00	1.859.500,00	1.859.500,00	-	-	Rp 29.968.814,00
4	PT. Hasta Panca Mandiri Utama (HPMU)	60.411.795,00	482.278.815,00	509.484.141,00	-	-	Rp 33.206.469,00
5	PT. Buma Suaran	21.940.303,00	-	-	-	-	Rp 21.940.303,00
6	PT. Hutan Hijau Mas	51.244.279,00	88.710.632,00	65.229.404,00	-	178.835,00	Rp 74.546.672,00
7	PT. Malindomas P	34.584.643,00	93.878.252,00	54.717.569,00	-	-	Rp 73.745.326,00
8	PT. Satu Sembilan D	102.961.614,00	151.090.745,00	167.823.980,00	-	-	Rp 86.228.379,00
9	PT. Jabontara Eka K	1.545.778,00	-	-	-	1.279.770,00	Rp 266.008,00
10	PT. Indo Pusaka Berau	20.644.000,00	132.218.969,00	101.011.849,00	-	5.800,00	Rp 51.845.320,00
11	PT. Jamsostek	1.734.122,00	-	-	-	-	Rp 1.734.122,00
12	Jamkesda Bulungan	21.606.572,00	-	-	-	-	Rp 21.606.572,00
13	PT. Kiani Kertas	495.993.112,00	115.391.586,00	141.036.647,00	-	-	Rp 470.348.051,00
14	PT. Madhani Tn (BBE)	96.883.898,00	198.507.130,00	262.711.521,00	-	-	Rp 32.679.507,00
15	PT. PLN (Persero)	29.888.253,00	167.492.200,00	119.462.481,00	-	-	Rp 77.917.972,00
16	PT. Persada Sukses Makmur/ Nusantara	8.381.970,00	-	-	-	-	Rp 8.381.970,00
17	PT. SIS Sambarata	59.645.213,00	-	-	-	-	Rp 59.645.213,00
18	PT. TRH	51.376,00	-	-	-	-	Rp 51.376,00
19	PT. Trakindo Utama	39.052.981,00	206.883.907,00	210.113.545,00	-	-	Rp 35.823.343,00
20	PT.TBP (TSE-1)	1.955.683,00	-	-	-	-	Rp 1.955.683,00
21	PT.TBP (TSE-2)	4.947.494,00	-	-	-	-	Rp 4.947.494,00
22	PT.TBP (AME)	65.220,00	-	-	-	-	Rp 65.220,00
23	PT. TBP (BTE)	-	-	-	-	-	Rp -
24	PT. TBP (KPW)	3.987.843,00	-	-	-	-	Rp 3.987.843,00
25	PT. TBP (TSM)	535.975,00	-	-	-	-	Rp 535.975,00
26	PT. United Tractor	54.751.078,00	86.347.344,00	138.160.193,00	-	-	Rp 2.938.229,00
27	PT. Dharma Henwa	262.262,00	-	-	-	-	Rp 262.262,00
28	Koperasi Bina Bersama	3.442.665,00	-	-	-	-	Rp 3.442.665,00
29	PT. Dnx Indonesia	69.925.721,00	278.314.261,00	240.841.944,00	-	-	Rp 107.398.038,00
30	PT. Ricobana Abadi	68.385,00	-	-	-	-	Rp 68.385,00
31	PT. Yudha Wahana	10.691.011,00	58.299.085,00	61.646.437,00	-	-	Rp 7.343.659,00
32	PT. Mutiara TI	235.868.441,91	679.950.241,00	811.036.376,00	687,00	3,00	Rp 104.782.990,91
33	Yayasan Darma Bakti Bc	67.392.438,00	173.523.966,00	233.065.640,00	-	-	Rp 7.850.764,00
34	BPD Kaltim	1.426.870,00	34.751.663,00	34.375.163,00	-	-	Rp 1.803.370,00
35	PT. Lati Tanjung Harapan	27.721.768,00	-	-	-	-	Rp 27.721.768,00
36	PT. Triputra Agro Persada/ Dwi Wira Le	34.074.360,00	-	-	-	-	Rp 34.074.360,00
37	PT. Samburakat Jaya	1.013.144,00	-	-	-	-	Rp 1.013.144,00
38	Asuransi Sinar Mas (Buma RJ-RI)	1.356.231.255,00	5.006.390.709,00	5.725.205.573,00	3.219.120,00	-	Rp 640.635.511,00
39	PT. Indokomas Buana Perkasa	16.542.565,00	-	-	-	-	Rp 16.542.565,00
40	PT. Nayaka Era Husada	7.196.694,00	1.083.080,00	5.037.119,00	-	-	Rp 3.242.655,00
41	Jasa Raharja	1.567.451,00	764.192.048,00	585.806.915,00	47.000,00	5.280.423,00	Rp 174.719.161,00
42	Asuransi Cynergy Care	98.065.228,00	-	-	-	-	Rp 98.065.228,00
43	BPJS Ketenaga Kerjaan	368.983.332,00	2.494.319.948,00	2.408.007.459,00	6.027,18	175.884,00	Rp 455.125.964,18
44	PT. Pama Persada Nus (BRCB)	162.700.469,00	1.120.062.446,00	1.054.432.150,00	-	-	Rp 228.330.765,00
45	PT. Pama Persada Nus (BRCG)	116.464.468,00	363.693.514,00	246.190.649,00	-	-	Rp 233.967.333,00
46	PT. Sungai Berlian Bhakti	136.065.667,00	-	-	-	-	Rp 136.065.667,00
47	Sentosa Kalimantan Jaya	40.197.311,00	-	-	-	-	Rp 40.197.311,00
48	PT. Anugerah Agung Prima	32.573.036,00	6.334.312,00	28.540.789,00	-	-	Rp 10.366.559,00
49	PT. Epiroc	6.665.849,00	-	-	-	-	Rp 6.665.849,00
50	PT. Prima Unggul Persada	157.488,00	-	-	-	-	Rp 157.488,00
51	PT. Harmoni Panca Utama	-	-	-	-	-	Rp -
52	PT. Harmoni Panca Utama (Samarinda)	-	-	-	-	-	Rp -
53	PT. Harmoni Panca Utama (HPA)	115.459.463,00	382.858.232,00	416.550.620,00	-	-	Rp 81.767.075,00
54	PT. Harmoni Panca Utama (KJA)	5.172.118,00	476.942.339,00	446.827.366,00	-	1,00	Rp 35.287.090,00
55	PT. Swakarsa Sinar Sentosa	-	-	-	-	-	Rp -
56	Klinik Utama Sangkakala	-	-	-	-	-	Rp -
57	PT. Airnav Indonesia	295.349,00	-	-	-	-	Rp 295.349,00
58	PT. Artha Tunggal Mandiri	1.094.335,00	42.176.594,00	42.885.290,00	-	-	Rp 385.639,00
59	PT. Tirta Medical Center	53.835.852,00	314.043.273,00	338.642.514,00	-	-	Rp 29.236.611,00
60	PT. Suprima Mitra Adihusada (Tirta Lab)	3.578.000,00	56.257.000,00	52.929.800,00	-	-	Rp 6.905.200,00
61	PT. Surya Madistrindo	-	25.582.611,00	25.582.611,00	-	-	Rp -
62	Klinik Berlian Bakti	-	-	-	-	-	Rp -
63	PT. Natura Pasific Nusantara	-	-	-	-	-	Rp -
64	PT. Berau Bara Energi (BBE)	-	-	-	-	-	Rp -
65	PT. Hexindo Adiperkasa	13.898.303,00	104.157.248,00	89.521.038,00	-	-	Rp 28.534.513,00
66	PDGI	31.250.000,00	-	55.627.000,00	24.377.000,00	-	Rp -
67	Covid Pusat	38.259.000,00	-	222.996.300,00	184.737.300,00	-	Rp -
68	Piutang pasien dengan SKTM/Jamkesda	208.806.300,00	-	-	-	-	Rp 208.806.300,00
69	Piutang pasien dengan JAMKESMAS	34.778.058,88	-	-	-	-	Rp 34.778.058,88
70	Piutang pasien dengan BPJS	9.863.554.529,00	55.558.245.933,00	55.605.632.820,00	202.423.748,00	1.084.606.112,00	Rp 8.933.985.278,00
71	Yayasan Kita Bisa	37.921.794,00	73.541.503,00	51.061.442,00	-	-	Rp 60.401.855,00
72	Yayasan Tzu Chi Indonesia (Sinar Mas)	-	479.425.370,00	479.425.370,00	-	-	Rp -
73	Masyarakat Umum	-	23.239.166,00	-	291.119.146,00	176.686.300,00	Rp 137.672.012,00
74	Asuransi CAR	-	23.040.326,00	2.032.983,00	-	-	Rp 21.007.343,00
75	Bantuan Sosial Pemda	-	207.350.900,00	-	-	-	Rp 207.350.900,00
TOTAL per 31 Desember 2025		Rp 14.349.316.065,79	Rp 70.478.840.421,00	Rp 71.041.116.027,00	Rp 705.930.028,18	Rp 1.268.246.877,00	Rp 13.224.723.610,97



LAMPIRAN 7

Rekapitulasi Retribusi Piutang Pasar Sanggam
Adjidilayas

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
1	RISMAN	SAYUR	E.359	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
2	RISMAN	SAYUR	E.360	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
3	NURSIHAH	SAYUR	E.361	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
4	SUARDI	SAYUR	E.362	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
5	RUSDI ARAS	SAYUR	E.364	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
6	FATMAWATI JUNAID	SAYUR	E.365	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 3.501.600
7	IDA ROYANI	SAYUR	G.524	Rp 3.407.250	Rp -	Rp 3.407.250
8	SITI FARIDA	SAYUR	H.671	Rp 2.880.150	Rp -	Rp 2.880.150
9	SITTI KARTINI	SAYUR	F.433	Rp 2.315.400	Rp -	Rp -
10	JUMINEM	SAYUR	F.437	Rp 320.000	Rp 960.000	Rp 320.000
11	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.450	Rp 1.185.900	Rp -	Rp 1.185.900
12	RAJJA BIN TUNGKA	SAYUR	F.451	Rp 1.185.900	Rp -	Rp 1.185.900
13	HJ.SITTI LAWIYAH	SAYUR	F.454	Rp 960.000	Rp -	Rp -
14	HJ.AMSUNA	SAYUR	F.455	Rp 960.000	Rp -	Rp -
15	Hj. SINAR	SAYUR	F.456	Rp 2.089.500	Rp -	Rp -
16	ATIKAH	SAYUR	F.457	Rp 2.089.500	Rp -	Rp -
17	MARIATUN	SAYUR	F.460	Rp 2.051.850	Rp -	Rp -
18	SUARDI	SAYUR	F.461	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
19	M.AJIS MUJAHIRIN	SAYUR	F.464	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
20	RUSLI	SAYUR	F.465	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
21	MUSIRAH	SAYUR	F.466	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
22	RUSLI	SAYUR	F.467	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
23	WAKIJEM	SAYUR	F.472	Rp 1.223.550	Rp -	Rp 263.550
24	HJ.HASIRAH	SAYUR	F.473	Rp 1.223.550	Rp -	Rp 263.550
25	BURHAN	SAYUR	F.474	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
26	ISIANA	SAYUR	F.477	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
27	MUJIATI	SAYUR	F.478	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.920.000
28	TUKINAH	SAYUR	F.479	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
29	MUHAMMAD TAUFIQ	SAYUR	F.480	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
30	ARDIANSYAH	SAYUR	F.481	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
31	SUKINI	SAYUR	F.482	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
32	PONIYEM	SAYUR	F.483	Rp 1.901.250	Rp -	Rp 1.901.250
33	HJ. RUMINTEN	SAYUR	F.484	Rp 1.901.250	Rp -	Rp 1.901.250
34	DEVI NOVALITA NINGTYAS	SAYUR	F.485	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.920.000
35	INDO LUNGE	SAYUR	F.486	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
36	MUSNI	SAYUR	F.490	Rp 1.825.950	Rp -	Rp 1.825.950
37	ABDUL RASYID,A	SAYUR	F.491	Rp 1.825.950	Rp -	Rp 1.825.950
38	WAHYUDI	SAYUR	F.492	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.920.000
39	GISAH	SAYUR	F.500	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
40	ALIMUDDIN	SAYUR	F.502	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
41	NURHAYATI	SAYUR	F.503	Rp 2.804.850	Rp -	Rp 2.804.850
42	M.YUSUF	SAYUR	F.504	Rp 2.804.850	Rp -	Rp 2.804.850
43	MARIANA	SAYUR	F.506	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
44	TUKINAH	SAYUR	F.509	Rp 2.221.800	Rp -	Rp 2.221.800
45	ZAINAL	SAYUR	F.510	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
46	RIRIN	SAYUR	F.512	Rp 960.000	Rp -	Rp -
47	HASNAH	SAYUR	F.516	Rp 960.000	Rp -	Rp -
48	SIAMAH	SAYUR	G.517	Rp 1.938.900	Rp -	Rp 1.938.900
49	Hj. KURNIA JINNE	SAYUR	G.518	Rp 1.938.900	Rp -	Rp 1.938.900
50	SADARIAH	SAYUR	G.531	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
51	HERMAS JAKUT PRATAMA	SAYUR	G.535	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 1.680.000
52	RUSLI	SAYUR	G.538	Rp 1.185.900	Rp -	Rp -
53	KACONG	SAYUR	G.542	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
54	SUTIATI	SAYUR	G.544	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
55	ZUBAIR	SAYUR	G.548	Rp 2.353.050	Rp -	Rp 2.353.050
56	H.HANAPING	SAYUR	G.551	Rp 2.353.050	Rp -	Rp 2.353.050
57	Hj. SATRIANA	SAYUR	G.552	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
58	SUTINI	SAYUR	G.553	Rp 1.487.100	Rp -	Rp 1.487.100
59	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.554	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
60	HJ.SATRIANA	SAYUR	G.555	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
61	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.556	Rp 1.261.200	Rp -	Rp 1.261.200
62	AGUSTINA KUSSUDATUTASIK	SAYUR	G.557	Rp 1.148.250	Rp -	Rp 1.148.250
63	HJ. SUTIYEM	SAYUR	G.558	Rp 1.600.050	Rp -	Rp 1.600.050

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
64	LILIS JUMASTUTIK	SAYUR	G.559	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
65	SAMINI	SAYUR	G.560	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000
66	BIKAI	SAYUR	G.561	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
67	WAGIANTI	SAYUR	G.562	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
68	IRAWATI	SAYUR	G.563	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
69	SUMARLIN	SAYUR	G.564	Rp 1.938.900	Rp -	Rp 1.938.900
70	ISMIATI	SAYUR	G.565	Rp 1.938.900	Rp -	Rp 1.938.900
71	LUS ARFIANTI	SAYUR	G.569	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
72	PURNIAWATI	SAYUR	G.571	Rp 320.000	Rp 960.000	Rp 480.000
73	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.580	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
74	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.581	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
75	MUHAMMAD ALIF ASWATULLAH	SAYUR	G.582	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
76	ARSYAD	SAYUR	G.583	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
77	YUSUF PANAMBA	SAYUR	G.584	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
78	MISRA	SAYUR	G.587	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
79	HASMAWATI	SAYUR	G.588	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
80	SALEHAH	SAYUR	G.589	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
81	SUMARSIH	SAYUR	G.590	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
82	MUH.HABIR	SAYUR	G.591	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
83	HASMAWATI	SAYUR	G.592	Rp 400.000	Rp 960.000	Rp 1.360.000
84	HASMAWATI	SAYUR	G.593	Rp 400.000	Rp 960.000	Rp 1.360.000
85	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.594	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
86	SYAMSUDDIN	SAYUR	G.595	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
87	H.MAMMA/H.AHMAD	SAYUR	G.596	Rp 480.000	Rp -	Rp -
88	ZUBAIR	SAYUR	G.597	Rp 480.000	Rp -	Rp -
89	HJ.RUSMAWATI	SAYUR	G.598	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
90	PAIMAN	SAYUR	G.599	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
91	HARIS	SAYUR	H.600	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
92	MUHAYYAR	SAYUR	H.602	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
93	MUHAMMAD	SAYUR	H.603	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
94	MISTIKA.R	SAYUR	H.605	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
95	SYARIFUDDIN/ HARIYANI HAMID	SAYUR	H.606	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
96	SURIANI KAMARUDDIN	SAYUR	H.612	Rp 640.000	Rp -	Rp 640.000
97	SURIANI KAMARUDDIN	SAYUR	H.613	Rp 640.000	Rp -	Rp 640.000
98	RUSMI	SAYUR	H.614	Rp 640.000	Rp -	Rp 640.000
99	SAHARUDDIN LINGKA	SAYUR	H.627	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
100	HARTATI PATI	SAYUR	H.628	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
101	ROHMAWATI	SAYUR	H.629	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
102	ASDAR AZIZ	SAYUR	H.636	Rp 3.595.500	Rp -	Rp 3.595.500
103	HASBIAH BAJI	SAYUR	H.638	Rp 3.219.000	Rp -	Rp 3.219.000
104	MUAL POHAN	SAYUR	H.645	Rp 1.035.300	Rp -	Rp 1.035.300
105	MANSYUR,S	SAYUR	H.648	Rp 1.185.900	Rp -	Rp 1.185.900
106	HARTATI RANNU	SAYUR	H.649	Rp 1.185.900	Rp -	Rp 1.185.900
107	SAINEM / SUHADA	SAYUR	H.651	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
108	DJABAR	SAYUR	H.657	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
109	MARTEN TAPPI	SAYUR	H.658	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
110	HABIBA DG. LINO	SAYUR	H.659	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
111	YASNI	SAYUR	H.660	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
112	YASNI	SAYUR	H.661	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
113	NARISA	SAYUR	H.670	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.920.000
114	MUH.HABIR	SAYUR	H.672	Rp 480.000	Rp 960.000	Rp 1.440.000
115	DANIEL KA'BAK AB	SAYUR	H.678	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
116	ANDI YUSRAN	SAYUR	H.679	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
117	KASMILAH	SAYUR	H.680	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
118	ACHMAD PAUZAN	SAYUR	H.681	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
119	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.682	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
120	M. RAHIM JAFAR	SAYUR	H.683	Rp 1.863.600	Rp -	Rp 1.863.600
121	MUHAMMAD SUMARDI	SAYUR	G.527	Rp -	Rp -	Rp -
122	ZAINUDDIN	SAYUR	G.526	Rp -	Rp -	Rp -
123	HARMUNANSYAH	SAYUR	G.525	Rp -	Rp -	Rp -
124	SURATI	SAYUR	F.489	Rp -	Rp 960.000	Rp -
125	SUMARNI	SAYUR	F.436	Rp -	Rp -	Rp -
126	BINTI	SAYUR	F.435	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
127	HENNY ROSNAWARDANY	SAYUR	G.567	Rp -	Rp -	Rp -
128	SYAMSUDDIN	SAYUR	F.447	Rp -	Rp -	Rp -
129	ADIT BAHAR	SAYUR	H.643	Rp -	Rp -	Rp -
130	CAHAYA	SAYUR	F.514	Rp -	Rp -	Rp -
131	FINARTI	SAYUR	F.515	Rp -	Rp 960.000	Rp -
132	MUDJIATUN	SAYUR	F.446	Rp -	Rp -	Rp -
133	WANTI P	SAYUR	G.545	Rp -	Rp -	Rp -
134	EDI SUKRISWANTO	SAYUR	G.547	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
135	SRI WAHYUNI	SAYUR	F.476	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
136	EDI SUKRISWANTO	SAYUR	G.546	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
137	EDI SUKRISWANTO	SAYUR	F.469	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000
138	HASANUDDIN	SAYUR	F.468	Rp -	Rp -	Rp -
139	FINARTI	SAYUR	F.513	Rp -	Rp -	Rp -
140	HERNAWATI	SAYUR	H.684	Rp -	Rp -	Rp -
141	FATMAWATI	SAYUR	F.471	Rp -	Rp -	Rp -
142	SRI WAHYUNI	SAYUR	F.475	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000
143	HARIANI HAMID	SAYUR	G.573	Rp -	Rp -	Rp -
144	WAGINEM	SAYUR	F.511	Rp -	Rp -	Rp -
145	PARIBAU	SAYUR	E.358	Rp -	Rp -	Rp -
146	ESTER KORLINA BATO'	SAYUR	E.366	Rp -	Rp -	Rp -
147	DINA SAPPE	SAYUR	E.367	Rp -	Rp -	Rp -
148	NURENI	SAYUR	E.368	Rp -	Rp -	Rp -
149	ANAFIAH	SAYUR	E.372	Rp -	Rp -	Rp -
150	SELDI	SAYUR	E.373	Rp -	Rp -	Rp -
151	MARTHA PARE	SAYUR	E.374	Rp -	Rp -	Rp -
152	ELISABETH DANDURU	SAYUR	E.375	Rp -	Rp -	Rp -
153	LILIS SURYANI	SAYUR	E.406	Rp -	Rp -	Rp -
154	JAMRUD	SAYUR	E.407	Rp -	Rp -	Rp -
155	MARIA MAGDALENA	SAYUR	F.434	Rp -	Rp -	Rp -
156	ZAKARIA	SAYUR	F.438	Rp -	Rp -	Rp -
157	HASNI	SAYUR	F.439	Rp -	Rp -	Rp -
158	JOKO ISWARDONO	SAYUR	F.440	Rp -	Rp -	Rp -
159	LEGINAH	SAYUR	F.441	Rp -	Rp -	Rp -
160	KANNU .B	SAYUR	F.442	Rp -	Rp -	Rp -
161	NURHAYATI	SAYUR	F.443	Rp -	Rp -	Rp -
162	MAYA ARDIANTI	SAYUR	F.444	Rp -	Rp -	Rp -
163	SUPARDI	SAYUR	F.445	Rp -	Rp -	Rp -
164	TRISNAWATI	SAYUR	F.448	Rp -	Rp -	Rp -
165	SUKIRA	SAYUR	F.449	Rp -	Rp -	Rp -
166	NURYANAH.K	SAYUR	F.452	Rp -	Rp -	Rp -
167	RASID	SAYUR	F.453	Rp -	Rp -	Rp -
168	RAMLAN	SAYUR	F.458	Rp -	Rp -	Rp -
169	HATIRA	SAYUR	F.459	Rp -	Rp -	Rp -
170	EVA RAMDHANIATI	SAYUR	F.462	Rp -	Rp -	Rp -
171	HANIAH	SAYUR	F.463	Rp -	Rp -	Rp -
172	ARIFIN DG. NGALLE	SAYUR	F.470	Rp -	Rp -	Rp -
173	INDO LUNGE	SAYUR	F.487	Rp -	Rp -	Rp -
174	INDO LUNGE	SAYUR	F.488	Rp -	Rp -	Rp -
175	HJ.SAGEMI	SAYUR	F.493	Rp -	Rp -	Rp -
176	LATIFAH	SAYUR	F.494	Rp -	Rp -	Rp -
177	SAMINEM	SAYUR	F.495	Rp -	Rp -	Rp -
178	MISNIATI	SAYUR	F.496	Rp -	Rp -	Rp -
179	MASWATI	SAYUR	F.497	Rp -	Rp -	Rp -
180	MAHFUZ	SAYUR	F.498	Rp -	Rp -	Rp -
181	NURHAYATI	SAYUR	F.499	Rp -	Rp -	Rp -
182	SINGARA	SAYUR	F.501	Rp -	Rp -	Rp -
183	MARIANA	SAYUR	F.505	Rp -	Rp -	Rp -
184	KASMAH	SAYUR	F.507	Rp -	Rp -	Rp -
185	NISWATI	SAYUR	F.508	Rp -	Rp -	Rp -
186	MUSTAFA	SAYUR	G.519	Rp -	Rp -	Rp -
187	ARSYAT HATTA / MARYATI	SAYUR	G.520	Rp -	Rp -	Rp -
188	IRWAN DG ROA	SAYUR	G.521	Rp -	Rp -	Rp -
189	SITI	SAYUR	G.522	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
190	JUMIATI	SAYUR	G.523	Rp -	Rp -	Rp -
191	HANI	SAYUR	G.528	Rp -	Rp -	Rp -
192	AMINAH	SAYUR	G.529	Rp -	Rp -	Rp -
193	RUDIANSYAH	SAYUR	G.530	Rp -	Rp -	Rp -
194	JUMIATI	SAYUR	G.532	Rp -	Rp -	Rp -
195	ROMBA	SAYUR	G.533	Rp -	Rp -	Rp -
196	MOH. SAYUTI ADY ASMORO	SAYUR	G.534	Rp -	Rp -	Rp -
197	SRIHARTINI	SAYUR	G.536	Rp -	Rp -	Rp -
198	SUSANTI	SAYUR	G.537	Rp -	Rp -	Rp -
199	EKE	SAYUR	G.539	Rp -	Rp -	Rp -
200	NURBAYA	SAYUR	G.540	Rp -	Rp -	Rp -
201	RAHMAN. S.H.J.S	SAYUR	G.541	Rp -	Rp -	Rp -
202	WAGINEM/APRIANTIKA	SAYUR	G.549	Rp -	Rp -	Rp -
203	RUSMIATI	SAYUR	G.550	Rp -	Rp -	Rp -
204	MURTIATI	SAYUR	G.566	Rp -	Rp -	Rp -
205	RABASIAH	SAYUR	G.568	Rp -	Rp -	Rp -
206	HJ. HASNIA	SAYUR	G.570	Rp -	Rp -	Rp -
207	AMINAH	SAYUR	G.572	Rp -	Rp -	Rp -
208	TAMAN NURHAIDA P	SAYUR	G.574	Rp -	Rp -	Rp -
209	NURSIA	SAYUR	G.575	Rp -	Rp -	Rp -
210	HAERUDDIN	SAYUR	G.576	Rp -	Rp -	Rp -
211	HINDONG. P	SAYUR	G.577	Rp -	Rp -	Rp -
212	MUSLIKAH	SAYUR	G.578	Rp -	Rp -	Rp -
213	ZAINUDDIN	SAYUR	G.579	Rp -	Rp -	Rp -
214	NURHAYATI	SAYUR	G.585	Rp -	Rp -	Rp -
215	MEGAWATI	SAYUR	G.586	Rp -	Rp -	Rp -
216	HJ. SITI KHADIJAH	SAYUR	H.601	Rp -	Rp -	Rp -
217	AR. JODIN MT	SAYUR	H.604	Rp -	Rp -	Rp -
218	E. EDWIN HARYANTO	SAYUR	H.607	Rp -	Rp -	Rp -
219	ICE ARFAIN	SAYUR	H.608	Rp -	Rp -	Rp -
220	MATIUS MUNA	SAYUR	H.609	Rp -	Rp -	Rp -
221	SUHARTI	SAYUR	H.610	Rp -	Rp -	Rp -
222	ERLINA	SAYUR	H.611	Rp -	Rp -	Rp -
223	AMRIS AZIS	SAYUR	H.615	Rp -	Rp -	Rp -
224	SYARIFUDDIN	SAYUR	H.616	Rp -	Rp -	Rp -
225	SYADARIAH DG. NGINNA	SAYUR	H.617	Rp -	Rp -	Rp -
226	WINARSIH	SAYUR	H.618	Rp -	Rp -	Rp -
227	FATIMAH	SAYUR	H.619	Rp -	Rp -	Rp -
228	RENDI HASAN	SAYUR	H.620	Rp -	Rp -	Rp -
229	NORMAYANTI	SAYUR	H.621	Rp -	Rp -	Rp -
230	USMAN RAMLI	SAYUR	H.622	Rp -	Rp -	Rp -
231	SAMPARA L / ROY	SAYUR	H.623	Rp -	Rp -	Rp -
232	ZAINAL RASYID	SAYUR	H.624	Rp -	Rp -	Rp -
233	RAHMAD	SAYUR	H.625	Rp -	Rp -	Rp -
234	HARMAN	SAYUR	H.626	Rp -	Rp -	Rp -
235	MADING	SAYUR	H.630	Rp -	Rp -	Rp -
236	HAMIRAH	SAYUR	H.631	Rp -	Rp -	Rp -
237	WAGIYEM	SAYUR	H.632	Rp -	Rp -	Rp -
238	LULUK SRI KUSMINANTI	SAYUR	H.633	Rp -	Rp -	Rp -
239	BETI	SAYUR	H.634	Rp -	Rp -	Rp -
240	ASRIN/BPK. HERI	SAYUR	H.635	Rp -	Rp -	Rp -
241	HJ. SUMIATI	SAYUR	H.637	Rp -	Rp -	Rp -
242	H. SOPIAN ASMAWI	SAYUR	H.639	Rp -	Rp -	Rp -
243	HASBULLAH	SAYUR	H.640	Rp -	Rp -	Rp -
244	MARLINAH	SAYUR	H.641	Rp -	Rp -	Rp -
245	ARIFUDDIN	SAYUR	H.642	Rp -	Rp -	Rp -
246	SUR'AH	SAYUR	H.644	Rp -	Rp -	Rp -
247	SITI KARTINI	SAYUR	H.646	Rp -	Rp -	Rp -
248	RUDI	SAYUR	H.647	Rp -	Rp -	Rp -
249	RAMLI	SAYUR	H.650	Rp -	Rp -	Rp -
250	ERLIN	SAYUR	H.652	Rp -	Rp -	Rp -
251	M. TAHIR	SAYUR	H.653	Rp -	Rp -	Rp -
252	MASROHAN	SAYUR	H.654	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
253	MURSINI	SAYUR	H.655	Rp -	Rp -	Rp -
254	SAIDE	SAYUR	H.656	Rp -	Rp -	Rp -
255	DJUBAIDAH	SAYUR	H.662	Rp -	Rp -	Rp -
256	SUMARTONO	SAYUR	H.663	Rp -	Rp -	Rp -
257	SUPRIH	SAYUR	H.664	Rp -	Rp -	Rp -
258	SUMARDI	SAYUR	H.665	Rp -	Rp -	Rp -
259	ILHAM	SAYUR	H.666	Rp -	Rp -	Rp -
260	YATIMAH	SAYUR	H.667	Rp -	Rp -	Rp -
261	SUDIRMAN	SAYUR	H.668	Rp -	Rp -	Rp -
262	DEBI YULIANI	SAYUR	H.669	Rp -	Rp -	Rp -
263	HADIA	SAYUR	H.673	Rp -	Rp -	Rp -
264	PRAYETNO	SAYUR	H.674	Rp -	Rp -	Rp -
265	DATU SURYANIS	SAYUR	H.675	Rp -	Rp -	Rp -
266	PUTRI SADRIAH	SAYUR	H.676	Rp -	Rp -	Rp -
267	SUNARDI	SAYUR	H.677	Rp -	Rp -	Rp -
268	HJ. SAINONG	SAYUR/Bawang	1.685	Rp -	Rp -	Rp -
269	HASRIANI	SAYUR/Bawang	1.712	Rp -	Rp -	Rp -
270	DJUMA	SAYUR	G.543	Rp -	Rp -	Rp -
						Rp -
1	SURYANI	PISANG	1.709	Rp 720.000	Rp -	Rp 560.000
2	JOHARENG	PISANG	1.710	Rp 720.000	Rp -	Rp 320.000
3	NURSIHAH	PISANG	1.719	Rp 1.411.800	Rp -	Rp 1.411.800
4	NURHANI	PISANG	1.721	Rp 880.000	Rp -	Rp -
5	NURHANI	PISANG	1.722	Rp 880.000	Rp -	Rp -
6	SAHARUDDIN	PISANG	1.725	Rp 1.675.350	Rp 960.000	Rp 1.440.000
8	CHAIRIL JAFAR,SE	PISANG	1.726	Rp 1.675.350	Rp 960.000	Rp 1.440.000
9	HAMSIHAH	PISANG	1.727	Rp 960.000	Rp -	Rp 480.000
10	ASTINA	PISANG	1.728	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.440.000
11	DARMANI	PISANG	1.729	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.440.000
12	SATRIA	PISANG	1.730	Rp 240.000	Rp -	Rp 240.000
13	JOHARENG	PISANG	1.733	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 640.000
14	SURYANI	PISANG	1.734	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 1.520.000
15	ASTINA	PISANG	1.738	Rp 1.185.900	Rp -	Rp 1.185.900
16	SITTI	PISANG	1.742	Rp 1.148.250	Rp 960.000	Rp 2.108.250
17	ASTINA	PISANG	1.743	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 1.440.000
18	SITTI	PISANG	1.745	Rp 1.148.250	Rp -	Rp 1.148.250
1	TIMANG	PISANG	1.711	Rp 1.336.500	Rp -	Rp 1.336.500
2	TIMANG	PISANG	1.713	Rp 1.336.500	Rp -	Rp 1.336.500
	HJ.HAYATI	PISANG	1.791	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMRI	PISANG	1.717	Rp -	Rp -	Rp -
	HAYATI	PISANG	1.718	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMRI	PISANG	1.720	Rp -	Rp -	Rp -
	HJ.HAYATI	PISANG	1.741	Rp -	Rp -	Rp -
	SAHARUDDIN Dg. NAI	PISANG	1.723	Rp -	Rp -	Rp -
	H. KAMBA	PISANG	1.724	Rp -	Rp -	Rp -
	SATRIA	PISANG		Rp -	Rp -	Rp -
	HJ. NURHANI	PISANG	1.732	Rp -	Rp -	Rp -
	NASIR	PISANG	1.735	Rp -	Rp 960.000	Rp -
	PIDE JAE LANI	PISANG	1.736	Rp -	Rp -	Rp -
	RUSMILA	PISANG	1.737	Rp -	Rp 960.000	Rp -
	SATRIA	PISANG	1.746	Rp -	Rp -	Rp -
	SATRIA	PISANG	1.747	Rp -	Rp -	Rp -
	SITTI MASATI	PISANG	1.706	Rp -	Rp -	Rp -
	SUARDI	PISANG	1.707	Rp -	Rp -	Rp -
	SUARDI	PISANG	1.708	Rp -	Rp -	Rp -
	Hj. DARMAWAN	PISANG	1.714	Rp -	Rp -	Rp -
	NAWIYAH	PISANG	1.715	Rp -	Rp -	Rp -
	MASTURA	PISANG	1.716	Rp -	Rp -	Rp -
	RINI WATI	PISANG	1.739	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
	WAHIDAH	PISANG	1.740	Rp -	Rp -	Rp -
	SUARNA	PISANG		Rp -	Rp -	Rp -
						Rp -
1	NURLIAH	LOS KAIN	86	Rp 675.000	Rp 540.000	Rp 22.500

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS
Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
2	MEGAWATI	KAIN	1.A	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
3	RATNI YUNITA	LOS KAIN	1.B	Rp 1.080.000	Rp 540.000	Rp 1.620.000
4	HERMAN	MAINAN	2.A	Rp 810.000	Rp 540.000	Rp 810.000
5	RATNI YUNITA	ASESORIS	2.B	Rp 1.080.000	Rp 540.000	Rp 1.620.000
6	HERMAN	ASESORIS	3.A	Rp 810.000	Rp 540.000	Rp 810.000
7	RATNI YUNITA	ASESORIS	3.B	Rp 1.080.000	Rp 540.000	Rp 1.620.000
8	ABDULLAH	ASESORIS	4.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
9	ABDULLAH	ASESORIS	5.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
10	SUPRI	KASET	6.B	Rp 405.000	Rp 540.000	Rp 945.000
11	HAMKA	COUNTER HP	7.A	Rp 675.000	Rp 540.000	Rp 225.000
12	SAM	JAM	7.B	Rp 405.000	Rp 540.000	Rp 945.000
13	NURHASYIM	ASESORIS	11.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 720.000
14	NURHASYIM	ASESORIS	11.B	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
15	JAKORNI	JAM	12.A	Rp 270.000	Rp -	Rp -
16	PENDI	ASESORIS	12.B	Rp 1.080.000	Rp -	Rp 1.080.000
17	NURHASYIM	ASESORIS	13.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 720.000
18	DIANA	ASESORIS	13.B	Rp 1.350.000	Rp -	Rp 1.350.000
19	AISYAH/M.RIFAI	ASESORIS	14.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 720.000
20	AISYAH/M.RIFAI	ASESORIS	15.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 720.000
21	KARIATI	MAINAN	16.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 360.000
22	WAHIDAH	MAINAN	16.B	Rp 810.000	Rp 540.000	Rp 1.350.000
23	SAMSUL ALAM	KASET	17.A	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
24	SALAMA	KASET	17.B	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
25	FITRI RAHMAN	LOS (ASS)	23.C	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
26	SIRAJUDDIN	LOS (ASS)	24.C	Rp 270.000	Rp -	Rp -
27	NUR HIKMA	SANDAL	25.A	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
28	SUARDI	SANDAL	25.B	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
29	NUR ALAM	ASESORIS	25.C	Rp 1.080.000	Rp -	Rp 1.080.000
30	SURATMAN	ASESORIS	26.A	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
31	YUSUF	ASESORIS	26.C	Rp 1.080.000	Rp -	Rp 1.080.000
32	YULIANA/SLAMAT	SANDAL	27.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
33	SARI	LOS (KAOS KAKI)	28.A	Rp 450.000	Rp 540.000	Rp 990.000
34	NORMALISA	LOS KAIN	28.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
35	PIPIT	LOS (JAM)	29.A	Rp 450.000	Rp 540.000	Rp 90.000
36	SHOLIHUL HARI	ASESORIS	29.B	Rp 675.000	Rp 540.000	Rp 315.000
37	NASRUDIN	ASSESORIS	32.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 315.000
38	NASRUDIN	ASSESORIS	32.B	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 315.000
39	SUMIATI	KAIN	33.A	Rp 675.000	Rp 540.000	Rp 315.000
40	MUSTAK FIRIN	ASESORIS	34.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
41	NURJANAH	ASESORIS	35.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
42	AHMAD ARIFIN	ASESORIS	35.B	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 495.000
43	MEGAWATI	MAINAN	36.A	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
44	ACHMAD ARIFIN	KAIN	36.B	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 495.000
45	SAHRONI	MAINAN	38.A	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
46	ZAENAL ARIFIN	ASSESORIS	38.B	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
47	ISA LIKANI	KAIN	44.A	Rp 315.000	Rp -	Rp -
48	ANUARI	KAIN	45.A	Rp 315.000	Rp -	Rp -
49	HAERIAH	LOS KAIN	46.A	Rp 315.000	Rp -	Rp -
50	MUH. FADLI RAMADHAN	KAIN	51.A	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
51	NURUL HIKMAH	KAIN	51.B	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
52	FATMAWATI	KAIN	52.A	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
53	LUTHFIA RAHMI	KAIN	52.B	Rp 1.215.000	Rp -	Rp 1.215.000
54	ELSYA HIKMAH	KAIN	53.A	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
55	ELSYA HIKMAH	KAIN	53.B	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
56	MUHAMMAD ARYANTO	KAIN	54.A	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
57	ZAINAL HAKIM	KAIN	54.B	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
58	IRPAN	KAIN	55.A	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
59	MASPIAH	KAIN	55.B	Rp 225.000	Rp -	Rp 225.000
60	STANLEY IRAWAN	KAIN	88	Rp 1.215.000	Rp -	Rp 1.215.000
61	SAHRIANA	KAIN	89	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
62	MARIYANA	ASESORIS	90	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
63	IRFAN	KAIN	56.A	Rp 1.350.000	Rp 540.000	Rp 1.890.000
64	EDI MULIYADI	SANDAL	79.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
65	SUMARNI	ASESORIS	79.B	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
66	ADRI	KAIN	80.B	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
67	MARIYANA	ASESORIS	84.A	Rp 270.000	Rp 540.000	Rp 540.000
68	IRWANTO	KAIN	84.B	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
69	MARIYANA	ASESORIS	85.A	Rp 270.000	Rp -	Rp -
70	SEMMA	ASSESORIS	87	Rp 135.000	Rp 540.000	Rp 270.000
71	ISMAIL	KAIN	L.96	Rp 877.500	Rp 540.000	Rp 1.237.500
72	FIRMAN	KAIN	L.97	Rp 495.000	Rp 540.000	Rp 1.035.000
73	NUR ALANG	KAIN	L.98	Rp 495.000	Rp 540.000	Rp 1.035.000
74	SAIDA	KAIN	99.A	Rp 270.000	Rp -	Rp 270.000
75	MEISA	KAIN	100.A	Rp 270.000	Rp -	Rp 270.000
76	MUTINGAH	KAIN	L.102	Rp 1.575.000	Rp 540.000	Rp 2.115.000
77	H. MUH RUSLI	KAIN	L.107	Rp 225.000	Rp 540.000	Rp 540.000
78	HJ.SURIANI	KAIN	L.108	Rp 90.000	Rp 540.000	Rp 270.000
79	FATMAWATI	KAIN	L.109	Rp 225.000	Rp 540.000	Rp 540.000
80	SURYANI	KAIN	L.110	Rp 90.000	Rp 540.000	Rp 270.000
81	ASWIN	KAIN	L.112	Rp 1.597.500	Rp -	Rp 1.597.500
82	PUTRI ALAEYDIA ZAHRA	KAIN	L.113	Rp 1.597.500	Rp -	Rp 1.597.500
83	HASNI	KAIN	L.114	Rp 1.080.000	Rp -	Rp 1.080.000
84	BUNIATI	KAIN	L.99	Rp 427.500	Rp -	Rp 427.500
85	BUNIATI / SAHIBUDDIN	KAIN	L.100	Rp 427.500	Rp -	Rp 427.500
86	HASARUDDIN	KAIN	L.119	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
87	NURSIHAH	KASET	L.120	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
88	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.121	Rp 585.000	Rp -	Rp 585.000
89	MANSYUR	KAIN	L.122	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
90	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	L.123	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
91	HASANUDDIN	KAIN	L.124	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
92	SAIPULA	KAIN	L.126	Rp 585.000	Rp -	Rp 585.000
93	AGUS ARDIANSYAH	KAIN	L.127	Rp 585.000	Rp -	Rp 585.000
94	SYAMSUL BAHRI	KASET	L.128	Rp 990.000	Rp 540.000	Rp 1.530.000
95	AGUS ARDIANSYAH	KASET	L.129	Rp 585.000	Rp -	Rp 585.000
96	SUPARDI S	KAIN	L.132	Rp 1.890.000	Rp -	Rp 1.890.000
20	HERI MAHMUDI	KAIN	63.A	Rp 742.500	Rp -	Rp 742.500
21	LA SARDI	ASSESORIS	81.A	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
22	SITI MAIDAH	KAIN	81.B	Rp 990.000	Rp -	Rp 990.000
23	JAITUN	TAS	83.A	Rp 630.000	Rp -	Rp 630.000
25	MUTINGAH	KAIN	92.A	Rp 1.597.500	Rp 540.000	Rp 2.137.500
26	HERI MAHMUDI	KAIN	93.A	Rp 742.500	Rp -	Rp 742.500
27	HERI MAHMUDI	KAIN	94.A	Rp 742.500	Rp -	Rp 742.500
28	H. MUH TROBUS	KAIN	95.A	Rp 1.350.000	Rp -	Rp 1.350.000
30	SAIDIL HAMID	KAIN	L.101	Rp 675.000	Rp 540.000	Rp 1.215.000
	SALMAWATI	KAIN	L.118	Rp -	Rp -	Rp -
	SAHIBUDDIN	KAIN	L.115	Rp -	Rp -	Rp -
	FATMAWATI	KAIN	L.116	Rp -	Rp 540.000	Rp 450.000
	SUMIYATI	KAIN	42.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 450.000
	SUMIYATI	KAIN	43.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 450.000
	BATI ERWAN	KAIN	43.B	Rp -	Rp -	Rp -
	NADI	KAIN	57.B	Rp -	Rp -	Rp -
	NADI	KAIN	57.A	Rp -	Rp -	Rp -
	NUR SANTI	LOS JILBAB	6.A	Rp -	Rp 540.000	Rp 180.000
	NUR HASYIM	ASSESORIS	11.A	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 720.000
	HJ.NUHRIAH	LOS KAIN	L.117	Rp -	Rp -	Rp -
	SIRAJUDDIN	LOS ASSESORIS	34.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	RAMLAN	LOS (SANDAL)	27.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	NUR KHOLIL	LOS (SANDAL)	26.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	ALIFUDDIN	LOS ASSESORIS	80.A	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
	SYAHRUDDIN	SANDAL	4.A	Rp -	Rp 540.000	Rp -
	SYAHRUDDIN	SANDAL	5.A	Rp -	Rp 540.000	Rp -
	NOR ALAM	MAINAN	42.B	Rp 495.000	Rp -	Rp 495.000
	SYARWANI ABDAN	KAIN	44.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	SYARWANI ABDAN	ASESORIS	45.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	SYARWANI ABDAN	SEPATU	46.B	Rp 540.000	Rp -	Rp -
	MISBAHUDDIN	KAIN	61.A	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
	SITI MUNFARIIHAH	KAIN	96.A	Rp -	Rp 540.000	Rp -
	SAHRUL GEGO	KAIN	L.93	Rp -	Rp -	Rp -
	SALMA WATI	KAIN	L.95	Rp -	Rp 540.000	Rp -
	M. SUAIB	KAIN	L.125	Rp -	Rp -	Rp -
	IRMA LOS PASAR KERING	ASESORIS	22	Rp -	Rp -	Rp -
	MUJIATI	LOS KAIN	83.B	Rp -	Rp -	Rp -
	HAIDIR	ASESORIS	101	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
	HASMAWI	ASESORIS	14.B	Rp -	Rp -	Rp -
	HARMILA	ASESORIS	15.B	Rp -	Rp -	Rp -
	SARONI	SANDAL	33.B	Rp 540.000	Rp -	Rp 540.000
	ZAINUDDIN (NANANG)	SEPATU	24	Rp -	Rp -	Rp -
	NURAINI	ASESORIS	37.A	Rp -	Rp -	Rp -
	SITI MUNFARIIHAH	KACAMATA	37.B	Rp -	Rp -	Rp -
	ASWIN	LOS KAIN	56.B	Rp -	Rp -	Rp -
	H.A. WAHID	KAIN	61.B	Rp -	Rp -	Rp -
	MUHAMMAD NUR	KAIN	62.A	Rp -	Rp -	Rp -
	FARIDA ASIRA	KAIN	62.B	Rp -	Rp -	Rp -
	AGUS	KAIN	63.B	Rp -	Rp -	Rp -
	DEDI RUSDIANTO	ASESORIS	64.A	Rp -	Rp -	Rp -
	MOHTAROM	KAIN	64.B	Rp -	Rp -	Rp -
	FAISAL RIFAI	ASESORIS	65.A	Rp -	Rp -	Rp -
	PASAHHA	KAIN	65.B	Rp -	Rp -	Rp -
	MARHUSEN	KAIN	82.A	Rp -	Rp -	Rp -
	HAMNA	KAIN	82.B	Rp -	Rp -	Rp -
	HAMSIDAR	KAIN	85.B	Rp -	Rp -	Rp -
	SUSILAWATI MELSA	LOS KAIN	97.A	Rp -	Rp -	Rp -
	SUSILAWATI MELSA	KAIN	98.A	Rp -	Rp -	Rp -
	MAHARIDIR WAHID	KAIN	L.94	Rp -	Rp -	Rp -
	HASNI	KAIN	L.111	Rp -	Rp -	Rp -
	SYAMSUDDIN	KAIN	L.130	Rp -	Rp -	Rp -
	SYAMSUDDIN	KAIN	L.131	Rp -	Rp -	Rp -
					Rp -	Rp -
1	SURIANA	KUE	J.810	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
2	NURYANAH K	KUE	J.811	Rp 2.315.400	Rp 960.000	Rp 3.275.400
3	GATOT SUBROTO,S.Ag	KUE	J.813	Rp 3.670.800	Rp 960.000	Rp 4.630.800
4	MARIANA	KUE	J.817	Rp 3.256.650	Rp 960.000	Rp 4.216.650
5	MARIANA BERAU	KUE	J.818	Rp 1.072.950	Rp 960.000	Rp 2.032.950
6	YULI RIHWANA	KUE	J.819	Rp 3.256.650	Rp 960.000	Rp 4.216.650
7	SITI FATIMAH/ZAINAL ABIDIN	KUE	J.822	Rp 3.068.400	Rp -	Rp 3.068.400
8	SURATMI	KUE	J.823	Rp 3.633.150	Rp 960.000	Rp 4.593.150
9	SURATMI	KUE	J.824	Rp 2.654.250	Rp 960.000	Rp 3.614.250
10	SURYANI	KUE	J.832	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 1.520.000
11	RABANIA	KUE	J.835	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
12	RABANIA	KUE	J.836	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
13	LINDAWATI	KUE	J.839	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
14	MUHAMMAD TAHER	KUE	J.846	Rp 480.000	Rp 960.000	Rp 560.000
15	RIZKY ANDRIANI	KUE	J.841	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
3	LINDAWATI	KUE	J.812	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
5	IRA WATI	KUE	J.816	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
9	NUR'AIN	KUE	J.820	Rp 3.068.400	Rp 960.000	Rp 4.028.400
	HASRIWATI	KUE	J.844	Rp 480.000	Rp 960.000	Rp 560.000
	HASRIWATI	KUE	J.845	Rp 480.000	Rp -	Rp -
	SUCIPTO	KUE	J.838	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 1.680.000
	SUCIPTO	KUE	J.837	Rp 720.000	Rp 960.000	Rp 1.680.000
	HAYATI	KUE	J.801	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMRI	KUE	J.802	Rp -	Rp -	Rp -
	ZAKIAH	KUE	J.807	Rp -	Rp -	Rp -
	SYAMSUDDIN	KUE	J.808	Rp -	Rp -	Rp -
	REKA ARIANI	KUE	J.851	Rp -	Rp -	Rp -
	REKA ARIANI	KUE	J.852	Rp -	Rp -	Rp -
	YUNITA ELVIRA	KUE	J.840	Rp -	Rp -	Rp -
	BATI ERWAN	KUE	J.850	Rp -	Rp -	Rp -
	ZAHROTIUNNISA	KUE	J.789	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
	ZAHROTIUNNISA	KUE	J.790	Rp -	Rp -	Rp -
	IRIYANTI	KUE	J.809	Rp 320.000	Rp -	Rp -
	SUSILAWATI	KUE	J.825	Rp 320.000	Rp 960.000	Rp 160.000
	HASNA	KUE	J.787	Rp -	Rp -	Rp -
	MARTINA SONDA	KUE	J.791	Rp 400.000	Rp -	Rp 80.000
	GANIK	KUE	J.792	Rp 400.000	Rp -	Rp 80.000
	HADIJAH	KUE	J.793	Rp 400.000	Rp -	Rp 80.000
	Hj. HASNI	KUE	J.794	Rp 640.000	Rp -	Rp 80.000
	MARIANA - BANJAR	KUE	J.814	Rp -	Rp -	Rp -
	ASNI	KUE	J.815	Rp -	Rp -	Rp -
	RATNA	KUE	J.786	Rp -	Rp -	Rp -
	HASLIAH	KUE	J.788	Rp -	Rp -	Rp -
	RIMA MELATI	KUE	J.799	Rp -	Rp -	Rp -
	KURNIAWATI	KUE	J.804	Rp -	Rp -	Rp -
	SITI AMINAH	KUE	J.805	Rp -	Rp -	Rp -
	SITTI AISYAH	KUE	J.806	Rp -	Rp -	Rp -
	Hj. ROHANI	KUE	J.821	Rp -	Rp -	Rp -
	JAJAM	KUE	J.826	Rp -	Rp -	Rp -
	SITTI AMINAH	KUE	J.828	Rp -	Rp -	Rp -
	ST. RABIAH	KUE	J.829	Rp -	Rp -	Rp -
	TASRIP	KUE	J.830	Rp -	Rp -	Rp -
	LINDA MARIANA	KUE	J.831	Rp -	Rp -	Rp -
	NURLINA	KUE	J.855	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	M. AZIZ	IKAN BASAH	A.01	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
2	M. AZIZ	IKAN BASAH	A.02	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
3	H.AMREN	IKAN BASAH	A.04	Rp 302.700	Rp -	Rp 302.700
4	ABUSTAN	IKAN BASAH	A.11	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 1.715.300
5	ABUSTAN	IKAN BASAH	A.12	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 302.700
6	FITRIANI	IKAN BASAH	A.13	Rp 504.500	Rp -	Rp -
7	HAMILUDDIN	IKAN BASAH	A.14	Rp 100.900	Rp 1.210.800	Rp 706.300
8	ABDUL MUIS	IKAN BASAH	A.15	Rp 1.359.150	Rp 1.210.800	Rp 1.917.100
9	HALIMUDDIN	IKAN BASAH	A.16	Rp 1.359.150	Rp 1.210.800	Rp 1.917.100
10	ARMUNIS	IKAN BASAH	A.17	Rp 908.100	Rp -	Rp 908.100
11	SOHOR	IKAN BASAH	A.18	Rp 2.348.150	Rp -	Rp 2.348.150
12	ALAMSYAH	IKAN BASAH	A.19	Rp 908.100	Rp -	Rp 908.100
13	SARINAH	IKAN BASAH	A.22	Rp 1.260.250	Rp 1.210.800	Rp 2.471.050
14	ULIAWINARTI	IKAN BASAH	A.23	Rp 605.400	Rp 1.210.800	Rp 1.412.600
15	MUHNIA	IKAN BASAH	A.24	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 504.500
16	NOOR BAIZURA	IKAN BASAH	A.27	Rp 302.700	Rp -	Rp -
17	DAHLAN	IKAN BASAH	A.31	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp 1.614.400
18	DAHLAN	IKAN BASAH	A.32	Rp 1.309.700	Rp -	Rp 807.200
19	ROSDIANA	IKAN BASAH	A.33	Rp 201.800	Rp 1.210.800	Rp 302.700
20	H.AMREN	IKAN BASAH	A.80	Rp 302.700	Rp 1.210.800	Rp -
21	NURHAYATI	IKAN BASAH	C.190	Rp 1.507.500	Rp -	Rp 1.507.500
22	ALDI SUNARYA	IKAN BASAH	C.191	Rp 1.507.500	Rp -	Rp 1.507.500
23	ISMAIL (PIPOS)	IKAN BASAH	C.193	Rp 908.100	Rp -	Rp 908.100
24	MUHNIA	IKAN BASAH	C.194	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 504.500
25	SUARDI	IKAN BASAH	C.196	Rp 1.210.800	Rp -	Rp 1.210.800
26	IKHSAN	IKAN BASAH	C.197	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 302.700
27	IKHSAN	IKAN BASAH	C.198	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 302.700
28	IKHSAN	IKAN BASAH	C.199	Rp 1.408.600	Rp 1.210.800	Rp 201.800
29	MARDAN	IKAN BASAH	C.200	Rp 1.804.200	Rp 1.210.800	Rp 3.015.000
30	RUDI	IKAN BASAH	C.201	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp 1.614.400
31	YUNUS	IKAN BASAH	C.205	Rp 605.400	Rp 1.210.800	Rp -
32	RUSDIN	IKAN BASAH	C.209	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
33	SANAWIYAH	IKAN BASAH	C.210	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
34	SANAWIYAH	IKAN BASAH	C.211	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
35	RIDWAN	IKAN BASAH	C.212	Rp 605.400	Rp -	Rp 605.400
36	AMUAS.U	IKAN BASAH	C.213	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
37	HASIAH MONGGO BILU	IKAN BASAH	C.214	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.118.900
38	ABU BAKAR SIDDIK	IKAN BASAH	C.215	Rp 1.507.500	Rp 1.210.800	Rp 1.715.300
39	HALIMUDDIN	IKAN BASAH	C.216	Rp 807.200	Rp 1.210.800	Rp 706.300

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
40	RAHMATIA	IKAN BASAH	C.220	Rp 1.804.200	Rp -	Rp 1.210.800
41	SANUDDIN Dg. NGAPO	IKAN BASAH	C.221	Rp 1.952.550	Rp 1.200.000	Rp 3.152.550
42	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	C.222	Rp 1.507.500	Rp -	Rp 1.210.800
43	H. ILHAM	IKAN BASAH	C.223	Rp 100.900	Rp 1.200.000	Rp 191.000
44	JONIANSYAH	IKAN BASAH	C.227	Rp 1.359.150	Rp 1.200.000	Rp -
45	KAMARUDDIN KUMIS	IKAN BASAH	C.228	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 504.500
46	ANWAR	IKAN BASAH	C.229	Rp 605.400	Rp -	Rp 605.400
47	RISWAN	IKAN BASAH	C.231	Rp 100.900	Rp 1.210.800	Rp 706.300
48	ABDURRAHMAN	IKAN BASAH	C.232	Rp 100.900	Rp 1.210.800	Rp 504.500
49	MUHAMMAD ADIL	IKAN BASAH	C.235	Rp 1.359.150	Rp -	Rp 1.359.150
50	RAMLAN	IKAN BASAH	C.236	Rp 403.600	Rp -	Rp 403.600
51	SURIANTI	IKAN BASAH	C.237	Rp 2.941.550	Rp -	Rp 2.941.550
52	ZUMRIYAH	IKAN BASAH	C.238	Rp 504.500	Rp -	Rp 504.500
53	JAMES	IKAN BASAH	C.239	Rp 504.500	Rp -	Rp 504.500
54	ISHAQ	IKAN BASAH	C.240	Rp 504.500	Rp -	Rp 504.500
55	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.242	Rp 2.100.900	Rp 1.210.800	Rp 3.311.700
56	MUHAMMAD SUPIANDI	IKAN BASAH	C.244	Rp 302.700	Rp -	Rp 302.700
57	HJ.SIANG	IKAN BASAH	C.253	Rp 4.771.200	Rp 1.210.800	Rp 4.004.000
58	ADI HAKIM	IKAN BASAH	C.257	Rp 2.397.600	Rp 1.210.800	Rp 3.608.400
59	WANDIARTAS	IKAN BASAH	C.258	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
60	UPE	IKAN BASAH	C.259	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
61	HASIAH.M	IKAN BASAH	D.266	Rp 5.275.750	Rp -	Rp 5.275.750
62	ABDUL RAJAB	IKAN BASAH	D.272	Rp 1.295.900	Rp 1.200.000	Rp 2.495.900
63	SARINTAN / SITI RAJIYAH	IKAN BASAH	D.276	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
64	BADAR	IKAN BASAH	D.278	Rp 1.775.400	Rp 1.200.000	Rp 2.975.400
65	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	D.279	Rp 1.535.650	Rp -	Rp 672.550
66	IWAN SAUDE	IKAN BASAH	D.281	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
67	ABDUL HALIM	IKAN BASAH	D.285	Rp 600.000	Rp -	Rp 100.000
68	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.286	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
69	M. SYARIF	IKAN BASAH	D.288	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
70	RUSDIANA NINGSIH	IKAN BASAH	D.289	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
71	ANDI JAMALUDDIN	IKAN BASAH	D.290	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
72	DONO	IKAN BASAH	D.292	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
73	AMUAS U	IKAN BASAH	D.293	Rp 500.000	Rp 1.200.000	Rp 300.000
74	AMUAS U	IKAN BASAH	D.294	Rp 500.000	Rp 1.200.000	Rp 300.000
75	HAMZAH	IKAN BASAH	D.295	Rp 3.118.000	Rp -	Rp 3.118.000
76	ZULKIFLI	IKAN BASAH	D.297	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
77	SUMARNI	IKAN BASAH	D.298	Rp 1.391.800	Rp 1.200.000	Rp 2.591.800
78	IBRAHIM	IKAN BASAH	D.299	Rp 700.000	Rp 1.200.000	Rp 300.000
79	SYAHDAN	IKAN BASAH	D.300	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
80	MUHAMMAD NUR	IKAN BASAH	D.301	Rp 3.309.800	Rp -	Rp 3.309.800
81	RAMLI	IKAN BASAH	D.302	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -
82	MULI SANGING	IKAN BASAH	D.303	Rp 800.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
83	MUKSIN MUHDIN	IKAN BASAH	D.304	Rp 300.000	Rp 1.200.000	Rp 600.000
84	H. TAUFIQ, SE	IKAN BASAH	D.305	Rp 100.000	Rp -	Rp -
85	H.MUH NASIR	IKAN BASAH	D.306	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000
86	HENDRA	IKAN BASAH	D.307	Rp 700.000	Rp 1.200.000	Rp 400.000
87	RAKBAH	IKAN BASAH	D.308	Rp 600.000	Rp -	Rp 100.000
88	KAMARIA	IKAN BASAH	D.310	Rp 3.213.900	Rp -	Rp 2.015.150
89	DETI HARTIANI	IKAN BASAH	D.311	Rp 400.000	Rp 1.200.000	Rp 200.000
90	USMAN	IKAN BASAH	D.312	Rp 1.535.650	Rp 1.200.000	Rp 2.735.650
91	REHAN SAPUTRA	IKAN BASAH	D.313	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -
92	ISMAIL IDRUS	IKAN BASAH	D.319	Rp 1.775.400	Rp 1.200.000	Rp 2.975.400
93	DARNING	IKAN BASAH	D.320	Rp 1.775.400	Rp 1.200.000	Rp 2.975.400
94	ABDU RAHMAN	IKAN BASAH	D.321	Rp 400.000	Rp 1.200.000	Rp 900.000
95	ABDU RAHMAN	IKAN BASAH	D.322	Rp 400.000	Rp 1.200.000	Rp 900.000
96	SAMSUDDIN	IKAN BASAH	D.323	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -
97	TIARA MONIKA	IKAN BASAH	D.325	Rp 600.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
98	BAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.333	Rp 2.638.500	Rp -	Rp 2.638.500
99	Hj. WAHIDAH	IKAN BASAH	D.334	Rp 2.063.100	Rp -	Rp 2.063.100
100	SOKU	IKAN BASAH	D.345	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -
101	INTAN	IKAN BASAH	D.346	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
102	NAPIAH	IKAN BASAH	D.347	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
103	HJ.NURHEDAH	IKAN BASAH	D.348	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
104	M.ARIFIN	IKAN BASAH	E.363	Rp 2.350.800	Rp -	Rp 2.350.800
105	MUHAMMAD S	IKAN BASAH	C.206	Rp 2.100.900	Rp -	Rp 2.100.900
106	MUNIR	IKAN BASAH	C.248	Rp 3.089.900	Rp -	Rp 3.089.900
107	SAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.335	Rp 1.247.950	Rp -	Rp 1.247.950
108	BADO LAHI	IKAN BASAH	C.188	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 100.900
109	MUHAMMAD NURSAM	IKAN BASAH	A.28	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
110	SYAHARUDDIN	IKAN BASAH	C.189	Rp -	Rp -	Rp -
111	SYAHARUDDIN	IKAN BASAH	A.26	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
112	HUJRAN	IKAN BASAH	C.233	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 201.800
113	SYAMSUDDIN	IKAN BASAH	C.234	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
114	RUJITO	IKAN BASAH	A.06	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
115	RUJITO	IKAN BASAH	A.05	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
116	HASANAHA	IKAN BASAH	C.218	Rp -	Rp -	Rp -
117	AGUS	IKAN BASAH	C.219	Rp -	Rp -	Rp -
118	HASANAHA	IKAN BASAH	C.225	Rp -	Rp -	Rp -
119	MUKSIN MUHDIN	IKAN BASAH	D.309	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 500.000
120	HASANUDDIN	IKAN BASAH	D.265	Rp -	Rp 1.200.000	Rp -
121	SAM'ANI	IKAN BASAH	C.187	Rp -	Rp -	Rp -
122	ANDI TENRI GAU	IKAN BASAH	C.181	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 302.700
123	TOTO DJUMARDI	IKAN BASAH	C.182	Rp -	Rp -	Rp -
124	FITRI	IKAN BASAH	C.243	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
125	HJ.RAHMAWATI DAENG	IKAN BASAH	C.226	Rp -	Rp -	Rp -
126	ETTY HENDARYATI	IKAN BASAH	A.86	Rp -	Rp -	Rp -
127	IWAN SAUDE	IKAN BASAH	D.381	Rp -	Rp -	Rp -
128	NURLINA	IKAN BASAH	A.78	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 493.700
129	NURLINA	IKAN BASAH	C.208	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 504.500
130	M.AGUS LADA	IKAN BASAH	A.94	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
131	M.AGUS LADA	IKAN BASAH	A.93	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
132	RISNAWATI	IKAN BASAH	A.92	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
133	MANSYUR	IKAN BASAH	D.287	Rp -	Rp 1.200.000	Rp -
134	SUHAEMI	IKAN BASAH	C.202	Rp -	Rp -	Rp -
135	SUHAIMI	IKAN BASAH	C.203	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
136	ABDUL MALIK	IKAN BASAH	C.241	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
137	SAHRUDDIN	IKAN BASAH	A.08	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
138	MUHAMMAD JAFAR	IKAN BASAH	A.09	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
139	HASNOL	IKAN BASAH	A.10	Rp -	Rp -	Rp -
140	DAHLIYANITA R	IKAN BASAH	A.79	Rp -	Rp -	Rp -
141	M. WARIS	IKAN BASAH	A.84	Rp -	Rp -	Rp -
142	SARIPUDDIN DG. NGOLA	IKAN BASAH	A.95	Rp -	Rp -	Rp -
143	ISMAIL PIPOS	IKAN BASAH	C.192	Rp -	Rp -	Rp -
144	YUNUS	IKAN BASAH	C.204	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
145	ABDUL GANI	IKAN BASAH	C.207	Rp -	Rp -	Rp -
146	SUDIRMAN	IKAN BASAH	C.217	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
147	MUHAMMAD ZURAIMI	IKAN BASAH	C.251	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
148	DAHLAN	IKAN BASAH	A.20	Rp -	Rp -	Rp -
149	MANSUR	IKAN BASAH	A.21	Rp -	Rp -	Rp -
150	RISMA BR SIRAIT	IKAN BASAH	A.29	Rp -	Rp -	Rp -
151	SINUNG HARI PRATIWA	IKAN BASAH	A.30	Rp -	Rp -	Rp -
152	SARINTAN	IKAN BASAH	A.76	Rp -	Rp -	Rp -
153	INDERAWATI	IKAN BASAH	A.77	Rp -	Rp -	Rp -
154	FITRIANI	IKAN BASAH	A.81	Rp -	Rp -	Rp -
155	DAMING DG. TOBO	IKAN BASAH	A.82	Rp -	Rp -	Rp -
156	LATE	IKAN BASAH	A.83	Rp -	Rp -	Rp -
157	ANDI NASIR	IKAN BASAH	A.85	Rp -	Rp -	Rp -
158	M. IDRIS	IKAN BASAH	A.87	Rp -	Rp -	Rp -
159	HALIMATUS SYADIAH	IKAN BASAH	A.88	Rp -	Rp -	Rp -
160	FARIJANTO	IKAN BASAH	A.89	Rp -	Rp -	Rp -
161	ARNOL	IKAN BASAH	A.90	Rp -	Rp -	Rp -
162	MUSTARI	IKAN BASAH	A.91	Rp -	Rp -	Rp -
163	AMBO AHA	IKAN BASAH	A.96	Rp -	Rp -	Rp -
164	GASSING / BUGIS	IKAN BASAH	C.183	Rp -	Rp -	Rp -
165	SANTI	IKAN BASAH	C.184	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
	PAISAL DG. BANTANG	IKAN BASAH	C.185	Rp -	Rp -	Rp -
	SAM'ANI	IKAN BASAH	C.186	Rp -	Rp -	Rp -
	SUARDI	IKAN BASAH	C.195	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
	ACHMAD RIVAI	IKAN BASAH	C.224	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 1.099.100
	SYAMSUDIN	IKAN BASAH	C.230	Rp -	Rp -	Rp -
	DARMAN IRAWAN	IKAN BASAH	C.245	Rp -	Rp -	Rp -
	HELDAWATI	IKAN BASAH	C.249	Rp -	Rp -	Rp -
	H. AHMAD	IKAN BASAH	C.250	Rp -	Rp -	Rp -
	MUHAMMAD DG. LAWAN	IKAN BASAH	C.252	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
	SAINUDDIN DG. TOMPO	IKAN BASAH	C.254	Rp -	Rp -	Rp -
	KAMARUDDIN	IKAN BASAH	C.255	Rp -	Rp -	Rp -
	MUH. YUSUF SILA	IKAN BASAH	C.256	Rp -	Rp -	Rp -
	HJ. WAHIDAH T	IKAN BASAH	C.260	Rp -	Rp -	Rp -
	MUH. SALEH	IKAN BASAH	C.261	Rp -	Rp -	Rp -
	SARLINDA	IKAN BASAH	C.262	Rp -	Rp -	Rp -
	BAKRI	IKAN BASAH	C.263	Rp -	Rp -	Rp -
	KARTINA YUNUS	IKAN BASAH	C.264	Rp -	Rp -	Rp -
	KAHARUDDIN PATTA	IKAN BASAH	D.267	Rp -	Rp -	Rp -
	SUNAR DG. NGEMPO	IKAN BASAH	D.268	Rp -	Rp -	Rp -
	SITI MUNAWAROH	IKAN BASAH	D.269	Rp -	Rp -	Rp -
	NOR AFRIANI	IKAN BASAH	D.270	Rp -	Rp -	Rp -
	NOR AFRIANI	IKAN BASAH	D.271	Rp -	Rp -	Rp -
	SYAMSUDIN DG. RURUNG	IKAN BASAH	D.273	Rp -	Rp -	Rp -
	ANTO	IKAN BASAH	D.274	Rp -	Rp -	Rp -
	ADHAR	IKAN BASAH	D.275	Rp -	Rp -	Rp -
	SARIFUDDIN DG. TUTU	IKAN BASAH	D.277	Rp -	Rp -	Rp -
	SYARIFUDDIN	IKAN BASAH	D.280	Rp -	Rp -	Rp -
	RAHMADIANSYAH	IKAN BASAH	D.282	Rp -	Rp -	Rp -
	MUH. NASIR	IKAN BASAH	D.283	Rp -	Rp -	Rp -
	ANDI JAYADI	IKAN BASAH	D.284	Rp -	Rp -	Rp -
	KARTIWI	IKAN BASAH	D.291	Rp -	Rp -	Rp -
	MUH. KAMARUDDIN B	IKAN BASAH	D.296	Rp -	Rp -	Rp -
	BAMBANG HARIADY	IKAN BASAH	D.314	Rp -	Rp -	Rp -
	BAMBANG HARIADY	IKAN BASAH	D.315	Rp -	Rp -	Rp -
	ASNI	IKAN BASAH	D.316	Rp -	Rp -	Rp -
	ASNI	IKAN BASAH	D.317	Rp -	Rp -	Rp -
	BAMBANG HARIADY	IKAN BASAH	D.318	Rp -	Rp -	Rp -
	SYAMSIR	IKAN BASAH	D.324	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
	MADE ALI	IKAN BASAH	D.326	Rp -	Rp -	Rp -
	SAMSUL BAHRI	IKAN BASAH	D.327	Rp -	Rp -	Rp -
	KAHARUDDIN BUNGA	IKAN BASAH	D.328	Rp -	Rp -	Rp -
	KARIM	IKAN BASAH	D.330	Rp -	Rp -	Rp -
	BASTIAN. AB	IKAN BASAH	D.332	Rp -	Rp -	Rp -
	MUHLIS	IKAN BASAH	D.336	Rp -	Rp -	Rp -
	NURSIHAH DG. CAHYA	IKAN BASAH	D.337	Rp -	Rp -	Rp -
	AIDIL	IKAN BASAH	D.338	Rp -	Rp -	Rp -
	ZULKIFLI	IKAN BASAH	D.339	Rp -	Rp -	Rp -
	AMIRUDDIN (SANDRE)	IKAN BASAH	D.340	Rp -	Rp -	Rp -
	NELSON	IKAN BASAH	D.341	Rp -	Rp -	Rp -
	BAHARUDDIN	IKAN BASAH	D.342	Rp -	Rp -	Rp -
	H.MUSLIMIN	IKAN BASAH	D.343	Rp -	Rp -	Rp -
	ROSDIANA	IKAN BASAH	D.344	Rp -	Rp -	Rp -
	NUR HAENI	IKAN BASAH	A.03	Rp -	Rp -	Rp -
	RUSDIAHAH	IKAN BASAH	A.07	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	MAWARDI	AYAM KPNG	B.98	Rp 706.300	Rp -	Rp 706.300
2	MAWARDI	AYAM KPNG	B.108	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 1.917.100
3	MUHAMMAD JAMIL	AYAM KPNG	B.109	Rp 504.500	Rp -	Rp 504.500
4	AFFANDI	AYAM KPNG	B.111	Rp 403.600	Rp 1.210.800	Rp -
5	SARBIDIN	AYAM PTG	B.112	Rp 2.397.600	Rp 1.210.800	Rp 3.608.400
6	WAHYUDDIN	AYAM PTG	B.113	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 504.500
7	IBRAHIM	AYAM PTG	B.114	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 504.500
8	MUHNIA	AYAM PTG	B.115	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 504.500

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
9	IBRAHIM	AYAM PTG	B.116	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 504.500
10	WAHYUDDIN	AYAM PTG	B.117	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 504.500
11	SYAHRONI	AYAM PTG	B.118	Rp 100.900	Rp -	Rp -
12	SLAMET RIYADI	AYAM PTG	B.119	Rp 100.900	Rp -	Rp -
13	SYAHRONI	AYAM PTG	B.121	Rp 100.900	Rp -	Rp -
14	MUH.ROMI.S	AYAM PTG	B.122	Rp 100.900	Rp -	Rp -
15	ISMAIL	AYAM PTG	B.125	Rp 302.700	Rp 1.210.800	Rp 1.513.500
16	AMRIATI	AYAM PTG	B.126	Rp 302.700	Rp -	Rp 302.700
17	SANDI	AYAM PTG	B.127	Rp 504.500	Rp -	Rp -
18	ABDURRAHMAN	AYAM PTG	B.132	Rp 1.655.850	Rp -	Rp -
19	MAHMUD	AYAM PTG	B.134	Rp 504.500	Rp -	Rp 504.500
20	AMIR L	AYAM PTG	B.139	Rp 1.210.800	Rp -	Rp 1.210.800
21	SYAHDAN lunas	AYAM PTG	B.141	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
22	SUMARYONO	AYAM PTG	B.146	Rp 1.754.750	Rp 1.210.800	Rp 403.600
23	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.147	Rp 1.754.750	Rp -	Rp 1.754.750
24	KUSUMAWARDANI	AYAM PTG	B.148	Rp 1.754.750	Rp -	Rp 247.250
25	HJ.CAMARE	AYAM PTG	B.153	Rp 1.754.750	Rp -	Rp 1.754.750
26	SUMARYONO	AYAM PTG	B.154	Rp 1.754.750	Rp -	Rp 1.754.750
27	TARMINI	AYAM PTG	B.155	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
28	TARMINI	AYAM PTG	B.156	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
29	TARMINI	AYAM PTG	B.157	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
30	JUMIATI	AYAM PTG	B.176	Rp 1.754.750	Rp 1.210.800	Rp 2.965.550
31	DEPOT SITOHANG	AYAM PTG	B.177	Rp 706.300	Rp 1.210.800	Rp 706.300
32	SYAFARUDDIN	AYAM PTG	B.178	Rp 2.842.650	Rp 1.210.800	Rp 4.053.450
33	SYAPARUDDIN	AYAM PTG	B.179	Rp 2.991.000	Rp -	Rp 2.991.000
34	SUMIATI	AYAM PTG	B.123	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 100.900
35	HASANAH	AYAM PTG	B.149	Rp -	Rp -	Rp -
36	MUNIR	AYAM PTG	B.168	Rp -	Rp -	Rp -
37	MUHAMMAD SUPRIANDI	AYAM PTG	B.175	Rp -	Rp -	Rp -
38	NUR ASISEH	AYAM PTG	B.150	Rp -	Rp -	Rp -
39	MUNIR	AYAM PTG	B.136	Rp -	Rp -	Rp -
40	MUNIR	AYAM PTG	B.174	Rp -	Rp -	Rp -
41	NUR ASISEH	AYAM PTG	B.151	Rp -	Rp -	Rp -
42	BARLIYANA	AYAM PTG	B.166	Rp -	Rp -	Rp -
43	SAIDI	AYAM PTG	B.103	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
44	SAM'ANI	AYAM PTG	B.101	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
45	SAIDI	AYAM PTG	B.102	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
46	SAIDI	AYAM PTG	B.99	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
47	MISNAWATI	AYAM PTG	B.104	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
48	SAIDI	AYAM PTG	B.100	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
49	MULYADI	AYAM PTG	B.107	Rp -	Rp -	Rp -
50	SAM'ANI	AYAM PTG	B.105	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
51	SAIDI	AYAM PTG	B.106	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
52	DEPOT SITOHANG	AYAM PTG	B.173	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
53	IBRONE SITOHANG	AYAM PTG	B.131	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
54	IBRONE SITOHANG	AYAM PTG	B.172	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
55	ASRUL	AYAM PTG	B.158	Rp -	Rp -	Rp -
56	SYAHRONI	AYAM PTG	B.159	Rp -	Rp -	Rp -
57	KURBANIAH	AYAM PTG	B.97	Rp -	Rp -	Rp -
58	ABDUL HAMID	AYAM KAMPUNG	B.110	Rp -	Rp -	Rp -
59	M.RUSDI	AYAM POTONG	B.128	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
60	FARIJANTO	AYAM POTONG	B.133	Rp -	Rp -	Rp -
61	ASMADI	AYAM POTONG	B.124	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
62	SYAHRONI	AYAM POTONG	B.120	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
63	NUR ASISEH	AYAM POTONG	B.152	Rp -	Rp -	Rp -
64	JAMALUDDIN HM	AYAM PTG	B.129	Rp -	Rp -	Rp -
65	BUSMAN	AYAM PTG	B.135	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
66	MULIYATI	AYAM PTG	B.138	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
67	SYAHRIANSYAH	AYAM PTG	B.142	Rp -	Rp -	Rp -
68	H. KASIM	AYAM PTG	B.143	Rp -	Rp -	Rp -
69	SUDIAWAN	AYAM PTG	B.130	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
70	H. RAHMATULLAH	AYAM PTG	B.137	Rp -	Rp -	Rp -
71	ABU BAKAR SIDDIK	AYAM PTG	B.140	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
72	ABDUL RAHMAN	AYAM PTG	B.144	Rp -	Rp -	Rp -
73	JUMBERI	AYAM PTG	B.145	Rp -	Rp -	Rp -
74	IKSAN CALLI	AYAM PTG	B.160	Rp -	Rp -	Rp -
75	BASRULLAH	AYAM PTG	B.161	Rp -	Rp -	Rp -
76	BAHAR	AYAM PTG	B.162	Rp -	Rp -	Rp -
77	ABD. RAHMAN Dg. TAYANG	AYAM PTG	B.163	Rp -	Rp -	Rp -
78	NUR ERNI YUSNITA	AYAM PTG	B.164	Rp -	Rp -	Rp -
79	H. ARIFIN Dg. TAYANG	AYAM PTG	B.165	Rp -	Rp -	Rp -
80	M. RUSLI	AYAM PTG	B.167	Rp -	Rp -	Rp -
81	MUHAMMAD ILYAS	AYAM PTG	B.169	Rp -	Rp -	Rp -
82	JAMAL	AYAM PTG	B.170	Rp -	Rp -	Rp -
83	IRWAN DG. ROA	AYAM PTG	B.171	Rp -	Rp -	Rp -
84	MASYHUR HAPK	AYAM PTG	B.180	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	SUJIYATI	BUAH	E.356	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000
2	AGUSTINA DG.RATU	BUAH	E.378	Rp 3.501.600	Rp -	Rp 2.542.600
3	HASNAH	BUAH	E.386	Rp 1.343.850	Rp -	Rp 1.343.850
4	ABDUL RAUF	BUAH	E.388	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
5	ABDUL RAUF	BUAH	E.389	Rp 1.775.400	Rp -	Rp 1.775.400
6	RIDWAN	BUAH	E.390	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000
7	ABD. MUIS	BUAH	E.397	Rp 4.077.000	Rp -	Rp 4.077.000
8	ISTIKHNA	BUAH	E.411	Rp 1.823.350	Rp 1.200.000	Rp 3.023.350
9	ISTIKHNA	BUAH	E.412	Rp 2.398.750	Rp 1.200.000	Rp 3.598.750
10	AMRAH SYAMSUDDIN	BUAH	E.425	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000
11	DAENG NGAI	BUAH	E.426	Rp 2.926.200	Rp -	Rp 2.926.200
12	DAENG NGAI	BUAH	E.427	Rp 2.974.150	Rp -	Rp 2.974.150
13	SUYADI	BUAH	E.385	Rp -	Rp -	Rp -
14	ETTY HENDARYATI	BUAH	E.387	Rp -	Rp -	Rp -
15	HJ. SOMPA	BUAH	E.349	Rp -	Rp -	Rp -
16	SANTI/MAMA TANANG	BUAH	E.351	Rp -	Rp -	Rp -
17	HASAN GD, TUTU	BUAH	E.352	Rp -	Rp -	Rp -
18	SABIR	BUAH	E.353	Rp -	Rp -	Rp -
19	MEMANG	BUAH	E.354	Rp -	Rp -	Rp -
20	JUMIATI	BUAH	E.355	Rp -	Rp -	Rp -
21	Irwansyah	BUAH	E.357	Rp -	Rp -	Rp -
22	MARDIWATI	BUAH	E.369	Rp -	Rp -	Rp -
23	RABASIAH	BUAH	E.370	Rp -	Rp -	Rp -
24	AGUS CERLY	BUAH	E.371	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
25	SAHARA DG. TANANG	BUAH	E.376	Rp -	Rp -	Rp -
26	AGUSTINA RAMINGO	BUAH	E.377	Rp -	Rp -	Rp -
27	YATEMI	BUAH	E.379	Rp -	Rp -	Rp -
28	MAMIN	BUAH	E.380	Rp -	Rp -	Rp -
29	NURDIN	BUAH	E.381	Rp -	Rp -	Rp -
30	ARMAH	BUAH	E.382	Rp -	Rp -	Rp -
31	NGAI	BUAH	E.383	Rp -	Rp -	Rp -
32	ACHMAD AMIN	BUAH	E.384	Rp -	Rp -	Rp -
33	M. ARIF	BUAH	E.391	Rp -	Rp -	Rp -
34	ACHMAD AMIN	BUAH	E.392	Rp -	Rp -	Rp -
35	ADREANI	BUAH	E.393	Rp -	Rp -	Rp -
36	ENANG	BUAH	E.394	Rp -	Rp -	Rp -
37	DAENG SARO / DG. SANGA	BUAH	E.395	Rp -	Rp -	Rp -
38	PADLIANSYAH	BUAH	E.396	Rp -	Rp -	Rp -
39	AGUS SALIM	BUAH	E.398	Rp -	Rp -	Rp -
40	H.HASRUN THAMRIN	BUAH	E.399	Rp -	Rp -	Rp -
41	SUKMAWATI	BUAH	E.401	Rp -	Rp -	Rp -
42	Hj. DILLANG	BUAH	E.402	Rp -	Rp -	Rp -
43	BAMBANG RIAWAN	BUAH	E.403	Rp -	Rp -	Rp -
44	TAYU	BUAH	E.404	Rp -	Rp -	Rp -
45	BASO DG LAU	BUAH	E.405	Rp -	Rp -	Rp -
46	HASMI	BUAH	E.408	Rp -	Rp -	Rp -
47	SUGIANTO	BUAH	E.413	Rp -	Rp -	Rp -
48	NASRI HAMZI	BUAH	E.414	Rp -	Rp -	Rp -
49	PARYONO	BUAH	E.415	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
50	JOHAR	BUAH	E.416	Rp -	Rp -	Rp -
51	HAYATI	BUAH	E.418	Rp -	Rp -	Rp -
52	ISTIKNA	BUAH	E.419	Rp -	Rp -	Rp -
53	ROMBA	BUAH	E.424	Rp -	Rp -	Rp -
54	HALIFAH	BUAH	E.428	Rp -	Rp -	Rp -
55	ARBAIN	BUAH	E.429	Rp -	Rp -	Rp -
56	ARIFIN	BUAH	E.430	Rp -	Rp -	Rp -
57	ACHMAD MUCHID	BUAH	E.431	Rp -	Rp -	Rp -
58	ROHANI DG. TAYU/USTAF A YUNUS	BUAH	E.432	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	MUHAMMAD SARDI	DAGING	A.25	Rp 1.408.600	Rp 1.210.800	Rp 1.509.500
2	SYAM'ANI	DAGING	A.34	Rp 403.600	Rp -	Rp -
3	DEWI RACHMAWATI	DAGING	A.41	Rp 706.300	Rp -	Rp 706.300
4	MAHESA AQNI	DAGING	A.42	Rp 1.210.800	Rp -	Rp 807.200
5	SUGITAN	DAGING	A.43	Rp 1.507.500	Rp -	Rp -
6	SUGITAN	DAGING	A.44	Rp 1.507.500	Rp -	Rp -
7	SUGIANI	DAGING	A.45	Rp 2.100.900	Rp -	Rp 2.100.900
8	CAHYADI	DAGING	A.46	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 302.700
9	MUHAMMAD MAULANA	DAGING	A.47	Rp 1.210.800	Rp -	Rp 1.210.800
10	ARJUN	DAGING	A.48	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 2.421.600
11	ASRIANSYAH.B	DAGING	A.55	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 1.009.000
12	JULAYHA WULANDARI	DAGING	A.56	Rp 706.300	Rp -	Rp 706.300
13	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.61	Rp 807.200	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
14	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.62	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
15	TAMJIDILLAH	DAGING	A.63	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 1.715.300
16	ADNI FITRI SURYADI	DAGING	A.64	Rp 504.500	Rp 1.210.800	Rp 1.715.300
17	GAZALI RAHMAN	DAGING	A.70	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
18	HENDRA/RAWON	DAGING	A.71	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 605.400
19	DARYANTO	DAGING	A.72	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
20	MUHAMMAD SUPRIANDI	DAGING	A.57	Rp -	Rp -	Rp -
21	ASRIANSYAH	DAGING	A.52	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
22	ASRIANSYAH	DAGING	A.53	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
23	MANSYUR	DAGING	A.49	Rp -	Rp -	Rp -
24	ASTUTI	DAGING	A.36	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
25	MASKUR	DAGING	A.35	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
26	NORIMANSYAH	DAGING	A.37	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
27	IWADIANSYAH	DAGING	A.38	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
28	ERLANSYAH	DAGING	A.39	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
29	SUGIANI	DAGING	A.40	Rp -	Rp 1.210.800	Rp -
30	BUDIANTO	DAGING	A.50	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
31	KASRAN	DAGING	A.51	Rp -	Rp 1.210.800	Rp 1.210.800
32	ZAKARIA RIMBA	DAGING	A.54	Rp -	Rp -	Rp -
33	SABIRIN MUCHTAR	DAGING	A.58	Rp -	Rp -	Rp -
34	ACHMAD MAULANA	DAGING	A.59	Rp -	Rp -	Rp -
35	NOFRIANTO	DAGING	A.60	Rp -	Rp -	Rp -
36	ISHAK	DAGING	A.73	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	SAHARIA	LOS KELONTONGAN	1.690	Rp 2.315.400	Rp 960.000	Rp 3.275.400
2		LOS KELONTONGAN	1.691	Rp 2.315.400	Rp 960.000	Rp 3.275.400
3		LOS KELONTONGAN	1.692	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
4	MAWAR ERVIANA	LOS KELONTONGAN	1.693	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
5		LOS KELONTONGAN	1.694	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
6	ALIANNUR	LOS KELONTONGAN	1.704	Rp 320.000	Rp 960.000	Rp 1.120.000
7		LOS KELONTONGAN	1.705	Rp 320.000	Rp 960.000	Rp 1.120.000
8		LOS KELONTONGAN	1.757	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
9	HJ.HASNAH	LOS KELONTONGAN	1.758	Rp 80.000	Rp -	Rp -
10		LOS KELONTONGAN	1.759	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
11	NOVIA HAYATI	LOS KELONTONGAN	1.762	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
12		LOS KELONTONGAN	1.763	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
13	SUARDI	LOS KELONTONGAN	1.764	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
14	KARSINI	LOS KELONTONGAN	1.765	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
15	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	1.767	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
16	KARMILA SARY	LOS KELONTONGAN	1.768	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
17	AMBO ASSE	LOS KELONTONGAN	1.770	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
18	NURAMINAH/MIRANDA	LOS KELONTONGAN	1.771	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
19	NURAMINAH/MIRANDA	LOS KELONTONGAN	1.772	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
20	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	1.773	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
21	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	1.774	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
22	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	1.775	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
23	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	1.776	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
24	HAIDIR	LOS KELONTONGAN	1.777	Rp 800.000	Rp -	Rp 240.000
25		LOS KELONTONGAN	1.778	Rp 800.000	Rp 960.000	Rp 1.120.000
26	ROSMIATI	LOS KELONTONGAN	1.687	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 1.835.400
27		LOS KELONTONGAN	1.688	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 1.835.400
28	NURLINA	LOS KELONTONGAN	1.856	Rp 2.315.400	Rp -	Rp 2.315.400
29	EDI SAENURI,SH	LOS KELONTONGAN	1.857	Rp 240.000	Rp 960.000	Rp 320.000
30	SITI AMINAH	LOS KELONTONGAN	1.860	Rp 960.000	Rp -	Rp 960.000
31	ZUBAIR	LOS KELONTONGAN	1.863	Rp 480.000	Rp 960.000	Rp 800.000
32		LOS KELONTONGAN	1.864	Rp 480.000	Rp -	Rp -
33	NUR FAUZIAH JAMIL	LOS KELONTONGAN	1.834	Rp -	Rp -	Rp -
34	NUR FAUZIAH JAMIL	LOS KELONTONGAN	1.833	Rp -	Rp -	Rp -
35	ELIS ROWANA SARI	LOS KELONTONGAN	1.848	Rp -	Rp -	Rp -
36	ELIS ROWANA SARI	LOS KELONTONGAN	1.847	Rp -	Rp -	Rp -
37	HJ.HASNAH	LOS KELONTONGAN	1.758	Rp -	Rp -	Rp -
38	HJ.HASNAH	LOS KELONTONGAN	1.757	Rp -	Rp -	Rp -
39	HASRIANI	LOS KELONTONGAN	1.759	Rp -	Rp -	Rp -
40	SITI AMINAH	LOS KELONTONGAN	1.859	Rp -	Rp -	Rp -
41	MARWAH	LOS KELONTONGAN	1.861	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
42	MARWAH	LOS KELONTONGAN	1.862	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
43	EDI SAENURI,SH	LOS KELONTONGAN	1.858	Rp -	Rp 960.000	Rp 80.000
44	MUHAMMAD ILHAM	LOS KELONTONGAN	1.780	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000
45	MUHAMMAD ILHAM	LOS KELONTONGAN	1.781	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000
46	MUHAMMAD ILHAM	LOS KELONTONGAN	1.779	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000
47	AMBO ASSE	LOS KELONTONGAN	1.769	Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000
48	NUR AMINAH / MIRANDA	LOS KELONTONGAN	1.771	Rp -	Rp -	Rp -
49	NUR AMINAH / MIRANDA	LOS KELONTONGAN	1.772	Rp -	Rp -	Rp -
50	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	1.775	Rp -	Rp -	Rp -
51	HAMZAH	LOS KELONTONGAN	1.776	Rp -	Rp -	Rp -
52	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	1.774	Rp -	Rp -	Rp -
53	SATRIANI	LOS KELONTONGAN	1.773	Rp -	Rp -	Rp -
54	H. DILLANG	LOS KELONTONGAN	1.750	Rp -	Rp -	Rp -
55	H. DILLANG	LOS KELONTONGAN	1.751	Rp -	Rp -	Rp -
56	SUWARNA	LOS KELONTONGAN	1.754	Rp -	Rp -	Rp -
57	ULFI	LOS KELONTONGAN	1.755	Rp -	Rp -	Rp -
58	ULFI	LOS KELONTONGAN	1.756	Rp -	Rp -	Rp -
59	ELDI SETIAWAN	LOS KELONTONGAN	1.760	Rp -	Rp -	Rp -
60	HASAN	LOS KELONTONGAN	1.766	Rp -	Rp -	Rp -
61	AMBO ASSE	LOS KELONTONGAN	1.769	Rp -	Rp -	Rp -
62	AMBO ASSE	LOS KELONTONGAN	1.770	Rp -	Rp -	Rp -
63	MUHAMMAD AKSAN TAMRIN	LOS KELONTONGAN	1.689	Rp -	Rp -	Rp -
64	SUARDI	LOS KELONTONGAN	1.748	Rp -	Rp -	Rp -
65	SUARDI	LOS KELONTONGAN	1.749	Rp -	Rp -	Rp -
66	EDY SETIAWAN	LOS KELONTONGAN	1.782	Rp -	Rp -	Rp -
67	EDY SETIAWAN	LOS KELONTONGAN	1.783	Rp -	Rp -	Rp -
68	EDY SETIAWAN	LOS KELONTONGAN	1.784	Rp -	Rp -	Rp -
69	ROSMIATI	LOS KELONTONGAN	1.687	Rp -	Rp -	Rp -
70	ROSMIATI	LOS KELONTONGAN	1.688	Rp -	Rp -	Rp -
71	WINARTI PARADILLA	LOS KELONTONGAN	1.849	Rp -	Rp -	Rp -
72	ELDI SETIAWAN	LOS KELONTONGAN	1.761	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	HAS DANIA	SANDAL/SEPATU	11.03	Rp 1.804.500	Rp -	Rp 1.804.500
2	ROSMANI	ASSESORIS	11.10	Rp 2.646.600	Rp -	Rp 2.646.600
3	AHMAD ARIFIN	MAINAN	11.13	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 1.323.300
4	MISRA	ASSESORIS	11.14	Rp 991.800	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600
5	M.ISMAIL MAPPIASE	MAINAN	11.18	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 1.323.300
6	ANUGRAHWATI	CAMPURAN	11.23	Rp 360.900	Rp 1.443.600	Rp 721.800

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
7	MASDUKI	SANDAL/SEPATU	II.24	Rp 962.400	Rp -	Rp 962.400
8	ZAINAL HAKIM	KAIN	II.27	Rp 962.400	Rp -	Rp 962.400
9	M. HATTA AMRULLAH	ASSESORIS	II.26	Rp 962.400	Rp -	Rp 962.400
10	JUMISI	SEPATU/SANDAL	II.29	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
11	HASMAWI	KAIN	II.31	Rp 842.100	Rp -	Rp -
12	TUDDING	KAIN	II.32	Rp 120.300	Rp -	Rp 120.300
13	NOR ALAM	MAINAN	II.38	Rp 1.323.300	Rp -	Rp 1.323.300
14	AYU DARIANI OTOLUWA	KAIN	II.43	Rp 5.052.600	Rp -	Rp 5.052.600
15	SUGIMI	SANDAL/SEPATU	II.49	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
16	HJ. SITI ALANG	KAIN	II.50	Rp 5.052.600	Rp -	Rp 5.052.600
17	SRI RAHAYU NINGSIH	KOMPUTER	II.54	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
18	ABDUL CHALIK	ASSESORIS	II.55	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
19	ASLAMIAH	MAINAN	II.56	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
20	UMI NURUL HABIBA	C HP & PULSA	II.57	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 1.323.300
21	HERIYANTO	MAINAN	II.61	Rp 1.924.800	Rp -	Rp 1.924.800
22	MULYADI	KAIN	II.62	Rp 5.052.600	Rp -	Rp 5.052.600
23	ZAINAL ARIFIN	KAIN	II.63	Rp 601.500	Rp -	Rp 601.500
24	NUR AMIN	KAIN	II.64	Rp 481.200	Rp -	Rp 481.200
25	HAIDIR	ASSESORIS	II.65	Rp 1.653.000	Rp 1.983.600	Rp 2.314.200
26	ENI KUSRINI (RONI R)	ASSESORIS	II.68	Rp 2.165.400	Rp -	Rp 2.165.400
27	HERAWATI	SOVENIR	II.69	Rp 2.345.850	Rp -	Rp 360.900
28	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II.70	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 2.887.200
29	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II.71	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 2.887.200
30	MASDUKI	SEPATU/SANDAL	II.72	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 2.887.200
31	KARIYATI	OBAT-OBATAN	II.73	Rp 1.082.700	Rp 1.443.600	Rp 2.526.300
32	SUBAKRI	SANDAL/SEPATU	II.74	Rp 2.338.200	Rp 3.117.600	Rp 5.455.800
33	FATMAR	KAIN	II.77	Rp 1.157.100	Rp -	Rp 165.300
34	ERMA DAMAYANTI	KAIN	II.79	Rp 842.100	Rp -	Rp 120.300
35	SITI MUALAFAH	SANDAL/SEPATU	II.82	Rp 1.082.700	Rp -	Rp 1.082.700
36	M.RIFAI	SANDAL/SEPATU	II.83	Rp 962.400	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600
37	NURHASYIM	TOPI	II.84	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp 1.924.800
38	FATMAR	SANDAL/SEPATU	II.117	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
39	SITI MUSDALIFAH	SANDAL/SEPATU	II.144	Rp 721.800	Rp -	Rp 721.800
40	H.SURADI	SANDAL/SEPATU	II.145	Rp 721.800	Rp -	Rp 721.800
41	ABD.RAHMAN	KAIN	II.147	Rp 721.800	Rp -	Rp 721.800
42	DONY SETIAWAN	CAMPURAN	II.08	Rp 721.800	Rp -	Rp -
43	RISNA	CAMPURAN	II.85	Rp -	Rp -	Rp -
44	SUGIARTI	CAMPURAN	II.30	Rp 721.800	Rp -	Rp -
45	ABDUL GHOFUR	ASSESORIS	II.66	Rp 481.200	Rp 1.443.600	Rp 1.924.800
46	MASDUKI	KERAJINAN	II.71	Rp -	Rp -	Rp -
47	SUDIONO	SANDAL/SEPATU	II.151	Rp -	Rp -	Rp -
48	RUDI SALAM	ELEKTRIK	II.53	Rp -	Rp -	Rp -
49	SULAIMAN EFENDI	SANDAL/SEPATU	II.60	Rp -	Rp -	Rp -
50	ABD LATIF	ASSESORIS	II.12	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	AHMADI	KELAPA	A.02	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
2	MAMMA	KELAPA	A.03	Rp 2.313.300	Rp -	Rp -
3	APRIADI	KELAPA	A.05	Rp 2.628.750	Rp -	Rp 2.628.750
4	JAMALUDDIN	KELAPA	B.09	Rp 630.900	Rp -	Rp -
5	SHINTA	KELAPA	B.13	Rp 3.456.900	Rp -	Rp 3.456.900
6	FAISAL	KELAPA	B.14	Rp 5.047.200	Rp -	Rp 5.047.200
7	KAHARUDDIN	KELAPA	B.15	Rp 630.900	Rp -	Rp -
8	YUSUF	KELAPA	B.16	Rp 6.729.600	Rp -	Rp -
9	AMIR	KELAPA	B.17	Rp 1.682.400	Rp -	Rp -
10	M.RUSLI	KELAPA	C.19	Rp 150.300	Rp -	Rp -
11	MARWIAH	KELAPA	C.24	Rp 1.352.700	Rp -	Rp 601.200
12	ROSDIANA	KELAPA	C.25	Rp 420.600	Rp 2.523.600	Rp 630.900
13	RIDWAN	KELAPA	C.26	Rp 420.600	Rp -	Rp -
14	HJ.RUKIAH	KELAPA	C.29	Rp 640.000	Rp -	Rp 640.000
15	HJ. ROSNAINI	KELAPA	D.30	Rp 640.000	Rp -	Rp 640.000
16	HERSAN	KELAPA	D.31	Rp 6.203.850	Rp -	Rp 6.203.850
17	HERSAN	KELAPA	D.32	Rp 3.785.400	Rp -	Rp 3.785.400
18	SRI WAHYUNI	KELAPA	D.33	Rp 3.680.250	Rp -	Rp 3.680.250

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
19	HJ.HASNAH	KELAPA	D.35	Rp 9.673.800	Rp -	Rp 6.834.750
20	M.HUTAGALUNG	KELAPA	E.41	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 1.261.800
21	NUR HAENI	KELAPA	G.58	Rp 3.306.600	Rp -	Rp 3.306.600
22	MARDIANA	KELAPA	G.59	Rp 3.306.600	Rp -	Rp 3.306.600
23	HJ.NURSLAH	KELAPA	F.52	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
24	H.AMREN	KELAPA	G.60	Rp -	Rp -	Rp -
25	H.MUHAMMAD SAID	KELAPA	A.04	Rp -	Rp -	Rp -
26	SYARIFUDDIN	KELAPA	B.08	Rp -	Rp -	Rp -
27	SYARIFUDDIN	KELAPA	C.21	Rp -	Rp -	Rp -
28	NANI	KELAPA	C.23	Rp -	Rp -	Rp -
29	NAHIRA	KELAPA	C.22	Rp -	Rp -	Rp -
30	BASRI	KELAPA	B.11	Rp -	Rp -	Rp -
31	DEPOT SITOANG	KELAPA	C.27	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
32	DEPOT SITOANG	KELAPA	C.28	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
33	RISNAWATI	KELAPA	F.54	Rp -	Rp -	Rp -
34	RISNAWATI	KELAPA	F.53	Rp -	Rp -	Rp -
35	HJ. ROSNAINI	KELAPA		Rp -	Rp -	Rp -
36	RUSDI	KELAPA	B.10	Rp -	Rp -	Rp -
37	MUSTARING	KELAPA	B.12	Rp -	Rp -	Rp -
38	MUNANDAR	KELAPA	B.18	Rp -	Rp -	Rp -
39	H. THAMRIN	KELAPA	C.20	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 841.200
40	DINDA NURUL ISLAMI	KELAPA	D.34	Rp -	Rp -	Rp -
41	YUSUF	KELAPA	G.42	Rp -	Rp -	Rp -
42	MUNANDAR	KELAPA		Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	SUPIANI	EMAS	II.34	Rp 991.800	Rp -	Rp 991.800
2	Hj. MARHANAH	EMAS	II.52	Rp 1.624.050	Rp -	Rp -
3	M.ASDAR	EMAS	II.59	Rp 481.200	Rp 1.983.600	Rp 1.924.800
4	TUTE	EMAS	II.67	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 120.300
5	HJ.NOR HAYATI	EMAS	II.86	Rp 1.804.500	Rp -	Rp -
6	HAMKA	EMAS	II.89	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
7	NASRUDDIN	EMAS	II.92	Rp 2.887.200	Rp 1.443.600	Rp 4.330.800
8	ADHI ACHMAD H	EMAS	II.93	Rp 1.443.600	Rp 1.983.600	Rp 2.270.100
9	FARIDA	EMAS	II.94	Rp 991.800	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600
10	SITI	EMAS	II.95	Rp 2.526.300	Rp -	Rp 601.500
11	MUCHTAR	EMAS	II.96	Rp 962.400	Rp 1.443.600	Rp 2.406.000
12	CONGGENG DARMAWAN / SULLYADI	EMAS	II.98	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
13	JUNAIDI	EMAS	II.99	Rp 962.400	Rp 1.443.600	Rp 2.406.000
14	HASAN / THAMRIN	EMAS	II.101	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
15	SYAIFUL	EMAS	II.102	Rp 2.887.200	Rp 1.443.600	Rp 2.406.000
16	KARTINI	EMAS	II.103	Rp 601.500	Rp -	Rp -
17	ABDUL RAHIM	EMAS	II.104	Rp 601.500	Rp -	Rp -
18	SUDIRMAN	EMAS	II.105	Rp 360.900	Rp -	Rp -
19	ALAMSYAH	EMAS	II.106	Rp 2.135.900	Rp 1.971.600	Rp 4.107.500
20	SUDIRMAN	EMAS	II.107	Rp 360.900	Rp 1.443.600	Rp -
21	LUKMAN	EMAS	II.108	Rp 991.800	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600
22	SUDIRMAN	EMAS	II.109	Rp 1.082.700	Rp 1.983.600	Rp 2.526.300
23	SYAMSIAR / SUWARNI	EMAS	II.111	Rp 2.887.200	Rp -	Rp 1.443.600
24	H.ALIMUDDIN.M.D	EMAS	II.112	Rp 481.200	Rp 1.443.600	Rp 1.924.800
25	WAHYUDDIN	EMAS	II.113	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
26	HASRUL	EMAS	II.115	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600
27	ACHMAD, MD	EMAS	II.119	Rp 2.165.400	Rp -	Rp 2.165.400
28	ZAINUDDIN DAENG SIRUA	EMAS	II.122	Rp 3.609.000	Rp -	Rp 3.609.000
29	HJ.RAHMAYATI	EMAS	II.124	Rp 3.140.700	Rp -	Rp 3.140.700
30	NAIMAH	EMAS	II.125	Rp 1.984.950	Rp 1.443.600	Rp 3.428.550
31	MUNAWIR	EMAS	II.126	Rp 1.503.750	Rp 1.443.600	Rp 2.947.350
32	H.MASDAR	EMAS	II.127	Rp 1.563.900	Rp 1.443.600	Rp 3.007.500
33	FIRMAAN	EMAS	II.128	Rp 1.443.600	Rp 1.443.600	Rp -
34	ABDULLAH	EMAS	II.129	Rp 1.443.600	Rp -	Rp -
35	ASDAR AKHMAD	EMAS	II.130	Rp 2.165.400	Rp 1.443.600	Rp 3.609.000
36	RUDI	EMAS	II.131	Rp 1.443.600	Rp -	Rp -
37	LINA	EMAS	II.132	Rp 721.800	Rp -	Rp -
38	ROSMIATI HS	EMAS	II.133	Rp 2.975.400	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
39	MARWATI	EMAS	II.135	Rp 3.388.650	Rp 1.983.600	Rp 5.372.250
40	KARYAWAN YOGYANTORO	EMAS	II.136	Rp 3.248.100	Rp -	Rp 2.947.350
41	H. ABDUL KHOLIL BIN M	EMAS	II.140	Rp 2.887.200	Rp -	Rp 2.887.200
42	HERAWATI	EMAS	II.141	Rp 2.345.850	Rp -	Rp 360.900
43	SUPIANI	EMAS	II.142	Rp 3.223.350	Rp -	Rp 495.900
44	SUDIRMAN	EMAS	II.05	Rp -	Rp -	Rp -
45	SUDIRMAN	EMAS	II.07	Rp -	Rp -	Rp -
46	SUPIANI	EMAS	II.134	Rp -	Rp -	Rp -
47	ZAKARIA	EMAS	II.90	Rp -	Rp 1.443.600	Rp -
48	ROHANI	EMAS	II.91	Rp -	Rp 1.443.600	Rp -
49	RAHMADI BUSTAMI	EMAS	II.123	Rp -	Rp -	Rp -
50	DARMAWATI	EMAS	II.116	Rp -	Rp 1.983.600	Rp -
51	RUKMAN	EMAS	II.87	Rp -	Rp 1.443.600	Rp -
52	M.YUSUF LIWANG	EMAS	II.88	Rp -	Rp 1.443.600	Rp -
53	FIRMAN	EMAS	II.120	Rp -	Rp -	Rp -
54	M. SUKRI	EMAS	II.118	Rp -	Rp -	Rp -
55	MAIMUNAH	EMAS	II.121	Rp -	Rp 1.443.600	Rp -
56	SITI FATIMAH HARTINAH	EMAS	II.58	Rp -	Rp -	Rp -
57	DARWIS	EMAS	II.97	Rp -	Rp -	Rp -
58	BAHAR	EMAS	II.100	Rp -	Rp -	Rp -
59	H. ABDUL KHALIK	EMAS	II.110	Rp -	Rp -	Rp -
60	ARMAN AMIR	EMAS	II.114	Rp -	Rp -	Rp -
61	ISMAIL	EMAS	II.137	Rp -	Rp -	Rp -
62	SYARIFUDDIN	EMAS	II.138	Rp -	Rp -	Rp -
63	ABDUL RAHMAN	EMAS	II.139	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	BAIHAKI	KELONTONGAN	F.56	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 751.500
2	SUMIATI	KELONTONGAN	G.62	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
3	NUR FARIKAH	KELONTONGAN	H.76	Rp 3.785.400	Rp -	Rp 3.785.400
4	M.HAIDIR	KELONTONGAN	I.82	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
5	FERY JUNAIDI	KELONTONGAN	I.85	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
6	AKHMADI	KELONTONGAN	J.109	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 751.500
7	AKHMADI	KELONTONGAN	J.110	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 751.500
8	SUROTO	KELONTONGAN	L.156	Rp 1.261.800	Rp -	Rp -
9	SITI MASRUHAH	KELONTONGAN	L.157	Rp 751.500	Rp -	Rp 751.500
10	SYARIFUDDIN	KELONTONGAN	L.159	Rp 4.509.000	Rp 2.523.600	Rp 6.312.600
11	NUR FAISYAH	KELONTONGAN	L.160	Rp 2.523.600	Rp -	Rp -
12	KARNIATI	KELONTONGAN	M.162	Rp 1.051.500	Rp -	Rp 1.051.500
13	SUKARI	KELONTONGAN	M.164	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 5.047.200
14	ASRIATUN	KELONTONGAN	M.165	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
15	SUMARNO BADERUN	KELONTONGAN	M.168	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
16	ROFIKUDDIN	KELONTONGAN	M.169	Rp 2.839.050	Rp -	Rp 2.523.600
17	NUR ROZAK	KELONTONGAN	M.170	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
18	SRI WAHYUNI	KELONTONGAN	M.171	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 2.029.050
19	SUPANDI	KELONTONGAN	M.172	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 2.029.050
20	AHMADI	KELONTONGAN	N.181	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
21	AHMAD RIFAI	KELONTONGAN	N.182	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
22	BAIHAKI	KELONTONGAN	N.183	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 751.500
23	PURWATI	KELONTONGAN	M.174	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
24	HASIM AS'ARI	KELONTONGAN	M.175	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
25	SUARDI	KELONTONGAN	N.187	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600
26	MAWAR TORALANGI	KELONTONGAN	O.207	Rp 1.051.500	Rp -	Rp 1.051.500
27	MAWAR TORALANGI	KELONTONGAN	O.209	Rp 751.500	Rp -	Rp 751.500
28	JAZERI BIN SUWARNO	KELONTONGAN	P.218	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 5.047.200
29	RABANG	KELONTONGAN	Q.227	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
30	H. HABBARENG	KELONTONGAN	Q.230	Rp 1.202.400	Rp -	Rp 1.202.400
31	HJ.SITI ALANG	KELONTONGAN	R.234	Rp 1.052.100	Rp 1.803.600	Rp -
32	DARUS SALAM	KELONTONGAN	S.238	Rp 2.705.400	Rp 1.803.600	Rp 1.352.700
33	SARIADI	KELONTONGAN	Z.355	Rp 901.800	Rp -	Rp -
34	H.NOR SAHID	KELONTONGAN	AB.393	Rp 841.200	Rp -	Rp -
35	H.MANAWWING	KELONTONGAN	AC.397	Rp 1.052.100	Rp 2.523.600	Rp 720.000
36	SITI MAIMUNAH	KELONTONGAN	AI.460	Rp 2.103.000	Rp 2.523.600	Rp 2.313.300
37	BADRI KANDAR	KELONTONGAN	E.40	Rp 5.047.200	Rp 2.523.600	Rp 6.624.450

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS
Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
38	ZULKARNAIN	KELONTONGAN	M.176	Rp 3.381.750	Rp -	Rp 3.381.750
39	SYAMSUDDIN	KELONTONGAN	N.180	Rp 3.154.500	Rp -	Rp 630.900
40	ABU SAIRI BIN MAT KUDI	KELONTONGAN	N.185	Rp 3.381.750	Rp -	Rp 3.381.750
41	SUPARNO	KELONTONGAN	N.190	Rp 3.982.950	Rp -	Rp 3.982.950
42	ALDI SUNARYA	KELONTONGAN	Q.226	Rp 3.907.800	Rp -	Rp 3.907.800
43	SAMSUI HADI	KELONTONGAN	H.75	Rp -	Rp 2.883.600	Rp -
44	MUTOHAROH	KELONTONGAN	E.38	Rp 1.261.800	Rp -	Rp -
45	SUCIPTO	KELONTONGAN	M.173	Rp 901.800	Rp -	Rp -
46	HJ.ARTIAH	KELONTONGAN	AG.443	Rp -	Rp -	Rp -
47	H.M.NURUNG,SE	KELONTONGAN	R.237	Rp -	Rp -	Rp -
48	H.TOBA	KELONTONGAN	N.184	Rp -	Rp -	Rp -
49	SIGIT PRAYITNO	KELONTONGAN	G.61	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
50	UTAMI SEPTRIA.D	KELONTONGAN	I.79	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 150.300
51	AS'AD FAJARDIN	KELONTONGAN	I.80	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 121.200
52	HERLINAWATI	KELONTONGAN	I.81	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 841.200
53	HJ.MARHLIMAH	KELONTONGAN	P.220	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 300.600
54	NURHEDA	KELONTONGAN	E.37	Rp -	Rp -	Rp -
55	LERMINA	KELONTONGAN	Z.354	Rp -	Rp -	Rp -
56	SAIDA SILALAH	KELONTONGAN	J.111	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
57	HJ.WANA	KELONTONGAN	N.186	Rp 450.900	Rp -	Rp -
58	HJ.FATIMAH	KELONTONGAN	I.83	Rp -	Rp -	Rp -
59	KARMA	KELONTONGAN	I.84	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 1.261.800
60	KARMA	KELONTONGAN	I.86	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 1.261.800
61	INTAN SURYANI	KELONTONGAN	L.153	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
62	IMRON	KELONTONGAN	L.155	Rp -	Rp -	Rp -
63	NUR AMINAH	KELONTONGAN	L.154	Rp -	Rp -	Rp -
64	M.AGUS LADA	KELONTONGAN	F.55	Rp -	Rp -	Rp -
65	RUSMIN	KELONTONGAN	M.166	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 1.051.500
66	KARNIATI	KELONTONGAN	H.77	Rp -	Rp -	Rp -
67	SUJADI/MARWAH	KELONTONGAN	H.78	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 841.200
68	RUSDIANSYAH	KELONTONGAN	R.235	Rp -	Rp -	Rp -
69	YUSRIADI	KELONTONGAN	R.236	Rp -	Rp -	Rp -
70	SAMSUDDIN	KELONTONGAN	AH.461	Rp -	Rp -	Rp -
71	HJ. SUTIKAH	KELONTONGAN	AB.392	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
72	HJ. SUTIKAH	KELONTONGAN	AB.390	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
73	RUSMIN	KELONTONGAN	M.161	Rp -	Rp -	Rp -
74	FAHRUN NISA	KELONTONGAN	O.208	Rp -	Rp -	Rp -
75	KARSINI	KELONTONGAN	M.179	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.653.300
76	ASRIATUN	KELONTONGAN	N.165	Rp -	Rp -	Rp -
77	SUHARI	KELONTONGAN	N.164	Rp -	Rp -	Rp -
78	SUMIATI	KELONTONGAN	E.39	Rp -	Rp -	Rp -
79	MUHAMMAD YUSUF	KELONTONGAN	M.167	Rp -	Rp -	Rp -
80	SANAWIYAH	KELONTONGAN	P.217	Rp -	Rp -	Rp -
81	HAMSAH	KELONTONGAN	M.163	Rp -	Rp -	Rp -
82	H. NUR AMINAH	KELONTONGAN	N.188	Rp -	Rp -	Rp -
83	SITI FATIMAH	KELONTONGAN	Q.228	Rp -	Rp -	Rp -
84	NUR AMINAH	KELONTONGAN	Q.229	Rp -	Rp -	Rp -
85	BAHARUDDIN	KELONTONGAN	W.274	Rp -	Rp -	Rp -
86	SUPARWANTO	KELONTONGAN	Y.333	Rp -	Rp -	Rp -
87	SRI WAHYUNINGSIH	KELONTONGAN	L.158	Rp -	Rp -	Rp -
88	LALA	KELONTONGAN	P.219	Rp -	Rp -	Rp -
89	ARBAIH	KELONTONGAN	AH.448	Rp -	Rp -	Rp -
90	DWI WIYATI	KELONTONGAN	AF.434	Rp -	Rp -	Rp -
	NUR FAISYAH	KELONTONGAN	M.160		Rp 2.523.600	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	HJ.MARHUMAH	IKAN ASIN	A.07	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 2.705.400
2	YUSUF	IKAN ASIN	E.42	Rp 4.058.100	Rp -	Rp 4.058.100
3	BURHANUDDIN	IKAN ASIN	E.43	Rp 901.800	Rp -	Rp -
4	AKHMADI	IKAN ASIN	F.48	Rp 901.800	Rp -	Rp -
5	HJ.ISIYAH	IKAN ASIN	F.50	Rp 901.800	Rp -	Rp -
6	HJ.HETTY SUSANTI	IKAN ASIN	F.51	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
7	SAHARTINA	IKAN ASIN	F.46	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 2.705.400
8	KAMARUDDIN	IKAN ASIN	G.63	Rp 1.052.100	Rp -	Rp 1.052.100

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS
Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
9	M. RUSLI / NURHAENI	IKAN ASIN	G.64	Rp 3.306.600	Rp -	Rp 3.306.600
10	SATRAWATI	IKAN ASIN	G.66	Rp 3.306.600	Rp -	Rp 3.306.600
11	NURDIANA	IKAN ASIN	G.67	Rp 1.202.400	Rp -	Rp 1.202.400
12	MARDIANA	IKAN ASIN	G.68	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
13	HJ.HABBARENG	IKAN ASIN	G.69	Rp 1.202.400	Rp -	Rp 1.202.400
14	HASMAWATI	IKAN ASIN	H.70	Rp 4.626.600	Rp -	Rp 4.626.600
15	HJ. ANDI YULI	IKAN ASIN	H.72	Rp 3.532.050	Rp -	Rp 3.532.050
16	NUR HAINI	IKAN ASIN	H.73	Rp 6.519.300	Rp -	Rp 6.519.300
17	HJ.TAMARIN	IKAN ASIN	H.74	Rp 3.785.400	Rp -	Rp 3.785.400
18	HJ.WAHIDAH	IKAN ASIN	I.90	Rp 901.800	Rp -	Rp -
19	KASMAWATI	IKAN ASIN	I.91	Rp 901.800	Rp -	Rp -
20	TENNI	IKAN ASIN	I.94	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
21	SERLIANA	IKAN ASIN	I.95	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
22	ERNAWATI	IKAN ASIN	I.96	Rp 150.300	Rp 1.803.600	Rp 601.200
23	ERNAWATI	IKAN ASIN	I.97	Rp 210.300	Rp 2.523.600	Rp 841.200
24	HJ.NURHEDAH	IKAN ASIN	J.98	Rp 901.800	Rp -	Rp -
25	RUDI RISMAWAN	IKAN ASIN	J.99	Rp 901.800	Rp -	Rp -
26	AHMAD RIDWAN/H.M.SETTA	IKAN ASIN	J.102	Rp 901.800	Rp -	Rp -
27	HASNI	IKAN ASIN	J.105	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
28	HAWATIAH	IKAN ASIN	J.106	Rp 901.800	Rp -	Rp -
29	HJ.NAIMAH	IKAN ASIN	J.107	Rp 150.300	Rp 1.803.600	Rp 300.600
30	HASNI	IKAN ASIN	J.108	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
31	UPE	IKAN ASIN	J.119	Rp 1.261.800	Rp -	Rp -
32	BALSIMAH	IKAN ASIN	K.120	Rp 1.202.400	Rp -	Rp 1.202.400
33	ENJONG SUTARJO	IKAN ASIN	K.132	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
34	NOR DIANA	IKAN ASIN	K.137	Rp 1.953.900	Rp -	Rp 1.953.900
35	SITI RAJIYAH	IKAN ASIN	K.138	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
36	H. USMAN G	IKAN ASIN	K.139	Rp 1.953.900	Rp -	Rp 1.953.900
37	BELMA	IKAN ASIN	K.140	Rp 1.051.500	Rp -	Rp 1.051.500
38	BELMA	IKAN ASIN	K.141	Rp 1.051.500	Rp -	Rp 1.051.500
39	HJ.ROSIDAH	IKAN ASIN	L.142	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
40	FAHRUN NISA	IKAN ASIN	L.152	Rp 1.051.500	Rp -	Rp 1.051.500
41	H. SYAMSUDDIN/NUR LAILA	IKAN ASIN	D.36	Rp 8.412.000	Rp -	Rp -
42	HJ.ABA	IKAN ASIN	K.131	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
43	HJ.ABA	IKAN ASIN	H.71	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
44	UTAMI SEPTRIA.D	IKAN ASIN	I.89	Rp -	Rp -	Rp -
45	AS'AD FAJARDIN	IKAN ASIN	I.87	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 450.900
46	HASLIANI	IKAN ASIN	J.101	Rp -	Rp -	Rp -
47	HJ.HAJRAH	IKAN ASIN	J.100	Rp -	Rp -	Rp -
48	NADIA YULISTIANA	IKAN ASIN	I.88	Rp -	Rp -	Rp -
49	BURHANUDDIN	IKAN ASIN	L.143	Rp -	Rp -	Rp -
50	HAERUDDIN	IKAN ASIN	L.144	Rp -	Rp -	Rp -
51	DALIMAH	IKAN ASIN	L.145	Rp -	Rp -	Rp -
52	SYAMSUDDIN	IKAN ASIN	E.44	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
53	MUHAMMAD SYAHBAN	IKAN ASIN	F.49	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
54	AGUS S.Pdi,MPd	IKAN ASIN	J.103	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
55	HJ. DARA ULANG	IKAN ASIN	E.45	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
56	DALIMAH	IKAN ASIN	K.135	Rp -	Rp -	Rp -
57	ROSMELI	IKAN ASIN	I.92	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
58	DALIMAH	IKAN ASIN	L.135	Rp -	Rp -	Rp -
59	HJ.DARA ULANG	IKAN ASIN	G.45	Rp -	Rp -	Rp -
60	HJ.MATA BINTI TENNE	IKAN ASIN	I.93	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
61	HJ.ABA	IKAN ASIN	K.71	Rp -	Rp -	Rp -
62	AISYAH	IKAN ASIN	K.133	Rp -	Rp -	Rp -
63	NASRULLAH	IKAN ASIN	F.47	Rp -	Rp -	Rp -
64	H. ACHMAD	IKAN ASIN	J.104	Rp -	Rp -	Rp -
65	HJ. RUPIAH	IKAN ASIN	K.134	Rp -	Rp -	Rp -
66	SARLINDA	IKAN ASIN	K.136	Rp -	Rp -	Rp -
				Rp -	Rp -	Rp -
1	H. M. AS EDY ASIS	SEMPAKO	A.01	Rp 4.836.900	Rp -	Rp 4.836.900
2	SYARIFUDDIN	SEMPAKO	J.113	Rp 601.200	Rp -	Rp 601.200
3	H. RAHMAN	SEMPAKO	K.121	Rp 1.202.400	Rp 1.803.600	Rp 3.006.000
4	M. TAHER	SEMPAKO	K.124	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.052.100

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
5	INDO UNGA	SEBAKO	K.129	Rp 150.300	Rp -	Rp 150.300
6	MAWAR	SEBAKO	K.130	Rp 5.572.950	Rp -	Rp 3.154.500
7	ROSMELI	SEBAKO	L.151	Rp 751.500	Rp -	Rp 751.500
8	SAIDATUL WILDANIYAH	SEBAKO	N.191	Rp 2.523.600	Rp -	Rp -
9	AHMAD RIDWAN	SEBAKO	N.192	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
10	H.BAHARUDDIN	SEBAKO	N.193	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
11	HASRIA	SEBAKO	N.195	Rp 3.306.600	Rp -	Rp -
12	SYAMSIH	SEBAKO	N.196	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
13	RIKA AYUNINGTYAS	SEBAKO	N.197	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
14	HJ. RAHMAH	SEBAKO	N.201	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
15	MAPPEASE	SEBAKO	O.206	Rp 150.300	Rp -	Rp 150.300
16	LALA	SEBAKO	O.210	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 2.705.400
17	NURHAYATI	SEBAKO	R.231	Rp 3.907.800	Rp -	Rp 3.907.800
18	MUHAMMAD TAHER	SEBAKO	R.232	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.052.100
19	KADDAS	SEBAKO	S.241	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
20	SAMUDDIN	SEBAKO	S.242	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
21	H.M. SETTA	SEBAKO	T.245	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
22	EKA SAVITRI	SEBAKO	T.248	Rp 3.381.750	Rp -	Rp 3.381.750
23	SUBANDI	SEBAKO	T.250	Rp 150.300	Rp -	Rp 150.300
24	HARIANI HAMID	SEBAKO	T.254	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
25	HJ.MARIANA	SEBAKO	U.255	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
26	RATNA	SEBAKO	U.256	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 1.051.500
27	H.M. SAING	SEBAKO	U.259	Rp 3.381.750	Rp -	Rp 3.381.750
28	EVA RAMDHANIATI	SEBAKO	U.260	Rp 4.509.000	Rp -	Rp 4.509.000
29	AMBO ASSE	SEBAKO	U.261	Rp 3.907.800	Rp -	Rp 3.907.800
30	M. SYAIFUL	SEBAKO	U.262	Rp 3.907.800	Rp -	Rp 3.907.800
31	AKHMAD SURYAS MARO,SP	SEBAKO	U.263	Rp 630.900	Rp 2.523.600	Rp 630.900
32	EDY EDWIN HARIJANTO	SEBAKO	V.264	Rp 4.509.000	Rp -	Rp 4.509.000
33	ROSLI ROSMAWATI	SEBAKO	V.265	Rp 3.907.800	Rp -	Rp 3.907.800
34	MURDAWIAH	SEBAKO	V.266	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
35	HJ.DAIYAH	SEBAKO	V.269	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
36	ANDI AGUS SURIANTO	SEBAKO	V.270	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
37	SARIADI	SEBAKO	V.271	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp -
38	MUHAMMAD RIFAL	SEBAKO	V.273	Rp 3.575.100	Rp -	Rp 3.575.100
39	HASNI	SEBAKO	W.275	Rp 5.936.850	Rp -	Rp 4.512.271
40	ARLINA	SEBAKO	W.276	Rp 5.410.800	Rp -	Rp 3.000.000
41	RABI	SEBAKO	W.277	Rp 4.208.400	Rp -	Rp 4.208.400
42	TARLIAH	SEBAKO	W.278	Rp 5.035.050	Rp -	Rp 5.035.050
43	M.I.LHAM	SEBAKO	W.283	Rp 751.500	Rp 1.803.600	Rp 450.900
44	SAMIRUDDIN	SEBAKO	W.285	Rp 300.600	Rp -	Rp 300.600
45	H.MUHAS EDY	SEBAKO	W.286	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
46	HJ. HANAFIAH	SEBAKO	W.287	Rp 601.200	Rp 1.803.600	Rp 751.500
47	HJ. SRI WAHYUNI	SEBAKO	X.296	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
48	H. H. AS EDY ASIS	SEBAKO	X.298	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
49	ENY SUPRATIWI	SEBAKO	X.299	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
50	MARYATI	SEBAKO	X.301	Rp 901.800	Rp -	Rp -
51	SRI WAHYUNI	SEBAKO	X.302	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
52	H.SITTI	SEBAKO	X.306	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 420.600
53	MANISI	SEBAKO	X.309	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 1.472.100
54	SARIFAH INTAN	SEBAKO	X.310	Rp 2.839.050	Rp -	Rp 2.839.050
55	HARTONO	SEBAKO	X.311	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
56	MURNAH	SEBAKO	X.312	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
57	MURNAH	SEBAKO	X.313	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
58	ABD.GANI	SEBAKO	Y.315	Rp 751.500	Rp 1.803.600	Rp 450.900
59	JUMADI	SEBAKO	Y.317	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
60	MUSTAFA	SEBAKO	Y.318	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 1.261.800
61	ABDUL RAHMAN	SEBAKO	Y.320	Rp 630.900	Rp -	Rp 630.900
62	HJ.RAHYA LIWANG	SEBAKO	Y.321	Rp 1.472.100	Rp 2.523.600	Rp -
63	SELFITRI REGISTRIAWATI	SEBAKO	Y.322	Rp 1.052.100	Rp 1.803.600	Rp -
64	YULIA PURWATI	SEBAKO	Y.323	Rp 1.051.500	Rp 2.523.600	Rp 630.900
65	HADRIA INTAN	SEBAKO	Y.324	Rp 1.653.300	Rp 1.803.600	Rp 3.456.900
66	DARMIATI	SEBAKO	Y.332	Rp 751.500	Rp -	Rp 751.500
67	ABDUL KARIM	SEBAKO	Z.334	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 5.047.200

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
68	H. BANDU	SEBAKO	Z.335	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
69	WARDIONO	SEBAKO	Z.336	Rp 751.500	Rp 1.803.600	Rp 450.900
70	ASMARANI	SEBAKO	Z.339	Rp 901.800	Rp -	Rp -
71	AGUSTINA, PL	SEBAKO	Z.340	Rp 4.509.000	Rp -	Rp 4.058.100
72	SRI WAHYUNI	SEBAKO	Z.344	Rp 150.300	Rp 1.803.600	Rp 450.900
73	HILDA	SEBAKO	Z.346	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
74	HJ. ROSANA	SEBAKO	Z.347	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
75	H. RAHMAN REDDE	SEBAKO	Z.348	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
76	MEGAWATI	SEBAKO	Z.350	Rp 751.500	Rp -	Rp 751.500
77	TRI PUJANTO	SEBAKO	Z.351	Rp 901.800	Rp -	Rp -
78	ABDUL GANI	SEBAKO	Z.352	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 2.705.400
79	TAMASIAH	SEBAKO	Z.353	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
80	H.RAHMAH	SEBAKO	AA.359	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.427.850
81	HAJRAH	SEBAKO	AA.361	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.427.850
82	MURNI	SEBAKO	AA.362	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
83	MUCHLIS	SEBAKO	AA.363	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
84	HJ.HESTI	SEBAKO	AA.364	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
85	HARYATI	SEBAKO	AA.365	Rp 4.058.100	Rp -	Rp 4.058.100
86	HJ.KHODJAH	SEBAKO	AA.366	Rp 150.300	Rp -	Rp 150.300
87	NUR AISYAH	SEBAKO	AA.367	Rp 841.200	Rp 2.523.600	Rp 1.051.500
88	ALI FAUZI	SEBAKO	AA.368	Rp 2.254.500	Rp -	Rp 2.254.500
89	ABD.RASYID	SEBAKO	AB.379	Rp 751.500	Rp 1.803.600	Rp 450.900
90	M. TAUFIQ	SEBAKO	AB.381	Rp 901.800	Rp -	Rp -
91	MARIYATI	SEBAKO	AB.387	Rp 450.900	Rp 1.803.600	Rp 450.900
92	SYAHRONI	SEBAKO	AB.388	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
93	AHMAD	SEBAKO	AC.399	Rp 210.300	Rp -	Rp -
94	H.PINDI	SEBAKO	AE.400	Rp 240.300	Rp -	Rp 90.000
95	BAHRI	SEBAKO	AC.404	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
96	HASMA	SEBAKO	AD.412	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600
97	HASRIWATI	SEBAKO	AD.413	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.052.100
98	IBRAHIM	SEBAKO	AD.414	Rp 1.503.000	Rp -	Rp 1.503.000
99	ABDUL LATIF	SEBAKO	AD.415	Rp 2.855.700	Rp -	Rp 2.855.700
100	HASMA	SEBAKO	AD.416	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600
101	SUHIRMAN	SEBAKO	AD.417	Rp 3.306.600	Rp 1.803.600	Rp 5.110.200
102	AMBO ASSE	SEBAKO	AE.419	Rp 1.953.900	Rp -	Rp 1.953.900
103	H.PINDI	SEBAKO	AE.420	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
104	MUHTAR	SEBAKO	AE.422	Rp 5.410.800	Rp -	Rp 5.410.800
105	HASANUDDIN	SEBAKO	AE.423	Rp 3.607.200	Rp 1.803.600	Rp 5.410.800
106	ARDIANTO	SEBAKO	AE.425	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
107	UMI SURYATI	SEBAKO	AE.427	Rp 3.607.200	Rp 1.803.600	Rp 3.306.600
108	RUDIYANTO	SEBAKO	AF.430	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
109	ANDI MUNIARTY AMY	SEBAKO	AF.432	Rp 150.300	Rp 1.803.600	Rp 150.300
110	HJ.SITI AMINAH	SEBAKO	AF.431	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
111	HJ. AGUSTINA	SEBAKO	AF.437	Rp 2.523.600	Rp -	Rp -
112	AMINAH	SEBAKO	AF.438	Rp 1.682.400	Rp -	Rp 721.200
113	TAKBIR	SEBAKO	AG.439	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp 5.047.200
114	NURUL ARIFAH	SEBAKO	AG.441	Rp 1.472.100	Rp -	Rp 1.472.100
115	SYARIFUDDIN M	SEBAKO	AH.444	Rp 1.472.100	Rp -	Rp 1.472.100
116	RAHMATUL ZUHRIAH	SEBAKO	AH.445	Rp 1.472.100	Rp -	Rp 1.472.100
117	DARMANI	SEBAKO	AH.446	Rp 5.047.200	Rp 2.523.600	Rp 7.570.800
118	KARSINI	SEBAKO	AH.447	Rp 1.261.800	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600
119	ARBAIN	SEBAKO	AH.448	Rp 2.313.300	Rp 2.523.600	Rp 4.416.300
120	HUBAIBAH MADUNG	SEBAKO	AH.450	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
121	ALI AKBAR	SEBAKO	AH.451	Rp 1.052.100	Rp 1.803.600	Rp -
122	HJ.SITI PAHIRA	SEBAKO	AH.456	Rp 450.900	Rp -	Rp 450.900
123	HERMANSYAH	SEBAKO	AI.458	Rp 1.472.100	Rp -	Rp -
124	DARMAWATI	SEBAKO	AI.459	Rp 841.200	Rp -	Rp 210.300
125	AISYAH	SEBAKO	AI.462	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
126	KAMARUDDIN	SEBAKO	AI.463	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
127	HJ.HAMDANA	SEBAKO	AI.465	Rp 841.200	Rp 2.523.600	Rp 3.364.800
128	JIMMI INDRAWAN	SEBAKO	AI.467	Rp 841.200	Rp -	Rp 240.000
129	ABDUL SAMAD	SEBAKO	AJ.468	Rp 3.785.400	Rp -	Rp 2.523.600
130	EDY RAHMAN	SEBAKO	AJ.471	Rp 841.200	Rp -	Rp 841.200

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
131	JULIAH. P	SEBAKO	J.116	Rp 3.081.150	Rp -	Rp 3.081.150
132	SANIASA	SEBAKO	L.146	Rp 3.532.050	Rp -	Rp 3.532.050
133	SURIANTO	SEBAKO	L.149	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 2.705.400
134	TOUPIK ROKI	SEBAKO	N.189	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
135	KASNIARTI ROSADI UTAMI	SEBAKO	O.202	Rp 3.154.500	Rp -	Rp -
136	ANWAR G	SEBAKO	O.211	Rp 2.254.500	Rp -	Rp -
137	SUHARTINA	SEBAKO	P.212	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 1.803.600
138	HJ. HAJRAH	SEBAKO	P.213	Rp 2.705.400	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
139	H.ARIFIN DG. NAPIING	SEBAKO	P.216	Rp 3.156.300	Rp -	Rp 3.156.300
140	HJ. SRI WAHYUNI	SEBAKO	Q.225	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
141	ABDUL KADIR	SEBAKO	V.267	Rp 2.329.650	Rp -	Rp -
142	M. MUID	SEBAKO	W.281	Rp 4.058.100	Rp -	Rp 4.058.100
143	ENY SUPRATIWI	SEBAKO	W.288	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
144	HASMA	SEBAKO	W.291	Rp 3.682.350	Rp -	Rp 2.179.350
145	SUMARDI	SEBAKO	W.292	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 1.202.400
146	M. TAUFIQ	SEBAKO	X.297	Rp 3.156.300	Rp -	Rp -
147	WIWIN ROSLAN	SEBAKO	X.305	Rp 3.607.200	Rp -	Rp 3.607.200
148	SUMARDI	SEBAKO	X.307	Rp 2.705.400	Rp -	Rp 1.202.400
149	TAUPIK ROKI	SEBAKO	Y.325	Rp 2.029.050	Rp -	Rp 1.803.600
150	NURHANA	SEBAKO	Y.329	Rp 3.006.000	Rp -	Rp 3.006.000
151	HASMA	SEBAKO	Y.330	Rp 3.006.000	Rp -	Rp 3.006.000
152	KHAMDAN	SEBAKO	AB.380	Rp 2.029.050	Rp 1.803.600	Rp 2.029.050
153	AMRIZAL	SEBAKO	AB.383	Rp 5.711.400	Rp -	Rp 5.711.400
154	NURSANTI	SEBAKO	AC.403	Rp 2.555.100	Rp -	Rp 2.555.100
155	H. HENDRA CIPTA	SEBAKO	AC.405	Rp 4.311.150	Rp -	Rp 4.311.150
156	IRAWATI	SEBAKO	AD.411	Rp 3.757.500	Rp -	Rp 3.757.500
157	KAMARUDDIN	SEBAKO	AJ.473	Rp 4.416.300	Rp -	Rp 2.432.700
158	LINA	SEBAKO	AJ.474	Rp 3.785.400	Rp -	Rp 3.785.400
159	ANDI SENAWATI	SEBAKO	K.126	Rp -	Rp -	Rp -
160	ROSLINA	SEBAKO	Q.224	Rp -	Rp -	Rp -
161	SARIADI	SEBAKO	Z.341	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
162	KASMAWATI SABIR	SEBAKO	U.258	Rp -	Rp -	Rp -
163	ANDI MUNIARTY AMY	SEBAKO	AB.394	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
164	ANDI MUNIARTY AMY	SEBAKO	AF.433	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 150.300
165	DWI WIYATI	SEBAKO	AF.434	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
166	SITTI WIJATI	SEBAKO	AB.395	Rp 841.200	Rp -	Rp -
167	RUSDI	SEBAKO	AF.436	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
168	HASNAWIYAH	SEBAKO	K.123	Rp -	Rp -	Rp -
169	HJ.NURBAYA	SEBAKO	L.150	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
170	HERLINAWATI	SEBAKO	Z.349	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
171	H.ACHMAD	SEBAKO	AB.382	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
172	ANDI MASARAPPI/JUSNIATI	SEBAKO	Y.316	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
173	BURHANUDDIN	SEBAKO	AJ.470	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
174	SANTI	SEBAKO	AJ.472	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
175	SAIDA SILALAH	SEBAKO	J.112	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
176	SAIDA SILALAH	SEBAKO	J.114	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
177	NENGSI NASIR	SEBAKO	K.128	Rp -	Rp -	Rp -
178	MULYANI	SEBAKO	K.122	Rp -	Rp -	Rp -
179	ANDI TENDRI GAU	SEBAKO	K.127	Rp -	Rp -	Rp -
180	ANDI SAKKA	SEBAKO	K.125	Rp -	Rp -	Rp -
181	RUSLINA,SH	SEBAKO	AC.398	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
182	M.ARAS	SEBAKO	W.295	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 1.261.800
183	BATI ERWAN	SEBAKO	AH.449	Rp -	Rp -	Rp -
184	AHMADI	SEBAKO	T.249	Rp -	Rp -	Rp -
185	HJ.DINA HERAWATI	SEBAKO	AC.400	Rp -	Rp -	Rp -
186	RAHMAN	SEBAKO	AC.401	Rp 150.300	Rp -	Rp -
187	SRI WAHYUNINGSIH	SEBAKO	L.158	Rp -	Rp -	Rp -
188	IDRIS	SEBAKO	Y.319	Rp -	Rp -	Rp -
189	AHMAD SARIFUDDIN	SEBAKO	AD.408	Rp -	Rp -	Rp -
190	MUHAMMAD FIRMAN HD	SEBAKO	Z.337	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
191	HARISMAN	SEBAKO	W.282	Rp 901.800	Rp -	Rp 901.800
192	SARINAH	SEBAKO	AG.442	Rp -	Rp -	Rp -
193	LAHANG	SEBAKO	T.251	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
194	H.ABDULLAH	SEBAKO	T.252	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
195	NASRULLAH	SEBAKO	AF.435	Rp 1.261.800	Rp -	Rp 1.261.800
196	MUSYIRATIKA	SEBAKO	R.233	Rp -	Rp -	Rp -
197	SOPPENG MALEWA	SEBAKO	S.244	Rp -	Rp -	Rp -
198	LIAS	SEBAKO	S.239	Rp 630.900	Rp -	Rp -
199	LIAS	SEBAKO	S.240	Rp 630.900	Rp -	Rp -
200	SARIYEM	SEBAKO	Q.221	Rp 150.300	Rp -	Rp -
201	MUSTAMIN	SEBAKO	AA.372	Rp -	Rp -	Rp -
202	JAZERI	SEBAKO	AA.358	Rp -	Rp -	Rp -
203	MUSTAMIN	SEBAKO	AA.376	Rp -	Rp -	Rp -
204	ABDULLAH MALIK	SEBAKO	AA.375	Rp -	Rp -	Rp -
205	MASTIYAH	SEBAKO	AA.369	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 150.300
206	ABDULLAH MALIK	SEBAKO	AA.371	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 450.900
207	IRA PUSPITA SARI	SEBAKO	AA.357	Rp -	Rp -	Rp -
208	H.DARWIS	SEBAKO	U.257	Rp -	Rp -	Rp -
209	HJ.WALANG	SEBAKO	AG.384	Rp -	Rp -	Rp -
210	SUDARTI	SEBAKO	X.308	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600	Rp -
211	RIDWAN	SEBAKO	X.300	Rp -	Rp -	Rp -
212	SUMARNI	SEBAKO	O.203	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 901.800
213	RIDWAN	SEBAKO	O.204	Rp -	Rp -	Rp -
214	SUMARNI	SEBAKO	O.205	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
215	RIDWAN	SEBAKO	L.148	Rp -	Rp -	Rp -
216	HARTONO	SEBAKO	W.289	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
217	HARTONO	SEBAKO	X.303	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
218	MULI	SEBAKO	T.253	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
219	M.KHALILUL RAHMAN	SEBAKO	AE.426	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
220	HASMAH	SEBAKO	AE.418	Rp -	Rp -	Rp -
221	SYARIFAH	SEBAKO	AE.424	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
222	SITI TARSIAH	SEBAKO	AG.440	Rp 1.261.800	Rp -	Rp 1.261.800
223	SUPARDI	SEBAKO	AE.429	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 300.600
224	SARJIATI	SEBAKO	AJ.469	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 420.600
225	RAHMAN MANAF	SEBAKO	AE.428	Rp -	Rp -	Rp -
226	SUPARDI	SEBAKO	P.214	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 300.600
227	BURHANUDDIN	SEBAKO	M.177	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600
228	SUTIKAH	SEBAKO	AB.391	Rp -	Rp 2.523.600	Rp 2.523.600
229	MUHAQSHA	SEBAKO	T.247	Rp -	Rp -	Rp -
230	SALBIAH	SEBAKO	AE.421	Rp -	Rp 1.803.600	Rp 450.900
231	RAKHMATUL ZUHRIAH	SEBAKO	AG.445	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
232	SYARIFUDDIN	SEBAKO	AG.444	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
233	JUMADI	SEBAKO	AC.402	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
234	HJ. JAMILAH	SEBAKO	AA.377	Rp -	Rp -	Rp -
235	NURUL HIKMAH	SEBAKO	AI.464	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 1.261.800
236	BAIJHAKI	SEBAKO	F.57	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 901.800
237	MUHAMMAD FIRMAN,HD	SEBAKO	Z.237	Rp -	Rp -	Rp -
238	RASMIDA	SEBAKO	Z.345	Rp -	Rp -	Rp -
239	RAHMAT	SEBAKO	Y.326	Rp -	Rp -	Rp -
240	MADE	SEBAKO	Z.338	Rp -	Rp -	Rp -
241	KARSINI	SEBAKO	M.178	Rp 901.800	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600
242	NURLINA WATI	SEBAKO	AH.452	Rp -	Rp -	Rp -
243	HJ. LIJAH	SEBAKO	AH.453	Rp -	Rp -	Rp -
244	NURUL HIKMAH	SEBAKO	AH.454	Rp -	Rp -	Rp -
245	DATU SALEHUDDIN	SEBAKO	AH.455	Rp -	Rp -	Rp -
246	M. AMIN	SEBAKO	J.117	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
247	H. SUPARDI	SEBAKO	N.199	Rp -	Rp -	Rp -
248	ROSMIATI	SEBAKO	T.246	Rp 150.300	Rp -	Rp 150.300
249	SULEMAN	SEBAKO	V.268	Rp 1.472.100	Rp -	Rp -
250	SELFITRI REGISTIAWATI	SEBAKO	W.290	Rp -	Rp -	Rp -
251	IRHAM WIJAYA	SEBAKO	X.304	Rp -	Rp -	Rp -
252	BUSTAMAL JAYA	SEBAKO	X.314	Rp -	Rp -	Rp -
253	PATIMAH	SEBAKO	Y.328	Rp 1.503.000	Rp 1.803.600	Rp 2.404.800
254	HJ. WALANG	SEBAKO	AB.384	Rp 450.900	Rp -	Rp 450.900
255	MARIANI	SEBAKO	AD.409	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
256	SUCIATI	SEBAKO	AD.410	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
257	MADE ALI	SEBAKO	J.115	Rp -	Rp -	Rp -
258	HJ. WAHIDAH	SEBAKO	J.118	Rp -	Rp -	Rp -
259	MUHAMMAD SALEH	SEBAKO	L. 147	Rp -	Rp -	Rp -
260	H. MUSLIMIN	SEBAKO	N.194	Rp -	Rp -	Rp -
261	SUDIRMAN	SEBAKO	N.198	Rp -	Rp -	Rp -
262	HARIYATI	SEBAKO	N.200	Rp -	Rp -	Rp -
263	SAMUEL TP	SEBAKO	P.215	Rp -	Rp -	Rp -
264	IBRAHIM	SEBAKO	Q.222	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
265	DARWIS	SEBAKO	Q.223	Rp -	Rp -	Rp -
266	KAHARUDDIN, SE	SEBAKO	S.243	Rp -	Rp -	Rp -
267	AIDIL FITRIANI	SEBAKO	V.272	Rp -	Rp -	Rp -
268	HJ. MUJISAH	SEBAKO	W.279	Rp -	Rp -	Rp -
269	CINGKERU	SEBAKO	W.280	Rp -	Rp -	Rp -
270	JUMIATI	SEBAKO	W.284	Rp -	Rp -	Rp -
271	IRIANI	SEBAKO	W.293	Rp -	Rp -	Rp -
272	JAMALUDDIN	SEBAKO	W.294	Rp -	Rp -	Rp -
273	HJ. FARIDAH	SEBAKO	Y.327	Rp -	Rp -	Rp -
274	SUPRIADI	SEBAKO	Y.331	Rp -	Rp -	Rp -
275	SUNANDAR	SEBAKO	Z.342	Rp -	Rp -	Rp -
276	DWI WIYATI	SEBAKO	Z.343	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
277	NURHANA	SEBAKO	AA.356	Rp 2.523.600	Rp -	Rp 2.523.600
278	H. HANAPING	SEBAKO	AA.360	Rp -	Rp -	Rp -
279	JOKO SUPRIYO	SEBAKO	AA.370	Rp 1.803.600	Rp -	Rp 1.803.600
280	HJ. NORMA IDALIAH	SEBAKO	AA.373	Rp -	Rp -	Rp -
281	KASUWA	SEBAKO	AA.374	Rp -	Rp -	Rp -
282	SLAMET	SEBAKO	AB.378	Rp -	Rp -	Rp -
283	ARI HAMBALI	SEBAKO	AB.385	Rp -	Rp -	Rp -
284	SULAIMAN	SEBAKO	AB.386	Rp -	Rp -	Rp -
285	ARMIATI	SEBAKO	AB.389	Rp -	Rp -	Rp -
286	HJ. RUSDIANA	SEBAKO	AB.396	Rp 1.803.600	Rp 1.803.600	Rp 3.607.200
287	MAHMUD MARZUKI	SEBAKO	AD.406	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
288	NURHAEDA	SEBAKO	AD.407	Rp 1.803.600	Rp -	Rp -
289	JIMI INDRAMAN	SEBAKO	AI.466	Rp -	Rp 2.523.600	Rp -
290	HUBAIBAH MADUNG	SEBAKO	AJ.450	Rp -	Rp -	Rp -
291	HASANUDDIN	SEBAKO	L.145	Rp -	Rp 1.803.600	Rp -
292	HJ ARTIAH	SEBAKO	AG.443	Rp -	Rp -	Rp -
	LINA	SEBAKO	AF.474		Rp 2.523.600	Rp 2.523.600
				Rp -	Rp -	Rp -
1	SYAMSUL BAHRI	KAIN	I.152	Rp 5.220.600	Rp -	Rp 5.220.600
2	HJ.BABA	KAIN	I.158	Rp 474.600	Rp 2.847.600	Rp 237.300
3	MURNI	KAIN	I.161	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
4	M. RUSLAN	KAIN	I.162	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 3.322.200
5	SURIANI	KAIN	I.163	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp 1.423.800
6	HJ.RAMLAWATI	KAIN	I.164	Rp 8.305.500	Rp -	Rp 8.305.500
7	H.KAMSIAH	KAIN	I.165	Rp 1.661.100	Rp -	Rp 1.661.100
8	HJ. RABIAH	KAIN	I.166	Rp 3.440.850	Rp -	Rp 3.440.850
9	RUSNAINI	KAIN	I.167	Rp 3.559.500	Rp 2.847.600	Rp 6.407.100
10	SITI AISYAH	KAIN	I.168	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
11	SUARDI	KAIN	I.170	Rp 4.271.400	Rp -	Rp 4.271.400
12	FARIDA	KAIN	I.171	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 5.220.600
13	H.IMRON	KAIN	I.172	Rp 237.300	Rp 2.847.600	Rp 3.084.900
14	RIZKY AULIA RAHMAN	KAIN	I.173	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 5.220.600
15	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I.175	Rp 3.915.450	Rp 2.847.600	Rp 6.763.050
16	RENI SUMARNI	KAIN	I.176	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp -
17	H.M.TAHER	KAIN	I.177	Rp 1.423.800	Rp -	Rp -
18	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I.178	Rp 3.915.450	Rp 2.847.600	Rp 1.186.500
19	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	I.179	Rp 4.390.050	Rp 2.847.600	Rp 1.186.500
20	PANDEF RUDIANTO	KAIN	I.180	Rp 949.200	Rp -	Rp -
21	H. MASUD / HAMKA	KAIN	I.182	Rp 7.237.650	Rp -	Rp 2.847.600
22	H. SULEMAN	KAIN	I.183	Rp 7.237.650	Rp -	Rp 2.847.600
23	HJ.RABIA	KAIN	I.184	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
24	H.ALIAS	KAIN	I.185	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
25	WAHID ISMAIL	KAIN	I.190	Rp 5.695.200	Rp 2.847.600	Rp 8.542.800

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
26	RASIDAH	KAIN	1.191	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 711.900
27	H. SUDIRMAN	KAIN	1.192	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
28	PATMAWATI	KAIN	1.193	Rp 5.220.600	Rp -	Rp 5.220.600
29	SUARDI	KAIN	1.194	Rp 3.029.400	Rp -	Rp 3.029.400
30	ILLANG	KAIN	1.195	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
31	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	1.196	Rp 2.861.100	Rp -	Rp 2.861.100
32	VIRZINIA SYAKINAH	KAIN	1.197	Rp 2.861.100	Rp -	Rp 2.861.100
33	HJ. SALMAWATI	KAIN	1.198	Rp 5.049.000	Rp 2.019.600	Rp 7.068.600
34	MUHAMMAD SAING	KAIN	1.199	Rp 5.049.000	Rp 2.019.600	Rp 7.068.600
35	HJ. YANTI DARMILA SARI	KAIN	1.200	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
36	MARIAMA HS	KAIN	1.201	Rp 5.049.000	Rp -	Rp 5.049.000
37	ZAINUDDIN	KAIN	1.202	Rp 1.009.800	Rp -	Rp -
38	HJ. SALMAWATI	KAIN	1.203	Rp 7.119.000	Rp 2.847.600	Rp 9.966.600
39	H.ALIAS	KAIN	1.204	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
40	H. ALIMING PADDA	KAIN	1.205	Rp 7.119.000	Rp 2.847.600	Rp 9.966.600
41	SUPARWANTO	KAIN	1.206	Rp 2.847.600	Rp -	Rp 1.423.800
42	DAENG NISIAN	KAIN	1.207	Rp 3.450.150	Rp 2.019.600	Rp 5.469.750
43	H.MANSYUR	KAIN	1.216	Rp 2.847.600	Rp -	Rp 2.847.600
44	H.ALIMUDDIN	KAIN	1.217	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
45	SISWANDI	KAIN	1.218	Rp 5.695.200	Rp 2.019.600	Rp 7.462.400
46	NURHASANAH	KAIN	1.219	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600	Rp 3.786.800
47	RAHIM	KAIN	1.220	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600	Rp 3.786.800
48	ASRIL	KAIN	1.224	Rp 3.440.850	Rp 2.847.600	Rp 6.288.450
49	ARDIANSYAH	KAIN	1.226	Rp 4.864.650	Rp -	Rp 4.864.650
50	RISNAWATI	KAIN	1.229	Rp 168.300	Rp 2.019.600	Rp 2.187.900
51	RISNAWATI	KAIN	1.230	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600	Rp 4.039.200
52	LINDA	KAIN	1.232	Rp 504.900	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
53	H. TANGGILING	KAIN	1.233	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
54	SAIPUL ALAM	KAIN	1.234	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
55	NURSIAH	KAIN	1.235	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
56	H. SYAMSUL ALAM	KAIN	1.236	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
57	NAHARENG	KAIN	1.237	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
58	HARIS.P	KAIN	1.238	Rp 5.220.600	Rp -	Rp 5.220.600
59	HAJRAH	KAIN	1.239	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.861.100
60	HJ. JUMIATI	KAIN	1.241	Rp 5.049.000	Rp -	Rp 5.049.000
61	RAMLAH	KAIN	1.242	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
62	HJ. MUSTIKA	KAIN	1.243	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
63	SITI ZAKIAH A.Md	KAIN	1.245	Rp 2.945.250	Rp -	Rp 2.945.250
64	ARLIN	KAIN	1.247	Rp 2.524.500	Rp 2.019.600	Rp 2.524.500
65	MURDIANSYAH	KAIN	1.248	Rp 5.049.000	Rp -	Rp 5.049.000
66	HJ.SUHE	KAIN	1.251	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.861.100
67	HJ.SUHE	KAIN	1.252	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.861.100
68	AMRI	KAIN	1.254	Rp 2.019.600	Rp -	Rp -
69	HASANUDDIN, SE	KAIN	1.257	Rp 3.702.600	Rp -	Rp 3.702.600
70	H. ABDUL KADIR	KAIN	1.259	Rp 5.049.000	Rp -	Rp 5.049.000
71	MUH. SALIM	KAIN	1.260	Rp 5.049.000	Rp 2.019.600	Rp 7.068.600
72	SUCITRA	KAIN	1.261	Rp 5.049.000	Rp 2.019.600	Rp 7.068.600
73	SUCITRA	KAIN	1.262	Rp 5.049.000	Rp 2.019.600	Rp 7.068.600
74	RUMAWATI	KAIN	1.263	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.861.100
75	RAHIMI	KAIN	1.267	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 4.034.100
76	ABDUL AZIS	KAIN	1.268	Rp 4.271.400	Rp 2.847.600	Rp 7.119.000
77	MASRUR, S.Ag	KAIN	1.270	Rp 4.271.400	Rp 2.847.600	Rp 7.119.000
78	PINI ERMAYADI	KAIN	1.271	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp 4.271.400
79	Hj. DAHLIA	KAIN	1.273	Rp 6.169.800	Rp -	Rp 6.169.800
80	NURASIAH	KAIN	1.276	Rp 1.898.400	Rp 2.847.600	Rp 4.746.000
81	SABRAN EFENDI	KAIN	1.277	Rp 2.135.700	Rp 2.847.600	Rp 4.983.300
82	ABDUL SAMAD	KAIN	1.278	Rp 1.423.800	Rp -	Rp -
83	DARMAWATI	ATM	1.279	Rp 2.847.600	Rp 2.847.600	Rp 4.271.400
84	MURNI	KAIN	1.280	Rp 1.423.800	Rp -	Rp -
85	H.ACHMAD	KAIN	1.281	Rp 1.824.000	Rp -	Rp -
86	KAMARUDDIN	KAIN	1.282	Rp 3.352.500	Rp -	Rp 3.352.500
87	M. RAFIQ / BUNIATI	KAIN	1.283	Rp 1.788.000	Rp -	Rp 1.788.000
88	HJ.JULIANA	KAIN	1.284	Rp 5.028.750	Rp -	Rp 5.028.750

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
89	MUHAMMAD ATANG	KAIN	1.285	Rp 3.796.800	Rp 2.682.000	Rp 5.137.800
90	NIRWANA	KAIN	1.286	Rp 2.011.500	Rp -	Rp 1.341.000
91	MASITA	KAIN	1.287	Rp 7.934.250	Rp -	Rp 7.934.250
92	HJ. HASNAH	KAIN	1.288	Rp 3.576.000	Rp 2.682.000	Rp 4.917.000
93	MUH.RUSLAN	KAIN	1.289	Rp 3.576.000	Rp 2.682.000	Rp 4.917.000
94	ISMAIL	KAIN	1.290	Rp 4.560.000	Rp 3.648.000	Rp 6.688.000
95	RIAN HIDAYAT	KAIN	1.291	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp -
96	ANDI SATRYANI RAHMAN	KAIN	1.295	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 5.220.600
97	MUTIARA QALBI MURSYID	KAIN	1.296	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp 1.898.400
98	NURLIN. K	KAIN	1.297	Rp 4.627.350	Rp 2.847.600	Rp 5.695.200
99	HJ.ASTATI	KAIN	1.298	Rp 2.135.700	Rp 2.847.600	Rp 2.847.600
100	HJ. HARDIANA	KAIN	1.299	Rp 2.135.700	Rp 2.847.600	Rp 3.559.500
101	H.MUCHRING	KAIN	1.300	Rp 6.051.150	Rp -	Rp 2.491.650
102	HJ.NURHAIDA	KAIN	1.301	Rp 6.763.050	Rp -	Rp 4.271.400
103	HJ.RUSMIATI	KAIN	1.302	Rp 2.135.700	Rp -	Rp 711.900
104	HJ.DARMATASIA	KAIN	1.304	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp 237.300
105	AHMAD AKBAR	KAIN	1.311	Rp 4.544.100	Rp -	Rp 2.524.500
106	AHMAD AKBAR	KAIN	1.312	Rp 4.544.100	Rp 2.019.600	Rp 4.544.100
107	H.M. RUSLI	KAIN	1.313	Rp 336.600	Rp -	Rp -
108	H.M. RUSLI	KAIN	1.314	Rp 336.600	Rp -	Rp -
109	BAYU ALAMSYAH	KAIN	1.315	Rp 336.600	Rp -	Rp -
110	IRWAN TAHER	KAIN	1.316	Rp 1.514.700	Rp -	Rp -
111	TOLLA	KAIN	1.317	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
112	TOLLA	KAIN	1.318	Rp 1.186.500	Rp 2.847.600	Rp 2.847.600
113		KAIN	1.319	Rp 504.900	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
114	HASMAH	KAIN	1.320	Rp 1.009.800	Rp 2.019.600	Rp -
115	NURLIN. K	KAIN	1.321	Rp 3.534.300	Rp 2.019.600	Rp 4.880.700
116	NORMAWATI	KAIN	1.322	Rp 2.135.700	Rp 2.847.600	Rp 949.200
117	HASANUDDIN	KAIN	1.323	Rp 1.514.700	Rp 2.019.600	Rp 673.200
118	NUR ALANG / FIRMAN	KAIN	1.326	Rp 2.458.500	Rp 2.682.000	Rp 5.140.500
119	HAIDIR ADHA	KAIN	1.327	Rp 3.911.250	Rp -	Rp 3.911.250
120	H. M. RAFIQ	KAIN	1.328	Rp 4.805.250	Rp 2.682.000	Rp 6.146.250
121	HJ.HAYATI	KAIN	1.329	Rp 1.117.500	Rp 2.682.000	Rp 3.799.500
122	HJ.NORHAYATI	KAIN	1.330	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 949.200
123	AISYAH	KAIN	1.331	Rp 1.898.400	Rp 2.847.600	Rp 2.373.000
124	H.SUDIRMAN	KAIN	1.335	Rp 608.000	Rp 3.648.000	Rp 304.000
125	RABASIAH	KAIN	1.337	Rp 1.514.700	Rp -	Rp -
126	HJ.HASNAH	KAIN	1.340	Rp 168.300	Rp -	Rp -
127	H.ALIMING	KAIN	1.341	Rp 1.514.700	Rp 2.019.600	Rp 3.534.300
128	MUHAMMAD ARIS	KAIN	1.343	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp -
129	HJ. SALMAWATI	KAIN	1.344	Rp 7.119.000	Rp -	Rp 7.119.000
130	H. NAWIR MD. NATIRO	KAIN	1.346	Rp 4.628.250	Rp 2.019.600	Rp 6.647.850
131	ATIN WARSIDIASTUTI	KAIN	1.347	Rp 673.200	Rp -	Rp 673.200
132	ATIN WARSIDIASTUTI	KAIN	1.348	Rp 673.200	Rp -	Rp 673.200
133	H. ABDULLAH	KAIN	1.349	Rp 4.039.200	Rp 2.019.600	Rp 6.058.800
134	HARDIANSYAH	KAIN	1.351	Rp 2.373.000	Rp 2.847.600	Rp 5.220.600
135	MARIAMAH	KAIN	1.352	Rp 1.683.000	Rp 2.019.600	Rp 3.702.600
136	NOVI LOVI YANTI	KAIN	1.353	Rp 1.683.000	Rp 2.019.600	Rp 3.702.600
137	ANSIAR	KAIN	1.358	Rp 4.039.200	Rp -	Rp 4.039.200
138	MAHARIDIR WAHID	KAIN	1.359	Rp 3.029.400	Rp 2.019.600	Rp 5.049.000
139	BADARIA	KAIN	1.360	Rp 4.039.200	Rp -	Rp -
140	HAMDANA	KAIN	1.362	Rp 841.500	Rp -	Rp 841.500
141	RUSMAN	KAIN	1.363	Rp 1.009.800	Rp -	Rp 1.009.800
142	M.ARIS	KAIN	1.364	Rp 1.009.800	Rp 2.019.600	Rp -
143	ZUBAIDAH	KAIN	1.365	Rp 1.009.800	Rp 2.019.600	Rp -
144	ANDI WAHE DG. PASORE	KAIN	1.370	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600	Rp 3.197.700
145	HJ. SANABONG	KAIN	1.371	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600	Rp 3.197.700
146	MARWATI	KAIN	1.372	Rp 3.281.850	Rp 2.019.600	Rp 4.628.250
147	MADUNG	KAIN	1.373	Rp 1.514.700	Rp 2.019.600	Rp 3.534.300
148	ALIFUDDIN	KAIN	1.374	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
149	FATMAWATI	KAIN	1.375	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
150	ABDUL RAHIM	KAIN	1.376	Rp 841.500	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
151	SAHARIA	KAIN	1.377	Rp 1.683.000	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
152	HAMIDA	KAIN	I.379	Rp 1.178.100	Rp 2.019.600	Rp 1.346.400
153	NUHRIAH	KAIN	II.09	Rp 5.715.600	Rp -	Rp 5.715.600
154	ALBAR	KAIN	II.11	Rp 2.466.150	Rp -	Rp 2.466.150
155	M. AIDIL	KAIN	II.15	Rp 2.975.400	Rp 1.983.600	Rp 3.967.200
156	MASIPAH	KAIN	II.17	Rp 1.443.600	Rp -	Rp 1.443.600
157	TRI RIVI ARIANTI	KAIN	II.19	Rp 4.676.400	Rp -	Rp 3.117.600
158	NURBAYA	KAIN	II.20	Rp 2.396.850	Rp -	Rp -
159	MASIPAH	KAIN	II.21	Rp 2.887.200	Rp 1.443.600	Rp 4.330.800
160	MAULANA	KAIN	II.22	Rp 2.887.200	Rp -	Rp 2.887.200
161	ADI SUNARYA	KAIN	II.25	Rp 2.887.200	Rp -	Rp 2.887.200
162	FIRMAN	KAIN	II.39	Rp 1.818.300	Rp -	Rp 1.818.300
163	FIRMAN	KAIN	II.40	Rp 1.818.300	Rp -	Rp 1.818.300
164	FIRMAN	KAIN	II.42	Rp 1.323.300	Rp -	Rp 1.323.300
165	HASLINDAWARI	KAIN	II.44	Rp 601.500	Rp -	Rp -
166	SITI MUALAFAH	KAIN	II.75	Rp 1.082.700	Rp 1.443.600	Rp 2.526.300
167	H. TANGGILING	KAIN	II.76	Rp 721.800	Rp 1.443.600	Rp 601.500
168	HJ.MURNI	KAIN	II.81	Rp 842.100	Rp -	Rp -
169	MARHANA	KAIN	II.143	Rp 2.562.150	Rp -	Rp -
170	KHOIRUL ANAM	KAIN	II.146	Rp 721.800	Rp 1.443.600	Rp 2.165.400
171	SUPARNO	KAIN	II.148	Rp 1.157.100	Rp -	Rp 1.157.100
172	SUPARNO	KAIN	II.149	Rp 1.157.100	Rp -	Rp 1.157.100
173	HJ. SITI SAWIAH	KAIN	1.228	Rp 6.763.050	Rp -	Rp 6.763.050
174	SALAMAT	KAIN	1.244	Rp 6.058.800	Rp 2.019.600	Rp 8.078.400
175	ULIYANTI	KAIN	1.253	Rp 3.029.400	Rp -	Rp 3.029.400
176	HJ. HATIJAH	KAIN	1.255	Rp 3.029.400	Rp -	Rp 3.029.400
177	BAMBANG	KAIN	1.256	Rp 5.974.650	Rp -	Rp 5.974.650
178	HJ. PATMAWAT, SE,MM	KAIN	1.334	Rp 6.705.000	Rp -	Rp 6.705.000
179	DARMAWATI	KAIN	1.336	Rp 4.459.950	Rp -	Rp 4.459.950
180	ANITA S	KAIN	1.338	Rp 4.375.800	Rp -	Rp 4.375.800
181	SAIDIL HAMID	KAIN	1.356	Rp 2.524.500	Rp 2.019.600	Rp 4.544.100
182	SAIDIL HAMID	KAIN	1.357	Rp 2.524.500	Rp 2.019.600	Rp 4.544.100
183	ANITA S	KAIN	1.378	Rp 3.029.400	Rp -	Rp 3.029.400
184	SUKRI	KAIN	II.12	Rp 5.052.600	Rp -	Rp 5.052.600
185	AMIR	KAIN	II.16	Rp 2.887.200	Rp -	Rp 2.887.200
186	M. EKO WAHYUDI	KAIN	II.34	Rp 4.959.000	Rp -	Rp 4.959.000
187	EFO HARTONO	KAIN	II.35	Rp 5.289.600	Rp -	Rp 5.289.600
188	EFO HARTONO	KAIN	II.36	Rp 2.766.900	Rp -	Rp 2.766.900
189	ALUS/HASLINDA	KAIN	II.04	Rp 842.100	Rp -	Rp 842.100
190	HJ.PATTIMASANG	KAIN	1.227	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
191	MUHAMMAD ILHAM.J	KAIN	1.350	Rp 1.346.400	Rp 2.019.600	Rp 2.524.500
192	MUHAMMAD NUR	KAIN	1.153	Rp 237.300	Rp -	Rp -
193	RUDI SALAM	KAIN	1.155	Rp 237.300	Rp -	Rp -
194	RUDI SALAM	KAIN	1.154	Rp 237.300	Rp -	Rp -
195	HJ.FARIDAH	KAIN	1.258	Rp -	Rp -	Rp -
196	ERMA DAMAYANTI	KAIN	II.80	Rp 721.800	Rp 1.443.600	Rp -
197	HJ.BOMPO	KAIN	1.292	Rp -	Rp -	Rp -
198	H.SUMARDI	KAIN	1.169	Rp -	Rp -	Rp -
199	RAHMIA	KAIN	1.293	Rp -	Rp -	Rp -
200	SUMIYATI	KAIN	II.37	Rp 1.443.600	Rp -	Rp -
201	HJ.JAM'ANI	KAIN	1.307	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
202	AKIL	KAIN	1.306	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
203	M.SAYUTI	KAIN	II.150	Rp 1.157.100	Rp -	Rp 435.300
204	H. TANGGILING	KAIN	1.308	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
205	MURSIDIN	KAIN	1.303	Rp -	Rp -	Rp -
206	YULIANA	KAIN	1.339	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
207	HJ.ISIYA	KAIN	1.368	Rp -	Rp 2.019.600	Rp 168.300
208	JUNAIDI	KAIN	1.367	Rp -	Rp 2.019.600	Rp -
209	H.SAING	KAIN	1.366	Rp -	Rp 2.019.600	Rp -
210	HASMI WANA	KAIN	1.310	Rp -	Rp -	Rp -
211	HARISMAN	KAIN	1.305	Rp -	Rp -	Rp -
212	MUHAMMAD ARAS	KAIN	1.250	Rp -	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
213	RAHMAN	KAIN	1.342	Rp -	Rp -	Rp -
214	MAHMUD	KAIN	1.181	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
215	H.NURBAYA	KAIN	I.215	Rp 1.514.700	Rp -	Rp 1.178.100
216	ROHANI	KAIN	I.345	Rp -	Rp -	Rp -
217	NOR AISYAH	KAIN	I.264	Rp -	Rp -	Rp -
218	ACHMAD FADLI AKBAR	KAIN	I.294	Rp -	Rp 2.847.600	Rp -
219	YUSNAN.N.R	KAIN	I.159	Rp -	Rp -	Rp -
220	H.FACHRUDDIN.K	KAIN	I.332	Rp -	Rp 2.682.000	Rp 1.103.700
221	SITTI NOR'AINA	KAIN	I.333	Rp -	Rp 2.682.000	Rp 1.103.700
222	HJ. MARHASNI HB	KAIN	I.231	Rp -	Rp -	Rp -
223	VERAWATI	KAIN	I.157	Rp -	Rp -	Rp -
224	AMIR HASAN	KAIN	I.156	Rp -	Rp -	Rp -
225	MUSDALIFAH	KAIN	II.01	Rp 991.800	Rp 1.983.600	Rp 2.975.400
226	H.JAMHARI	KAIN	I.160	Rp -	Rp -	Rp -
227	HJ.KASUM	KAIN	I.309	Rp -	Rp -	Rp -
228	MISRA	KAIN	I.214	Rp 1.009.800	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
229	H. ABDO RAHMAN	KAIN	I.174	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp -
230	ACHMAD ZALI	KAIN	I.186	Rp -	Rp 2.847.600	Rp 949.200
231	H. RAHMAT	KAIN	I.187	Rp -	Rp 2.847.600	Rp 237.300
232	JAMALUDDIN	KAIN	I.188	Rp -	Rp 2.847.600	Rp 949.200
233	JAMALUDDIN	KAIN	I.189	Rp -	Rp 2.847.600	Rp 949.200
234	NATASIA	KAIN	I.272	Rp -	Rp -	Rp -
235	SULAIMAN HADI	KAIN	I.355	Rp -	Rp -	Rp -
236	RUSTAM	KAIN	I.361	Rp -	Rp 2.019.600	Rp -
237	MARWATI	KAIN	I.369	Rp -	Rp 2.019.600	Rp 2.019.600
238	DARWISAH	KAIN	II.28	Rp -	Rp 1.983.600	Rp 1.983.600
239	NETTY CHERAWATY	KAIN	II.78	Rp 721.800	Rp 1.443.600	Rp -
240	HJ. SITI NAISAH	KAIN	I.208	Rp -	Rp -	Rp -
241	DARMIANTI	KAIN	I.209	Rp -	Rp -	Rp -
242	HJ. RUSMIATI	KAIN	I.210	Rp -	Rp -	Rp -
243	MURNI	KAIN	I.211	Rp -	Rp -	Rp -
244	DANIAL	KAIN	I.212	Rp -	Rp -	Rp -
245	MUHAMMAD WAHID	KAIN	I.213	Rp -	Rp -	Rp -
246	HASNI	KAIN	I.221	Rp -	Rp -	Rp -
247	ASWIN	KAIN	I.222	Rp -	Rp -	Rp -
248	AGUS	KAIN	I.223	Rp -	Rp -	Rp -
249	FIRMANSYAH	KAIN	I.225	Rp -	Rp -	Rp -
250	ARDIANSYAH	KAIN	I.240	Rp -	Rp -	Rp -
251	H. BADARUDDIN	KAIN	I.246	Rp -	Rp -	Rp -
252	HJ. NORHASANAH	KAIN	I.249	Rp -	Rp -	Rp -
253	Hj. ASIAH	KAIN	I.265	Rp -	Rp -	Rp -
254	DEWI SINTA	KAIN	I.266	Rp -	Rp -	Rp -
255	NOR AISYAH	KAIN	I.269	Rp 1.423.800	Rp 2.847.600	Rp 3.559.500
256	FAHRIANSYAH	KAIN	I.274	Rp -	Rp -	Rp -
257	SUHARTANG / MARWAH	KAIN	I.275	Rp -	Rp -	Rp -
258	LERMINA	KAIN	I.324	Rp 2.019.600	Rp -	Rp 1.009.800
259	DANI ADITYA HERWANTO	KAIN	I.325	Rp 841.500	Rp -	Rp -
260	DARMAWATI	KAIN	I.354	Rp -	Rp -	Rp -
261	SISWANTO	KAIN	II.02	Rp -	Rp -	Rp -
262	KASDI DARMIN	KAIN	II.06	Rp -	Rp -	Rp -
263	FATMAR	KAIN	II.41	Rp -	Rp -	Rp -
264	MUTIARA SITUMORANG	KAIN	II.45	Rp -	Rp -	Rp -
265	MUTIARA SITUMORANG	KAIN	II.46	Rp -	Rp -	Rp -
266	MUHAMMAD NUR	KAIN	II.47	Rp -	Rp -	Rp -
267	SITI RABIAH	KAIN	II.48	Rp -	Rp -	Rp -
268	BUHATI	KAIN	II.51	Rp -	Rp -	Rp -
269	MARHUSEN	KAIN	II.05	Rp -	Rp -	Rp -
270	MEGAWATI	KAIN	II.07	Rp -	Rp -	Rp -
271	Anugerahwati	KAIN	II.23	Rp -	Rp 1.443.600	Rp 360.900
272	ENDANG PURNIAWATI	KAIN	II.33	Rp -	Rp -	Rp -
273	H. SURADI	KAIN	II.145	Rp -	Rp -	Rp -
274	H. FAHRUL	KAIN	II.03	Rp -	Rp -	Rp -
275	ISWANTI	KAIN	II.08	Rp -	Rp -	Rp -
276	MISRA	KAIN	II.14	Rp -	Rp -	Rp -
277	AHMAD RAMLI	KAIN	II.18	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
278	SUDIYANTO	KAIN	II.26	Rp -	Rp -	Rp -
279	ZAINAL HAKIM	KAIN	II.27	Rp -	Rp -	Rp -
280	ABDUL MUIS ASMA	KAIN	II.29	Rp -	Rp -	Rp -
281	NURMINAH	KAIN	II.30	Rp -	Rp -	Rp -
282	SUKRI	KAIN	II.31	Rp -	Rp -	Rp -
283	MUFTIHADAH	KAIN	II.32	Rp -	Rp -	Rp -
284	KAHAR	KAIN	II.38	Rp -	Rp -	Rp -
285	AYU DARIANI OTOLUWA	KAIN	II.43	Rp -	Rp -	Rp -
286	DEDI FIRMANSYAH	KAIN	II.49	Rp -	Rp -	Rp -
287	HJ. SITI ALANG	KAIN	II.50	Rp -	Rp -	Rp -
288	MULYADI	KAIN	II.62	Rp -	Rp -	Rp -
289	ZAINAL ARIFIN	KAIN	II.63	Rp -	Rp -	Rp -
290	HJ. NURWATI	KAIN	II.64	Rp -	Rp -	Rp -
291	IRWANTO	KAIN	II.79	Rp -	Rp -	Rp -
292	SITI MUSDALIFAH	KAIN	II.144	Rp -	Rp -	Rp -
293	ANDI MASSARAPPI	KAIN	Y.316	Rp -	Rp -	Rp -
294	IDRIS	KAIN	Y.319	Rp -	Rp -	Rp -
295	AHMAD SARIFUDDIN	KAIN	AD.408	Rp -	Rp -	Rp -
296	H. IMRAN	KAIN	II.72	Rp -	Rp -	Rp -
297	H. ALIMUDDIN	KAIN	I.127	Rp -	Rp -	Rp -
298	ABDUL ROHMAN	KAIN	II.147	Rp 1.203.000	Rp -	Rp 1.203.000
						Rp -
1	ENDAH SUTARSIH	WARUNG MAKAN	2	Rp 516.800	Rp -	Rp 516.800
2	HJ. SALMIAH	WARUNG MAKAN	4	Rp 4.263.600	Rp -	Rp 4.263.600
3	ROSMAN	WARUNG MAKAN	7	Rp 1.550.400	Rp -	Rp 1.550.400
3	LUSIATUN	WARUNG MAKAN	11	Rp 2.971.600	Rp -	Rp -
4	ROSNAWATI	WARUNG MAKAN	12	Rp 1.421.200	Rp -	Rp 1.421.200
5	SITI HALIJAH	WARUNG MAKAN	13	Rp 4.586.600	Rp -	Rp -
6	TIMANG	WARUNG MAKAN	14	Rp 2.196.400	Rp -	Rp 2.196.400
7	ARMINAH	WARUNG MAKAN	15	Rp 1.033.600	Rp -	Rp -
8	EKA YANTI	WARUNG MAKAN	17	Rp 1.033.600	Rp -	Rp 1.033.600
9	MIKO DG.SIANG	WARUNG MAKAN	18	Rp 129.200	Rp -	Rp -
10	HJ.NURSLAH	WARUNG MAKAN	20	Rp 646.000	Rp -	Rp -
11	SANTI	WARUNG MAKAN	21	Rp 646.000	Rp -	Rp -
12	MANSYUR	WARUNG MAKAN	22	Rp 646.000	Rp 1.550.400	Rp 646.000
13	EVI	WARUNG MAKAN	23	Rp 646.000	Rp -	Rp -
14	ADI	WARUNG MAKAN	8	Rp -	Rp -	Rp -
15	ADI	WARUNG MAKAN	9	Rp -	Rp -	Rp -
16	YUDI KRISDIANTO	WARUNG MAKAN	30	Rp -	Rp 1.550.400	Rp -
17	ULFAH	WARUNG MAKAN	31	Rp -	Rp 1.550.400	Rp -
18	YUDI KRISDIANTO	WARUNG MAKAN	32	Rp -	Rp 1.550.400	Rp -
19	ROSLINA	WARUNG MAKAN	6	Rp -	Rp -	Rp -
20	RATNA	WARUNG MAKAN	5	Rp -	Rp -	Rp -
21	MISNAWATI	WARUNG MAKAN	19	Rp -	Rp -	Rp -
22	SITI FATIMAH	WARUNG MAKAN	33	Rp -	Rp -	Rp -
23	SAHARIAH	WARUNG MAKAN	29	Rp -	Rp -	Rp -
24	SYAMSUDDIN	WARUNG MAKAN	26	Rp -	Rp -	Rp -
25	ZAKIAH	WARUNG MAKAN	27	Rp -	Rp 1.550.400	Rp 516.800
26	H.MUNA	WARUNG MAKAN	1	Rp -	Rp -	Rp -
27	MIRNA	WARUNG MAKAN	24	Rp -	Rp 1.550.400	Rp -
28	MARTANG	WARUNG MAKAN	25	Rp -	Rp 1.550.400	Rp -
29	NURMI	WARUNG MAKAN	3	Rp -	Rp -	Rp -
30	RABASIAH	WARUNG MAKAN	10	Rp -	Rp -	Rp -
31	ABDUL SALIM	WARUNG MAKAN	16	Rp -	Rp -	Rp -
32	KONSTITUWANTE MARTA	WARUNG MAKAN	28	Rp -	Rp 1.550.400	Rp 1.550.400
				Rp -	Rp -	Rp -
1	HJ.YULIANA	RETAIL	5	Rp 13.038.000	Rp 39.114.000	Rp 13.038.000
2	MUHAMMAD MUHLISIN	RETAIL	8	Rp 19.557.000	Rp 39.114.000	Rp 13.038.000
3	HERBALIFE/ACHMAD AMIN	RETAIL	6	Rp -	Rp -	Rp -
4	AMIR	RETAIL	7	Rp -	Rp 39.114.000	Rp -
5	TUKUNG CUKUR	RETAIL	4	Rp -	Rp 44.486.712	Rp 12
6	JAWA INDAH	RETAIL	3	Rp -	Rp 39.114.000	Rp 19.557.000
7	BANK BRI	RETAIL	1	Rp -	Rp -	Rp -

DATA PIUTANG 2025 PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS

Lampiran 7

NO.	NAMA	JENIS USAHA	NO. PETAK	JUMLAH S/D 2024	SKRD 2025	TOTAL SALDO PIUTANG 2025
8	SAMSAT	RETAIL	2	Rp -	Rp -	Rp -
						Rp -
1	RATIH WINDAYANIE (CAFE ALIKHA)	FOOD COURT	1	Rp 4.780.800		Rp 4.780.800
2	YUTIE LARASHATIE (ES BUAH)	FOOD COURT	2	Rp 8.067.600		Rp 8.067.600
3	INTAN SURYANI (MALAGA)	FOOD COURT	15	Rp 4.681.200		Rp 4.681.200
4	SURTI (RM.DWI RAHAYU)	FOOD COURT	25	Rp 10.224.000		Rp 10.224.000
5	ERWIMIN	FOOD COURT	29	Rp 3.067.200		Rp 3.067.200
6	SULKARNAIN (CAFE MAKASAR)	FOOD COURT	35	Rp 9.088.000		Rp 9.088.000
7	ETI KUMALA DEWI (RORA CAFÉ)	FOOD COURT	37	Rp 10.905.600		Rp 10.905.600
8	CAFE INDAH	FOOD COURT	40	Rp 4.771.200		Rp 4.771.200
9	Hj. JAMILAH (CAFE NIKMAT'AULIA)	FOOD COURT	16	Rp 4.681.200		Rp 4.681.200
10	SUCIYATI/CAFE MDS	FOOD COURT	20	Rp 8.520.000		Rp 8.520.000
11	MARIANI (RM.MANDA)	FOOD COURT	21	Rp 10.905.600		Rp 10.905.600
12	CAFE TEPIAN KELAY / ERNAWATI H.HS	FOOD COURT	24	Rp 8.520.000		Rp 8.520.000
13	SOFYAN	FOOD COURT	36	Rp 3.635.200		Rp 3.635.200
14	SITI FATIMAH	FOOD COURT	4	Rp 2.191.200		Rp 2.191.200
15	TRI UTAMI/VERA ASRI CAFE	FOOD COURT	38	Rp 908.800		Rp -
16	CAFE. HJ. HASNIA/HJ. HASNA	FOOD COURT	3	Rp -		Rp -
17	ASNI/CAFE 99	FOOD COURT	5	Rp -		Rp -
18	ASNI/CAFE 99	FOOD COURT	6	Rp -		Rp -
19	CAFE SANGGAM SELERAKU/JURIAH	FOOD COURT	7	Rp -		Rp -
20	CAFE PUTRI/RINIPURWATI	FOOD COURT	8	Rp -		Rp -
21	CAFE NURJANAH/BUNGA	FOOD COURT	9	Rp -		Rp -
22	RM.CITRA CAFE	FOOD COURT	10	Rp -		Rp -
23	PODO MORO/PADJRIATI	FOOD COURT	11	Rp -		Rp -
24	CAFE WULAN/TIARA WULANDARI	FOOD COURT	12	Rp -		Rp -
25	CAFE RAMA/RAMA PEDRIYANTO	FOOD COURT	13	Rp -		Rp -
26	CAFE AMALIA/DWI SASMITA ULFAH	FOOD COURT	14	Rp -		Rp -
27	TRI HARTINI	FOOD COURT	17	Rp -		Rp -
28	ENDIN SUPANDI	FOOD COURT	18	Rp -		Rp -
29	CAFE GAJAH MADA/HJ.LIVI NURUL K	FOOD COURT	19	Rp -		Rp -
30	CAFE YON ARMED	FOOD COURT	22	Rp -		Rp -
31	CAFE BAGONG/ROHANI	FOOD COURT	23	Rp -		Rp -
32	RUMAH MAKAN 777/MUH. RIDWAN	FOOD COURT	26	Rp -		Rp -
33	RM.TYRTA	FOOD COURT	27	Rp -		Rp -
34	CAFE SAFARUDDIN/SARI BANUN	FOOD COURT	28	Rp -		Rp -
35	INTAN CAFE/FAHMI	FOOD COURT	30	Rp -		Rp -
36	SKY RESTO/SRI KUMALA	FOOD COURT	31	Rp -		Rp -
37	PARIDAH/ANEKA COFFE	FOOD COURT	32	Rp -		Rp -
38	DEPOT BIRU/IRFAN RINALDIE	FOOD COURT	33	Rp -		Rp -
39	PAYO/DESSY JUMARYANTI	FOOD COURT	34	Rp -	Rp -	Rp -
40	HELLO KITTY CAFE/SURIYANA	FOOD COURT	39	Rp -	Rp -	Rp -
41	JEFFR Y.RC.M/RM.TELUK BAYUR	FOOD COURT	41	Rp -	Rp -	Rp -
42	ELLA CAFE	FOOD COURT	42	Rp -	Rp -	Rp -
			LOS	Rp 566.320.100	Rp 257.311.200	Rp 607.538.750
			KIOS	Rp 1.514.531.850	Rp 838.757.112	Rp 1.551.802.433
			JUMLAH	Rp 2.080.851.950	Rp 1.096.068.312	Rp 2.159.341.183

A

TELUK BAYUR

LAMPIRAN 7

No.	Nama	No. Petak	Jenis	Saldo Hutang 2024	Koreksi	Pembayaran Piutang 2024	Ketetapan 2025	Pembayaran 2025	Saldo 2025
1		1	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	NURHAYATI	2	Sayur	Rp 350.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 350.000
3		3	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		4	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	TUMIATI	5	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 385.000	Rp -
6	TUMIATI	6	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 385.000	Rp -
7	SUDARMI/BARIAH	7	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
8		8	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 140.000	Rp -
9		9	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 140.000	Rp -
10		10	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11		11	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp -
12		12	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	ARINI	13	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
14	ARINI	14	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
15	ARINI	15	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
16	BARIAH	16	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
17	MUSINAH	17	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
18	ARINI	18	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
19	ARINI	19	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
20	ARINI	20	Sayur	Rp 105.000		Rp 105.000	Rp -	Rp 385.000	Rp -
21		21	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp -
22	HERLINA	22	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
23	HERLINA	23	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
24	KASINEM	24	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
25	BUARI	25	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 175.000	Rp 350.000	Rp -
26	SARINEM	26	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
27	H.SANI/RINA/MIFTAH	27	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 175.000	Rp 350.000	Rp -
28	KANTUM	28	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
29	KANTUM	29	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
30	HERLINA	30	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
31	HERLINA	31	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
32		32	Sayur	0		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
33		33	Sayur	0		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
34		34	Sayur	0		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
35	KANTUM	35	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
36		36	Sayur	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
37		37	Sayur	0		Rp -	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp -
38		38	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp -
39	REBO SUNARSO	39	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
40	REBO SUNARSO	40	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
41	SAMIYATUN	41	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
42	SAMIYATUN	42	Sayur	Rp -		Rp -	Rp 420.000	Rp 420.000	Rp -
72	Rusiyah	1	Ayam	Rp 560.000		Rp 560.000	Rp -	Rp 720.000	Rp -
73	Rusiyah	2	Ayam	Rp 640.000		Rp 640.000	Rp -	Rp 400.000	Rp -
74	H.Hairunsyah	3	Ayam	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
44	Raodah	4	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
45	Darsih	5	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 800.000	Rp -
46		6	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
47	Darniati	7	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 560.000	Rp 400.000
48	Hanifah	8	Ikan Basah	Rp 560.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 560.000
49	Lusi Liana	9	Ikan Basah	Rp 1.200.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000
50	Lusi Liana	10	Ikan Basah	Rp 1.360.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.360.000
43	Darmansyah	11	Daging	Rp 480.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 480.000
51	Ida Mariana	12	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
52	Isnani	13	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
53	Rahmadi	14	Ikan Basah	Rp 160.000		Rp -	Rp -	Rp 800.000	Rp 160.000
54	ABD. Kadir	15	Ikan Basah	Rp 720.000		Rp 240.000	Rp -	Rp -	Rp 480.000
55	Ernawati	16	Ikan Basah	Rp 400.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 400.000
56	Efendy Rustam	17	Ikan Basah	Rp 1.360.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.360.000
57	Edi Julian	18	Ikan Basah	Rp 1.320.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.320.000
58	Chatrina/Sapariah	19	Ikan Basah	Rp 160.000		Rp -	Rp -	Rp 800.000	Rp 160.000
59	Sadariyah	20	Ikan Basah	Rp 640.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 640.000
60	Juhriansyah	21	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
61	Mahdi/Wahyudi	22	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
62	Sarifpandi	23	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
63	Rohani	24	Ikan Basah	Rp 80.000		Rp -	Rp 400.000	Rp 560.000	Rp 80.000
64		25	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
65		26	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
66		27	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

TELUK BAYUR

LAMPIRAN 7

No.	Nama	No. Petak	Jenis	Saldo Hutang 2024	Koreksi	Pembayaran Piutang 2024	Ketetapan 2025	Pembayaran 2025	Saldo 2025
67		28	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
68	Mursidah	29	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
69	Mursidah	30	Ikan Basah	Rp -		Rp -	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp -
70	Masriah	31	Ikan Basah	Rp 720.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 720.000
71	Nurhidayati	32	Ikan Basah	Rp 480.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 480.000
75	RAHMAD ISNAENI	1	Ruko	Rp 180.000		Rp -	Rp -	Rp 2.160.000	Rp 180.000
76	SURATI	2	Ruko	Rp -		Rp -	Rp 900.000	Rp 2.160.000	Rp -
77	BADERUN	3	Ruko	Rp -		Rp -	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp -
78	H.TAWILE	4	Ruko	Rp 180.000		Rp 180.000	Rp 2.160.000	Rp 2.160.000	Rp -
79	HJ. SURIANI	1	Kios A	Rp 115.000		Rp 115.000	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
80	HENDRA	2	Kios A	Rp 115.000		Rp 115.000	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
81	KNPI/A.YANI	3	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
82	LAHONDA	4	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
83	REBO SUNARSO	5	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
84	SUMIYATUN	6	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
85	HJ CINONG	7	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
86	H. TAWIL	8	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
87	MARWAN	9	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
88	NURYENI/FARID/IKA	10	Kios A	Rp 460.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 460.000
89	HJ. SRI MURNI	11	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
90	NUNUNG/HERLINA	12	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
91	REBO SUNARSO	13	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
92	RUSTAM	14	Kios A	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
93	KAMIRAH	1	Kios B/Makanan	Rp 230.000		Rp 230.000	Rp -	Rp 805.000	Rp -
94	MUALIM	2	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
95	ISNALIA/SITIN	3	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 575.000	Rp 575.000	Rp -
96	JAINAH	4	Kios B/Makanan	Rp 230.000		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp 230.000
97	SUNARSIH/PUJIONO	5	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
98	RAHMAD HIDAYAT	6	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
99	NGADIRAH	7	Kios B/Makanan	Rp 345.000		Rp 230.000	Rp -	Rp 805.000	Rp 115.000
100	NYAMAT	8	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
101	SUNDARI	9	Kios B/Makanan	Rp 690.000		Rp 230.000	Rp -	Rp -	Rp 460.000
102	JAINAH	10	Kios B/Makanan	Rp 230.000		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp 230.000
103	MARDI/SARTANA	11	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
104	SURATEMI	12	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
105	SARTANA	13	Kios B/Makanan	Rp -		Rp -	Rp 1.380.000	Rp 1.380.000	Rp -
106	HENDRA	2	Kulkas	Rp -		Rp -		Rp -	Rp -
107	LAHONDA	4	Kulkas	Rp 200.000		Rp -		Rp -	Rp 200.000
108	HERLINA	22	Kulkas	Rp -		Rp -		Rp -	Rp -
			JUMLAH	Rp 14.795.000	Rp -	Rp 3.170.000	Rp 52.665.000	Rp 64.685.000	Rp 12.025.000

Teluk Bayur, 26 Maret 2026



Np. 01 1002

LAMPIRAN 7

NO	NAMA	JENIS PETAK	NO. PETAK	2024	Koreksi	Pembayaran Piutang 2024	Ketetapan 2025	Pembayaran 2025	Piutang 2025
1	H. Ahmad	KIOS 4 x 6	1	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
2	Hj. Fatmawati	KIOS 4 x 6	2A	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
3	Sukri	KIOS 4 x 6	2B	28.150.000	-	3.500.000	4.800.000	-	29.450.000
4	Sumari	KIOS 4 x 6	3	28.150.000	-	3.250.000	4.800.000	-	29.700.000
5	H. Rahmat	KIOS 4 x 6	4	28.400.000	-	4.500.000	4.800.000	-	28.700.000
6	H. Muhammdiyah	KIOS 4 x 6	5	29.400.000	-	6.000.000	4.800.000	-	28.200.000
7	M. Yasir	KIOS 4 x 6	6	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
8	Hasmawati	KIOS 4 x 6	7	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
9	Hj. Asisah	KIOS 4 x 6	8	27.400.000	-	-	4.800.000	-	32.200.000
10	Eka Savitri	KIOS 4 x 6	9	26.150.000	-	4.000.000	4.800.000	-	26.950.000
11	Samsul Ma'ruf	KIOS 4 x 6	10	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
12	Susilawati	KIOS 4 x 6	11	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
13	Hj. Binti	KIOS 4 x 6	12	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
14	Saleng	KIOS 4 x 6	13	28.400.000	-	-	4.800.000	-	33.200.000
15	Hj. Irawati	KIOS 4 x 6	14	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
16	Solikin	KIOS 4 x 6	15	28.900.000	-	2.750.000	4.800.000	-	30.950.000
17	H. Ahmad	KIOS 4 x 6	16	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
18	Achmad Rochim	KIOS 4 x 6	17	26.650.000	-	1.000.000	4.800.000	-	30.450.000
19	Hj. Nursiah	KIOS 4 x 6	18	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
20	H. Hasan	KIOS 4 x 6	19	29.400.000	-	9.000.000	4.800.000	-	25.200.000
21	Rahmawati	KIOS 4 x 6	20	29.400.000	-	7.000.000	4.800.000	-	27.200.000
22	Sirajuddin	KIOS 4 x 6	21	25.400.000	-	1.000.000	4.800.000	-	29.200.000
23	Marto	KIOS 4 x 6	22	24.400.000	-	7.500.000	4.800.000	-	21.700.000
24	Hj. Marhanah	KIOS 4 x 6	23	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
25	Nasriah	KIOS 4 x 6	24	26.400.000	-	1.000.000	4.800.000	-	30.200.000
26	Abd. Majid	KIOS 4 x 6	25	29.400.000	-	2.000.000	4.800.000	-	32.200.000
27	Kasmini	KIOS 4 x 6	26	26.400.000	-	6.000.000	4.800.000	-	25.200.000
28	Hj. Rukiah	KIOS 4 x 6	27	25.900.000	-	750.000	4.800.000	-	29.950.000
29	Hj. Faridah	KIOS 4 x 6	28	21.400.000	-	6.000.000	4.800.000	-	20.200.000
30	Drs. H. Abdurachman	KIOS 4 x 6	29	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
31	Asiah	KIOS 4 x 6	30	20.900.000	-	6.500.000	4.800.000	-	19.200.000
32	Saharing	KIOS 4 x 6	31	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-
33	Murni	KIOS 4 x 6	32	27.400.000	-	2.000.000	4.800.000	-	30.200.000
34	H. Abdul Samad	KIOS 4 x 6	33	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
35	H. Abdul Samad	KIOS 4 x 6	34	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-
36	Hj. Dinar	KIOS 4 x 6	35	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
37	Hj. Dinar	KIOS 4 x 6	36	29.400.000	-	-	4.800.000	-	34.200.000
38	Rusydi	KIOS 4 x 6	37	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
39	Rusydi	KIOS 4 x 6	38	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
40	Abu Bakar	KIOS 4 x 6	39	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
41	Achmad Amin	KIOS 4 x 6	40	9.600.000	-	9.600.000	7.200.000	7.200.000	-
42	Sukarma	KIOS 4 x 6	41	16.800.000	-	6.000.000	7.200.000	-	18.000.000
43	Amiruddin Hanan	KIOS 4 x 6	42	34.100.000	-	1.000.000	7.200.000	-	40.300.000
44	H. Abd. Halik	KIOS 4 x 6	43	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
45	H. Ali Fauji	KIOS 4 x 6	44	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
46	Sutejo, A.Md	KIOS 4 x 6	45	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
47	Ahmad, SE	KIOS 4 x 6	46	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
48	H. Hasan	KIOS 4 x 6	47	36.600.000	-	9.000.000	7.200.000	-	34.800.000
49	Hj. Rahmawati	KIOS 4 x 6	48	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
50	M. Saiful Bahri	KIOS 4 x 6	49	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
51	Asriana	KIOS 4 x 6	50	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
52	Hj. Marhanah	KIOS 4 x 6	51	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
53	Hj. Marhanah	KIOS 4 x 6	52	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
54	Amrullah	KIOS 4 x 6	53	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
55	Hj. Marhanah	KIOS 4 x 6	54	-	-	-	7.200.000	6.600.000	600.000
56	Alprida	KIOS 4 x 6	55	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
57	Hj. Fatmawati	KIOS 4 x 6	56	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
58	Baharuddin	KIOS 4 x 6	57	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
59	Sukri	KIOS 4 x 6	58	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
60	Asri Minah	KIOS 4 x 6	59	36.600.000	-	-	7.200.000	-	43.800.000
61	Hasbullah Rasyid	KIOS 4 x 6	60	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
62	H. Tamami Bakri	KIOS 4 x 6	61	28.600.000	-	14.200.000	7.200.000	-	21.600.000
63	Syamsul Wathan	KIOS 4 x 6	62	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
64	Rahmatullah	KIOS 4 x 6	63	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
65	Alimuddin	KIOS 4 x 6	64	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
66	Hj. Nurdahlia	KIOS 4 x 6	65	25.800.000	-	-	7.200.000	7.200.000	25.800.000
67	Hj. Nurdahlia	KIOS 4 x 6	66	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
68	M. Rasyidi HB	KIOS 4 x 6	67	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
69	Rusniah Mukri	KIOS 4 x 6	68	36.600.000	-	-	7.200.000	-	43.800.000
70	Herwin. R	KIOS 4 x 6	69	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-

71	Abd. Rahman	KIOS 4 x 6	70	22.600.000	-	1.600.000	7.200.000	-	28.200.000
72	Johanes	KIOS 4 x 6	71	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
73	Muslimin	KIOS 4 x 6	72	8.400.000	-	7.200.000	7.200.000	-	8.400.000
74	H. Arman Thahir	KIOS 4 x 6	73	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
75	Hj. Nurdahlia	KIOS 4 x 6	74	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
76	H. Hartady	KIOS 4 x 6	76	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
77	H. Muchtar	KIOS 4 x 6	77	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-
78	M. Jafar	KIOS 4 x 6	78	36.600.000	-	-	7.200.000	-	43.800.000
JUMLAH TOTAL				1.040.900.000	-	127.150.000	472.800.000	277.800.000	1.108.750.000

Tanjung Redeh, 19 Januari 2026





LAMPIRAN 8

**Daftar Obat / Alkes / BMHP Rusak / Kadaluarsa RSUD
dr.Abdul Rivai Tanjung Redeb Tahun 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
 Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Tlp/Fax (0554) 21098
 Website : <http://rsuddrabdulrivai.co.id> / Email : rsuddrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB



BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT DAN BMHP

No. 445/ 005 /Pan-PBF/IF-RSU/XII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 bulan Desember tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Nama Apoteker Pengelola Apotek	: apt. Triana Damayanti, S. Farm
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/23/IV/2021
Nama Ketua Tim Penghapusan	: apt. Ima Inarah, S. Farm
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/25/VIII/2022
Nama Apotek	: Instalasi Farmasi RSUD Dr. Abdul Rivali
Alamat Apotek	: Jl. Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Kab. Berau

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : apt. Rima Yuliyanti, S. Farm, M.Sc
 NIP : 19850726 201101 2 008
 Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kab. Berau
2. Nama : apt. Aji Tridika Wardana, S. Farm
 NIP : 19970621 202504 1 001
 Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kab. Berau
3. Nama : Ramadhan, SKM
 NIP : 197105101998031015
 Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis
4. Nama : Arifuddin, Amd. TEM
 NIP : 19860901 201001 1 004
 Jabatan : Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Abdul Rivali
5. Nama : apt. Jessie Elviasari, S. Farm
 NIP : 19931209 202321 2 008
 Jabatan : Administrasi Gudang Instalasi Farmasi

Telah melakukan pemusnahan Obat, Alat Kesehatan dan BMHP sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Tempat dilakukan pemusnahan: RSUD dr. Abdul Rivali, diserahkan kepada pihak Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak ketiga (PT. Limbah Bina Sejahtera) untuk dimusnahkan sebagai limbah farmasi.

Alasan melakukan pemusnahan: Obat Kadaluarsa dan rusak.

Demikian berita acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Berita acara ini dibuat 4 (empat) dan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
2. Kepala Instalasi Pengolahan Air Limbah
3. Pihak ketiga (PT. Limbah Bina Sejahtera)
4. Arsip

P



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Tlp/Fax (0554) 21098
Website : <http://rsuddrabdulrivai.co.id> / Email : rsuddrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB



Tanjung Redeb, 05 Desember 2025

Saksi-saksi

apt. Rima Yuliyanti, S.Farm, M.Sc
NIP. 19850726 201101 2 008

apt. Aji Tridika Wardana, S. Farm
NIP. 19970621 202504 1 001

Ramadhan, SKM
NIP. 197105101998031015

Arifuddin Amd. TEM
NIP. 19860901 201001 1 004

apt. Jessie Elviasari, S. Farm
NIP. 19931209 202321 2 008

Yang membuat berita acara

apt. Triana Damayanti, S. Farm
SIPA . 503/DPMPTSP/SIPA/23/IV/2021

Ketua Tim Penghapusan

apt. Ima Inarah, S.Farm
SIPA. 503/DPMPTSP/SIPA/25/VIII/2022

P



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Telp. (0554) 21359 Fax. 21359
E-Mail : rsuberau@gmail.com / Kemitraan : rsudabdurivai2@gmail.com
TANJUNG REDEB



BERITA ACARA PEMUSNAHAN OBAT KADALUWARSA/RUSAK

No. 445/ 006 /Pan-PBF/IF-RSU/XII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 bulan Desember tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Apoteker Pengelola Apotek	: apt. Triana Damayanti, S. Farm
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/23/IV/2021
Nama Ketua Tim Penghapusan	: apt. Ima Inarah, S.Farm
Nomor SIPA	: 503/DPMPTSP/SIPA/25/VIII/2022
Nama Apotek	: Instalasi Farmasi RSUD Dr. Abdul Rivai
Alamat Apotek	: Jl. Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Kab. Berau

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : apt. Rima Yuliyanti, S.Farm, M.Sc
NIP : 19850726 201101 2 008
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kab. Berau
2. Nama : apt. Aji Tridika Wardana, S. Farm
NIP : 19970621 202504 1 001
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kab. Berau
3. Nama : Ramadhan, SKM
NIP : 197105101998031015
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis
4. Nama : Arifuddin, Amd. TEM
NIP : 19860901 201001 1 004
Jabatan : Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Dr. Abdul Rivai
5. Nama : apt. Jessie Elviasari, S. Farm
NIP : 19931209 202321 2 008
Jabatan : Administrasi Gudang Instalasi Farmasi

Telah melakukan pemusnahan Narkotika dan Psikotropika, dengan daftar produk terlampir. Demikian berita acara ini dibuat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Berita acara ini dibuat 3 (tiga) rangkap dan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
2. Kepala Instalasi Pengolahan Air Limbah
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI
Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Telp. (0554) 21359 Fax. 21359
E-Mail : rsuberau@gmail.com / Kemitraan : rsudabdurivai2@gmail.com
TANJUNG REDEB



Tanjung Redeb, 05 Desember 2025

Saksi-saksi

apt. Rima Yuliyanti, S.Farm, M.Sc
NIP. 19850726 201101 2 008

apt. Ai Tridika Wardana, S. Farm
NIP. 19970621 202504 1 001

Rameadhan, SKM
NIP. 197105101998031015

Arifuddin, Amd, TEM
NIP. 19860901 201001 1 004

apt. Jessie Elviasari, S. Farm
NIP. 19931209 202321 2 008

Yang membuat berita acara

apt. Triana Damayanti, S. Farm
SIPA . 503/DPMPTSP/SIPA/23/IV/2021

Ketua Tim Penghapusan

apt. Ima Inarah, S.Farm
SIPA. 503/DPMPTSP/SIPA/25/VIII/2022

**DAFTAR OBAT NARKOTIKA
RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2025**

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Jumlah	Sumber Dana	Harga	Total	ED	Alasan Pemusnahan
1	Durogesic Patch	Lembar	NAB4800	2	BLUD	Rp 101.100,00	Rp 202.200,00	Des-25	Telah melewati tanggal ED
2	Fentanyl Inj	Ampul	FJ24007	1	BLUD	Rp 29.500,00	Rp 29.500,00	Jun-26	Pecah
3	Fentanyl Inj	Ampul	FJ24069	1	BLUD	Rp 29.500,00	Rp 29.500,00	Jun-26	Pecah
TOTAL							Rp 261.200,00		

**DAFTAR OBAT PSIKOTROPIKA
RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2025**

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Jumlah	Sumber Dana	Harga	Total	ED	Alasan Pemusnahan
1	Phenobarbital	Tablet	B30325N	733	BLUD	Rp 209,00	Rp 153.197,00	Feb-25	Telah melewati tanggal ED
2	Haloperidol 0,5 mg	Tablet	A01807HA	97	BLUD	Rp 116,00	Rp 11.252,00	Agu-25	Telah melewati tanggal ED
TOTAL							Rp 164.449,00		

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA PROGRAM HIV

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Dolutegravir 10 mg	Tab	3171846	Juli 2025	270	Dinkes	Rp 771,00	Rp 208.170,00
2	Dolutegravir 10 mg	Tab	3172359	Juli 2025	2700	Dinkes	Rp 771,00	Rp 2.081.700,00
3	Zidovudine Syr	Botol	BZZ2403A	Juni 2025	9	Dinkes	Rp 32.876,00	Rp 295.884,00
4	Dolutegravir 10 mg	Tab	DG0081	Juni 2025	205	Dinkes	Rp 771,00	Rp 158.055,00
5	Efavirenz 600 mg	Tab	I32144J	September 2025	600	Dinkes	Rp 8.050,00	Rp 4.830.000,00
TOTAL								Rp 7.573.809,00

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA PROGRAM TB

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Moxifloxacin 400 mg	Tab	BRA05045A	April 2025	176	Dinkes	Rp 3.475,00	Rp 611.600,00
2	Etambutol 400 mg	Tab	SL509	Maret 2025	5.117	Dinkes	Rp 525,00	Rp 2.686.425,00
3	Bedaquilin 100 mg	Tab	TMC22009	Februari 2025	167	Dinkes	Rp 11.156,00	Rp 1.863.052,00
4	Ethionamid 250 mg	Tab	ETAH131	Mei 2025	502	Dinkes	Rp 1.502,00	Rp 754.004,00
5	Etambutol 400 mg	Tab	SL513	Juni 2025	1542	Dinkes	Rp 525,00	Rp 809.550,00
6	Isoniazid 100 mg	Tab	ISBH048	September 2025	170	Dinkes	Rp 412,00	Rp 70.040,00
7	Levofloxacin 500 mg	Tab	HTL0NF35144	Oktober 2025	257	Dinkes	Rp 600,00	Rp 154.200,00
8	Moxifloxacin 400 mg	Tab	23MXF083	November 2025	41	Dinkes	Rp 3.475,00	Rp 142.475,00
9	Pyrazinamide 500 mg	Tab	NPA2015A	September 2024	420	Dinkes	Rp 334,00	Rp 140.280,00
TOTAL								Rp 7.231.626,00

1

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA PROGRAM MALARIA

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	DHP Frimal	Tab	221205	Desember 2024	74	Dinkes	Rp 2.851,00	Rp 210.974,00
2	Primaquin	Tab	66386001	Februari 2025	79	Dinkes	Rp 545,00	Rp 43.055,00
3	DHP Frimal	Tab	230407	April 2025	36	Dinkes	Rp 2.851,00	Rp 102.636,00
4	Artesun inj	Vial	LA220631	11 Mei 2025	2	Dinkes	Rp 88.989,00	Rp 177.978,00
TOTAL								Rp 534.643,00

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA PROGRAM HEPATITIS

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Vaksin Hepatitis B	pouches	3666021	November 2024	183	Dinkes	Rp 57.000,00	Rp 10.431.000,00
2	HyperHEP B	box	H01H000903	04 Januari 2025	20	Dinkes	Rp 1.389.500,00	Rp 27.790.000,00
3	HyperHEP B	box	H01F007773	03 Agustus 2024	5	Dinkes	Rp 1.389.500,00	Rp 6.947.500,00
TOTAL								Rp 45.168.500,00

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSAMASA HIBAH

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Metraclin Spray	Botol	M03A0121J0009	Desember 2024	8	Dinkes	Rp 160.900,00	Rp 1.287.200,00
TOTAL								Rp 1.287.200,00

**DAFTAR OBAT / ALKES / BMHP RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2025**

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Sumber Dana	Harga Satuan		Total Harga
1	Inf Manitol	13	Softbag	DG3107A	Juni 2025	BLUD	Rp	34.960,92	Rp 454.491,96
2	Aquadest inj 25 mL	839	Flacon	B73A53B	04 Januari 2025	BLUD	Rp	2.386,00	Rp 2.001.854,00
3	Clinimix	6	Softbag	IJDB9703	Januari 2025	BLUD	Rp	282.999,00	Rp 1.697.994,00
4	KN1B	1	Kolf	480K52A	11 November 2024	BLUD	Rp	12.889,00	Rp 12.889,00
5	NS 500 ml (Otsu)	2	Kolf	530307	Februari 2025	BLUD	Rp	7.992,00	Rp 15.984,00
6	KN3B	1	Kolf	A84B52A	Februari 2024	BLUD	Rp	12.770,00	Rp 12.770,00
7	KN4A	2	Kolf	A71C52A	Maret 2024	BLUD	Rp	14.449,00	Rp 28.898,00
8	Aqua Injeksi 25 ml	18	Kolf	B73A53B	Januari 2025	BLUD	Rp	2.386,00	Rp 42.948,00
TOTAL									Rp 4.267.828,96
1	Dopamin Inj	77	Ampul	4330512	Maret 2025	BLUD	Rp	6.600,00	Rp 508.200,00
2	Dexamethasone inj	2	Ampul	66337010	Februari 2025	BLUD	Rp	2.184,00	Rp 4.368,00
3	Atropin Sulfat inj	5	Ampul	9622B0032A	Februari 2025	BLUD	Rp	4.350,00	Rp 21.750,00
4	Farmavon inj	3	Ampul	3HC059	Maret 2025	BLUD	Rp	36.465,00	Rp 109.395,00
5	Epinephrine inj	2	Ampul	46344013-2	Oktober 2024	BLUD	Rp	1.518,00	Rp 3.036,00
6	Iron Sucrose inj	39	Ampul	25E304	Juni 2025	BLUD	Rp	20.535,00	Rp 800.865,00
7	Orabloc inj	200	Ampul	230095	Mei 2025	BLUD	Rp	15.400,00	Rp 3.080.000,00
8	Iron Sucrose inj	169	Ampul	25G640	Agustus 2025	BLUD	Rp	20.535,00	Rp 3.470.415,00
9	Tradosik inj	20	Ampul	DA3422	Januari 2025	BLUD	Rp	22.066,00	Rp 441.320,00
10	Digoxin Inj	28	Ampul	3AL056	Desember 2024	BLUD	Rp	20.600,00	Rp 576.800,00
11	Triamcinolon Inj	1	Vial	24L185A	November 202	BLUD	Rp	30.000,00	Rp 30.000,00
12	Farmavon Inj	3	Ampul	3HC059	Maret 2025	BLUD	Rp	46.620,00	Rp 139.860,00
13	Flamicort Inj	1	Vial	IS030441	September 2025	BLUD	Rp	109.980,00	Rp 109.980,00
14	Farmabes Inj	13	Vial	3AJ090	Oktober 2025	BLUD	Rp	81.807,00	Rp 1.063.491,00
15	Umaron Inj	2	Vial	3AA029	Januari 2025	BLUD	Rp	172.660,00	Rp 345.320,00
16	Lidocain comp inj	84	Ampul	66815034	November 2025	BLUD	Rp	1.531,00	Rp 128.604,00
17	Bunascan inj	6	Ampul	3HK041	November 2025	BLUD	Rp	58.275,00	Rp 349.650,00
TOTAL									Rp 11.183.054,00

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Suction Catheter No. 10	18	pcs	18022088	Januari 2025	BLUD	Rp 4.997,00	Rp 89.946,00
2	Masker Oksigen Dewasa	1	pcs	FY1907022	Agustus 2024	BLUD	Rp 16.698,00	Rp 16.698,00
3	Masker Oksigen Dewasa	7	pcs	11022188	Januari 2025	BLUD	Rp 16.698,00	Rp 116.886,00
4	Guedel Airway No. 70 mm	28	pcs	06032088	Februari 2025	BLUD	Rp 15.089,00	Rp 422.492,00
5	Masker Oksigen Dewasa	15	pcs	24032188	Februari 2025	BLUD	Rp 16.698,00	Rp 250.470,00
6	Masker Oksigen Dewasa	50	pcs	24032188	Februari 2025	BLUD	Rp 16.698,00	Rp 834.900,00
7	Minicap	120	pcs	20180703L	11 Desember 2024	BLUD	Rp -	Rp -
8	Gel Lidocain	262	pcs	432015/16	Mei 2025	BLUD	Rp 29.970,00	Rp 7.852.140,00
9	Silk 3/0	217	pcs	2007085	Juli 2025	BLUD	Rp 3.514,00	Rp 762.538,00
10	ETT 5	1	pcs	-	-	BLUD	Rp 27.246,00	Rp 27.246,00
11	ETT 7,5	1	pcs	180301	Maret 2023	BLUD	Rp 27.250,00	Rp 27.250,00
12	ETT 7,0	2	pcs	119022010001	Januari 2024	BLUD	Rp 27.246,00	Rp 54.492,00
13	ETT 6,5	1	pcs	180301	Maret 2023	BLUD	Rp 27.246,00	Rp 27.246,00
14	ETT 6,5	1	pcs	200320	Maret 2025	BLUD	Rp 27.246,00	Rp 27.246,00
15	NGT 5	1	pcs	20151130	November 2024	BLUD	Rp 12.099,00	Rp 12.099,00
16	NGT 8	2	pcs	SFFT0885	Agustus 2020	BLUD	Rp 8.275,00	Rp 16.550,00
17	NGT 2,5	1	pcs	20112010005	Oktober 2025	BLUD		Rp -
18	Guedel 60 mm	1	pcs	26011888	Desember 2022	BLUD	Rp 15.089,00	Rp 15.089,00
19	Guedel 80 mm	1	pcs	16041888	Maret 2023	BLUD	Rp 15.089,00	Rp 15.089,00
20	Guedel 110 mm	1	pcs	PN-0521	Desember 2019	BLUD	Rp 14.461,00	Rp 14.461,00
21	Abocath 18 G	50	pcs	16627-01	Desember 2024	BLUD	Rp 23.310,00	Rp 1.165.500,00
22	NGT 3,5	10	pcs	SF*FT0380	November 2025	BLUD	Rp 12.756,00	Rp 127.560,00
23	Minicap Baxter	17	pcs	24D15H15	September 2025	BLUD	Rp -	Rp -
24	Foley Catheter 12	4	pcs	20200925	September 2025	BLUD	Rp 11.988,00	Rp 47.952,00
25	Suction Catheter 10	25	pcs	23101988	September 2024	BLUD	Rp 4.997,00	Rp 124.925,00
26	Suction Catheter 14	3	pcs	11112088	Oktober 2025	BLUD	Rp 4.997,00	Rp 14.991,00
27	Delta dry	1	roll	73443-02	Mei 2025	BLUD	Rp 34.966,00	Rp 34.966,00
28	Silk 3/0	58	pcs	2007085	Juli 2025	BLUD	Rp 3.514,00	Rp 203.812,00
29	Gypsona 7	7	roll	2147	November 2024	BLUD	Rp 37.752,00	Rp 264.264,00
30	Stab Knife	1	pcs	2002906	Oktober 2025	BLUD	Rp 352.000,00	Rp 352.000,00
TOTAL								Rp 12.918.808,00

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Eflagen 25 mg	8	Tab	DA2921	Januari 2025	BLUD	Rp 1.320,00	Rp 10.560,00
2	Gluvigien	180	Caps	D1A0102	Januari 2025	BLUD	Rp 15.505,00	Rp 2.790.900,00
3	Oseltamivir tab	20	Caps	21OV2011	Januari 2025	BLUD	Rp 7.000,00	Rp 140.000,00
4	Oseltamivir tab	60	Caps	21OV2061	Januari 2025	BLUD	Rp 7.000,00	Rp 420.000,00
5	Mucohexin tab	12	Tab	CK2330	Oktober 2024	BLUD	Rp 495,00	Rp 5.940,00
6	Erdomex caps	20	Caps	ED1L07	November 2024	BLUD	Rp 4.717,00	Rp 94.340,00
7	Antasida Doen	273	Tab	A30217N	Februari 2025	BLUD	Rp 111,00	Rp 30.303,00
8	Glimepirid 1 mg	20	Tab	TPC21851	Februari 2025	BLUD	Rp 97,00	Rp 1.940,00
9	Mucohexin tab	8	Tab	CK2330	Desember 2024	BLUD	Rp 495,00	Rp 3.960,00
10	Amiodaron tab	394	Tab	AX3A072	Februari 2025	BLUD	Rp 1.576,00	Rp 620.944,00
11	Mertigo tab	12	Tab		Februari 2025	BLUD	Rp 3.075,00	Rp 36.900,00
12	Mertigo tab	11	Tab		Agustus 2024	BLUD	Rp 3.075,00	Rp 33.825,00
13	Glibenclamid 5 mg	115	Tab	23GD1054	Maret 2025	BLUD	Rp 83,00	Rp 9.545,00
14	Ifalmin	570	Kaps	D3A0401	Maret 2025	BLUD	Rp 15.505,00	Rp 8.837.850,00
15	Kalium Diklofenak 50 mg	2107	Tab	2303050	Maret 2025	BLUD	Rp 464,00	Rp 977.648,00
16	Acarbose 100 mg	17	Tab	54C0651	Februari 2025	BLUD	Rp 990,00	Rp 16.830,00
17	Irbesartan 150 mg	28	Tab	08723E01G	April 2025	BLUD	Rp 875,00	Rp 24.500,00
18	Revipros	150	Kap	D5A0901	Mei 2025	BLUD	Rp 15.505,00	Rp 2.325.750,00
19	Levocetirizine 5 mg	20	Tab	T616M001	April 2025	BLUD	Rp 3.000,00	Rp 60.000,00
20	Mucohexine	62	Tab		Maret 2025	BLUD	Rp 495,00	Rp 30.690,00
21	Acyclovir 200 mg	280	Tab	A01307FA	Juni 2025	BLUD	Rp 556,00	Rp 155.680,00
22	Oseltamivir	21	Tab	21OV2070	Januari 2025	BLUD	Rp 7.000,00	Rp 147.000,00
23	Oseltamivir	170	Tab	21OV2087	Juli 2025	BLUD	Rp 7.000,00	Rp 1.190.000,00
24	Oseltamivir	190	Tab	21OV2096	Agustus 2025	BLUD	Rp 7.000,00	Rp 1.330.000,00
25	Kina	24	Tab	600538B	Juni 2025	BLUD	Rp 1.677,00	Rp 40.248,00
26	Loperamid	447	Tab	20131	November 2025	BLUD	Rp 74,00	Rp 33.078,00
27	Irbesartan 300 mg	152	Tab	08823K08G	Oktober 2025	BLUD	Rp 1.780,00	Rp 270.560,00
28	Ticagrelor	20	Tab	HTTILA35001	Oktober 2025	BLUD	Rp 8.325,00	Rp 166.500,00
29	Erisanbe 200 mg	148	Tab	DK203017	Oktober 2025	BLUD	Rp 1.505,00	Rp 222.740,00
30	Imunos Syr	12	Botol	E5042	Oktober 2024	BLUD	Rp 66.045,00	Rp 792.540,00
31	Rhinos Neo Drop	1	Botol	54B4103	Maret 2025	BLUD	Rp 57.533,00	Rp 57.533,00
32	Lapiflox	30	Tablet	34013	Maret 2025	BLUD	Rp 15.096,00	Rp 452.880,00
TOTAL								Rp 21.331.184,00

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan	No Batch	Exp Date	Sumber Dana	Harga Satuan	Total Harga
1	Cinolon Cream	1	Tube	BB9509	Februari 2024	BLUD	Rp 15.850,00	Rp 15.850,00
2	Otopain Ear Droops	1	Box	D008N008	Mei 2027 (Pecah)	BLUD	Rp 74.300,00	Rp 74.300,00
3	Symbicort Turbuhaler	1	Box	05982570573578	Januari 2025	BLUD	Rp 166.840,00	Rp 166.840,00
4	Vasacon MD	12	Strip	1VN61229	Desember 2024	BLUD	Rp 15.553,00	Rp 186.636,00
5	Ofloxacin Tetes Telinga	1	Botol	TLOFCA32005	Maret 2025	BLUD	Rp 24.750,00	Rp 24.750,00
6	Fosen Enema	1	Botol	1HB142	Februari 2025	BLUD	Rp 77.700,00	Rp 77.700,00
7	Floxa Minidose	1	Strip	2F360707	Januari 2025	BLUD	Rp 28.207,00	Rp 28.207,00
8	Ofloxacin Tetes Telinga	1	Botol	TLOFCA32005	Maret 2025	BLUD	Rp 77.700,00	Rp 77.700,00
9	Dulcolax supp	67	supp	21070428	Juni 2025	BLUD	Rp 3.931,00	Rp 263.377,00
10	Vasacon A Md	5	Strip	3VA60808	Agustus 2025	BLUD	Rp 15.553,00	Rp 77.765,00
TOTAL								Rp 993.125,00
SUBTOTAL								Rp 50.693.999,96

Berdasarkan lampiran tersebut akan dimusnahkan sediaan farmasi sejumlah Rp. 112.915,427,00 dengan rincian sebagai berikut :
obat dan alkes menggunakan sumber dana BLUD : Rp. 51.119.648,96 dan program menggunakan sumber dana Dinas Kesehatan
Rp. 61.795.778,00

Tanjung Redeb, 05 Desember 2025

Diketahui,
Kepala Instalasi Farmasi



apt. Triana Damayanti, S. Farm
NIP. 198303062011012004

Kepala Gudang Farmasi



apt. Ima Inarah, S. Farm
NIP. 198901202022032006



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD dr. ABDUL RIVAI

Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Telp (0554) 21098 Fax. 21098
Website : rsudrabdulrivai.co.id / E-Mail : rsudrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB



Nomor : 445 / 04 / LAB / XII / 2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Barang Expired 2024

Kepada Yth.
Direktur RSUD dr. Abdul Rivai
Cq Kepala Instalasi Farmasi
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan berakhirnya masa pakai barang/reagen, maka melalui surat ini kami melaporkan data barang/reagen expired periode Januari 2024 - Desember 2024 . Adapun data barang expired tersebut adalah sebagai berikut

No	Nama Barang	Merk	No LOT	Tgl Exp	Jumlah	Sumber Dana	Harga
1	AHG Coomb Test	Matrix	50530-2431	09/2024	11 Box	BLUD	Rp. 29.304.000
2	Bzo Device	Answer	0000640515	19/10/2024	8 Box	BLUD	Rp. 3.741.120

Demikian laporan barang expired tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tanjung Redeb, 02 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Instalasi Laboratorium

dr. Nordjannah, Sp.PK
NIP. 19820407 200604 2 014

1



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD dr. ABDUL RIVAI

Jalan Pulau Panjang No. 276 Kode Pos. 77311 Telp (0554) 21098 Fax. 21098
Website : rsudrabdulrivai.co.id / E-Mail : rsudrabdulrivai@gmail.com
TANJUNG REDEB



LAPORAN KADALUARSA

Nomor : 445 / 02 / LAB / XI / 2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Barang Kadaluarsa 2025

Kepada Yth.
Direktur RSUD dr. Abdul Rivai
Cq Kepala Instalasi Farmasi
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa pakai barang/reagen, maka melalui surat ini kami melaporkan data barang/reagen Kadaluarsa periode Januari 2025 – September 2025 . Adapun data barang Kadaluarsa tersebut adalah sebagai berikut

No	Nama Barang	Merk	No LOT	Tgl Exp	Jumlah	Sumber Dana	Harga
1	Dengue IgG/IgM	Abbott	11ADI003C	05/10/2025	1 Box	BLUD	Rp. 1,135,530
2	Sulfolyser	Sysmex	AM4053	06/10/2025	3 Bh	BLUD	Rp. 6,653,340
3	Trepopcheck Syphilis	Indec	K23052	31/10/2025	4 Box	Bantuan Dinkes	-

Berdasarkan evaluasi periode oktober 2025 ini, 3 item barang yang Kadaluarsa diatas disebabkan karena penurunan jumlah tes pada periode tahun 2025 ini dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Demikian laporan barang Kadaluarsa tahun 2025, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tanjung Redeb, 01 November 2025

Mengetahui,

Kepala Instalasi Laboratorium

dr. Nordjannah, Sp.PK

NIP. 19820407 200604 2 014



10 strip @ 10 tablet

HALOPERIDOL

Tablet 0.5 mg



PT. YAHINDO FAHMATAMA Semarang-Indonesia

Mr. Neg. — **DELEGATION**

HALOPERIDOL
Tablet 0,5 mg

Tablet 0,5 mg

Feb. 1940]

AGT 25
AGT 25
16 280



Phenobarbital
15 Tablets



10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets
PHENOBARBITAL
Tablet 30 mg

NO. BATCH : 830325N
MFG. DATE : 02 2023
EXP. DATE : 02 2025
HET : RP32,432

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2

10 blisters @ 10 tablets

PHENOBARBITAL

Tablet 30 mg

NO. BATCH : B 3 0 3 2 5 N
MFG. DATE : 0 2 2 0 2 3
EXP. DATE : 0 2 2 0 2 5
HET : R P 3 2 . 4 3 2



10 strip @ 10 tablet



HALOPERIDOL

Tablet 0,5 mg



PT. YARINDO FARMATAMA Serang-Indonesia

HARUS DENGAN
RESEP DOKTER



Durogesic® 25µg/h
fentanyl



8.2 mg per transdermal patch

1 transdermal patches

Do not use if seal on pouch is broken

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

for external use

Janssen

Manufactured by Janssen Pharmaceutics N.V.,
Beerse, Belgium.
Marketed by PT. Citra Karya Paramita Tbk.
JAWA-BANDUNG

LOT No. 111177
■ 752963

NAB4800
01-2023
12-2024

Batch No.
Mfg. Date
Exp. Date

Durogesic® 25µg/h
fentanyl



8.2 mg per transdermal patch

1 transdermal patches

Do not use if seal on pouch is broken

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

for external use

Janssen

Manufactured by Janssen Pharmaceutics N.V.,
Beerse, Belgium.
Marketed by PT. Citra Karya Paramita Tbk.
JAWA-BANDUNG

LOT No. 111177
■ 752963

NAB4800
01-2023
12-2024

Batch No.
Mfg. Date
Exp. Date





Oraldol 100.000
Asetosal Hidroklorida
Epinephrine Bitartrate
Atorvastatin Kalsium 40 mg
Sediaan injeksi 100.000 for Dental Use

IRON SUCROSE
Injeksi 20 mg/ml
NOVELL

IRON SUCROSE
Injeksi 20 mg/ml
NOVELL

IRON SUCROSE
Injeksi 20 mg/ml
NOVELL

KALMECO
Nicotizine
500 mg

Blister pack containing 10 small vials of Iron Sucrose Injeksi 20 mg/ml.

100PCS

**KTK KE 2 ED
(OBT PROG TB)**

• Single use • Non-Toxic and Non-Pyrogenic • EO Gas-Sterile • Ultra Sharp needle

OTSUKA INFUSION
"DIAPHOTLE"

**OBAT ED
PROGRAM**

**ED (OBAT
PROG HIV)**











LAMPIRAN 9

Laporan Perumdam Batiwakkal Untuk Tahun yang
berakhir 31 Desember 2025

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU**

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direktur	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 26

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saipul Rahman
Alamat Kantor : JL Raja Alam 1 KM 5 Tanjung Redeb Berau
Nomor Telepon : -
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.
2. Laporan keuangan PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.
3. PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU telah melakukan transisi dari SAK ETAP ke SAK EP efektif per 1 Januari 2025 dengan melakukan penyesuaian retrospektif pada saldo awal ekuitas dan penyajian kembali angka komparatif tahun 2024 sesuai ketentuan standar yang berlaku.
4. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan, serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta akurasi perhitungan imbalan kerja secara aktuarial, pajak tangguhan, dan estimasi penurunan nilai piutang sesuai SAK EP bagi PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 26 Maret 2026

Direktur,

Saipul Rahman



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No. 00031/2.0883/AU.8/05/0834-1/1/III/2026

Direksi dan Badan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau** ("Perusahaan"), yang terdiri laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 26 Maret 2025. Beberapa akun pada laporan keuangan tahun 2024 disajikan kembali untuk menyesuaikan penerapan pertama kali SAK Entitas Privat.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AHMAD RAHARJO UTOMO



Ahmad Toha, CPA
NRAP: AP.0834



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3d, 3	23.793.832.316	17.747.870.091
Piutang Usaha	3e, 4	6.954.446.074	7.505.949.672
Persediaan	3f, 5	6.631.245.253	7.063.168.508
Pajak Dibayar Dimuka		3.881.889.316	3.881.889.316
Jumlah Aset Lancar		41.261.412.959	36.198.877.587
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap-Neto	3g, 6	162.354.383.718	164.242.818.669
Jumlah Aset Tidak Lancar		162.354.383.718	164.242.818.669
JUMLAH ASET		203.615.796.677	200.441.696.256
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	3j, 8	-	8.340.000
Utang Pajak	3k, 9	1.120.046.188	448.897.026
Beban yang Masih Harus Dibayar	3l, 10	133.423.095	195.879.022
Utang Lain-lain	3j, 11	441.647.198	403.416.894
Liabilitas Pajak Tangguhan		496.445.156	123.867.480
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.191.561.637	1.180.400.422
EKUITAS			
	13		
Kekayaan Pemda yang Dipisahkan		171.320.860.000	171.320.860.000
Penyertaan Pemerintah			
yang Belum Ditetapkan Statusnya		4.676.266.000	4.676.266.000
Tambahan Modal Disetor		528.460.000	528.460.000
Modal Hibah		14.760.000	14.760.000
Dana Cadangan		6.240.006.885	6.240.006.885
Penyisihan Laba		4.887.159.842	4.887.159.842
Saldo Laba (Rugi)		1.446.655.375	52.443.507
Akumulasi Penghasilan Komprehensif Lain	13	12.310.066.937	11.541.339.600
Jumlah Ekuitas		201.424.235.040	199.261.295.834
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		203.615.796.677	200.441.696.256

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	3o, 14	85.221.320.742	76.372.476.762
BEBAN USAHA	3o, 15	83.354.398.544	81.316.479.149
LABA (RUGI) USAHA		1.866.922.198	(4.944.002.387)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	3o, 16	1.283.354.022	265.003.739
Beban Lain-lain	3o, 17	(833.295.406)	(752.247.053)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		450.058.617	(487.243.314)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.316.980.815	(5.431.245.701)
Beban Pajak Kini		(627.780.458)	-
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		(155.757.145)	8.026.920
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		1.533.443.213	(5.423.218.781)
Penghasilan Komprehensif Lain:			
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria		985.547.868	599.520.000
Pajak Tangguhan terkait OCI		(216.820.531)	(131.894.400)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		2.302.170.550	(4.955.593.181)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Kekayaan Pemda yang Dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	Tambahan Modal Disetor	Modal hibah	Dana cadangan	Penyisihan Laba	Saldo Laba (Rugi)	Akumulasi Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2023	171.320.860.000	4.676.266.000	528.460.000	14.760.000	4.709.893.182	4.465.270.871	10.749.274.426	-	196.464.784.479
Dana Sosial Pendidikan	-	-	-	-	421.888.971	-	-		421.888.971
Dana Pesiun					421.888.971				421.888.971
Pajak Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	-	-	-		-
Jasa Produksi					-		-		-
Cadangan Tujuan					210.944.485				210.944.485
Cadangan Umum					475.391.276				475.391.276
Penyisihan Laba						421.888.971			421.888.971
Pembagian Laba 2023	-	-	-	-	-	-	(5.273.612.138)		(5.273.612.138)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	(5.423.218.781)		(5.423.218.781)
Penghasilan Komprehensif Lain								11.541.339.600	11.541.339.600
Saldo 31 Desember 2024	171.320.860.000	4.676.266.000	528.460.000	14.760.000	6.240.006.885	4.887.159.842	52.443.507	11.541.339.600	199.261.295.834
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-	(139.231.344)		(139.231.344)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	1.533.443.213		1.533.443.213
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-	-		768.727.337	768.727.337
Saldo 31 Desember 2025	171.320.860.000	4.676.266.000	528.460.000	14.760.000	6.240.006.885	4.887.159.842	1.446.655.375	12.310.066.937	201.424.235.040

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba Penghasilan Komprehensif	2.302.170.550	(4.955.593.181)
Penyesuaian atas pos-pos yang tidak mempengaruhi Kas dari kegiatan operasi:		
Penyusutan Aset Tetap	13.506.885.246	10.733.927.644
Penghasilan Komprehensif Lain	-	11.073.714.000
Koreksi Laba Ditahan	(139.231.344)	(5.273.612.138)
PERUBAHAN MODAL KERJA		
Kenaikan / Penurunan Aset Lancar		
(Kenaikan) / Penurunan Piutang Usaha	551.503.598	1.727.316.907
(Kenaikan) / Penurunan Persediaan	431.923.255	959.329.311
(Kenaikan) / Penurunan Pajak Dibayar Dimuka	-	(3.881.889.316)
(Kenaikan) / Penurunan Aset Pajak Tangguhan	-	-
Kenaikan / (Penurunan) Utang Usaha	(8.340.000)	(5.130.900)
Kenaikan / (Penurunan) Beban yang Masih Harus Dibayar	(62.455.927)	113.225.534
Kenaikan / (Penurunan) Utang Pajak	671.149.162	(1.214.671.505)
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Pajak Tangguhan	372.577.676	123.867.480
Kenaikan / (Penurunan) Utang Lainnya	38.230.304	347.320.894
Kenaikan / (Penurunan) Utang Imbalan Kerja	-	(10.516.213.000)
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Operasi	17.664.412.520	(768.408.270)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Pembelian/Pengadaan Aset Tetap	(11.618.450.295)	(5.697.873.475)
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Investasi	(11.618.450.295)	(5.697.873.475)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Dana Jasa Produksi	-	421.888.971
Cadangan Dana	-	1.108.224.732
Penyisihan Laba	-	421.888.971
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Pendanaan	-	1.952.002.674
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	6.045.962.225	(4.514.279.071)
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE	17.747.870.091	22.262.149.162
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERODE	23.793.832.316	17.747.870.091

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pada awalnya merupakan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Berau yang didirikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 171/KPTS/CK/XII/1982 tanggal 4 Desember 1982 berkedudukan di Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Dengan Pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masa kini, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mengembangkan kemas depan, Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Berau disesuaikan namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 41 Tahun 1993 tanggal 15 Maret 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tingkat II No.7 Tahun 1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pembentukan/Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Berau. PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau. Perusahaan merupakan perangkat dari Pemerintah Kabupaten Berau dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Kepala Daerah (Kuasa Pemilik Modal).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 ayat (2) dan ayat (4) peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD dapat melaksanakan perubahan entitas hukum maka peraturan daerah No. 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum tirta segah Kabupaten Berau Perlu diganti. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau terdiri dari:

- KPM;
- Dewan Pengawas; dan
- Direksi.

Sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 500/388/KPM/PSDA/2023 Tahun 2023 Periode 2023 -2027 Tanggal 27 November 2023 dan Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau, Surat Keputusan Bupati Nomor 500/417/KPM/PSDA/2023 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau Periode 2024-2028 dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 39/DP-PERUMDAM/BRU/XII/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator dan Staf Administrasi Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, susunan pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja (lanjutan)

Dewan Pengawas

Ketua	: Drh Mustakim Suharjana
Direktur	: Saipul Rahman, S. Hut., M, ENVN.MAN,SC
Kabag. Keuangan & Adm.	: Syaipul Kasni Satiawan,SH
Kabag. Teknik	: Syahril, SE., M.Si
Kabag. Hublang	: Yan AT, SE
Kabag. Satuan Pengawas	: Asra,ST

Karyawan

Bidang Umum	: 24 Orang
Bidang Teknik	: 39 Orang
Bidang Hublang	: 16 Orang
Karyawan/Pegawai Kontr	: 22 Orang
Outsorsing	: 23 Orang

2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT

Direktur Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2024 disajikan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Entitas Privat (SAK-EP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan berlaku efektif untuk periode laporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. SAK EP merupakan pengganti SAK ETAP dan telah diselaraskan dengan *IFRS for SMEs* edisi 2025.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan lengkap Perusahaan terdiri atas, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual (*accrual basis*), menggunakan metode konsep biaya historis sebagai dasar pengukuran. Berbeda dengan keempat komponen laporan keuangan lainnya yang disusun atas dasar akrual, laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) sesuai SAK EP Bab 7. Laporan ini menyajikan pergerakan kas dan setara kas yang sesungguhnya terjadi selama periode berjalan, bukan berdasarkan pengakuan pendapatan dan beban secara akrual. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyajian laporan arus kas, cerukan bank pada umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan yang serupa dengan pinjaman. Namun, apabila cerukan bank tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut diakui sebagai komponen kas dan setara kas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa posisi likuiditas yang dikelola secara harian tercermin secara akurat dalam laporan arus kas Perusahaan.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 merupakan laporan keuangan PERUMDA Air Minum Batiwakkal Berau pertama yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Perusahaan menerapkan SAK EP secara retrospektif sesuai SAK EP Bab 35 tentang Ketentuan Transisi SAK Entitas Privat, dengan tanggal transisi 1 Januari 2025 sebagai awal periode komparatif. Seluruh penyesuaian yang timbul dari penerapan pertama kali SAK EP diakui langsung ke saldo laba awal periode berjalan per 1 Januari 2025. Informasi komparatif tahun 2024 disajikan kembali (*restate*) untuk mencerminkan dampak penerapan SAK EP, terutama terkait pengakuan Pajak Tangguhan dan Imbalan Kerja (Aktuaria).

b. Mata uang pelaporan, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

c. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a) Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* di mana entitas tersebut merupakan *venture* ;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

c. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu Jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Pengakuan dan Pengukuran

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa layanan air minum maupun layanan non-air lainnya yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal Perusahaan. Piutang lain-lain terutama terdiri dari pinjaman dan penggantian yang diberikan kepada pihak ketiga. Piutang disajikan berdasarkan klasifikasi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 11, piutang diakui sebesar nilai nominal tagihan dan selanjutnya diukur pada nilai nominal tersebut dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Penurunan nilai piutang diakui berdasarkan bukti objektif bahwa Perusahaan tidak akan mampu menagih seluruh jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal tagihan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo piutang pada akhir periode laporan. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan bukti objektif yang mencakup pengalaman masa lalu, prospek usaha, kondisi keuangan debitur dengan penekanan pada arus kas, serta kemampuan membayar debitur. Penentuan besaran penyisihan dilakukan melalui pendekatan umur piutang (*aging schedule*) sebagai berikut:

<u>Kategori Umur Piutang</u>	<u>Persentase Penyisihan</u>	<u>Keterangan</u>
Belum jatuh tempo	0%	Lancar
Menunggak 1-3 bulan	5% - 10%	Kurang lancar
Menunggak 4-6 bulan	11% - 20%	Dalam perhatian
Menunggak 7-12 bulan	21% - 50%	Diragukan
Menunggak > 12 bulan	50% - 100%	Macet

Penentuan persentase dalam setiap rentang dilakukan berdasarkan pertimbangan manajemen atas kondisi spesifik masing-masing pelanggan, termasuk riwayat pembayaran, kondisi ekonomi pelanggan, dan hasil upaya penagihan yang telah dilakukan. Persentase penyisihan ditelaah dan disesuaikan setiap akhir periode pelaporan.

Penghapusan dan Pemulihan Piutang

Piutang dihapusbukukan (*write-off*) ketika tidak terdapat kemungkinan yang wajar untuk dapat ditagih, yaitu setelah seluruh upaya penagihan telah dilakukan dan tidak menghasilkan hasil. Penghapusan dilakukan dengan mendebit akun penyisihan piutang dan mengkredit akun piutang usaha, setelah mendapat persetujuan Direksi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan pada periode penerimaannya.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah dan pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- Persediaan bahan kimia
- Persediaan bahan lainnya

Pembebanan pemakaian bahan kimia dan bahan instalasi kedalam pos biaya dicatat dengan metode FIFO.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

g. Aset tetap

Aset tetap dibukukan menurut harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Perpajakan yakni sesuai SK Menteri Keuangan Nomor: 82/KMK.04/1994 dengan penggolongan penyusutan sebagai berikut:

Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Tanah merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan.

	<u>Masa Manfaat</u>
Tanah	-
Bangunan	20 Tahun
Instalasi Sumber Air	8 Tahun
Instalasi Pompa	8 Tahun
Instalasi Pengolahan Air	8 Tahun
Peralatan/Perlengkapan	8 Tahun
Kendaraan	8 Tahun
Inventaris/Perabot Kantor	4 Tahun

Berdasarkan ketentuan SAK EP, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun buku untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi fisik dan ekonomi aset. Perubahan atas taksiran tersebut, akan diterapkan secara retrospektif sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Aset tetap yang telah berakhir masa manfaatnya, maka pada tahun tersebut seluruh nilai buku yang tersisa akan disusutkan sekaligus.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat di atribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK EP.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

h. Aset tidak berfungsi

Aset tidak berfungsi merupakan aset tetap yang umur ekonomisnya (masa manfaatnya) telah habis. Namun beberapa aset tidak berfungsi tersebut masih digunakan dalam operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

i. Penurunan nilai aset

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai atas aset, baik dari sumber internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok unit penghasil kas. Apabila terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Kerugian penurunan nilai diakui apabila jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, dan dibebankan langsung pada laba rugi periode berjalan, sesuai dengan SAK EP Bab 27 "Penurunan Nilai Aset".

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dapat dipulihkan pada periode berikutnya apabila terdapat perubahan estimasi jumlah terpulihkan. Pemulihan diakui dalam laba rugi, namun jumlah tercatat aset setelah pemulihan tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang seharusnya ada apabila tidak pernah terdapat penurunan nilai sebelumnya.

j. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

k. Pajak penghasilan

Kebijakan akuntansi pajak penghasilan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 29 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan terdiri atas dua komponen utama, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan, yang masing-masing diakui, diukur, dan disajikan sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan menggunakan tarif pajak badan yang berlaku, yaitu sebesar 22% (dua puluh persen). Laba kena pajak merupakan laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

k. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Utang pajak kini (PPH Badan yang masih harus dibayar) disajikan sebagai liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas perpajakan, setelah dikurangkan dengan kredit pajak dan angsuran PPh Pasar 25 yang telah dibayarkan selama tahun berjalan.

Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan, maka selisih lebih tersebut diakui sebagai aset pajak kini dan disajikan sebagai piutang pajak dalam laporan posisi keuangan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya, menggunakan metode liabilitas neraca (*balance sheet liability method*) sesuai SAK EP Bab 29. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer dapat dikurangkan serta akumulasi rugi fiskal yang belum dikompensasi menimbulkan aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui sebatas besar kemungkinan laba kena pajak masa mendatang tersedia untuk dikompensasi. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak yang memadai tidak lagi besar kemungkinannya tersedia.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali yang berkaitan dengan pos yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau *Other Comprehensive Income (OCI)* atau langsung di ekuitas, yang dalam hal tersebut pajak terkait juga diakui pada pos yang sama. Aset pajak tangguhan disajikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas pajak tangguhan disajikan sebagai liabilitas tidak lancar dalam laporan posisi keuangan.

l. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh Perusahaan karena diterimanya jasa selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

m. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

n. Imbalan kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengukuran kewajiban tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) sebagai dasar perhitungan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja, baik karena pensiun normal, meninggal dunia, cacat tetap, maupun pengunduran diri.

Imbalan kerja berdasarkan ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai program imbalan pasti. Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk mengukur nilai kini kewajiban imbalan pasti dan beban jasa kini terkait. Pengukuran ini melibatkan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan yang mencakup tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan mortalitas. Tingkat diskonto yang digunakan ditentukan berdasarkan suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan sesuai dengan mata uang dan estimasi jangka waktu pembayaran imbalan.

Sesuai dengan ketentuan SAK EP, biaya jasa kini dan beban bunga diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Seluruh pengukuran kembali berupa keuntungan atau kerugian aktuarial diakui secara langsung melalui Penghasilan Komprehensif Lain atau *Other Comprehensive Income (OCI)* dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perusahaan tidak menyelenggarakan aset program imbalan pasti.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

o. Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

i. Penjualan barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- a). Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas barang yang terjual;
- b). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- c). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
- d). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

o. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

ii. Penjualan jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- a). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- d). Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Pendapatan penjualan air yang disajikan dalam laporan laba rugi diakui/dicatat dan dilaporkan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan sebagai berikut:

- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara tunai, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara angsuran, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat dokumen tagihan diterbitkan atau pada saat kontrak sambungan baru ditandatangani.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda diterima.
- Pendapatan yang berasal dari usaha kerjasama dengan pihak ketiga berupa royalti, *revenue sharing*, *production sharing* diakui atas dasar akrual. Sedang pendapatan berupa pembagian keuntungan dan deviden diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*basis akrual*). Pembebanan beban yang bersifat periodik seperti gaji, sewa, asuransi, harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka. Kecuali untuk listrik dan telepon dibukukan atas dasar *cash basis*.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

p. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus di evaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dan peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan diterapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perusahaan melakukan revaluasi atas umur manfaat nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 ("UU 11/2020") mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perusahaan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode *projected unit credit* dan mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perusahaan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2025	2024
Kas		
Kas kecil	21.758.500	120.784.102
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Syariah	728.153	728.153
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.518.925.858	5.589.308.875
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.924.339.412	1.878.181.335
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	7.328.080.393	10.158.867.626
Jumlah Kas dan Setara Kas	23.793.832.316	17.747.870.091

4. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Piutang penjualan air	28.399.221.643	25.274.563.417
Piutang penjualan non air	560.273.500	560.273.500
Piutang Kemitraan	1.220.138.090	1.320.138.090
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(23.225.187.159)	(19.649.025.335)
Jumlah Piutang Usaha - neto	6.954.446.074	7.505.949.672

	2025	2024
Umur Piutang		
Belum Jatuh Tempo	3.157.177.440	3.051.822.675
Menunggak 1-3 Bulan	867.657.200	3.733.731.854
Menunggak 4-6 Bulan	1.332.839.950	650.380.692
Menunggak 7-12 Bulan	1.710.178.650	737.040.907
Menunggak > 12 Bulan	23.111.779.993	18.981.998.879
Jumlah Piutang Bruto	30.179.633.233	27.154.975.007
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	23.225.187.159	19.649.025.335
Jumlah Piutang Neto	6.954.446.074	7.505.949.672

Sesuai dengan SAK Entitas Privat, mutasi akun penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
Saldo Awal Tahun	19.649.025.335	18.213.233.548
+ Cadangan tahun berjalan	3.576.161.824	1.435.791.787
- Pemulihan Penyisihan	-	-
- Penghapusan Piutang	-	-
Saldo Akhir Tahun	23.225.187.159	19.649.025.335

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan Bahan Operasi Kimia		
Persediaan Bahan Kimia Kaporit	486.265.568	71.078.240
Persediaan Bahan Kimia PAC	1.307.649.908	2.034.015.844
Persediaan Bahan Kimia Soda Ash	209.075.770	251.509.370
Persediaan Bahan Kimia Soda Caustic	2.640.000	2.640.000
Persediaan Bahan Operasi Lainnya		
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	140.506.954	225.149.144
Persediaan Suku Cadang Pompa	148.740.000	148.740.000
Persediaan Bahan Instalasi		
Persediaan Pipa-Pipa	1.094.585.705	1.106.920.921
Persediaan Water Meter	755.186.110	588.506.602
Persediaan Accessories	2.486.595.238	2.634.608.387
Jumlah Persediaan	6.631.245.253	7.063.168.508

6. ASET TETAP

	2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Nilai Perolehan</u>				
Tanah	54.752.618.910	-	-	54.752.618.910
Bangunan dan gedung	16.776.718.687	1.209.297.399	-	17.986.016.086
Instalasi sumber air	16.279.929.760	541.680.000	-	16.821.609.760
Instalasi pengolahan air	49.563.618.656	5.998.804.050	-	55.562.422.706
Transmisi dan distribusi	78.005.647.388	3.595.831.971	-	81.601.479.359
Peralatan/perlengkapan	1.227.718.724	16.510.000	-	1.244.228.724
Kendaraan/alat pengangkutan	4.399.911.000	-	-	4.399.911.000
Inventaris/perabot kantor	9.377.320.197	256.326.875	-	9.633.647.072
Jumlah	230.383.483.322	11.618.450.295	-	242.001.933.617
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan dan gedung	3.557.974.878	848.137.030	-	4.406.111.908
Instalasi sumber air	5.509.665.645	733.202.372	-	6.242.868.017
Instalasi pengolahan air	15.699.830.459	2.384.945.676	-	18.084.776.135
Transmisi dan distribusi	31.498.550.095	8.052.347.072	-	39.550.897.167
Peralatan/perlengkapan	1.171.634.799	22.592.575	-	1.194.227.374
Kendaraan/alat pengangkutan	2.829.282.740	353.155.250	-	3.182.437.990
Inventaris/perabot kantor	5.873.726.037	1.112.505.271	-	6.986.231.308
Jumlah	66.140.664.653	13.506.885.246	-	79.647.549.899
Nilai Buku	164.242.818.669			162.354.383.718

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Nilai Perolehan</u>				
Tanah	54.752.618.910	-	-	54.752.618.910
Bangunan dan gedung	15.940.677.707	836.040.980	-	16.776.718.687
Instalasi sumber air	16.089.564.760	190.365.000	-	16.279.929.760
Instalasi pengolahan air	49.313.091.564	250.527.092	-	49.563.618.656
Transmisi dan distribusi	75.460.510.638	2.545.136.750	-	78.005.647.388
Peralatan/perlengkapan	1.188.662.726	39.055.998	-	1.227.718.724
Kendaraan/alat pengangkutan	3.521.346.000	878.565.000	-	4.399.911.000
Inventaris/perabot kantor	8.419.137.542	958.182.655	-	9.377.320.197
Jumlah	224.685.609.847	5.697.873.475	-	230.383.483.322
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan dan gedung	2.754.220.006	803.754.872	-	3.557.974.878
Instalasi sumber air	4.856.905.140	652.760.505	-	5.509.665.645
Instalasi pengolahan air	13.411.552.070	2.288.278.389	-	15.699.830.459
Transmisi dan distribusi	25.975.034.712	5.523.515.383	-	31.498.550.095
Peralatan/perlengkapan	1.141.377.507	30.257.292	-	1.171.634.799
Kendaraan/alat pengangkutan	2.427.762.903	401.519.837	-	2.829.282.740
Inventaris/perabot kantor	4.839.884.671	1.033.841.366	-	5.873.726.037
Jumlah	55.406.737.009	10.733.927.644	-	66.140.664.653
Nilai Buku	169.278.872.838			164.242.818.669

7. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Harga perolehan aktiva tetap tidak dimanfaatkan	2.653.645.006	2.653.645.006
Harga perolehan aktiva tetap yang rusak	270.548.318	270.548.318
Akumulasi penyusutan	(2.924.193.324)	(2.924.193.324)
Jumlah Aset Lain-lain	-	-

8. UTANG USAHA

	2025	2024
Utang Usaha	-	8.340.000
Jumlah Utang Usaha	-	8.340.000

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2025	2024
Pajak dimuka Pasal 21	-	-
Pajak dimuka Pasal 22	-	-
Pajak dimuka Pasal 23	-	-
Pajak dimuka Pasal 25	542.600.301	542.600.301
PPN lebih bayar	3.339.289.015	3.339.289.015
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	3.881.889.316	3.881.889.316

a. Utang Pajak

	2025	2024
Utang PPh Pasal 21	-	-
Utang PPh Pasal 23	-	2.427.678
Utang PPh Pasal 25	446.469.348	446.469.348
Utang PPh Pasal 29	627.780.458	-
PPN Masukan Yang Ditahan	45.796.383	-
Jumlah Utang Pajak	1.120.046.188	448.897.026

b. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	2.316.980.815	(5.431.245.701)
<u>Koreksi fiskal</u>		
Perbedaan Temporer:		
- Beban (Manfaat) Imbalan Pasca Kerja	1.608.030.000	(307.307.000)
- Beban Penyusutan	(1.693.534.889)	-
- Pembayaran Manfaat Pensiun	(622.482.132)	343.793.000
Jumlah Perbedaan Temporer	(707.987.021)	36.486.000
Perbedaan Tetap		
- Beban Penyisihan Piutang	3.576.161.824	1.435.791.787
- Beban Olahraga	73.125.000	97.803.400
- Bantuan Dan Sumbangan	227.348.700	213.614.096
- Dana Representasi Direksi	308.920.000	-
- Beban Tamu Perusahaan	273.338.484	-
- Beban Iklan	108.105.000	-
- Beban Pajak Jasa Giro	57.298.212	52.547.17
Jumlah Perbedaan Tetap	4.624.297.220	1.799.756.460

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2025	2024
Penghasilan yang dikenakan pajak final:		
- Pendapatan Jasa Giro	(290.280.479)	(262.470.839)
Laba (Rugi) menurut fiskal	5.943.010.534	(3.089.462.080)
Kompensasi Rugi tahun 2024	(3.089.463.000)	-
Penghasilan kena pajak dibulatkan	2.853.547.534	(3.089.463.000)
Beban Pajak penghasilan badan	627.780.458	-
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	-	-
Pajak penghasilan badan (lebih) kurang bayar - PPh Pasal 29	627.780.458	-

c. Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan merupakan dampak pajak atas ekspektasi manfaat pajak penghasilan masa depan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak (fiskal).

	2025	2024
Saldo Awal Aset (Liabilitas)	(123.867.480)	-
Penambahan:		
- Imbalan Pasca Kerja	216.820.531	8.026.920
- Beban Penyusutan	(372.577.676)	
- Keuntungan (kerugian) Aktuaria	(216.820.531)	(131.894.400)
Saldo Akhir Aset (Liabilitas)	(496.445.156)	(123.867.480)

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2025	2024
Hutang Non Usaha	133.423.095	195.879.022
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	133.423.095	195.879.022

11. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PENDEK

	2025	2024
Titipan materai	12.384.100	11.057.100
Jaminan masa pemeliharaan	68.074.998	77.334.594
Titipan retribusi kebersihan	361.188.100	315.025.200
Jumlah Utang Lain-lain Jangka Pendek	441.647.198	403.416.894

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG IMBALAN KERJA

Pencatatan Liabilitas imbalan kerja untuk tahun 2025 didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Budi Ramdani dengan No Laporan 41398/EP/KKA-BR/III/2026 tanggal 09 Maret 2026, yang didalam laporannya menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi utama sebagai berikut:

	2025	2024
- Kenaikan gaji	7,00 % per tahun	7,10 % per tahun
- Tingkat diskonto	6,97% % pertahun	6,97% % pertahun
- Rata-rata usia pegawai	43,17 tahun	43,28 tahun
- Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
- Jumlah karyawan	75 Karyawan	80 Karyawan

Tabel berikut menyajikan komponen imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di dalam neraca dan beban-beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi.

a. Posisi Pendanaan dan Pengakuan Kewajiban (Kekayaan) dalam Neraca	2025	2024
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	10.967.148.000	10.905.222.000
Nilai Wajar Aset Program	(18.194.081.000)	(18.194.081.000)
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria yang belum diakui	-	-
Kewajiban (Kekayaan) yang Diakui dalam Neraca	(7.226.933.000)	(7.288.859.000)

Perusahaan tidak mengakui surplus atas aset imbalan pasti dalam Laporan Posisi Keuangan karena iuran yang telah dibayarkan bersifat tidak dapat ditarik kembali (*non-refundable*) dan tidak terdapat potensi pengurangan iuran masa depan, sehingga manfaat ekonomis masa depan dinilai nihil dan nilai aset disajikan sebesar 0 (nol) sesuai dengan penerapan batasan aset (*asset ceiling*).

b. Perhitungan (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	2025	2024
Kewajiban (Kekayaan) pada awal tahun	10.905.222.000	10.516.213.000
Beban (Pendapatan)	684.408.000	(307.307.000)
Aset Program/ investasi	-	1.208.601.000
Keuntungan (Kerugian) nilai aset program	-	(168.492.000)
Realisasi pembayaran manfaat	(622.482.000)	(343.793.000)
Kewajiban (Kekayaan) pada akhir tahun	10.967.148.000	10.905.222.000

c. Beban (Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	2025	2024
Beban Jasa Kini	833.708.000	804.399.000
Beban Bunga	774.322.000	696.415.000
Harapan Dari Hasil Investasi	-	(1.208.601.000)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(923.622.000)	(599.520.000)
Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca Kerja	684.408.000	(307.307.000)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. EKUITAS

a. Kekayaan Pemda yang dipisahkan

	2025	2024
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2011	2.000.000.000	2.000.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2009	2.700.000.000	2.700.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2010	1.000.000.000	1.000.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2001,2002	9.000.000.000	9.000.000.000
Penyertaan Modal tahun 2018	149.460.860.000	149.460.860.000
Penyertaan Modal tahun 2020	5.900.000.000	5.900.000.000
Penyertaan Modal tahun 2021	1.260.000.000	1.260.000.000
Jumlah	171.320.860.000	171.320.860.000

b. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya

	2025	2024
Bantuan penyertaan modal tahun 2011	4.676.266.000	4.676.266.000
Jumlah	4.676.266.000	4.676.266.000

c. Tambahan modal disetor

	2025	2024
Tambahan modal disetor (<i>Tax Amnesty</i>)	528.460.000	528.460.000
Jumlah	528.460.000	528.460.000

d. Modal hibah

	2025	2024
Computer	3.500.000	3.500.000
Printer	450.000	450.000
Mesin Pack	1.800.000	1.800.000
Computer	3.500.000	3.500.000
Kursi Putar	850.000	850.000
Kursi Lipat	80.000	80.000
Kursi Lipat	80.000	80.000
TV 20 "	1.500.000	1.500.000
Digital GS. 2500 Parabola	3.000.000	3.000.000
Jumlah	14.760.000	14.760.000

e. Dana cadangan

	2025	2024
Dana Cadangan Umum	3.452.238.524	3.452.238.524
Dana Cadangan Tujuan	210.944.485	210.944.485
Dana Pensiun	421.888.971	421.888.971
Dana Sosial Pendidikan	2.154.934.905	2.154.934.905
Jumlah	6.240.006.885	6.240.006.885

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BRAU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. EKUITAS (LANJUTAN)

e. Dana cadangan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau pasal 90 ayat 2 (b) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau pasal 90 ayat 2 (b) dan Juncto Peraturan Bupati Brau No. 13 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau bahwa laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau.

Seiring dengan peraturan yang berlaku, terdapat perubahan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brau Nomor 13 Tahun 2021 Bab VI pasal 56 mengenai Tata Cara Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau. Berdasarkan poin nomor 2 pada peraturan tersebut, pembagian laba yang telah dikurangi dengan Dana Cadangan Umum sebesar 20%, akan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. bagian laba, untuk APBD sebesar 35%
- b. jasa produksi sebesar 30%
- c. dana sosial dan pendidikan sebesar 10%
- d. dana penyesuaian laba sebesar 10%
- e. cadangan sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 10%
- f. tantiem dan bonus sebesar 5%

Pembagian ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan laba dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sosial dan pembangunan daerah serta kesejahteraan karyawan.

f. Penyesuaian laba

	2025	2024
Penyesuaian laba	4.887.159.842	4.887.159.842
Jumlah	4.887.159.842	4.887.159.842

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau pasal 90 ayat 2 (e) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penyesuaian laba. Penyesuaian laba dialokasikan untuk dana cadangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau pasal 90 ayat 2 (b) dan Juncto Peraturan Bupati Brau No. 13 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau bahwa laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Brau.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. EKUITAS (LANJUTAN)

g. Penghasilan Komprehensif Lain

	2025	2024
Saldo Awal Tahun	11.541.339.600	-
Mutasi tahun berjalan:		
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria tahun berjalan	985.547.868	11.673.234.000
Pajak Tangguhan terkait OCI	(216.820.531)	(131.894.400)
Saldo Akhir Tahun	12.310.066.937	11.541.339.600

14. PENDAPATAN USAHA

	2025	2024
<u>Pendapatan penjualan air</u>		
Harga Air	73.168.024.900	67.913.415.350
Jasa Administrasi	2.237.365.000	2.077.545.000
Penjualan Air Mobil Tangki	2.686.500	4.800.000
<u>Pendapatan non air</u>		
Pendapatan Sambungan Baru	8.517.215.942	5.105.453.385
Pendapatan Penyambungan Kembal	506.338.268	314.474.300
Pendapatan Denda	664.669.600	781.492.000
Pendapatan Balik Nama	3.800.000	4.100.000
Pendapatan Pemindahan Jaringan /Meter	71.150.532	171.196.727
Pendapatan Non Air Lainnya	50.070.000	-
Jumlah Pendapatan Usaha	85.221.320.742	76.372.476.762

Peraturan Bupati Berau nomor 10 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau menetapkan tarif penyesuaian atas Peraturan Bupati Berau nomor 713 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024.

Penyesuaian tarif ini dilakukan karena adanya ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat atas perubahan tarif yang ada, meskipun sudah dilakukan sosialisasi pada tanggal 2 Januari 2025. Maka dari itu, DPRD Kabupaten Berau mengundang pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau untuk menghendaki tarif tersebut kembali menggunakan tarif yang lama. Pada 14 Januari 2025, Bupati Berau menerbitkan SK Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2025 dan mencabut SK Bupati Berau Nomor 713 Tahun 2024. Dengan diterbitkannya SK tersebut, maka tarif kembali menggunakan tarif tahun 2011.

15. BEBAN USAHA

	2025	2024
Beban Sumber Air		
Beban Operasi Sumber Air	7.204.700.616	7.752.609.819
Beban Pemeliharaan Sumber Air	143.082.000	226.958.300
Beban Air Baku	242.502.386	219.005.833
Beban Penyusutan Sumber Air	733.202.372	652.760.505

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN USAHA (LANJUTAN)

	2025	2024
Beban Pengolahan Air		
Beban Operasi Pengolahan Air	25.395.833.952	25.066.190.825
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	494.136.100	528.550.216
Beban Penyusutan Pengolahan Air	2.384.945.676	2.288.278.389
Beban Transmisi dan Distribusi		
Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	310.374.839	2.448.939.112
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	4.298.093.318	2.081.912.074
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	8.052.347.072	5.523.515.383
Beban Umum dan Administrasi		
Beban Pegawai	14.587.835.995	16.203.969.377
Beban Dana Representatif Direksi	308.920.000	350.000.000
Beban Kantor	4.573.364.458	4.207.927.595
Beban Hubungan Langganan	618.372.263	1.448.215.936
Beban Penelitian dan Pengembangan	494.789.332	594.430.384
Beban Pemeliharaan	1.228.295.235	1.205.875.076
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	3.576.161.824	1.435.791.787
Beban (manfaat) Imbalan Kerja	833.708.000	804.399.000
Rupa-Rupa Beban Umum	5.537.342.980	6.007.776.171
Beban Penyusutan	2.336.390.126	2.269.373.367
Jumlah Beban Usaha	83.354.398.544	81.316.479.149

Beban Reprerentasi sebesar Rp308.920.000,- adalah beban untuk pengeluaran entertain relasi Perusahaan dan operasional direksi dalam rangka kepentingan Perusahaan.

16. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Jasa Giro	290.280.479	262.470.839
Pendapatan Lainnya	993.073.543	2.532.900
Jumlah	1.283.354.022	265.003.739

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Beban Administrasi Bank	1.400.194	1.978.376
Pajak Jasa Giro	57.298.212	52.547.177
Beban Cek	275.000	825.000
Beban Payroll	-	481.500
Beban Bunga Imbalan Kerja	774.322.000	696.415.000
Jumlah	833.295.406	752.247.053

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. KOREKSI LABA DITAHAN

Koreksi laba ditahan adalah penyesuaian saldo piutang yaitu dengan mengurangi saldo piutang atas uang retribusi, denda, dan angsuran sambungan rumah (biaya pasang baru). Manajemen melakukan penyesuaian atas saldo tersebut dikarenakan:

- a. Uang retribusi dan denda bukan merupakan hak Perusahaan;
- b. Pengakuan pendapatan atas angsuran sambungan rumah diakui sesuai dengan progress pembayaran;
- c. Penyesuaian Transisi SAK Entitas Privat (SAK EP);

19. PENYAJIAN KEMBALI AKIBAT TRANSISI KE SAK ENTITAS PRIVAT

Laporan keuangan tahun 2024 yang disajikan kembali (*restated*) dalam laporan keuangan tahun 2025 bertujuan untuk memberikan daya banding yang konsisten setelah penerapan pertama kali Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) per 1 Januari 2025. Perusahaan telah melakukan penyesuaian retrospektif terhadap saldo-saldo tertentu pada tahun 2024, terutama terkait pengakuan Pajak Tangguhan dan Imbalan Kerja (Aktuaria) yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP.

Keterangan	Saldo Audit 2024	Penyesuaian Restate	Saldo 2024 (Disajikan Kembali)
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset			
Aset Lain-lain	7.288.859.000	(7.288.859.000)	-
Liabilitas Jangka Pendek			
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	(123.867.480)	123.867.480
Ekuitas			
Saldo Laba	812.428.587	759.985.080	52.443.507
Laba atas Imbalan Kerja	18.194.081.000	18.194.081.000	-
Akumulasi Penghasilan Komprehensif Lain	-	(11.541.339.600)	11.541.339.600
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
Pendapatan Lain-lain	1.033.015.739	599.520.000	433.495.739
Beban Pajak Penghasilan			
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	-	(8.026.920)	8.026.920
Penghasilan Komprehensif Lain			
Keuntungan (kerugian) Aktuaria	-	(599.520.000)	599.520.000
Pajak Tangguhan terkait OCI		131.894.400	(131.894.400)

20. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 26 Maret 2026.



LAMPIRAN 10

Laporan Auditor Independen PT Hutan Sanggam Berau
Tahun yang berakhir 31 Desember 2025

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Daftar isi

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN:

LAPORAN POSISI KEUANGAN 1

LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 4

LAPORAN ARUS KAS 5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 6

P



PT. HUTAN SANGGAM BERAU

Jl. Padat Karya RT. 01 Kel. Gn. Panjang Telp. (0554) 2022865
TANJUNG REDEB – KALIMANTAN TIMUR

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT HUTAN SANGGAM BERAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Roby Maula, S.Hut
Alamat Kantor : Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
Alamat Domisili Sesuai KTP : Jl. Teuku Umar Komp Pengayoman No. 13 RT. 013
Tanjung Redeb – Berau
No. Tlpn / Hp : 0813 1655 5783
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Adi Dhatta Arief
Alamat Kantor : Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
Alamat Domisili Sesuai KTP : Jl. AW Syahrani Perum Villa Tamara RT 033
Samarinda Ulu – Samarinda
No. Tlpn / Hp : 0811 584 845
Jabatan : Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Hutan Sanggam Berau
5. Laporan keuangan tahun 2025 hanya diaudit KAP Thoufan dan Rosyid dan tidak ada akuntan publik lain yang mengaudit tahun buku 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 05 Februari 2026

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Umum



Roby Maula, S.Hut

Adi Dhatta Arief

[Handwritten mark]



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00002/3.0307/AU.1/01/1974-2/1/II/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Hutan Sanggam Berau
Jl. Padat Karya RT 01 Kel. Gunung Panjang

Tanjung Redeb, Kalimantan Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara

Kantor Pusat :

Address Cincyo Permai Timur, Kaw. 7 A-6 Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address Citraland City Blok D-03 Ru. 1, Jl. El. Pangkajene Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 771 768
Fax +62541 771 768
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com



wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP. THOUFAN DAN ROSYID

Tenni Ginting, SE., Ak., CA., CPA, Asean CPA
Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 1974.



05 Februari 2026

Kantor Pusat :

Address Cibeaya Permisi Timur, Kav. 7 A-4 Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0318
E-mail kaptrn@yahoo.com

Kantor Cabang :

Address Cirebon City Blok D-05 No. 1, Jl. Di. Perjuangan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 771 769
Fax +62541 771 769
E-mail kaptrn_crd@yahoo.com

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2g.4	7.535.332.647	1.129.261.124
Piutang Usaha Pihak Ketiga	2h.5	419.133.225	-
Piutang Pajak	2n.6	-	715.993.433
Piutang Lain-lain	2h.7		
Pihak Berelasi		99.065.578	88.083.971
Pihak Ketiga		813.069.429	2.668.865.242
Biaya Dibayar Dimuka	2i.8	36.458.333	14.583.333
Uang Muka	2i.9	175.276.985	55.687.000
Persediaan	2j.10	1.170.634	-
Jumlah Aset Lancar		9.079.506.831	4.672.474.103
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi - setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp. 523.050.227,- Tahun 2025			
Rp. 466.504.256,- Tahun 2024	2k.11	607.869.190	664.415.161
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp 3.649.901.226,- Tahun 2025			
Rp 3.223.002.886,- Tahun 2024	2l.12	4.113.647.279	2.435.181.917
Aset Pajak Tangguhan	13	236.357.706	194.706.263
Aset Lain-lain	14	2.444.002.908	2.691.205.484
Jumlah Aset Tidak Lancar		7.401.877.084	5.985.508.825
TOTAL ASET		16.481.383.915	10.657.982.928

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	Catatan	2025	2024
		Rp	Rp
KEWAJIBAN & EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	2n.15	1.474.303.400	224.627.401
Beban Akrua	16	1.085.680.660	3.219.667.678
Utang Lain - lain	17	195.132.994	67.169.319
Jumlah Kewajiban Lancar		2.755.117.054	3.511.464.398
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	18	1.162.619.246	1.312.619.246
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	19	1.655.302.377	1.669.307.644
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		2.817.921.623	2.981.926.890
Total Kewajiban		5.573.038.676	6.493.391.287
EKUITAS			
Modal Dasar - 6.000 Lembar Saham, Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor			
Penuh - 1.500 Lembar Saham	20	1.500.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Komprehensif Lainnya		219.231.725	239.794.510
Cadangan Umum		2.299.360.888	2.369.090.977
Saldo Laba		6.889.752.625	55.706.153
Jumlah Ekuitas		10.908.345.239	4.164.591.640
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.481.383.915	10.657.982.928

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*


Rody Maula, S.Hut
Direktur Utama

Atas Nama dan Mewakili Direksi


Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	Catatan	2025 Rp	2024 Rp
PENDAPATAN	2o.21	18.880.330.315	8.255.193.300
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	2o.22	(4.928.253.243)	(3.995.433.408)
Laba (Rugi) Kotor Usaha		13.952.077.072	4.259.759.892
BEBAN USAHA	2o.23		
Beban Personalia		(3.787.603.421)	(2.775.102.707)
Beban Administrasi dan Umum		(2.242.179.229)	(1.588.114.693)
		(6.029.782.650)	(4.363.217.400)
Laba (Rugi) Usaha		7.922.294.421	(103.457.508)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	2o.24		
Pendapatan Non Operasional		686.799.348	169.459.046
Beban Non Operasional		(41.652.989)	(15.500.105)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		645.146.359	153.958.941
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	25	8.567.440.780	50.501.433
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2o.26		
Pajak Kini		(1.719.339.598)	(37.442.797)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan		41.651.443	42.647.517
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak		(1.677.688.155)	5.204.720
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	27	6.889.752.625	55.706.153
Penghasilan Komprehensif Lainnya :			
Pengakuan Kembali Atas Program Imbalan Pasca Kerja		(20.562.785)	(35.222.407)
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		-	2.094.262
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya, Setelah Pajak		(20.562.785)	(33.128.145)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		6.869.189.840	22.578.009

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Atas Nama dan Mewakili Direksi


Rody Maula, S.Hut
 Direktur Utama


Adi Dhatta Arief, SH
 Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	Catatan	Modal Saham Rp	Laba Komprehensif Lain Rp	Cadangan Umum Rp	Saldo Laba (Rugi) Rp	Ekuitas Rp
Saldo, 31 Desember 2023		1.500.000.000	232.369.400	2.467.620.669	57.317.117	4.257.307.186
Koreksi Pembayaran Denda PBB Tahun 2023		-	-	(98.529.693)	-	(98.529.693)
Dividen Tahun 2023	28	-	-	-	(57.317.117)	(57.317.117)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	55.706.153	55.706.153
Laba (Rugi) Aktuaria Yang Belum Diakui		-	(35.222.407)	-	-	(35.222.407)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	42.647.517	-	-	42.647.517
Saldo, 31 Desember 2024		1.500.000.000	239.794.510	2.369.090.977	55.706.153	4.164.591.641
Koreksi SKPKB, STP Badan, PPh 21 dan PPN Tahun Takwim 2023		-	-	(69.730.089)	-	(69.730.089)
Dividen Tahun 2024	28	-	-	-	(55.706.153)	(55.706.153)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	6.889.752.625	6.889.752.625
Penyesuaian Penghasilan/(Rugi) aktuarial yang belum diakui		-	(20.562.785)	-	-	(20.562.785)
Saldo, 31 Desember 2025		1.500.000.000	219.231.725	2.299.360.888	6.889.752.625	10.908.345.239

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan Kas Dari Pelanggan	18.759.850.843	6.665.707.046
- Penerimaan Bunga Bank	156.298.348	4.439.051
- Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Agen	(5.295.208.820)	(3.140.557.961)
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(5.046.351.492)	(3.837.287.314)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	8.574.588.879	(307.699.178)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(2.112.811.203)	(155.414.339)
Arus Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Investasi	(2.112.811.203)	(155.414.339)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembagian Dividen	(55.706.153)	(57.317.117)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(55.706.153)	(57.317.117)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	6.406.071.523	(520.430.634)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.129.261.124	1.649.691.758
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	7.535.332.647	1.129.261.124
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Terdiri Dari :		
Kas	313.327.184	292.426.956
Bank	7.222.005.463	836.834.168
Jumlah	7.535.332.647	1.129.261.124

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Hutan Sanggam Berau (Perusahaan) yang semula bernama PT Hutansanggam Laban Lestari didirikan dengan akta Nomor 02 tanggal 03 April 2003 yang dikeluarkan oleh Tn. Sony Thio, S.H. Notaris di Berau dan disahkan berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-12138.HT.01.01.TH 2003 ditetapkan tanggal 02 Juni 2003 dan dipublikasikan pada suplemen No. 64 dalam Lembaran Berita Negara Indonesia No. 6684 tanggal 12 Agustus 2003.

Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Hutan Sanggam Berau Nomor 59 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh M. Fahmi Azis, SH., M.Kn. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Notaris di Berau. Akta perubahan pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0147236.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 19 Juli 2024.

Rekomendasi dan Perizinan

- Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.250.996.2-725.000 terdaftar sejak 19 Juni 2003
- Nomor Induk Berusaha	:	0108220037819 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2022
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	No: S-56KT/WPJ.14/KP.0503/2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh KKP Madya Balikpapan

b. Bidang Usaha

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 22 Juli 2022 maksud dan tujuan Perseroan ini adalah, menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perusahaan bertujuan untuk turut melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pertanian

- Pertanian Raman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan meliputi perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan ayam lokal dan persilangannya, pembibitan dan budidaya Itik dan atau bebek, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya
- Pengolahan Kehutanan dan Penebangan, meliputi pemanfaatan kayu hutan, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, perkebunan karet dan tanam penghasil getah lainnya.

2. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, meliputi perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket atau supermarket atau hypermarket, dan perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik

3. Bidang Penyediaan Akomodasi dan penyediaan Makan Minum

- Penyedia Makanan dan Minuman, meliputi jasa boga untuk suatu *event* tertentu (*Event Catering*)

4. Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, meliputi aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

1. GAMBARAN UMUM

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 Juni 2024 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam rangka penggantian dan pengangkatan kembali dewan komisaris dan direksi PT Hutan Sanggam Berau tanggal 22 September 2025, susunan pengurus perusahaan tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

		Tahun 2025	Tahun 2024
Dewan Komisaris			
- Komisaris Utama	:	Moch. Farid Januardi	Moch. Farid Januardi
- Komisaris	:	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Dr. Fitriadi, SE., M.Si	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si
Dewan Direksi			
- Direktur Utama	:	Roby Maula, S.Hut	Roby Maula, S.Hut
- Direktur Operasional	:	Yohanes Paska Kurniawan, S.Hut	Ir. Gunawan Setiyani
- Direktur Keuangan Umum	:	Adi Dhatta Arief, SH	Adi Dhatta Arief, SH

Dalam menjalankan kegiatan usaha, dewan direksi mengangkat staf dan karyawan sesuai dengan kebutuhan.

d. Karyawan

Jumlah karyawan rata-rata perusahaan adalah sebanyak 25 orang tahun 2025 dan 24 orang untuk tahun 2024.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan menggunakan metode langsung (*direct method*) .

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Amandemen PSAK 207 "Laporan arus kas"

Amandemen ini mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode.

Amandemen PSAK 240 "Properti investasi"

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 228 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"

Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran investasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap asosiasi atau ventura bersama saat pengakuan awal.

Amandemen PSAK 216 "Aset tetap"

Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

Amandemen PSAK 212 "Pajak penghasilan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas aset tersebut. Amandemen tersebut dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

Amandemen PSAK 102 "Pembayaran berbasis saham"

Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrument ekuitas. Amandemen ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 102 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

Amandemen PSAK 112 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"

Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas lain yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

PSAK 241 "Agrikultur"

Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK 117 "Kontrak asuransi"

Amandemen ini merupakan amandemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamandemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan"

PSAK 109 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.

Sementara ini perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk aset-aset tersebut.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" (Lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang dimiliki mencakup:

- a. Instrumen ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya tersedia
- b. Investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 109, dan
- c. Instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 109.

Oleh karena itu, perusahaan tidak mengharapkan pedoman baru tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya.

Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut.

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 109. Dengan demikian, perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktifitas lindung nilai.

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 109. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 115 Pendapatan dari kontrak pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

PSAK 115 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini sebelumnya dikenal dengan PSAK 72 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau

Entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut.

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi :

- a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- e. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 116 "Sewa"

Amandemen ini disahkan di 16 Desember 2020 dan berlaku efektif 1 Januari 2022. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 116. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya. Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan perusahaan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kerugian akibat selisih kurs yang disebabkan karena devaluasi atau kondisi yang tidak normal, maka kerugian tersebut dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
	Rp	Rp
Kurs USD 1	16.782	16.162

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

- iii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi;
 - Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.
- Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

(a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 360 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang telah turun nilainya. Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka Pembelian diperhitungkan sesuai pembayaran dimuka dengan harga pembelian/nilai kontrak yang diperjanjikan pada saat penerimaan barang/jasa. Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Persediaan

Persediaan dinilai dengan biaya perolehannya, atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan harga pembelian.

k. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh penyewa melalui sewa operasional untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dinyatakan berdasarkan model harga perolehan yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

Bangunan dan prasarana	<u>Tahun</u> 20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

l. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset Tetap dinilai dengan harga perolehan dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan dengan taksiran masa manfaat masing-masing kelompok, yaitu sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Persentase
Tanah	-	Tidak Disusutkan
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun	10%
Kendaraan	4 / 8 Tahun	25% / 50%
Inventaris Kantor	4 / 8 Tahun	25% / 50%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.

m. Liabilitas yang Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasca Kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No.219 tentang, "Imbalan Kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal menundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

o. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penjualan kayu bulat dicatat berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak kedua yang jumlah kubikasinya m³ diperhitungkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan pendapatan penggantian biaya investasi dan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama antara PT Inhutani I dengan PT Hutan Sanggam Berau, dan penerbitan *invoice*.

Beban-beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dinyatakan dalam periode diakuinya pendapatan. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dialokasikan secara sistematis sepanjang periode diperoleh manfaatnya. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual* basis).

p. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2025 pada tanggal 05 Februari 2026

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 (Revisi 2017) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 30.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto aset tetap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan pada Catatan 12.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
4. Kas dan Setara Kas		
Terdiri dari :		
- Kas		
- Kas Tanjung	313.327.184	292.426.956
Jumlah	313.327.184	292.426.956
- Bank		
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Rek. No. 148-00-04119536	17.140.750	713.718.542
- Bank Muamalat Rek. No. 6070014732	204.864.713	123.115.626
- Deposito Bank Muamalat	7.000.000.000	-
Jumlah	7.222.005.463	836.834.168
Total	7.535.332.647	1.129.261.124
5. Piutang Usaha		
Piutang Usaha Pihak Ketiga		
- PT Agung Kharisma Santoso Abadi	419.133.225	-
Jumlah	419.133.225	-
6. Piutang Pajak		
- PPh Pasal 28 Tahun 2023	-	715.993.433
- PPh Pasal 28 Tahun 2024	-	140.198.008
Jumlah	-	856.191.441
7. Piutang Lain-lain		
Terdiri dari :		
Pihak Berelasi		
- Pegawai	95.206.808	73.083.971
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	3.858.770	15.000.000
Jumlah	99.065.578	88.083.971
Pihak Ketiga		
- PT Agung Kharisma Santoso Abadi - Dana Talangan Dokumen dan Kompenmas	787.986.279	2.044.775.078
- PT Wana Nusa Perkasa - Dana Talangan Dokumen	25.083.150	508.890.164
- Alimuddin Merancang	-	53.500.000
- Marpai	-	44.000.000
- Agustinus	-	6.500.000
- PT Berkah Utama Pontianak	-	11.200.000
Jumlah	813.069.429	2.668.865.242
Total	912.135.007	2.756.949.213
8. Biaya Dibayar Dimuka		
Terdiri dari :		
- Yasman (Sewa Mess Direksi)	21.875.000	-
- Hj. Anugrah Wati (Sewa Mess Direksi)	11.458.333	11.458.333
- Susnadi, SE (Sewa Tanah Untuk Kandang Ayam)	3.125.000	3.125.000
Jumlah	36.458.333	14.583.333
9. Uang Muka		
Terdiri dari :		
- PPN Masukan	175.276.985	-
- Uang Muka Rapat RUPS LB	-	55.687.000
Jumlah	175.276.985	55.687.000

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	Rp	Rp
10. Persediaan		
Terdiri dari :		
- Ribbon	720.390	-
- Label (PVC Tag)	450.244	-
Jumlah	1.170.634	-

11. Properti Investasi

31 DESEMBER 2025			
Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Harga Perolehan</u>			
Bangunan	1.130.919.417	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	-	1.130.919.417
<u>Akumulasi Penyusutan</u>			
Bangunan	466.504.256	56.545.971	523.050.227
	466.504.256	-	523.050.227
Nilai Buku	664.415.160		607.869.189

31 DESEMBER 2024			
Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Harga Perolehan</u>			
Bangunan	1.130.919.417	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	-	1.130.919.417
<u>Akumulasi Penyusutan</u>			
Bangunan	409.958.286	56.545.971	466.504.256
	409.958.286	-	466.504.256
Nilai Buku	720.961.131		664.415.160

12. Aset Tetap

31 DESEMBER 2025			
Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
1 Januari 2025	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Harga Perolehan</u>			
Tanah	541.962.500	-	541.962.500
Bangunan	2.460.514.035	-	2.460.514.035
Kendaraan	1.795.115.072	1.775.396.916	3.570.511.988
Inventaris Kantor	860.593.195	337.414.287	1.190.559.982
	5.658.184.802	2.112.811.203	7.763.548.505
<u>Akumulasi Penyusutan</u>			
Bangunan	1.090.455.145	139.166.543	1.229.621.688
Kendaraan	1.487.014.903	219.816.214	1.706.831.117
Inventaris Kantor	645.532.837	75.363.083	713.448.420
	3.223.002.885	434.345.840	3.649.901.225
Nilai Buku	2.435.181.917		4.113.647.279

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

12. Aset Tetap (Lanjutan)

	31 DESEMBER 2024			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.460.514.035	-	-	2.460.514.035
Kendaraan	1.795.115.072	-	-	1.795.115.072
Inventaris Kantor	705.178.856	155.414.339	-	860.593.195
	5.502.770.463	155.414.339	-	5.658.184.802
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	951.288.603	139.166.543	-	1.090.455.145
Kendaraan	1.384.314.846	102.700.056	-	1.487.014.903
Inventaris Kantor	619.502.420	26.030.417	-	645.532.837
	2.955.105.869	267.897.016	-	3.223.002.885
Nilai Buku	2.547.664.595			2.435.181.917

13. Aset Pajak Tangguhan

	31 DESEMBER 2025			
	Saldo Awal	Dibebankan Ke	Dibebankan Ke	Saldo Akhir
	1 Januari 2025	Laporan Laba Rugi	Penghasilan Komprehensif	31 Desember 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	194.706.263	41.651.443	-	236.357.706
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	194.706.263	41.651.443	-	236.357.706

	31 DESEMBER 2024			
	Saldo Awal	Dibebankan Ke	Dibebankan Ke	Saldo Akhir
	1 Januari 2024	Laporan Laba Rugi	Penghasilan Komprehensif	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	154.153.008	42.647.517	2.094.262	194.706.263
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	154.153.008	42.647.517	2.094.262	194.706.263

14. Aset Lain-lain

	2025	2024
	Rp	Rp
Harga Perolehan		
- Perizinan IUPHHK	5.614.299.000	5.614.299.000
- Revisi RKU-IUPHHK	236.868.000	236.868.000
- Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
- Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
- Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
- Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	199.677.000	199.677.000
- Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	283.132.100	283.132.100
- Piutang Macet	199.926.089	79.469.400
- Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
- Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
- Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
- Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
- Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
- Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2021-2031	215.640.880	215.640.880
Jumlah	8.503.932.209	8.383.475.520

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	Rp	Rp
14. Aset Lain-lain (Lanjutan)		
Amortisasi		
- Perizinan IUPHHK	3.527.651.199	3.342.379.332
- Revisi RKU-IUPHHK	217.129.000	193.442.200
- Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
- Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
- Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
- Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	159.741.600	119.806.200
- Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	226.505.680	169.879.260
- Piutang Macet	88.256.330	47.681.640
- Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
- Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
- Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
- Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
- Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
- Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2021-2031	86.256.352	64.692.264
Jumlah	6.059.929.301	5.692.270.035
Nilai Buku	2.444.002.908	2.691.205.484
15. Utang Pajak		
Terdiri dari :		
- PPh Pasal 29 Badan	1.409.672.127	-
- PPh Pasal 21	54.396.578	25.342.709
- PPh Pasal 4 Ayat 2 Final	4.513.889	4.190.969
- PPh Pasal 25	4.251.418	-
- PPh Pasal 23	1.469.388	-
- PPN Keluaran	-	195.093.723
Jumlah	1.474.303.400	224.627.401
16. Biaya Akruai		
Terdiri dari:		
- Jasa Karyawan	856.614.384	-
- Kompensasi Masyarakat	113.959.160	76.123.850
- Iuran APHI	81.060.690	85.907.885
- Beban Operasional	31.792.956	41.767.546
- Premi Produksi	2.253.470	-
- PT Inhutani I	-	2.903.291.773
- Iuran Dana Pensiun	-	112.576.624
Jumlah	1.085.680.660	3.219.667.678
17. Utang Lain-lain		
Terdiri dari:		
Pihak Berelasi		
- Lebih Potong PPh 21	8.223.034	12.014.750
- Uang Penghargaan Masa Kerja	-	55.154.569
Jumlah	8.223.034	67.169.319

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
17. Utang Lain-lain (Lanjutan)		
Pihak Ketiga		
- CV Borneo Steel	100.740.000	-
- Fakultas Pertanian Univ. Jend. Soedirman	60.000.000	-
- Wardi Wiyono	18.785.960	-
- Shunda Plafon Berau	7.384.000	-
Jumlah	186.909.960	-
Total	195.132.994	67.169.319

18. Utang Usaha Pihak Ketiga		
Terdiri dari :		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	1.162.619.246	1.312.619.246
Jumlah	1.162.619.246	1.312.619.246
Bagian Jangka Pendek		
Pihak Ketiga	-	-
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi		
Bagian Jangka Pendek - Pihak Ketiga	1.162.619.246	1.312.619.246

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada Tanggal 25 Maret 2003, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila karyawan mencapai usia pensiun, terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam Undang - Undang tersebut. Uang penghargaan dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut dihitung sendiri oleh manajemen perusahaan.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut adalah :

Jumlah Karyawan	16 orang	18 orang
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Kenaikan Gaji	0%	0%
Tingkat Bunga	6,25%	6,25%

Beban imbalan kerja yang dibebankan di laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan jumlah neto dari :

Beban Jasa Kini	91.954.013	95.657.783
Beban Bunga	97.370.728	98.194.567
Jumlah	189.324.741	193.852.351

Liabilitas neto diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas	1.655.302.377	1.669.307.644
Jumlah	1.655.302.377	1.669.307.644

Mutasi nilai kini liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.669.307.644	1.593.980.041
Beban tahun berjalan	189.324.741	193.852.351
Amortisasi rugi yang belum direalisasi	20.562.785	(9.519.372)
Pembayaran imbalan kerja	(223.892.794)	(109.005.375)
Jumlah	1.655.302.377	1.669.307.644

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
20. Ekuitas		
Terdiri dari:		
- Modal Saham	1.500.000.000	1.500.000.000
- Penghasilan Komprehensif Lain	219.231.725	239.794.510
- Cadangan Umum	2.299.360.888	2.369.090.977
- Saldo Laba	6.889.752.625	55.706.153
Jumlah	10.908.345.239	4.164.591.640

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
- Pemerintah Kabupaten Berau	750	50%	750.000.000
- PT Inhutani I	450	30%	450.000.000
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	300	20%	300.000.000
Jumlah	1500	100%	1.500.000.000

Cadangan Umum

- Saldo Awal Cadangan Umum	2.369.090.977	2.467.620.669
- Selisish Pembulatan	1	-
- Koreksi Pembayaran Denda PBB Tahun 2023	-	(98.529.693)
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	-	4
- Koreksi Amortisasi Aset Lain-lain	-	(4)
- Koreksi SKPKB, STP Badan, PPh 21 dan PPN Tahun Takwim 2023	(69.730.089)	-
Jumlah	2.299.360.888	2.369.090.977

21. Pendapatan

Terdiri dari :

- Pendapatan RKT	4.417.598.500	8.255.193.300
- Penjualan Kayu Bulat	173.499.900	-
- Penggantian Biaya Investasi dan Kompensasi Lainnya	14.289.231.915	-
Jumlah	18.880.330.315	8.255.193.300

- Pendapatan RKT dan penjualan kayu bulat (kompensasi) merupakan kerjasama dengan PT Wana Nusa Perkasa dan PT Agung Kharisma Santoso Abadi, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Volume M3	Harga Rp	Jumlah Rp
- Pendapatan RKT	12621,71	350.000	4.417.598.500
- Penjualan Kayu Bulat (Kompensasi)	4957,14	35.000	173.499.900

- Penggantian biaya investasi dan kompensasi lainnya 14.289.231.915

Berdasarkan kesepakatan bersama antara PT Inhutani I dengan PT Hutan Sanggam Berau Nomor: 681/V.B/INH/2025 dan Nomor: 036/E-DIR-UT/HSB-TRD/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang pembagian kompensasi atas penggunaan sebagian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Labanan untuk Kegiatan Eksplorasi dan Operasional Produksi Pertambangan Batu Bara PT Berau Coal.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung		
Terdiri dari :		
- Perencanaan		
- Beban Overhead	302.694.587	289.629.681
- Amortisasi Iuran IUPHHK	185.271.867	185.271.867
- ITSP URKT 2026	118.425.079	-
- Pengurusan dan Pengesahan RKT - IUPHHK Self Approval	77.825.529	7.500.000
- Pembuatan Trace Jalan URKT 2026	25.328.971	-
- Penataan Areal Kerja URKT 2026	24.996.600	-
- Amortisasi Penyusunan dan Pengesahan RKUPHHK	23.686.800	23.686.800
- Amortisasi IHMB Konsesi IUPHHK	21.564.088	21.564.088
- Biaya GIS (Pembuatan Peta Kerja DII)	7.578.282	1.930.680
- Bimtek dan Monitoring Buha / Dishut	3.295.673	-
- Ceking Pengawasan (Dishut Prop & Kab RKT, SPORC Dephut)	1.255.500	1.806.150
- Surveillance PHPL 2023	-	42.330.633
- Penataan Areal Kerja URKT 2024	-	29.351.150
- ITSP URKT 2025	-	225.241.725
- Pembuatan Trace Jalan URKT 2025	-	32.779.100
Jumlah	791.922.976	861.091.874
- Pembinaan Hutan		
- Beban Overhead	92.332.587	98.464.727
- Produksi Bibit dan Pemeliharaan Bibit di Persemaian KM 35	36.455.130	2.650.900
- Pembuatan Sempadan Sungai Siduung	8.875.800	-
- Pembuatan Koridor Satwa	6.275.000	-
- Pembutan Petak KPPN	-	62.451.600
- Checking Dishut Kabupaten	-	1.950.000
Jumlah	143.938.517	165.517.227
- Pengendalian Kebakaran dan Pamhut		
- Beban Overhead	318.156.521	288.405.732
- Perlindungan Hutan / Patroli Pengamanan Hutan	34.792.800	22.263.300
- Perlengkapan Kerja	4.957.968	775.380
Jumlah	357.907.289	311.444.412
- Pemanfaatan Hasil Hutan		
- Beban Overhead	508.701.277	448.131.651
- Register Penerbitan LHP & SKSHHK	22.200.206	32.231.447
- Biaya Rekonsiliasi PSDH DR Per Triwulan	18.840.000	18.810.000
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Provinsi	8.541.738	-
- Koordinasi Pengurusan LHP	6.600.000	8.517.000
- Bahan Makan & Obat-obatan	6.420.400	8.145.000
- Iuran APhi	6.310.855	12.753.075
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) BPHP Wil. XI Samarinda	5.280.000	-
- Pengurusan SKSHHK Sei Agung	3.786.513	8.001.899
- Sewa TPK/Tpn/Logpon	3.570.000	243.055
- Beban Perlengkapan Kerja Lapangan (set)	2.079.595	1.622.914
Jumlah	592.330.584	538.456.041
- Kelola Sosial		
- Beban Overhead	412.139.542	317.929.764
- Sosial Budaya	32.967.100	32.150.000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana	2.250.000	4.000.000
Jumlah	447.356.642	354.079.764

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025 Rp	2024 Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara		
- PBB Areal IUPHHK	1.143.051.781	1.017.577.190
Jumlah	1.143.051.781	1.017.577.190
- Beban Camp dan Administrasi		
- Beban Overhead	448.975.876	359.278.911
- Koordinasi Optimalisasi Aset	354.250.732	-
- Diklat / Seminar / Loka Karya	140.109.388	-
- Feasibility Study	120.000.000	-
- Penyusutan & Amortisasi	119.434.454	111.549.049
- BBM, Pelumas Kendaraan & Inventaris	100.141.633	83.776.036
- Lain-Lain	69.017.457	128.790.332
- Spare Parts Kendaraan & Inventaris	61.870.420	46.892.632
- Material Bangunan Camp	20.193.000	-
- PKB dan Perijinan	9.680.914	11.121.400
- ATK, Foto Copy, Cetakan	5.791.580	5.858.540
- Perlengkapan Kerja	2.280.000	-
Jumlah	1.451.745.454	747.266.900
Total	4.928.253.243	3.995.433.408
23. Beban Usaha		
Terdiri dari :		
Beban Personalia		
- Beban Gaji Direksi dan Karyawan	1.780.300.757	1.749.576.807
- Beban Jasa Karya	554.122.425	-
- Beban Honorarium Komisaris	441.000.000	441.000.000
- Beban Tunjangan Purna Jabatan	231.916.666	37.187.500
- Tunjangan Pajak Penghasilan	157.694.661	-
- Beban Tunjangan Hari Raya (THR)	148.360.446	182.541.290
- Beban Asuransi Jiwa	108.000.000	108.000.000
- Beban Tunjangan Cuti	92.144.300	81.359.054
- Beban Imbalan Pasca Kerja	83.717.440	76.120.911
- Beban Tunjangan Hari Raya (THR Komisaris)	36.750.000	-
- Beban Premi Produksi	31.604.387	35.379.871
- Beban Olahraga dan Rekreasi	25.810.675	17.678.280
- Beban Jamuan Makan Minum	25.377.140	5.857.700
- Beban BPJS Tenagakerjaan Perusahaan	23.041.308	20.969.400
- Beban Rapat Internal Komisaris	20.250.000	354.000
- Beban Pajak Ditanggung Perusahaan (Komisaris)	17.100.000	-
- Beban Pengobatan	10.413.216	10.054.512
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	-	9.023.382
Jumlah	3.787.603.421	2.775.102.707
Beban Administrasi dan Umum		
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	508.593.867	325.349.638
- Beban Perjalanan Dinas	284.968.780	350.077.800
- Beban Pemeliharaan Bangunan Kantor	261.293.411	-
- Beban Rapat	203.002.561	195.029.870
- Beban Spare Parts	152.266.000	34.133.000
- Beban Media Sosial, Branding, Surat Kabar dan Majalah	142.826.735	30.070.477
Jumlah dipindahkan	1.552.951.354	934.660.785

P

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	Rp	Rp
23. Beban Usaha (Lanjutan)		
Beban Administrasi dan Umum (Lanjutan)		
Jumlah pindahan	1.552.951.354	934.660.785
- Beban Representasi	130.336.060	50.893.083
- Beban Rumah Tangga Kantor dan Mess	128.082.700	116.571.500
- Beban Lain-lain	124.240.400	236.912.375
- Beban BBM dan Pelumas	67.341.653	61.805.890
- Beban Listrik	50.812.281	43.288.273
- Beban Jasa Profesional	50.000.000	50.000.000
- Beban Sewa Mess	31.250.000	27.777.776
- Beban Pakaian Seragam Karyawan	26.832.648	-
- Beban Perizinan	17.450.666	19.332.000
- Beban Air PDAM	16.376.140	10.412.590
- Beban ATK, Fotocopy dan Cetakan	15.397.940	10.505.440
- Beban Telekomunikasi	14.970.927	14.120.552
- Beban Perlengkapan Kantor dan Mess	10.701.900	7.724.979
- Beban Pos dan Pengiriman Dokumen	5.434.560	4.109.450
Jumlah	2.242.179.229	1.588.114.693
24. Pendapatan (Beban) Non Operasional		
- Pendapatan Non Operasional		
- Jasa Koridor Jalan	500.000.000	150.000.000
- Usaha Lain-lain	30.501.000	15.019.995
- Pendapatan Jasa Giro	15.416.156	4.439.051
- Bunga Deposito	140.882.192	-
Jumlah	686.799.348	169.459.046
- Beban Non Operasional		
- Beban Lain-lain	26.321.000	-
- Beban Usaha Lainnya	13.888.889	13.888.888
- Beban Administrasi Bank	1.443.100	1.569.396
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	-	41.821
Jumlah	41.652.989	15.500.105
Total	645.146.359	153.958.941
25. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	8.567.440.780	50.501.433
Jumlah	8.567.440.780	50.501.433

P

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	Rp	Rp
26. Beban Pajak		
- Beban Pajak Kini	(1.719.339.598)	(37.442.797)
- Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	41.651.443	42.647.517
Jumlah	(1.677.688.154)	5.204.720

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan seperti disajikan pada laporan laba (rugi) dan akumulasi laba fiskal perusahaan sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	8.567.440.780	50.501.433
Kompensasi kerugian fiskal tahun lalu	-	-
Perbedaan Temporer		
- Imbalan pasca kerja	189.324.742	193.852.351
Perbedaan Tetap		
- Beban Representasi	130.336.060	-
- Pajak Ditanggung Perusahaan	186.994.400	-
- Pendapatan Jasa giro	(15.416.156)	(4.439.051)
- Denda Pajak	-	41.821
- Bunga Deposito	(140.882.192)	-
Jumlah	350.356.854	189.455.121
Laba Kena Pajak (Pembulatan)	8.917.797.000	239.956.000
Perhitungan pajak penghasilan		
- Tarif 11%	242.575.742	15.347.523
- Tarif 22%	1.476.763.855	22.095.274
Beban Pajak Kini	1.719.339.598	37.442.797
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 22	10.100.004	16.240.618
- PPh Pasal 23	286.813.213	1.802.542
- PPh Pasal 25	12.754.254	159.597.645
Jumlah	309.667.471	177.640.805
Jumlah penghasilan pajak (lebih) / kurang bayar	1.409.672.127	(140.198.008)

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain	8.567.440.780	50.501.433
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(1.884.836.832)	(11.110.193)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(35.427.065)	967.391
Penyesuaian tarif pajak	242.575.742	15.347.523
Beban / (manfaat) pajak penghasilan	(1.677.688.154)	5.204.720

27. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	6.889.752.625	55.706.153
Jumlah	6.889.752.625	55.706.153

28. Dividen Tunai

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Hutan Sanggam Berau tanggal 15 Mei 2025, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun buku 2024 sebesar 100% atau sebesar Rp 55.706.153. Dividen sebesar Rp 27.853.077 telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 04 Juni 2025 dan kepada PT Inhutani I sebesar Rp 16.711.846 tanggal 24 Juni 2025 dan dibayarkan kepada Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera sebesar Rp 11.141.230 tanggal 24 Juni 2025.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

29. Ikatan

PT Hutan Sanggam Berau mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT Wana Nusa Perkasa dengan Akta nomor 01/KSO/HSB-WNP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas areal 78.436 Ha.

Jangka waktu perjanjian selama 2 tahun mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2025, setelah masa kerja 6 (enam) bulan kedua belah pihak akan meninjau kembali kenaikan fee tegakan kayu, dengan acuan sebagai berikut:

- Rp 330.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 50 cm - up.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPN) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.

PT Hutan Sanggam Berau mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT Agung Kharisma Santoso Abadi dengan Akta nomor 03/KSO/HSB-AKSA/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, luasan areal yang akan dikerjasamakan adalah areal blok carry over RKTPH 2024 PT Inhutani I unit Labanan blok Labanan I jumlah petak 7 (tujuh) dengan luas areal 602 Ha. Lokasi blok RKTPH 2025 PT Inhutani I unit Labanan blok Labanan I jumlah petak 5 (lima) dengan luas areal 364 Ha.

Jangka waktu perjanjian dimulai sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan menerima pembayaran harga kayu tertebang sebesar Rp 350.000,-/m3 untuk semua kelompok jenis dan semua kelompok diameter.

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

(i) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko dimana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan jatuh tempo :

	31 Desember 2025		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	7.535.332.647	-	7.535.332.647
Piutang Usaha Pihak Ketiga	419.133.225	-	419.133.225
Piutang Lain-lain	912.135.007	-	912.135.007
Aset Keuangan Lainnya	212.905.952	-	212.905.952
Jumlah	9.079.506.831	-	9.079.506.831

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

	31 Desember 2024		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	1.129.261.124	-	1.129.261.124
Piutang Lain-lain	2.756.949.213	-	2.756.949.213
Aset Keuangan Lainnya	786.263.766	-	786.263.766
Jumlah	4.672.474.103	-	4.672.474.103

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Kas dan Setara Kas	7.535.332.647	1.129.261.124
Piutang Usaha Pihak Ketiga	419.133.225	-
Piutang Lain-lain	912.135.007	2.756.949.213
Aset Keuangan Lainnya	212.905.952	786.263.766
Jumlah	9.079.506.831	4.672.474.103

(ii) Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Desember 2025		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	195.132.994	-	195.132.994
Utang Pajak	1.474.303.400	-	1.474.303.400
Beban Akrua	1.085.680.660	-	1.085.680.660
Utang Usaha Jangka Panjang	2.817.921.623	-	2.817.921.623
Jumlah	5.573.038.676	-	5.573.038.676

	31 Desember 2024		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	67.169.319	-	67.169.319
Utang Pajak	224.627.401	-	224.627.401
Beban Akrua	3.219.667.678	-	3.219.667.678
Utang Usaha Jangka Panjang	2.981.926.890	-	2.981.926.890
Jumlah	6.493.391.287	-	6.493.391.287

PT HUTAN SANGGAM BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

30. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

b. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan peseroan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	2025	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	7.535.332.647	7.535.332.647
Piutang Usaha Pihak Ketiga	419.133.225	419.133.225
Piutang Lain-lain	912.135.007	912.135.007
Aset Keuangan Lainnya	212.905.952	212.905.952

KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	1.474.303.400	1.474.303.400
Utang Lain-Lain	195.132.994	195.132.994
Beban Akrua	1.085.680.660	1.085.680.660

	2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara kas	1.129.261.124	1.129.261.124
Piutang Lain-Lain	2.756.949.213	2.756.949.213
Aset Keuangan Lainnya	786.263.766	786.263.766

KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	224.627.401	224.627.401
Utang Lain-Lain	67.169.319	67.169.319
Beban Akrua	3.219.667.678	3.219.667.678

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
I.	TANAH													
	Tanah	999 M2	01-Jan-02		541.962.500	-	-	541.962.500	541.962.500	-	-	-	-	541.962.500
	Jumlah Tanah				541.962.500	-	-	541.962.500	541.962.500	-	-	-	-	541.962.500
II.	BANGUNAN NON PERMANEN													
	Kantor Camp Produksi SP6	1	2003	10%	47.300.000	-	-	47.300.000	-	47.300.000	-	-	47.300.000	-
	Rumah Pelayan Dapur	1	2003	10%	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-	2.400.000	-
	Bedeng Semai (KM 7) Siduung	50	2008	10%	6.145.500	-	-	6.145.500	-	6.145.500	-	-	6.145.500	-
	Bedeng SPH/Tiang	1	2008	10%	23.635.500	-	-	23.635.500	-	23.635.500	-	-	23.635.500	-
	Jembatan & Parit PT. HLL	1	Nov-16	20%	43.263.230	-	-	43.263.230	-	43.263.230	-	-	43.263.230	-
	Sekat Ruangan Arsip	1	Nov-16	20%	6.060.500	-	-	6.060.500	-	6.060.500	-	-	6.060.500	-
	Bangunan Kandang Ayam	1	Jun-20	10%	229.951.550	-	-	229.951.550	124.557.088	105.394.462	22.995.155	-	128.389.617	101.561.933
	Pintu Pagar & Pengecogan Lantai	1	Aug-23	20%	73.890.000	-	-	73.890.000	52.954.500	20.935.500	14.778.000	-	35.713.500	38.176.500
	Jumlah Bangunan Non Permanen				432.646.280	-	-	432.646.280	177.511.588	255.134.692	37.773.155	-	292.907.847	139.738.433
	BANGUNAN PERMANEN													
	Kantor Tanjung Redeb Lantai II Luas 366,74 M2	1	Sep-16	5%	1.574.793.586	-	-	1.574.793.586	925.191.232	649.602.354	78.739.679	-	728.342.034	846.451.552
	Kantor Tanjung Redeb Lantai I Luas 103,37 M2	1	Sep-16	5%	443.874.169	-	-	443.874.169	260.776.071	183.098.099	22.193.708	-	205.291.807	238.582.362
Pintu Geser Aluminium	1 Set	Oct-16	5%	4.800.000	-	-	4.800.000	2.840.000	1.960.000	240.000	-	2.200.000	2.600.000	
Sekat Ruangan Direksi	1 Unit	Jan-22	5%	4.400.000	-	-	4.400.000	3.740.000	660.000	220.000	-	880.000	3.520.000	
Jumlah Bangunan Permanen				2.027.867.755	-	-	2.027.867.755	1.192.547.302	835.320.453	101.393.388	-	936.713.841	1.091.153.915	
Jumlah Bangunan Non Permanen & Bangunan Permanen				2.460.514.035	-	-	2.460.514.035	1.370.058.890	1.090.455.146	139.166.543	-	1.229.621.688	1.230.892.347	
III.	KENDARAAN													
	KENDARAAN KELOMPOK I													
	Honda Mega Pro D 160 CC (Binhut) KT. 4813 GO	1 unit	2008	50%	18.040.000	-	-	18.040.000	-	18.040.000	-	-	18.040.000	-
	Honda Supra X 125 TD-HRD & GA	1 unit	2010	50%	15.060.000	-	-	15.060.000	-	15.060.000	-	-	15.060.000	-
	Honda New Mega Pro D 160 CC (Pamhut)	1 unit	May-11	50%	19.845.000	-	-	19.845.000	-	19.845.000	-	-	19.845.000	-
	Kawasaki Trail KLX 150S U (Produksi)	1 unit	Nov-14	50%	27.700.000	-	-	27.700.000	-	27.700.000	-	-	27.700.000	-
	Honda Mega Pro D 160 CC (Revaluasi)	1 unit	Des-14	50%	7.000.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-
	Honda Supra X 125 TD-HRD & GA (Revaluasi)	1 unit	Des-14	50%	6.000.000	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-
	Jumlah Kendaraan Kelompok I				93.645.000	-	-	93.645.000	-	93.645.000	-	-	93.645.000	-

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2024	
					S/D 31 - 12 - 2023	MUTASI TAHUN 2024		S/D 31 - 12 - 2024		S/D 31 - 12 - 2023	PENYUSUTAN TAHUN 2024		S/D 31 - 12 - 2024		
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT			
IV.	KENDARAAN KELOMPOK II														
	Strada Triton 2,7 (Dounle Cabin LGS)	1 Unit	2010	25%	375.000.000	-	-	375.000.000	-	375.000.000	-	-	375.000.000	-	
	Toyota Kijang Inova seri G	1 Unit	Feb-14	25%	265.313.636	-	-	265.313.636	16.185.804	249.127.832	16.185.804	-	265.313.636	-	
	Kendaraan Toyota Fortuner DV A/T Lux TRD	1 Unit	Apr-15	25%	588.869.000	-	-	588.869.000	26.252.682	562.616.318	26.252.682	-	588.869.000	-	
	Triton DC Exceed MT 4 x 4 Tahun 2022	1 Unit	Jan-23	25%	472.287.436	-	-	472.287.436	265.661.683	206.625.753	66.415.421	-	273.041.174	199.246.262	
	Pajero Dakar Ultimate 4 X 4 AT Putih	1 Unit	Oct-25	25%	-	698.994.514	-	698.994.514	-	-	43.687.157	-	43.687.157	655.307.357	
	Triton DC GLS MT 4 x 4 Tahun 2025 Putih	1 Unit	Oct-25	25%	-	407.692.000	-	407.692.000	-	-	25.480.750	-	25.480.750	382.211.250	
	Xpander Ultimate AT 2025 Silver	1 Unit	Oct-25	25%	-	298.010.171	-	298.010.171	-	-	18.625.636	-	18.625.636	279.384.535	
	Xpander Ultimate AT 2025 Hitam	1 Unit	Oct-25	25%	-	298.010.171	-	298.010.171	-	-	18.625.636	-	18.625.636	279.384.535	
	Motor Merek Honda CRF 150 L Pamhut	1 Unit	Oct-25	25%	-	36.345.030	-	36.345.030	-	-	2.271.564	-	2.271.564	34.073.466	
	Motor Merek Honda CRF 150 L Produksi	1 Unit	Oct-25	25%	-	36.345.030	-	36.345.030	-	-	2.271.564	-	2.271.564	34.073.466	
	Jumlah Kendaraan Kelompok II					1.701.470.072	1.775.396.916	-	3.476.866.988	308.100.169	1.393.369.903	219.816.214	-	1.613.186.117	1.863.680.871
	Jumlah Kendaraan Kelompok I & II					1.795.115.072	1.775.396.916	-	3.570.511.988	308.100.169	1.487.014.903	219.816.214	-	1.706.831.117	1.863.680.871
	INVENTARIS KANTOR														
	INVENTARIS KELOMPOK I														
	Almari Lokal 2 Pintu	3 Unit	2003	50%	3.537.600	-	-	3.537.600	-	3.537.600	-	-	3.537.600	-	-
	Almari Lokal 1 Pintu	3 Unit	2003	50%	2.442.000	-	-	2.442.000	-	2.442.000	-	-	2.442.000	-	-
	Kalkulator Casio MJ 120	2 Unit	2003	50%	286.000	-	-	286.000	-	286.000	-	-	286.000	-	-
	Meja File	2 Unit	2003	50%	2.334.000	-	-	2.334.000	-	2.334.000	-	-	2.334.000	-	-
	Stick Golf	2 Unit	2003	50%	3.500.000	-	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	3.500.000	-	-
	CPU Intel Pentium 4	1 Unit	2005	50%	4.200.000	-	-	4.200.000	-	4.200.000	-	-	4.200.000	-	-
	Software Akuntansi	1 Unit	2005	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-
	Almari Pakaian 2 Pintu	1 Unit	2006	50%	350.000	-	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-	-
	Spring Bad Dir. Opr&Keu	2 Unit	Jul-07	50%	1.900.000	-	-	1.900.000	-	1.900.000	-	-	1.900.000	-	-
	Almari Arsip 3 Pintu - Can	1 Unit	Jul-07	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	-
	Kursi Chitos - Can	2 Unit	Aug-07	50%	230.000	-	-	230.000	-	230.000	-	-	230.000	-	-
	Almari 2 Pintu GA	1 Unit	Oct-07	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	-
	Kursi Lipat Chitos - Legal	2 Unit	Oct-07	50%	230.000	-	-	230.000	-	230.000	-	-	230.000	-	-
Lemari Activ Furniture	1 Unit	Feb-08	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	
Lemari Solod Furnitue	1 Unit	Feb-08	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	
Komputer Bid Produksi	1 Unit	May-08	50%	4.650.000	-	-	4.650.000	-	4.650.000	-	-	4.650.000	-	-	
Kursi Lipat Chitos - Legal	1 Unit	Jul-08	50%	280.000	-	-	280.000	-	280.000	-	-	280.000	-	-	
Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan					31.639.600	-	-	31.639.600	-	31.639.600	-	-	31.639.600	-	
Jumlah Dipindahkan					4.829.231.207	1.775.396.916	-	6.604.628.123	2.220.121.559	2.609.109.648	358.982.757	-	2.968.092.405	3.636.535.718	

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				4.829.231.207	1.775.396.916	-	6.604.628.123	2.220.121.559	2.609.109.648	358.982.757	-	2.968.092.405	3.636.535.718
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				31.639.600	-	-	31.639.600	-	31.639.600	-	-	31.639.600	-
	Komputer Pentium Dual Core	1 Unit	Dec-08	50%	3.750.000	-	-	3.750.000	-	3.750.000	-	-	3.750.000	-
	Upgrade Komputer + Power Supply 30 Ah	1 Unit	Mar-09	50%	1.490.000	-	-	1.490.000	-	1.490.000	-	-	1.490.000	-
	Lemari Kecil 2 Pintu	1 Unit	Apr-09	50%	450.000	-	-	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-
	Upgrade Software Program Akuntansi	1 Unit	Apr-09	50%	12.500.000	-	-	12.500.000	-	12.500.000	-	-	12.500.000	-
	Clinometer Shunto	2 Unit	Apr-09	50%	1.680.000	-	-	1.680.000	-	1.680.000	-	-	1.680.000	-
	Priband HP	2 Unit	Apr-09	50%	320.000	-	-	320.000	-	320.000	-	-	320.000	-
	Telpon Panasonic KX-TS 505 MX	1 Unit	Apr-09	50%	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-
	Komputer Intel Atom P4	1 Unit	Apr-09	50%	4.905.000	-	-	4.905.000	-	4.905.000	-	-	4.905.000	-
	Meja 1/2 Biro Lokal	1 Unit	May-09	50%	325.000	-	-	325.000	-	325.000	-	-	325.000	-
	TV Sharp 21" GXF 250	1 Unit	Jun-09	50%	1.450.000	-	-	1.450.000	-	1.450.000	-	-	1.450.000	-
	Lemari Arsip Kayu Lokal	1 Unit	Sep-09	50%	1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
	Kursi Lipat Chitos	2 Unit	Nov-09	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-
	Peralatan Sipuh Online	1 Unit	Jan-10	50%	8.649.512	-	-	8.649.512	-	8.649.512	-	-	8.649.512	-
	Lemari Arsip - Can	1 Unit	May-10	50%	1.400.000	-	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-	1.400.000	-
	Komputer	1 Unit	Jul-10	50%	4.800.000	-	-	4.800.000	-	4.800.000	-	-	4.800.000	-
	Dispenser Uchida + Refrigerator - Camp	2 Unit	Oct-10	50%	800.000	-	-	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-
	Komputer Intel Pentium Dual Core	1 Unit	Nov-10	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
	Tangga Alumunium Uk. 3 Meter	1 Unit	Dec-10	50%	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-
	Monitor LCD LG 15,6"	1 Unit	Dec-10	50%	1.100.000	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-
	Lemari Rak Lokal	1 Unit	Dec-10	50%	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	1.700.000	-
	TV Sharp 29"	1 Unit	Dec-10	50%	2.800.000	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-
	Kursi Lipat Chitose-Kantor Tanjung	6 Unit	Feb-11	50%	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	1.650.000	-
	Lemari Gantungan untuk File-Manajer HRD	1 Unit	Apr-11	50%	875.000	-	-	875.000	-	875.000	-	-	875.000	-
	Lemari Rak Piring 2 Pintu-Kantor Tanjung	1 Unit	Jun-11	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	Laptop Sony Vaio VPC-EG18FG-Produksi	1 Unit	Aug-11	50%	7.000.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-
	Camera Nikon D5100 VR	1 Unit	Aug-11	50%	13.350.000	-	-	13.350.000	-	13.350.000	-	-	13.350.000	-
	Kursi Putar Bakuda-HRD/GA	6 Unit	Sep-11	50%	3.300.000	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-	3.300.000	-
	Kursi Putar Tiger-Binsos	1 Unit	Sep-11	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	TV LG 21" u/ Perse. KM. 37-Binhut	1 Unit	Oct-11	50%	1.150.000	-	-	1.150.000	-	1.150.000	-	-	1.150.000	-
	Ranjang Olympic - Mess Direksi	1 Unit	Jan-12	50%	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000	-	-	3.050.000	-
	Meja Makan + Kursi - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	Rak Piring Kaca - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	850.000	-	-	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				122.834.112	-	1.100.000	121.734.112	-	122.834.112	-	1.100.000	121.734.112	-
	Jumlah Dipindahkan				4.920.425.719	1.775.396.916	1.100.000	6.694.722.635	2.220.121.559	2.700.304.160	358.982.757	1.100.000	3.058.186.917	3.636.535.718

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				4.920.425.719	1.775.396.916	1.100.000	6.694.722.635	2.220.121.559	2.700.304.160	358.982.757	1.100.000	3.058.186.917	3.636.535.718
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				122.834.112	-	1.100.000	121.734.112	-	122.834.112	-	1.100.000	121.734.112	-
	Magic Com Maspion - Mess Direksi	1 Unit	Feb-12	50%	325.000	-	-	325.000	-	325.000	-	-	325.000	-
	Kursi Putar Olimpia Manager Produksi	1 Unit	Feb-12	50%	850.000	-	-	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-
	Skat Ruang - Mess Direksi	2 Unit	Feb-12	50%	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	1.700.000	-
	Meja Kerja 1/2 Biro - HRD	1 Unit	Mar-12	50%	550.000	-	-	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-
	Meja Kerja 1 Biro - Binsos	1 Unit	Mar-12	50%	950.000	-	-	950.000	-	950.000	-	-	950.000	-
	Lemari Arsip 1 Pintu - Can	1 Unit	Apr-12	50%	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-
	Kompas Gas Rinai - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	650.000	-	-	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-
	Meja Piring Stainless - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	1.600.000	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	-	1.600.000	-
	Meja Kompas Gas Stainless - Mess Direksi	1 Unit	Jun-12	50%	1.500.000	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
	Printer Canon Mp 287 + Infus - Produksi	1 Unit	Jun-12	50%	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-
	Lemari Es Sharp 1 Pintu - Mess Direksi	1 Unit	Aug-12	50%	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-
	Kompas Sunto - Produksi	1 Unit	Jun-14	50%	1.121.250	-	-	1.121.250	-	1.121.250	-	-	1.121.250	-
	Printer Canon Pixma iP 2770 - Binhut	1 Unit	Sep-14	50%	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
	TV Samsung LED 32 " - R. Dirut	1 Unit	Oct-14	50%	3.200.000	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-	3.200.000	-
	Nozzle Pemadam - Pamhut	1 Unit	Nov-14	50%	600.000	-	-	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-
	Roll Selang Pemadam - Pamhut	2 Roll	Dec-14	50%	2.800.000	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	2.800.000	-
	Pakain Pemadam - Pamhut	6 Stell	Dec-14	50%	1.560.000	-	-	1.560.000	-	1.560.000	-	-	1.560.000	-
	Penutup Telinga EM62- Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	450.000	-	-	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-
	Masker NP305- Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	390.000	-	-	390.000	-	390.000	-	-	390.000	-
	Jas Hujan Soleil - Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	1.320.000	-	-	1.320.000	-	1.320.000	-	-	1.320.000	-
	P3K - Pamhut	6 Set	Dec-14	50%	960.000	-	-	960.000	-	960.000	-	-	960.000	-
	Layar Projektor Sony 70 " - HRD	1 Unit	Dec-14	50%	985.000	-	-	985.000	-	985.000	-	-	985.000	-
	Kursi Olympic - R. Dirut	1 Set	Dec-14	50%	3.250.000	-	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-
	Mesin Penghitung Uang LD-26 M	1 Unit	Mar-14	50%	2.208.250	-	-	2.208.250	-	2.208.250	-	-	2.208.250	-
	Printer Canon Pixma MP 237 + Infus	1 Unit	Mar-14	50%	1.100.000	-	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-
	Laptop Sony Viao SVF 1421 CWW	1 Unit	May-14	50%	6.850.000	-	-	6.850.000	-	6.850.000	-	-	6.850.000	-
	Kursi Puter Merk Brother	1 Unit	May-14	50%	700.000	-	-	700.000	-	700.000	-	-	700.000	-
	Genset PO 3200	1 Unit	Aug-14	50%	3.200.000	-	-	3.200.000	-	3.200.000	-	-	3.200.000	-
	Water Pump National 200	1 Unit	Aug-14	50%	780.000	-	-	780.000	-	780.000	-	-	780.000	-
	Profile Tank Uk. 1.100 Ltr	1 Pcs	Oct-14	50%	1.157.500	-	-	1.157.500	-	1.157.500	-	-	1.157.500	-
	Kompas Gas Rinai	1 Pcs	Oct-14	50%	500.000	-	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-
	Kipas Angin Maspion	1 Unit	Jan-15	50%	500.000	-	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				168.541.112	-	3.200.000	165.341.112	-	168.541.112	-	3.200.000	165.341.112	-
	Jumlah Dipindahkan				4.966.132.719	1.775.396.916	3.200.000	6.738.329.635	2.220.121.559	2.746.011.160	358.982.757	3.200.000	3.101.793.917	3.636.535.718

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				4.966.132.719	1.775.396.916	3.200.000	6.738.329.635	2.220.121.559	2.746.011.160	358.982.757	3.200.000	3.101.793.917	3.636.535.718
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				168.541.112	-	3.200.000	165.341.112	-	168.541.112	-	3.200.000	165.341.112	-
	Meja 1 Biro	1 Unit	Jan-15	50%	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	Scaner Alfalink As 1213	1 Unit	Jan-15	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	AC Sharp 3/4 PK	1 Unit	Jan-15	50%	4.000.000	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-
	Printer Canon 237 MP	1 Unit	Jul-15	50%	1.080.000	-	-	1.080.000	-	1.080.000	-	-	1.080.000	-
	Monitor LG Flat 15" - Sipuh	1 Unit	Aug-15	50%	950.000	-	950.000	-	-	950.000	-	950.000	-	-
	Kursi Lipat Palaris	8 Unit	Oct-15	50%	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
	Meja Resepsionis	4,29 M	Mar-16	50%	22.308.000	-	-	22.308.000	-	22.308.000	-	-	22.308.000	-
	Pintu Coboy	1 Set	Mar-16	50%	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-
	Sofa	5 Set	Mar-16	50%	19.000.000	-	-	19.000.000	-	19.000.000	-	-	19.000.000	-
	Coffe Table	3 Unit	Mar-16	50%	8.100.000	-	-	8.100.000	-	8.100.000	-	-	8.100.000	-
	Partisi (1 Set)	114,75 M	Mar-16	50%	43.031.250	-	-	43.031.250	-	43.031.250	-	-	43.031.250	-
	List Lantai	359 M	Mar-16	50%	30.515.000	-	-	30.515.000	-	30.515.000	-	-	30.515.000	-
	UPS Pro Link 700 SFC (Manager HRD & GA)	1 Unit	Mar-16	50%	580.000	-	-	580.000	-	580.000	-	-	580.000	-
	Grand Meja 1/2 Biro NB 502 + Laci Beech	22 Pcs	Jun-16	50%	44.440.000	-	-	44.440.000	-	44.440.000	-	-	44.440.000	-
	Grand Meja 1 Biro NB 503 + Laci Beech	6 Pcs	Jun-16	50%	16.080.000	-	-	16.080.000	-	16.080.000	-	-	16.080.000	-
	Grand Meja Lexus 120 x 80 x 72 LC 1280	2 Pcs	Jun-16	50%	5.060.000	-	-	5.060.000	-	5.060.000	-	-	5.060.000	-
	Grand Meja Lexus 150 x 80 x 72 LC 1580	4 Pcs	Jun-16	50%	11.420.000	-	-	11.420.000	-	11.420.000	-	-	11.420.000	-
	Grand Meja Sudut Lexus LX 90 D	4 Pcs	Jun-16	50%	3.860.000	-	-	3.860.000	-	3.860.000	-	-	3.860.000	-
	Meja Kerja Tipe ED (Ruang Kerja Dirut)	1 Pcs	Aug-16	50%	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
	Lemari Kaca Uk. 1/2 Kaca (Ruang Kerja Dirut)	1 Pcs	Aug-16	50%	2.200.000	-	-	2.200.000	-	2.200.000	-	-	2.200.000	-
	Meja Kerja Tipe ED 2010 (Ruang Kerja Direktur Oprs)	1 Pcs	Aug-16	50%	6.500.000	-	-	6.500.000	-	6.500.000	-	-	6.500.000	-
	Sofa (Teras Ruang Tunggu Tamu Kantor Tanjung)	1 Set	Sep-16	50%	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-
	TV LED LG 29 MT 48 + Bracket	1 Unit	Oct-16	50%	2.550.000	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-	-	2.550.000	-
	Speaker Polytron 21 s/n 0380	1 Set	Oct-16	50%	675.000	-	-	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-
	Kursi Lipat (Ruang Dirkeu & Dirops)	3 Pcs	Oct-16	50%	990.000	-	-	990.000	-	990.000	-	-	990.000	-
	Meja Kerja (Ruang Direktur Keuangan)	1 Unit	Oct-16	50%	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
	Lemari Arsip (Ruang Direktur Keuangan)	1 Unit	Oct-16	50%	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-
	Lemari Arsip (Bidang Umum)	6 Unit	Aug-16	50%	5.508.000	-	-	5.508.000	-	5.508.000	-	-	5.508.000	-
	Lemari Arsip (Bidang Personalia)	1 Unit	Nov-16	50%	490.000	-	-	490.000	-	490.000	-	-	490.000	-
	Kipas Angin Merek Panasonic	1 Unit	Dec-16	50%	540.000	-	-	540.000	-	540.000	-	-	540.000	-
	Hardish Eksternal 1 Tera (Bidang Keuangan)	1 Unit	Jan-17	50%	875.000	-	-	875.000	-	875.000	-	-	875.000	-
	Lemari Pakaian 3 Pintu (Mess Direksi)	1 Unit	Jun-17	50%	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				424.293.362	-	4.150.000	420.143.362	-	424.293.362	-	4.150.000	420.143.362	-
	Jumlah Dipindahkan				5.221.884.969	1.775.396.916	4.150.000	6.993.131.885	2.220.121.559	3.001.763.410	358.982.757	4.150.000	3.356.596.167	3.636.535.718

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025		S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025	
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				5.221.884.969	1.775.396.916	4.150.000	6.993.131.885	2.220.121.559	3.001.763.410	358.982.757	4.150.000	3.356.596.167	3.636.535.718
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				424.293.362	-	4.150.000	420.143.362	-	424.293.362	-	4.150.000	420.143.362	-
	Kursi Susun Merek Polaris (Direktur Operasional)	2 Unit	Mar-17	50%	1.029.000	-	-	1.029.000	-	1.029.000	-	-	1.029.000	-
	Printer Canon Pixma MP 287 (Manager HRD)	1 Unit	Aug-17	50%	1.470.000	-	1.470.000	-	-	1.470.000	-	1.470.000	-	-
	Spring Bed Air Land (Mess Direksi)	1 Unit	Oct-17	50%	8.000.000	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	8.000.000	-
	GPS Garmin MAP 78s (Pamhut)	1 Unit	Aug-19	50%	4.280.000	-	-	4.280.000	-	4.280.000	-	-	4.280.000	-
	Jumlah Inventais Kelompok I				439.072.362	-	5.620.000	433.452.362	-	439.072.362	-	5.620.000	433.452.362	-
	INVENTARIS KELOMPOK II													
	Kursi Putar	1 Unit	May-03	25%	475.200	-	-	475.200	-	475.200	-	-	475.200	-
	Kursi Direktur	3 Unit	May-03	25%	3.207.600	-	-	3.207.600	-	3.207.600	-	-	3.207.600	-
	Cash Box	2 Unit	Aug-03	25%	310.000	-	-	310.000	-	310.000	-	-	310.000	-
	Kursi Putar	2 Unit	Oct-03	25%	2.138.400	-	-	2.138.400	-	2.138.400	-	-	2.138.400	-
	AC Split LG 1/2 PK	2 Unit	Jul-07	25%	2.450.000	-	-	2.450.000	-	2.450.000	-	-	2.450.000	0
	GPS Garmin MAP 76 CSX	5 Unit	Apr-10	25%	17.600.000	-	-	17.600.000	-	17.600.000	-	-	17.600.000	(0)
	Klinometer Shunto PM 5 - Can	4 Unit	Apr-10	25%	6.400.000	-	-	6.400.000	(0)	6.400.000	(0)	-	6.400.000	(0)
	Phiband 10 Mtr - Can	3 Unit	Apr-10	25%	1.200.000	-	-	1.200.000	(0)	1.200.000	(0)	-	1.200.000	(0)
	Generator Diesel 5 KVA ATS YLW	1 Unit	Jul-10	25%	14.454.364	-	-	14.454.364	(0)	14.454.364	(0)	-	14.454.364	(0)
	AC LG 3/4 PK - Camp	1 Unit	Oct-10	25%	3.700.000	-	-	3.700.000	(0)	3.700.000	(0)	-	3.700.000	(0)
	AC LG 3/4 PK - Camp	1 Unit	Oct-10	25%	3.700.000	-	-	3.700.000	(0)	3.700.000	(0)	-	3.700.000	(0)
	Mesin Alkon Robin 5 PK	1 Unit	Nov-10	25%	3.120.000	-	-	3.120.000	0	3.120.000	0	-	3.120.000	0
	AC Panasonic 3/4 PK-Dirops	1 Unit	Feb-11	25%	3.250.000	-	-	3.250.000	(0)	3.250.000	(0)	-	3.250.000	(0)
	Lemari Besi Brother-Kuangan	1 Unit	Sep-11	25%	2.500.000	-	-	2.500.000	(0)	2.500.000	(0)	-	2.500.000	(0)
	AC Kamar Tidur Direktur Operasional	1 Unit	Jul-11	25%	1.750.000	-	-	1.750.000	(0)	1.750.000	(0)	-	1.750.000	(0)
	Almari Arsip Besi 2 pintu merk brother (Keuangan)	1 Unit	Aug-15	25%	2.800.000	-	-	2.800.000	188.337	2.611.663	188.337	-	2.800.000	-
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang Kerja Dirut	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	457.391	4.642.609	457.391	-	5.100.000	-
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang HRD & GA	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	457.391	4.642.609	457.391	-	5.100.000	-
	AC Panasonic 1,5 PK Ruang Meeting	1 Unit	Aug-16	25%	5.100.000	-	-	5.100.000	457.391	4.642.609	457.391	-	5.100.000	-
	Selang Hisap (Spiral) Untuk Mesin Alcon	5 M	May-16	25%	405.000	-	-	405.000	34.633	370.367	34.633	-	405.000	-
	Selang Biasa Uk. 1,5 Untuk Mesin Alcon	50 M	May-16	25%	1.890.000	-	-	1.890.000	161.620	1.728.380	161.620	-	1.890.000	-
	Kompas Suunto KB 14/360 R (Perencanaan Hutan)	2 Bh	Oct-16	25%	2.773.000	-	-	2.773.000	260.262	2.512.738	260.262	-	2.773.000	-
	Clinometer Suunto PM-5/360 PC (Perencanaan Hutan)	2 Bh	Oct-16	25%	3.384.000	-	-	3.384.000	317.608	3.066.392	317.608	-	3.384.000	-
	Alat Ukur Curah Hujan	1 Unit	Apr-18	25%	1.995.000	-	-	1.995.000	295.889	1.699.111	73.972	-	1.773.083	221.917
	Printer HP Designjet T795 = 44 Inc	1 Unit	Feb-18	25%	40.909.091	-	-	40.909.091	5.612.391	35.296.700	1.403.098	-	36.699.798	4.209.293
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				135.711.655	-	-	135.711.655	8.242.913	127.468.743	3.811.703	-	131.280.446	4.431.209
	Jumlah Dipindahkan				5.372.375.624	1.775.396.916	5.620.000	7.142.152.540	2.228.364.472	3.144.011.153	362.794.460	5.620.000	3.501.185.613	3.640.966.927

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025		S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025	
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				5.372.375.624	1.775.396.916	5.620.000	7.142.152.540	2.228.364.472	3.144.011.153	362.794.460	5.620.000	3.501.185.613	3.640.966.927
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				135.711.655	-	-	135.711.655	8.242.913	127.468.743	3.811.703	-	131.280.446	4.431.209
	AC Merek Panasonic Eco Smart 1 PK	1 Unit	Apr-18	25%	4.148.000	-	-	4.148.000	599.832	3.548.168	149.958	-	3.698.126	449.874
	Laptop Asus X441UA Core i3	1 Unit	May-18	25%	5.700.000	-	-	5.700.000	866.533	4.833.467	216.633	-	5.050.100	649.900
	Laptop Lenovo Ideapad 320 Core i5	1 Unit	May-18	25%	7.450.000	-	-	7.450.000	1.132.574	6.317.426	283.143	-	6.600.570	849.430
	Kompas Sunto KB-14/36 CR	2 Unit	Jul-18	25%	3.478.000	-	-	3.478.000	554.529	2.923.471	138.632	-	3.062.103	415.897
	AC Merek Panasonic KN5 TKJ (Mess Direksi)	1 Unit	Aug-18	25%	4.325.000	-	-	4.325.000	689.574	3.635.426	172.394	-	3.807.819	517.181
	Kipas Angin Panasonic Fep. 405	1 Unit	Sep-18	25%	550.000	-	-	550.000	91.770	458.230	22.943	-	481.172	68.828
	Printer Merek Epson (Binsos)	1 Unit	Sep-18	25%	2.266.000	-	-	2.266.000	378.093	1.887.907	94.523	-	1.982.430	283.570
	UPS Prolink	1 Unit	Sep-18	25%	1.287.500	-	1.287.500	-	214.826	1.072.674	214.826	1.287.500	-	-
	Tanki Semprot Malaysia (Binhut)	1 Unit	Sep-18	25%	630.000	-	-	630.000	105.119	524.881	26.280	-	551.161	78.839
	Dongkrak + Engkol Ban Untuk Mobil Kijang Innova KT. 1120	1 Set	Oct-18	25%	500.000	-	-	500.000	85.281	414.719	21.320	-	436.039	63.961
	Kulkas Polytron PR 173 G	1 Unit	Feb-19	25%	1.950.000	-	-	1.950.000	366.339	1.583.661	91.585	-	1.675.246	274.754
	AC Sharp Osucy (Mess Direksi)	1 Unit	Jun-19	25%	3.450.000	-	-	3.450.000	716.364	2.733.636	179.091	-	2.912.727	537.273
	Laptop HP 14"	1 Unit	Aug-19	25%	5.850.000	-	-	5.850.000	1.272.546	4.577.454	318.137	-	4.895.590	954.410
	Gerobak Dorong (Binhut)	1 Unit	Feb-20	25%	770.000	-	-	770.000	110.610	659.390	27.653	-	687.042	82.958
	UPS ICA CN 1300 (Bidang Produksi)	1 Unit	Mar-20	25%	1.250.000	-	-	1.250.000	390.300	859.700	97.575	-	957.275	292.725
	Mesin Chainsaw Yamaha GX50 (Pamhut)	1 Unit	Jul-20	25%	1.600.000	-	-	1.600.000	442.969	1.157.031	110.742	-	1.267.773	332.227
	UPS ICA CN 1200 (Bidang Canhut)	1 Unit	Jul-20	25%	1.337.500	-	-	1.337.500	370.294	967.206	92.574	-	1.059.779	277.721
	UPS ICA CN 700 (Bidang Pamhut)	1 Unit	Jul-20	25%	909.500	-	-	909.500	251.800	657.700	62.950	-	720.650	188.850
	Gorden	1 Paket	Aug-21	25%	1.900.000	-	-	1.900.000	718.066	1.181.934	179.517	-	1.361.450	538.550
	Printer Epson L1110	1 Unit	Sep-21	25%	2.135.000	-	-	2.135.000	825.645	1.309.355	206.411	-	1.515.767	619.233
	Monitor Computer Merek SPC (Manager HRD & GA)	1 Unit	Nov-21	25%	1.400.000	-	-	1.400.000	566.016	833.984	141.504	-	975.488	424.512
	Printer Epson (Sekretaris Direksi & Dekom)	1 Unit	Jan-22	25%	2.650.000	-	-	2.650.000	1.117.969	1.532.031	279.492	-	1.811.523	838.477
	AC Panasonic CS-4MG7 KJ	1 Unit	Apr-22	25%	2.000.000	-	-	2.000.000	914.063	1.085.938	228.516	-	1.314.453	685.547
	HP Android Samasung Galaxy A32	1 Unit	Jun-22	25%	1.079.700	-	-	1.079.700	518.762	560.938	129.691	-	690.628	389.072
	Kulkas Merek Sharp SJ-X165	1 Unit	Jul-22	25%	1.500.000	-	-	1.500.000	738.281	761.719	184.570	-	946.289	553.711
	Kursi Merek Matrix Warna Coklat Untuk Ruang Rapat	10 Unit	Sep-22	25%	3.000.000	-	-	3.000.000	1.546.875	1.453.125	386.719	-	1.839.844	1.160.156
	Meja Kaca Untuk Ruang Musholla Kantor	1 Unit	Sep-22	25%	1.350.000	-	-	1.350.000	696.094	653.906	174.023	-	827.930	522.070
	Semprotan Rumput	1 Unit	Sep-22	25%	700.000	-	-	700.000	360.938	339.063	90.234	-	429.297	270.703
	Kursi Susun Merek Matrix Warna Coklat	10 Unit	Oct-22	25%	3.000.000	-	-	3.000.000	1.582.031	1.417.969	395.508	-	1.813.477	1.186.523
	Kursi Putar Merek Ardent	2 Unit	Oct-22	25%	3.800.000	-	-	3.800.000	2.003.906	1.796.094	500.977	-	2.297.070	1.502.930
	Gerobak Dorong (Kantor)	1 Unit	Jan-23	25%	700.000	-	-	700.000	393.750	306.250	98.438	-	404.688	295.313
	Kompas Gas Merek Hitachi (Mess Direksi / Dirkeu)	1 Unit	Jan-23	25%	650.000	-	-	650.000	365.625	284.375	91.406	-	375.781	274.219
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				209.027.855	-	1.287.500	207.740.355	29.230.286	179.797.569	9.219.666	1.287.500	187.729.735	20.010.620
	Jumlah Dipindahkan				5.445.691.824	1.775.396.916	6.907.500	7.214.181.240	2.249.351.845	3.196.339.980	368.202.423	6.907.500	3.557.634.902	3.656.546.338

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				5.445.691.824	1.775.396.916	6.907.500	7.214.181.240	2.249.351.845	3.196.339.980	368.202.423	6.907.500	3.557.634.902	3.656.546.338
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				209.027.855	-	1.287.500	207.740.355	29.230.286	179.797.569	9.219.666	1.287.500	187.729.735	20.010.620
	HT Rig Icom 2300 + Braket	1 Set	Jan-23	25%	3.180.000	-	-	3.180.000	1.788.750	1.391.250	447.188	-	1.838.438	1.341.563
	HP Oppo A775 (Pamhut)	1 Unit	Jan-23	25%	3.500.000	-	-	3.500.000	1.968.750	1.531.250	492.188	-	2.023.438	1.476.563
	Mesin Absensi	3 Unit	Jan-23	25%	1.480.000	-	-	1.480.000	832.500	647.500	208.125	-	855.625	624.375
	Infokus Merek Epson EBE500	1 Unit	Feb-23	25%	5.550.000	-	-	5.550.000	3.208.594	2.341.406	802.148	-	3.143.555	2.406.445
	Prolink Pro 1.200	1 Unit	Mar-23	25%	1.240.200	-	-	1.240.200	736.369	503.831	184.092	-	687.923	552.277
	Kursi Tunggu 3 Baris	1 Unit	Mar-23	25%	1.500.000	-	-	1.500.000	890.625	609.375	222.656	-	832.031	667.969
	CCTV Untuk Kantor	1 Unit	Mar-23	25%	8.200.000	-	-	8.200.000	4.868.750	3.331.250	1.217.188	-	4.548.438	3.651.563
	Tandon Air Merek My Tank Untuk Persemaian KM. 35	1 Unit	Mar-23	25%	1.785.000	-	-	1.785.000	1.059.844	725.156	264.961	-	990.117	794.883
	Pump Jet Krisbow	1 Unit	Mar-23	25%	1.415.500	-	-	1.415.500	840.453	575.047	210.113	-	785.160	630.340
	Printer Epson L3210	1 Unit	Mar-23	25%	2.500.000	-	-	2.500.000	1.484.375	1.015.625	371.094	-	1.386.719	1.113.281
	Speaker Miting Wireles Durand 10	1 Unit	Mar-23	25%	1.800.000	-	-	1.800.000	1.068.750	731.250	267.188	-	998.438	801.563
	Kipas Angin Merek Matsumichi	2 Unit	Mar-23	25%	1.080.000	-	540.000	540.000	641.250	438.750	160.313	540.000	59.063	480.938
	Mesin Pompa National MDL OP200	1 Unit	Mar-23	25%	690.000	-	-	690.000	409.688	280.313	102.422	-	382.734	307.266
	UPS Prolink Pro 1200	1 Unit	May-23	25%	1.240.200	-	-	1.240.200	775.125	465.075	193.781	-	658.856	581.344
	Print Head Zebra XIII Plus 203 dpi	1 Unit	Jun-23	25%	3.789.000	-	-	3.789.000	2.427.328	1.361.672	606.832	-	1.968.504	1.820.496
	Generator 5.500 W 1 PH Open KRP 55 (Mesin Genzet) Me	1 Unit	Jul-23	25%	9.238.739	-	-	9.238.739	6.062.922	3.175.817	1.515.731	-	4.691.547	4.547.192
	Gerobak Arco	1 Unit	Jul-23	25%	640.000	-	-	640.000	420.000	220.000	105.000	-	325.000	315.000
	Rice Cooker 6L MMC4015	1 Unit	Aug-23	25%	1.550.000	-	-	1.550.000	1.041.406	508.594	260.352	-	768.945	781.055
	Dispenser Merek Sanken	1 Unit	Aug-23	25%	2.800.000	-	-	2.800.000	1.881.250	918.750	470.313	-	1.389.063	1.410.938
	Semprotan Rumput Untuk Bidang Pamhut	2 Unit	Aug-23	25%	1.600.000	-	-	1.600.000	1.075.000	525.000	268.750	-	793.750	806.250
	Selang Pemadam 30 M Untuk Pamhut	1 Set	Aug-23	25%	1.050.000	-	-	1.050.000	705.469	344.531	176.367	-	520.898	529.102
	Tangki Air Segi 4 Untuk Pamhut	1 Unit	Aug-23	25%	1.250.000	-	-	1.250.000	839.844	410.156	209.961	-	620.117	629.883
	UPS ICA 02-CT-1082B VA 1000 Watt (Canhut)	1 Unit	Jun-24	25%	1.165.500	-	-	1.165.500	995.531	169.969	248.883	-	418.852	746.648
	HP Android Redmi Note 12 Ram 8/256 = 3 Unit dan Ram 6/	4 Unit	Jun-24	25%	3.585.000	-	-	3.585.000	3.062.188	522.813	765.547	-	1.288.359	2.296.641
	UPS ICA 5005 - GKA CV - 1400 (Barcode)	1 Unit	Jul-24	25%	494.100	-	-	494.100	432.338	61.763	108.084	-	169.847	324.253
	Laptop Asus E1504FA R5-7250 (Perencanaan)	1 Unit	Aug-24	25%	8.738.739	-	-	8.738.739	7.828.454	910.285	1.957.113	-	2.867.399	5.871.340
	Peralatan Dalkarhutla (Pamhut)	1 Paket	Dec-24	25%	133.810.000	-	-	133.810.000	131.022.292	2.787.708	32.755.573	-	35.543.281	98.266.719
	Kompas Sunto	6 Unit	Dec-24	25%	7.270.000	-	-	7.270.000	7.118.542	151.458	1.779.635	-	1.931.094	5.338.906
	Kipas Angin Cosmos	1 Unit	Dec-24	25%	351.000	-	-	351.000	343.688	7.313	85.922	-	93.234	257.766
	CPU Asus S500TE-385000002W (Binsos)	1 Unit	Mar-25	25%	-	7.595.000	-	7.595.000	-	-	1.582.292	-	1.582.292	6.012.708
	Laptop Lenovo Slim	3 Unit	May-25	25%	-	20.100.000	-	20.100.000	-	-	3.350.000	-	3.350.000	16.750.000
	Printer Epson L3210 (Keuangan)	1 Unit	Jun-25	25%	-	2.420.000	-	2.420.000	-	-	352.917	-	352.917	2.067.083
	Jumlah Inventaris Kantor Dipindahkan				421.520.833	30.115.000	1.827.500	449.808.333	215.060.358	206.460.475	60.962.392	1.827.500	265.595.367	184.212.966
	Jumlah Dipindahkan				5.658.184.802	1.805.511.916	7.447.500	7.456.249.218	2.435.181.917	3.223.002.886	419.945.149	7.447.500	3.635.500.535	3.820.748.684

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
31 DESEMBER 2025

Lampiran I

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PEROLEHAN	% PENYUSUTAN	HARGA PEROLEHAN				NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025		S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025		S/D 31 - 12 - 2025	
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
	Jumlah Pindahan				5.658.184.802	1.805.511.916	7.447.500	7.456.249.218	2.435.181.917	3.223.002.886	419.945.149	7.447.500	3.635.500.535	3.820.748.684
	Jumlah Inventaris Kantor Pindahan				421.520.833	30.115.000	1.827.500	449.808.333	215.060.358	206.460.475	60.962.392	1.827.500	265.595.367	184.212.966
	Printer Epson L3210 (Canhut)	1 Unit	Jun-25	25%	-	2.420.000	-	2.420.000	-	-	352.917	-	352.917	2.067.083
	Kipas Angin Merek Miyako KST 18 RC	1 Unit	Jul-25	25%	-	550.000	-	550.000	-	-	68.750	-	68.750	481.250
	UPS ICA CV 1400	1 Unit	Jul-25	25%	-	1.750.000	-	1.750.000	-	-	218.750	-	218.750	1.531.250
	Monitor Samsung 19"	1 Unit	Jul-25	25%	-	1.280.000	-	1.280.000	-	-	160.000	-	160.000	1.120.000
	Tandon Stainless Merek Profil Tank 2.000 Liter	1 Unit	Jul-25	25%	-	5.500.000	-	5.500.000	-	-	687.500	-	687.500	4.812.500
	Mesin Giling Perontok Jagung Badja MT60G	1 Unit	Aug-25	25%	-	3.740.950	-	3.740.950	-	-	389.682	-	389.682	3.351.268
	Laptop Asus E1404FA (Direksi)	3 Unit	Aug-25	25%	-	19.500.000	-	19.500.000	-	-	2.031.250	-	2.031.250	17.468.750
	Program Komputer Akuntansi Multi User SS-ASK GL Plus	1 Unit	Oct-25	25%	-	10.900.000	-	10.900.000	-	-	681.250	-	681.250	10.218.750
	Smart TV LG UHD AI 86" (Ruang Rapat)	1 Unit	Oct-25	25%	-	25.275.000	-	25.275.000	-	-	1.579.688	-	1.579.688	23.695.313
	Bracket Standing TV Rodson TRC 1800 (Ruang Rapat)	1 Unit	Oct-25	25%	-	3.285.000	-	3.285.000	-	-	205.313	-	205.313	3.079.688
	Kursi Merek Cheetose	24 Unit	Oct-25	25%	-	16.320.000	-	16.320.000	-	-	1.020.000	-	1.020.000	15.300.000
	Kursi Tunggu Merek Frontline	1 Unit	Oct-25	25%	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	93.750	-	93.750	1.406.250
	Radio Rig Kenwood Untuk Mobil Pajero Sport	1 Unit	Oct-25	25%	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-	206.250	-	206.250	3.093.750
	Radio Rig Kenwood Untuk Mobil Triton LGS	1 Unit	Oct-25	25%	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-	206.250	-	206.250	3.093.750
	Radio Rig Kenwood Untuk Mobil Triton Exceed	1 Unit	Oct-25	25%	-	2.900.000	-	2.900.000	-	-	181.250	-	181.250	2.718.750
	Sound System Baretone, Standing + Mic (Ruang Rapat)	1 Unit	Oct-25	25%	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	312.500	-	312.500	4.687.500
	Vacum Cleaner Sharp	1 Unit	Oct-25	25%	-	930.050	-	930.050	-	-	58.128	-	58.128	871.922
	Kursi Rapat Merek Chitose	6 Unit	Oct-25	25%	-	4.080.000	-	4.080.000	-	-	255.000	-	255.000	3.825.000
	Wirelles Mixio (Ruang Rapat)	6 Unit	Oct-25	25%	-	850.000	-	850.000	-	-	53.125	-	53.125	796.875
	Laptop Merek Asus A1404VA i5 (Manager Binsos)	1 Unit	Nov-25	25%	-	9.100.000	-	9.100.000	-	-	379.167	-	379.167	8.720.833
	Laptop Merek Lenovo Slim 3 i5 (Bidang Canhut)	1 Unit	Nov-25	25%	-	8.900.000	-	8.900.000	-	-	370.833	-	370.833	8.529.167
	Laptop Merek Acer AL 14 i5 (Manager Umum & HRD)	1 Unit	Nov-25	25%	-	8.970.000	-	8.970.000	-	-	373.750	-	373.750	8.596.250
	Printer Epson L3550 (Pamhut & Binsos)	1 Unit	Nov-25	25%	-	3.650.000	-	3.650.000	-	-	152.083	-	152.083	3.497.917
	Laptop Merek Acer AL 14-71 P i5 (Manager Keuangan)	1 Unit	Nov-25	25%	-	8.500.000	-	8.500.000	-	-	354.167	-	354.167	8.145.833
	AC Panasonic YN 18 WKY	3 Unit	Nov-25	25%	-	20.400.000	-	20.400.000	-	-	850.000	-	850.000	19.550.000
	AC Panasonic YN 18 WKY	1 Unit	Nov-25	25%	-	8.050.000	-	8.050.000	-	-	335.417	-	335.417	7.714.583
	Printer Epson L 14150 (Canhut)	1 Unit	Nov-25	25%	-	8.200.000	-	8.200.000	-	-	341.667	-	341.667	7.858.333
	Laptop Lenovo Legiaon Pro 5 i9 Canhut / Pemetaan	1 Unit	Dec-25	25%	-	29.700.000	-	29.700.000	-	-	618.750	-	618.750	29.081.250
	Drone Dji Matrice Trice 4 Enterprice / Pemetaan	1 Unit	Dec-25	25%	-	66.288.287	-	66.288.287	-	-	1.381.006	-	1.381.006	64.907.281
	Ranjang Susun Untuk Camp	4 Set	Dec-25	25%	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	208.333	-	208.333	9.791.667
	Meja Kerja Untuk Camp	5 Unit	Dec-25	25%	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	72.917	-	72.917	3.427.083
	Kasur Komplit Untuk Camp	8 Set	Dec-25	25%	-	6.160.000	-	6.160.000	-	-	128.333	-	128.333	6.031.667
	Kursi Untuk Camp	5 Unit	Dec-25	25%	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	72.917	-	72.917	3.427.083
	Jumlah Inventais Kelompok II				421.520.833	337.414.287	1.827.500	757.107.620	215.060.358	206.460.475	75.363.083	1.827.500	279.996.059	477.111.561
	Jumlah Inventaris Kantor Kelompok I & II				860.593.195	337.414.287	7.447.500	1.190.559.982	215.060.358	645.532.837	75.363.083	7.447.500	713.448.421	477.111.561
	GRAND TOTAL				5.658.184.802	2.112.811.203	7.447.500	7.763.548.505	2.435.181.917	3.223.002.886	434.345.840	7.447.500	3.649.901.226	4.113.647.279

PT HUTAN SANGGAM BERAU
 DAFTAR PROPERTI INVESTASI DAN PENYUSUTANNYA
 31 DESEMBER 2025

Lampiran II

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
I.	BANGUNAN													
	Lantai I Wing Kanan 80 M2	1 Unit	Sep-16	5%	343.522.623	-	-	343.522.623	201.801.540	141.721.083	17.176.131	-	158.897.214	184.625.409
	Lantai I Wing Kiri 183,37 M2	1 Unit	Sep-16	5%	787.396.793	-	-	787.396.793	462.613.620	324.783.173	39.369.840	-	364.153.013	423.243.781
	TOTAL				1.130.919.417	-	-	1.130.919.417	664.415.161	466.504.256	56.545.971	-	523.050.227	607.869.190

PT HUTAN SANGGAM BERAU
DAFTAR ASET LAIN - LAIN DAN AKUMULASI AMORTISASI
31 DESEMBER 2025

Lampiran III

NO	NAMA ASET	QTY	TAHUN PERO- LEHAN	% PENYU- SUTAN	HARGA PEROLEHAN			NILAI BUKU DAN MUTASI TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU TANGGAL 31 - 12 - 2025	
					S/D 31 - 12 - 2024	MUTASI TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025	S/D 31 - 12 - 2024	PENYUSUTAN TAHUN 2025			S/D 31 - 12 - 2025
						DEBET	KREDIT				DEBET	KREDIT		
I.	PERIJINAN JANGKA PANJANG													
1	Beban Pra Operasi		May-03	25%	28.842.850	-	-	28.842.850	-	28.842.850	-	-	28.842.850	-
2	Beban Ditangguhkan		May-03	13%	443.345.523	-	-	443.345.523	-	443.345.523	-	-	443.345.523	-
3	Perijinan JKP/RKPH		Jan-07	3%	5.614.299.000	-	-	5.614.299.000	2.271.919.668	3.342.379.332	185.271.867	-	3.527.651.199	2.086.647.801
4	Penyusunan RKUPH2K		Apr-07	10%	162.731.109	-	-	162.731.109	-	162.731.109	-	-	162.731.109	-
5	Pelaksanaan IHMB		Dec-10	10%	453.134.285	-	-	453.134.285	-	453.134.285	-	-	453.134.285	-
6	Pelaksanaan Penilaian PHPL		Oct-14	20%	242.418.020	-	-	242.418.020	0	242.418.020	-	-	242.418.020	0
7	Perubahan Anggaran Dasar		Sep-12	33%	9.000.000	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	9.000.000	-
8	Penyusunan RKUPHHK Brbasis IHMB-HA		2014	11%	49.012.504	-	-	49.012.504	-	49.012.504	-	-	49.012.504	-
9	Perubahan Anggaran Dasar		Nov-16	33%	7.500.000	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	7.500.000	-
10	Revisi RKU-IUPHHK		Oct-16	10%	236.868.000	-	-	236.868.000	43.425.800	193.442.200	23.686.800	-	217.129.000	19.739.000
11	Pelaksanaan Penilaian PHPL (Resertifikasi) Tahun 2018		Dec-18	20%	358.404.849	-	-	358.404.849	-	358.404.849	-	-	358.404.849	-
12	Pelaksanaan IHMB Tahun 2020		Dec-21	10%	215.640.880	-	-	215.640.880	150.948.616	64.692.264	21.564.088	-	86.256.352	129.384.528
13	Usaha Perkebunan Karet Dalam Pengembangan		2022	20%	283.132.100	-	-	283.132.100	113.252.840	169.879.260	56.626.420	-	226.505.680	56.626.420
14	Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan		2022	20%	199.677.000	-	-	199.677.000	79.870.800	119.806.200	39.935.400	-	159.741.600	39.935.400
15	Piutang Macet		2022	20%	79.469.400	-	-	79.469.400	31.787.760	47.681.640	15.893.879	-	63.575.519	15.893.881
16	Alimuddin Merancang		2025	20%	-	53.500.000	-	53.500.000	-	-	10.700.000	-	10.700.000	42.800.000
17	Marpai		2025	20%	-	44.000.000	-	44.000.000	-	-	8.800.000	-	8.800.000	35.200.000
18	Agustinus		2025	20%	-	6.500.000	-	6.500.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	5.200.000
19	PT. Berkah Utama Pontianak		2025	20%	-	11.200.000	-	11.200.000	-	-	2.240.000	-	2.240.000	8.960.000
20	Dadang Ahmadi		2025	100%	-	259.410	-	259.410	-	-	259.410	-	259.410	-
21	Muttar		2025	100%	-	80.781	-	80.781	-	-	80.781	-	80.781	-
22	Randa Riasyah, SE		2025	100%	-	185.750	-	185.750	-	-	185.750	-	185.750	-
23	Ir. Baharuddin Hasyim		2025	100%	-	210.900	-	210.900	-	-	210.900	-	210.900	-
24	Hidup Anwar		2025	20%	-	4.519.848	-	4.519.848	-	-	903.970	-	903.970	3.615.878
TOTAL					8.383.475.520	120.456.689	-	8.503.932.209	2.691.205.484	5.692.270.036	367.659.265	-	6.059.929.301	2.444.002.908



LAMPIRAN 11

Laporan Keuangan PT Indo Pusaka Berau Per 31
Desember 2025



PT INDO PUSAKA BERAU

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements
As of December 31, 2025
And for the Year
Then Ended
With Independent Auditors' Report***

**PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDO PUSAKA BERAU
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/Page

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 2	 <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3	 <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	 <i>Statement of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5	 <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6 - 45	 <i>Notes to the Financial Statements</i>

P



PT INDO PUSAKA BERAU

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

PT INDO PUSAKA BERAU

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENT AS OF DECEMBER
31, 2025 AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama :	Aan Wibowo :	Name :
Alamat Kantor :	Jl. Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau, Kaltim :	Office address :
Alamat Rumah :	Jl. Pulau Panjang Rt 032, Tanjung Redeb, Berau, Kaltim :	Residential address :
Nomor Telepon :	085348240621 :	Telephone :
Jabatan :	Direktur Utama/President Director :	Title :
2. Nama :	M. Teguh Satria :	Name :
Alamat Kantor :	Jl. Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau, Kaltim :	Office address :
Alamat Rumah :	Jl. Mardatillah Rt 010 Kel. Karang Ambon, Tanjung Redeb, Berau, Kaltim :	Residential address :
Nomor Telepon :	082266664408 :	Telephone :
Jabatan :	Direktur Keuangan dan Administrasi/Finance and Administration Director :	Title :

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indo Pusaka Berau ("Perusahaan")	1 Responsible for the preparation and presentation of PT Indo Pusaka Berau ("Company")
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	2 The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;	3 a. All information in the company's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.	b. The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.	4 We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors
4 Mei 2026/May 4, 2026

Aan Wibowo
(Direktur Utama/President Director)

M. Teguh Satria
(Direktur Keuangan dan Administrasi/Finance and Administration Director)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No. 00774/2.0459/AU.1/02/1493-2/1/V/2026

Report No. 00774/2.0459/AU.1/02/1493-2/1/V/2026

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Indo Pusaka Berau**

**The Shareholders, Board of Commissioners
and Director
PT Indo Pusaka Berau**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indo Pusaka Berau ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6, Perusahaan mencatat aset tetap tidak beroperasi sebesar Rp15.750 (dalam jutaan). Perusahaan belum melakukan penghapusbukuan atas aset tetap tidak beroperasi tersebut karena belum memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Indo Pusaka Berau (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under these standards are further described in the Auditor's Responsibility for an Audit of Financial Statements paragraph in our report. We are independent of the Company based on relevant ethical requirements in our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled other ethical responsibilities under those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

As disclosed in Note 6, the Company has recorded idle fixed assets amounting to Rp15,750 million. The Company has not yet derecognized these idle fixed assets because it has not obtained approval from the Company's Board of Commissioners. Our opinion is not modified in respect of this matter.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for internal controls deemed necessary by management to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as appropriate, matters relating to going concern, and using the basis of going concern accounting, unless management has the intention to liquidate the Company or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis on these financial statements.

P



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya dan apakah mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriate use of the going concern basis of accounting by management and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. When we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if those disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained to date of our independent auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to be unable to continue as a going concern.
- Evaluate the presentation, structure and content of the financial statements as a whole, including the disclosures, and whether they reflect the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

P



**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Heliantono & Rekan**



Rahmat Sukendar, S.E., Ak., S.H., CA., CPA, CPI, CBV

Registrasi Akuntan Publik No.AP.1493 / Public Accountant Registration No.AP.1493



4 Mei 2026 / May 4, 2026

P

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
<u>ASET</u>				<u>ASSETS</u>
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset tetap - bersih	4	190.585	195.840	Fixed assets - net
Aset hak guna - bersih	5	-	1.107	Right of use assets - net
Aset tidak lancar lain	6	17.991	17.524	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		208.576	214.471	Total Non-Current Assets
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan bank	7	20.183	8.727	Cash and bank
Piutang usaha	8			Trade receivables
Pihak berelasi		6.604	6.888	Related parties
Pihak ketiga		166.651	127.694	Third parties
Piutang lain-lain - bersih	9	4.362	4.362	Other receivables - net
Persediaan	10	7.960	13.088	Inventories
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	83	46	Prepaid expenses and advances
Piutang pajak	12	2.476	3.362	Tax receivables
Jumlah Aset Lancar		208.320	164.167	Total Current Assets
JUMLAH ASET		416.896	378.638	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

7

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
<u>EKUITAS DAN LIABILITAS</u>				<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>
Ekuitas				Equity
Modal saham-nilai nominal				Capital stock-par value
Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar 247.800 saham				Authorized 247,800 share
Modal ditempatkan dan				Subscribed and
disetor penuh 133.150 saham	13	133.150	133.150	paid-up 133,150 shares
Tambahan modal disetor	14	4.071	4.071	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		77.555	77.555	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(130.570)	(66.023)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		2.886	2.559	Other comprehensive income
Jumlah Ekuitas		87.092	151.312	Total Equity
		-		
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Utang lain-lain	16	494	494	Other payables
Liabilitas pajak tangguhan	21c	9.606	9.554	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	17	10.700	10.934	Employee benefits liabilities
Utang usaha	18	-	-	Trade payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.799	20.982	Total Non-Current Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang usaha	18			Trade payables
Pihak berelasi		1.143	1.117	Related parties
Pihak ketiga		300.575	194.531	Third parties
Biaya masih harus dibayar	19	2.883	4.991	Accrued expenses
Utang pajak	20	55	66	Taxes payable
Liabilitas sewa		485.844.234	1.710	Lease payables
Utang lain-lain	16	3.861	3.929	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		309.004	206.344	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		329.803	227.326	Total Liabilities
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		416.896	378.638	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

P

PT INDO PUSAKA BERAU		PT INDO PUSAKA BERAU		
LAPORAN LABA RUGI		STATEMENT OF PROFIT OR LOSS		
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME		
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA		FOR THE YEARS ENDED		
31 DESEMBER 2025 DAN 2024		DECEMBER 31, 2025 AND 2024		
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan usaha	22	113.822	141.001	Revenue
Beban Usaha				Operating Expenses
Beban langsung	23	(162.684)	(160.720)	Direct expenses
Beban umum dan administrasi	24	(16.506)	(15.692)	General and administrative expenses
Jumlah Beban Usaha		(179.190)	(176.412)	Total Operating Expenses
RUGI USAHA		(65.367)	(35.411)	OPERATING LOSS
Pendapatan keuangan		180	59	Finance income
Beban keuangan		(36)	-	Finance expenses
Lain-lain - bersih		635	(954)	Others - net
RUGI SEBELUM				LOSS BEFORE
PAJAK PENGHASILAN		(64.587)	(36.306)	INCOME TAX
Manfaat (beban) pajak penghasilan	21a	41	(7.764)	Income tax benefit (expense)
RUGI TAHUN BERJALAN		(64.547)	(44.070)	LOSS FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		420	2.695	Remeasurement on employee benefits liabilities
Manfaat (beban) pajak terkait		(92)	(593)	Related tax benefit (expense)
Penghasilan Komprehensif Lain, Bersih		327	2.102	Other Comprehensive Income, Net
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(64.219)	(41.967)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

P

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Subscribed and paid-up capital stock</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saldo laba/ <i>Retained earning</i>		Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
				Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>			
Saldo per 31 Desember 2023		133.150	4.071	77.555	(21.953)	457	193.279	Balance as of December 31, 2023
Dividen	15	-	-	-	-	-	-	Dividends
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(44.070)	-	(44.070)	Loss for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		-	-	-	-	2.102	2.102	Reasurement of employee benefit liabilities
Saldo per 31 Desember 2024		133.150	4.071	77.555	(66.023)	2.559	151.312	Balance as of December 31, 2024
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(64.547)	-	(64.547)	Loss for the year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		-	-	-	-	327	327	Reasurement of employee benefit liabilities
Saldo per 31 Desember 2025		133.150	4.071	77.555	(130.570)	2.886	87.092	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	74.072	74.951	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(55.833)	(53.897)	Cash paid to suppliers and employees employees and others
Penerimaan bunga/jasa giro	2.056	89	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(3.050)	(2.914)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Provided by
Aktivitas Operasi	17.245	18.228	Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(5.789)	(8.834)	Acquisition of fixed assets
Kas Bersih Digunakan untuk			Net Cash Used in
Aktivitas Investasi	(5.789)	(8.834)	Investing Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	-	(3.014)	Payments of dividends
Pembayaran pokok pinjaman bank	-	-	Repayments of bank loan
Pembayaran bunga	-	-	Payment of interest expense
Kas Bersih Digunakan untuk			Net Cash Used in
Aktivitas Pendanaan	-	(3.014)	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN BANK	11.456	6.380	CASH AND BANKS
KAS DAN BANK			CASH AND BANKS
PADA AWAL TAHUN	8.727	2.347	AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK			CASH AND BANKS
PADA AKHIR TAHUN	20.183	8.727	AT THE END OF THE YEAR

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Indo Pusaka Berau ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 12 Januari 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 8 dari Notaris Sukawaty Sumardi, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-08559 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Maret 2005.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 17 tanggal 18 Februari 2022 dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Peralihan Saham Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0166820 tanggal 14 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, adalah untuk mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangkit listrik, memasarkan dan memperdagangkan hasil produksinya di dalam negeri.

Perusahaan berdomisili di Jl. Pemuda No. 356, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") yang berlokasi di Lati, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan memulai kegiatan komersil pada tahun 2005.

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 07 tanggal 15 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 12 pada tanggal 17 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama :	Derina
Komisaris :	Muhammad Said
Komisaris :	Ivan Julianto

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Indo Pusaka Berau ("the Company") was established on January 12, 2005 based on Notarial Deed No. 8 of Sukawaty Sumardi, S.H., notary in Jakarta. The Company's Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C-08559 HT. 01.01.TH.2005 dated March 31, 2005.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 17 dated February 18, 2022 of Notary Lenny Janis Ishak, S.H., domiciled in South Jakarta, regarding changes to the Transfer of Company Shares which have obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03.0166820 dated March 14, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities are to construct and operate business in the power generation sector, to distribute and sale its production in domestic market.

The Company is domiciled in Jl. Pemuda No. 356, Tanjung Redeb, Berau Regency, East Kalimantan Province. The Company owned Coal-fired Steam Power Plant ("PLTU") in Lati, Berau Regency, East Kalimantan Province. The Company started its commercial activities in 2005.

b. Composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2025 as stated in Notarial Deed No. 07 dated December 15, 2025 and as of December 31, 2024 as stated in Notarial Deed No. 12 dated January 17, 2024 is as follows:

	<u>2024</u>		<u>Board of Commissioners</u>
Heru Setiawan :			<i>President Commissioner</i>
Kamaruddin :			<i>Commissioner</i>
Ivan Julianto :			<i>Commissioner</i>

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (lanjutan)

b. Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

	2025
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama :	Aan Wibowo
Direktur Keuangan dan Administrasi :	Muhamad Teguh Satria
Direktur Operasi :	Rahadi Santoso

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki masing-masing 95 dan 101 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees (continued)

	2024	
<u>Board of Directors</u>		
Aan Wibowo :		President Director
Muhamad Teguh Satria :		Director of Finance and Administration
Jefri Ade Saputra :		Operations Director

As of December 31, 2025 and 2024, the number of Company has a total of 95 and 101 employees (unaudited), respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis for Preparation and Presentation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and interpretations to Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The measurement in the preparation of financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of respective account.

The statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024:

- i. PSAK 116 (amandemen) Sewa : mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi dan sewa balik;
- ii. PSAK 201 (amandemen) Penyajian Laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- iii. PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: pengaturan pembiayaan pemasok.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting January 1, 2024:

- i. PSAK 116 (amendment) Lease : Arrange the subsequent measurement of transactions and leaseback;
- ii. PSAK 201 (amendment) Presentation of Financial Statements: Non-current Liabilities with Covenants;
- iii. PSAK 207: Cash Flow Statement and PSAK 107: Financial Instruments: supplier financing arrangements.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to SFAS relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

c. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- 1) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

d. Instrumen Keuangan

1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

c. Transactions with Related Parties (continued)

- 2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

d. Financial Instruments

1) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are measured at amortized cost of acquisition if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- The contractual terms of such financial assets entitle at a certain date to cash flows obtained solely from the payment of principal and interest (SPPI) of the principal amount owed.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal
(lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1) Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement
(continued)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model aimed at obtaining contractual cash flow and selling financial assets; and*
- *The contractual requirements of such financial assets meet the criteria of SPPI.*

At the time of initial recognition, the Group may make the irrevocable choice of presenting non-owned equity instruments to trade at fair value through other comprehensive income. Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets are measured at amortized cost of acquisition or fair value through other comprehensive income, classified as measured at fair value through profit and loss.

Upon initial recognition the Group may make irrevocable injunctions to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost of acquisition or fair value through other comprehensive income at fair value through profit and loss, if such determination eliminates or significantly reduces measurement inconsistencies or acknowledgments (sometimes referred to as "accounting mismatches").

Business model assessment

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business goals.

Business model assessment is carried out taking into account, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model is evaluated and reported to the Group's key management personnel;*

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal
(lanjutan)

- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1) Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement
(continued)

- What are the risks that affect the performance of the business model (including the financial assets held in the business model) and in particular how those financial assets are managed; and
- How is the performance appraisal of a financial asset manager (for example, whether the performance appraisal is based on the fair value of the assets under management or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or management and an assessment of their performance based on fair value are measured at fair value through profit and loss.

Assessment of contractual cash flows derived solely from principal and interest payments

For the purposes of this assessment, principal is defined as the fair value of a financial asset at the time of initial recognition. Interest is defined as the reward for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a given period of time and also the risk and cost of standard borrowing, and also the profit margin.

Assessments regarding contractual cash flows derived solely from principal and interest payments are made taking into account contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that may change the timing or amount of contractual cash flows.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Perusahaan mempunyai aset keuangan yang seluruhnya dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Perusahaan meliputi kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi pada saham, piutang pihak berelasi dan aset tidak lancar lain-lain.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1) Financial Assets (continued)

Assessment of contractual cash flows derived solely from principal and interest payments (continued)

In conducting the assessment, the Group considers:

- Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flows;
- Leverage feature;
- Advance payment terms and contractual renewals;
- Requirements regarding limited claims on cash flows derived from specific assets; and
- A feature that can change the time value of the money element.

The Group has financial assets that are entirely categorized as financial assets as measured at amortized cost of acquisition.

Financial assets measured on the Group's amortized cost of acquisition include cash and cash equivalents, funds restricted in use, accounts receivable, miscellaneous receivables, investments in stocks, related party receivables and miscellaneous non-current assets.

2) Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories at the time of initial recognition:

- Financial liabilities measured at fair value through the income statement, which has 2 (two) sub-classifications, namely financial liabilities established thus at the time of initial recognition and financial liabilities that have been classified in the traded group;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities are financial liabilities that are not held for sale or determined as fair value through profit and loss upon recognition of liabilities.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

4) Penghentian Pengakuan

Aset keuangan

Suatu aset keuangan atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

3) Deterioration in the Value of Financial Assets

The Group assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since the initial recognition. When conducting assessments, the Group uses changes to the risk of default that occur throughout the estimated age of financial instruments rather than changes to the amount of expected credit losses. In conducting the assessment, the Group compares the risk of default incurred on financial instruments during the reporting period with the risk of default occurring over financial instruments at the time of initial recognition and considers the reasonableness and availability of information, which is available at no cost or effort, indicating an increase in credit risk since initial recognition.

4) Derecognition

Financial assets

A financial asset or any of which is applicable as part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is terminated at the time of:

- i. The contractual right to cash flows derived from such financial assets expires; or*
- ii. The Company transfers the contractual right to receive cash flows derived from financial assets or assumes the obligation to pay the cash flows received without significant delay to third parties through an agreement of delivery and (a) substantively transfer all risks and benefits of ownership of such financial assets, or (b) substantially do not transfer and do not have all risks and benefits of ownership of such financial assets, but have transferred control of such financial assets.*

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

5) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

6) Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu utang antara pihak-pihak yang memahami transaksi wajar (*arm's length transaction*). Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif (harga penawaran bagi aset yang dimiliki atau utang yang akan diterbitkan dan harga permintaan untuk aset yang akan diperoleh atau utang yang dimiliki).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

4) Derecognition (continued)

Financial liabilities

Financial liabilities are terminated when the liabilities stipulated in the contract are released or cancelled or expire. When the initial financial liabilities are replaced with other financial liabilities of the same lender with substantially different terms, or substantial modification of a financial liability currently in existence, then such exchange or modification is recorded as the write-off of the initial financial liability and the recognition of the new financial liability, and the difference between the carrying value of such financial liability is recognized in profit or loss.

5) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are written off and their net value is presented in the statement of financial position if and only if there is a legal right to mutually write off the recorded amounts of such financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle cleanly, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

6) Determination of Fair Value

Fair value is the value used to exchange an asset or to settle a debt between parties who understand an arm's length transaction. The fair value of an asset or financial liability can be measured using quotes in the active market (the bid price for an asset owned or debt to be issued and the asking price for an asset to be acquired or debt held).

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6) Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara pengawas (*pricing service/regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang actual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan apabila tersedia, analisa arus kas yang didiskonto dan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama.

7) Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau liabilitas akan terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

6) Determination of Fair Value (continued)

A financial instrument is considered to have quotes in the active market if the quote price is available at any time and can be obtained regularly from exchanges, dealers, pricing service (regulatory agency) and the price reflects actual and routine market transactions in a reasonable transaction.

In the event that there is no active market for an asset or financial liability, the Company determines fair value using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include the reasonable use of current market transactions by parties who wish and understand, and where available, discounted cash flow analysis and references to the current fair value of other substantially the same instruments.

7) Fair Value Measurement

Measurement of value based on the assumption that a transaction to sell the asset or liability will occur:

- i. in the principal market for the asset or liability or;*
- ii. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

7) Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii. Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- iii. Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan, kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi tenaga listrik.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>(Tahun/Years)</u>
Jaringan dan gardu	40
Instalasi dan mesin pembangkit	30
Bangunan	27
Bangunan non-permanen	11
Alat berat	11
Peralatan kantor	5
Kendaraan bermotor	5

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

d. Financial Instruments (continued)

7) Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- i. Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- ii. Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- iii. Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

e. Fixed Assets

Fixed assets held for use in production or for administrative purposes are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Fixed assets include the main reserve material and ready-to-use equipment with an economic benefit of more than one year which is intended to maintain the continuity, stability of the operation of power plants and machines in order to produce electricity.

Depreciation is recognized using the straight-line method based on the estimated useful lives is as follows:

	<i>Network and substations</i>
	<i>Installations and power plant</i>
	<i>Buildings</i>
	<i>Non-permanent buildings</i>
	<i>Heavy equipments</i>
	<i>Office equipments</i>
	<i>Motor vehicles</i>

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pekerjaan dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tidak Lancar Lain" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk pekerjaan dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

f. Aset Takberwujud

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke aset tersebut saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan.

Perusahaan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset takberwujudnya.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite*) diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas (*indefinite*) tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan.

Selain itu, Perusahaan juga menerapkan ISAK No. 25, "Hak Tanah". Penerapan ISAK ini hanya mereklasifikasi biaya pengurusan hak tanah untuk perolehan awal pada kelompok akun tanah dan untuk perpanjangan hak pada kelompok akun "Aset Tak-berwujud".

Hak tanah tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama taksiran masa manfaat hukum atau ekonomis, mana yang lebih cepat.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

e. Fixed Assets (continued)

The economic useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end and the effect of any changes in estimates is applied prospectively.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred in addition to adding, replacing or repairing fixed assets are recorded as the cost of the asset if and only if it is probable that the future economic benefits associated with the asset will flow to the entity and the cost of the asset can be measured reliably.

Construction in progress is presented in the "Other Non-Current Assets" and is stated at cost. The accumulated cost for the construction in progress is transferred to respective fixed assets when the assets are completed and ready for intended use.

f. Intangible Assets

Intangible assets are initially recognized at cost or the amount attributable to the item when it was first recognized, where applicable.

The Company has chosen the cost model for measurement intangible assets.

Intangible assets with finite useful lives are amortized systematically over the useful life. Intangible assets with indefinite life are not necessarily amortized, but must be done on an annual basis the comparison between the carrying value and the recoverable amount.

In addition, the Company also adopted prospectively IFAS No. 25, "Land Rights". Application of this IFAS is just to reclassify the cost of the land rights for the initial acquisition of land and account for the extension of rights to "Intangible Assets" account.

Land rights are amortized using the straight-line method over the legal life or economic life, whichever is shorter.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

g. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dilakukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan persediaan.

i. Piutang Usaha

Pada saat pengakuan awal piutang diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa entitas tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran dianggap sebagai indikator bahwa piutang telah turun nilainya.

Jumlah cadangan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

g. Cash and Bank

Cash and bank consist of cash and bank that ready and free to be used to finance the activities of the Company.

h. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimation of the cost of completion and selling expenses.

Provision for decline in value of inventory is made based on a review of the condition of the inventories.

i. Trade Receivables

At the time of initial recognition, receivables are measured at fair value and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method, reducing the value of impairment losses on reserves.

Allowance of doubtful account are when there is objective evidence that the entity will not be able to collect all receivables in accordance with the initial terms of receivables. Significant financial difficulties on the borrower, the probability that the debtor will be declared bankrupt or a financial reorganization and wanprestasi or arrears in the payment is considered an indicator that there is impairment.

Net of carrying amount and estimated cash flows in the future is allowance, discounted at the initial effective interest rate.

Carrying amount deducted through the use of an allowance account, and impairment loss recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan metode garis lurus.

Uang muka pembelian akan diperhitungkan sesuai pembayaran di muka atas komitmen Perusahaan dengan harga pembelian/nilai kontrak yang diperjanjikan pada saat penerimaan barang/jasa.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

l. Sewa

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 116 "Sewa" efektif tanggal 1 Januari 2021. PSAK No. 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

j. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses amortized using straight line method.

Advances for purchase will be calculated in accordance prepayments on the Company's commitment to the purchase price/value of the contract agreed upon at the time of receipt of goods/services.

k. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortisation or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units).

Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

l. Lease

The company has implemented SFAS No. 116 "Lease" effective January 1, 2021. SFAS No. 116 apply new requirements or amendments with respect to lease accounting.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi penyewa dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Perusahaan sebagai penyewa

Pada permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan akan menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Perusahaan menerapkan cara praktis untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Lease (continued)

This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance leases, and requires the recognition of right-of-use assets and the recognition of lease liabilities at inception of the lease for all leases, except:

- *Lease with a term of less than or equal to 12 months and there is no buy option;*
- *Rent for low value assets.*

The Company as lessee

At inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company will assess whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset.*

At the commencement date of the lease, the Company recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises

- *The initial amount of the lease liability;*
- *Lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *Initial direct cost incurred; and*
- *An estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group has used practical expedient to not separate non-lease payments from lease components on lease by class of underlying assets.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda.

Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apapun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Perusahaan sebagai pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

I. Lease (continued)

Lease terms are negotiated on an individual bases and contain a wide range of different terms and conditions.

The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Assets and liabilities arising from lease arrangements are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

The Company as lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases.

Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisis transaksi melalui lima langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria tertentu sebagai berikut:
 - a) Kontrak telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak;
 - b) Perusahaan dapat mengidentifikasi hak-hak pihak terkait dan jangka waktu pembayaran atas barang yang akan dialihkan;
 - c) Kontrak memiliki substansi komersial;
 - d) Besar kemungkinan Perusahaan akan menerima manfaat atas barang yang dialihkan.
2. Identifikasi kewajiban kinerja dalam kontrak kepada pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, kelonggaran perdagangan, pajak ekspor, dan pungutan ekspor, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang yang dijanjikan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual setiap barang yang dijanjikan dalam kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi (dari waktu ke waktu atau pada suatu titik waktu).

Beban diakui pada saat terjadinya (berbasis akrual).

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam periode/tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif karena penghasilan kena pajak tidak termasuk *item-item* Penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan.

Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

m. Recognition of Revenue And Expenses

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - a) The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
 - b) The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods to be transferred;*
 - c) The contract has commercial substance;*
 - d) It is probable that the Company will receive benefits for the goods transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, trade allowances, export tax and export levies, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Income Tax

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income in the current period/year. Taxable income is different from profit reported in the statement of comprehensive income because taxable income does not include items of income or expenses that are taxed or deducted in other years and excludes items that have never been taxed or deducted.

Corporate income tax currently payable is calculated using tax rates based on tax laws that have been established or are substantially set at the end of the reporting period.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

n. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya menurut laporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

o. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban, dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

p. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

n. Income Tax (continued)

Deferred tax is accounted for using the liability method for all temporary differences arising between fiscal-based assets and liabilities and their carrying amounts according to financial statements. Deferred tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates are charged to current income, except for transactions that have been directly charged or credited to equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities can mutually cancel each other if legally eliminated between current tax assets against current tax liabilities and deferred tax assets for deferred tax liabilities related to the same entity, or the Company intends to settle current assets and liabilities based on the amount net.

o. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate made of the amount of the obligation.

p. Events After the Reporting Period

Events that occur after the reporting period that provide additional information about the Company's financial position on the date of the statement of financial position (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements.

3. MANGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPSTIONS

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the total reported of revenues, expenses, assets dan liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about assumptions and estimates may result in material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities in the subsequent reporting period.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam Laporan Keuangan:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang ini mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat Laporan Keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. MANGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPSTIONS (continued)

a. Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Financial Statement:

Determination of functional currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company's operates. It is the currency that mainly influences the revenue and expenses from sale of goods and services rendered and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of underlying transactions, events and conditions.

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded. Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company's based its assumptions and estimates on parameters available when The Financial Statement were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur manfaat aset tetap

Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis (estimasi daya pakai, pengoperasi, pemeliharaan) dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Pajak tangguhan

Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah pajak tangguhan yang diakui sebagai laba atau rugi serta jumlah yang dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Pengakuan tersebut dilakukan hanya jika besar kemungkinan aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang, dimana perbedaan temporer dan akumulasi rugi fiskal masih dapat digunakan. Manajemen juga mempertimbangkan estimasi penghasilan kena pajak di masa datang dan perencanaan strategik perpajakan dalam mengevaluasi aset pajak tangguhnya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun perubahannya. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, ada kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks dimana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat.

3. MANGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPSTIONS
(continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews periodically of the usefull lives of the property, plant and equipment based on factors such as technical conditions (estimated useability, operation, maintenance) and future technology development. Future result of operatios will be materially affected by changes in these estimates resulting from changes in the factors mentioned above.

Estimated deferred tax

Management judgment is required to determine the amount of deferred tax recognized in profit or loss and the amount recorded as deferred tax assets. Such recognition is made only if it is probable that the asset will be recovered in the form of economic benefits to be received in future periods, in which the temporary differences and tax losses can still be utilized. Management also considers the estimation of future taxable income and strategic tax planning in evaluating its deferred tax assets in order to comply with applicable tax laws and their amendments. As a result, due to its inherent nature, it is possible that the calculation of deferred tax relates to complex patterns where judgment is required and an accurate calculation is not expected.

PT INDO PUSAKA BERAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT INDO PUSAKA BERAU NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

4. ASET TETAP

4. FIXED ASSETS

2025				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
<u>Biaya Perolehan</u>				<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	15.346	-	-	15.346
Bangunan	47.574	184	-	47.758
Bangunan non-permanen	5.665	193	-	5.858
Peralatan kantor	4.520	94	-	4.614
Jaringan dan gardu	34.437	1.138	-	35.575
Instalasi dan mesin pembangkit	262.915	8.762	-	271.677
Alat berat	1.218	-	-	1.218
Kendaraan bermotor	2.644	-	-	2.644
Sub Jumlah	374.319	10.371	-	384.691
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	24.988	1.983	-	26.971
Bangunan non-permanen	4.977	182	-	5.159
Peralatan kantor	3.842	227	-	4.070
Jaringan dan gardu	13.765	908	-	14.673
Instalasi dan mesin pembangkit	127.045	12.326	-	139.371
Alat berat	1.218	-	-	1.218
Kendaraan bermotor	2.644	-	-	2.644
Sub Jumlah	178.480	15.626	-	194.105
Nilai Buku	195.840			190.585

2024				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
<u>Biaya Perolehan</u>				<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	15.346	-	-	15.346
Bangunan	47.162	146	-	47.574
Bangunan non-permanen	5.665	-	-	5.665
Peralatan kantor	3.999	264	-	4.520
Jaringan dan gardu	36.068	178	-	34.437
Instalasi dan mesin pembangkit	259.617	2.014	-	262.915
Alat berat	1.218	-	-	1.218
Kendaraan bermotor	2.644	-	-	2.644
Sub Jumlah	371.719	2.602	-	374.319
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	23.023	1.965	-	24.988
Bangunan non-permanen	4.688	289	-	4.977
Peralatan kantor	3.614	229	-	3.842
Jaringan dan gardu	12.894	871	-	13.765
Instalasi dan mesin pembangkit	114.001	13.043	-	127.045
Alat berat	1.218	-	-	1.218
Kendaraan bermotor	2.645	-	-	2.644
Sub Jumlah	162.083	16.397	-	178.480
Nilai Buku	209.635			195.840

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

4. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2025	2024	
Beban langsung (Catatan 23)	16.313	17.083	Direct expenses (Notes 23)
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	54	55	General and administrative expenses (Notes 24)
Jumlah	16.366	17.138	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Perusahaan mengasuransikan gardu induk dan transmisi tiang menara, pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 3 x 7 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya, dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp16.545 dan nilai premi sebesar Rp49. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

4. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expenses are allocated as follows:

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of property, plant and equipment as of the reporting date.

The company insures substations and tower pole transmission, steam power plants with a capacity of 3 x 7 MW are insured to PT Asuransi Tri Pakarta against fire risks and other possible risks, with a total insured value of Rp16,545 and a premium value of Rp49. Management believes that the insurance coverage value is sufficient to cover losses that may arise from these risks.

5. ASET HAK GUNA

5. RIGHT OF USE ASSETS

2025					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir Ending balance		
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Alat Berat	3.978	952	-	4.930	Heavy Equipment
Kendaraan	7.330	1.023	-	8.353	Motor vehicles
Sub Jumlah	11.308	1.975	-	13.283	Sub Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat Berat	4.077	952	534	5.563	Heavy Equipment
Kendaraan	6.124	1.023	573	7.720	Motor vehicles
Sub Jumlah	10.201	1.975	1.107	13.283	Sub Total
Nilai Buku	1.107			-	Book Value
2024					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir Ending balance		
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Alat Berat	3.041	937	-	3.978	Heavy Equipment
Kendaraan	6.710	620	-	7.330	Motor vehicles
Sub Jumlah	9.751	1.557	-	11.308	Sub Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Alat Berat	3.141	936	-	4.077	Heavy Equipment
Kendaraan	4.844	1.280	-	6.124	Motor vehicles
Sub Jumlah	7.985	2.216	-	10.201	Sub Total
Nilai Buku	1.766			1.107	Book Value

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TIDAK LANCAR LAIN

6. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2025	2024	
Aset takberwujud	3.731	3.731	<i>Intangible assets</i>
Akumulasi amortisasi	(3.721)	(3.597)	<i>Accumulation amortization</i>
Aset takberwujud - bersih	10	134	<i>Intangible assets - net</i>
Aset tetap tidak beroperasi	60.386	60.386	<i>Non-operating fixed assets</i>
Akumulasi penyusutan aset tetap tidak beroperasi	(44.636)	(43.895)	<i>Accumulated Depreciation non-operating fixed assets</i>
Aset tetap tidak beroperasi - bersih	15.750	16.491	<i>Non-operating fixed assets - net</i>
Pekerjaan dalam pelaksanaan	2.203	871	<i>Construction in progress</i>
Lain-lain	27	27	<i>Others</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar Lain	17.991	17.524	<i>Total Other Non-Current Assets</i>

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan pekerjaan pembangunan Dermaga Jetty Batubara yang berlokasi di Site Lati, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Work in progress is the construction of Coal Jetty located at Lati Site, Berau Regency, East Kalimantan Province.

7. KAS DAN BANK

7. CASH AND BANK

	2025	2024	
Kas	21	17	<i>Cash on hand</i>
Bank			<i>Cash in bank</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.162	8.711	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Jumlah Kas dan Bank	20.183	8.727	<i>Total Cash and Bank</i>

8. PIUTANG USAHA

8. TRADE RECEIVABLES

a. Berdasarkan Pelanggan

a. By Customers

	2025	2024	
Pihak Berelasi			<i>Related Party</i>
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	6.604	6.888	<i>PT PLN (Persero) East Kalimantan Region</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Party</i>
PT Berau Coal	166.643	127.689	<i>PT Berau Coal</i>
PT Smart Telecom	8	4	<i>PT Smart Telecom</i>
Jumlah Piutang Usaha	173.255	134.582	<i>Total Trade Receivables</i>

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan Umur Piutang Usaha

b. By Aging of Receivables

	2025	2024	
Sudah jatuh tempo:			Past due:
1 - 60 hari	13.946	17.056	1-60 days
61 - 90 hari	2.652	5.228	61-90 days
Lebih dari 91 hari	156.657	112.298	more than 91 days
Jumlah	173.255	134.582	Total

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Tidak terdapat saldo piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

The Company do not provide allowance for impairment losses due to management believes that all receivables are collectible. There are no trade receivables used as collateral or restricted for use.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

9. OTHER RECEIVABLES

	2025	2024	
Pihak Ketiga			Third Parties
Chairuddin Noor	15.812	15.812	Chairuddin Noor
PT Himalaya-Zug Industry	6.465	6.465	PT Himalaya-Zug Industry
PT Berau Coal	4.362	4.362	PT Berau Coal
PT Pembangkit Listrik Nusantara	500	500	PT Pembangkit Listrik Nusantara
Lainnya	1.415	1.415	Others
Jumlah Pihak Ketiga	28.554	28.554	Total of Third Parties
Cadangan penurunan nilai	(24.192)	(24.192)	Allowance for impairment
Piutang Lain-lain, Neto	4.362	4.362	Other Receivables, Net

Piutang Lain-lain kepada Bapak Chairuddin Noor

Berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Berau yang tertuang di dalam surat No. B-567/O.4.14/Gp.2/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, perkara hukum atas uang muka proyek pembangunan boiler circulated fluized bed sebesar Rp14.850 telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tingkat Kasasi oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1702K/Pid,Sus/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang menghukum Bapak Chairuddin Noor untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.850. Dengan putusan tersebut piutang atas pengembalian uang muka proyek sebesar Rp14.850 tersebut yang semula ditagihkan kepada PT Pembangkit Listrik Nusantara kemudian dihapuskan dan selanjutnya ditagihkan kepada Bapak Chairuddin Noor.

Other Receivables to Mr. Chairuddin Noor

Based on the Legal Opinion from the State Attorney's Office at the Berau District Attorney as stated in letter No. B-567/O.4.14/Gp.2/03/2022 dated March 31, 2022, the legal case over the advance for the circulating fluized bed construction project amounting to Rp14,850 has been decided with permanent legal force (*inkracht*) at the Cassation level by the Supreme Court Decision of Republic of Indonesia Number 1702K/Pid,Sus/2021 dated July 15, 2021 which punishes Mr. Chairuddin Noor to pay a replacement money of Rp14,850. With this decision, the receivable for the refund of the project advance amounting to Rp14,850 which was originally billed to PT Pembangkit Listrik Nusantara was then written off and then billed to Mr. Chairuddin Noor.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Piutang atas pengembalian uang muka proyek sebesar Rp14.850 berasal dari transaksi uang muka proyek pembangunan *boiler circulated fluized bed* pada tahun 2015 yang dibayarkan Perusahaan kepada PT Pembangkit Listrik Nusantara sebagai pemenang lelang atas proyek tersebut. Saldo uang muka ini kemudian menjadi perkara hukum yang melibatkan Bapak Chairuddin Noor yang pada saat itu menjabat Direktur Utama Perusahaan.

Karena pembayaran uang muka proyek sebesar Rp14.850 menggunakan uang pinjaman BNI maka bunga atas pinjaman tersebut sebesar Rp962 juga ditagihkan kepada Bapak Chairuddin Noor, sehingga piutang kepada Bapak Chairuddin Noor berjumlah Rp15.812.

Piutang Lain-lain kepada PT Himalaya-Zug Industry

Piutang dari PT Himalaya-Zug Industry merupakan piutang denda pekerjaan pembangunan boiler baru PLTU Lati berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 005.SPK/DIR/IPB/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing piutang secara kolektif dan individu pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan kerugian penurunan nilai piutang telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang tak tertagih.

Piutang Lain-lain kepada PT Berau Coal

Piutang lain-lain kepada PT Berau Coal merupakan transaksi penjualan listrik yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan yang ditagihkan oleh Perusahaan dan akan di bayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 1 tahun 2011 pada Bab VII yang menjelaskan bahwa setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan kecuali penggunaan tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Piutang Lain-lain kepada PT Pembangkit Listrik Nusantara

Piutang kepada PT Pembangkit Listrik Nusantara Rp500 merupakan piutang yang berasal dari pembelian *spareparts* yang pembayarannya berdasarkan bukti pengeluaran bank Nomor BP-033 tanggal 30 Maret 2016 serta surat Direksi Perusahaan Nomor 201/DIR/IPB/2016-R tanggal 11 November 2016 perihal Hasil Audit Khusus periode Januari sampai dengan April 2016 dan tindak lanjutnya.

Receivables for refund of project advances amounting to Rp14,850 came from advances for circulating fluized bed boiler construction projects in 2015 which were paid by the Company to PT Pembangkit Listrik Nusantara as the winning bidder for the project. The balance of this advance later became a legal case involving Mr. Chairuddin Noor, who at that time was the President Director of the Company.

Since the down payment for the project amounted to Rp14,850 using BNI loan money, interest on the loan of Rp962 was also billed to Mr. Chairuddin Noor, so that the receivables to Mr. Chairuddin Noor amounted to Rp15,812.

Other Receivables to PT Himalaya-Zug Industry

Receivables from PT Himalaya-Zug Industry represent receivables from work fines construction of boilers for the Lati Power Plant based on Work Agreement No. 005.SPK/DIR/IPB/I/2010 dated January 20, 2010.

Based on the review of each receivable collectively and individually at the end of the year, Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses on bad debts.

Other Receivables to PT Berau Coal

Other receivables to PT Berau Coal represent electricity sales transactions that are subject to Street Lighting Tax billed by the Company and will be paid to the Berau Regency Government based on Berau Regency Regional Regulation No. 1 of 2011 in Chapter VII which explains that every use of electricity, whether self-generated or obtained from other sources, is taxed under the name of Street Lighting Tax except for the use of electricity by Government and Regional Government agencies. The basis for the imposition of street lighting tax is the selling value of electricity.

Other Receivables to PT Pembangkit Listrik Nusantara

Receivables from PT Pembangkit Listrik Nusantara Rp500 represent receivables originating from the purchase of spare parts, the payment of which is based on evidence of bank disbursements Number BP-033 dated March 30, 2016 and the letter of the Board of Directors of the Company Number 201/DIR/IPB/2016-R dated November 11, 2016 regarding Special Audit Results period of January to April 2016 and its follow-up.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	2025	2024	
Material dan suku cadang	5.128	10.168	<i>Material and sparepart</i>
Batubara dan bahan bakar minyak	2.712	2.131	<i>Coal and fuel</i>
Bahan kimia	14	691	<i>Chemicals</i>
Perlengkapan	106	98	<i>Supplies</i>
Jumlah Persediaan	7.960	13.088	Total Inventories

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

11. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2025	2024	
Biaya dibayar asuransi			<i>Prepaid expenses assurance</i>
unit industri <i>all risk</i>	42	42	<i>unit all risk</i>
Uang muka karyawan	2	2	<i>Advances to employees</i>
Sewa tanah di Site Lati	33	-	<i>Land rental at Site Lati</i>
Retribusi surat kendaraan	6	2	<i>Vehicle registration fees</i>
Jumlah Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka	83	46	Total Prepaid Expenses and Advances

12. PIUTANG PAJAK

12. TAX RECEIVABLES

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			
klaim atas lebih bayar:			<i>Corporate income</i>
Pajak penghasilan 21	85	-	<i>Income tax article 21</i>
Pajak penghasilan 22	-	-	<i>Income tax article 22</i>
pajak badan tahun			<i>tax overpayment claims:</i>
2025	1.122		<i>2025</i>
2024	1.269	1.269	<i>2024</i>
2023	-	2.093	<i>2023</i>
Jumlah Piutang Pajak	2.476	3.362	Total Tax Receivables

Atas kelebihan pembayaran pajak badan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.476 manajemen berencana akan melakukan pengajuan pemeriksaan pajak untuk dilakukan restitusi atas lebih bayar tersebut.

Due to the excess payment of corporate tax as of December 31, 2025 amounting to IDR 2,476, management plans to submit a tax audit to carry out restitution for the overpayment.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. PIUTANG PAJAK (lanjutan)

Berdasarkan surat pemberitahuan No. S-563/RIKSIS/KPP.1405/2024 tanggal 7 Agustus 2024 mengenai pemeriksaan lapangan atas restitusi PPh Badan tahun 2023 Perusahaan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak badan tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Pajak Penghasilan 22 sebesar Rp987
- b. Pajak Penghasilan 25 sebesar Rp1.106

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kelebihan pembayaran senilai Rp2.093 telah disetujui untuk direstitusi melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00041/406/23/725/25, tertanggal 06 Mei 2025. Atas penerimaan restitusi pajak tersebut akan diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau deposit Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2023 sebesar Rp245, sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh Perusahaan sebesar Rp1.849,-.

12. TAX RECEIVABLES (continued)

Based on notification letter No. S-563/RIKSIS/KPP.1405/2024 dated August 7, 2024 regarding the field audit of the 2023 Corporate Income Tax restitution, the Company submitted an application for a refund of the 2023 corporate tax overpayment consisting of:

- a. Income Tax Article 22 of Rp987
- b. Income Tax Article 25 of Rp1,106

Based on the results of the audit conducted by the Directorate General of Taxes, the excess payment of Rp2,093 has been approved for restitution through the Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) No. 00041/406/23/725/25, dated May 6, 2025. The tax refund receipt was calculated on the tax payable and/or deposit of Value Added Tax (VAT) in 2023 amounting to Rp245, so that the remaining tax overpayment received by the Company amounted to Rp1,849.

13. MODAL SAHAM

Susunan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

13. CAPITAL STOCK

The composition of the Company's Shareholders as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Presentase kepemilikan/ Ownership percentage	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Shareholders
Pemerintah Kabupaten Berau	65.890	49,48%	65.890	Berau District Government
PT PLN Indonesia Power	61.950	46,53%	61.950	PT PLN Indonesia Power
PT Jasin Effrin Jaya	5.310	3,99%	5.310	PT Jasin Effrin Jaya
Jumlah	133.150	100%	133.150	Total

14. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri dari:

14. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The additional paid-in capital consisted of:

	2025	2024	
Dividen yang disetor kembali	2.403	2.403	Dividends which were paid back
Agio saham	1.528	1.528	Stock premium
Pengampunan pajak	140	140	Tax amnesty
Jumlah	4.071	4.071	Total

Agio saham merupakan selisih antara dana yang diperoleh dari tambahan modal saham dari Pemerintah Kabupaten Berau dengan nominal saham yang diterbitkan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan juga merupakan pengalihan utang Perusahaan kepada pemegang saham.

Stock premium represents the difference between fund received from additional paid-in capital from Government of Berau Regency with nominal share issued based on Company's Article of Association and also the transfer of the Company's debt to the shareholders.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

15. DIVIDEN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler No. 013.K/010/RUPS-IPB/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen atas laba bersih Perusahaan tahun buku 2022 sebesar Rp4.043 dengan rincian sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp2.000
- PT Indonesia Power sebesar Rp1.881
- PT Jasin Effrin Jaya sebesar Rp162

Pada tanggal 29 Desember 2023 Perusahaan telah membayarkan dividen dengan rincian sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp500
- PT Indonesia Power sebesar Rp470
- PT Jasin Effrin Jaya sebesar Rp40

Pada tahun 2025 dan 2026, Perusahaan tidak membagikan dividen atas laporan keuangan perusahaan tahun 2024 dan 2025 karena Perusahaan mengalami kerugian.

15. DIVIDENS

Based on Circular Shareholder Resolution No.013.K/010/GMS-IPB/2023 on October 26 2023,shareholders have approved the distribution of dividends on the Company's net profit for the 2022 financial year of Rp4,043 with the following details:

- Berau Regency Government Rp2,000
- PT Indonesia Power Rp1,881
- PT Jasin Effrin Jaya Rp162

On December 29, 2023, the Company has paid dividends with the following details:

- Berau Regency Government Rp500
- PT Indonesia Power Rp470
- PT Jasin Effrin Jaya Rp40

In 2025 and 2026, the Company did not distribute dividends on the company's 2024 and 2025 financial statements because the Company incurred losses.

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLES

	2025	2024	
Pihak Ketiga - Jangka Pendek			Third Parties - Current
Utang pajak penerangan jalan	3.831	3.831	Street lighting tax debt
BPJS Kesehatan	29	31	BPJS Kesehatan
Iuran pensiun	-	21	Pension fee
Titipan arisan	-	19	Social gathering
Karyawan koperasi	-	17	Employees cooperative
Titipan JKK dan JKM	-	9	JKM and JKK Deposit
Lainnya	1	1	Others
Sub Jumlah	3.861	3.929	Sub Total
Pihak Berelasi - Jangka Panjang			Related Parties - Non Current
PT Pusaka Jaya Baru	494	494	PT Pusaka Jaya Baru
Pemerintah Kabupaten Berau	-	-	Berau District Government
PT PLN Indonesia Power	-	-	PT PLN Indonesia Power
PT Jasin Effrin Jaya	-	-	PT Jasin Effrin Jaya
Sub Jumlah	494	494	Sub Total
Jumlah Utang Lain-lain	4.355	4.423	Total Others Payable

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pascakerja tanpa pendanaan kepada karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 95 karyawan pada tahun 2025 dan 101 karyawan pada tahun 2024.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa tunjangan uang cuti besar dan kesetiaan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan antara lain adalah sebagai berikut:

	2025
Umur pensiun normal	56 tahun/ years
Tingkat diskonto	6,58%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	6%
Tingkat kematian	TMI-IV 2019

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah Tabel Mortalita Indonesia ke-4 (TMI-IV) 2019 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tanggal 13 April 2026 dan 17 April 2025.

Liabilitas imbalan kerja Perusahaan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2025
Imbalan pasca kerja	9.485
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.215
Jumlah	10.700

17. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Post-employment Benefit

The Company provides unfunded post-employment benefits to permanent employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to these benefits was 95 employees in 2025 and 101 employees in 2024.

Other Long-term Benefit

The Company also provides unfunded long-term employee benefits in the form of sabbatical leave and loyalty allowances for employees who meet the requirements.

The main assumptions used in calculating employee benefits liability are as follows:

	2024	
56 tahun/ years	56 tahun/ years	Nominal retirement age
7,13%	7,13%	Discount rate
		Salary increase
	7%	projection rate
TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	Mortality rate

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in each territory. The mortality assumptions used are based on the Indonesian Mortality Table-4 ("TMI-IV") 2019 which is applied in calculating the long-term benefits liability recognized within the statement of financial position.

The provision for post-employment and other long-term benefits on December 31, 2025 and 2024 was calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial and Amran Nangasan on its report on April 13, 2026 and April 17, 2025.

The Company benefit obligation in financial position are as follows:

	2024	
9.758	9.758	Post-employment benefit
1.176	1.176	Other Long-term Benefit
10.934	10.934	Total

PT INDO PUSAKA BERAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT INDO PUSAKA BERAU NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban imbalan kerja Perusahaan sebagai berikut:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	1.323	1.400	Current service cost
Beban bunga	779	811	Interest cost
Jumlah	2.102	2.211	Total

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The Company employee benefit expenses as follow:

	2025	2024	
Saldo awal	10.934	11.974	Beginning balance
Biaya jasa kini	1.323	1.400	Current service cost
Biaya bunga	779	811	Interest expenses
Pembayaran	(1.398)	(556)	Payment of benefits
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Perubahan asumsi keuangan	(524)	(345)	Change in financial assumption
Penyesuaian atas pengalaman	(414)	(2.351)	Adjustment assumption
Saldo Akhir	10.700	10.934	Ending Balance

18. UTANG USAHA
18. TRADE PAYABLES

	2025	2024	
Pihak Berelasi			Related Parties
Koperasi Karyawan Mitra			Koperasi Karyawan Mitra
Sejahtera	1.143	1.117	Sejahtera
PT PLN Indonesia Power	-	-	PT PLN Indonesia Power
Sub Jumlah	1.143	1.117	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Berau Coal	296.430	188.595	PT Berau Coal
PT Bukit Makmur Utama	1.025	1.024	PT Bukit Makmur Utama
PT Paguntaka Cahaya Nusantara	474	448	PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT Antariksa Globalindo	445	-	PT Antariksa Globalindo
PT Mesinda Tekninesia	415	-	PT Mesinda Tekninesia
PT Kawalan Mitra Sejati	308	854	PT Kawalan Mitra Sejati
PT Bogasari Sarana Surya	307	-	PT Bogasari Sarana Surya
PT Pusaka Jaya Investama	289	283	PT Pusaka Jaya Investama
PT Banua Jaya Energi	179	-	PT Banua Jaya Energi
PT Sucofindo	126	-	PT Sucofindo
CV Cahaya Kurnia Agung	95	-	CV Cahaya Kurnia Agung
PT Geoservices	79	66	PT Geoservices
PT Dorareta Indo Makmur	65	-	PT Dorareta Indo Makmur
CV Firza Total	62	-	CV Firza Total
PT Cahaya Dewata Nusantara	-	1.910	PT Cahaya Dewata Nusantara
CV Trans Borneo	-	307	CV Trans Borneo
PT Adidaya Hutama Mandiri	-	266	PT Adidaya Hutama Mandiri
Tukang Jahit Bandung	-	173	Tukang Jahit Bandung
PT Elkaza Abadi Internasional	-	90	PT Elkaza Abadi Internasional
CV Medan Magnet	-	78	CV Medan Magnet
CV Kaltim Multi Sejahtera	-	69	CV Kaltim Multi Sejahtera
Toko Derawan	-	63	Toko Derawan
Lain-lain (dibawah Rp50)	279	305	Others (below Rp50)
Sub Jumlah	300.575	194.531	Sub Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(301.719)	(195.648)	Less the portion that is due in one year
Bagian Jangka Panjang	-	-	Long-Term Portion

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

19. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2025	2024
Bonus dan insentif prestasi kerja	2.169	3.412
Lain-lain	714	1.579
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	2.883	4.991

19. ACCRUED EXPENSES

Bonus and performance incentives
Others
Total Accrued Expenses

20. UTANG PAJAK

	2025	2024
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	-	22
Pasal 23	55	37
Pasal 4 (2)	-	6
Jumlah	55	66

Income Taxes:
Article 21 Income Tax
Article 23 Income Tax
Article 4 (2) Income Tax
Total

21. PERPAJAKAN

21. TAXATION

a. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

a. Income Tax Benefit (Expense)

	2025	2024
Tangguhan	41	7.764
Jumlah	41	7.764

Deferred
Total

b. Pajak Tangguhan

b. Deferred Tax

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The calculation of the Company's deferred tax benefit (expense) for the year ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025				
	31 Desember 2024/ December 31, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charges) to statements profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charges) to other comprehensive income	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	5.322	-	-	5.322	<i>Impairment losses of other receivables</i>
Aset tetap	(18.717)	(474)	-	(19.191)	<i>Fixed assets</i>
Penyusutan aset hak guna Pemulihan aset	667	1.975	-	2.642	<i>Depreciation of right of use assets</i>
hak guna (penyusutan)	769	(1.615)	-	(847)	<i>Recovery right of use assets (depreciation)</i>
Imbalan pascakerja	2.405	155	(92)	2.468	<i>Post-employment benefits</i>
Kerugian fiskal	-	-	-	-	<i>Fiscal loss</i>
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	(9.554)	41	(92)	(9.606)	Deferred Tax Liabilities, Net

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

	2024				
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charges) to statements profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charges) to other comprehensive income	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	5.322	-	-	5.322	Impairment losses of other receivables
Aset tetap	(18.155)	(563)	-	(18.717)	Fixed assets
Penyusutan aset hak guna	667	-	-	667	Depreciation of right of use assets
Pemulihan aset hak guna (penyusutan)	769	-	-	769	Recovery right of use assets (depreciation)
Imbalan pascakerja	2.634	364	(593)	2.405	Post-employment benefits
Kerugian fiskal	7.565	(7.565)	-	-	Fiscal loss
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	(1.198)	(7.764)	(593)	(9.554)	Deferred Tax Liabilities, Net

c. Pajak Kini

c. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before income tax with estimated taxable income for years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(64.587)	(36.306)	Loss before income tax
Beda waktu:			Timing differences:
Penyusutan aset tetap	(2.154)	(2.558)	Depreciation of fixed assets
Beban imbalan kerja	2.102	2.211	Post employee benefits expense
Pembayaran manfaat imbalan kerja	(1.398)	(556)	Payment of employee benefits
Beda tetap:			Permanent differences:
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(144)	(47)	Income subject to final tax
Jumlah	(1.593)	(950)	Total
Rugi fiskal tahun berjalan	(66.181)	(37.256)	Taxable loss for the year
Beban pajak kini	-	-	Current tax
Dikurangi kredit pajak:			Less tax credit:
PPh Pasal 22	(1.122)	(1.093)	Income tax article 22
PPh Pasal 25	-	(176)	Income tax article 25
	(1.122)	(1.269)	
Jumlah (lebih) bayar pajak penghasilan	(1.122)	(1.269)	(Over) payment of income tax

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 akan menjadi dasar dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2025.

The income tax calculation for the year ended December 31, 2025 will be the basis in filing 2025 Annual Corporate Income Tax Return.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, PT Berau Coal dan PT Smart Telecom.

22. REVENUES

This account represents sale of electricity to PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, PT Berau Coal and PT Smart Telecom.

	2025	2024	
Pihak Berelasi			Related Party
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	74.820	72.878	PT PLN (Persero) East Kalimantan Region
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Berau Coal	38.954	68.070	PT Berau Coal
PT Smart Telecom	49	53	PT Smart Telecom
Jumlah Pendapatan	113.822	141.001	Total Revenues

23. BEBAN LANGSUNG

23. DIRECT EXPENSES

	2025	2024	
Beban bahan bakar dan minyak pelumas	116.700	114.465	Fuel and lubricants
Penyusutan aset tetap (Catatan 4)	16.313	17.083	Depreciation of fixed assets (Note 4)
Beban gaji dan tunjangan	12.063	12.704	Salaries and allowances
Beban jasa borongan	11.161	10.641	Contractor services
Pemeliharaan	4.852	4.221	Maintenance
Penyusutan aset hak guna (Catatan 5)	952	962	Depreciation right of use assets (Note 5)
Amortisasi aset takberwujud	124	199	Amortization of intangible assets
Lain-lain	519	444	Others
Jumlah Beban Langsung	162.684	160.720	Total Direct Expenses

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. GENERAL AND ADMINSTRATIVE EXPENSES

	2025	2024	
Beban gaji dan tunjangan	5.541	5.047	Salaries and allowances
Beban honorarium	4.684	3.901	Honorarium
Beban perjalanan dinas	2.110	2.345	Business travel
Penyusutan aset hak guna (Catatan 5)	1.023	1.254	Depreciation right of use assets (Note 5)
Beban kendaraan bermotor	724	293	Motor vehicles
Penyusutan aset tetap (Catatan 4)	54	55	Depreciation of fixed assets (Note 4)
Lain-Lain	2.370	2.797	Others
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	16.506	15.692	Total General and Administrative Expenses

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

25. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

	2025		2024		
	Rp	%)	Rp	%)	
<u>Piutang Usaha</u>					<u>Trade Receivables</u>
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	6.604	1,58%	6.888	1,82%	PT PLN (Persero) East Kalimantan Region
Jumlah	6.604	1,58%	6.888	1,82%	Total
<u>Utang Usaha</u>					<u>Trade Payables</u>
PT PLN Indonesia Power	-	0,00%	-	0,00%	PT PLN Indonesia Power
Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera	1.143	0,35%	1.117	0,49%	Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera
Jumlah	1.143	0,35%	1.117	0,49%	Total
<u>Utang Lain-lain</u>					<u>Other Payables</u>
PT Pusaka Jaya Baru	494	0,15%	494	0,22%	PT Pusaka Jaya Baru
Pemerintah Kabupaten Berau	-	0,00%	-	0,00%	Berau District Government
PT PLN Indonesia Power	-	0,00%	-	0,00%	PT PLN Indonesia Power
PT Jasin Effrin Jaya	-	0,00%	-	0,00%	PT Jasin Effrin Jaya
Jumlah	494	0,15%	494	2,92%	Total
<u>Pendapatan</u>					<u>Revenues</u>
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	74.820	65,73%	72.878	51,69%	PT PLN (Persero) East Kalimantan Region
Jumlah	74.820	65,73%	72.878	51,69%	Total

*) Presentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan yang bersangkutan.

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationship with related parties is as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur	Pemegang saham PT PLN Indonesia Power/ Shareholder of PT Indonesia Power	Piutang usaha dan pendapatan/trade receivable and revenues
PT PLN Indonesia Power	Pemegang saham/The shareholder	Utang lain-lain/ Other payables
PT Jasin Effrin Jaya	Pemegang saham/The shareholder	Utang lain-lain/ Other payables

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Penjualan Tenaga Listrik

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur

Pada tanggal 2 Maret 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, pihak berelasi. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan berkewajiban untuk menjamin dan menyediakan daya listrik di titik penyerahan sebesar minimum 3,6 MW yang selanjutnya disebut dengan daya yang dijamin dan minimum 4 MW setelah penjualan melebihi 31.500.000 kWh. Sedangkan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyerap daya listrik sebesar 3,6 MW dan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan Perusahaan berdasarkan formula pembayaran yang ditetapkan. Perjanjian tersebut telah diamandemen beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Oktober 2019 mengenai perubahan harga penjualan energi listrik di titik penyerahan menjadi 836,5/kWh yang berlaku sejak tanggal 1 November 2019.

Pada tanggal 29 Januari 2021 Perusahaan juga menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Antar Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Berau (15 MW) dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan menyediakan listrik kepada PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur sesuai dengan kapasitas sebesar 15 MW dengan faktor ketersediaan (*availability factor*) 85% berupa pasokan dengan kapasitas tetap (*firm capacity*) dengan pola operasi pada beban dasar (*based load*) dengan harga jual beli tenaga listrik sebesar Rp836,5/kWh pada titik transaksi, tidak termasuk pajak pertambahan nilai 10%. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Berdasarkan amendemen tanggal 27 Januari 2022, perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2023.

Pada Tanggal 28 Juni 2024 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Antar Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Berau dengan PT PLN (Persero). Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan menyediakan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan harga jual Rp949/kWh pada titik transaksi. Perjanjian ini berlaku efektif sejak 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026.

26. COMMITMENTS AND CONTIGENCIES

a. Sales of Electricity

PT PLN (Persero) East Kalimantan Region

On March 2, 2006, the Company entered into a power purchase agreement with PT PLN (Persero) East Kalimantan Region, a related party. Based on the agreement, the Company is obliged to guarantee and provide electricity at the point of delivery of a minimum of 3.6 MW, hereinafter referred to as guaranteed power and a minimum of 4 MW after sales exceed 31,500,000 kWh. Meanwhile, PT PLN (Persero) East Kalimantan Region is obliged to absorb 3.6 MW of electricity and pay for the electricity supply that will be provided by the Company based on the payment formula determined. The agreement has been amended several times and most recently on October 28, 2019 regarding changes in the selling price of electrical energy at the point of delivery to 836.5/kWh effective on November 1, 2019.

On January 29, 2021, the Company also signed a Cooperation Agreement for the Provision of Electricity between Holders of a Business Permit for the Provision of Electricity in Berau (15 MW) with PT PLN (Persero) East Kalimantan Region. Based on the agreement, the Company provides electricity to PT PLN (Persero) East Kalimantan Region in accordance with a capacity of 15 MW with an availability factor of 85% in the form of supply with a fixed capacity (*firm capacity*) with an operating pattern on a base load at a selling price electricity of Rp836.5/kWh at the point of transaction, excluding 10% value added tax. This agreement is effective from February 1, 2021 until January 31, 2022 and can be extended based on the written agreement of the parties. Based on the amendment dated January 27, 2022, this agreement has been extended until January 31, 2023.

On June 28, 2024, the Company signed a Cooperation Agreement for the Supply of Electricity between Holders of Electricity Supply Business License in Berau with PT PLN (Persero). Based on the agreement, the Company provides electricity in accordance with the predetermined capacity with a selling price of Rp949/kWh at the transaction point. This agreement is effective from July 01, 2024 until June 30, 2026.

P

**PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

26. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

PT Berau Coal

Pada tanggal 18 September 2003, Perusahaan mengadakan perjanjian penyediaan tenaga listrik dengan PT Berau Coal untuk jangka waktu 20 tahun, yang telah diamandemen terakhir kali pada April 2012. Dalam perjanjian tersebut, PT Berau Coal akan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan Perusahaan berdasarkan formula pembayaran yang ditentukan.

Pada tahun 2007 dan 2010 perjanjian jual beli listrik tersebut telah diamendemen dengan perubahan pada pasal 6 dan pasal 7 masing-masing mengenai tempat penyerahan energi listrik dan harga jual beli energi listrik.

b. Pembelian Batubara

PT Berau Coal

Pada tanggal 29 Oktober 2002, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Berau Coal untuk jangka waktu 20 tahun setelah *Commercial Operation Date* (COD). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan akan membeli batubara berkalori rendah dari PT Berau Coal dengan jumlah maksimal 100.000 metrik ton per tahun ($\pm$ 8.000 metrik ton per bulan) untuk kebutuhan operasional PLTU Lati 2 x 6 MW yang dimiliki Perusahaan yang berlokasi di Lati, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2010 Perjanjian jual beli batubara tersebut telah diamandemen dengan beberapa perubahan kesepakatan diantaranya adalah bahwa harga batu bara akan ditinjau ulang setiap tahun dan akan disesuaikan apabila ketentuan tentang harga patokan batu bara (HPB) telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan surat dari PT Berau Coal No. 042/BC/BOD-SWD/V/2023 pada tanggal 23 Mei 2023 atas usulan perubahan kontrak jual beli listrik menyatakan bahwa harga jual beli listrik berubah menjadi sebesar Rp2.135,12 per kWh.

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan Perusahaan masih melakukan proses negosiasi harga pembelian batubara dengan PT Berau Coal.

**26. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)**

PT Berau Coal

On September 18, 2003, the Company entered into a power purchase agreement with PT Berau Coal with duration of 20 years, which has been amended most recently on April 2012. In the agreement, PT Berau Coal will pay for electricity supply provided by the Company based on determined formula.

In 2007 and 2010 the power purchase agreement was amended by amending article 6 and article 7, respectively regarding the place of delivery of electrical energy and the sale and purchase price of electrical energy.

b. Purchase of Coal

PT Berau Coal

On October 29, 2002, the Company entered into a purchase of coal agreement with PT Berau Coal with duration of 20 years after the *Commercial Operation Date* ("COD"). In the agreement, the Company will purchase low rank coal from PT Berau Coal with maximum amount of 100,000 metric ton per year ($\pm$ 8,000 metric ton per month) for the operational requirement of PLTU Lati 2 x 6 MW owned by the Company located in Lati, Berau Regency, East Kalimantan Province.

In 2010 the coal sale and purchase agreement was amended with several amendments to the agreement including that the price of coal will be reviewed annually and will be adjusted if the provisions regarding the coal benchmark price (HPB) have been determined by the Government.

Based on a letter from PT Berau Coal No. 042/BC/BOD-SWD/V/2023 on 23 May 2023 regarding the proposed amendment to the electricity sales and purchase contract stated that the electricity sales and purchase price would change to Rp2,135.12 per kWh.

Until the issuance of this financial report, the Company is still in the process of negotiating the purchase price of coal with PT Berau Coal.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

a. Kategori dan Klasifikasi Instrumen Keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang seluruhnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

	2025		2024		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas dan bank	20.183	20.183	8.727	8.727	Cash and bank
Piutang usaha	173.255	173.255	134.582	134.582	Trades receivables
Jumlah	193.439	193.439	143.309	143.309	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang usaha	301.719	301.719	195.648	195.648	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	2.883	2.883	4.991	4.991	Accrued expensed
Utang lain-lain	4.355	4.355	4.423	4.423	Other payables
Jumlah	308.957	308.957	205.062	205.062	Total

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 13), tambahan modal disetor (Catatan 14) dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Categories and Classification of Financial Instruments

The following table discloses the details of the Company's financial assets and liabilities which are all measured at amortized cost:

b. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure a capital adequacy ratio limit. The Company's capital structure consists of shareholders' equity, which consists of issued capital (Note 13), additional paid-in capital (Note 14) and retained earnings.

The Board of Directors of the Company regularly reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Company's loan covenants require, among other things, the fulfillment of certain ratios. Management regularly monitors the requirements to ensure that there is no default on the loans of the Company.

The Company aims to minimise the borrowing cost of debt to maximise the Company's value. Therefore, in its financing policies, the Company always takes into account the financial risks incurred from loan that may arise in the future.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

i. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko kredit dengan melakukan pendekatan kepada pelanggan jika pelanggan tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan bank, Perusahaan meminimalisir risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa lembaga keuangan dengan reputasi baik. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Risiko kredit terkonsentrasi pada dua pelanggan besar yang telah bertransaksi dengan Perusahaan selama lebih dari lima tahun. Hal ini terkait piutang dari PT PLN dan PT Berau Coal. Manajemen tidak membentuk pencadangan terhadap saldo pelanggan tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan kualitas aset keuangan Perusahaan:

		2025			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	20.183	-	-	20.183	Cash and bank
Piutang usaha	-	173.255	-	173.255	Trade receivables
Jumlah	20.183	173.255	-	193.439	Total

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Company's overall financial risk management objectives and policies are to ensure that adequate financial resources are available for operations and development of the business, while managing the exposure to financial risk, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company operates within defined policies that are approved by the Board of Directors.

i. Credit Risk Management

Credit risk refers to the risk that a third party will fail to fulfill its contractual obligations which may result in losses for the Company. The company manages credit risk by approaching customers if the customer does not pay at the specified time. For other financial assets such as cash and bank, the Company minimizes credit risk by placing placements in several financial institutions with good reputations. The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's exposure to credit risk.

The credit risk is concentrated in two large customers that have been transacting with the Company for more than five years. This is related to the receivables from PT PLN and PT Berau Coal. Management has not made any allowance for the balances of these customers.

The following table shows the quality of the Company's financial assets:

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
 RISIKO (lanjutan)**

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND CAPITAL RISK
 MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
 Keuangan (lanjutan)**

**c. Financial Risk Management Objectives and
 Policies (continued)**

i. Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

i. Credit Risk Management (continued)

		2024			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	8.727	-	-	8.727	Cash and bank
Piutang usaha	-	134.582	-	134.582	Trade receivables
Jumlah	8.727	134.582	-	143.309	Total

ii. Manajemen Risiko Likuiditas

ii. Liquidity Risk Management

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan indikasi terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and if impairment indication is found, impairment loss is recognized individually.

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan. Perusahaan mengatur risiko likuiditas dengan mempertahankan kecukupan kas yang memadai dan fasilitas perbankan, dengan terus memantau perkiraan dan arus kas actual dan jatuh tempo liabilitas keuangan.

Liquidity risk is defined as the risk that the Company will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivery of cash or other financial assets. Ultimate responsibility for liquidity risk rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework that is appropriate for the management of the Company's liquidity and funding requirements. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate cash and banking facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows and the maturity of financial liabilities.

Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan. Manajemen yakin bahwa Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas Perusahaan pada saat jatuh tempo yang diharapkan akan terjadi dalam satu tahun.

The Company maintains sufficient funds to finance the continuity of working capital needs. Management believes that the Company has sufficient liquidity to complete the Company's obligation at maturity as expected to occur within one year.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual Perusahaan untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tahun 31 Desember 2024.

The following table provides details of the Company's contractual maturity dates for financial liabilities with agreed payments by December 31, 2024.

PT INDO PUSAKA BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT INDO PUSAKA BERAU
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

27. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel ini disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan pada tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu tanggal paling awal dimana Perusahaan diwajibkan untuk membayar.

27. FINANCIAL INSTRUMENTS AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Financial Risk Management Objectives and Policies (continued)

ii. Liquidity Risk Management (continued)

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company is required to pay.

2025					
	Dalam satu tahun/ within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ over one year but no longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ over three year but no longer than five years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	301.719	-	-	301.719	Trade payable
Biaya yang masih harus dibayar	2.883	-	-	2.883	Accrued expense
Utang lain-lain	3.861	494	-	4.355	Other payables
Jumlah	308.463	494	-	308.957	Total
2024					
	Dalam satu tahun/ within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ over one year but no longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ over three year but no longer than five years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	195.648	-	-	195.648	Trade payable
Biaya yang masih harus dibayar	4.991	-	-	4.991	Accrued expense
Utang lain-lain	3.929	494	-	4.423	Other payables
Jumlah	204.567	494	-	205.061	Total

d. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau memiliki tingkat suku bunga yang sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

d. Fair Value of Financial Instruments

The management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market interest rate.

28. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2026.

28. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements completed and authorized for issuance on , May 4, 2026.



LAMPIRAN 12
Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja Per 31
Desember 2025

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Direksi	ii
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

PERNYATAAN DIREKSI

PERUMDA BHAKTI PRAJA

Pernyataan Direksi **Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan** **Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024**

Manajemen Perumda Bhakti Praja menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Bhakti Praja.

Tanjung Redeb, 23 Februari 2026
Untuk dan atas nama Direksi Perumda Bhakti Praja



Sultan, S.Pi
Direktur

PERUMDA BHAKTI PRAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas	3	468.762.325	2.224.866.049,00
Piutang usaha - bersih	4	302.521.410	376.050.108
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	5	230.174.535	112.592.368
Persediaan (Aset Biologis)	6	1.257.210.000	
Jumlah Aset Lancar		2.258.668.270	2.713.508.525
Aset Tidak Lancar			
Akumulasi Penyusutan	7/8	-124.252.229	-11.874.420
Aset Tetap	7/8	2.377.052.679	
Aset Lain- Lain	9	107.347.213	2.189.197.727
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.360.147.663	2.177.323.307
Total Aset		4.618.815.933	4.890.831.832
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Hutang Pajak	10	49.238.112	1.000.000.000
Hutang Usaha	11	790.000.000	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		839.238.112	1.000.000.000
Liabilitas Jangka Panjang			
Hutang Pengembangan Usaha			-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Ekuitas			
Modal Disetor	12	4.000.000.000	4.000.000.000
Saldo Laba (Rugi)		-109.168.168	-114.013.194
Laba (Rugi) Berjalan		-111.254.011	4.845.026
Jumlah Ekuitas		3.779.577.821	3.890.831.832
Total Liabilitas dan Ekuitas		4.618.815.933	4.890.831.832

Tanjung Redeb, 23 Februari 2026



Sultan, S.Pi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA BHAKTI PRAJA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

		1 Jan. s.d. 31 Des. 2025	1 Jan. s.d. 31 Des. 2024
	<u>Catatan</u>		
Pendapatan	13	7.666.754.950	6.262.639.455
Beban Pokok Pendapatan	14	7.129.348.869	5.248.164.250
Laba Bruto		537.406.081	1.014.475.205
Beban Usaha			
Beban Umum dan Administrasi	15	715.443.389	982.464.905
Beban Penyusutan	7/8	110.877.857	
Jumlah Beban Usaha		826.321.246	982.464.905
Laba (Rugi) Usaha		-288.915.165	32.010.300
Pendapatan dan (Beban) Lain			
Pendapatan Lain-lain	16	2.267.762	8.255.408
Beban Lain-lain	17	-981.123	-35.420.682
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Lain		1.286.639	-27.165.274
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		-287.628.526	4.845.026
Pajak Penghasilan Badan		-	-
Laba Bersih Setelah Pajak		-287.628.526	4.845.026

Tanjung Redeb, 23 Februari 2026



Sultan, S.Pi
 Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA BHAKTI PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Deskripsi	Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah
Saldo Per 1 Januari 2024			
Penambahan Modal Disetor	4.000.000.000	-109.168.168	3.890.831.832
Laba Tahun Berjalan			-
Saldo Per 31 Desember 2024	4.000.000.000	-109.168.168	3.890.831.832
Penambahan Modal Disetor			-
Laba Tahun Berjalan		-287.628.526	-287.628.526
Koreksi Akumulasi Penyusutan		176.374.515	245.657.533
Saldo Per 31 Desember 2025	4.000.000.000	-220.422.179	3.848.860.839

Tanjung Redeb, 23 Februari 2026



Sultan, S.Pi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA BHAKTI PRAJA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

	(Dalam Rupiah)	
	1 Jan. - 31 Des. 2025	1 Jan. - 31 Des. 2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
- Laba Bersih	-287.628.526	4.845.026
- Beban Penyusutan Aset Tetap	110.877.857	11.874.420
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Tetap	176.374.515	
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	-376.154	16.719.446
Perubahan Modal Kerja		
Penurunan(Kenaikan) Piutang Usaha	73.528.698	-292.675.908
Penurunan(Kenaikan) Pembayaran Dimuka	-117.582.167	-22.592.368
Penurunan(Kenaikan) Persediaan	-1.257.210.000	
Penurunan(Kenaikan) Utang Usaha	-210.000.000	-300.000.000
Penurunan(Kenaikan) Utang Pajak	49.238.112	
Penurunan(Kenaikan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar		-34.030.500
Penurunan(Kenaikan) Utang Lain		
Jumlah Penggunaan Dana untuk Kegiatn Usaha	-1.462.025.357	-649.298.776
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	-1.462.401.511	-632.579.330
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-293.702.213	-2.143.200.000
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-293.702.213	-2.143.200.000
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penurunan(Kenaikan) Kewajiban Tidak Lancar		1.000.000.000
Penurunan(Kenaikan) Modal Disetor		2.000.000.000
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	3.000.000.000
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	-1.756.103.724	224.220.670
Kas dan Setara Kas Awal Periode	2.224.866.049	2.000.645.379
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	468.762.325	2.224.866.049

Tanjung Redeb, 23 Februari 2026



Sultan, S.Pi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

PERUMDA BHAKTI PRAJA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Perumda Bhakti Praja didirikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau No. 05 Tahun 1998 [Perda 05/1998] tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Kabupaten Berau.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 14 Tahun 2020 [Perda 14/2020] tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 5 Perda 14/ 2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut:

- 1 . kehutanan,
- 2 . pertanian tanaman pangan,
- 3 . perkebunan,
- 4 . peternakan,
- 5 . perikanan,
- 6 . pariwisata,
- 7 . pertambangan dan penggalian,
- 8 . minyak dan gas bumi,
- 9 . ketenagalistrikan,
10. perhubungan/kepelabuhanan,
11. industri pengolahan, dan
12. perdagangan

Di samping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/ 2020, sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada tahun 2024, yang meliputi :

- 1 . Pengangkutan CPO
- 2 . Perdagangan Karet
- 3 . Peternakan ayam petelur
- 4 . Cold Storage

Di antara bidang usaha yang di-inisiasi tersebut, yang telah dijalankan secara operasional pada tahun 2024 adalah Pengangkutan CPO dan Perdagangan Karet

c. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan pada 8 Oktober 2024 menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,00. Dengan demikian, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Berau pada Perumda Bhakti Praja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00.

d. Susunan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2025, susunan pengurus Perumda Bhakti Praja adalah sebagai berikut:

- Direktur : Sultan, S.Pi
- Dewan Pengawas : H. Jaka Siswanta, SH, M.Si

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perumda Bhakti Praja memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

Meskipun menggunakan SAK ETAP, Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Pencatatan akuntansi dan pelaporan menggunakan mata uang rupiah.

b. Periode Pembukuan

Periode pembukuan adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

d. Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir. Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun dibentuk cadangan penyisihan piutang sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan hapus buku.

Penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun berjalan.

e. Persediaan

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap pakai.

Metode pencatatan terhadap persediaan menggunakan metode "*Physical Inventory Method*".

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan aset tetap adalah sebagai berikut:

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian aset berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dicatat sebagai aset tetap apabila aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah di atas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset tetap selain bangunan menggunakan metode saldo menurun berganda. Tanah tidak disusutkan. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

Bangunan	20 tahun
Mesin dan Peralatan	8 tahun
Kendaraan/ Alat angkut	8 tahun
Peralatan/ Perlengkapan	4 tahun
Inventaris Kantor	4 tahun

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan selama umur manfaat aset tetap. Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan, dan dihentikan saat aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tetap tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

g. Pencatatan Utang/ Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.

h. Pendapatan

Pendapatan Perumda Bhakti Praja terdiri dari pendapatan usaha dan non usaha. Pendapatan usaha meliputi pendapatan jasa pengangkutan CPO dan pendapatan penjualan. Sedangkan pendapatan non usaha (pendapatan lain-lain) meliputi pendapatan bunga deposito, jasa giro, sewa, royalti, dividen, dan lain-lain.

Pendapatan yang berasal dari jasa pengangkutan CPO dan penjualan diakui dengan terbitnya invoice kepada pengguna jasa/pembeli.

Pendapatan non usaha (pendapatan lain-lain) diakui dalam laporan laba rugi jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan tersebut dan dapat diukur nilainya dengan andal.

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

i. **Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

3. Kas Dan Setara Kas

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
a. Kas	137.755.012	51.313.568
b. BPD Kaltim Kaltara	9.025.922	507.687.095
c. Bank Mandiri		-
d. Bank BNI	301.080.726	665.865.386
e. Deposito		1.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	447.861.660	2.224.866.049

4. Piutang usaha - bersih

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
a. Piutang Usaha Angkutan CPO	302.521.410	376.050.108
b. Piutang Usaha Penjualan Karet	-	-
c. Cadangan Piutang Tak Tertagih	-	-
Jumlah Piutang usaha - bersih	302.521.410	376.050.108

5. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
PPh 23	187.376.196	112.592.368
PPh 22	1397050	
PPN Masukan	1222535	
Desposit Coretax	40.178.754	
Jumlah Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	230.174.535	112.592.368

6. Persediaan

	31 Des.2025	31 Des.2025
Aset Biologi	1.257.210.000	
	1.257.210.000	-

7. Aset Tetap

a. Nilai Perolehan Aset Tetap	47.497.679	47.497.679
b. Akumulasi Penyusutan	-25.248.792	-13.374.372
Aset Tetap - Bersih	22.248.887	34.123.307

Rincian per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	Per 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025
a. Nilai Perolehan				
NP Furniture	17.647.679		-	17.647.679
NP Inventaris Kantor	29.850.000			29.850.000
Jumlah Nilai Perolehan	47.497.679			47.497.679
b. Akumulasi Penyusutan				
AP Furniture	5.055.622	4.411.920	-	9.467.542
AP Inventaris Kantor	8.318.750	7.462.500	-	15.781.250
Jumlah Akm Penyusutan	13.374.372	11.874.420	-	25.248.792
Nilai Aset Bersih	34.123.307	-11.874.420	-	22.248.887

8. Aset Tetap	31 Des 2025	31 Des 2024
d. NP Peralatan Kandang	186.355.000	
e. NP Tanah		1.000.000.000
f. NP Bangunan Kandang		200.000.000
g. NP Kandang Batrai		943.200.000
Aset Tetap - Bersih	186.355.000	2.143.200.000

Rincian per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	Per 01-01-25	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2025
a. Nilai Perolehan				
NP Peralatan Kandang	-	186.355.000		186.355.000
Np Tanah	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
NP Bangunan Kandang	200.000.000	-	-	200.000.000
NP Kandang Batrai	943.200.000	-	-	943.200.000
Jumlah Nilai Perolehan	2.143.200.000	186.355.000	-	2.329.555.000
b. Akumulasi Penyusutan				
NP Peralatan Kandang	-	41.843.438	-	41.843.438
Np Tanah	-	-	-	-
NP Bangunan Kandang	-	10.000.000	-	10.000.000
NP Kandang Batrai	-	47.160.000	-	47.160.000
Jumlah Akm Penyusutan	-	99.003.438	-	99.003.438
Nilai Aset Bersih			-	2.230.551.562

9. Aset Lain-Lain

Merupakan akumulasi nilai perolehan kandang ayam yang sedang dibangun yang akan dioperasikan pada awal tahun 2025.

	31 Des.2025	31 Des.2025
- Pembelian Tanah dan Bangunan Kandang	-	1.200.000.000
- Pembelian baja ringan dan bahan lainnya	-	115.500.000
- Pembelian/Pembangunan kandang batere thp 1	-	165.540.000
- Pembelian/Pembangunan kandang batere thp 2	-	248.310.000
- Pembelian/Pembangunan kandang batere thp 3	-	248.310.000
- Pembelian/Pembangunan kandang batere thp 4	-	165.540.000
- NP Instalasi Listrik Kandang	73.347.213	
-NP 1 Unit Tiang Listrik Kandang	9.000.000	
- NP Instalasi Air Kandang	25.000.000	
Jumlah Aset Tetap Dalam Pembangunan	107.347.213	2.143.200.000

10. Hutang Pajak

	31 Des.2025	31 Des.2025
PPN Keluaran	49.238.112	
	49.238.112	-

11. Hutang Usaha

	31 Des.2025	31 Des.2025
Hutang Pengembangan Usaha	790.000.000	1.000.000.000
Jumlah Hutang Usaha	790.000.000	1.000.000.000

Hutang pengembangan usaha adalah hutang Perumda Bhakti Praja yang berkaitan dengan perolehan aset tetap berupa tanah dan bangunan kandang ayam senilai Rp 1.200.000.000,00. Dari nilai tersebut, Perumda Bhakti Praja telah membayar DP sebesar Rp 200.000.000,00. Sehingga terutang sebesar Rp 1.000.000.000,00.

[Handwritten signature]

Sesuai perjanjian, nilai Rp 1.000.000.000,00 tersebut diangsur minimal sebesar Rp 20.000.000,00 per bulan, setelah bisnis ayam petelur menghasilkan (mulai Maret 2025). Dengan demikian, nilai yang akan jatuh tempo dalam tahun 2025 adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (10 x Rp 20.000.000,00), dan sebesar Rp 800.000.000,00 akan jatuh tempo setelah tahun 2025.

12. Modal Disetor

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau

	31 Des 2025	31 Des 2024
Penyertaan Modal Pemda		4.000.000.000
Jumlah Modal Disetor	-	4.000.000.000

13. Pendapatan

	31 Des 2025	31 Des 2024
a. Pendapatan Jasa	3.739.190.150	5.629.618.400
b. Pendapatan Penjualan Karet	558.819.800	633.021.055
c. Pendapatan Penjualan Telur	3.293.745.000	
d. Pendapatan Ayam	75.000.000	
Jumlah Pendapatan	7.666.754.950	6.262.639.455

14. Beban Pokok Pendapatan

	31 Des 2025	31 Des 2024
a. Beban Pokok Pendapatan Jasa	3.494.744.044	4.732.491.250
b. Beban Pokok Penjualan Karet	511.666.481	515.673.000
c. Beban Pokok Penjualan Telur	2.946.563.830	
d. Beban Kerugian atas Kematian Ayam	176.374.514	
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	7.129.348.869	5.248.164.250

15. Beban Umum dan Administrasi

	31 Des 2025	31 Des 2024
a. Beban Pegawai	452.589.975	488.874.950
b. Beban Sewa Kantor dan Mobil	198.756.000	12.015.819
c. Beban Pajak	11.764.983	269.500.000
d. Beban Transportasi dan Perjalanan Dinas	10.949.431	59.966.216
e. Beban Jasa Profesional	27.750.000	126.750.000
f. Beban Pemeliharaan	11.600.000	2.612.000
g. Beban Administrasi dan Umum Lainnya	2.033.000	3.371.500
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	715.443.389	963.090.485

16. Pendapatan Lain-lain

	31 Des 2025	31 Des 2024
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	2.267.762	8.255.408
Jumlah Pendapatan Lain-lain	2.267.762	8.255.408

17. Beban Lain-lain

	31 Des 2025	31 Des 2024
a. Beban Administrasi Bank	981.123	407.500
b. Beban Bagi Hasil		33.949.690
c. Beban Lainnya		1.063.492
Jumlah Beban Lain-lain	981.123	35.420.682



LAMPIRAN 13

Rincian JJI yang dimanfaatkan Perumdam Batiwakkal
Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2025 dan 2024

Rincian JIJ yang Dimanfaatkan Perumda Batiwakkal Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2023 dan 2022

No	ID Pemda	UPB	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Keterangan
1	'05010010014008355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.163.213.002,40	83.163.213.002,40	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
2	'05010010014007851	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.240.272.200,00	59.240.272.200,00	Sumur Resapan
3	'05010010014004898	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.622.918.000,00	3.622.918.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
4	'05010010014008096	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.844.806.652,00	1.844.806.652,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
5	'05010010014007583	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.386.343.000,00	1.386.343.000,00	Sumur Resapan
6	'05010010014006728	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.286.232.200,00	1.286.232.200,00	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain
7	'05010010014004890	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.151.685.000,00	1.151.685.000,00	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain
8	'05010010014007910	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.400.100,00	1.047.400.100,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
9	'05010010014004884	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	934.633.000,00	934.633.000,00	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain
10	'05010010014005335	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	899.181.000,00	899.181.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
11	'05010010014004681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	884.362.000,00	884.362.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
12	'05010010014002343	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	865.659.000,00	865.659.000,00	Bangunan Buster Pump
13	'05010010014004882	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	780.775.000,00	780.775.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
14	'05010010014002404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	739.250.000,00	739.250.000,00	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain
15	'05010010014005044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.797.000,00	700.797.000,00	Sumur Resapan
16	05010010014009399	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.742.587.214,00	4.742.587.214,00	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
17	05010010014009393	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.554.624.101,41	1.554.624.101,41	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
18	05010010014009086	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.792.396,00	650.792.396,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
19	05010010014009132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.577.232.400,00	15.577.232.400,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
20	05010010014009186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.930.365.390,00	6.930.365.390,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
21	05010010014009375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.832.307.759,00	1.832.307.759,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
Jumlah			189.835.436.414,81	189.835.436.414,81	

[Handwritten signature]

RINCIAN JIJ YANG DIMANFAATKAN PERUMDAM BATIWAKKAL TANPA KERJASAMA PEMANFAATAN TAHUN 2024

NO	ID PEMDA	UPB	TAHUN 2024	KETERANGAN
1	05010010014011107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.644.782.570,00	Pembangunan SPAM Singkuang Jl Karang Mulyo 2
2	05010010014011095	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.167.060.800,00	Pembangunan SPAM Labanan Anak1

Handwritten signature or mark.



LAMPIRAN 14

Properti Investasi SKPD dan Akumulasi Penyusutan

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI

Lampiran 14

NO	NAMA ASET		HARGA PEROLEHAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2025	NILAI BUKU PER 31 DES 2025	LOKASI	TERCATAT PADA OPD
C	GEDUNG DAN BANGUNAN															
1	GEDUNG OLAH RAGA PEMUDA		3.823.462.841,00	76.469.256,00	815.672.068,00	3.007.790.773,00	892.141.324,00	2.931.321.517,00	968.610.580,00	2.854.852.261,00	1.045.079.836,00	2.778.383.005,00	1.121.549.092,00	2.701.913.749,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	DISPORA
2	PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS		286.207.413.000,00	5.724.048.260,00	74.537.273.163,00	210.680.239.837,00	80.261.321.423,00	205.946.091.577,00	80.283.821.423,00	205.923.591.577,00	86.007.869.683,00	200.199.543.317,00	91.731.917.943,00	194.475.495.057,00	Jl. RM Ayoeb Kel Rinding	DISKOPERINDAG
3	GEDUNG BUSAK MALUR		460.494.000,00	9.209.880,00	106.784.911,00	353.709.089,00	115.994.791,00	344.499.209,00	125.204.671,00	335.289.329,00	134.414.551,00	326.079.449,00	143.624.431,00	316.869.569,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	DPPKBPPPA
4	STADION MINI OLMPIC		72.297.466.424,00	1.445.949.328,00	120.495.777,00	72.176.970.647,00	1.566.445.105,00	70.731.021.319,00	3.012.394.433,00	69.285.071.991,00	4.458.343.761,00	67.839.122.663,00	5.904.293.089,00	66.393.173.335,00	Kel. Teluk Bayur	DISPORA
5	WISMA ATLIT		1.376.396.000,00	27.527.920,00	364.744.940,00	1.011.651.060,00	392.272.860,00	984.123.140,00	419.800.780,00	956.595.220,00	447.328.700,00	929.067.300,00	474.856.620,00	901.539.380,00	Kampung Tanjung Batu	DISPORA
6	MESS BERAU SAMARINDA 1		1.197.000.000,00	23.940.000,00	600.495.000,00	596.505.000,00	624.435.000,00	572.565.000,00	648.375.000,00	548.625.000,00	672.315.000,00	524.685.000,00	696.255.000,00	500.745.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
7	MESS BERAU SAMARINDA 2		1.125.000.000,00	22.500.000,00	564.375.000,00	560.625.000,00	586.875.000,00	538.125.000,00	609.375.000,00	515.625.000,00	631.875.000,00	493.125.000,00	654.375.000,00	470.625.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
			366.487.232.265,00	7.329.644.644,00	77.109.840.859,00	288.387.491.406,00	84.439.485.503,00	282.047.746.762,00	86.067.581.887,00	280.419.650.378,00	93.397.226.531,00	273.090.005.734,00	100.726.871.175,00	265.760.361.090,00		

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI**

Lampiran 14

NO	NAMA ASET		HARGA PEROLEHAN	LOKASI	TERCATAT PADA KIB A
A	TANAH				
	1	TANAH PEMKAB BERAU EX BSC	2.700.000.000,00	Kec. Gunung tabur	BPKAD
	2	TANAH PEMKAB BERAU EX PLTU SAMBAKUNGAN	461.844.520,00	Kampung Sambakungan	BPKAD
			3.161.844.520,00		





LAMPIRAN 15

Rincian kurang volume atas denda pekerjaan pihak
ketiga

REKAP SETORAN LHP BPK RI TAHUN 2024

Lampiran 15

No	Temuan	URAIAN	PENYEDIA	Nilai BPKAD
A	Kekurangan volume			
1	Kekurangan volume atas 12 Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.2.470.817.491,10	1. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Turap Sheet Pile Belakang Kantor Bupati (Bankeu)		
		2. Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Poros Jalan Tasuk, Kec.Gunung Tabur	PT. DAYA PERKASA	451.810.786,71
		3. Pekerjaan Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Pangeran Antasari-Sudirman (APBD + Bankeu Prov)	PT. Megadarian Multi Perkasa	210.819.966,18
		4. Pekerjaan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jl.Pulau Derawan Kec.Tanjung Redeb		
		5. Pekerjaan Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pemuda (Bankeu)	PT. Hiqmah Aldina Prima	125.763.289,36
		6. Pekerjaan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Pembangunan 2 -Prapatan-Sultan Agung-Kedaung	PT. BUMI LASINDRANG	69.017.583,89
		7.Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Turap Gunung Tabur RT.1		
		8. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Turap Sambaliung		
		9. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SPAM Singkuang	PT. DHARMA KARYA DHIKA ALAMBHANA	85.050.000,00
		10. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SPAM Labanan	PT. RIS PUTRA DELTA KSO PT. SENONI KARYA UTAMA (RIS-SKU,KSO)	54.692.196,72
		11. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sulaiman-Teluk Sumbang		
		12Pekerjaan Pembangunan Jalan Kampung Jagung Samburakat Kec.Gunung Tabur	PT Megadarian Multi Perkasa	9.124.876,96
2	Kekurangan volume atas lima pekerjaan belanja pemeliharaan bangunan gedung melalui pengadaan langsung pada Dispora, Kec.Batu Putih dan Kec.Maratua sebesar Rp.178.245.492,42	Dispora 1) Pemeliharaan/Rehab gedung graha Pemuda Tanjung Redeb		
		2) Pemagaran Lapangan Bola Kampung Biatan Lempake		
		3) Pemeliharaan Jaringan Listrik Stadion Mini Teluk Bayur (telah disetor ke Kas Daerah)		
		Kec.Batu Putih Rehab Rumah Dinas Camat Batu Putih		
		Kec,Maratua Rehab Rumah Dinas Camat Maratua		
3	Pelaksanaan Belanja modal gedung dan bangunan pada RSUD dr.Abdul Rivai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.7.278.100.078,36	a.Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan RS (Fisik Bangunan) RSUD b. Pembayaran termin pekerjaan melebihi realisasi progres fisik	PT Permata Anugerah	1.917.785.119,51

Lampiran 15

No	Temuan	URAIAN	PENYEDIA	Nilai BPKAD
4	Pengelolaan Belanja Hibah pada Delapan OPD belum sesuai ketentuan	g. (DPUPR) Kekurangan volume atas 4 pekerjaan belanja hibah gedung dan bangunan: 1) Lanjutan Masjid Mapolres		
		2) Pembangunan Pagar Kodim		
		3) Pembangunan Kantor Pengadilan		
		4) Pembangunan Kawasan Kodim		
5	Kekurangan volume atas sembilan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.208.628.116,94	Kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada Kec.Tanjung Redeb, Tanjung Batu, Buyung-buyung, Teluk Bayur, Sambaliung, Batu Putih dan Gunung Tabur		
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU KEc. Tanjung Redeb TA 2024	PT PERLENGKAPAN INDONESIA	4.990.000,00
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU KEc. Tanjung Redeb TA 2024	CV PRIMA ABYAKTA SENTOSA	76.402.585,53
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung di Batu Putih	PT SEVEN ENERGI	2.797.937,00
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung di Gunung Tabur	PT SEVEN ENERGI	7.554.429,60
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung di Samabaliung	PT SEVEN ENERGI	4.773.979,60
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung di Teluk Bayur	PT SEVEN ENERGI	4.406.750,40
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung Tanjung Batu TA 2024	CV SOLARINDO JAYA	17.028.772,56
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU Kampung Tanjung Batu TA 2024	CV SOLARINDO JAYA	26.022.909,75
		Pengerjaan dan Pemasangan Lampu PJU KEc. Tanjung Redeb TA 2024	CV SOLARINDO JAYA	64.650.752,50
6	Kekurangan volume atas tiga pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada DPUPR sebesar 268.603.297,81	1) Pekerjaan Pembangunan Embung Air Baku Maratua	CV. Mojo Joyo	220.335.946,65
		2) Pekerjaan Rehab total Kantor Camat Gunung Tabur	cv. mitra tiga bersaudara	33.126.932,88
		3) Pekerjaan Rehab total Kantor Camat Biduk-biduk	CV. Maheswara Dewa Perkasa	15.140.418,28
7	Kekurangan Volume Pekerjaan lanjutan rehab berat pelabuhan pengumpan lokal Kampung Pulau Derawan pada Dinas Perhubungan sebesar 86.463.295,75	a. Kekurangan volume pada 3 item pekerjaan (Plafond, rangka Plafond dan Instalasi penerangan) b. Ketidak sesuaian spesifikasi pada pekerjaan pengecatan interior dan eksterior yang menyebabkan kelebihan pembayaran	CV DELTA PRATAMA	86.463.295,75
	Total A			3.487.758.529,83
B	Denda Keterlambatan			
1	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja modal JIJ serta belanja modal gedung dan bangunan pada DPUPR belum dikenakan denda sebesar Rp.978.355.069,48	1) Lanjutan Pembangunan Turap sheet pile belakang Kantor Bupati (Bankeu)	PT. Megadarian Multi Perkasa	403.266.382,61
		2) Revitalisasi jalan dan bangunan pelengkap kawasan jalan Pulau Derawan Kec.Tanjung Redeb	PT. Berkat Indohana Lestari	351.096.298,66
		3) Lanjutan Pembangunan Turap Gunung Tabur	PT. Trinanda Karya Utama	82.100.712,99
		4) Lanjutan Pembangunan Turap Sambaliung	PT. Jasin Effrin Jaya	25.190.208,00
		5) Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sulaiman - Teluk Sumbang	PT. ERA BANGUN SARANA	149.917.159,71
		6) Pembangunan Embung Air Baku Maratua	CV. Mojo Joyo	
		7) Pemagaran dan Gapura Kodim		
	Total B			1.011.570.761,97
	Total ALL (A+B)			4.499.329.291,80

KOREKSI KURANG VOLUME

Lampiran 15

No	URAIAN	Jumlah	OPD
1	Koreksi Kurang volume pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedung Bangunan Pengembangan RSUD dr. Abdul Rivai	48.491.924,96	RSUD (BLUD)
2	Peningkatan Jalan Datu Si Panaik (APBD-P)	21.182.714,68	DPUPR
3	Pekerjaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Berau	76.036.687,23	DPUPR
4	Pekerjaan Persiapan/Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Tepian Buah	85.071.373,71	DINKES
5	Pekerjaan Pembangunan Rehab Total Kantor Camat Segah	74.802.077,44	DPUPR
6	Hutang Pembangunan Gedung RSUD Tanjung Redeb Kabupaten Berau (MYC)	1.089.381.305,15	DINKES/sebelum pupr
7	Lanjutan Pembangunan Sarana Amenitas Pariwisata Batu-Batu dan Lanjutan Pembangunan Tracking Mangrove Tanjung Batu	20.500.000,00	Disbudpar
8	Konstruksi Lanjutan Pembangunan DTW Kakaban (Tahap III)	39.798.500,67	Disbudpar
9	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Teluk Sulaiman	1.695.284,70	Dishub
10	Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Maratua	8.322.014,37	Dishub
11	Penambahan RKB SDN 014 Tanjung Redeb	3.429.741,06	Disdik
12	Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 6 Tanjung Redeb	8.034.961,47	Disdik
13	Pembangunan Turap SDN 009 Tanjung Redeb	12.342.618,75	Disdik
14	Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa/Siswi SMPN 2 Segah di Pandan Sari	25.236.393,47	Disdik
15	Penambahan RKB SDN 001 Gunung Sari	5.622.941,66	Disdik
16	Rehab Total Ruang Kelas SDN 001 Labanan Jaya	16.301.616,16	Disdik
17	Pemagaran SDN 001 Pantai Harapan	2.718.710,19	Disdik
18	Lanjutan Penimbunan SDN 001 Labanan Makmur (Filial)	96.751.832,31	Disdik
19	Pematangan Lahan TK Negeri Teluk Bayur 2	4.100.000,00	Disdik
20	Pekerjaan Pemasangan Turap Puskesmas Teluk Bayur	67.387.239,23	Dinkes
21	Pekerjaan Rehab Puskesmas Biduk - Biduk	12.767.711,27	Dinkes
22	Pekerjaan Rehab Sedang Puskesmas Teluk Bayur	40.486.599,76	Dinkes
23	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Makam Datu Sipanaik	58.998.544,00	DPUPR
24	Pekerjaan Lanjutan Rekonstruksi Jalan Poros Labanan - Pandansari Kec. Teluk Bayur	26.062.568,42	DPUPR
25	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Singkuang - Mantarip (Paket 1) T.A. 2025 (Bankeu Prov)	188.600.706,61	DPUPR
26	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Tubaan - Tabalar Muara	396.473.227,75	DPUPR
27	Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Lobang Klatak - Kalindakan	203.287.893,66	DPUPR
28	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelabuhan Mantarip (Bankeu Prov)	54.258.835,42	DPUPR
29	Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Limunjan RT.21 Sambaliung	71.306.160,27	DPUPR
30	Pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Siduung Indah	153.925.025,67	DPUPR
31	Pekerjaan Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Siduung Ulu (DBH Sawit)	9.664.282,16	DPUPR
32	Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi dan Normalisasi Kawasan Kampung Tasuk T.A. 2025 (APBD-P)	267.062.988,40	DPUPR
33	Pekerjaan Peningkatan Jalan Kawasan Pariwisata Kampung Pulau Derawan (APBD-P)	18.154.679,76	DPUPR
34	Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Wisata Maratua T.A. 2025 (APBD)	20.561.120,12	DPUPR
35	Pekerjaan Pembangunan Jalan Jalur Utara Pulau Maratua (APBD + Bankeu Prov)	20.171.041,50	DPUPR
36	Pekerjaan Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Tanjung Redeb T.A. 2025 (APBD Kab.)	15.557.295,21	DPUPR
37	Pekerjaan Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Kawasan Jalan Dalam Kota Tanjung Redeb (APBD-P)	39.312.285,32	DPUPR
38	Pekerjaan Peningkatan Jalan Kawasan Jln. HARM Ayoeb RT 13 Sei Bedungun Kec. Tanjung Redeb (APBD Kab.)	12.676.888,00	DPUPR
39	Pek. Overlay Jalan Dalam Kota Kecamatan Tanjung Redeb (APBD-P)	9.485.857,04	DPUPR
40	Pekerjaan Peningkatan Jalan Raya Bangun Gg. Barokah RT 15 Sambaliung	104.490.819,96	DPUPR
41	Pekerjaan Peningkatan Jalan Damai RT. 15 Kec. Sambaliung	46.446.568,60	DPUPR
42	Pekerjaan Preservasi Kawasan Jalan lembah Ilanun Kec. Sambaliung dan Sekitarnya (APBD-P)	43.994.375,00	DPUPR
43	Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Menuju Makam Rt 04 Sei Bebanir Bangun Sambaliung	57.488.850,00	DPUPR
44	Pekerjaan Semenisasi dan Pelebaran Drainase Jalan Perjuangan Paribau RT 05 Maluang (APBD-P)	8.368.694,79	DPUPR
45	Pekerjaan Peningkatan Drainase Lingkungan RSUD Ahmad Rifai Tanjung Redeb (APBD-P)	33.969.939,12	DPUPR
46	Pekerjaan Preservasi Jalan Akses Menuju SD 009 Tanjung Redeb di Kel Bedungun (APBD-P)	9.689.493,22	DPUPR
47	Pekerjaan Rehabilitas Bangunan Pelengkap Jalan Dalam Kota Tanjung Redeb (APBD-P)	20.818.592,16	DPUPR
48	Pekerjaan Peningkatan Sistem Drainase Merpati 2, RT.14, Kec. Sambaliung, Kab.Berau	38.155.692,50	DPUPR
49	Pekerjaan Peningkatan Jalan Gg Amira Sambaliung (APBD-P)	24.906.343,78	DPUPR
50	Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT.005 Kampung Sumber Agung Kec. Batu Putih (APBD-P)	16.158.040,20	DPUPR
51	Pekerjaan Revitalisasi Subdas RT.07 dan RT.4 Maluang	26.902.175,06	DPUPR
52	Lanjutan Peningkatan Gg. Wijaya Bedungun Kec. Tanjung Redeb	4.789.338,79	DPKP
53	Peningkatan jalan/semenisasi Gg. Mukti Sari RT. 29 Kel. Tanjung Redeb	6.008.582,41	DPKP
54	Lanjutan Semenisasi Gg. Gunung Agung RT 05 Kel. Gunung Panjang	3.324.703,68	DPKP
55	Peningkatan Gg. Padat Karya gg. Sari I RT 03 Gunung Panjang	4.390.302,29	DPKP

No	URAIAN	Jumlah	OPD
56	Peningkatan Gg. Berkah RT 19 Kel. Karang Ambun	20.985.231,35	DPKP
57	Peningkatan Gg Haur Gading Blok F Jl. Durian 3 Gunung Panjang	3.546.492,89	DPKP
58	Lanjutan Peningkatan Jl. Gunung Panjang Gg. Cemara Rt 03 Kel. Gunung Panjang	4.801.649,17	DPKP
59	Lanjutan Semenisasi dan penutup parit Gg. Senggol Jl. Kemakmuran RT 08 Kel. Karang Ambun	3.710.561,03	DPKP
60	Peningkatan Jalan/Semenisasi Gg. Caco RT. 01 Kel. Gunung Panjang	4.693.858,28	DPKP
61	Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Sepakat Jl. P. Derawan Kel. Tanjung Redeb	4.729.888,66	DPKP
62	Peningkatan Drainase/Penutup Gg. Berkah RT. 19 Jl. Murjani II Kelurahan Karang Ambun	16.162.843,08	DPKP
63	Semenisasi Gg. Kembar RT. 01 Kel. Gunung Panjang	3.279.365,45	DPKP
64	Pekerjaan Pembangunan Gedung PWRI	21.553.818,03	DPUPR
Total		3.859.387.867,05	



LAMPIRAN 16

Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud

REKAP ASET TAK BERWUJUD		NILAI
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Belanja Modal Aplikasi Database/Arsip PSU	78.904.350,00
	Belanja Modal Aplikasi Usulan Kegiatan/Program PSU	79.015.350,00
	Belanja Modal Sistem Informasi Pendataan SPM Layanan Relokasi	29.680.000,00
	Belanja Modal Kajian dan Pendataan Ulang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	99.789.000,00
2	Pertanahan	
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software - Pembuatan Aplikasi	78.810.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	Belanja Modal Kajian Timbulan dan Komposisi Sumber Sampah Kota Tanjung Redeb	199.829.082,00
	Masterplan Pemakaman dan Pembibitan	99.653.000,00
4	Dinas Perhubungan	
	Website SIM PKB	58.830.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Belanja Modal Pengembangan Portal Data Berau an CV.Beesoft Research Technology	19.813.500,00
	Aplikasi eSPPD	64.990.500,00
	Pengembangan Modul Absensi dan Kinerja	79.809.000,00
6	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
	Belanja Modal Kajian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	99.256.644,00
	Penyusunan Review DED sentra Industri Tahu Tempe	98.790.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	
	Belanja Modal Penyusunan Dokumen Kajian Pra FS Investasi Unggulan (Pariwisata Pesisir) Kabupaten Berau	250.000.000,00
	Belanja Modal Penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Berau	299.781.777,00
	Belanja Modal Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DPMTSP Kabupaten Berau	32.185.892,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Belanja Modal Pengembangan Website Sidewi	74.950.000,00
	Belanja Modal Pengembangan aplikasi Fitur Jelajah Pariwisata Berau	74.950.000,00
	Kajian Kakaban	251.050.000,00
	Kajian Revisi Riparda	323.150.000,00
	Kajian Sejarah Atau Budaya Banua Bajau Dayak (BABADA)	202.150.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	
	Belanja Modal Kajian Akademik (Pembertukan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)	100.000.000,00
10	Dinas Pendidikan	
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (Software) - Pengadaan / Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Dana BOS - BOSP (06.0011.5.2.06.01) TA. 2025	79.800.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	DED Pembangunan jembatan Sei Sepeti Kampung Long Ayan	593.212.749,00
	Masterplan Pembangunan Pengaman Sungai dan Penataan Kawasan Taman Sanggam (APBD-P)	989.474.424,00
	Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai Pulau Derawan (APBD-P)	342.638.352,00
	masterplan pembangunan pengaman Sungai dan Penataan Kawasan ujung Tanjung (APBD-P)	990.029.424,00
	Perancangan DED Pembangunan SPAM Sido Bangen	1.328.186.706,00
	Updating Pelaksanaan E-Paksi D.I. Semurut Pendukung DAK T.A. 2026 (APBD-P)	99.898.335,00
	Updating Pelaksanaan E-Paksi D.I. Tasuk pendukung DAK T.A. 2026 (Bankeu 2026) (APBD-P)	99.898.335,00
	Updating Pelaksanaan E-Paksi D.I. Buyung-Buyung Pendukung DAK T.A. 2026 (APBD-P)	99.565.000,00
	Updating Pelaksanaan E-Paksi D.I. Gurimbang Pendukung DAK T.A. 2026 (Bankeu 2026) (APBD-P)	99.565.000,00
	Survey Kondisi Jalan Pendukung/APBD/APBN/BANPROV	198.411.057,00
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Pengaman Pantai Pulau Derawan	910.967.010,00
	perancangan DED perluasan SPAM Labanan (arah pandan sari dan bukit makmur)	998.518.800,00
	Updating Survey Kondisi Jalan Pendukung Usulan APBD/APBN	420.580.332,00
	FS dan MasterPlan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kecamatan kelay	1.603.386.000,00
	Penyusunan DED Pembangunan TPS - 3R Biduk Biduk	793.124.082,00
	Review DED IPLT Kabupaten Berau	909.140.000,00
	Pemutakhiran DataBase Jaringan Jalan Kabupaten Berau	1.518.924.000,00
	Penyusunan DED Pembangunan TPA Talisayan	926.622.450,00
	Revisi Rencana Induk SPAM Desa/Kelurahan Tanjung Redeb	1.603.746.000,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Labanan	331.179.600,00
	DED Bangunan Pengaman Sungai Kampung sukan Tengah	485.320.638,00
	Updating Pelaksanaani E-Paksi D.I. Pulau Besing Pendukung DAK T.A. 2026(Bankeu 2026) (APBD-P)	99.565.000,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Dumaring	324.453.222,00
	DED Bangunan Pengaman Sungai Museum Batubara Teluk Bayur	485.320.638,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Batu Putih	327.849.600,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Teluk Sulaiman	328.085.142,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Tembudan	327.849.600,00
	FS dan IGT Daerah Irigasi Kabupaten Berau	1.498.401.876,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Suaran	318.581.100,00
	Masterplan Bangunan Pengaman Sungai Jalan Laksamana - Kalibasau Kecamatan Gunung Tabur	790.844.364,00
	Dokumen Lingkungan SPAM Biatan Lempake	325.509.942,00
	Revisi Rencana Induk SPAM Desa/Kelurahan Tanjung Redeb	218.658.900,00
	04/BAST-PPK/PJIP/Dokling Tabalar Muara/APBD-P/SDA/XII/2025	99.847.830,00
	Pelaksanaani E-Paksi D.I. Tumbit Melayu Pendukung DAK T.A. 2026 (APBD-P)	99.898.335,00
	Review DED Gedung Bahampas Menjadi GOR Kawasan Kakaban Aquatic	267.787.500,00
	Masterplan Lahan Kawasan (Expo, MPP, Gedung Kesenian, UMKM Center)	898.159.386,00
12	RSUD DR A. RIVALI	
	Software/Sistem Informasi/Aplikasi Layanan Informasi & Pengaduan	14.700.000,00
	Software Aplikasi SIMPEG	84.800.000,00
13	Sekretariat Daerah	
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software - Aplikasi Siitem Pengendalian dan Monitoring Tenaga Non PPPK	96.570.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung PBJ pada Rekanan CV Teramedia	163.999.170,00

		24.888.457.994,00

1



LAMPIRAN 17

Rincian Utang Belanja yang belum direviu oleh
Inspektorat

Rincian Utang Belanja yang belum direviu oleh Inspektorat

Lampiran 17

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK		NILAI SP2D		SISA KONTRAK		PHO/ BAST
		OPD	REVIU	OPD	REVIU	OPD	REVIU	
BIDANG PEMBANGUNAN JALAN								
1	Pembangunan Jalan Sei. Masang Kampung Bena Baru dan Sekitarnya							02/ BASTHP-PJ.2/ Sei.Masang/ PJ2/ II/ 2026 13 Februari 2026
2	Pembangunan Jalan Poros Panaan							02/ BASTHP-PJ3/ PRS PANAAN/ PJ2/ I/ 2026 13 Januari 2026
3	Pembangunan Jalan Kawasan Pertanian Kampung Merancang Ilir							02/ BASTP/ PJ5/ MRNCGILIR/ PJ2/ I/ 2026 14 Januari 2026
4	Pembangunan Jalan Limunjan - Mantarip (Segmen 5)							2/ BAPSTHP-PJ.10/ SEGMEN 5/ PJ2/ II/ 2026 13 Februari 2026
5	Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Simpang Merabu - Panaan Kec. Kelay							02/ BASTHP-PJ1/ SMPG MRBU-PNAAAN/ PJ2/ APBD-P/ I/ 2026 20 Januari 2026
6	Lanjutan Pembangunan Jalan Limunjan-Mantarip (APBD-P)							09/ BASTHP-PJ.2/ LIMUNJAN/ PJ2/ APBD-P/ II/ 2026 26 Februari 2026
BIDANG SDA								
1	Pembangunan Turap Batu-Batu							01/ BAPHP-J3/ PTS6/ Pem.turap Batu -Batu / APBD/ SDA/ I/ 2026 26 Januari 2026
2	Pembangunan Sistem Drainase Jalan Poros menuju Kampung Gurimbang (Jl. Rjjang)	16.327.905.000,00	16.327.905.000,00	14.307.816.593,00	14.307.816.593,00	2.020.088.407,00	2.020.088.407,00	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
3	Pembangunan Drainase Kawasan Stadion Mini Teluk Bayur, Kel. Teluk Bayur							02/ BASTHP/ PPK-PSDP3/ Pem.Drai.Kws.Stadion Mini/ SDA/ APBD/ XII/ 2025 9 Januari 2026
BIDANG P3BJK								
1	MAKO DITSAMAPTA 3 Lantai	46.726.968.000,00	46.726.968.000,00	45.644.608.000,00	43.058.900.984,00	1.082.360.000,00	3.668.067.016,0	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
2	Lanjutan Penataan Makam Pahlawan							08/ BASTHP-PPK/ LP_TAMANMAKAMPAHLA WANI/ II/ 2026 13 Februari 2026
3	Pembangunan Kantor BKPSDM							02/ BAPHP-FISIK.PKBKPSDM/ I/ 2026 9 Januari 2026
4	Pembangunan Gedung Serbaguna dan Prasarana Camat Kelay							02/ BASTHP-PHO/ PGSGP.KELAY/ XII/ 2025 30 Desember 2025
5	Lanjutan Pembangunan Masjid Tanjung Batu (Dan sudah tersaji pada CALK sebesar Rp250.098.999,96)	6.529.999.999,00	6.529.999.999,00	4.911.310.949,00	4.911.310.949,00	1.618.689.050,00	1.368.590.050,04	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
BIDANG AMPLP								
1	Peningkatan dan Perluasan SPAM Merancang							05/ PHO/ PPK-P2SPAM-Merancang/ AMPLP/ I/ 2026 22 Januari 2026
2	Pembangunan SAB Balikukup (Support dari Batu Putih)							05/ PHO/ PPK-PSPAMJ/ SAB.BALIKUKUP/ DPUPR-AMPLP/ II/ 2026 5 Februari 2026
3	Peningkatan dan Perluasan SPAM Biatan Lempake Kecamatan Biatan							06/ BASTPK/ PPSAM-BIATAN/ AMLP/ I/ 2025 30 Januari 2026
4	Pembangunan TPS 3R Pulau Maratua	6.108.975.959,00	6.108.975.959,00	4.437.957.221,00	4.437.957.220,00	1.671.018.738,00	1.671.018.739,00	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
BIDANG PRJJ								
1	Rehabilitasi Jembatan Kawasan Kampung Sukan Tengah Kec. Sambaling	9.386.505.211,00	9.386.505.211,00	7.345.081.125,00	7.345.081.125,00	2.041.424.086,00	2.041.424.086,00	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
2	Lanjutan Perbaikan Jalan Jembatan Pulau Besing	2.582.263.740,00	2.582.263.740,00	829.164.887,00	829.164.887,00	1.753.098.853,00	1.753.098.853,00	Tidak ada dokumen PHO/ BAST
3	Pengawasan Teknis Lanjutan Perbaikan Jalan Jembatan Pulau Besing							04/ BASTPK/ PPK-RH-JBT/ PWS/ JBT.BSG/ PRJJ/ XII/ 2025 1 Desember 2025
4	Peningkatan Jalan Datu Si Panaik (APBD-P)							02/ BASTHP-PPK-RK.14/ DATU SI PANAIK/ APDP-P/ PRJJ/ I/ 2026 19 Januari 2026
5	Penanganan Longsoran Maluang - Punggawa Sejati (APBD-P)	1.756.217.701,00	1.756.217.701,00	1.484.881.000,00	1.484.881.000,00	271.336.701,00	271.336.701,00	Tidak ada dokumen PHO/ RAST

6	Peningkatan Jalan Permukiman Rt 05 Sukan Tengah Kec. Sambaliung (APBD-P)							03/ BASTHP/ PHO/ PPK-REKON.16/ PRMKMN/ PRJJ/ XII/ 2025 18 Desember 2025
7	Peningkatan Jalan Usaha Tani, Kampung Eka Sapta, Kec. Talisayan (APBD-P)							02/ BASTHP/ RK.17/ EKSPT/ APBD-P/ PRJJ/ XII/ 2025 02 Desember 2025
Jumlah		89.418.835.610,00	89.418.835.610,00	78.960.819.775,00	76.375.112.758,00	10.458.015.835,00	12.793.623.852,04	

4